

AMANA TUMBUH BERSAMA

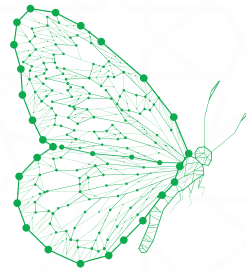
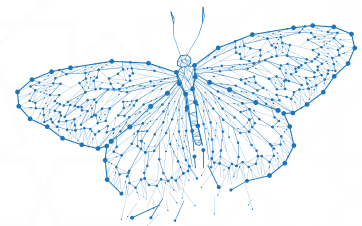
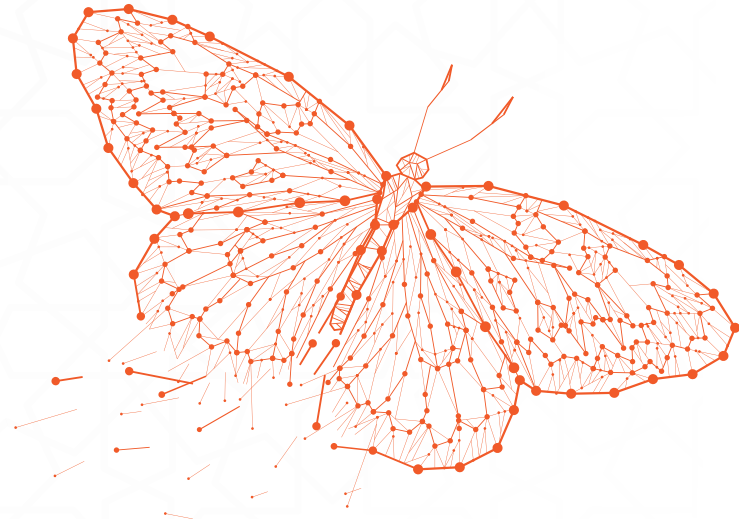
2018
Laporan Tahunan
Annual Report

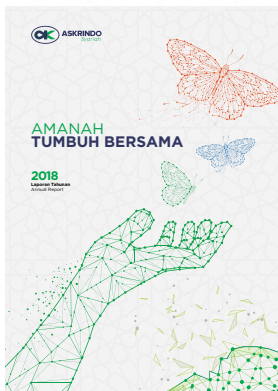


NAVIGASI NAVIGATION

Laporan tahunan ini memuat kata "Askrindo Syariah" yang didefinisikan sebagai PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah yang menjalankan bisnis di bidang penjaminan pembiayaan, *suretyship* lembaga penjamin pembiayaan dalam program kredit usaha rakyat serta bidang lainnya sesuai dengan Anggaran Dasar. Adakalanya kata "Perseroan" dan "Kami" juga digunakan atas dasar kemudahan untuk menyebut PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah secara umum.

This Annual Report contains "Askrindo Syariah", which is defined as PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah that is engaged in financing guarantee, *suretyship* of guarantee financing institution in people's business credit, and other fields based on the Articles of Association. The word "the Company" and "We" is also used for convenience to mention PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah in general.





AMANAH TUMBUH BERSAMA

Dunia industri tengah memasuki era digital yang ditandai dengan semakin bergantungnya masyarakat terhadap layanan berbasis teknologi informasi. Kondisi ini mengawali pergeseran iklim usaha yang menjadi kian penuh tantangan. Kami menyadari bahwa respon cepat dan tepat sasaran akan menjadi kunci untuk memasuki persaingan di masa mendatang.

Pada tahun 2018, di tengah ketatnya persaingan yang kami hadapi, Askrindo Syariah terus mengkaji dinamika yang ada seraya menyiapkan diri untuk ikut terlibat dalam perubahan era baru tersebut. Dalam hal ini kami senantiasa meningkatkan kualitas kinerja Perseroan secara keseluruhan, baik di lapisan organisasi maupun operasional. Penguatan atas dukungan teknologi informasi yang mumpuni juga terus kami galakkan. Upaya ini terbukti membuahkan hasil dengan diakuinya TI Perseroan oleh IT Works yang menganugerahkan Perseroan penghargaan **"TOP IT Implementation on Sharia Insurance Sector 2018"**.

Berbagai langkah strategis yang kami jalankan di sepanjang tahun ini merupakan upaya untuk menghadirkan momentum dalam mewujudkan visi sebagai **"perusahaan penjaminan pembiayaan berbasis syariah terkemuka"**. Seiring dengan kerja keras seluruh pihak, Perseroan pada akhirnya berhasil meningkatkan kinerja tahun 2018, baik dari sisi finansial maupun nonfinansial.

Industrial sector is entering the digital era as the public becomes more dependent on information technology-based service. This condition starts off the shift of business climate, which has become more challenging. We realize that quick response and right on target will be the key to go into the competition in the future.

In 2018, amidst the intense competition we faced, Askrindo Syariah kept reviewing the existing dynamics while preparing ourselves to be involved in the new era changes. In this event, we continuously increased the quality of the Company's performance in overall, both at the organizational and operational layer. We also encourage the strengthening of qualified information technology support. This effort is proven to result in the acknowledgement of the Company's IT by IT Works, which also presented an award to the Company namely **"TOP IT Implementation on Sharia Insurance Sector 2018"**.

A variety of strategic steps taken during this year are the efforts to present a momentum to realize the vision as **"a well-known Sharia-based financing guarantee company."** In line with the hard work of all parties, the Company ultimately succeeds to improve its performance in 2018, both in terms of financial and non-financial.

DAFTAR ISI

TABLE OF CONTENTS

02	Daftar Isi Table of Contents
04	Daftar Istilah dan Singkatan List of Terms and Abbreviations
05	Strategi Perseroan di 2018 Corporate Strategies in 2018
08	Hasil dan Capaian di 2018 Result and Achievement in 2018
10	Kebijakan Utama Tahun 2018 Primary Policies in 2018
10	Jalinan Kerjasama di 2018 Cooperation in 2018
13	Rencana Jangka Panjang Perseroan Corporate Long-Term Planning



01 KILAS KINERJA 2018 GLANCE OF 2018 PERFORMANCE

16	Ikhtisar Data Keuangan Penting Financial Highlights
18	Grafik Ikhtisar Data Keuangan Penting Graphic Summarizing Important Financial Data
19	Ikhtisar Kinerja Operasional Summary of Operating Performance
20	Ikhtisar Saham dan Efek Lainnya Summary of Shares and Other Securities
21	Peristiwa Penting Tahun 2018 Important Events in 2018
23	Penghargaan dan Sertifikasi Achievements and Certification



02 LAPORAN MANAJEMEN MANAGEMENT REPORT

26	Laporan Dewan Komisaris The Board of Commissioners' Report
34	Laporan Direksi The Board of Directors' Report
47	Pernyataan Dewan Komisaris dan Direksi tentang Tanggung Jawab atas Laporan Tahunan 2018 Statement of Board of Commissioners and Board of Directors on the Responsibility for the 2018 Annual Report



03 PROFIL PERUSAHAAN COMPANY PROFILE

50	Informasi Perusahaan Company Information
51	Wilayah Operasional Operational Areas
52	Sekilas Askrindo Syariah Askrindo Syariah at a Glance
53	Jejak Langkah Milestones
54	Kegiatan Usaha Business Activities
55	Produk Perseroan The Company Products
56	Visi, Misi & Budaya Perusahaan Vision, Mission & Corporate Values

57	Makna Logo Perseroan Meaning of the Company Logo
58	Website Perseroan Company's Website
59	Struktur Grup Perseroan Corporate Group Structure
59	Struktur Organisasi Organization Structure
60	Profil Direksi Profile of Board of Director
64	Profil Dewan Komisaris Profile of Board of Commissioners
66	Profil Dewan Pengawas Syariah Profile of Sharia Supervisory Board
70	Profil Kepala Divisi Profile of Heads of Divisions
73	Informasi Perubahan Susunan Manajemen Information on Change of Management Composition
73	Informasi Anak Perusahaan, Perusahaan Asosiasi, dan Perusahaan Ventura Bersama Information on Subsidiaries, Associated Companies, and Joint Venture Companies
73	Kronologis Pencatatan Saham Chronology of Shares Listing
74	Komposisi Pemegang Saham Composition of Shareholders
75	Lembaga dan Profesi Penunjang Perusahaan The Company's Supporting Institution and Profession
75	Informasi Jasa Berkala Lembaga Profesi dan Penunjang Perusahaan Tahun 2018 Information on Regular Service of Profession Institutions and Supporting Companies in 2018



04 TINJAUAN PENDUKUNG BISNIS REVIEW OF BUSINESS SUPPORTS

78	Sumber Daya Insani Human Resources
86	Teknologi Informasi Information Technology



05 ANALISIS DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN MANAGEMENT DISCUSSION AND ANALYSIS

94	Tinjauan Makroekonomi Global Global Macroeconomic Overview
95	Tinjauan Ekonomi Nasional National Economic Overview
101	Tinjauan Industri Penjaminan Syariah Sharia Guarantee Industry Overview
108	Aspek Pemasaran Marketing Aspect
110	Survey Pelanggan Customer Survey
112	Tinjauan Operasi Per Segmen Usaha Operational Overview Per Business Segments
113	Analisis Kinerja Keuangan Analysis of Financial Performance
114	Laporan Posisi Keuangan Financial Position Statements
118	Laporan Laba Rugi Income Statements
120	Laporan Arus Kas Cash Flow Statements
121	Kemampuan Membayar Utang Dan Tingkat Kolektibilitas Piutang Ability to Pay Debt and Receivable Collectibility Level
122	Struktur Modal Dan Kebijakan Manajemen Atas Struktur Modal Equity Structure and Management Policy on Equity Structure



- 123 Informasi Mengenai Investasi, Ekspansi, Divestasi, Penggabungan/Peleburan Usaha, Akuisisi atau Restrukturisasi Utang/Modal
Information Concerning Investment, Expansion, Divestment, Merger, Debt/Capital Acquisition or Restructuring
- 123 Informasi Transaksi Material Yang Mengandung Benturan Kepentingan dan/atau Transaksi dengan Pihak Afiliasi
Information on Material Transactions That Contain Conflict of Interest and/or Transactions with Affiliated Parties
- 126 Kebijakan Dividen
Dividend Policy
- 126 Perubahan Peraturan Perundang-Undangan yang Berpengaruh Signifikan Terhadap Perusahaan
Changes in Laws and Regulations That Significantly Affect the Company
- 126 Ikatan Yang Material untuk Investasi Barang Modal
Material Commitments for Capital Expenditure
- 126 Investasi Barang Modal yang Direalisasikan pada Tahun Buku
Capital Expenditure Realized for the Year
- 127 Informasi dan Fakta Material yang Terjadi Setelah Tanggal Laporan Akuntan
Subsequent Event
- 127 Perbandingan Antara Target, Realisasi Tahun 2018 dan Proyeksi 2019
Comparison Between Targets, Realization in 2018, and Projections for 2019
- 129 Program Kepemilikan Saham oleh Karyawan dan/atau Manajemen
Share Ownership Program by Employees and/or Management
- 129 Tingkat Kesehatan Perusahaan
Company Health Level
- 130 Kebijakan Akuntansi
Accounting Policy
- 131 Informasi Kelangsungan Usaha
Business Continuity Information



06

TATA KELOLA PERUSAHAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE

- 136 Komitmen Penegakan GCG
GCG Enforcement Commitments
- 137 Mekanisme dan Struktur Tata Kelola
The Governance Structure and Mechanism
- 140 Implementasi Prinsip-Prinsip Tata Kelola Perusahaan
Implementation of the Principles of Corporate Governance
- 141 Assessment GCG Tahun 2018
GCG Assessment In 2018
- 142 Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)
General Meeting Of Shareholders (GMS)
- 146 Dewan Pengawas Syariah
Sharia Supervisory Board
- 148 Dewan Komisaris
Board of Commissioners
- 160 Direksi
Board of Directors
- 171 Remunerasi Dewan Komisaris, dan Direksi serta DPS
Remuneration of the Board of Commissioners, the Board of Directors and SSB
- 173 Remunerasi Dewan Pengawas Syariah
Sharia Supervisory Board Remuneration
- 173 Informasi Mengenai Pemegang Saham Utama dan Pengendali
Information About Principal and Controlling Shareholders

- 174 Hubungan Afiliasi
Affiliate Relationship
- 175 Komite Audit
Audit Committee
- 178 Sekretariat Dewan Komisaris
The Secretary of the Board of Commissioners
- 182 Sekretaris Perusahaan
Corporate Secretary
- 188 Satuan Pengawasan Intern (SPI)
Internal Audit Unit (IAU)
- 191 Unit Kepatuhan
Compliance Unit
- 192 Sistem Pengendalian Internal
Internal Control System
- 194 Manajemen Risiko
Risk Management
- 196 Komite di Bawah Direksi
Committees under the Board of Directors
- 205 Hubungan Kerja dengan Pihak Eksternal
Relationship with the External Parties
- 206 Keterbukaan Informasi
Disclosure of Information
- 207 Benturan Kepentingan Terkait Hubungan Berelasi
Conflicts of Interests with Related Parties
- 208 Kode Etik
Code of Conduct
- 209 Perkara Hukum yang Dihadapi Selama 2018
Legal Cases in 2018
- 209 Informasi Sanksi Administratif
Information About Administrative Sanctions
- 209 Pernyataan Anti Gratifikasi, Korupsi dan Penyuapan
Anti Gratification, Corruption and Bribery Statements
- 209 Pernyataan Penolakan Pemberian Dana untuk Kegiatan Politik
Funding for Political Activities
- 210 Sistem Pelaporan Pelanggaran
Whistle Blowing System



07

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

- 218 Tujuan
Purpose
- 219 Kebijakan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan
Corporate Social Responsibility Policy
- 219 Tanggung Jawab Terhadap Masyarakat
Responsibilities of the Community
- 221 Tanggung Jawab Ketenagakerjaan
Labor Responsibilities
- 223 Tanggung Jawab Produk dan Jasa
Product and Service Responsibilities



08

LAPORAN KEUANGAN FINANCIAL STATEMENT



Daftar Istilah dan Singkatan

List of Terms and Abbreviations

No.	Istilah/Singkatan / Terms & Abbreviations	Maksud dan Pengertian / Definition
1.	BOPO	Rasio Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional / The ratio of operational expenses to operational revenue.
2.	Akad Pembiayaan / Financing Contract	Perikatan antara ijab dan Kabul yang dibuat oleh Makful Anhu dan Makful Lahu dengan cara yang dibenarkan Syariah yang menetapkan adanya akibat hukum pada obyeknya. / Engagement between consent and obedience drawn up by <i>Makful Anhu</i> (the guaranteed party) and <i>Makful Lahu</i> (the beneficiary) in a manner justified by Sharia, which establishes legal consequences on the objects.
3.	BPRS	Bank Perkreditan Rakyat Syariah
4.	EBITDA	Pendapatan sebelum bunga, pajak, depresiasi, dan amortisasi / Earning Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization
5.	<i>Kafalah</i>	Kegiatan pemberian penjaminan dari Kafil kepada Makful Lahu atas kerugian yang didera Makful lahu akibat Makful Anhu gagal memenuhi kewajiban melunasi pembiayaan yang dijamin oleh Kafil sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam akad. / Guarantee provision from <i>Kafil</i> (the guarantor) to <i>Makful Lahu</i> for the loss suffered by <i>Makful Lahu</i> because <i>Makful Anhu</i> fails to fulfill its obligations to settle the financing guaranteed by Kafil in accordance with the terms specified in the contract.
6.	<i>Kafil</i>	Perusahaan yang memberikan jasa dalam pemenuhan kewajiban finansial Makful Anhu kepada Makful Lahu sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang No. 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan. / The company providing services in fulfilling financial obligations of <i>Makful Anhu</i> to <i>Makful Lahu</i> as referred to in Law No. 1 of 2016 regarding Guarantee.
7.	KPI	Indikator Kinerja Utama / Key Performance Index
8.	KPKU	Kriteria Penilaian Kinerja Unggul / assessment criteria for performance excellence (KPKU)
9.	Likuiditas	Kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya. / The company's ability to meet its short-term obligations
10.	LKB	Lembaga Keuangan Bank / Bank Financial Institutions
11.	LKNB	Lembaga Keuangan Non-bank / Non-bank financial institutions
12.	<i>Makful Anhu</i>	Perorangan yang mengadakan akad pembiayaan dengan Makful Lahu. / Individual entering into financing contract with <i>Makful Lahu</i> .
13.	<i>Makful Lahu</i>	Bank Syariah yang menjalankan usaha sesuai ketentuan yang berlaku, antara lain memberikan pembiayaan berdasarkan prinsip Syariah. / The Sharia bank carrying out business in accordance with the prevailing terms, including providing financing based on Sharia principles.
14.	<i>Mudharabah / Mudharaba</i>	Perjanjian pembiayaan/penanaman dana dari pemilik dana (shahibul maal) kepada pengelola dana (mudharib) untuk melakukan kegiatan usaha tertentu yang sesuai syariah, dengan pembagian hasil usaha antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya. / A financing/investment contract between a capital provider (<i>shahibul maal</i>) and an entrepreneur or a fund manager (<i>mudharib</i>), whereby the entrepreneur or fund manager can mobilize the funds of the former for its business activity within the Sharia guidelines. Profits made are shared between the parties according to a mutually agreed ratio.
15.	<i>Musyarakah / Musharaka</i>	Perjanjian pembiayaan/ penanaman dana dari dua atau lebih pemilik dana dan/atau barang untuk menjalankan usaha tertentu sesuai syariah dengan pembagian hasil usaha antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang disepakati, sedangkan pembagian kerugian berdasarkan proporsi modal masing-masing. / A contract between two parties whereby both parties provide capital and both may be active in managing the venture. Losses are shared on the basis of how much capital has been contributed. Profits are shared in any way the partners decide.
16.	NPM	Net Profit Margin adalah rasio yang digunakan untuk menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan bersih / Net Profit Margin is a ratio used to show a company's ability to generate net profits
17.	PKS	Perjanjian Kerja Sama / Cooperation agreement
18.	PT	Perseroan Terbatas / Limited Liability Company.
19.	RJPP	Rencana Jangka Panjang Perusahaan / The Company's Long Term Plan
20.	RKAP	Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan / Work Plan and Company Budget
21.	ROA	Return on Assets, yaitu rasio laba sebelum pajak (disetahunkan) terhadap total asset rata-rata / Return on Assets, which is the ratio of annualized earnings before taxes to average assets.
22.	ROE	Return on Equity, yaitu rasio laba setelah pajak (disetahunkan) terhadap total modal rata-rata / Return on Equity, which is the ratio of annualized earnings after taxes to average equity.
23.	Solvabilitas	Kemampuan perusahaan untuk memenuhi semua kewajibannya / The company's ability to fulfill all its obligations (solvency)
24.	Subrograsi	Kas pengembalian atas nilai likuidasi agunan/jaminan yang dipegang Bank disampaikan kepada asuradur / Cash returns on liquidation value of collateral / collateral held by the Bank are conveyed to the insurer
25.	<i>Ta'widh</i>	Tuntutan pembayaran oleh Makful Lahu kepada Kafil diakibatkan Makful Anhu tidak dapat memenuhi kewajibannya sesuai dengan akad pembiayaan. / Demand for payment by <i>Makful Lahu</i> to <i>Kafil</i> because <i>Makful Anhu</i> cannot fulfill its obligation based on the financing contract.
26.	<i>Ujroh</i>	Sejumlah uang yang diterima oleh Kafil atas jasa Kafalah yang diberikan oleh Kafil kepada Makful Lahu yang dibayar oleh Makful Lahu / An amount of money received by <i>Kafil</i> for the <i>Kafalah</i> service provided by <i>Kafil</i> to <i>Makful Lahu</i> paid by <i>Makful Lahu</i> .
27.	<i>Yield on Investment (YOI)</i>	Tingkat pengembalian investasi sebagai persentase dari jumlah investasi awal / Return on investment as a percentage of the initial investment amount

Strategi Perseroan di 2018

Corporate Strategies in 2018

Meningkatkan Kinerja, Bersiap Memenangkan Persaingan

Improving Performance, Preparing to Win Competition

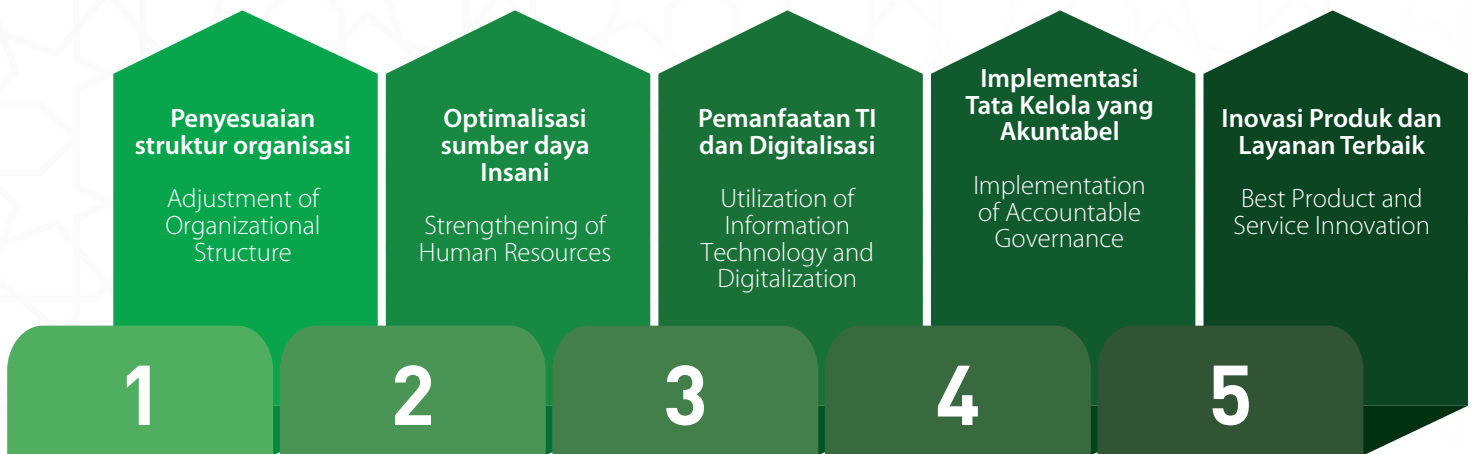
Sepanjang lebih dari 5 tahun menjadi pelopor penjaminan syariah di Indonesia, Perseroan telah memantapkan posisinya sebagai perusahaan yang terpercaya di tengah-tengah masyarakat. Seiring dengan tuntutan industri yang terus berkembang, sebuah terobosan perlu diambil guna mempertahankan keunggulan daya saing yang berkelanjutan.

Pada tahun 2018, Perseroan mengambil langkah tegas dengan menjalankan sejumlah inisiatif strategis yang menyeluruh baik dari sisi organisasi maupun operasional. Langkah ini menjadi awal baru bagi Perseroan untuk menjadi perusahaan yang lebih kuat, lebih menguntungkan, serta terbuka dan profesional.

For over 5 years as a pioneer in sharia insurance in Indonesia, the Company has established its position as a trusted company for the public. As demand in the industry continues to increase, the company needs to create some breakthrough to sustainably maintain its competitive edge.

In 2018, the Company took firm steps by carrying out a number of comprehensive strategic initiatives, both in terms of organization and operations. This step is a new beginning for the Company to transform as a stronger, more profitable, open, and professional enterprise.





1. Penyesuaian Struktur Organisasi

Struktur organisasi yang profesional dan sinergi kokoh seluruh jajaran merupakan kunci untuk mewujudkan visi dan misi. Pada awal tahun 2018, Pemegang Saham Perseroan telah menunjuk manajemen baru untuk melanjutkan estafet kepemimpinan sebelumnya. Struktur organisasi baru Perseroan dirancang berdasarkan sistem kerja yang partisipatif serta selaras dengan *best practices*, yang didukung oleh manajemen berpengalaman dan berdedikasi sehingga pengelolaan usaha akan dapat berjalan secara harmonis dan profesional.

- Penunjukan Direksi baru;
- Penguatan tugas, hak, dan tanggung jawab secara jelas dan sinergis di seluruh lapisan organisasi;
- Meresmikan 5 (lima) Kantor Pemasaran menjadi Kantor Cabang di Medan, Palembang, Semarang, Surabaya dan Makassar.

2. Penguatan Sumber Daya Insani

Menyempurnakan langkah strategis menuju yang terdepan, Perseroan pada tahun 2018 memperkuat Sumber Daya Insani (SDI) yang dimiliki. Penguatan SDM diharapkan akan mendukung langkah-langkah besar yang ditetapkan oleh manajemen sehingga menunjang pencapaian target jangka panjang dan jangka pendek. Hal ini pada akhirnya akan memastikan Perseroan meraih pertumbuhan berkelanjutan di masa mendatang.

- Mengenalkan seluruh karyawan terhadap budaya Perseroan dan menjalankannya di lingkungan kerja;
- Membekali karyawan dengan berbagai pelatihan yang sesuai dengan posisi dan kebutuhannya;
- Mewujudkan lingkungan dan budaya kerja yang amanah, profesional, dan inovatif;
- Menerapkan remunerasi berbasis kinerja yang kompetitif untuk meningkatkan kreativitas lebih tinggi.

1. Adjustment of Organizational Structure

Professional organizational structure and solid synergy between employees at all levels are key to realizing the vision and mission. At the beginning of 2018, the Company's Shareholders have appointed new management to continue the previous leadership relay. The Company's new organizational structure is established based on a participatory work system that is in line with best practices, which are supported by experienced and dedicated management so that it is expected business management can run harmoniously and professionally.

- Appointing new Directors;
- Strengthening duties, rights, and responsibilities on a clear and synergistic manner across all levels of the organization;
- Inaugurated 5 (five) Marketing Offices to Branch Offices in Medan, Palembang, Semarang, Surabaya and Makassar.

2. Strengthening of Human Resources

In an effort to improve strategic steps to stay ahead, in 2018 the Company Strengthen Human Resources (SDI). The strengthening of HR is expected to support big steps that have been prepared by the management to support the achievement of long-term and short-term targets. This will ultimately ensure the Company's attainment of sustainable growth in the future.

- Introducing all employees to the Company's culture and implementing it in the work environment;
- Equipping employees with various training activities according to their position and needs;
- Creating safe, professional and innovative work environment and culture;
- Providing competitive performance-based remuneration to stimulate higher creativity

3. Pemanfaatan TI dan Digitalisasi

Komitmen memajukan Perseroan yang selaras dengan kemajuan teknologi dan mempermudah nasabah menjadi agenda utama manajemen baru Perseroan. Salah satu upaya guna mewujudkan target tersebut adalah memaksimalkan operasional Perseroan dengan meningkatkan dukungan TI yang dimiliki.

- Mengembangkan Sistem Integrasi Data Penjaminan dengan Mitra Bisnis (*host to host*);
- Mengembangkan Sistem Aplikasi *Suretyship* (*mobile apps* Maasya);
- Mengembangkan Sistem Aplikasi *Call Center*;
- Implementasi *Email Corporate*.

4. Implementasi Tata Kelola yang Akuntabel

Penunjukan manajemen baru di 2018 merupakan bagian dari upaya menjawab tantangan di masa lalu serta menyongsong peluang di masa depan. Perseroan menyempurnakan inisiatif ini dengan memperteguh komitmen pengelolaan usaha secara lebih transparan dan profesional selaras dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan berdasarkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik/*Good Corporate Governance* (GCG).

- Mengimplementasikan prinsip-prinsip GCG di seluruh lapisan organisasi;
- Melengkapi *soft structure* GCG Perseroan dan menjalankannya secara maksimal.

5. Inovasi Produk dan Layanan Terbaik

Seiring dengan perkembangan industri yang kian kompetitif, manajemen Perseroan berpandangan bahwa diperlukan sikap yang lebih jeli dalam melihat peluang dan tantangan yang ada. Oleh karena itu, Perseroan pada tahun 2018 melakukan inovasi produk dan layanan untuk meningkatkan pangsa pasar Perseroan yang lebih luas dan menguntungkan di masa mendatang.

- melakukan inovasi produk penjaminan syariah dan memastikan terwujudnya *service excellent* atas kerjasama dengan segenap mitra;
- Meningkatkan nisbah bagi hasil investasi melalui instrumen deposito dan surat berharga Syariah;
- Meningkatkan *market share* melalui optimalisasi *gearing ratio*;

3. Utilization of Information Technology and Digitalization

Commitment to advancing the Company in line with technological development and creating convenience for the customers are among the main agenda set by the Company's new management. One of the efforts to realize this target is to maximize the Company's operations by increasing its IT support.

- Developing a Guarantee Data Integration System with Business Partners (*host to host*);
- Developing the Suretyship Application System (Maasya mobile apps);
- Developing a Call Center Application System;
- Corporate Email Implementation.

4. Implementation of Accountable Governance

The new management's appointment in 2018 was part of an effort to answer the challenges in the past and to capture opportunities in the future. The Company improves this initiative by strengthening the commitment of business management in a more transparent and professional manner in line with the applicable laws and regulations and based on good corporate governance (GCG) principles.

- Implementing GCG principles at all levels of the organization;
- Complementing the Company's GCG soft structure and implementing it as optimum as possible.

5. Best Product and Service Innovation

In line with the increasingly competitive industry from time to time, the Company's management believes that a more agile attitude is needed to spot the existing opportunities and challenges. Therefore, in 2018 the Company created innovation in its products and services to expand the Company's market share more broadly and profitably in the future.

- creating innovation in sharia guarantee products and ensuring the realization of service excellence in cooperation with all partners;
- Increasing investment profit sharing ratio through deposit and Sharia securities instruments;
- Increasing market share through optimization of gearing ratios;

Hasil dan Capaian di 2018

Pendapatan Kafalah
Revenue of Kafalah

Rp
156
miliar / billion

28%

Pendapatan Kafalah meningkat sebesar 27,59%, dibandingkan dengan tahun 2017 sebesar Rp122 miliar.

Revenue of Kafalah increased by 27.59%, compared to 2017 of Rp122 billion.

Pendapatan Kafalah Bersih
Revenue of Net Kafalah

Rp
81
miliar / billion

94%

Pendapatan Kafalah Bersih meningkat sebesar 94,13%, dibandingkan dengan tahun 2017 sebesar Rp42 miliar.

Revenue of Net Kafalah increased by 94.13%, compared to 2017 of Rp42 billion.

Laba Tahun Berjalan
Profit for the Year

Rp
14
miliar / billion

126%

Laba Tahun Berjalan meningkat sebesar 126,22%, dibandingkan dengan tahun 2017 sebesar Rp6 miliar.

Profit for the Year increased by 126.22%, compared to 2017 of Rp6 billion.

Laba Komprehensif Tahun Berjalan
Comprehensive Profit for the Year

Rp
15
miliar / billion

131%

Laba Komprehensif Tahun Berjalan meningkat sebesar 130,62%, dibandingkan dengan tahun 2017 sebesar Rp6 miliar.

Comprehensive Profit for the Year increased by 130.62%, compared to 2017 of Rp6 billion.

Result and Achievement in 2018

Ekuitas meningkat sebesar 4,80%, dibandingkan dengan tahun 2017 sebesar Rp311 miliar.

The equity increased by 4.80%, compared to 2017 of Rp311 billion.

Jumlah Liabilitas dan Ekuitas meningkat sebesar 2,52%, dibandingkan dengan tahun 2017 sebesar Rp391 miliar.

The amount of Liabilities and Equity increased by 2.52%, compared to 2017 of Rp391 billion.

Ekuitas
Equity

Rp 326
miliar / billion

5%

Liabilitas dan Ekuitas
Liabilities and Equity

Rp 401
miliar / billion

3%

Skor Tingkat Kesehatan
Soundness Level Score

78,50

Skor Tingkat Kesehatan Perseroan di 2018 meningkat dibandingkan skor tahun 2017 sebesar 76,00.

The Company's Soundness Level Score in 2018 increased compared to the score in 2017 of 76.00.

Skor GCG
GCG Score

73,30

Skor GCG di 2018 meningkat dibandingkan skor tahun 2017 sebesar 72,74.

GCG Score in 2018 increased compared to the score in 2017 of 72.74.

Kebijakan Utama Tahun 2018

Primary Policies in 2018

Mengiringi implementasi strategi utama, Perseroan di 2018 menerapkan inisiatif-inisiatif strategis sebagai kebijakan utama untuk memastikan tercapainya target-target yang kami tetapkan. Langkah-langkah ini meliputi dua fokus, yakni:

In line with the implementation of main strategies, the Company in 2018 applied strategic initiatives as the primary policies to ensure that we can reach the target set. The steps cover two focuses, which are:

1

Kerjasama dengan **LKB dan LKNB Syariah** yang berkinerja sehat.

Cooperation with Sharia Bank Financial Institutions and Sharia non-Bank Financial Institution with healthy performance.



2

Sinergi Askrindo Group.

Synergy of Askrindo Group.



Jalanan Kerjasama di 2018

Cooperation in 2018

No	Nama Perusahaan / Company Name	Jenis Kerjasama / Type of Cooperation	Tanggal Perjanjian / Agreement Date	Tanggal Berakhirnya Perjanjian / End Date of Agreement
1	PT Bank CIMB Niaga Tbk (Unit Usaha Syariah / Sharia Business Unit)	PKS Penjaminan Pembiayaan - Induk / Financing Guarantee Cooperation Agreement – Parent	1 November 2018 / November 1, 2018	11 Januari 2021 / January 11, 2021
2	PT Bank Syariah Mandiri	PKS Penjaminan Pembiayaan - Induk / Financing Guarantee Cooperation Agreement – Parent	26 Januari 2018 / January 26, 2018	26 Januari 2021 / January 26, 2021
3	PT Bank Syariah Bukopin	PKS Penjaminan Bank Garansi / Cooperation Agreement of Guarantee Bank	26 Februari 2018 / February 26, 2018	26 Februari 2021 / February 26, 2021
4	Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi, Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (LPDB - KUMKM)	MoU Penjaminan Langsung, Monitoring Dan Evaluasi Serta Penagihan Atas Fasilitas Pembiayaan Dari LPDB - KUMKM Kepada KUMKM / MoU of Direct Guarantee, Monitoring, and Evaluation, and Collection of Financing Facility from LPDB - KUMKM to KUMKM	-	-
5	PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Harta Insan Karimah Parahyangan	PKS Induk / Parent Cooperation Agreement	27 Maret 2018 / March 27, 2018	27 Maret 2020 / March 27, 2020
6	PT Bank Jabar Banten Syariah	PKS Induk / Parent Cooperation Agreement	5 April 2018 / April 5, 2018	4 Mei 2020 / May 4, 2020
7	Puskopssim Muawanah NU	PKS Induk / Parent Cooperation Agreement	6 April 2018 / April 6, 2018	-



No	Nama Perusahaan / Company Name	Jenis Kerjasama / Type of Cooperation	Tanggal Perjanjian / Agreement Date	Tanggal Berakhirnya Perjanjian / End Date of Agreement
8	PT Sarana Transwisata Teknologi	PKS Induk / Parent Cooperation Agreement	14 Mei 2018 / May 14, 2018	14 Mei 2023 / May 14, 2023
9	PT Asuransi Jiwa Syariah Jasa Mitra Abadi Tbk	PKS Penjaminan & Asuransi Bersama Berdasarkan Prinsip Syariah / Cooperation Agreement of Guarantee & Joint Insurance Based on Sharia Principle	10 April 2018 / April 10, 2018	10 April 2021 / April 10, 2021
10	PT BRI Syariah	PKS Multiguna Multijasa / Cooperation Agreement of Multifunction Multiservice	22 Mei 2018 / May 22, 2018	22 Mei 2021 / May 22, 2021
11	PT BRI Syariah	PKS Multiguna Multijasa Nasabah Purna, Purna Janda/Duda dan Pra Purna / Cooperation Agreement of Multifunction Multiservice of Full Customer, Full Widow/Widower, and Pre-Full	23 Mei 2018 / May 23, 2018	23 Mei 2021 / May 23, 2021
12	PT BPRS Metro Madani	PKS Induk Penjaminan Pembiayaan / Parent Cooperation Agreement of Financing Guarantee	31 Mei 2018 / May 31, 2018	31 Mei 2020 / May 31, 2020
13	PT Bank Jabar Banten Syariah	PKS Kafalah Bank Garansi / Cooperation Agreement of Kafalah of Guarantee Bank	31 Mei 2018 / May 31, 2018	-
14	PT Bank Jabar Banten Syariah	PKS Kafalah Pembiayaan Konstruksi & Non Konstruksi / Cooperation Agreement of Financing Kafalah for Construction & Non-Construction	31 Mei 2018 / May 31, 2018	-
15	PT Bank Jabar Banten Syariah	PKS Kafalah Pembiayaan Konsumtif / Cooperation Agreement of Consumptive Financing Kafalah	-	-
16	PT Bank Jabar Banten Syariah	PKS Kafalah Pembiayaan Linkage Pola Channeling / Cooperation Agreement of Financing Kafalah for Linkage Channeling Pattern	31 Mei 2018 / May 31, 2018	-
17	PT Bank Jabar Banten Syariah	PKS Kafalah Pembiayaan Linkage Pola Executing / Cooperation Agreement of Financing Kafalah for Linkage Executing Pattern	31 Mei 2018 / May 31, 2018	-
18	PT Bank Jabar Banten Syariah	PKS Kafalah Pembiayaan Kepemilikan Emas / Cooperation Agreement of Financing Kafalah for Gold Ownership	31 Mei 2018 / May 31, 2018	-
19	PT Bank Jabar Banten Syariah	PKS Kafalah Pembiayaan Pemilikan Rumah / Cooperation Agreement of Financing Kafalah for House Ownership	31 Mei 2018 / May 31, 2018	-
20	PT Bank Jabar Banten Syariah	PKS Kafalah Pembiayaan Pemilikan Rumah Sejahtera FLPP / Cooperation Agreement of Financing Kafalah for Prosperous House Ownership with FLPP	31 Mei 2018 / May 31, 2018	31 Mei 2020 / May 31, 2020
21	PT BPD Jawa Timur Tbk	Akad Kerjasama Turunan Kafalah Pembiayaan Multiguna / Derivative Cooperation Agreement of Multifunction Financing Kafalah	21 Juni 2018 / June 21, 2018	21 Juni 2021 / June 21, 2021
22	PT BPD Jawa Timur Tbk	Akad Kerjasama Turunan Kafalah Pembiayaan Pemilikan Rumah iB Griya Barokah / Derivative Cooperation Contract of Financing Kafalah for House Ownership of iB Griya Barokah	21 Juni 2018 / June 21, 2018	21 Juni 2021 / June 21, 2021
23	PT BPD Jawa Timur Tbk	Akad Kerjasama Turunan Kafalah Pembiayaan Multijasa Umroh / Derivative Cooperation Contract of Financing Kafalah for Umrah Multiservice	4 November 2017 / November 4, 2017	4 November 2020 / November 4, 2020
24	PT BPD Jawa Timur Tbk	Akad Kerjasama Turunan Kafalah Pembiayaan Kepemilikan Logam Emas / Derivative Cooperation Contract of Financing Kafalah for Gold Ownership	4 November 2017 / November 4, 2017	4 November 2020 / November 4, 2020
25	PT BPD Jawa Timur Tbk	Akad Kerjasama Turunan Kafalah Pembiayaan Produktif Modal Kerja & Investasi / Derivative Cooperation Contract of Productive Financing Kafalah for Working Capital & Investment	4 November 2017 / November 4, 2017	4 November 2020 / November 4, 2020
26	PT BPD Jawa Timur Tbk	Akad Kerjasama Turunan Kafalah Pembiayaan Pemilikan Rumah Sejahtera / Derivative Cooperation Contract of Financing Kafalah for Prosperous House Ownership	4 November 2017 / November 4, 2017	4 November 2020 / November 4, 2020
27	PT BPD Jawa Timur Tbk	Akad Kerjasama Turunan Kafalah Pembiayaan Komersial / Derivative Cooperation Contract of Commercial Financing Kafalah	4 November 2017 / November 4, 2017	4 November 2020 / November 4, 2020
28	PT BPD Jawa Timur Tbk	Akad Kerjasama Kafalah Pembiayaan Kepada Lembaga Linkage Pola Channeling / Cooperation Contract of Financing Kafalah for Linkage Channeling Pattern Institution	4 November 2017 / November 4, 2017	4 November 2020 / November 4, 2020

No	Nama Perusahaan / Company Name	Jenis Kerjasama / Type of Cooperation	Tanggal Perjanjian / Agreement Date	Tanggal Berakhirnya Perjanjian / End Date of Agreement
29	PT BPD Jawa Timur Tbk	Akad Kerjasama Kafalah Pembiayaan Kepada Lembaga Linkage Pola Executing / Cooperation Contract of Financing <i>Kafalah</i> for Linkage Executing Pattern Institution	21 Juni 2018 / June 21, 2018	21 Juni 2021 / June 21, 2021
30	PT BPD Jawa Timur Tbk	Akad Kerjasama Turunan Kafalah Bank Garansi / Derivative Cooperation Contract of <i>Kafalah</i> for Guarantee Bank	4 November 2017 / November 4, 2017	4 November 2020 / November 4, 2020
31	PT BPD Jawa Timur Tbk	Akad Kerjasama Kafalah Anjak Piutang / Cooperation Contract of <i>Kafalah</i> for Factoring	4 November 2017 / November 4, 2017	4 November 2020 / November 4, 2020
32	PT Bank Aceh Syariah (BPD Aceh)	PKS Induk / Parent Cooperation Agreement	16 Agustus 2018 / August 16, 2018	16 Agustus 2020 / August 16, 2020
33	PT BPRS Buana Mitra Perwira	PKS Induk / Parent Cooperation Agreement	22 Mei 2018 / May 22, 2018	22 Mei 2020 / May 22, 2020
34	PT BPRS Lampung Timur	PKS Induk / Parent Cooperation Agreement	26 Juli 2018 / July 26, 2018	26 Juli 2020 / July 26, 2020
35	Kopelindo III	PKS Induk / Parent Cooperation Agreement	28 Agustus 2018 / August 28, 2018	28 Agustus 2020 / August 28, 2020
36	PT Mitra Proteksi Madani	PKS Induk / Parent Cooperation Agreement	1 Juli 2018 / July 1, 2018	1 Juli 2019 / July 1, 2019
37	PT Bank NTB Syariah	PKS Induk / Parent Cooperation Agreement	18 Oktober 2018 / October 18, 2018	18 Oktober 2020 / October 18, 2020
38	PT Bank NTB Syariah	PKS KUR Online / Cooperation Agreement of Online People's Business Credit	18 Oktober 2018 / October 18, 2018	18 Oktober 2020 / October 18, 2020
39	PT Bank NTB Syariah	PKS KUR / Cooperation Agreement of People's Business Credit	18 Oktober 2018 / October 18, 2018	18 Oktober 2020 / October 18, 2020
40	PT BPRS HIK Surakarta	PKS Induk / Parent Cooperation Agreement	26 Oktober 2018 / October 26, 2018	26 Oktober 2020 / October 26, 2020
41	BMT Al-Hijrah KAN Jabung Syariah	PKS Induk / Parent Cooperation Agreement	26 Oktober 2018 / October 26, 2018	26 Oktober 2020 / October 26, 2020
42	PT Permodalan Nasional Madani (PNM)	PKS Induk / Parent Cooperation Agreement	6 November 2018 / November 6, 2018	6 November 2020 / November 6, 2018
43	Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Republik Indonesia / Directorate General of Treasury of the Ministry of Finance of the Republic of Indonesia	Perjanjian Kerjasama Penggunaan system Informasi Kredit Program (SIKP) Untuk Penatausahaan dan Pengelolaan Penjaminan Kredit Usaha Rakyat (KUR) / Cooperation Agreement for Utilization of Credit Information Program System (SIKP) for Administration and Guarantee Management of People's Business Credit	6 November 2018 / November 6, 2018	6 November 2020 / November 6, 2018
44	PT BPRS Bhakti Sumekar	PKS Konsumtif Khusus CPNS dan PNS / Special Consumptive Cooperation Agreement for Candidates for Civil Servants and Civil Servants	16 November 2018 / November 16, 2018	16 November 2018 / November 16, 2018
45	PT Bank Syariah Mandiri	PKS Konsumer / Consumer Cooperation Agreement	30 November 2018 / November 30, 2018	30 November 2018 / November 30, 2018

Rencana Jangka Panjang Perseroan

Corporate Long-Term Planning

Guna mewujudkan visi **"Menjadi Perusahaan Penjamin Pembiayaan berbasis syariah yang terkemuka sebagai pendukung pengembangan ekonomi nasional dan berperan dalam pasar global"** yang dijabarkan dalam Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) 2016-2020, Perseroan telah menetapkan tema strategi **"Optimalisasi Bisnis Penjaminan Syariah yang Berkualitas Melalui Proses Bisnis yang Prudent dan Strategis yang Implementatif"** yang diarahkan kepada pencapaian sasaran Perseroan semaksimal mungkin, meliputi:

In order to realize the vision of **"Becoming A Well-Known Sharia-Based Financing Guarantee Company to Support National Economic Development and Play a Role in Global Market"** as elaborated in the Corporate Long-Term Planning of 2016-2020, the Company has established strategic theme of **"Optimizing Quality Sharia Guarantee Business through Prudent, Strategic, and Applicable Business Process"**, which is aimed to achieve the Company's targets as maximum as possible, including:



Pada tahun 2018, implementasi strategi yang dilakukan oleh Perseroan berada pada tahap 1. Sejalan dengan kejelian manajemen dalam melihat peluang dan tantangan, disertai ketepatan implementasi strategi yang dijalankan, serta dukungan seluruh pihak, Perseroan pada tahun 2018 berhasil membukukan pencapaian yang cukup memuaskan. Realisasi terhadap pencapaian RKAP yang dicanangkan di awal tahun buku memang sedikit berada di bawah target, namun peningkatan yang berhasil dibukukan dibandingkan tahun 2017 tumbuh sangat signifikan.

In 2018, the strategic implementation carried out by the Company was at the stage 1. In line with the management's foresight in grasping opportunities and challenges, accurateness of strategy implementation, as well as the support of all parties, the Company in 2018 succeeded to record satisfying achievements. The realization of Corporate Work Plan and Budget (RKAP) established in the beginning of the financial year was slightly lower than the target, but the increase recorded grew significantly compared to 2017.

Tabel Ikhtisar Pencapaian Tahun 2018 dan Perbandingannya dengan RKAP dan Tahun Sebelumnya
Table of Summary of Achievements in 2018 and Its Comparison with RKAP and the Previous Year

Uraian / Description	Dalam juta Rupiah / In Million Rp			Dalam persentase / In Percentage (%)	
	Realisasi / Realization 2017	RKAP 2018	Realisasi / Realization 2018	Pencapaian / Achievement	Pertumbuhan / Growth
Total Pendapatan / Total Income	139.254	175.434	168.686	96,15	21,14
Jumlah Beban / Total Expense	132.471	152.832	145.957	95,50	10,18
Laba Sebelum Zakat / Profit Before Zakat	6.783	22.602	22.729	100,56	235,09
Zakat / Zakat	170	642	568	88,47	234,12
Laba Sebelum Pajak / Profit Before Tax	6.613	21.960	22.161	100,92	235,11
Beban Pajak / Tax Expense	388	6.088	8.076	132,65	1.981,44
Laba Setelah Pajak / Profit After Tax	6.225	15.872	14.085	88,74	126,27





Melalui penerapan strategi tepat sasaran, pengelolaan usaha berdasarkan nilai-nilai GCG, penguatan organisasi yang profesional, pengembangan sumber daya insani yang amanah dan kompeten, serta pengembangan teknologi informasi terkini, Perseroan pada 2018 berhasil membukukan kinerja keuangan yang meningkat dan lebih baik dari periode sebelumnya.

Through the implementation of on-target strategies, business management based on GCG values, strengthening of professional organization, development of trustworthy and competent human resources, and advancement of the latest information technology, in 2018 the Company managed to record improved financial performance compared to the previous period.

Kilas Kinerja 2018

Glance of 2018
Performance

Ikhtisar Data Keuangan Penting

Financial Highlights

Dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain / In Rupiah Unless otherwise stated

Ikhtisar Posisi Keuangan	2018	2017	2016	Summary of Financial Position
Kas dan Bank	15.711.757.402	35.762.042.033	7.427.003.051	Cash and Bank
Investasi	349.848.110.022	318.884.943.750	327.373.433.372	Investment
Piutang Ujrah	6.750.855.864	5.913.042.609	9.671.534.114	Ujrah Receivables
Piutang ta'widh	7.988.726.802	8.379.785.803	1.606.427.204	Ta'widh Receivables
Piutang Hasil Investasi	381.286.784	153.183.255	155.903.945	Investment Income Receivables
Aset Tetap	11.314.634.637	10.288.978.961	4.824.308.773	Fixed Assets
Jumlah Aset	401.227.957.708	391.354.837.891	357.209.247.905	Total Assets
Utang Ta'widh	1.733.582.361	8.318.944.590	2.368.985.673	Ta'widh Payables
Utang Zakat	962.416.208	227.653.357	511.851.756	Zakat Payables
Utang Pajak	5.911.509.051	473.594.157	196.461.562	Tax Payables
Jumlah Liabilitas	75.696.590.961	80.718.996.276	53.032.768.839	Total Liabilities
Jumlah Ekuitas	325.531.366.747	310.635.541.615	304.176.479.066	Total Equity
Ikhtisar Laba Rugi	2018	2017	2016	Summary of Profit and Loss
Jumlah Pendapatan Kafalah	156.030.449.949	122.289.715.338	113.942.247.195	Total Kafalah Income
Jumlah Beban Kafalah	(75.098.901.038)	(80.599.308.644)	(53.175.925.591)	Total Kafalah Expense
Pendapatan Kafalah Bersih	80.931.548.911	41.690.406.694	60.766.321.604	Net Kafalah Income
Pendapatan Investasi	12.655.131.361	16.965.151.160	15.612.896.835	Investment Income
Beban Usaha	(66.609.072.438)	(52.623.755.526)	(43.560.422.796)	Operating Expenses
Laba Usaha	26.977.607.834	6.031.802.808	32.818.795.643	Operating Profit
(Beban) Penghasilan Lain-lain	(4.248.541.162)	(752.055.993)	(7.556.142.887)	Other Income (Expense)
Laba Sebelum Zakat	22.729.066.672	6.783.858.801	25.262.652.756	Profit Before Zakat
Zakat	(568.226.667)	(169.596.470)	(631.566.319)	Zakat
Laba Sebelum Pajak	22.160.840.005	6.614.262.331	24.631.086.437	Profit Before Tax
(Beban) Manfaat Pajak	(8.075.982.772)	(388.057.776)	(4.147.049.946)	Tax Benefit (Expense)
Laba Tahun Berjalan	14.084.857.233	6.226.204.555	20.484.036.491	Profit for the Year
Laba Komprehensif Tahun Berjalan	14.895.825.132	6.459.062.548	19.431.027.508	Comprehensive Profit for the Year
Laba per Saham	-	-	-	Profit Per Share
EBITDA	24.435.061.644	2.518.794.481	30.905.427.321	EBITDA

Dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain / In Rupiah Unless otherwise stated

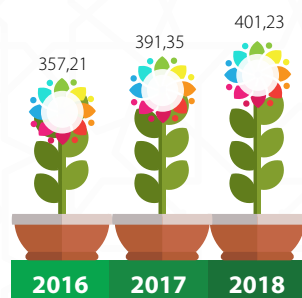
Laporan Arus Kas	2018	2017	2016	Statement of Cash Flows
Kas Bersih Diperoleh dari Aktivitas Operasi	13.484.714.308	26.458.217.358	26.361.125.744	Cash Provided by Operating Activities
Kas Bersih Diperoleh dari Aktivitas Investasi	(33.534.998.939)	1.876.821.624	(25.995.384.870)	Cash Provided by Investing Activities
Saldo Kas dan Bank Akhir Tahun	15.711.757.402	35.762.042.033	7.427.003.051	Cash on Hand and Bank at End of Year
Rasio Keuangan	2018	2017	2016	Financial Ratio
ROA	6	2%	7	ROA
ROE	4	2%	7	ROE
Solvabilitas	530	485	674	Solvability
Likuiditas	1212	200	657	Liquidity
Yield on Investment (YOI)	4	5	5	Yield on Investment (YOI)
BOPO	(27)	6	4	BOPO
NPM	6	4%	13	NPM
Gearing Ratio	32	30%	27	Gearing Ratio
Rasio Efektivitas Operasi	6	3%	16	Operating Efficiency Ratio
Rasio Efektivitas Subrogasi	14	10%	9	Subrogation Efficiency Ratio

Grafik Ikhtisar Data Keuangan Penting

Graphic Summarizing Important Financial Data

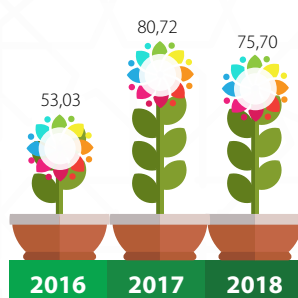
Jumlah Aset

Total Assets
(dalam miliar Rupiah / in billion Rupiah)



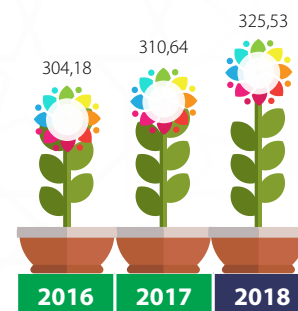
Jumlah Liabilitas

Total Liabilities
(dalam miliar Rupiah / in billion Rupiah)



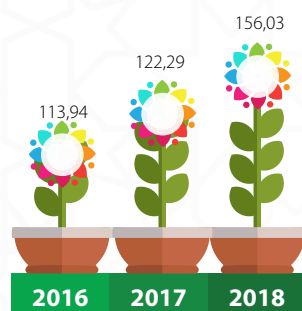
Jumlah Ekuitas

Total Equity
(dalam miliar Rupiah / in billion Rupiah)



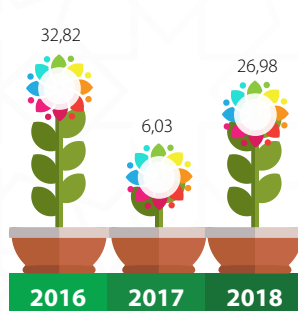
Jumlah Pendapatan Kafalah

Total Kafalah Income
(dalam miliar Rupiah / in billion Rupiah)



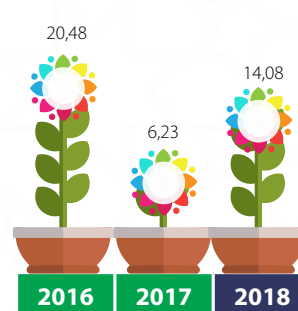
Laba (Rugi) Usaha

Operating Profit
(dalam miliar Rupiah / in billion Rupiah)



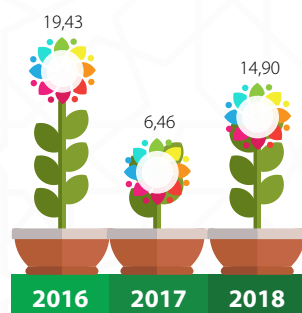
Laba Tahun Berjalan

Profit for the Year
(dalam miliar Rupiah / in billion Rupiah)



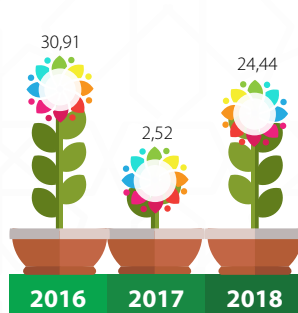
Laba Komprehensif Tahun Berjalan

Comprehensive Profit for the Year
(dalam miliar Rupiah / in billion Rupiah)



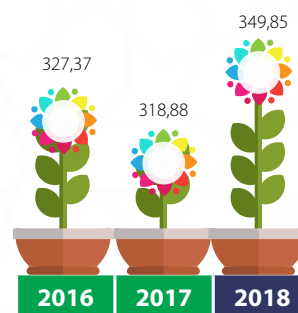
EBITDA

EBITDA
(dalam miliar Rupiah / in billion Rupiah)



Investasi

Investment
(dalam miliar Rupiah / in billion Rupiah)



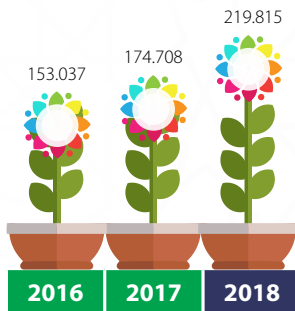
Ikhtisar Kinerja Operasional

Summary of Operating Performance

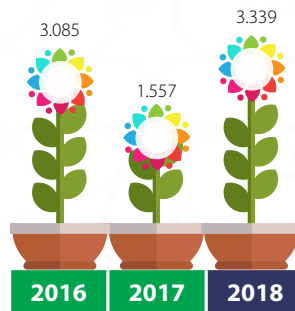
Dalam juta Rupiah kecuali dinyatakan lain / In million Rupiah Unless otherwise stated

Jenis Produk / Type of Product	2018	2017	2016
Kafalah Pembiayaan / Financing Kafalah	219.815	174.708	153.037
Kafalah Bank Garansi / Guarantee Bank Kafalah	3.339	1.557	3.085
Kafalah Surety / Surety Kafalah	330	35	93
Total	223.484	176.300	156.215

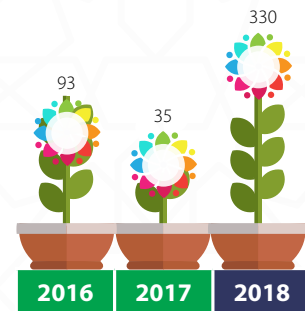
Kafalah Pembiayaan
Financing Kafalah
(dalam juta Rupiah / in million Rupiah)



Kafalah Bank Garansi
Guarantee Bank Kafalah
(dalam juta Rupiah / in million Rupiah)



Kafalah Surety
Surety Kafalah
(dalam juta Rupiah / in million Rupiah)



Ikhtisar Saham dan Efek Lainnya

Summary of Shares and Other Securities

PEMEGANG SAHAM

Per 31 Desember 2018, pemegang saham utama dan pengendali PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah adalah PT (Persero) Asuransi Kredit Indonesia dengan kepemilikan saham sebesar 99,99% dan Yayasan Dana Kesejahteraan Karyawan Askrindo (YDKKA) dengan kepemilikan saham sebesar 0,01%.



SHAREHOLDERS

As of December 31, 2018, ultimate shareholders and controllers of PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah were PT (Persero) Asuransi Kredit Indonesia with the share ownership of 99.99% and Yayasan Dana Kesejahteraan Karyawan Askrindo (YDKKA) with the share ownership of 0.01%.

■ PT Askrindo (Persero) **99,99%**

■ YDKKA
 (Yayasan Dana Kesejahteraan
 Karyawan Askrindo) **0,01%**

KEPEMILIKAN SAHAM OLEH DIREKTUR, KOMISARIS, DAN DEWAN PENGAWAS

Seluruh anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan tidak memiliki saham PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah, baik secara langsung maupun tidak langsung.

SHARE OWNERSHIP BY DIRECTOR, COMMISSIONER, AND SUPERVISORY BOARD

All members of the Board of Directors, Board of Commissioners, and Sharia Supervisory Board of the Company do not have the shares of PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah, both directly and indirectly.

INFORMASI HARGA SAHAM

Hingga tahun 2018, Perseroan tidak menerbitkan dan memperdagangkan sahamnya kepada publik dan tidak terdaftar di bursa efek. Dengan demikian, Perseroan tidak menyajikan informasi mengenai jumlah saham yang beredar, harga dan volume perdagangan saham maupun informasi mengenai kapitalisasi pasar selama dua tahun, dalam bentuk tabel maupun grafik pada Laporan Tahunan 2018.

INFORMATION ON SHARE PRICE

Up to 2018, the Company has not issued and traded its shares to public and it has not been listed in the stock exchange. Therefore, the Company does not provide information regarding the number of listed shares, prices, and volume of share trading, as well as the information on market capitalization for two years, either in table or graphic in the 2018 Annual Report.

KRONOLOGIS PENERBITAN SAHAM

Karena Perseroan tidak menerbitkan dan memperdagangkan sahamnya kepada publik termasuk *private placement* dan/atau pencatatan saham, maka di Laporan Tahunan 2018 Perseroan tidak mencantumkan informasi mengenai penerbitan saham dan tindakan korporasi atas saham yang dimiliki.

CHRONOLOGY OF SHARE ISSUANCE

Because the Company does not issue and trade any shares to the Public, including private placement and/or share record, the Company does not include any information regarding share issuance and corporate action on the shares owned in the 2018 Annual Report.

PENERBITAN OBLIGASI, SUKUK DAN EFEK LAINNYA

Per 31 Desember 2018, Perseroan tidak menerbitkan dan/atau mencatatkan obligasi, sukuk, maupun efek lainnya di bursa manapun, sehingga di Laporan Tahunan 2018 tidak memiliki informasi mengenai kronologi penerbitan dan pencatatan obligasi, sukuk, dan efek lainnya.

ISSUANCE OF BONDS, SUKUK, AND OTHER SECURITIES

As of December 31, 2018, the Company did not issue and/or record any bonds, sukuk, and other securities in any stock exchange, so there is no information on the chronology of issuance and record of bonds, sukuk, and other securities in the 2018 Annual Report.

Peristiwa Penting Tahun 2018

Important Events in 2018



22 Januari 2018

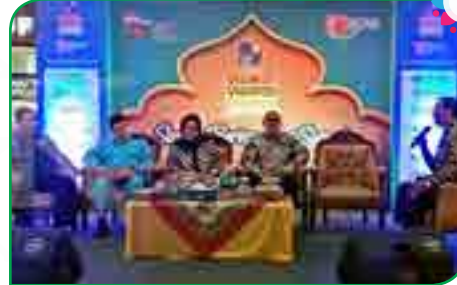
January 22, 2018

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB)

Bertempat di PT Asuransi Kredit Indonesia (Persero), Jalan Angkasa Blok B-9, Kav. 8, Kemayoran, Jakarta Pusat, Perseroan menyelenggarakan RUPS LB.

Extraordinary General Meeting of Shareholders

The Company held the Extraordinary General Meeting of Shareholders at PT Asuransi Kredit Indonesia (Persero), Jalan Angkasa Blok B-9, Kav. 8, Kemayoran, Jakarta Pusat.



24 Juli 2018

July 24, 2018

Turut Serta dalam IB Vaganza 2018

Untuk meningkatkan *brand awareness*, Perseroan berpartisipasi dalam acara IB Vaganza 2018. Acara pameran produk dan jasa perbankan/keuangan Syariah ini digelar oleh OJK bersama dengan industri perbankan Syariah dan keuangan Syariah.

Participating in IB Vaganza 2018

To increase brand awareness, the Company participated in the IB Vaganza 2018 event. This exhibition of Sharia banking/financial products and services was held by OJK in cooperation with Sharia banking and finance industry.



20 Juli 2018

July 20, 2018

Penandatanganan Kontrak Kerjasama dengan Bank Jatim

Perseroan menandatangani perpanjangan kontrak kerjasama dengan Bank Jatim. Melalui penandatanganan kontrak ini, Perseroan melakukan ekspansi beberapa produk.

Signing of a Cooperation Contract with Bank Jatim

The company signed a renewed cooperation contract with Bank Jatim. Through the signing of this contract, the Company had expanded several products.



12 September 2018

September 12, 2018

Turut Serta dalam Expo IKNB Syariah

Perseroan turut serta dalam Expo Industri Keuangan Non Bank (IKNB) yang diselenggarakan oleh OJK di Palembang dengan membuka *booth* pameran serta mensosialisasikan industri penjaminan Syariah kepada masyarakat.

Participating in the IKNB Syariah Expo

The company participated in the Non-Bank Financial Industry Expo (IKNB) organized by OJK in Palembang by opening an exhibition booth and disseminating Sharia guarantee industry to the public.



13 September 2018

September 13, 2018

Salurkan Dana Bantuan senilai Rp100 juta

Melalui Aksi Cepat Tanggap (ACT), Perseroan menyalurkan dana bantuan sebesar Rp100 juta untuk korban gempa Lombok.

Distributing Rp100 million of donation fund

Through Aksi Cepat Tanggap (ACT), the Company distributed Rp100 million of donation fund for the victims of Lombok earthquake.



19 Oktober 2018

October 19, 2018

Penandatanganan Kerjasama dengan Bank NTB Syariah

Perseroan menandatangani kerjasama dengan Bank NTB Syariah untuk beberapa produk.

Signing of Cooperation with Bank NTB Syariah

The company signed a cooperation contract with Bank NTB Syariah for several products.



8 Oktober 2018

October 8, 2018

Raih Penghargaan TOP CSR 2018

Perseroan mendapatkan penghargaan Top CSR 2018 dengan kategori Top CSR Improvement 2018 dari majalah Topbusiness untuk program-program CSR tepat sasaran yang dijalankan oleh Perseroan.

Winning TOP CSR Award 2018

The Company received Top CSR award 2018 for the category of Top CSR Improvement 2018 from Topbusiness magazine in recognition of on-target CSR programs implemented by the Company.



22 November 2018

November 22, 2018

Askrindo Syariah Ikut Meriahkan 1HRAM Fair 2018

Turut serta dalam 1HRAM Fair 2018, Perseroan senantiasa mendukung inovasi produk keuangan dan teknologi kreatif yang diharapkan dapat mendorong keamanan, kenyamanan, dan kepercayaan pasar, serta iklim industri umroh yang sehat.

Askrindo Syariah Participated in Enlivening 1HRAM Fair 2018

Participating in the 1HRAM Fair 2018, the Company continued to support financial product innovation and creative technology that were expected to increase security, comfort and market confidence, as well as a healthy climate for the Umrah industry.



28 November 2018

November 28, 2018

Turut Serta dalam Indonesia Syariah Fair (Insyaf)

Perseroan menjadi salah satu pembicara dalam acara Insyaf yang bertajuk "Peran Penjaminan Syariah Sebagai Pendamping Pertumbuhan UMKM" yang diadakan Insyaf di Jakarta.

Participate in Indonesia Syariah Fair (Insyaf)

The Company was one of the speakers at the Insyaf event entitled "The Role of Sharia Guarantee as an Assistant to MSME Growth" which was held by Insyaf in Jakarta.

Penghargaan dan Sertifikasi

Achievements and Certification

PENGHARGAAN / ACHIEVEMENT

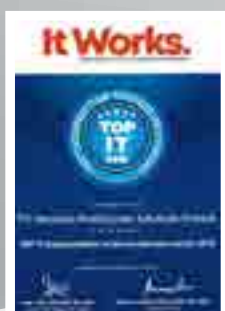
No	Penghargaan / Achievement	Tingkat Penghargaan / Scope Level	Lembaga Yang Memberikan Penghargaan / The Institution Presenting the Award	Waktu Diterima / Time of Receipt
1	The Most Trusted Company in Service and Customer Satisfaction of the Year 2018	Nasional / National	Indonesia Development Achievement Foundation	19 Oktober 2018 / October 19, 2018
2	TOP CSR Improvement 2018	Regional / Regional	KNKG, Indonesia CSR Society	4 Oktober 2018 / October 4, 2018
3	TOP IT Implementation on Sharia Insurance Sector 2018	Nasional / National	IT Works	6 Desember 2018 / December 6, 2018

SERTIFIKASI / CERTIFICATION

No	Sertifikat / Certificate	Lembaga Yang Memberikan Sertifikat / The Institution Granting the Certificate	Masa Berlaku / Effective Period
1	ISO 9001:2015	United Registrar of System Certification	15 Februari 2020 / February 15, 2020
2	ISO 27001:2013	PT ACS Registrasi Indonesia	17 November 2018 / November 17, 2018

**TOP IT
Implementation on
Sharia Insurance
Sector 2018**

IT Works



**TOP CSR
Improvement 2018**
KNKG, Indonesia CSR
Society



ISO 9001:2015
United Registrar of
System Certification



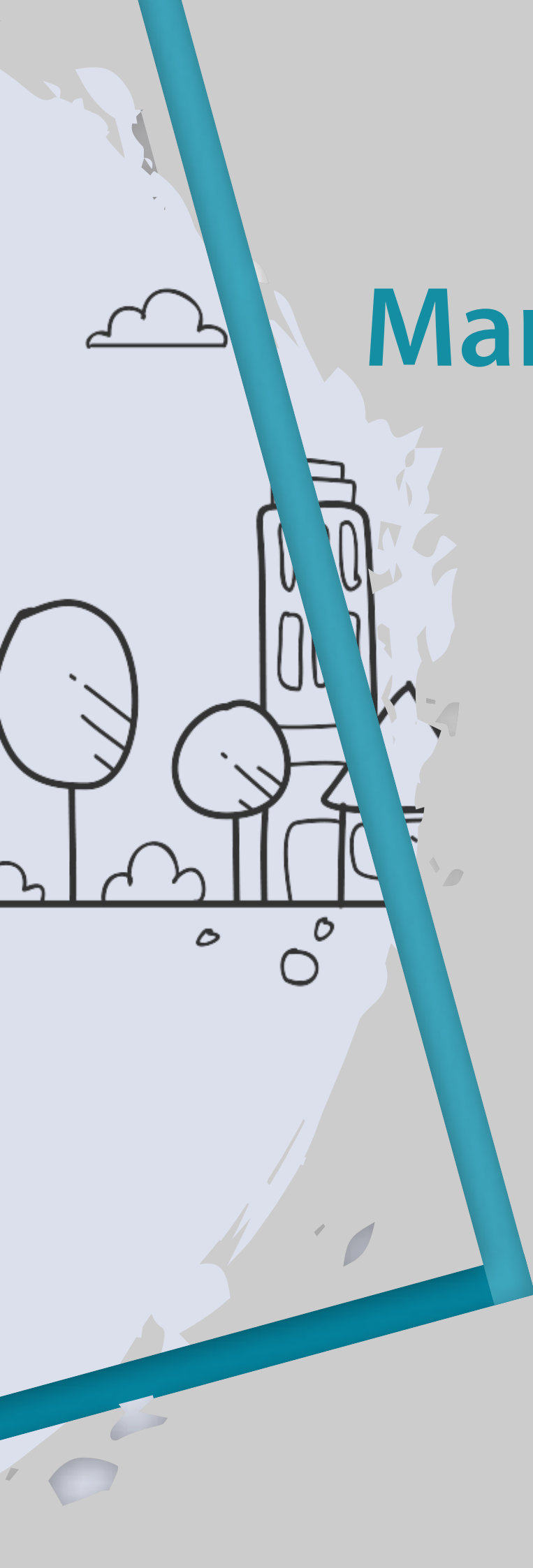
**The Most Trusted Company
in Service and Customer
Satisfaction of the Year 2018**
Indonesia Development
Achievement Foundation



ISO 27001:2013
PT ACS Registrasi
Indonesia





A stylized illustration of a landscape on the left side of the page. It features a blue diagonal line running from the top left towards the bottom right. To the left of this line, there are simple line drawings of a cloud, a tall building, and several trees. The background is a light gray gradient.

Laporan Manajemen

Management Report

Didukung oleh kolaborasi yang solid seluruh insan Perseroan, serta ketaatan atas peraturan perundang-undangan yang berlaku, Askrindo Syariah pada tahun 2018 berhasil memperbaiki diri dan mampu memiliki fundamental yang cukup untuk menghadapi berbagai tantangan yang ada.

Supported by solid collaboration of all the Company's employees, as well as compliance with applicable laws and regulations, in 2018 Askrindo Syariah managed to improve its performance and build fundamental to tackle various challenges.

Laporan Dewan Komisaris

The Board of Commissioners' Report

**Menutup tahun
2018, Perseroan
berhasil
meningkatkan
kinerja dengan
pencapaian yang
optimal.**

Closing 2018, the Company
succeeded in enhancing its
performance with optimum
achievement.

Budi Wisaksono
Komisaris Utama
President Commissioner

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Para pemegang saham yang kami hormati,

Dear valued shareholders,

Menutup tahun 2018, Perseroan berhasil meningkatkan kinerja dengan pencapaian yang optimal. Didukung kolaborasi yang solid seluruh insan Perseroan, serta ketaatan atas peraturan perundang-undangan yang berlaku, Perseroan berhasil memperbaiki diri dan mampu memiliki fundamental yang cukup untuk menghadapi berbagai tantangan usaha yang ada.

Sebagai bagian dari tanggung jawab yang dimiliki, Dewan Komisaris menyampaikan laporan berikut sebagai komitmen atas pemenuhan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Laporan ini berisi beberapa poin penting yang menjadi fokus pelaksanaan tugas Dewan Komisaris, di antaranya ialah penilaian atas kinerja Direksi, pengawasan atas implementasi strategis Perseroan, pandangan atas prospek usaha, perkembangan implementasi tata kelola, pelaksanaan kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan, frekuensi dan cara pemberian nasihat Dewan Komisaris kepada Direksi, serta informasi perubahan komposisi Dewan Direksi.

PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS DI 2018

Sepanjang 2018, Dewan Komisaris senantiasa membangun hubungan yang baik dengan Direksi guna memaksimalkan tugas pengawasan atas mekanisme kepengurusan yang dijalankan oleh manajemen. Dewan Komisaris juga aktif memberikan pandangan dan rekomendasi atas berbagai permasalahan yang memerlukan arahan.

Fokus utama pengawasan Dewan Komisaris tahun ini utamanya berkenaan dengan upaya penyempurnaan organisasi dan operasional. Dari sisi organisasi, pelaksanaan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik *good corporate governance* (GCG) harus ditingkatkan. Sementara dari segi operasional, beberapa penyesuaian dengan perkembangan industri terkini harus segera dijalankan sehingga mampu meningkatkan kinerja Perseroan yang maksimal.

To end 2018, the Company managed to enhance its performance with optimum achievements. Supported by the solid collaboration of all people within the Company, and compliance with the prevailing laws and regulations, the Company succeeded to improve itself and to have strong fundamental to face the business challenges.

As a part of the responsibilities, the Board of Commissioners would like to submit the following report as a commitment to fulfill the principles of good corporate governance. This report include several important points that have been the focus in implementing the Company's strategies, including assessment on the performance of the Board of Directors, supervision on the Company's strategic implementation, view on the business prospect, development of governance implementation, performance of corporate social responsibility activities, frequency and how the Board of Commissioners provides advices to the Board of Directors, as well as information on the changes in the composition of the Board of Directors.

PERFORMANCE OF DUTIES AND RESPONSIBILITIES OF THE BOARD OF COMMISSIONERS IN 2018

During 2018, the Board of Commissioners constantly developed good relationship with the Board of Directors to maximize its supervisory duties on the mechanism of management carried out by the management. The Board of Commissioners also actively gave their view and recommendations on various issues that need direction.

The main focus of the Board of Commissioners' supervision in this year principally related to the effort to refine the organization and operation. From the organizational side, the implementation of good corporate governance (GCG) principles must be improved. Meanwhile, from the operational side, several adjustments to the latest industry development needs to be made to maximize the Company's performance.

Tugas ini kami jalankan melalui mekanisme rapat internal dan rapat gabungan tiga bulanan bersama Direksi, di samping pertemuan lain apabila diperlukan. Di sepanjang 2018, Dewan Komisaris telah melaksanakan rapat gabungan bersama Direksi sebanyak 12 kali.

Dalam pertemuan-pertemuan tersebut, Dewan Komisaris membahas dan memberikan nasihat kepada Direksi utamanya tentang langkah-langkah strategis terkait dinamika internal, penyesuaian struktur Perseroan yang efektif dan efisien, perbaikan sistem layanan, perkembangan pasar, serta ekspansi usaha.

ARAHAN DAN REKOMENDASI DEWAN KOMISARIS KEPADA DIREKSI

Sepanjang 2018, Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas pengawas pengelolaan Perseroan dengan memberikan nasihat maupun arahan-arahan kepada Direksi untuk memastikan bahwa pengelolaan Perseroan senantiasa memperhatikan praktik pengelolaan perusahaan yang baik. Adapun pokok-pokok arahan atau rekomendasi yang diberikan Dewan Komisaris kepada Direksi terkait peningkatan kinerja Perseroan sepanjang tahun 2018 antara lain sebagai berikut:

- *Underwriting* : 12 kali
- *Investasi* : 12 kali
- *Keuangan & Umum* : 12 kali
- *Pengendalian Internal* : 12 kali

Seiring dengan pertumbuhan yang dicapai, ditambah dengan tuntutan internal dan persaingan eksternal yang tidak mudah, kami melihat bahwa dua masalah utama harus segera direspons secara cepat oleh manajemen.

Sebagai *anchor problem*, kami melihat bahwa evaluasi atas sistem teknologi informasi yang dimiliki sangatlah mendesak. Keunggulan Perseroan sebagai salah satu pemain utama di industri penjaminan berbasis syariah harus didukung oleh TI terkini, sehingga menjamin hasil optimal yang berkelanjutan.

We carry out this duty through the mechanisms of internal meetings and joint meeting every three month with the Board of Directors, besides other meetings if necessary. During 2018, the Board of Commissioners held 12 joint meetings with the Board of Directors.

In the meetings, the Board of Commissioners discussed and provided advices to the Board of Directors, mainly regarding the strategic steps related to internal dynamics, the Company's effective and efficient structure adjustment, service system improvement, market development, and business expansion.

DIRECTION AND RECOMMENDATION OF THE BOARD OF COMMISSIONERS TO THE BOARD OF DIRECTORS

During 2018, the Board of Commissioner have performed its supervisory and management duties for the Company by providing advices and directions to the Board of Directors to ensure that the Company's management always considering the good corporate governance practices. The main focuses of the Company throughout the year included:

- *Underwriting* : 12 times
- *Investment* : 12 times
- *Finance & General* : 12 times
- *Internal Control* : 12 times

In line with the growth, as well as internal demand and tough external competition, we identify the two main issues that need quick response by the management.

As the anchor problem, we see that the evaluation on information technology system is highly urgent. The advantage of the Company as one of the main players in the Sharia-based guarantee industry must be supported by the latest IT in order to assure sustainable optimum result.

Kedua, implementasi rencana tersebut tentunya membutuhkan dukungan Sumber Daya Insani yang kompeten. Oleh karena itu, Dewan Komisaris berpesan kepada Direksi agar senantiasa memberikan perhatian lebih pada pengembangan karyawan. Karyawan harus ditempatkan sebagai mitra strategis Perseroan. Hal ini berarti peningkatan kompetensi seluruh karyawan, termasuk kesejahteraan karyawan harus diutamakan.

PENILAIAN TERHADAP KINERJA DIREKSI

Dalam rangka mengawasi efektivitas dan produktivitas Perseroan, Dewan Komisaris secara berkala melakukan penilaian atas kinerja pengelolaan Perseroan oleh Direksi yang didasarkan pada target kinerja dalam RKAP serta realisasi kinerja tahun sebelumnya. Sepanjang 2018, Dewan Komisaris menilai Direksi telah mampu merealisasikan berbagai inisiatif strategis sehingga mampu meningkatkan kinerja Perseroan dalam tataran yang positif, baik dari sisi operasional maupun finansial.

Atas nama Dewan Komisaris, kami sangat mengapresiasi inisiatif Direksi untuk melakukan penguatan internal Perseroan. Diawali dengan penunjukan manajemen baru, Direksi kemudian melanjutkannya dengan melakukan penguatan fungsi, tanggung jawab, dan kewenangan di tiap-tiap level jabatan. Upaya tersebut akan semakin meningkatkan sistem tata kelola Perseroan yang profesional dan transparan.

Dari sisi finansial, pertumbuhan yang dicapai oleh Perseroan di bawah pengelolaan Direksi pada tahun ini sangatlah memuaskan. Perseroan berhasil meningkatkan seluruh indikator kinerja keuangan utama dengan pertumbuhan yang sangat signifikan. Dalam pantauan kami, pencapaian tahun ini berhasil melampaui target-target yang telah ditetapkan di awal tahun, dan mengalami peningkatan dibandingkan dengan kinerja finansial tahun sebelumnya sebagaimana tercermin dalam Laporan Keuangan Perseroan. Tingkat kesehatan Perseroan di 2018 juga mengalami peningkatan dari skor 76,00 di 2017 menjadi 78,50 di 2018.

Kami berharap, keberhasilan untuk bertumbuh senantiasa menjadi tradisi yang terus dipertahankan oleh seluruh jajaran Perseroan. Sehingga Perseroan senantiasa berkembang dari masa ke masa dan memberikan yang terbaik bagi para pemegang saham dan segenap pemangku kepentingan lainnya.

Second, the implementation of the plan needs the support of competent human resources. Therefore, the Board of Commissioners instructs the Board of Directors to always pay attention to the employee development. Employees must be positioned as strategic partners of the Company, which means that the improvement of all employees' competence, including their welfare, must be prioritized.

ASSESSMENT ON THE PERFORMANCE OF THE BOARD OF DIRECTORS

In order to supervise the Company's effectiveness and productivity, the Board of Commissioners regularly assesses the performance of the Company's management by the Board of Directors based on the performance target in the RKAP and the realization of performance in the previous year. Throughout 2018, the Board of Commissioners considered that the Board of Directors has been able to realize various strategic initiatives, so that they were able to improve the Company's performance in a positive manner, both in terms of operational and financial.

On behalf of the Board of Commissioners, we vastly appreciate the initiative of the Board of Directors to strengthen the Company's internal. Initiated with new management appointment, the Board of Directors continued it by reinforcing its functions, responsibilities, and authorities at every position level. The effort improves the Company's professional and transparent governance system.

In terms of financial, the Company's growth under the Board of Directors' management in this year is very satisfying. The Company succeeds to increase all main financial performance indicators with considerable growth. In our observation, the achievements in this year manage to pass the targets set in the beginning of the year, and increase compared to the financial performance in the previous year as indicated in the Company's Financial Statements. The Company's health level in 2018 also increased from the score of 76.00 in 2017 to 78.50 in 2018.

We hope that the success will constantly grow to be a tradition that will be maintained by the entire elements of the Company. As a result, the Company will continuously develop from time to time and give the best result to the shareholders and all other stakeholders.

PANDANGAN ATAS PROSPEK USAHA

Secara garis besar, Dewan Komisaris berpandangan bahwa prospek usaha yang telah disusun Direksi untuk tahun 2019 dan jangka panjang sudah baik dan sangat menjanjikan, selaras dengan arah dan tujuan Perseroan. Hal ini didukung dengan kondisi perekonomian dan industri penjaminan berbasis syariah yang diprediksi akan terus mengarah pada pertumbuhan. Kami menilai bahwa prospek usaha Perseroan pada masa mendatang akan semakin optimistis, dan dengan penerapan strategi yang tepat, kami yakin Perseroan mampu meraih peluang dan kesempatan yang ada.

Dewan Komisaris, bersama Komite Penunjang Dewan Komisaris akan senantiasa mengawal dan mengingatkan Direksi untuk senantiasa melaksanakan program-program strategis dengan tetap mempertimbangkan kondisi usaha yang dihadapi. Dewan Komisaris akan siap memberikan masukan dan saran guna memastikan Perseroan mampu mengatasi setiap kendala yang dihadapi dan mencatatkan kinerja yang membesarkan hati.

PANDANGAN ATAS PERKEMBANGAN TATA KELOLA PERUSAHAAN

Upaya Perseroan untuk mewujudkan visi menjadi perusahaan terkemuka, terus dilaksanakan melalui penguatan di berbagai lini, salah satunya penerapan tata kelola perusahaan yang baik atau *Good Corporate Governance* (GCG) secara menyeluruh. Perseroan meyakini bahwa terdapat relasi erat antara kualitas penerapan GCG yang inklusif di Perseroan dengan peningkatan kinerja. Meningkatkan kualitas penerapan GCG dengan membangun lingkungan bisnis yang sehat, dinamis, serta adaptif mengikuti perkembangan zaman berarti memberikan keyakinan terhadap pemegang saham maupun pemangku kepentingan lainnya akan kinerja yang dijalankan Perseroan.

Dewan Komisaris menyadari bahwa pengelolaan Perseroan dan praktik bisnis yang berlandaskan pada prinsip GCG bertujuan untuk mendorong tumbuh dan berkembangnya budaya korporat yang positif dan berlandaskan kepada nilai moral yang tinggi, kepatuhan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kesadaran akan adanya kewajiban jajaran perusahaan baik kepada pemegang saham maupun seluruh pemangku kepentingan lainnya.

OUTLOOK ON THE BUSINESS PROSPECTS

In overall, the Board of Commissioners has a view that the business prospects that have been formulated by the Board of Directors for 2019 and the long term are very well and promising, and also aligned with the Company's direction and objective. This is supported by the economic condition and Sharia-based guarantee industry that is predicted to grow. We consider that the Company's prospect in the future will be more optimistic and with the implementation of the appropriate strategies, we believe that the Company will be able to reach its opportunity and chance.

The Board of Commissioners, along with the Supporting Committee of the Board of Commissioner, will continuously accompany and remind the Board of Directors to always carry out strategic programs by considering the business condition that will be faced. The Board of Commissioners is ready to give inputs and suggestions in order to ensure that the Company is able to overcome any obstacles and record an encouraging performance.

OUTLOOK ON THE CORPORATE GOVERNANCE OUTLOOK

The Company's efforts to realize the vision as a leading company are done continuously through the strengthening in various lines, one of which is the implementation of the overall Good Corporate Governance (GCG). The Company believes that there is a close relation between the qualities of inclusive GCG implementation in the company with the performance improvement. Improving the GCG implementation by creating a healthy, dynamic, and adaptive business environment by following the current development will give a sense of trust to the shareholders and other stakeholders to the Company's performance.

The Board of Commissioners realizes that the Company's management and business practices which are based on the GCF principles are intended to drive growth and develop positive corporate culture that is based on high moral values, compliance with the prevailing laws and regulations, and the awareness of the Company's obligations to the shareholders and other stakeholders.

Sebagai unsur mendasar dalam aspek manajemen, Perseroan menempatkan GCG sebagai pedoman untuk mewujudkan sistem manajemen korporat yang profesional dengan bercirikan kerja sistematis, efisien, transparan, akuntabel dan bertanggung jawab serta menumbuhkan budaya kepatuhan (*compliance*) dan sadar risiko (*risk awareness*). Tujuan jangka panjang dari pembentukan sistem manajemen tersebut adalah untuk meningkatkan kemandirian dan daya tahan seluruh Organ Perseroan terhadap praktik-praktik yang bertentangan dengan prinsip-prinsip GCG.

Komitmen Perseroan dalam peningkatan penerapan GCG di Perseroan tercermin dari hasil implementasi *assessment* yang dilaksanakan pada 2018 dengan skor sebesar 73,30. Meski skor yang dicapai tahun ini meningkat dibandingkan tahun sebelumnya, namun Dewan Komisaris tetap mengimbau agar kualitas penerapan GCG di masa depan dapat terus ditingkatkan, salah satunya dengan cara menindaklanjuti rekomendasi-rekomendasi yang diperoleh dari hasil *assessment* tersebut.

PENERAPAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

Selain berfokus pada peningkatan kinerja, Perseroan juga berkomitmen untuk senantiasa berkontribusi dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan melalui pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan.

Kegiatan tanggung jawab sosial Perusahaan dijalankan dengan mengacu pada UUPT dan Peraturan Pemerintah No. 47 tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas. Selain itu peran Perseroan sebagai Badan Usaha Milik Negara juga membuat pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan (Corporate Social Responsibility/"CSR") mengacu kepada Keputusan Menteri BUMN No. Per – 05/MBU/2007 tanggal 27 April 2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil & Program Bina Lingkungan sebagaimana telah beberapa kali mengalami perubahan terakhir dengan Peraturan Menteri BUMN Nomor : PER-02/MBU/7/2017 tanggal 5 Juli 2017 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor : Per-09/MBU/07/2015 tanggal 03 Juli 2015 Tentang Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara.

As a basic element in management aspect, the Company puts GCG as guidance to realize a professional corporate management system with the characters of systematic, efficient, transparent, accountable, and responsible, as well as build a compliance culture and risk awareness. The long-term objective of the management system establishment is to increase independency and endurance of the entire Company's organs against practices that do not conform to the GCG principles.

The Company's commitment in improving the GCG implementation in the Company is reflected from the implementation result of the assessment conducted in 2018 with the score of 73.30. Although the score in this year rose from the previous year, the Board of Commissioners appeals that the quality of GCG implementation in the future can be improved, one of which is by following up the recommendations from the assessment results.

IMPLEMENTATION OF THE CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITIES

Besides focusing on improving the performance, the Company also commits to constantly contribute to the realization of sustainable development through the implementation of social and environmental responsibilities.

The Company's corporate social responsibility activity is performed by referring to the Limited Liability Company Law and Government Regulation No. 47 of 2012 regarding Social Responsibilities and Environment of Limited Liability Company. Furthermore, the Company's role as a State-Owned Enterprise has also caused the implementation of corporate social responsibility refer to Minister of State-Owned Enterprises Decision No. Per – 05/MBU/2007 dated April 27, 2007 regarding Partnership Program of State-Owned Enterprises with Small Business & Community Development Program as amended several times and last by Minister of State-Owned Enterprises Regulation No. PER-02/MBU/7/2017 dated July 5, 2017 regarding Second Amendment to Minister of State-Owned Enterprises Regulation No. Per-09/MBU/07/2015 dated July 03, 2015 regarding Partnership Program and Community Development of State-Owned Enterprises.

Pelaksanaan kegiatan tanggung jawab sosial Perseroan dilandasi keyakinan bahwa pertumbuhan Perseroan harus selaras dengan peningkatan kesejahteraan dan taraf hidup komunitas sekitar, baik secara ekonomi maupun sosial. Dengan demikian, terjalin hubungan yang harmonis dan saling mendukung antara Perseroan dengan masyarakat. Untuk mewujudkan hal tersebut, Perseroan melaksanakan berbagai kegiatan di bidang sosial, ekonomi dan lingkungan terhadap masyarakat melalui program peningkatan kehidupan kemasyarakatan (*community development*) yang dilakukan di sepanjang tahun 2018.

PENILAIAN KINERJA KOMITE DI BAWAH DEWAN KOMISARIS

Pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan Dewan Komisaris dibantu oleh Komite Audit. Dewan Komisaris menilai kinerja Komite Audit di sepanjang 2018, berjalan dengan sangat baik dan memuaskan.

PANDANGAN ATAS PENERAPAN WHISTLEBLOWING SYSTEM (WBS)

Keberadaan WBS ditujukan agar Perseroan dapat mendeteksi secara dini (*early warning*) atas kemungkinan terjadinya masalah akibat suatu pelanggaran, sehingga dapat mencegah segala bentuk penyimpangan di Perseroan yang berpotensi menimbulkan kerugian termasuk hal-hal yang dapat merusak citra Perseroan.

Di sepanjang 2018, Dewan Komisaris senantiasa menekankan kepada seluruh insan Perseroan untuk meningkatkan kesadaran serta berperan aktif dalam pengelolaan sistem pelaporan pelanggaran, dengan tidak ragu melaporkan setiap adanya pelanggaran yang ditemukan. Perseroan menjamin perlindungan terhadap pelapor dari segala bentuk ancaman, intimidasi, ataupun tindakan tidak menyenangkan dari pihak manapun selama pelapor menjaga kerahasiaan pelanggaran yang diadukan oleh pihak manapun.

Pada 2018, Perseroan tidak mendapati adanya pengaduan WBS. Ke depan, Perseroan akan terus melanjutkan efektivitas pengelolaan WBS dengan menitikberatkan pada upaya preventif melalui sosialisasi yang tepat sasaran dan dilakukan secara berkala.

The implementation of corporate social responsibility is based on the trust that the Company's growth must be consistent with the improvement of surrounding community welfare and standard of living, both economically and socially. Thus, a harmonious and encouraging relation between the Company and public can be cultivated. To achieve such condition, the Company performs various activities in social, economic, and environmental sectors for the public through community development that has been applied throughout 2018.

ASSESSMENT ON THE PERFORMANCE OF COMMITTEES UNDER THE BOARD OF COMMISSIONERS

The performance of duties and supervisory function of the Board of Commissioners is assisted by the Audit Committee. The Board of Commissioners considers that the performance of the Audit Committee throughout 2018 was very well and satisfying.

VIEW OF THE WHISTLEBLOWING SYSTEM (WBS) IMPLEMENTATION

The establishment of WBS aims to enable the Company to detect early potential problems (*early warning*) caused by a violation, so as to prevent all forms of deviations in the Company that have the potential to cause harm, including other matters that can damage the Company's reputation.

Throughout 2018, the Board of Commissioners continues to emphasize all people of the Company to raise awareness and play an active role in managing the whistleblowing system by firmly reporting any violations found with no hesitation. The Company guarantees protection against whistleblowers from all forms of threats, intimidation, or unpleasant actions from any party as long as the whistleblowers maintains the confidentiality of violations submitted by any party.

In 2018, the Company did not have any WBS complaints. Going forward, the Company will continue to effectively manage WBS by focusing on preventive efforts through periodical on-target dissemination.

PERUBAHAN KOMPOSISI DEWAN KOMISARIS

Pada 2018, terdapat perubahan pada susunan Dewan Komisaris Perseroan dengan diangkatnya Pak Bambang Hermanto sebagai Komisaris Perseroan berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa pada 16 Mei 2018 dan Surat Menteri BUMN No. SR-586/MBU/10/2017. Susunan Dewan Komisaris Perseroan per 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

Komisaris Utama/Komisaris Independen / President Commissioner/Independent Commissioner : Budi Wisakseno
Komisaris / Commissioner : Bambang Hermanto

APRESIASI DAN PENUTUP

Mengakhiri laporan ini, Dewan Komisaris menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran Direksi dan karyawan yang telah berkontribusi aktif dalam meningkatkan pertumbuhan Perseroan. Dewan Komisaris juga menyampaikan terima kasih kepada Pemerintah selaku pemegang saham, Grup Askrindo, seluruh pemangku kepentingan lainnya, dan segenap mitra atas dukungan dan kepercayaan yang telah diberikan kepada Perseroan sehingga Perseroan mampu menorehkan kinerja terbaik tahun ini.

Ke depan, mari kita kuatkan tekad untuk terus menjaga kinerja positif tanpa mengesampingkan pengelolaan Perseroan yang dijalankan secara bersih, amanah, transparan, profesional dan inovatif dengan selalu menjunjung tinggi etika usaha serta menempatkan prioritas pada keberlanjutan Perseroan dan kepentingan Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan.

CHANGES IN THE COMPOSITION OF THE BOARD OF COMMISSIONERS

In 2018, there was a change in the composition of the Company's Board of Commissioners with the appointment of Mr. Bambang Hermanto as Commissioner of the Company based on the Resolution of the Extraordinary General Meeting of Shareholders on May 16, 2018 and Minister of SOE Letter No. SR-586/MBU/10/2017. The composition of the Company's Board of Commissioners as of 31 December 2018 is as follows:

APPRECIATION AND CLOSING

To end this report, the Board of Commissioners would like to appreciate the entire Board of Directors and employees that have actively contributed in improving the Company's growth. The Board of Commissioners would like also to thank the Government as the shareholders, Askrindo Group, all other stakeholders, and the entire partners for the support and trust given to the Company, so that the Company is able to deliver the best performance in this year.

In the future, let's be full of stronger determination to maintain positive performance without set aside the Company's management that is clean, trustful, transparent, professional, and innovative, by always upholding work ethics and prioritizing the Company's sustainability and the interest of the Shareholders and Stakeholders.

Jakarta, 10 Agustus 2019 / Jakarta, August 10, 2019

Atas nama Dewan Komisaris
On behalf of the Board of Commissioners



Budi Wisakseno
Komisaris Utama
President Commissioner

Laporan Direksi

The Board of Directors' Report

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Para pemegang saham yang kami hormati,

Dear valued shareholders,

Tahun 2018 merupakan awal baru bagi Perseroan untuk mewujudkan PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah yang lebih besar dan lebih menguntungkan di masa mendatang. Perjalanan panjang selama lebih dari 5 tahun telah memberikan landasan yang kokoh bagi Perseroan selaku pelopor perusahaan penjaminan berbasis syariah di Indonesia. Namun, catatan-catatan merah menuntut penyelesaian dengan cepat dan berbagai target harus ditingkatkan, sehingga visi sebagai perusahaan terkemuka dapat segera diwujudkan.

Perkembangan industri penjaminan dengan berbagai regulasi yang menyertai juga memberikan tantangan yang tidak mudah. Ditambah dengan persaingan usaha yang semakin ketat, tentunya memerlukan kejelian lebih tinggi dalam melihat peluang yang ada. Oleh karena itu, terobosan dalam tata kelola dan operasional harus dilakukan. Beruntung, posisi kuat Perseroan telah dikenal luas oleh masyarakat. Kekuatan ini menjadi modal bagi Perseroan untuk memantapkan arah menyongsong pertumbuhan yang berkelanjutan.

Atas nama Direksi, perkenankan kami melaporkan pertumbuhan Perseroan di sepanjang 2018. Pada tahun ini, kami berhasil meraih berbagai prestasi yang cukup memuaskan, namun kami juga mencatat beberapa capaian yang harus ditingkatkan di masa mendatang.

The year of 2018 was a new beginning for the Company to realize a greater and more profitable PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah in the future. The long journey for more than 5 years has been a solid foundation for the Company as the initiator of Sharia-based guarantee company in Indonesia. However, some poor performance expects quick solution and various targets must be improved, so that the vision as a leading company can be achieved immediately.

The development of guarantee industry with a range of related regulations also presents tough challenges. In addition, the intense business competition also needs more considerable foresight to identify the existing opportunities. The breakthrough in governance and operational, therefore, must be made. Luckily, the Company's strong position has been known by the public. Such advantage must be used as an asset for the Company to stabilize its direction toward a sustainable growth.

On behalf of the Board of Directors, please allow us to report the Company's growth throughout 2018. In this year, we managed to acquire some satisfying achievements, but we also record some performance that needs to be developed in the future.

**Tahun 2018
merupakan awal
baru bagi Perseroan
untuk mewujudkan PT
Jaminan Pembiayaan
Askrindo Syariah yang
lebih besar dan lebih
menguntungkan di
masa mendatang.**

2018 was a new beginning
for the Company to realize a
bigger and more profitable PT
Jaminan Pembiayaan Askrindo
Syariah in the future.

Soegiharto
Direktur Utama
President Director



PELUANG DAN TANTANGAN DI 2018

a. Kondisi Ekonomi Global

Perang dagang antara Amerika Serikat (AS) dan China berisiko memberikan dampak pada perekonomian global. Taiwan, Korea Selatan, dan negara-negara Asia Tenggara, sebagai eksportir terbesar barang setengah jadi ke China, yang kemudian merakit potongan-potongan tersebut menjadi produk jadi untuk dikirim ke tujuan akhir seperti AS, akan mengalami tekanan jika perang dagang terus berlanjut.

Seiring dengan tegangan yang terjadi, Badan Pusat Statistik (BPS) memberikan data bahwa perang dagang antara AS dengan China ternyata tidak memberikan dampak yang signifikan terhadap perekonomian Indonesia. Hal ini seperti tampak pada kinerja ekspor nasional ke kedua negara tersebut yang tetap mencatatkan pertumbuhan.

Meski demikian, BPS juga mengingatkan bahwa pertumbuhan Indonesia sangat bergantung pada kemampuan perdagangan Indonesia dengan negara lain. Ini perlu diwaspadai, karena apabila perang dagang antara AS dan China terus berlanjut, dampak tidak langsung mungkin akan dirasakan oleh Indonesia.

b. Kondisi Ekonomi Nasional

Sinergi kebijakan antar lembaga keuangan negara dan otoritas terkait lainnya terbukti mampu mengarahkan perekonomian Indonesia 2018 tetap stabil dan tumbuh lebih baik. Berbagai indikator ekonomi pada triwulan IV 2018 menunjukkan perkembangan yang positif. Aliran masuk modal asing kembali meningkat pada akhir 2018, didorong oleh daya tarik pasar keuangan domestik yang tinggi dan prospek perekonomian yang tetap baik, serta ketidakpastian pasar keuangan global yang menurun. Impor juga mulai melambat pada triwulan IV 2018, sejalan dengan dampak kebijakan yang diambil oleh Pemerintah.

Di tengah gejolak sektor eksternal yang ada, inflasi 2018 tetap terkendali pada level yang rendah dan stabil. Inflasi indeks harga konsumen (IHK) tercatat sebesar 3,13% dan berada dalam rentang sasaran $3,5 \pm 1\%$, ditopang oleh inflasi inti dan inflasi *volatile food* (VF) yang terjaga, serta inflasi *administered prices* (AP) yang rendah. Perkembangan ini juga menjadikan inflasi Indonesia berturut-turut dalam empat tahun terakhir berada pada kisaran sasaran.

OPPORTUNITIES AND CHALLENGES IN 2018

a. Global Economic Condition

The trade war between the United States and China may impact the global economy. Taiwan, South Korea, and countries in the Southeast Asia, as the largest exporter of semi-finished goods to China, which then assembles the pieces into finished goods to be delivered to the final destination such as the US, will be under pressure if the trade war continues.

Along with the tension, the Statistics Indonesia (Badan Pusat Statistik/BPS) provides some data that the trade war between the US and China in fact does not significantly affect the Indonesian economy. This condition seems to be shown in the national export performance to both countries, which keeps growing.

Nevertheless, BPS also reminds that the growth of Indonesia highly depends on its trading abilities with the other countries. It is important to be aware of such condition because if the trade war between the US and China continues, indirect impact may be felt by Indonesia.

b. National Economic Condition

The synergy of policies among the state financial institutions and the related authorities has proven to direct Indonesian economy in 2018 to a stable condition and better growth. Many economic indicators in the fourth quarter of 2018 indicated positive development. The foreign capital flow increased again at the end of 2018, encouraged by the considerable appeal of domestic financial market and favorable economic prospect, as well as the decreasing uncertainty of global financial market. The import also started to slow down in the fourth quarter of 2018, in line with the effect of the policies established by the Government.

Amidst the external sector turmoil, the 2018 inflation was still controlled at low and stable level. The inflation of consumer price index was recorded at 3.13% and it was within the target range of $3.5 \pm 1\%$, which was supported by the maintained core inflation and volatile food (VF) inflation, as well as low administered prices (AP) inflation. The development also has put Indonesian inflation within the target range in the last four consecutive years.

Penyaluran kredit tercatat meningkat dengan risiko kredit yang terkendali. Fungsi intermediasi terus menunjukkan peningkatan, sebagaimana terlihat dari pertumbuhan kredit yang naik menjadi 11,8% pada 2018. Di tengah pertumbuhan kredit yang membaik, risiko kredit juga terkelola dengan baik yang tercermin dari rasio NPL yang tetap rendah yakni 2,4% (gross) atau 1,0% (nett) dan berada pada level sehat di bawah 5%.

Daya tahan ekonomi yang baik di tengah ketidakpastian global yang tinggi mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap solid. Pertumbuhan ekonomi pada 2018 tercatat 5,17%, lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan pada tahun sebelumnya sebesar 5,07%. Angka ini merupakan capaian tertinggi dalam lima tahun terakhir. Perbaikan pertumbuhan ekonomi terutama ditopang oleh permintaan domestik yang kuat sebagai dampak atas konsumsi dan investasi yang tumbuh tinggi melalui pembangunan proyek infrastruktur yang berlanjut.

c. Perkembangan Perbankan Syariah

Perbankan syariah nasional dalam dekade terakhir menunjukkan pertumbuhan positif, tercermin dari volume usaha yang terus tumbuh, dana investasi dan dana titipan masyarakat serta penyaluran pembiayaan yang meningkat. Kinerja perbankan syariah tahun 2018 mengalami peningkatan lebih baik dibandingkan dengan 2017. Sampai dengan semester II 2018, Sejumlah bank syariah, meski masih mencatatkan rasio pembiayaan bermasalah atau *non-performing financing* (NPF) yang tinggi, tetap berhasil membangun kinerja keuangan yang membaik. Sedikitnya ada tiga bank syariah yang mencatatkan kenaikan laba hingga semester II 2018, yakni Bank Muamalat, Bank BJB Syariah, dan Bank Panin Dubai Syariah.

Sampai dengan Desember 2018 volume pembiayaan perbankan syariah (BUS, UUS dan BPRS) tercatat sebesar Rp329,27 triliun, terdiri dari komposisi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah sebesar Rp320,19 triliun dan komposisi BPRS sebesar Rp9,08 triliun. Pertumbuhan pembiayaan perbankan syariah per Desember 2018 *year on year* naik sebesar 12,21% dengan realisasi Desember 2017 sebesar Rp293,46 triliun menjadi Rp329,28 triliun.

Peningkatan dana pihak ketiga (DPK) sampai Desember 2018 mengalami pertumbuhan sebesar 11,1% menjadi Rp379,96 triliun dari Rp341,87 triliun pada tahun 2017. Pertumbuhan aset perbankan syariah mengalami peningkatan sebesar Rp53,58 triliun atau 11,9% dari periode Desember 2017.

The credit distribution was also recorded to increase with the controlled credit risk. The intermediation function also continues to rise, as indicated by the increasing credit growth to 11.8% in 2018. Amid the improving credit growth, the credit risk was also maintained well, as reflected in the low NPL ratio, which is 2.4% (gross) or 1.0% (net) and at the sound level of under 5%.

The great economic endurance during the high global uncertainty has driven solid Indonesian economic growth. The economic growth in 2018 was 5.17%, which was higher than the growth in the previous year of 5.07%. This figure is the highest achievement in the last five years. The improvement of economic growth was particularly supported by strong domestic demand as an effect of consumption and investment that grew highly through continuous infrastructure project development.

c. Sharia Banking Development

National Sharia banking in the last decade shows positive growth, which is reflected in the growing business volume, investment fund, and community deposit fund, as well as the increasing financing distribution. The performance of Sharia banking in 2018 increased better than 2017. Up to the second semester of 2018, a number of Sharia banks, even though they still recorded high non-performing financing (NPF), managed to develop better financial performance. There were at least three Sharia banks that recorded profit increment up to the second semester of 2018, which were Bank Muamalat, Bank BJB Syariah, and Bank Panin Dubai Syariah.

Up to December 2018, the volume of Sharia banking financing (BUS, UUS, and BPRS) was recorded at the amount of IDR329.27 trillion, consisting of the composition of Sharia General Banks and Sharia Business Units amounting to IDR320.19 trillion and the composition of BPRS was IDR9.08 trillion. The year-on-year growth of Sharia banking financing as of December 2018 increased by 12.21% with a realization in December 2017 of IDR293.46 trillion to IDR329.28 trillion.

The third party funds up to December 2018 increased by 11.1% to IDR379.96 trillion from IDR341.87 trillion in 2017. The growth of Sharia banking assets increased by IDR53.58 trillion or 11.9% from the period of December 2017.

Pada Desember 2018 komposisi akad pembiayaan perbankan syariah didominasi oleh akad *murabahah* sebesar Rp161,75 triliun, kemudian akad *musyarakah* dengan nilai sebesar Rp130,48 triliun, akad *mudharabah* sebesar Rp16,05 triliun dan akad lainnya sebesar Rp858 miliar.

d. Tantangan Yang Dihadapi

Sebagaimana kami sampaikan, gejala perekonomian global terbukti tidak memberikan dampak yang signifikan terhadap perekonomian nasional di sepanjang 2018. Namun, kehati-hatian dalam merespon dinamika yang ada tetap diperlukan. Demikian juga dengan kondisi industri penjaminan berbasis syariah, yang justru mengalami pertumbuhan yang cukup baik di 2018.

Pada satu sisi, iklim industri yang positif merupakan peluang bagi Perseroan. Di sisi lain, kondisi tersebut memunculkan tantangan tersendiri, terkait bagaimana Perseroan merespon perkembangan yang ada agar setiap kesempatan dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Dalam hal ini, dukungan sumber daya dan teknologi menjadi kunci utama.

Salah satu tantangan yang menjadi perhatian utama Perseroan di 2018 adalah bagaimana membangun Sumber Daya Insani (SDI) yang memiliki kompetensi tinggi untuk menjawab perkembangan industri yang ada. Struktur organisasi dan lingkungan kerja juga perlu dilakukan penyegaran, agar upaya meraih setiap target dapat didukung oleh seluruh lapisan organisasi, sehingga terwujud budaya kerja yang amanah, profesional dan inovatif.

Teknologi informasi juga telah berkembang sedemikian rupa sehingga mengubah pola kerja, konsumsi, dan gaya hidup masyarakat luas. Kami melihat bahwa TI ke depan akan memerankan peran yang sangat penting dalam mendorong pertumbuhan usaha. Hal ini sejalan dengan semakin tingginya tren pemanfaatan *internet online* dalam proses bisnis untuk menciptakan operasional usaha yang lebih terstandarisasi, transparan, efisien, dan efektif. Seiring dengan perkembangan tersebut, maka penyesuaian sistem TI yang dimiliki Perseroan ke arah digitalisasi menjadi kian mendesak.

Dari sisi bisnis, Perseroan di awal 2018 menghadapi tingginya angka klaim sebagai dampak dari fokus usaha Perseroan tahun-tahun sebelumnya pada sektor mikro. Perkembangan sektor mikro yang bergerak statis pada kisaran 2,5-3% per tahun pada akhirnya memunculkan tantangan tersendiri bagi Perseroan.

In December 2018, the composition of financing contract of Sharia banking was dominated by *murabahah* contract of IDR161.75 trillion, then *musyarakah* contract of IDR130.48 trillion, *mudharabah* contract of IDR16.05 trillion, and other contracts of IDR858 billion.

d. The Challenges

As we have explained, the global economic fluctuation has proven to not impact significantly to the national economy throughout 2018. However, caution in responding to the dynamics is still necessary. Similarly, it also applies to the condition of Sharia-based guarantee industry, which grew quite well in 2018.

On the one hand, the positive industrial climate is an opportunity for the Company. On the other hand, the condition poses its own challenges related to how the Company responds to the development, so every opportunity can be taken in the best manner. In this case, the support of resources and technology is the main key.

One of the challenges that became the Company's main attention in 2018 was how to develop Human Resources to be highly competence to answer the industry development. The organizational structure and work environment must also be refreshed, so that the effort to reach every target can be supported by the entire organizational level and a trustful, professional, and innovative working culture can be achieved.

Information technology has also developed in a way that changes the public patterns of work, consumption, and lifestyle. We notice that in the future, the information technology will have very significant role to drive the business growth. It is in line with the uptrend in the utilization of online internet in business process to create a standardized, transparent, efficient, and effective business operational. Along with the development, the adjustment of the Company's IT system towards digitalization is becoming increasingly urgent.

From the business side, the Company in the beginning of 2018 encountered the high number of claims as an impact of the Company's business focus in the previous years, which was in the micro sector. The development of micro sector that moved statically at the range of 2.5-3% per year ultimately presented challenges for the Company.

Mengakhiri tahun 2018, seiring dengan pergantian manajemen baru, Direksi menetapkan langkah-langkah tegas serta menyeluruh untuk meningkatkan kualitas dan profesionalitas organisasi Perseroan. Upaya ini melibatkan beberapa perombakan di beberapa lini organisasi, juga penyempurnaan di segi operasional. Penguatan terhadap implementasi nilai-nilai GCG di seluruh lingkungan Perseroan juga digalakkan. Hal ini kami lakukan guna menciptakan momentum perubahan demi mewujudkan Perseroan yang lebih baik di masa mendatang.

STRATEGI PERSEROAN DI 2018

Guna menghadapi berbagai tantangan dan peluang yang ada, Perseroan secara aktif merespon dengan mencanangkan beberapa strategi utama untuk memperkuat *business positioning* dan daya saing Perseroan. Beberapa inisiatif di 2018 di antaranya:

- 1) Penyesuaian struktur organisasi;
- 2) Penguatan sumber daya insani;
- 3) Pemanfaatan TI dan digitalisasi;
- 4) Implementasi tata kelola yang akuntabel; dan
- 5) Inovasi produk dan layanan terbaik.

Pada awal 2018, Perseroan telah menunjuk manajemen baru untuk meneruskan estafet kepemimpinan sebelumnya. Perseroan melihat bahwa dinamika internal dan perubahan iklim industri memerlukan strategi yang berbeda untuk menanganinya. Sebagai bagian dari upaya tersebut, penyesuaian struktur organisasi menjadi keharusan yang harus dilaksanakan.

Sebagai bagian dari langkah reorganisasi, Perseroan mengangkat anggota Direksi baru untuk mengawal perubahan di Perseroan. Perseroan juga melakukan penguatan kewenangan, peran, tanggung jawab dan hak yang jelas di tiap-tiap level jabatan sebagai bentuk dari komitmen atas peraturan perundang-undangan serta GCG.

Selanjutnya, kami juga memberikan perhatian yang lebih besar kepada karyawan Perseroan. Hal ini kami wujudkan dengan menciptakan lingkungan kerja yang hangat, nyaman, dan menyenangkan. Pengembangan karyawan menjadi agenda utama yang kami jalankan. Selain menyiapkan rangkaian pelatihan, baik internal maupun eksternal, kami juga membuka ruang komunikasi secara lebar melalui program-program pertemuan rutin antara karyawan dan manajemen, sehingga masukan dari seluruh pihak dapat didengar untuk kemudian kami olah sebagai bagian dari kebijakan Perseroan.

Mengiringi penguatan Sumber Daya Insani, Perseroan pada 2018 telah menyusun *information technology strategic plan* sebagai landasan pengembangan TI tahun 2018 dan lima tahun ke depan.

To end 2018, in line with the change of the new management, the Board of Directors established decisive steps in overall to improve the Company's organization quality and professionalism. This effort included reshuffle at several organizational lines and improvement in terms of operational. The reinforcement of GCG values implementation in the entire Company's environment was also encouraged. It was done in order to create momentum of change to reach better Company in the future.

THE COMPANY'S STRATEGIES IN 2018

In facing the challenges and opportunities, the Company actively responds them by formulating several main strategies to strengthen the Company's business positioning and competitiveness. Some initiatives done in 2018 were:

- 1) Adjustment of organizational structure;
- 2) Strengthening of human resources;
- 3) Utilization of IT and digitalization;
- 4) Implementation of accountable governance; and
- 5) Innovation of the best product and service.

At the beginning of 2018, the Company appointed new management to continue the previous leadership. The Company identified that the internal dynamics and change of industrial claim needed distinctive strategies. As a part of that effort, the adjustment to the organizational structure was a must.

In the reorganization, the step included the Company appointed new members of Board of Directors to oversee the changes in the Company. The Company also reinforced clear authorities, roles, responsibilities, and rights at each position level as a commitment to the laws and regulations, as well as the GCG.

Furthermore, we also would like to pay greater attention to the Company's employees. It was achieved by creating a warm, comfortable, and exciting working environment. The employee development was the main agenda. Besides preparing a range of trainings, both internal and external, we also opened broad communication space through regular meeting programs between the employees and the management, so that any suggestions from all parties can be heard to be processed as a part of the Company's policies.

In line with the strengthening of human resources, the Company in 2018 drew up information technology strategic plan as a foundation of the IT development in 2018 and the next five years.

Beberapa program utama yang kami jalankan di 2018 berfokus pada pengembangan sistem aplikasi untuk meningkatkan layanan serta meningkatkan efektivitas dan efisiensi kerja, seperti pengembangan sistem integrasi data penjaminan dengan mitra bisnis, sistem aplikasi *suretyship*, sistem aplikasi *call center*, implementasi *email corporate*, dan lainnya.

Selain itu, selaras dengan amanat Dewan Komisaris, kami juga senantiasa menjalankan usaha dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini kami jalankan untuk menjaga keunggulan Perseroan dalam jangka panjang, sehingga Perseroan tidak saja dapat dibanggakan oleh segenap pemegang saham, tetapi juga mampu memberikan manfaat bagi masyarakat secara lebih luas.

Selain fokus pada pembenahan internal, kami juga mengupayakan terobosan-terobosan baru secara eksternal. Salah satunya dengan melakukan kajian untuk menjajaki bisnis baru, penjaminan haji. Upaya ini memang masih berada dalam tahap awal. Sehingga hasilnya tentu belum bisa dinikmati dalam waktu dekat. Namun, kesuksesan di masa depan selalu tergantung dengan keputusan-keputusan yang kita ambil hari ini. Kami yakin, dengan dukungan segenap manajemen dan komitmen seluruh pihak, pada akhirnya Perseroan akan memetik hasil manis di masa yang akan datang.

Berbagai inisiatif tersebut memang belum akan memberikan dampak yang signifikan secara langsung, sebab inisiatif-inisiatif di sepanjang 2018 tersebut merupakan investasi yang bersifat jangka panjang. Namun demikian, langkah-langkah strategis ini telah mengantarkan Perseroan berhasil melewati tahun 2018 dengan berbagai pencapaian yang menggembirakan. Ke depan, kami akan terus meningkatkan kinerja utama sehingga pencapaian ini dapat kami lampau di masa-masa mendatang.

ANALISIS KINERJA TAHUN 2018

Kinerja Perseroan di 2018 secara keseluruhan ditandai dengan berbagai capaian yang memuaskan, baik dari sisi operasional maupun finansial.

A. Kinerja Operasional

Per 31 Desember 2018, jumlah pengguna jasa seluruh produk mencapai 233.867 debitur, meningkat 119,67% dibandingkan tahun 2017 sejumlah 106.462 Debitur.

Dari sisi produk, Perseroan menjalankan program penjaminan pembiayaan syariah untuk tiga jenis produk kafalah:

- 1) Kafalah Pembiayaan, dengan total pendapatan imbal jasa mencapai Rp219,815 juta dibandingkan tahun 2017 sebesar Rp174,708 juta;

Several main programs in 2018 focused on the development of application system to improve services and work effectiveness and efficiency, such as the development of integrated guarantee data with business partners, suretyship application system, call center application system, the implementation of corporate email, and others.

Moreover, aligned with the mandate of the Board of Commissioners, we also continuously perform the business by prioritizing caution and ensuring compliance with the prevailing laws and regulations. This is done to maintain the Company's excellence in the long term, so that the Company is not only satisfying for the shareholders, but also providing benefits for the public.

Aside from focusing on internal revamp, we also strive for new breakthroughs externally, one of which by conducting review to explore new business, i.e., hajj guarantee. This effort is still in the initiation stage, so that the result cannot be enjoyed in the near time. However, the success in the future always depends on the decisions made today. We believe that with the support of the entire management and commitment of all parties, the Company ultimately will reap favorable results in the future.

Various initiatives seem to be not giving direct significant results because the initiatives throughout 2018 are long-term investment. Yet, the strategic steps have led the Company to succeed in 2018 with many impressive achievements. In the future, we will continuously improve the primary performance so we can reach much more in the future than the current achievements.

PERFORMANCE ANALYSIS IN 2018

The Company's overall performance in 2018 was marked with many satisfying achievements, in term of operational and financial.

A. Operational Performance

As of December 31, 2018, the number of service users of all products reached 233,867 debtors, increasing by 119.67% compared to 2017 of 106,462 debtors.

In terms of products, the Company performs Sharia-based financing guarantee program for types of kafalah products as follows:

- 1) Financing Kafalah, with the total service income of IDR219,815 million compared to 2017 of IDR174,708 million;

- 2) Kafalah Kontra Bank Garansi, dengan total pendapatan total pendapatan imbal jasa mencapai Rp3.339 juta dibandingkan tahun 2017 sebesar Rp1.557 juta; dan
- 3) Surety dengan total pendapatan total pendapatan imbal jasa mencapai Rp330 juta dibandingkan tahun 2017 sebesar Rp35 juta.

Selain itu, Perseroan pada tahun 2018 juga berhasil meningkatkan skor Tingkat Kesehatan dari 76,00 di 2017 menjadi 78,50 di 2018 dengan predikat "A" (SEHAT). Sementara skor GCG mencapai 73,30 di 2018, dibandingkan tahun 2017 sebesar 72,24.

B. Kinerja Keuangan

Total aset perseroan per 31 Desember 2018 tercatat sebesar Rp401,23 miliar atau meningkat 2,52% dibandingkan tahun 2017 sebesar Rp391,35 miliar. Total liabilitas Perseroan per 31 Desember 2018 mencapai Rp75,70 miliar, turun 6,22% atau sebesar Rp5,02 miliar dari total kewajiban per 31 Desember 2017 sebesar Rp80,72 miliar. Sedangkan ekuitas per 31 Desember 2018 mencapai Rp401,23 miliar, dengan rincian Modal Disetor pada 31 Desember 2018 tercatat sebesar Rp250,00 miliar, dan Cadangan Umum sebesar Rp61,46 miliar.

Dari sisi laba rugi, Perseroan membukukan laba setelah pajak dan zakat sebesar Rp14,08 miliar atau naik signifikan sebesar 126,22% dari tahun 2017 yang tercatat sebesar Rp6,23 miliar. Imbal Jasa Kafalah Bruto selama tahun 2018 mencapai Rp223,48 miliar, naik 26,76% dari tahun 2017 sebesar Rp176,30 miliar. Pendapatan ujarah tersebut terdiri dari:

- 1) ujarah pembiayaan konsumtif sebesar Rp51,24 miliar, turun 0,03% atau sebesar Rp15,95 juta dari Rp51,26 miliar di 2017;
- 2) ujarah pembiayaan produktif sebesar Rp168,57 miliar, naik 36,55% atau Rp45,12 miliar dari Rp123,46 miliar di 2017; dan
- 3) ujarah surety sebesar sebesar Rp3,67 miliar, naik 131,10% atau Rp2,08 miliar dari Rp1,59 miliar di 2017.

Pendapatan Kafalah Bersih pada tahun 2018 adalah sebesar Rp80,93 miliar, naik 94,13% atau sebesar Rp39,24 miliar dari Rp41,69 miliar di 2017. Sedangkan pendapatan investasi pada tahun 2018 tercatat sebesar Rp12,66 miliar, turun 25,41% atau sebesar Rp4,31 miliar dari Rp16,97 miliar di 2017. Sementara Laba (Rugi) Komprehensif pada tahun 2018 mencapai Rp14,90 miliar, naik 130,62% atau sebesar Rp8,44 miliar dibandingkan Rp6,46 miliar di 2017.

- 2) Counter Guarantee Bank Kafalah, with the total service income of IDR3,339 million compared to 2017 of IDR1,557 million; and
- 3) Surety with the total service income of IDR330 million compared to 2017 of IDR35 million.

Furthermore, the Company in 2018 also succeeded to improve its Health Level from 76.00 in 2017 to 78.50 in 2018 with the predicate of "A" (HEALTHY). Meanwhile, the GCG score was 73.30 in 2018, compared to 2017 of 72.24.

B. Financial Performance

The Company's total assets as of December 31, 2018 were IDR401.23 billion or increased by 2.52% compared to 2017 of IDR391.35 billion. The Company's total liabilities as of December 31, 2018 was IDR75.70 billion, decreasing by 6.22% or IDR5.02 billion from the total liabilities as of December 31, 2017 of IDR80.72 billion. Meanwhile, the equity as of December 31, 2018 reached IDR401.23 billion, with the details of Paid Up Capital as of December 31, 2018 was IDR250.00 billion, and General Reserves of IDR61.46 billion.

In terms of profit or loss, the Company recorded profit after tax and zakat of IDR14.08 billion or increased significantly by 126.22% from 2017, which was IDR6.23 billion. The Gross Service Fee Kafalah during 2018 reached IDR223.48 billion, increasing by 26.76% from 2017 of IDR176.30 billion. The ujarah income consisted of:

- 1) consumptive financing ujarah amounting to IDR51.24 billion, decreasing by 0.03% or IDR15.95 million from IDR51.26 billion in 2017;
- 2) productive financing ujarah amounting to IDR168.57 billion, increasing by 36.55% or IDR45.12 billion from IDR123.46 billion in 2017; and
- 3) surety ujarah amounting to IDR3.67 billion, increasing by 131.10% or IDR2.08 billion from IDR1.59 billion in 2017.

The net Kafalah income in 2018 was IDR80.93 billion, increasing by 94.13% or IDR39.24 billion from IDR41.69 billion in 2017. Meanwhile, the investment income in 2018 was IDR12.66 billion, decreasing by 25.41% or IDR4.31 billion from IDR16.97 billion in 2017. Meanwhile, the Comprehensive Profit (Loss) in 2018 reached IDR14.90 billion, increasing by 130.62% or IDR8.44 billion compared to IDR6.46 billion in 2017.

C. Perbandingan antara target dan realisasi

Secara keseluruhan, Rencana Kerja Anggaran Perusahaan tahun 2018 telah dilaksanakan secara maksimal dengan perolehan laba komprehensif sebesar Rp14.895 juta dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Realisasi pendapatan kafalah tahun 2018 sebesar Rp156.031 juta atau tercapai 101,08% dari RKAP yang telah ditetapkan sebesar Rp154.366 juta.
- 2) Realisasi beban kafalah tahun 2018 sebesar Rp75.099 juta atau tercapai 91,42% dari RKAP yang telah ditetapkan sebesar Rp82.147 juta.
- 3) Penerimaan ujah kafalah bruto tahun 2018 sebesar Rp223.485 juta, atau tercapai 96,0% dari anggaran tahun 2018. Sedangkan Pendapatan kafalah bersih sebesar Rp80.931 juta, atau tercapai 112,1% dari anggarannya.
- 4) Pendapatan investasi tahun 2018 mencapai Rp12.655 juta yang berasal dari bagi hasil deposito di beberapa bank syariah. Hasil investasi ini tercapai 60,06% dari anggarannya sebesar Rp21.068 juta. Pada tahun 2018 investasi Perseroan dalam bentuk deposito dan reksadana sejumlah Rp349.848 juta.
- 5) Realisasi beban usaha pada tahun 2018 sebesar Rp66.609 juta, atau 94,63% dari anggarannya sebesar Rp70.385 juta. Beban Usaha tersebut terdiri dari biaya pemasaran sebesar Rp6.804 juta, beban umum sebesar Rp41.733 juta, beban administrasi Rp15.529 juta dan beban penyusutan dan amortisasi sebesar Rp2.543 juta.
- 6) Laba bersih setelah pajak & zakat sebesar Rp14.805 juta, atau 88,74% dari anggarannya sebesar Rp15.872 juta. Dengan pencapaian laba tersebut maka perusahaan mencatat ROA sebesar 5,1% dan ROE sebesar 4,9%.

PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK

Sejalan dengan pembenahan internal di bawah arahan manajemen baru, penerapan GCG menjadi salah satu komitmen utama di 2018. Dalam hal ini, salah satu fokus kami adalah memperkuat penerapan pengendalian internal guna memastikan seluruh kegiatan operasional, penyajian pelaporan keuangan, serta kepatuhan Perseroan terhadap peraturan perundang-undangan telah memenuhi seluruh ketentuan yang berlaku.

Selain itu, kami juga senantiasa memonitor perkembangan regulasi yang ada lalu menerapkannya di lingkungan Perseroan sehingga kepatuhan Perseroan meningkat serta selaras dengan perkembangan terkini. Sebagai wujud atas komitmen tersebut, kami pada tahun 2018 melakukan penyempurnaan berbagai kelengkapan *soft structure* GCG, di antaranya Pedoman *Good Corporate Governance* dan *Board Manual* Dewan Komisaris dan Direksi.

C. Comparison between Target and Realization

In overall, the Corporate Work Plan and Budget (RKAP) in 2018 has been applied optimally with the comprehensive profit amounting to IDR14,895 million with details as follows:

- 1) Realization of kafalah income in 2018 amounting to IDR156,031 million or accounted for 101.08% of the RKAP established, which was IDR154,366 million.
- 2) Realization of kafalah expenses in 2018 amounting to IDR75,099 million or accounted for 91.42% of the RKAP established, which was IDR82,147 million.
- 3) Gross ujah kafalah income in 2018 was IDR223,485 million, or accounted for 96.0% of the budget in 2018. The net kafalah income was IDR80,931 million, or accounted for 112,1% of the budget.
- 4) The investment income in 2018 reached IDR12,655 million, originating from profit sharing time deposits in several Sharia banks. The investment result accounted for 60.06% of the budget amounting to IDR21,068 million. In 2018, the Company's investment in the form of deposits and mutual fund amounted to IDR349,848 million.
- 5) Realization of operating expenses in 2018 was IDR66,609 million, or 94.63% of the budget amounting to IDR70,385 million. The operating expenses consisted of marketing fee of IDR6,804 million, general expenses amounting to IDR41,733 million, administrative expenses of IDR15,529 million, and depreciation and amortization expenses of IDR2,543 million.
- 6) Net profit after tax & zakat amounted to IDR14,805 million, or 88.74% of the budget amounting to IDR15,872 million. With the profit achievement, the Company recorded ROA and ROE of 5.1% and 4.9%, respectively.

IMPLEMENTATION OF GOOD CORPORATE GOVERNANCE

Aligned with the internal revamp under the direction of the new management, the GCG implementation was one of the primary commitments in 2018. In this case, one of our focuses was to reinforce the implementation of internal control to ensure that the entire operational activities, preparation of financial statements, as well as the Company's compliance with the laws and regulations have fulfilled the prevailing provisions.

Furthermore, we also constantly monitor the development of the existing regulations and apply them in the Company's environment, so the Company's compliance will improve in line with the newest development. As a manifestation of the commitment, we in 2018 refined some items to complete the soft structure of GCG, including Guidelines for Good Corporate Governance and Board Manual for the Board of Commissioners and Board of Directors.

Seiring dengan pergantian manajemen, Direksi menetapkan langkah-langkah tegas serta menyeluruh untuk meningkatkan kualitas dan profesionalitas organisasi. Hasilnya, kinerja Askrindo Syariah secara keseluruhan meningkat, baik operasional maupun finansial.

Along with the change of management, the Board of Directors has determined firm and comprehensive steps to improve the quality and professionalism of the organization. As a result, Askrindo Syariah's overall performance increased in both operational and financial sectors.

Guna memaksimalkan komitmen penerapan prinsip-prinsip GCG, Direksi menjalin hubungan yang baik dengan Dewan Komisaris yang telah memberikan saran dan masukan terkait kegiatan kepengurusan Perseroan. Direksi juga memperkuat koordinasi di jajaran Direksi baik secara kultural maupun struktural, salah satunya dengan menyelenggarakan rapat secara berkala. Pada 2018, Direksi telah menyelenggarakan rapat sebanyak 19 kali dengan tingkat kehadiran 100% dan rapat gabungan Dewan Komisaris dan Direksi sebanyak 12 kali dengan kehadiran 100%.

Kami percaya bahwa kualitas penerapan GCG akan turut menentukan pertumbuhan Perseroan. Oleh karena itu, prinsip-prinsip GCG meliputi transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran akan senantiasa menjadi landasan utama Perseroan dalam menjalankan usaha. Ke depan, kami akan semakin menggalakkan implementasinya di seluruh level organisasi dan lingkungan kerja seraya menyempurnakan kelengkapan struktur GCG yang kami miliki.

PELAKSANAAN PROGRAM-PROGRAM CSR

Perseroan tidak hanya fokus pada pencapaian *profit* semata, namun secara seimbang juga berupaya untuk memerhatikan kehadirannya bagi masyarakat sekitar. Hal ini kami wujudkan melalui penetapan kebijakan-kebijakan tanggung Jawab Sosial Perusahaan/*corporate social responsibility* (CSR).

Selaras dengan perkembangan usaha Perseroan, kami berkomitmen untuk terus meningkatkan program-program CSR Perseroan di masa mendatang. Sehingga kehadiran Perseroan tidak hanya dapat memberikan keuntungan bagi segenap pemangku kepentingan, namun juga turut menyejahterakan masyarakat secara luas.

In order to maximize the commitment in applying GCG principles, the Board of Directors foster good relationship with the Board of Commissioners that have provided suggestions and inputs related to the Company's management activities. The Board of Directors has also strengthened the coordination among them, both culturally and structurally, one of which by holding 19 meetings with the attendance level of 100% and 12 joint meetings between the Board of Commissioners and Board of Directors with the attendance level of 100%.

We believe that the quality of GCG implementation will also determine the Company's Growth. Therefore, the GCG principles, which include transparency, accountability, responsibility, independency, and fairness, will always be the Company's main foundation in performing its business. In the future, we will encourage the implementation at all organization level and working environment while refining the GCG structure that we have owned.

IMPLEMENTATION OF CSR PROGRAMS

The Company does not solely focus on achieving the profit, but it tries to balance it by paying attention to its presence for the surrounding community. We realize it through the policies of corporate social responsibility (CSR).

Corresponding to the Company's business development, we commit to constantly intensify the Company's CSR programs in the future. As a result, the Company's presence does not only provide advantages for all stakeholders, but also improve the public welfare.

PERUBAHAN KOMPOSISI DIREKSI

Pada 2018, komposisi Direksi Perseroan mengalami perubahan dengan berhenti menjabatnya Bapak Pribadi dari posisinya sebagai Direktur Utama dikarenakan masa jabatan beliau yang telah selesai. Pada 22 Januari 2018, Bapak Soegiharto ditunjuk sebagai Direktur Utama Perseroan berdasarkan Keputusan RUPS LB tanggal 22 Januari 2018 dan Surat Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia No. SR-586/MBU/10/2017 tentang persetujuan pengangkatan anggota Direksi PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah.

Pada saat penyampaian laporan tahunan ini, komposisi Direksi Perseroan kembali mengalami perubahan dengan diangkatnya Bapak Supardi Najamuddin sebagai Direktur Pemasaran Perseroan berdasarkan Keputusan RUPS LB tanggal 17 Januari 2019 dan Surat Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia No. SR-586/MBU/10/2017 tentang persetujuan pengangkatan anggota Direksi PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah. Susunan Direksi Perseroan terakhir adalah sebagai berikut:

Direktur Utama : Soegiharto
Direktur Keuangan : Subagio Istiarto
Direktur Pemasaran : Supardi Najamuddin

PROSPEK USAHA TAHUN MENDATANG

Kami memandang bahwa perekonomian global akan membaik di masa mendatang, meskipun beberapa risiko tetap harus diwaspadai. Beberapa tantangan yang mengiringi ketidakpastian ekonomi global, di antaranya adalah belum solidnya prospek pertumbuhan makro ekonomi dan berlanjutnya perang dagang antara AS dan China.

Sementara itu, perekonomian nasional bergerak positif dan semakin menjanjikan sehingga turut menumbuhkan kepercayaan investor dan dunia usaha. Keberhasilan Pemerintah membangun infrastruktur juga akan semakin meningkatkan peluang pertumbuhan ekonomi di masa mendatang.

Dari sisi industri, kami melihat bahwa tren pembiayaan berbasis syariah, baik dari perbankan maupun IKNB Syariah terus bertumbuh. Dari data OJK terlihat bahwa proyeksi pembiayaan perbankan Syariah (BUS, UUS, dan BPRS) serta IKNB syariah yang membutuhkan penjaminan di 2019 mencapai Rp31.776 miliar.

CHANGES IN THE COMPOSITION OF THE BOARD OF DIRECTORS

In 2018, the composition of the Company's Board of Directors changed with the termination of Mr. Pribadi from his position as President Director due to end of tenor. On January 22, 2018, Mr. Soegiharto was appointed as President Director of the Company based on the Resolution of the General Meeting of Shareholders on January 22, 2018 and Decree of the Minister of State-Owned Enterprises Republic of Indonesia No. SR-586/MBU/10/2017 concerning approval of appointment of members of the Board of Directors of PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah.

At the time of submission of this annual report, the composition of the Company's Board of Directors changed again with the appointment of Mr. Supardi Najamuddin as the Company's Marketing Director based on the Resolution of the Extraordinary General Meeting of Shareholders on January 17, 2019 and Decree of the Minister of State-Owned Enterprises of the Republic of Indonesia No. SR-586/MBU/10/2017 concerning approval of appointment of members of the Board of Directors of PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah. The latest composition of the Company's Board of Directors is as follows:

President Director : Soegiharto
Director of Finance : Subagio Istiarto
Director of Marketing : Supardi Najamuddin

BUSINESS PROSPECT IN THE NEXT YEAR

We view that the global economy will improve in the future although there are some risks that we must be aware of. Some challenges accompanying the global economic uncertainty include the not solid prospect of macro economic growth and the continuous trade war between the US and China.

Meanwhile, the national economy moves positively and becomes increasingly promising, which builds up the trust of the investors and businesses. The Government's success to develop the infrastructure will also open some opportunities for the coming economic growth.

From the industry side, we notice that the trend of Sharia-based financing, both Sharia banking and non-bank financial institutions, is continuously growing. Based on the data of the Financial Services Authority (OJK), it can be seen that the projection of Sharia banking financing (BUS, UUS, and BPRS) and Sharia non-bank financial institutions needs guarantee in 2019 up to IDR31,776 billion.

Menyongsong tahun 2019, kami berkomitmen untuk bekerja lebih keras guna meningkatkan kinerja. Didukung oleh koordinasi manajemen yang kuat dengan seluruh unsur Perseroan, kami yakin mampu memberikan hasil yang lebih baik di masa mendatang.

PENUTUP

Atas nama Direksi, kami menyampaikan rasa bangga atas kerja sama tim yang kuat yang terbentuk antara jajaran Direksi dan segenap karyawan sehingga Perseroan mampu meraih momentum pertumbuhan di sepanjang tahun ini. Berbagai capaian yang menggembirakan di 2018 hendaknya tidak membuat kita berpuas diri. Prestasi hari ini adalah parameter baru untuk dilampaui di hari esok. Maka, hendaknya kita tetap merekatkan sinergi seraya memaksimalkan kinerja ikhlas untuk mewujudkan PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah yang lebih baik dan lebih besar di masa mendatang.

Akhirnya, kami menyampaikan terimakasih kepada Dewan Komisaris yang senantiasa memberikan masukan dan saran untuk mengiringi langkah kami dalam menjalankan operasional Perseroan, kepada karyawan yang tidak pernah lelah untuk meningkatkan kinerja demi pertumbuhan yang lebih baik, serta kepada segenap mitra yang tetap memberikan kepercayaan kepada Perseroan.

Welcoming the 2019, we commit to work harder in order to improve the performance. With the support of strong management coordination with all of the Company's elements, we believe that we are able to provide better result in the future.

CLOSING

On behalf of the Board of Directors, we would like to express our proud of the solid team work between the Board of Directors and all employees, so that the Company is able to reach its momentum of growth throughout the year. The impressive achievements in 2018 should not make us complacent. The achievements today should be a new parameter to be passed tomorrow. Therefore, we should develop the synergy while maximizing sincere performance to achieve better and larger PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah later.

Lastly, we would like to thank the Board of Commissioners who constantly provides advices and input to accompany our steps in carrying out the Company's operation, the employees who are never tired to improve their performance for a better growth, and all partners who still put their trust to the Company.

Jakarta, 10 Agustus 2019 / Jakarta, August 10, 2019

Atas nama Direksi
On behalf of the Board of Directors



Soegiharto
Direktur Utama
President Director

Dewan Komisaris dan Direksi

PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah

The Board of Commissioners and Board of Directors of PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah



Soegiharto
Direktur Utama
President Director

Supardi Najamuddin
Direktur Pemasaran
Director of Marketing

Budi Wisaksono
Komisaris Utama
President Commissioner

Bambang Hermanto
Komisaris
Commissioner

Subagio Istiarno
Direktur Keuangan & SDM
Director of Finance & HR

Pernyataan Dewan Komisaris dan Direksi tentang Tanggung Jawab atas Laporan Tahunan 2018 PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah

Statement of Board of Commissioners and Board of Directors on the Responsibility for the 2018 Annual Report of PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah

Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa semua informasi dalam Laporan Tahunan PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah 2018 telah dimuat secara lengkap dan bertanggung jawab penuh atas kebenaran isi Laporan Tahunan ini.

We, the undersigned below state that all information in the Annual Report of PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah for 2018 is presented in its entirety and we are fully responsible for the correctness of the contents in this Annual Report.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

This statement is hereby made in all truthfulness.

Jakarta, 10 Agustus 2019 / Jakarta, August 10, 2019

Dewan Komisaris

Board of Commissioners



Budi Wisaksono
Komisaris Utama
President Commissioner



Bambang Hermanto
Komisaris
Commissioner

Direksi

Board of Directors



Soegiharto
Direktur Utama
President Director



Subagio Istiarno
Direktur Keuangan & SDM
Director of Finance & HR



ASKRINDO

Syariah



Profil
Perusahaan
Company Profile



Informasi Perusahaan

Company Information


Nama Perusahaan
 Company Name
 PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah


Tanggal Pendirian
 Date of Establishment
 29 November 2012
 November 29th, 2012


Perubahan Nama Perusahaan
 Change of Company Name
 PT Askrindo Penjamin Pembiayaan Syariah (2012), menjadi
 PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah (2012)
 PT Askrindo Penjamin Pembiayaan Syariah (2012) to
 PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah (2012)


Tanggal Pendirian dan Tanggal Efektif Perubahan Nama Perusahaan
 Date of Establishment and Effective Date of Change of Company Name

- 29 November 2012 bernama PT Askrindo Penjamin Pembiayaan Syariah / November 29, 2012 with the name of PT Askrindo Penjamin Pembiayaan Syariah
- 14 Desember 2012 bernama PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah / December 14, 2012 with the name of PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah


Bidang Usaha
 Line of Business
 Penjaminan Pembiayaan berbasis syariah
 Sharia-based Financing Guarantee


Kepemilikan Saham
 Share Ownership

- PT (Persero) Asuransi Kredit Indonesia: 99,99%;
- Yayasan Dana Kesejahteraan Karyawan Askrindo: 0,01%.


Akta Pendirian Perusahaan
 Company's Deed of Establishment
 Akta No. 45 tanggal 29 November 2012 oleh Hadijah, SH., notaris di Jakarta. Akta pendirian ini disahkan oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU-61610.AH.01.01 tanggal 3 Desember 2012.
 Deed No. 45 dated November 29, 2012 of Hadijah, S.H., notary in Jakarta. This deed of establishment was ratified by the Minister of Justice and Human Rights of the Republic of Indonesia in Decision Letter No. AHU-61610.AH.01.01 dated December 3, 2012.


Akta Perubahan Terakhir
 Last Deed Amendment
 Akta No. 31 tanggal 07 Februari 2019 oleh Hadijah, SH, notaris di Jakarta, mengenai perubahan Direksi dan Komisaris. Perubahan anggaran dasar tersebut telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-AH.01.03-0130432 tanggal 05 Maret 2019.
 Deed No. 31 dated February 07, 2019 of Hadijah, S.H., notary in Jakarta, regarding the change of Board of Directors and Board of Commissioners. The amendment to the deed of establishment was ratified by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in letter No. AHU-AH.01.03-0130432 dated March 05, 2019.


Modal Dasar
 Authorized Capital
 400.000 lembar saham atau Rp400.000.000.000
 400,000 shares or Rp400,000,000,000


Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh
 Issued Capital and Paid-Up Capital
 250.000 lembar saham atau Rp250.000.000.000
 250,000 shares or Rp250,000,000,000


Alamat Lengkap
 Complete Address
Kantor Pusat / Headquarter
 Gedung Prima Graha Persada
 Jalan Gedung Kesenian No. 3-7, Jakarta Pusat 10710.
 Phone : +62 21 351 7525
 Contact Center : +62 21 3508479

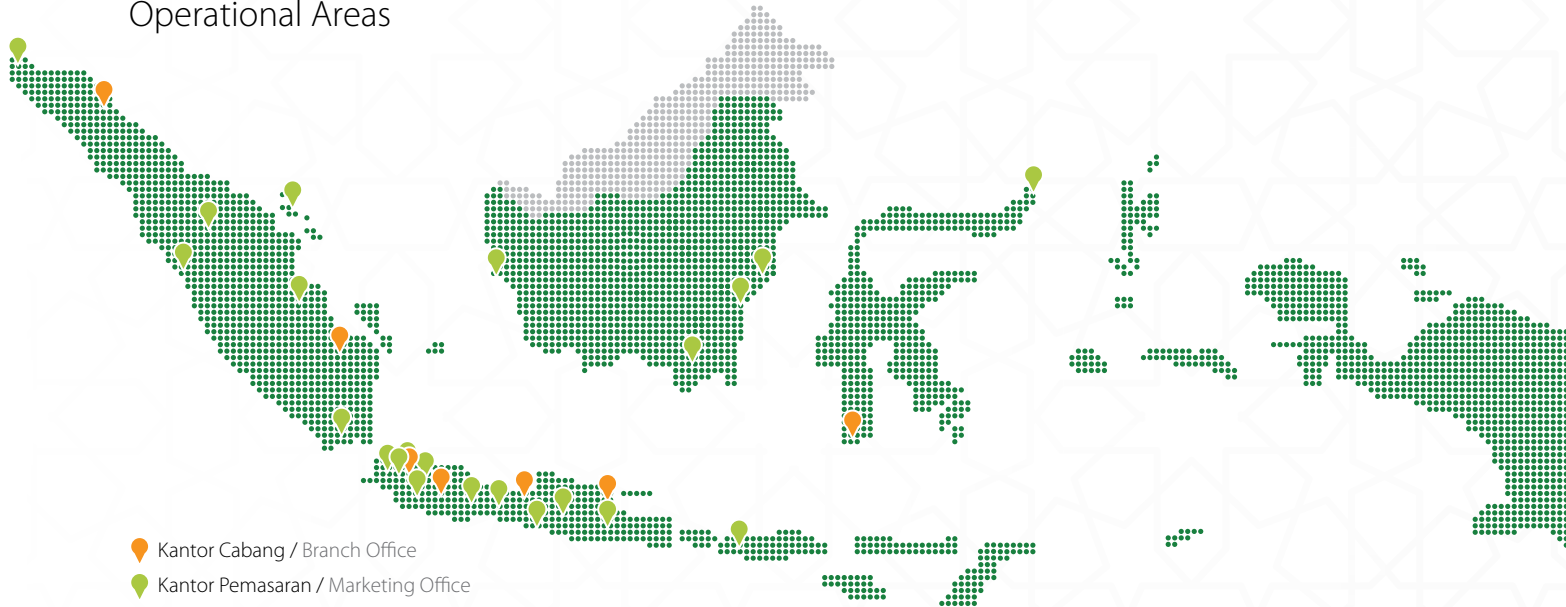

Website Perseroan
 Company's Website
www.askrindosyariah.co.id





Wilayah Operasional

Operational Areas



No	Kantor / Office	Alamat / Address
1	Kantor Cabang Jakarta 1 / Branch Office of Jakarta 1	Gedung Primagraha Persada Lt. 1, Jl Gedung Kesenian No. 3-7 Jakarta Pusat, 10710.
2	Kantor Cabang Jakarta 2 / Branch Office of Jakarta 2	Ruko Perkantoran Tujuh, Jl. Tebet Raya No. 9D Tebet Jakarta Selatan
3	Kantor Cabang Bandung / Branch Office of Bandung	Jl. Maskumbang No. 29 Bandung.
4	Kantor Cabang Medan / Branch Office of Medan	Jl. Sei Belutu No. 93 Kelurahan Padang Bulan Selayang I Kec. Medan Selayang, 20131.
5	Kantor Cabang Palembang / Branch Office of Palembang	Jl. Basuki Rahmat No. 1607B, Simpang Polda, Kemuning, Palembang, Sumatera Selatan, 30128.
6	Kantor Cabang Makassar / Branch Office of Makassar	Jl. Kakatua No. 25 Makassar, 90121.
7	Kantor Cabang Semarang / Branch Office of Semarang	Komplek Rukan Pemuda Mas (DP Mall) Blok A Kav. B1 Jl. Pemuda No. 150, Semarang- Jawa Tengah, 50132.
8	Kantor Cabang Surabaya / Branch Office of Surabaya	Jl. Manyar Kartika No. 11i Surabaya, Jawa Timur.
9	Kantor Pemasaran Bekasi / Marketing Office of Bekasi	Ruko Bekasi Mas Blok C 14 Jl. Ahmad Yani Bekasi Selatan, 17141- Jawa Barat.
10	Kantor Pemasaran Tangerang / Marketing Office of Tangerang	Ruko BSD Sektor VII Blok RK No. 10, Jl. Pahlawan Seribu Serpong, Tangerang, 15311.
11	Kantor Pemasaran Yogyakarta / Marketing Office of Yogyakarta	Jl. Kebun Raya I, Ruko B, Kota Gede Yogyakarta, 55171.
12	Kantor Pemasaran Pontianak / Marketing Office of Pontianak	Jl. M. Sohor No. 29 E-F Pontianak, 78121.
13	Kantor Pemasaran Balikpapan / Marketing Office of Balikpapan	Jl. Jenderal Sudirman No. 22A Balikpapan, 76114-Kalimantan Timur
14	Kantor Pemasaran Malang / Marketing Office of Malang	Jl. Mayjen Panjaitan No. 135 Kav. A Malang, 65113-Jawa Timur
15	Kantor Pemasaran Pekanbaru / Marketing Office of Pekanbaru	Jl. Teuku Umar No. 18 A Pekanbaru, 28282-Riau

No	Kantor / Office	Alamat / Address
16	Kantor Pemasaran Padang / Marketing Office of Padang	Gedung Rangkiang Ventura Kav. 4, Jl. Khatib Sulaiman No. 9, Padang, 25173-Sumatera Barat
17	Kantor Pemasaran Mataram / Marketing Office of Mataram	Jl. Sriwijaya No. 18 D, Mataram 83126-Nusa Tenggara Barat
18	Kantor Pemasaran Manado / Marketing Office of Manado	Jl. 17 Agustus No.45, Teling Atas, Wanea, Kota Manado, Sulawesi Utara
19	Kantor Pemasaran Bandar Lampung / Marketing Office of Bandar Lampung	Jl. M. Yamin No.32 GH, Rawalaut, Bandarkampung 35127
20	Kantor Pemasaran Bogor / Marketing Office of Bogor	Jl. Raya Pajajaran Ruko No. 68, Bogor-Jawa Barat
21	Kantor Pemasaran Sukabumi / Marketing Office of Sukabumi	Jl. Sudirman No.81, Sukabumi-Jawa Barat
22	Kantor Pemasaran Tasikmalaya / Marketing Office of Tasikmalaya	Jl. Yudanegara No.28 Tasikmalaya-Jawa Barat
23	Kantor Pemasaran Purwokerto / Marketing Office of Purwokerto	Jl. Gatot Subroto No.16 C, Purwokerto-Jawa Tengah
24	Kantor Pemasaran Surakarta / Marketing Office of Surakarta	Jl. Dr. Rajiman No.376 B, Surakarta 57141-Jawa Tengah
25	Kantor Pemasaran Jambi / Marketing Office of Jambi	Jl. A.R. Hakim No.5-6, Telanai Pura-Jambi
26	Kantor Pemasaran Banda Aceh / Marketing Office of Banda Aceh	Perkantoran Aceh Square, Jl. T. IImum Luen Bata, Aceh
27	Kantor Pemasaran Batam / Marketing Office of Batam	Komp. Graha Kadin Blok F No.1, Jl. Engku Puri Batam Centre, 29453
28	Kantor Pemasaran Jakarta Selatan 2 / Marketing Office of Jakarta Selatan 2	Royal Spring Residence Jl. Raya Ragunan No. 29A Jatipadang-Pasar Minggu, Jakarta Selatan
29	Kantor Pemasaran Banjarmasin / Marketing Office of Banjarmasin	Jl. Achmad Yani KM.6,9 No.2, Banjarmasin-70249
30	Kantor Pemasaran Samarinda / Marketing Office of Samarinda	Jl. MT. Haryono No.93G, Samarinda Ulu, Kota Samarinda Kalimantan Timur 75124

Sekilas Askrindo Syariah

Askrindo Syariah at a Glance

Askrindo Syariah merupakan perusahaan yang pertama berdiri di industri penjaminan pembiayaan berbasis syariah.

Askrindo Syariah is the first company in Indonesia to provide Sharia-based financing guarantees.



PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah ("Askrindo Syariah/ Perseroan") didirikan pada akhir tahun 2012 oleh PT Asuransi Kredit Indonesia (Persero) atau Askrindo, BUMN yang bergerak di bidang asuransi kredit dan suretyship dan sejak tahun 2007 juga menjadi lembaga penjamin dalam program Kredit Usaha Rakyat. Pembentukan Askrindo Syariah merupakan respon dari Askrindo atas perkembangan dunia perkreditan/pembiayaan yang menuntut adanya lembaga penjaminan yang secara khusus menjamin pembiayaan berbasis Syariah, seiring dengan semakin pesatnya pertumbuhan industri pembiayaan, baik yang dilaksanakan perbankan Syariah maupun lembaga keuangan nonbank berbasis Syariah seperti Baitul Maal wat Tamwil dan *multifinance* syariah.

Disamping untuk memenuhi tuntutan dunia usaha, pembentukan Askrindo Syariah juga merupakan pengejawantahan dari rencana jangka panjang Askrindo sebagai upaya optimalisasi modal dan memperbesar sumbangsinya dalam industri penjaminan nasional.

Terkait dengan hal itu, maka salah satu pedoman utama dalam pengembangan usahanya Askrindo Syariah adalah berorientasi kepada pengembangan jejaring usaha Askrindo secara keseluruhan, baik yang bersifat operasional maupun non operasional.

Askrindo Syariah merupakan perusahaan yang pertama berdiri di industri penjaminan pembiayaan berbasis syariah. Namun demikian, usaha ini sesungguhnya telah dilaksanakan perusahaan lain tetapi dalam bentuk unit usaha, yaitu Perum Jamkrindo yang memiliki kesamaan posisi dengan Askrindo dalam program penjaminan KUR, yaitu sebagai penjamin. Dengan posisi demikian, maka di satu sisi Askrindo Syariah memiliki keunggulan berupa kejelasan pertanggungjawaban dalam menjalankan usaha ini.

PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah ("Askrindo Syariah/the Company") was established in 2012 by PT Asuransi Kredit Indonesia (Persero) or Askrindo, a state-owned enterprise engaged in credit insurance and suretyship and since 2007, it has become a guarantee institution for People's Business Credit program. The establishment of Askrindo Syariah was a response of Askrindo to the development of credit/financing sector, which demanded for a guarantee company that specially guarantees Sharia-based financing. It is in line with the rapid growth of financing industry, both performed by Sharia-based banks and Sharia-based non-bank financial institution, such as Baitul Maal wat Tamwil and Sharia multifinance.

The establishment of Askrindo Syariah is also an embodiment of Askrindo's long-term plan to optimize capital and increase contributions in the national guarantee industry.

Related to this, then one of the main guidelines in the business development of Askrindo Syariah is oriented to the development of the overall business network, both operational and non-operational.

Askrindo Syariah is the first company in Indonesia to provide Sharia-based financing guarantees. Previously, these services were carried out by other companies in the form of business units, namely by Perum Jamkrindo which, like Askrindo, also offered a KUR guarantee program. With this position, Askrindo Syariah has the advantage of clarity of accountability in running a Sharia-based financing guarantee business.

Jejak Langkah

Milestones



Perjalanan panjang selama lebih dari 5 tahun telah memberikan landasan yang kokoh bagi Askrindo Syariah untuk tumbuh menjadi salah satu perusahaan penjaminan terpercaya.

Long journey of more than 5 years has provided a solid foundation for Askrindo Syariah to grow into one of the most trusted guarantee companies.

Kegiatan Usaha

Business Activities

Berdasarkan perubahan anggaran dasar Perusahaan terakhir, maksud dan tujuan Perseroan adalah turut serta melaksanakan dan menunjang kebijakan dan program pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional pada umumnya, khususnya penyelenggaraan usaha di bidang Penjaminan Pembiayaan dengan prinsip Syariah serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya Perseroan untuk menghasilkan jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat untuk meningkatkan nilai Perseroan dengan menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha utama sebagai berikut:

- a. Sebagai perusahaan penjaminan pembiayaan yang usaha pokoknya melakukan penjaminan pembiayaan sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah; dan
- b. Melakukan usaha-usaha lain yang masih memiliki keterkaitan dengan usaha kafalah (penjaminan) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Based on the last amendment to the Company's articles of association, the Company's purposes and objectives are to apply and support government policies and programs in economic and national development sector in general, particularly business in Financing Guarantee sector that is based on Sharia principles, as well as to optimize the utilization of the Company's resources to generate high quality and highly competitive services in order to increase the Company's value by applying good corporate governance principle.

In order to achieve the above purposes and objectives, the Company performs the main business activities as follows:

- a. As a financing guarantee company with the main business of providing financing guarantee with Sharia principles; and
- b. Carrying out other businesses that still have linkages with the kafalah business (guarantee) based on the prevailing terms.



Produk Perseroan

The Company Products

Dalam menjalankan bisnis sebagai lembaga penjaminan berbasis syariah, Askrindo Syariah mempunyai beberapa produk penjaminan antara lain:

In conducting business as a sharia-based guarantee institution, Askrindo Syariah has several guarantee products including:



**Kafalah Pembiayaan
(Produktif dan Konsumtif)**
Kafalah Financing
(Productive and Consumptive)



**Kafalah Bank Garansi dan Suretyship
(Surety Bond)**
Kafalah Bank Guarantee and Suretyship
(Surety Bond)



**Kafalah Transaksi Perdagangan
(Domestik dan Internasional)**
Kafalah Trading Transactions
(Domestic and International)

1. Kafalah Pembiayaan (Produktif dan Konsumtif)

Jasa Penjaminan Pembiayaan yang diberikan oleh Askrindo Syariah (Kafil) bagi pengusaha (Makful 'Anhu) dalam upaya memperoleh pembiayaan produktif maupun konsumtif dari Bank Syariah ataupun Lembaga Keuangan Non-Bank (Makful Lahu), khususnya pengusaha yang tidak memenuhi persyaratan teknis Bank Syariah (kurang agunan) namun usahanya layak dibiayai (*feasible*).

2. Kafalah Bank Garansi dan Suretyship (Surety Bond)

Surety Bond dan Kafalah Bank Garansi adalah produk Suretyship berbasis syariah yang memberikan jaminan kepada Kontraktor atau Bank Penerbit Bank Garansi/Penerima Jaminan/Makful Lahu atas kemampuan Principal/Terjamin/Makful 'Anhu dalam melaksanakan kewajiban sesuai perjanjian pokok antara Principal/Terjamin dan Obligee.

3. Kafalah Transaksi Perdagangan (Domestik dan Internasional)

Jasa Penjaminan Transaksi Perdagangan yang diberikan oleh Askrindo Syariah (Kafil) yaitu dimana pihak pertama (Penjamin/Kafil) memberikan jaminan kepada pihak kedua (Penerima Jaminan/Makful Lahu), terhadap kemungkinan gagalnya pembayaran sejumlah piutang oleh Terjamin/Makful 'Anhu sesuai dengan perjanjian berbasis syariah antara Penerima Jaminan/Makful Lahu dengan Terjamin/Makful 'Anhu akibat terjamin/Makful 'Anhu mengalami penunggakan pembayaran yang berlarut-larut.

1. Kafalah Financing (Productive and Consumptive)

Is a Financing Guarantee Services provided by Askrindo Syariah (Kafil) for entrepreneurs (Makful 'Anhu) in an effort to obtain productive and consumptive financing from Islamic Banks or Non-Bank Financial Institutions (Makful Lahu), especially entrepreneurs who do not meet the technical requirements of Islamic Banks (less collateral) but the business is feasible.

2. Kafalah Bank Guarantee and Suretyship (Surety Bond)

Surety Bond and Kafalah Bank Guarantee are Shariabased Suretyship product that provides guarantee to Contractor or The Bank Issuing Bank Guarantee/Obligee/Makful Lahu regarding the capability of Principal/Makful 'Anhu in fulfilling the obligations in accordance with the main agreement between Principal and Obligee.

3. Kafalah Trading Transactions (Domestic and International)

Trade Transaction Guarantee Services provided by Askrindo Syariah (Kafil) which is where the first party (Guarantor/Kafil) provides guarantees to the second party (Guarantee/Makful Lahu), against the possibility of payment of a number of receivables by the Guaranteed/Makful 'Anhu in accordance with the sharia based agreement between the Recipient of Guarantee/Makful Lahu with Guaranteed/Makful 'Anhu due to guaranteed/Makful 'Anhu experienced delinquent protracted payments.

Visi, Misi & Budaya Perusahaan

Vision, Mission & Corporate Values



Visi - Vision

Menjadi **perusahaan penjaminan pembiayaan berbasis syariah** yang terkemuka sebagai pendukung **pengembangan ekonomi nasional** dan **berperan dalam pasar global**.

Becoming a prominent sharia-based financing guarantee company to support national economic development and play a role in the global market.



Misi - Mission

1

Memberikan kontribusi terhadap pengembangan ekonomi nasional khususnya yang berbasis syariah.
Contribute to the national economic development, especially the sharia-based.

2

Memberikan akses kemudahan kepada seluruh pemangku kepentingan bisnis pembiayaan berbasis syariah.
Provides easy access to all stakeholders of shariabased financing business.

3

Memberikan pelayanan penjaminan yang amanah dengan mengutamakan prinsip kehati-hatian untuk dapat memberikan perlindungan finansial kepada para pihak terkait.
Provides financing guarantee services by prioritizing prudential principle as to provide financial protection to all related parties.

4

Melakukan pengembangan layanan dan inovasi produk secara berkesinambungan untuk meningkatkan nilai Perusahaan.
Improving services and product innovation continuously to enhance company values.

5

Melaksanakan tata kelola perusahaan yang menjunjung tinggi nilai-nilai profesionalisme dan integritas.
Implementing good corporate governance that upholds professionalism and integrity principles.



Budaya Perusahaan - Corporate Culture



Amanah (Reliability)

Menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran yang hakiki dalam menjalankan tanggung jawab pekerjaan dan berperilaku secara terpuji.
Upholding true honesty in fulfilling work responsibilities and acting truthfully.



Profesional (Professionalism)

Kompeten dan unggul di bidangnya, berdedikasi tinggi, kreatif, disiplin, berpikir positif dengan menjunjung tinggi etika dan integritas profesi.
Having competence and excellence in its field, high dedication, creativity, discipline, positive thoughts and upholding ethics and integrity of profession.



Inovasi (Innovation)

Berupaya secara maksimal dan selalu melakukan terobosan dalam pelayanan.
The Company endeavors to always be the pioneer in providing services.

Visi, Misi dan Budaya berikut telah dibahas, dikaji, ditinjau kembali serta disetujui bersama oleh Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.

The following Vision, Mission & Corporate Culture has been discussed, analyzed, reviewed, and approved by both Board of Commissioners and Board of Directors of the Company.

Makna Logo Perseroan

Meaning of the Company Logo



MAKNA LOGO

Warna Logo Perseroan terdiri dari warna Biru dan Hijau yang memiliki arti sebagai berikut:



Warna Biru Tua, Menyimbolkan Askrido Syariah sebagai Perusahaan Penjaminan yang Solid

Dark Blue Color, Symbolizing Askrido Syariah as a solid Guarantee Company



Warna Hijau Daun, Menyimbolkan kesucian, kenikmatan, kesenangan dan ketenangan

Leaf Green Color, Symbolizing purity, pleasure, happiness, and tranquility



Dengan **bentuk logo** yang diamanatkan oleh Induk Perusahaan PT. Askrido, Askrido Syariah diharapkan menjadi perusahaan penjaminan pembiayaan syariah nomor satu, kokoh, modern, dan inovatif dalam memberikan layanan kepada mitra bisnis di seluruh Indonesia.

With the form of logo as mandated by the Parent Company, i.e., PT. Askrido, Askrido Syariah is expected to be a Sharia-based financing guarantee company that is leading, strong, modern, and innovative in delivering services to business partners throughout Indonesia.



Lambang Alpha-Kappa dengan warna biru dan hijau merupakan identitas Askrido Syariah sebagai anak perusahaan PT. Askrido.

The symbol of Alpha-Kappa with the blue and green colors is an identity of Askrido Syariah as a subsidiary of PT. Askrido.

Website Perseroan

Company's Website



<http://www.askrindosyariah.co.id/>

INFORMASI PADA WEBSITE PERUSAHAAN

Guna meningkatkan transparansi dan akses stakeholder atas informasi serta kinerja Perseroan yang aktual dan terkini, Perseroan menyediakan website resmi yang dapat diakses di www.askrindosyariah.co.id. Website Perseroan dibuat dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Secara umum, informasi di dalam website meliputi:

1. Informasi umum tentang Perseroan yang terdiri dari: Profil Perusahaan; Visi dan Misi; struktur organisasi, makna logo, budaya Perusahaan, profil manajemen, mitra bisnis, dan komposisi tenaga ahli;
2. Informasi produk meliputi Kafalah Pembiayaan, Kafalah Transaksi Perdagangan, Kafalah Bank Garansi & Surety;
3. Informasi terkait Media yang terdiri dari Berita, Meeting, Eksternal, Internal, CSR, Spirit, Informasi, Penghargaan, Kantor Cabang/Pemasaran, Kerjasama, Video, dan Galeri;
4. Informasi tentang kinerja, terdiri dari: Laporan Tahunan, GCG, SK & Perizinan, Pemingkatan, Laporan keuangan, Penghargaan, dan KPKU;
5. Peluang, terdiri dari karir dan Pengadaan Barang & Jasa; dan
6. Hubungi Kami, terdiri dari Kantor Pusat, Kantor Cabang, dan FAQ.

INFORMATION IN THE COMPANY'S WEBSITE

In order to improve the transparency and access of shareholders to the Company's actual and newest information and performance, the Company provides an official website that can be accessed at www.askrindosyariah.co.id. The Company's website is made by considering the prevailing laws and regulations. In general, the information in the website covers:

1. General information regarding the Company, consisting of the Company profile, vision and mission, organizational structure, meaning of the logo, corporate culture, management profile, business partners, and composition of experts;
2. Product information, consisting of Financing Kafalah, Trading Transaction Kafalah, Guarantee Bank Kafalah, & Surety;
3. Information related to media, consisting of news, meetings, external, internal, CSR, spirit, information, achievements, branches, cooperation, videos, and galleries;
4. Performance information, consisting of annual report, GCG, decision letters & permits, ranks, financial statements, awards, and assessment criteria for performance excellence (KPKU);
5. Opportunities, consisting of careers and procurement of goods & services; and
6. Contact Us, consisting of Headquarter, Branch Offices, and FAQ.

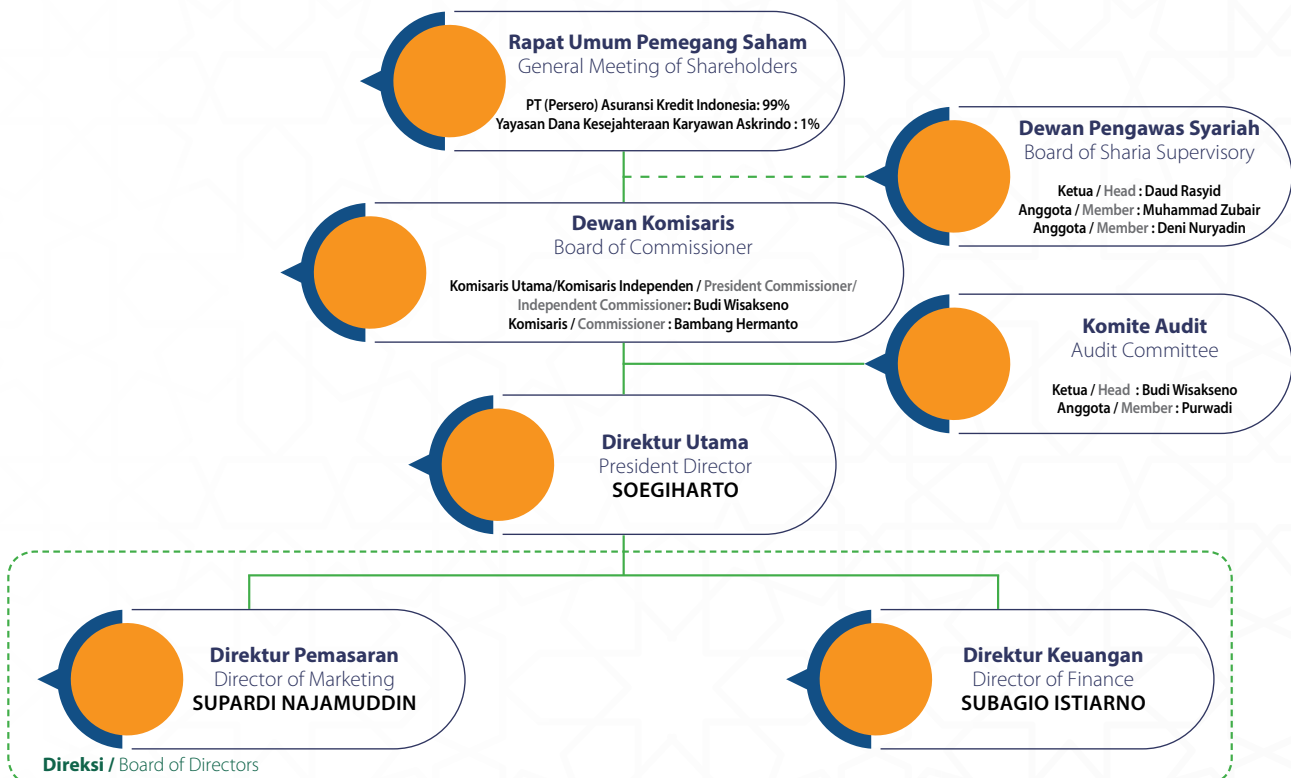
Struktur Grup Perseroan

Corporate Group Structure



Struktur Organisasi

Organization Structure



Profil Direksi

Profile of Board of Directors

PRIBADI

Jabatan / Position:
 Direktur Utama / President Director

Periode / Period:
 2013-Januari 2018 / January 2018

Data Pribadi / Personal Data:
 Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Indonesia.
 Usia 53 tahun. Kelahiran Surabaya, 22 April 1964 / Indonesian
 Citizen, resided in Jakarta, Indonesia. Age 53 years old. Born in
 Surabaya on April 22, 1964

Riwayat Penunjukan Sebagai Direksi Perseroan

Menjabat sebagai Direktur Utama Perseroan sejak 22 Februari 2013 berdasarkan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia No.S-128/MBU/2013 tentang Persetujuan Pengurus PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah.

Appointment as the Company's Board of Directors

Appointed as the President Director of the Company since February 22, 2013 based on the Decree of the Minister of State-Owned Enterprises of the Republic of Indonesia No.S-128/MBU/2013 concerning Approval on the Board of Management of PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah.

Pendidikan

- (S2) Program Studi Akuntansi Manajemen di Universitas Indonesia pada tahun 1989
- (S1) Fakultas Ekonomi-Universitas Airlangga, 1986

Education

- Master's Degree in Management Accounting from the University of Indonesia in 1989.
- (S1) Faculty of Economics at Airlangga University in 1986

Keahlian

Akuntansi & Manajemen

Expertise

Management & Accounting

Riwayat Profesi

Kepala Divisi Teknologi Informasi di PT (persero) Asuransi Kredit Indonesia pada tahun 2012.

Professional History

Head of Information Technology Division at the Indonesian Credit Insurance Company in 2012.

Rangkap Jabatan pada Grup/Instansi Lain

Per 31 Desember 2018, beliau tidak menjabat posisi lain di Grup maupun perusahaan/instansi Lembaga lain. Pada saat penyampaian laporan tahunan ini, beliau telah menyelesaikan masa jabatannya sebagai Direktur Utama Perseroan.

Concurrent Position in Group/Other Institution

As of December 31, 2018, Soegiharto has not held any other position in the Group and other companies/institutions. At the time of submission of this annual report, he had completed his tenure as President Director of the Company.



Profil Direksi

Profile of Board of Directors

SOEGIHARTO

Jabatan / Position:
Direktur Utama / President Director

Periode / Period:
2018-2022

Data Pribadi / Personal Data:

Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Indonesia. Usia 52 tahun. Kelahiran Jakarta, 19 Oktober 1966 / Indonesian Citizen, resided in Jakarta, Indonesia. Age 52 years old. Born in Jakarta on October 19, 1966

Riwayat Penunjukan Sebagai Direksi Perseroan

Menjabat sebagai Direktur Utama Perseroan sejak tanggal 22 Januari 2018, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia No. SR-586/MBU/10/2017 tentang persetujuan pengangkatan anggota Direksi PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah dan Keputusan RUPS LB tanggal 22 Januari 2018.

Appointment as the Company's Board of Directors

Appointed as President Director of the Company since January 22, 2018, based on the Decree of the Minister of State-Owned Enterprises of the Republic of Indonesia No. SR-586 / MBU / 10/2017 concerning approval of the appointment of members of the Board of Directors of PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah and the Resolution of the General Meeting of Shareholders on January 22, 2018.

Pendidikan

- (S2) Magister Manajemen (Keuangan), STM PPM Jakarta (2002)
- (S1) Administrasi dan Keuangan, Universitas Pancasila (1991)

Education

- (S2) Master of Management (Finance), STM PPM Jakarta (2002)
- (S1) Administration and Finance, Universitas Pancasila (1991)

Keahlian

Pemasaran produk

Expertise

Product Marketing

Riwayat Profesi

- Area Managing Director Kantor Cabang Jakarta Kemayoran sejak (2016-2017);
- Division Head (2015-2016);
- Area Managing Director merangkap Korwil DKI Jakarta II (2014-2015);
- Area Managing Director Cabang Jakarta Cikini (K1) (2013-2014);
- PJ Kepala Kantor Cabang Jakarta Cikini (2011-2013)

Professional History

- Area Managing Director of the Branch Office of Jakarta Kemayoran (2016-2017);
- Division Head (2015-2016);
- Area Managing Director with concurrent service as Area Coordinator of DKI Jakarta II (2014-2015);
- Area Managing Director of Branch of Jakarta Cikini (K1) (2013-2014);
- Acting Office for Head of Branch Office of Jakarta Cikini (2011-2013)

Rangkap Jabatan pada Grup/Instansi Lain

Per 31 Desember 2018, Soegiharto tidak menjabat posisi lain di Grup maupun perusahaan/instansi Lembaga lain. Pada tahun 2018, beliau juga ditunjuk sebagai Direktur Pelaksana (Plt.) Pemasaran Perseroan periode Januari 2018 sampai Januari 2019.

Concurrent Position in Group/Other Institution

As of December 31, 2018, Soegiharto has not held any other position in the Group and other companies/institutions. In 2018, he was also appointed as the Company's Acting Marketing Director in the period of January 2018 up to January 2019.

Profil Direksi

Profile of Board of Directors

SUBAGIO ISTIARNO

Jabatan / Position:
 Direktur Keuangan / Director of Finance

Periode / Period:
 2017-2022

Data Pribadi / Personal data:
 Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Indonesia.
 Usia 56 tahun. Kelahiran Solo, 4 November 1962. / Indonesian
 Citizen, resided in Jakarta, Indonesia. Age 56 years old. Born in Solo
 on November 4, 1962.

Riwayat Penunjukan Sebagai Direksi Perseroan

Menjabat sebagai Direktur Keuangan Perseroan sejak 5 Oktober 2017 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia No. SR-586/MBU/10/2017 tentang persetujuan pengangkatan anggota Direksi PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah dan Keputusan RUPS LB tanggal 22 Januari 2018.

Appointment as the Company's Board of Director

served as the Company's Finance Director since October 5, 2017 based on the Decree of the Minister of State-Owned Enterprises of the Republic of Indonesia No. SR-586 / MBU / 10/2017 regarding the approval of the appointment of members of the Board of Directors of PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah and the Resolution of the General Meeting of Shareholders on January 22, 2018

Pendidikan

- (S2) Magister Manajemen, STIE IPWI Jakarta (2001);
- (S1) Sarjana Akuntansi, STIE Swadaya Jakarta (1993);
- (D3) Akuntansi, STAN Jakarta (1984).

Education

- (S2) Master of Management, STIE IPWI Jakarta (2001);
- (S1) Bachelor of Accounting, STIE Swadaya Jakarta (1993);
- (D3) Accounting, STAN Jakarta (1984).

Keahlian

- Akuntansi & Keuangan
- Auditing

Expertise

- Accounting & Finance
- Auditing

Riwayat Profesi

- PT Reasuransi Nasional Indonesia sebagai Kepala SPI (2012- 2017);
- PT Reasuransi Nasional Indonesia sebagai Kepala Divisi SDM dan Umum (2010-2012);
- PT Reasuransi Nasional Indonesia sebagai Kepala Divisi Keuangan dan Akuntansi (2004-2010),
- PT Reasuransi Nasional Indonesia sebagai Kepala Bagian Akuntansi/Administrasi Keuangan (1996-2004);
- Bertugas di BPKP pada Deputi Pengawasan BUMN di Direktorat Pengawasan Lembaga-Lembaga Keuangan- Subdit Was Asuransi dan LKBN (1996);
- Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan sebagai Auditor (1984-1996);

Professional History

- PT Reasuransi Nasional Indonesia as Head of SPI (2012-2017);
- PT Reasuransi Nasional Indonesia as Head of Human Resources and General Division (2010-2012);
- PT Reasuransi Nasional Indonesia as Head of Finance and Accounting Division (2004-2010),
- PT Reasuransi Nasional Indonesia as Head of Accounting/Finance Administration (1996-2004);
- In charge in BPKP at the State-Owned Enterprise Supervisory Deputy in the Directorate of Financial Institution Supervision – Subdirectorate of Insurance and LKBN (1996);
- Representative of BPKP for the Province of South Sulawesi as Auditor (1984-1996).

Rangkap Jabatan pada Grup/Instansi Lain

Per 31 Desember 2018, Subagio Istiarno tidak menjabat posisi lain di Grup maupun perusahaan/instansi Lembaga lain.

Concurrent Position in Group/Other Institution

As of December 31, 2018, Subagio Istiarno has not held any other position in the Group and other companies/institutions.

Profil Direksi

Profile of Board of Directors

SUPARDI NAJAMUDDIN

Jabatan / Position:

Direktur Pemasaran / Director of Marketing

Periode / Period:

2019-2024

Data Pribadi / Personal data:

Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Indonesia. Usia 48 tahun. Kelahiran Bulukamba, 4 Oktober 1970. / Indonesian Citizen, resided in Jakarta, Indonesia. Age 48 years old. Born in Bulukamba on October 4, 1970.

Riwayat Penunjukan Sebagai Direksi Perseroan

Menjabat sebagai Direktur Pemasaran sejak 17 Januari 2019 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia No. SR-586/MBU/10/2017 tentang persetujuan pengangkatan anggota Direksi PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah dan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 17 Januari 2019.

Appointment as the Company's Board of Directors

Served as Marketing Director since 17 January 2019 based on the Decree of the Minister of State-Owned Enterprises of the Republic of Indonesia No. SR-586 / MBU / 10/2017 concerning the approval of the appointment of members of the Board of Directors of PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah and the Resolution of the Extraordinary General Meeting of Shareholders on 17 January 2019.

Pendidikan

- (S2) Master bidang Perbankan Islam, Universitas Indonesia Jakarta, Jakarta (2007)
- (S1) Ekonomi Akuntansi, Universitas Hasanuddin Makassar (1995)

Education

- (S2) Master of Sharia Banking, Universitas Indonesia, Jakarta, (2007)
- (S1) Accounting Economy, Universitas Hasanuddin Makassar (1995)

Keahlian

Pemasaran

Expertise

Marketing

Riwayat Profesi

- PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah sebagai Senior Executive Vice President (Januari 2018);
- BNI Syariah sebagai Division Head Divisi Pengelolaan dan Pengadaan Aset Tetap (2017-2018)
- BNI Syariah sebagai Network and General Affairs Division (2014-2016);
- BNI Syariah sebagai Division Head of Funding and Transactional Division (2015);
- BNI Syariah sebagai Staf Khusus Direksi (2014);
- BNI Syariah sebagai Division Head Divisi Komunikasi, Jaringan dan Logistik (2013);
- BNI Syariah sebagai Division Head Divisi Pengendalian Keuangan dan Operasional (2011);
- BNI Syariah sebagai Branch Manager Kantor Cabang Fatmawati (2010);

Professional History

- PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah as Senior Executive Vice President (January 2018);
- BNI Syariah as Head of Management and Procurement of Fixed Assets (2017-2018)
- BNI Syariah as Network and General Affairs Division (2014-2016);
- BNI Syariah as Division Head of Funding and Transactional Division (2015);
- BNI Syariah as Special Staff of the Board of Directors (2014);
- BNI Syariah as Head of Communication, Network, and Logistics Division (2013);
- BNI Syariah as Head of Finance Control and Operational Division (2011);
- BNI Syariah as Branch Manager of Branch Office of Fatmawati (2010);

Rangkap Jabatan pada Grup/Instansi Lain

Per 31 Desember 2018, Supardi Najamuddin tidak menjabat posisi lain di Grup maupun perusahaan/instansi Lembaga lain.

Concurrent Position in Group/Other Institution

As of December 31, 2018, Supardi Najamuddin has not held any other position in the Group and other companies/institutions.

Profil Dewan Komisaris

Profile of Board of Commissioners

BUDI WISAKSENO

Jabatan / Position:

Komisaris Utama/Komisaris Independen
/ *President Commissioner/Supervisory
Independent Commissioner*

Periode / Period:

2017-2022

Data Pribadi / Personal data:

Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Indonesia.
Usia 65 tahun. Kelahiran Jakarta 18 Juni 1954. / *Indonesian Citizen,
resided in Jakarta, Indonesia. Age 65 years old. Born in Jakarta on
June 18, 1954.*

Riwayat Penunjukan Sebagai Komisaris Utama/Independen Perseroan

Menjabat sebagai Komisaris Utama/Independen Perseroan sejak 17 Mei 2016 berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 17 Mei 2016.

Appointment as the Company's President Commissioner/Independent

Appointed as President Commissioner/Independent of the Company since May 17, 2016 based on the Resolution of the Extraordinary General Meeting of Shareholders on May 17, 2016.

Pendidikan

- (S1) Ekonomi, Universitas Trisakti Jakarta (1980)

Education

- (S1) Economy, Universitas Trisakti Jakarta (1980)

Keahlian

- Risk & Compliance
- Trade Finance

Education

- Risk & Compliance
- Trade Finance

Riwayat Profesi

- PT Bank BRI Syariah sebagai Direktur Kepatuhan (2008-2014);
- PT Bank Syariah Mega sebagai Direktur Kepatuhan (2007- 2008);
- PT Bank Tugu sebagai Direktur Utama (2003-2007);
- PT Bank Muamalat Indonesia sebagai Direktur Kepatuhan, Direktur Operasi, Direktur Finance, *General Manager* Operasi dan *General Manager* SDM (1995-2002);
- Rabobank Jakarta sebagai *Operation Manager* (1993-1994);
- PT Bank Danamon Jakarta sebagai *Deputy General Manager Trade Finance-FI & Correspondent Banking Division* (1992-1994);
- PT BANK UNIVERSAL Jakarta sebagai Kepala Divisi Ekspor Impor dan Devisa (1989-1992);
- CITIBANK Jakarta sebagai *Staff Clerical* Operasional (1979-1981),

Professional History

- PT Bank BRI Syariah as Compliance Director (2008-2014);
- PT Bank Syariah Mega as Compliance Director (2007- 2008);
- PT Bank Tugu as President Director (2003-2007);
- PT Bank Muamalat Indonesia as Compliance Director, Finance Director, General Manager of Operational, and General Manager of Human Resources (1995-2002);
- Rabobank Jakarta as Operation Manager (1993-1994);
- PT Bank Danamon Jakarta as Deputy General Manager Trade Finance-FI & Correspondent Banking Division (1992-1994);
- PT BANK UNIVERSAL Jakarta as Head of Export and Import and Foreign Exchange Division (1989-1992);
- CITIBANK Jakarta as Operational Clerical Staff (1979-1981),

Rangkap Jabatan pada Grup/Instansi Lain

Per 31 Desember 2018, Budi Wisakseno tidak menjabat posisi lain di Grup maupun perusahaan/instansi Lembaga lain.

Concurrent Position in Group/Other Institution

As of December 31, 2018, Budi Wisakseno has not held any other position in the Group and other companies/institutions.



Profil Dewan Komisaris

Profile of Board of Commissioners

BAMBANG HERMANTO

Jabatan / Position:
Komisaris / Commissioner

Periode / Period:
2018-2023

Data Pribadi / Personal data:
Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Indonesia.
Usia 63 tahun. Kelahiran Surabaya, 23 Desember 1955. /
Indonesian Citizen, resided in Jakarta, Indonesia. Age 63 years old.
Born in Surabaya on December 23, 1955.

Riwayat Penunjukan Sebagai Komisaris Perseroan

Menjabat sebagai Komisaris Perseroan sejak 17 Januari 2019 berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 17 Januari 2019 dan Surat Menteri BUMN No. SR-586/MBU/10/2017 tentang persetujuan pengangkatan anggota Direksi PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah.

Appointment as the Company's Board of Commissioner

Serving as the Company's Commissioner since January 17, 2019 based on the Resolution of the Extraordinary General Meeting of Shareholders on January 17, 2019 and Letter of Minister of State-Owned Enterprises No. SR-586/MBU/10/2017 regarding approval on the appointment of members of the Board of Directors of PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah.

Pendidikan

- Ajun Akuntan, PAAP Fakultas Ekonomi Universitas Airlangga Surabaya (1979)
- Ajun Akuntan/Sarjana Muda Akuntansi, Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (1980)
- (S1) STIESIA Surabaya (1989)
- Profesi Akuntan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Universitas Airlangga Surabaya (1999)

Education

- Junior Accountant, PAAP Faculty of Economy, Universitas Airlangga Surabaya (1979)
- Junior Accountant/Associate Degree of Accounting, Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (1980)
- (S1) STIESIA Surabaya (1989)
- Accountant Profession at the Directorate General of High Education, Universitas Airlangga Surabaya (1999)

Keahlian Akuntansi

Expertise Accounting

Riwayat Profesi

- PT Asuransi Kredit Indonesia sebagai Komite Audit (2012-2017);
- PT Reasuransi Nasional sebagai Komite Audit (2012-2013);
- BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Timur sebagai Auditor Ahli Madya (2008-2011);
- Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Auditor BPKP Pusat sebagai Kepala Sub bagian Tata Usaha (2006-2008);
- BPKP Perwakilan Provinsi DKI II sebagai Kepala Sub Bagian Program dan Pelaporan (2002-2006);
- BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat sebagai Kepala Seksi Pengawasan Penerimaan pusat (2000-2002);
- BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Timur sebagai Ketua Tim Pemeriksaan Anggota Tim Pemeriksaan (1986-1999);
- Kantor Pengawasan Anggaran Banjarmasin/ BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan sebagai anggota tim (1981-1986).

Professional History

- PT Asuransi Kredit Indonesia as the Audit Committee (2012-2017);
- PT National Reinsurance as an Audit Committee (2012-2013);
- BPKP Representative of East Java Province as Associate Expert Auditor (2008-2011);
- Central BPKP Auditor Functional Development Center as Head of Administration Subdivision (2006-2008);
- BPKP DKI Jakarta Province Representative as Head of Program and Report Subdivision (2002-2006);
- BPKP West Kalimantan Province Representative as Head of the Center for Supervision of Reception (2000-2002);
- BPKP Representative of East Java Province as Chairman of the Examination Team Member of the Examination Team (1986-1999);
- Banjarmasin Budget Supervision Office / BPKP Representative Province of Kalimantan

Rangkap Jabatan pada Grup/Instansi Lain

Per 31 Desember 2018, Bambang Hermanto tidak menjabat posisi lain di Grup maupun perusahaan/ instansi Lembaga lain.

Concurrent Position in Group/Other Institution

As of December 31, 2018, Bambang Hermanto has not held any other position in the Group and other companies/institutions.

Profil Dewan Pengawas Syariah

Profile of Sharia Supervisory Board

DAUD RASYID

Jabatan / Position:

Ketua Dewan Pengawas /
Head of Supervisory Board

Periode / Period:

2018-2023

Data Pribadi / Personal data:

Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Indonesia.
Usia 55 tahun. Kelahiran Tanjung Balai, 3 Desember 1962. /
Indonesian Citizen, resided in Jakarta, Indonesia. Age 55 years old.
Born in Tanjung Balai on December 3, 1962.

Riwayat Penunjukan Sebagai Dewan Pengawas Perseroan

Menjabat sebagai Ketua Dewan Pengawas Syariah Perseroan sejak 29 Maret 2018 berdasarkan rekomendasi Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No. U-235/DSN-MUI/III/2018.

Appointment as the Company's Supervisory Board

Appointed as Chairperson of the Sharia Supervisory Board of the Company since March 29, 2018 based on the recommendation of the National Sharia Board of the Indonesian Ulama Council (DSN-MUI) No. U-235 / DSN-MUI / III / 2018.

Pendidikan

- Ph.D dalam bidang Syariah, Universitas Kairo, Mesir (1996)
- M.A. dalam bidang Syariah, Universitas Kairo, Mesir (1990)
- B.A. dalam Hukum Islam, Universitas Islam Negeri Medan, Indonesia (1983)

Education

- Ph.D in Shariah, University of Cairo, Egypt (1996)
- M.A. in Shariah, University of Cairo, Egypt (1990)
- B.A. in Islamic Law, the State University of Islamic Studies Medan, Indonesia (1983)

Keahlian

Ahli Hadits

Expertise

Hadits Expert

Riwayat Profesi

1. Kegiatan pengajaran akademik:
 - Dosen - Lembaga Ilmu Pengetahuan Islam dan Arab, Jakarta, Indonesia (2000-2012);
 - Dosen - Fakultas Hukum Islam, Universitas Islam Negeri, Bandung (1998-sekarang);
 - Graduate Instructor - Universitas Ibnu Khaldun, Bogor (2000-2008);
 - Kepala Departemen - Departemen Hadits (Program Pascasarjana) Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, Bandung (1999-2004);
 - Graduate Instructor - Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta (1996-1999); dan
 - Sekolah Pascasarjana - Universitas Indonesia, Departemen Studi Timur Tengah, Jakarta (2002).

Professional History

1. Academic teaching activities
 - Lecturer - The Institute of Islamic and Arabic Sciences, Jakarta, Indonesia (2000-2012);
 - Lecturer - Faculty of Islamic Law, The State Institute for Islamic Studies, Bandung (1998-present);
 - Graduate Instructor - University of Ibnu Khaldun, Bogor (2000-2008);
 - Department Head - Department of Hadeeth (Graduate Program) The State Institute for Islamic Studies, Sunan Gunung Djati, Bandung (1999-2004);
 - Graduate Instructor - The State Institute for Islamic Studies, Syarif Hidayatullah, Jakarta (1996-1999); and
 - The School of Post Graduate - University of Indonesia, Department of Middle East Studies, Jakarta (2002).

2. Kegiatan Dakwah

- Memberikan khutbah Solat Jumat, khutbah hari raya, dan ceramah agama di masjid-masjid di sekitar Jakarta, Indonesia (1990-sekarang);
- Memberikan khutbah Solat Jumat di Masjid Tempe, di Sydney selama dua minggu, dan memberikan ceramah kepada masyarakat Indonesia di Sydney, Australia (2013);
- Memberikan ceramah kepada masyarakat Indonesia di London, Bristol, Birmingham, Manchester, Glasgow, SouthHampton, Leeds, di Inggris (2012);
- Memberikan khutbah Solat Jumat di Masjid Tempe, di Sydney selama satu bulan, dan memberikan ceramah kepada masyarakat Indonesia di Sydney, Canberra, Melbourne, Brisbane, dan Perth, Australia (2005); dan
- Memberikan khutbah Solat Jumat di Masjid mahasiswa Muslim di Universitas Newcastle di Inggris, dan memberikan ceramah untuk masyarakat Indonesia di London, Oxford, Bristol, Birmingham, Manchester, New Castle, dan kota-kota lain di Inggris selama dua bulan (2004).

3. Dakwah di Televisi

- Memberikan kuliah untuk Program Islam di TV Indonesia: Indosiar, TVRI, RCTI, SCTV, TPI, dan TVOne (1999-sekarang)

Rangkap Jabatan pada Grup/Instansi Lain

Per 31 Desember 2018, Daud Rasyid juga menjabat sebagai Dewan Pengawas Syariah pada unit usaha asuransi syariah PT Askrida.

2. Dakwah Activities

- Addressing Jum'ah khutbah, holiday sermons, and religious lectures in mosques surround Jakarta, Indonesia (1990-present);
- Addressing Jum'ah khutbah in Tempe Mosque, in Sydney for two weeks, and giving lectures to Indonesian communities in Sydney, Australia (2013);
- Addressing lectures to Indonesian communities in London, Bristol, Birmingham, Manchester, Glasgow, SouthHampton, Leeds, in UK (2012);
- Addressing Jum'ah khutbah in Tempe Mosque, in Sydney for one month, and giving lectures to Indonesian communities in Sydney, Canberra, Melbourne, Brisbane, and Perth, Australia (2005); and
- Addressing Jum'ah khutbah in the Muslim students Mosque at University of Newcastle in UK, and giving lectures for Indonesian communities in London, Oxford, Bristol, Birmingham, Manchester, New Castle, and other cities in UK for two months (2004).

3. Dakwah in Television

- Giving lectures for Islamic Programs in Indonesian TVs: Indosiar, TVRI, RCTI, SCTV, TPI, and TVOne (1999-present)

Concurrent Position in Group/Other Institution

As of December 31, 2018, Daud Rasyid is also serving as the Sharia Supervisory Board in the Sharia insurance business unit of PT Askrida.

Profil Dewan Pengawas Syariah

Profile of Sharia Supervisory Board

MUHAMMAD ZUBAIR

Jabatan / Position:

Anggota Dewan Pengawas /
Member of Supervisory Board

Periode / Period:

2017-2022

Data Pribadi / Personal data:

Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Indonesia.
Usia 55 tahun. Kelahiran Probolinggo, 21 Juni 1962. / Indonesian
Citizen, resided in Jakarta, Indonesia. Age 55 years old. Born in
Probolinggo on June 21, 1962.

Riwayat Penunjukan Sebagai Dewan Pengawas Perseroan

Menjabat sebagai anggota Dewan Pengawas Syariah Perseroan sejak 29 Maret 2018 berdasarkan rekomendasi Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No. U-235/DSN-MUI/III/2018.

Appointment as the Company's Supervisory Board

Served as a member of the Sharia Supervisory Board of the Company since 29 March 2018 based on the recommendation of the National Sharia Board of the Indonesian Ulema Council (DSN-MUI) No. -235 / DSN-MUI / III / 2018

Pendidikan

- (S1) Program Studi Administrasi Negara FISIP, Universitas Jember (1988)
- (S2) Program Studi PSDM Universitas Indonesia (2004)

Education

- (S1) State Administrative Study Program, Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Jember (1988)
- (S2) Human Resources Development Study Program, Universitas Indonesia (2004)

Keahlian

Asuransi syariah

Expertise

Sharia insurance

Riwayat Profesi

- Anggota Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BSNP) (2011-2016);
- Wakil Ketua Komisi VII DPR RI (2009);
- Wakil Sekretaris FKB DPR RI (2008-2009);
- Anggota FKB DPR RI, Komisi VII (2007-2009);
- Anggota BURT DPR RI (2007-2008);
- Pemimpin Cabang Syariah PT Asuransi Brigin Sejahtera Artamakmur cabang Syariah (2003-2007);
- Asisten Manajer SDM PT Asuransi Brigin Sejahtera (2001-2003);
- Wakil Kepala Cabang Jakarta Veteran PT Asuransi Brigin Sejahtera Artamakmur (1999-2000);
- Wakil Kepala Cabang Jakarta Gandaria PT Asuransi Brigin Sejahtera Artamakmur (1997-1999);
- Kasi Reasuransi PT Asuransi Brigin Sejahtera Artamakmur (1994-1997);
- Staff Teknik PT Asuransi Brigin Sejahtera Artamakmur (1991-1994);
- Staff Pengawasan Intern PT Asuransi Brigin Sejahtera Artamakmur (1990-1991); dan
- Guru Madrasah Tsanawiyah Riyadus Sholihin Rangkang, Kraksaan-Probolinggo (1988-1990).

Professional History

- Member of Profession Certification National Agency (BSNP) (2011-2016);
- Vice-chairperson of the faction for Commission VII of DPR RI (2009);
- Vice Secretary of FKB DPR RI (2008-2009);
- Member of FKB DPR RI, Commission VII (2007-2009);
- Member of Household Committee (BURT) of DPR RI (2007-2008);
- Head of Sharia Branch of PT Asuransi Brigin Sejahtera Artamakmur (2003-2007);
- Assistant Manager of Human Resources of PT Asuransi Brigin Sejahtera (2001-2003);
- Deputy Head of Jakarta Veteran Branch of PT Asuransi Brigin Sejahtera Artamakmur (1999-2000);
- Deputy Head of Jakarta Gandaria Branch of PT Asuransi Brigin Sejahtera Artamakmur (1997-1999);
- Head of Reinsurance Section of PT Asuransi Brigin Sejahtera Artamakmur (1994-1997);
- Technical Staff of PT Asuransi Brigin Sejahtera Artamakmur (1991-1994);
- Intern Supervisory Staff of PT Asuransi Brigin Sejahtera Artamakmur (1990-1991); and
- Teacher at Madrasah Tsanawiyah Riyadus Sholihin Rangkang, Kraksaan-Probolinggo (1988-1990).

Rangkap Jabatan pada Grup/Instansi Lain

Per 31 Desember 2018, Muhammad Zubair tidak menjabat posisi lain di Grup maupun perusahaan/instansi Lembaga lain.

Concurrent Position in Group/Other Institution

As of December 31, 2018, Muhammad Zubair has not held any other position in the Group and other companies/institutions.



Profil Dewan Pengawas Syariah

Profile of Sharia Supervisory Board

DENI NURYADIN

Jabatan / Position:

Anggota Dewan Pengawas /
Member of Supervisory Board

Periode / Period:

2018-2023

Data Pribadi / Personal data:

Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Indonesia.
Usia 52 tahun. Kelahiran Majalengka, 25 Mei 1967 / Indonesian
Citizen, resided in Jakarta, Indonesia. Age 52 years old. Born in
Majalengka on May 25, 1967

Riwayat Penunjukan Sebagai Dewan Pengawas Perseroan

Menjabat sebagai anggota Dewan Pengawas Syariah Perseroan sejak 29 Maret 2018 berdasarkan rekomendasi Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No. U-235/DSN-MUI/III/2018.

Pendidikan

- S3 jurusan Konsentrasi Keuangan Syariah, UIN Sekolah Paska Ekonomi Islam (sedang berlangsung)
- S2 jurusan Strata Dua Keuangan dan Perbankan Syariah, Sekolah Tinggi KH. Ahmad Dahlan (2014)
- S1 Sarjana Ekonomi jurusan Manajemen, Universitas Pancasila, Jakarta (1992)

Keahlian

Keuangan & perbankan Syariah

Riwayat Profesi

- Asisten Ahli Dosen Tetap Prodi Ekonomi Islam dan Ketua LAB Keuangan dan Filantrophy Islami, UHAMKA (2016-sekarang)
- Tenaga Ahli Produk Syariah FINTECH, PT Danako Syariah (2017-sekarang)
- Anggota DPS, BPRS Matahari Artha Dana (2017-sekarang)
- Procurement Manager, Bank BRI Syariah Pusat (2012-2017)
- Marketing Manager, Bank BRI Syariah (2011-2012)
- AO Senior Retail & Linkage, Bank BRI Syariah (2010-2011)
- Team Leader, Bank Mega Syariah (2007-2009)
- Direktur Unit Simpan Pinjam, Koperasi ESQ 165 (2005-2007)
- Instruktur DIK-LAT Orientasi BSM (Manager), Lembaga Pengelola ZIS Bank Syariah Mandiri (2002-2004)
- Manajer Pengembangan Syariah, PT Kalimaya Perkasa Finance (1998-2001)
- Senior Account Officer Div. PPL, Bank Putera Surya Perkasa (1996-1998)
- Outsourcing Funding Executive, Bank Muamalat IND (1994-1996)

Rangkap Jabatan pada Grup/Instansi Lain

Per 31 Desember 2018, Deni Nuryadin tidak menjabat posisi lain di Grup maupun perusahaan/instansi Lembaga lain.

Appointment as the Company's Supervisory Board

Serving as a member of the Company's Sharia Supervisory Board since March 29, 2018 based on the recommendation of the National Sharia Board of the Indonesian Ulema Council (DSN-MUI) No. -235 / DSN-MUI / III / 2018

Education

- Doctoral degree in sharia Finance, UIN Sekolah Paska Ekonomi Islam (ongoing)
- Master's degree in Sharia Finance and Banking, Sekolah Tinggi KH. Ahmad Dahlan (2014)
- Bachelor of Economics degree in Management, Pancasila University, Jakarta (1992)

Expertise

Sharia banking & finance

Professional History

- Permanent Expert Lecturer Assistant of Islamic Economics Study Program and Chair of Islamic Financial and Philanthropy LAB, UHAMKA (2016-present)
- FINTECH Sharia Product Expert, PT Danako Syariah (2017-present)
- Member of DPS, BPRS Matahari Artha Dana (2017-present)
- Procurement Manager, Bank BRI Syariah Pusat (2012-2017)
- Marketing Manager, Bank BRI Syariah (2011-2012)
- AO Senior Retail & Linkage, Bank BRI Syariah (2010-2011)
- Team Leader, Bank Mega Syariah (2007-2009)
- Director of Savings and Loans Unit, ESQ 165 Cooperative (2005-2007)
- BSM Orientation Training and Education Instructor (Manager), Bank Syariah Mandiri ZIS Management Institute (2002-2004)
- Sharia Development Manager, PT Kalimaya Perkasa Finance (1998-2001)
- Senior Account Officer of Div. PPL, Bank Putera Surya Perkasa (1996-1998)
- Outsourcing Funding Executive, Bank Muamalat IND (1994-1996)

Concurrent Position in Group/Other Institution

As of December 31, 2018, Deni Nuryadin has not held any other position in the Group and other companies/institutions.



Profil Kepala Divisi

PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah

Profile of Heads of Divisions of PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah



Khairul Fata

Kepala Divisi Pemasaran
dan Pengembangan Produk
Head of Product Marketing
and Development Division

Shakti Agustono Rahardjo

Kepala Divisi Keuangan dan
Akuntansi
Head of Finance &
Accounting Division

Heddy Fachradi

Kepala Divisi SDM dan
Umum
Head of HR and GA
Division

Baitus Luckman Hakim

Kepala Divisi Operasional
Head of Operations

Khairul Fata

Kepala Divisi Pemasaran dan Pengembangan Produk

Warga Negara Indonesia, 51 tahun. Saat ini berdomisili di Jakarta, Indonesia.

Menjabat sebagai Kepala Divisi Pemasaran dan Pengembangan Produk sejak 2013. Sebelumnya, beliau menjabat berbagai posisi penting di PT Asuransi Takaful Indonesia di antaranya Group Head of Technical Division (Januari 2012-Agustus 2012), Group Head of Marketing Division (2006-2011), Branch Manager Jakarta-Pondok Indah (2004-2006), Marketing Manager Broker & Direct-Head Office (2002-2004), Branch Manager Jakarta-Saharjo (2000-2002), Reinsurance Section Manager (1998-2000) Claims Section Manager (1997-1998), dan Underwriting Staff (1995-1997). Selain itu, beliau juga memiliki pengalaman lainnya di antaranya sebagai Management Trainee PT Asuransi BSAM (1994-1995), dan Staff Akuntansi PT Ayuningrum Kencana (1992-1994).

Beliau meraih gelar S1 jurusan Management dari Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto pada 1991.

Shakti Agustono Rahardjo

Kepala Divisi Keuangan dan Akuntansi

Warga Negara Indonesia, 53 tahun. Saat ini berdomisili di Jakarta.

Menjabat sebagai Kepala Divisi Keuangan & Akuntansi Perseroan sejak Februari 2019 berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 125/KEP-DIR/SDM/I/2019 tentang Mutasi Pegawai sdr. Shakti Agustono Rahardjo PT Penjaminan Pembiayaan Askrindo Syariah tanggal 9 Januari 2019. Sebelumnya, beliau menjabat sebagai Kepala Divisi Pengembangan SDM & Umum Perseroan (2017-2019); Kepala Kantor Pemasaran Syariah Perseroan Tangerang & Lampung (2016-2017), Kepala Divisi Keuangan, Akuntansi, SDM & Umum Perseroan (2013-2016), Direktur Keuangan & Administrasi Perusahaan Daerah Jasa Transportasi, BUMD Bogor (2011-2013), Wakil Presiden Pendukung Bisnis Takaful House (2008-2009), Presiden Direktur PT Asuransi Takaful Umum (2000-2008), Kepala Divisi Keuangan & Administrasi-Sekretaris Perusahaan PT Asuransi Takaful Umum (1996-2000), Manajer Keuangan & Akuntansi PT Syarikat Takaful Indonesia (1993-1996), Broker Asuransi, Manajer Keuangan & Akuntansi PT Alexander Lippo Indonesia (sekarang: PT AON Indonesia) (1993), Manajer Akuntansi PT Daya Tata Matra (DATAM), (1992-1993), Senior Auditor Ernst & Young (1990-1992), dan Junior Auditor Klynveld Peat Marwick and Goerdeler (1989-1990).

Beliau mendapatkan gelar S1 jurusan Akuntansi dari Universitas Indonesia pada tahun 1989.

Khairul Fata

Head of Marketing and Product Development Division

Indonesian citizen, 51 years old. Currently domiciled in Jakarta, Indonesia.

Served as Head of Marketing and Product Development Division since 2013. Previously, he held various important positions at PT Asuransi Takaful Indonesia, among others, Group Head of Technical Division (January 2012-August 2012), Group Head of Marketing Division (2006-2011), Branch Manager of Jakarta-Pondok Indah (2004-2006), Marketing Manager of Broker & Direct-Head Office (2002-2004), Jakarta-Saharjo Branch Manager (2000-2002), Reinsurance Section Manager (1998-2000), Claims Section Manager (1997-1998), and Underwriting Staff (1995-1997). In addition, he also has other working experiences, among others, Management Trainee of PT Asuransi BSAM (1994-1995), and Accounting Staff of PT Ayuningrum Kencana (1992-1994).

He earned his Bachelor of Management degree from Jenderal Soedirman University, Purwokerto, in 1991.

Shakti Agustono Rahardjo

Head of Finance & Accounting Division

Indonesian citizen, 53 years old. Currently domiciled in Jakarta.

Served as Head of the Company's Finance & Accounting Division since February 2019 based on Board of Directors Decree No. 125/KEP-DIR/SDM/I/2019 concerning Employee Transfer of Shakti Agustono Rahardjo of PT Penjaminan Pembiayaan Askrindo Syariah dated January 9, 2019. Previously, he served as Head of the Company's HR Development & GA Division (2017-2019); Head of the Company's Sharia Marketing Office of Tangerang & Lampung (2016-2017), Head of the Company's Finance, Accounting, HR & General Division (2013-2016), Director of Finance & Administration of Regional-owned Transportation Service Company, Bogor BUMD (2011-2013), Vice President of Business Support of Takaful House (2008-2009), President Director of PT Asuransi Takaful Umum (2000-2008), Head of Finance & Administration-Corporate Secretary Division of PT Asuransi Takaful Umum (1996-2000), Finance & Accounting Manager of PT Syarikat Takaful Indonesia (1993-1996), Insurance Broker, Financial & Accounting Manager of PT Alexander Lippo Indonesia (now: PT AON Indonesia) (1993), Accounting Manager of PT Daya Tata Matra (DATAM), (1992-1993), Senior Auditor of Ernst & Young (1990-1992), and Junior Auditor of Klynveld Peat Marwick and Goerdeler (1989-1990).

He earned his Bachelor of Accounting degree from Indonesia University, in 1989.

Heddy Fachradi

Kepala Divisi SDM dan Umum

Warga Negara Indonesia, 53 tahun. Saat ini berdomisili di Jakarta, Indonesia.

Menjabat sebagai Kepala Divisi SDM dan Umum Perseroan sejak 9 Januari 2019 berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 126/KEP-DIR/SDM/I /2019 tentang Mutasi Pegawai sdr. Heddy Fachradi PT Penjaminan Pembiayaan Askrindo Syariah tanggal 9 Januari 2019. Sebelumnya, beliau menjabat sebagai *Sharia Branch Manager* PT Asuransi Staco Mandiri (2003-2013), *Claim Motor Underwriter staff* (2000-2002), *Motor Underwriter Staff* (2000-2001), dan *Marketing Staff* (1995-2000).

Beliau meraih gelar S1 jurusan Marketing Manajemen dari Universitas Padjadjaran Bandung pada 1990.

Baitus Luckman Hakim

Kepala Divisi Operasional

Warga Negara Indonesia, 38 tahun. Saat ini berdomisili di Jakarta, Indonesia.

Menjabat sebagai Kepala Divisi Operasional Perseroan sejak Januari 2019. Sebelumnya, beliau menjabat sebagai Jakarta Branch Manager PT Askrindo (Persero), Syariah Business Unit (2016-2019), Surabaya Branch Manager PT Askrindo (Persero), Unit Bisnis Syariah (2013-2016), Sub Branch Manager KCP Buleleng PT Bank Syariah Mandiri (2012-2013), Micro Banking District Manager Surabaya PT Bank Syariah Mandiri (Jan 2012-Mar 2012), Account Officer and Microbanking Head Denpasar PT Bank Syariah Mandiri (2010-2012), Manager of Consumer Corporate Segmen and Branch Channeling Acquisition PT Bank BII-Maybank Tbk. (2008-2009), Assistant Manager CEPS Jakarta HSBC (2007-2008), District Sales Team Manager Region 1 (Ciledug, serpong, Ciputat Tangerang Selatan) Citibank (Citifinansial) (Januari 2007-September 2007), Sales Supervisor Lampung Branch PT Gawih Jaya (Wismilak Group), dan CS for Exim Route PT Pelayaran Meratus Surabaya (2005-2006).

Beliau meraih gelar Magister Sains Management jurusan Marketing & Finance dari Universitas Airlangga Surabaya pada 2016 dan B.Sc in Physics jurusan Material & Computing Science dari Institut Teknologi Sepuluh November Surabaya pada 2004.

Heddy Fachradi

Head of HR and GA Division

Indonesian citizen, 53 years old. Currently domiciled in Jakarta.

Served as Head of the Company's HR and GA Division since January 9, 2019 based on Board of Directors Decree No. 126/KEP-DIR/SDM/I/2019 concerning Employee Transfer of Heddy Fachradi of PT Penjaminan Pembiayaan Askrindo Syariah on January 9, 2019. Previously, he served as Sharia Branch Manager of PT Asuransi Staco Mandiri (2003-2013), Claims Motor Underwriter staff (2000-2002), Motor Underwriter Staff (2000-2001), and Marketing Staff (1995-2000).

He earned his Bachelor's degree majoring in Marketing Management from Padjadjaran University, Bandung, in 1990.

Baitus Luckman Hakim

Head of Operations

Indonesian citizen, 38 years old. Currently domiciled in Jakarta, Indonesia.

Served as Head of the Company's Operations Division since January 2019. Previously, he served as Jakarta Branch Manager of PT Askrindo (Persero), Syariah Business Unit (2016-2019), Surabaya Branch Manager of PT Askrindo (Persero), Sharia Business Unit (2013-2016), Sub Branch Manager of KCP Buleleng of PT Bank Syariah Mandiri (2012-2013), Surabaya Micro Banking District Manager of PT Bank Syariah Mandiri (Jan 2012-Mar 2012), Denpasar Account Officer and Microbanking Head of PT Bank Syariah Mandiri (2010-2012), Manager of Consumer Corporate Segment and Branch Channeling Acquisition of PT Bank BII-Maybank Tbk. (2008-2009), Assistant Manager of CEPS Jakarta HSBC (2007-2008), District Sales Team of Manager Region 1 (Ciledug, Serpong, Ciputat, South Tangerang) Citibank (Citifinansial) (January 2007-September 2007), Lampung Branch Sales Supervisor of PT Gawih Jaya (Wismilak Group), and CS for Exim Route of PT Pelayaran Meratus Surabaya (2005-2006).

He earned his Master of Science in Management majoring in Marketing & Finance from Airlangga University, Surabaya, in 2016 and B.Sc in Physics majoring in Materials & Computing Science from Institut Teknologi Sepuluh November, Surabaya, in 2004.

Informasi Perubahan Susunan Manajemen

Information on Change of Management Composition

Pada saat penyampaian laporan tahunan ini, komposisi Direksi Perseroan mengalami perubahan berdasarkan Keputusan RUPS LB tanggal 17 Januari 2019. Susunan Direksi terakhir Perseroan adalah sebagaimana disajikan dalam bab Profil Direksi pada laporan tahunan ini.

At the submission of this annual report, the composition of the Company's Board of Directors changes based on the Resolution of General Meeting of Shareholders on January 17, 2019. The latest composition of the Company's Board of Directors is as presented in the chapter of Profile of Board of Directors of this annual report.

Informasi Anak Perusahaan, Perusahaan Asosiasi, dan Perusahaan Ventura Bersama

Information on Subsidiaries, Associated Companies, and Joint Venture Companies

Hingga akhir tahun 2018, Perseroan tidak memiliki anak perusahaan, perusahaan asosiasi, dan perusahaan ventura bersama.

Up to the end of 2018, the Company has not have any subsidiaries, associated companies, and joint venture companies.

Kronologis Pencatatan Saham

Chronology of Shares Listing

Hingga akhir tahun 2018, Perseroan belum mencatatkan saham di Bursa Saham, sehingga tidak ada informasi terkait kronologis pencatatan, perubahan jumlah saham, maupun nama bursa.

Up to the end of 2018, the Company has not listed its shares in the stock exchange, so there is no information on the chronology of listing, change of shares amount, and name of stock exchange.

Komposisi Pemegang Saham

Composition of Shareholders

Berdasarkan Akta No. 45 tanggal 29 November 2012 oleh Hadijah, S.H., notaris di Jakarta, modal dasar Perusahaan ini ditetapkan sebesar Rp400.000.000.000 terbagi atas 400.000 saham, masing-masing saham dengan nilai nominal Rp1.000.000. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor 25% atau sejumlah 100.000 saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp100.000.000.000.

Based on Deed No. 45 dated November 29, 2012 of Hadijah, S.H., notary in Jakarta, the Company's authorized capital is stipulated at Rp400,000,000,000, which is divided into 400,000 shares, with the par value of each share of Rp1,000,000. From the authorized capital, the issued and paid-up capital is 25% or 100,000 shares with the overall par value of Rp100,000,000,000.

Berdasarkan akta tersebut diatas sesuai pasal 4 ayat 2 struktur modalnya adalah sebagai berikut:

Based on article 4 paragraph 2 of the above deed, the capital structure is as follows:

Uraian / Description	Jumlah Saham / Number of Shares	Persentase / Percentage	Nominal Saham (Dalam Juta Rp) / Share Nominal (in Million Rp)
PT (Persero) Asuransi Kredit Indonesia	99.999	99%	99.999
Yayasan Dana Kesejahteraan Karyawan Askrindo	1	1%	1
Jumlah / Total	100.000	100%	100.000

Berdasarkan Surat Menteri Badan Usaha Milik Negara selaku Rapat Umum Pemegang Saham PT Askrindo (Persero) Nomor: S-345/MBU/06/2015 tanggal 12 Juni 2015 perihal Persetujuan Penambahan Modal pada PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah, Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah memutuskan untuk menambah modal disetor sebanyak 150.000 lembar saham senilai @ Rp1.000.000 atau senilai Rp150.000.000.000. Pada tanggal 29 Juni 2015, Perseroan telah menerima setoran sebesar Rp150.000.000.000 sehingga modal disetor perusahaan sampai dengan akhir tahun 2015 menjadi sebesar Rp250.000.000.000.

Based on Letter of Minister of State-Owned Enterprise as the General Meeting of Shareholders of PT Askrindo (Persero) Number: S-345/MBU/06/2015 dated June 12, 2015 regarding Approval of Capital Increase to PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah, the Extraordinary General Meeting of Shareholders of PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah decided to increase the paid-up capital by 150,000 shares with each value of Rp1,000,000 or amounting to Rp150,000,000,000. On June 29, 2015, the Company received a payment amounting to Rp150,000,000,000, so the Company's paid-up capital up to the end of 2015 became Rp250,000,000,000.

Uraian / Description	Jumlah Saham / Number of Shares	Persentase / Percentage	Nominal Saham (Dalam Juta Rp) / Share Nominal (in Million Rp)
PT (Persero) Asuransi Kredit Indonesia	249.999	99%	249.000
Yayasan Dana Kesejahteraan Karyawan Askrindo	1	1%	1
Jumlah / Total	250.000	100%	250.000

Lembaga dan Profesi Penunjang Perusahaan

The Company's Supporting Institution and Profession

Kantor Akuntan Publik / Public Accounting Firm

KAP Tanubranta Sutanto Bambang & Rekan

Prudential Tower Lantai 17

Jl. Jend. Sudirman Kav. 79

Jakarta 12910

Telp / Phone : (021) 5795 7300

Fax : (021) 5795 7301

Website : bdo.co.id

Aktuaria / Actuary

PT Prima Aktuaria

Wisma Prima Lantai 2

Jl. Salemba Tengah No. 11

Jakarta Pusat, 10440

Telp / Phone : (+62) 822 6133 3338

(+62) 878 7300 7778

Pemeringkat Efek / Credit Rating Agency

PT Fitch Ratings Indonesia

Gedung DSB Bank Tower,

Lt. 24 Ciputra World 1, Jl. Prof DR Satrio Kav 3-5, Karet

Jakarta Selatan

Telp / Phone : (021) 2988 6800

Fax : (021) 2988 6822

Email : jessica.pratiwi@fitchratings.com

Konsultan Hukum / Legal

Amir Syamsudin & Partners

Menara Sudirman Lt. 9

Jl. Jend. Sudirman Kav. 60, Jakarta 12190, Indonesia.

Telp / Phone : (021) 522 0855 (Hunting), 522 7020

Fax : (021) 522 0840

Email : kharisma@amirsyam.com

Informasi Jasa Berkala Lembaga Profesi dan Penunjang Perusahaan Tahun 2018

Information on Regular Service of Profession Institutions and Supporting Companies in 2018

No.	Lembaga / Institution	Jasa yang Diberikan / Service Provided	Periode Penugasan / Assignment Period	Biaya / Fee
1.	KAP Tanubranta Sutanto Bambang & Rekan	Audit Laporan Keuangan / Audit of Financial Statements	Tahun Buku 2018 / Financial Year 2018	Rp90.000.000
2.	Pemeringkat Efek PT Fitch Ratings Indonesia	Memerikngkat tingkat kredibilitas Perseroan / Rating the level of credibility of the Company	Tahun Buku 2018 / Financial Year 2018	Rp10.000.000
3	Aktuaria PT Prima Aktuaria	Menghitung imbalan pasca kerja (pension) / Calculate post- retirement benefits (pension)	Tahun 2018 / Year 2018	Rp110.000.000
4.	Konsultan Hukum Amir Syamsudin & Partners	Memberikan konsultasi hukum/ Provide legal consultation	Tahun 2018 / Year 2018	Rp462.000.000



RINDO
Syariah

Tinjauan Pendukung Bisnis

Review of Business Supports

Tinjauan Pendukung Bisnis

Review of Business Supports

Sumber Daya Insani

Human Resources



Perseroan senantiasa menempatkan **Sumber Daya Insani (SDI)** sebagai **aset utama** dan **mitra** dalam mencapai **tujuan bisnis**. SDI menjadi **elemen penting kesuksesan kinerja Perseroan** dalam memberikan **pelayanan terbaik** kepada seluruh **pelanggan**.

The Company continuously puts human resources as the primary asset and partner in achieving its business objective. Human resources become an important element in the success of the Company's performance to provide the best service to all customers.

Perseroan senantiasa menempatkan Sumber Daya Manusia (SDI) sebagai aset utama dan mitra dalam mencapai tujuan bisnis. SDI menjadi elemen penting kesuksesan kinerja Perseroan dalam memberikan pelayanan terbaik kepada seluruh pelanggan. Menyadari hal tersebut, Perseroan berupaya untuk senantiasa mengembangkan sistem pengelolaan SDM yang dimiliki.

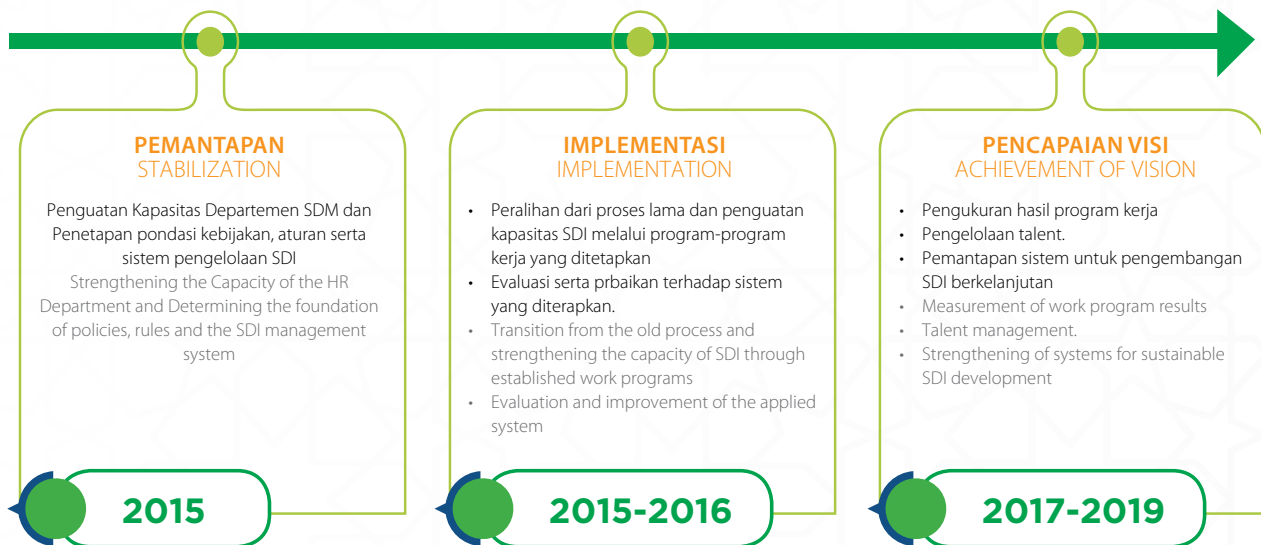
The Company continuously puts human resources as the primary asset and partner in achieving its business objective. Human resources become an important element in the success of the Company's performance to provide the best service to all customers. Being aware of such condition, the Company is striving to constantly develop the management system of the human resources.

Perseroan melalui Departemen SDI juga mendorong setiap individu untuk terus meningkatkan keahlian dan keterampilan sesuai bidangnya masing-masing. Sejalan dengan kondisi bisnis yang terus berkembang, Perseroan juga memastikan setiap karyawan memiliki kompetensi yang memadai dengan tuntutan tugas dan kewajiban masing-masing individu. Perseroan mewujudkan hal ini dengan menyelenggarakan pembelajaran dan pengembangan SDI secara intensif.

The Company through the Human Capital Department encourages each individual to keep improving their expertise and skills in their fields. In line with the growing business condition, the Company also ensures that each employee has sufficient competence for their duties and obligations. The Company realizes it by organizing intensive human resources learning and development.

ROADMAP PENGELOLAAN SUMBER DAYA MANUSIA

Perseroan menjalankan pengelolaan SDI secara jelas agar pengembangan SDI lebih terarah sehingga mampu menunjang kebutuhan Perseroan dalam menghadapi dinamika yang ada. Secara umum, rencana pengembangan SDI ke depan adalah menyiapkan *performance oriented personnel* sebagai *key driver* pertumbuhan bisnis sesuai dengan visi misi Perseroan. Dalam merencanakan pengelolaan SDI, Perseroan telah menyusun *roadmap* pengelolaan SDI sebagai berikut:



STRUKTUR PENGELOLA SDI

Pengelolaan SDI Perseroan menjadi tanggung jawab Divisi SDI dan umum dan diawasi oleh Komite Personalia. Pelaksanaan tugas oleh Divisi tersebut dipertanggungjawabkan secara langsung kepada Direktur Keuangan & Umum. Berdasarkan hal tersebut, struktur organisasi pengelola SDM ditunjukkan sebagai berikut.

ROADMAP OF HUMAN RESOURCES DEVELOPMENT

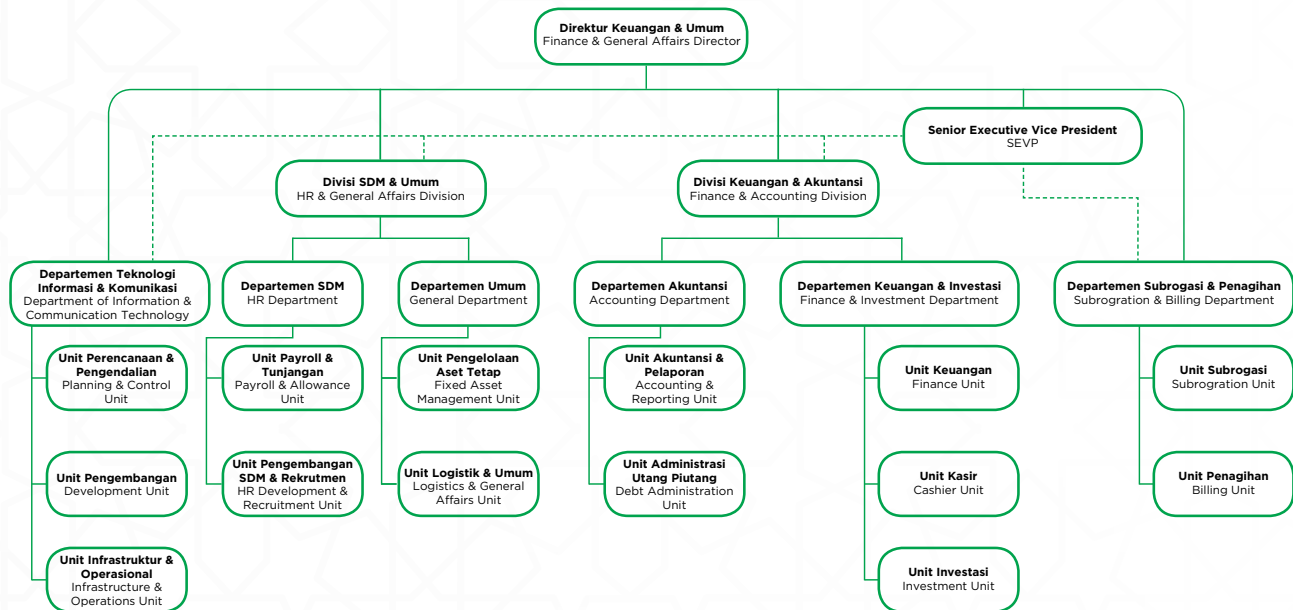
The Company carries out human resources management clearly, so they will be more directed and able to support the Company's needs in facing the existing dynamics. Generally, the future plan of human resources development is to prepare performance-oriented personnel as the key driver of business growth in accordance with the Company's vision and mission. In planning the human resources management, the Company has formulated a roadmap of human resources development as follows:

STRUCTURE OF HUMAN RESOURCES MANAGEMENT

The management of the Company's SDI is the responsibility of the SDI Division and the public and is overseen by the Personnel Committee. The duties performed by the Division are directly reported to the Finance & General Director. Therefore, the organizational structure of human resources management is shown as follows.

Skema Struktur Organisasi Pengelola Sumber Daya Insani Perseroan

Scheme for Organizational Structure of Human Capital Management



PROFIL KEPALA DIVISI HUMAN CAPITAL

Profil Kepala Divisi SDI dan Umum telah disajikan dalam bab Profil Kepala Divisi dalam laporan tahunan ini.

PROFILE OF HEAD OF HUMAN CAPITAL DIVISION

The profiles of SDI and General Division Heads are presented in the Division Head Profiles chapter in this annual report

REKRUTMEN DAN PENGEMBANGAN KARIR

Perseroan melakukan rekrutmen dengan prinsip keterbukaan, kewajaran dan kesetaraan. Proses seleksi dilakukan berdasarkan kebutuhan dan kompetensi yang dimiliki kandidat. Kandidat dijangkau melalui iklan, situs Perseroan, *job fair*, referensi dan media rekrutmen lainnya. Perseroan merekrut lulusan baru secara selektif dari perguruan tinggi terkemuka yang mempunyai indeks prestasi dan potensi yang baik. Calon karyawan diberikan pelatihan intensif untuk mempercepat proses adaptasi dengan pekerjaan di lapangan.

RECRUITMENT AND CAREER DEVELOPMENT

The Company conducts recruitment with transparency, fairness, and equality. The selection process is performed based on the needs and competence of the candidates. Candidates are informed through advertisements, the Company's website, *job fair*, references, and other recruitment media. The Company selectively recruits fresh graduates from well-known universities that have good grade points and potentials. Candidates of employees are provided with intensive training to accelerate the adaptation process to the work in the field.

Setiap karyawan mempunyai kesempatan yang sama untuk mencapai tingkat jabatan tertinggi berdasarkan kemampuannya. Perseroan memiliki program pengembangan karir yang lebih tertata serta promosi jabatan dan grade didasarkan pada penilaian kinerja dan melalui seleksi yang berjenjang. Di sepanjang tahun 2018, Perseroan merekrut sebanyak 38 karyawan baru yang berasal dari berbagai latar belakang untuk menjabat berbagai posisi di Perseroan.

Each employee has the same opportunity to reach the highest position level based on their skills. The Company has a well-managed career development program and position and grade promotion based on the performance assessment and tiered selection. During 2018, the Company recruited 38 new employees from various backgrounds to be in different positions in the Company.

HUMAN CAPITAL MANAGEMENT SYSTEM

Sebagai upaya untuk meningkatkan kinerja SDI, khususnya dalam proses remunerasi, *talent management*, *training & development* serta penilaian kinerja, maka telah diterapkan penggunaan *Human Capital Management system*. Saat ini

HUMAN CAPITAL MANAGEMENT SYSTEM

As an effort to improve the performance of human capital, particularly in remuneration process, talent management, training & development, and performance evaluation, the Human Capital Management system is implemented.

progres pekerjaan sudah mencapai 100%, adapun proses *Human Capital* yang sudah dapat dilakukan melalui sistem adalah: sentralisasi *payroll*, master data pegawai, kamus kompetensi serta *key performance indicator* untuk Pimpinan Unit Usaha dan seluruh pegawai.

PROGRAM SDI TAHUN 2018

Dalam rangka meningkatkan kualitas SDI yang dimiliki, Perseroan di sepanjang tahun 2018 telah menjalankan beberapa program kegiatan strategis, antara lain:

1. Menyusun dan mengevaluasi pedoman SDI Perseroan.
2. Optimalisasi pemanfaatan aplikasi *Human Resource Information System* bekerjasama dengan konsultan dan Divisi IT.
3. Menyelenggarakan program pendidikan dan pelatihan secara berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kompetensi SDI, baik langsung maupun melalui internet (*e-learning*).
4. Menyusun *job description* unit kerja.

SISTEM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Insan Perseroan dipersiapkan untuk menjadi SDI yang efektif, produktif dan memiliki integritas melalui pelatihan-pelatihan yang disesuaikan dengan kebutuhan dan tuntutan aktual di lapangan dan di masa depan. Perseroan memetakan program pengembangan SDI lebih terstruktur yang mencakup pemetaan kebutuhan SDI sampai dengan beberapa tahun ke depan, serta memperkuat program pelatihan dan pengembangan dengan menyusun kurikulum yang mampu menjawab kebutuhan.

Setiap karyawan mendapatkan kesempatan yang setara dalam meningkatkan kompetensi sesuai dengan potensi, kemampuan dan ketrampilan yang dipersyaratkan. Perseroan menyelenggarakan berbagai bentuk pelatihan untuk meningkatkan pengetahuan dan kompetensi pegawai melalui pembelajaran dan pengembangan. Jenis pembelajaran dan pengembangan bervariasi, mulai dari diklat pembentukan diri, diklat pengembangan keterampilan, hingga diklat khusus.

Currently, the working progress has reached 100%, while the human capital processes that can be one through the system are payroll centralization, employee master data, competence dictionary, and key performance indicator for Leaders of Business Units and all employees.

HUMAN RESOURCES PROGRAM IN 2018

In order to improve the human resources quality, during 2018 the Company has applied several strategic programs as follows:

1. Formulating and evaluating the Company's guidelines for human resources.
2. Optimizing the utilization of Human Resource Information System Program, cooperating with consultants and IT Division.
3. Organizing education programs and trainings continuously in order to develop the human resources competence, both directly and through internet (*e-learning*).
4. Formulating job description for business units.

EDUCATION AND TRAINING SYSTEM

The Company's human resources are prepared to be effective, productive, and having integrity through the trainings that are adjusted to the needs and actual demands in the field and in the future. The Company maps a more structured human resources development program, which include mapping the needs of human resources up to the next several years, as well as strengthening training and development programs by compiling the curriculum that is able to answer the needs.

Each employee has equal opportunity to develop their competence in accordance with the potentials, abilities, and skills required. The Company organizes various trainings to improve knowledge and competence of the employees through learning and development. The learning and development types are varied, starting from training on self-development, training on skill development, and special trainings.

Tabel Pendidikan dan Pelatihan

Table of Education and Trainings

No	Pelatihan / Training	Waktu / Time	Tempat / Place	Penyelenggara / Organizer	Biaya (Rp) / Fee (Rp)
Pelatihan Operasional (Aktuarial, Akseptasi, Klaim & Reasuransi) / Operational Training (Actuarial, Acceptance, Claims & Reinsurance)					
1	Tutorial Ujian PAI Subjek A40 (Akuntansi)	Maret 2018 – Mei 2018 / March 2018 / – May 2018	Jakarta	PT. Reasuransi Nasional Indonesia	Free
2	Workshop Dasar-dasar Aktuarial dalam Industri Asuransi Jiwa	Maret 2018 / March 2018	Jakarta	PT. Reasuransi Nasional Indonesia	Free
3	Workshop Sosialisasi Permenko No.11 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan KUR	Maret 2018 / March 2018	Jakarta	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI	Free

No	Pelatihan / Training	Waktu / Time	Tempat / Place	Penyelenggara / Organizer	Biaya (Rp) / Fee (Rp)
4	Reinsurance Gathering 2018	Maret 2018 / March 2018	Jakarta	PT. Reasuransi Nasional Indonesia	Free
5	Analisis Pembiayaan Tingkat Dasar dan Penanganan Pembiayaan Bermasalah	Mei 2018 / May 2018	Jakarta	Muamalat Institute	11.500.000
6	Workshop Internal Power Plant & Fintech	Agustus 2018 / August 2018	Jakarta	PT. Reasuransi Nasional Indonesia	Free
7	Tutorial Ujian PAI Subjek A70 (Permodelan dan Teori Risiko)	September 2018 – Oktober 2018 / September 2018 – October 2018	Jakarta	PT. Reasuransi Nasional Indonesia	Free
8	In House Training : Sosialisasi Produk Konsumer Bank Syariah Mandiri	September 2018 / September 2018	Jakarta	Divisi Pemasaran & Pengembangan Produk	1.844.000
9	Workshop Penjaminan Kapal dan Penanganan pada Kredit Bermasalah	Desember 2018 / December 2018	Jakarta	Kontan Academy	6.750.000
10	Pelatihan Dasar Asuransi Syariah IIS	Desember 2018 / December 2018	Jakarta	PT. Reasuransi Nasional Indonesia	Free
Sub Total					20.094.000

Pelatihan Keuangan dan Akuntansi / Financial and Accounting Training

1	Pelatihan International Financial Reporting Standards (IFRS) VII	Agustus 2018 / August 2018	Jakarta	PT (Persero) Asuransi Kredit Indonesia	Free
2	In House Training : Pemantapan Open Bravo, Keuangan dan Akuntansi Kantor Cabang	Oktober 2018 / October 2018	Jakarta	Divisi Keuangan dan Akuntansi	22.737.200
3	Training Brevet A&B Terpadu	November 2018 / November 2018	Jakarta	Ikatan Akuntan Indonesia	5.400.000
Sub Total					28.137.200

Pelatihan Risk Management / Risk Management Training

1	Risk Management	Juli 2018 / July 2018	Jakarta	Intraglobal Development	4.000.000
2	Training A to Z GCG	Juli 2018 / July 2018	Jakarta	DPS Consulting	4.000.000
3	Workshop Manajemen Kepatuhan	Juli 2018 / July 2018	Jakarta	PT (Persero) Asuransi Kredit Indonesia	Free
4	Workshop Tindak Pidana Korupsi	Juli 2018 / July 2018	Jakarta	The Center For Continuing Legal Education (CLE) Fakultas Hukum Universitas Indonesia	2.500.000
5	In House Training : Sosialisasi dan penginputan data risiko pada sistem informasi manajemen risiko korporat berbasis web	September 2018 / September 2018	Jakarta	Manajemen Risiko, Kepatuhan dan GCG	6.541.000
Sub Total					17.041.000

Pelatihan Surety Bond & Bank Guarantee / Surety Bond & Bank Guarantee Training

1	In House Training :	Mei 2018 / May 2018	Jakarta	Divisi Suretyship	29.290.950
Sub Total					29.290.950

Pelatihan Soft Skill / Soft Skill Training

1	Exclusive Public Speaking (Golden Mind)	Maret 2018 / March 2018	Jakarta	Golden Mind	3.300.000
2	In House Training :	Juli 2018 / July 2018	Jakarta	Divisi Pemasaran & Pengembangan Produk	16.016.000
3	In House Training : Selling Skill and Communication Skill	November – Desember 2018 / November – December 2018	Jakarta	Sandler Trainingng	139.056.800
Sub Total					158.372.800

Pelatihan Lainnya (Corporate Governance, HR dan HSE) / Other Training (Corporate Governance, HR and HSE)

1	Simulasi Penanggulangan Bencana	Juli 2018 / July 2018	Jakarta	PT (Persero) Asuransi Kredit Indonesia	Free
2	In House Training Interpretasi KPKU BUMN	Agustus 2018 / August 2018	Jakarta	PT (Persero) Asuransi Kredit Indonesia	Free
3	Training Leading Organization Change	Desember 2018 / December 2018	Jakarta	Elegan Indonesia	4.000.000
Sub Total					4.000.000
Total					256.935.950

BIAYA PENGEMBANGAN KOMPETENSI

Besarnya investasi di bidang pengembangan SDI yang dikeluarkan Perseroan selama tahun 2018 mencapai Rp256.935.950.

EVALUASI PENGEMBANGAN KOMPETENSI

Guna mengukur efektivitas atas pelaksanaan sistem pelatihan dan pengembangan bagi SDI, Perseroan senantiasa menjalankan evaluasi setelah penyelenggaraan pelatihan. Hasil evaluasi tersebut menjadi salah satu bahan pertimbangan, bukan sebagai faktor penentu atau merupakan hasil akhir suatu proses/kegiatan di pengembangan SDI, baik dalam pengangkatan karyawan (promosi) maupun proses mutasi karyawan, ataupun sebagai dasar untuk meningkatkan kebutuhan *training* lanjutan SDI di masa mendatang.

PROFIL SUMBER DAYA INSANI PERSEROAN

Pada 2018, Perseroan didukung oleh 162 karyawan, naik 25% dibandingkan pada 2017 sebanyak 130 karyawan. Perseroan pada 2018 merekrut beberapa karyawan baru guna menunjang pencapaian visi dan misi Perseroan.

Tabel Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan

Uraian	2018	2017
Manager	20	15
Supervisor	18	16
Staff	124	99
Total	162	130

Tabel Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Uraian	2018	2017
S2 / Post graduate	11	9
S1 / Bachelor's	146	118
Diploma / Diploma	7	3
SMA / Senior High School	1	
Total	162	130

Tabel Jumlah Pegawai Berdasarkan Usia

Uraian	2018	2017
<20-35	114	92
36-45	36	29
46-56	12	9
Total	162	130

COMPETENCE DEVELOPMENT FEE

The amount of investment in the field of SDI development issued by the Company during 2018 reached Rp256,935,950.

EVALUATION OF COMPETENCE DEVELOPMENT

In order to measure the effectiveness of the implementation of training and development system for human resources, the Company continuously conducts evaluation after a training. The evaluation result will be a consideration, not a defining factor or the end result of a process/activity in the human resources development, both for employee appointment (promotion) and employee mutation process, or as a basis to increase the needs for further human resources training in the future.

PROFILE OF HUMAN RESOURCES

In 2018, the Company was supported by 162 employees, increased by 25% compared to 2017 of 130 employees. In 2018, the Company recruited some new employees to support the achievement of the Company's vision and mission.

Table of Number of Employees Based on Position

Table of Number of Employees Based on Education Level

Table of Number of Employees Based on Age

Tabel Jumlah Pegawai Berdasarkan Status Kepegawaian

Table of Number of Employees Based on Employment Status

Uraian / Description	2018	2017
Tetap / Permanent	138	110
Kontrak / Contract	24	20
Total	162	130

Tabel Jumlah Pegawai Berdasarkan Gender

Table of Number of Employees Based on Gender

Uraian / Description	2018	2017
Laki-laki / Male	103	85
Perempuan / Female	59	45
Total	162	130

Tabel Jumlah Pegawai Berdasarkan Lokasi

Table of Number of Employees Based on Location

Uraian / Description	2018	2017
Kantor Pusat / Head Office	71	59
Cabang Jakarta 1 / Branch Office Jakarta 1	6	7
Cabang Jakarta 2 / Branch Office Jakarta 2	7	5
Cabang Bandung / Branch Office Bandung	5	5
Cabang Medan / Branch Office of Medan	5	4
Cabang Palembang / Branch Office of Palembang	5	4
Cabang Makassar / Branch Office of Makassar	4	4
Cabang Semarang / Branch Office of Semarang	5	5
Cabang Surabaya / Branch Office of Surabaya	6	5
Kantor Pemasaran Bekasi / Marketing Office of Bekasi	5	5
Kantor Pemasaran Tangerang / Marketing Office of Tangerang	5	3
Kantor Pemasaran Yogyakarta / Marketing Office of Yogyakarta	3	4
Kantor Pemasaran Pontianak / Marketing Office of Pontianak	1	2
Kantor Pemasaran Balikpapan / Marketing Office of Balikpapan	4	3
Kantor Pemasaran Malang / Marketing Office of Malang	4	3
Kantor Pemasaran Pekanbaru / Marketing Office of Pekanbaru	2	2
Kantor Pemasaran Padang / Marketing Office of Padang	4	4
Kantor Pemasaran Purwokerto / Marketing Office of Purwokerto	1	0
Kantor Pemasaran Sukabumi / Marketing Office of Sukabumi	1	0
Kantor Pemasaran Banda Aceh / Marketing Office of Banda Aceh	2	0
Kantor Pemasaran Jambi / Marketing Office of Jambi	1	0
Kantor Pemasaran Bandar Lampung / Marketing Office of Bandar Lampung	1	1
Kantor Pemasaran Bogor / Marketing Office of Bogor	1	0
Kantor Pemasaran Jakarta Selatan / Marketing Office of Jakarta Selatan	2	0
Kantor Pemasaran Surakarta / Marketing Office of Surakarta	2	0
Kantor Pemasaran Mataram / Marketing Office of Mataram	4	3
Kantor Pemasaran Denpasar / Marketing Office of Denpasar	0	1
Kantor Pemasaran Palu / Marketing Office of Palu	2	0
Kantor Pemasaran Tasikmalaya / Marketing Office of Tasikmalaya	1	0
Kantor Pemasaran Cirebon / Marketing Office of Cirebon	1	0
Kantor Pemasaran Kediri / Marketing Office of Kediri	1	0
Total	162	130

TINGKAT TURNOVER SDI

Melalui berbagai upaya pengelolaan SDI yang dilakukan secara adil, transparan dan berimbang, Perseroan menciptakan lingkungan kerja yang baik bagi seluruh insan Perseroan. Hal ini antara lain ditujukan untuk mengelola tingkat *turnover* karyawan Perseroan. Pada tahun 2018, tercatat sebanyak 8 karyawan berhenti bekerja karena mengundurkan diri. Tingkat *turnover* tersebut cenderung lebih tinggi dari tahun 2017 yang sebanyak 7. Tingkat *turnover* karyawan komparatif 2 tahun disajikan dalam tabel berikut.

Tabel Tingkat Turnover SDI

2018			
Pensiun / Retirement	Mengundurkan Diri / Resign	Meninggal Dunia / Die	Total
0	8	0	8

HUMAN RESOURCES TURNOVER LEVEL

Through some human resources management effort carried out fairly, transparently, and balanced, the Company creates good working environment for all individuals in the Company. It is intended to maintain turnover level of the Company's employees. In 2018, there were 8 employees stopped working because they resigned. The turnover rate tends to be higher than in 2017 which was 7. The comparison of employee turnover level in 2 years is presented in the following table.

Table of Human Resources Turnover Level

2017			
Pensiun / Retirement	Mengundurkan Diri / Resign	Meninggal Dunia / Die	Total
0	7	0	7

RENCANA KE DEPAN

Perseroan melalui Departemen Human Capital akan menggunakan sistem terintegrasi baru untuk seluruh unit usaha dan kantor pusat dalam pengelolaan SDI. Penerapan sistem ini sudah disosialisasikan di seluruh unit dan saat ini dalam tahap sinkronisasi data yang sudah di masukkan ke dalam sistem tersebut. Diharapkan dalam jangka waktu satu tahun ke depan telah dapat digunakan secara maksimal.

FUTURE PLAN

The Company through the Human Capital Department will use new integrated system for all business units and headquarter in managing the human resources. The system implementation has been socialized throughout the units and currently, it is in the stage of synchronization of data that have been entered in the system. It is expected that in the next one year, it can be implemented optimally.

Tinjauan Pendukung Bisnis

Review of Business Supports

Teknologi Informasi

Information Technology



Sebagai wujud kerja keras Perseroan dalam meningkatkan kualitas layanan berbasis TI, Perseroan pada tahun 2018 menerima penghargaan **"TOP IT Implementation on Sharia Insurance Sector 2018"** dari IT Works.

As a form of the Company's hard work in increasing the IT-based service quality, the Company in 2018 received the achievement of "TOP IT Implementation on Sharia Insurance Sector 2018" from IT Works.

TEKNOLOGI INFORMASI (TI)

Sebagai perusahaan penjaminan syariah pertama di Indonesia, Perseroan memiliki *core competence* yakni "penjaminan syariah berbasis IT". Sejak awal polis pertama diterbitkan pada tanggal 17 Mei 2013, Perseroan telah menggunakan elektronik polis.

Hal ini menunjukkan bahwa sejak awal, komitmen Perseroan untuk memanfaatkan teknologi informasi dalam bisnisnya sangat kuat. Kerjasama penggunaan *Online System Application* (OSA) dengan mitra bisnis juga dilakukan secara bertahap seiring dengan kebutuhan pengembangan produk setiap mitra bisnis. Dengan OSA dan *e-polis* maka mitra bisnis dapat secara langsung meng-input sendiri data nasabah yang akan diberikan pembiayaan dan kemudian mencetak langsung sendiri polisnya dalam waktu yang bersamaan.

INFORMATION TECHNOLOGY (IT)

As a the first Sharia guarantee company in Indonesia, the Company has the core competence, i.e., "IT-based Sharia guarantee". Since the first policy issued on May 17, 2013, the Company has used electronic policy.

This shows that since the beginning, the Company's commitment to utilize information technology in its business is very strong. The cooperation using Online System Application (OSA) with business partners is also conducted gradually proportional with the needs for product development of each business partner. With OSA and e-policy, the business partners are able to directly input by themselves the data of customers who will be provided with the financing and to print out the policy at the same time.

Peseroan telah menggunakan aplikasi *core business* yaitu *System Online Core Production* (SOCP) yang mencakup modul pemasaran, akseptasi, ta'widh, reasuransi, aktuaria dan Laporan yang telah Digunakan dan diaplikasikan secara nasional oleh karyawan Kantor Pusat, Kantor Cabang dan KPS dan KPPS.

Hingga saat ini, Perseroan telah mengembangkan Teknologi Informasi yang dimiliki melalui:

1. Pengembangan OSA:

- Implementasi *Host to Host* dengan bank BRI Syariah terkait produk mikro
- Pengembangan fitur klaim *online* dan pengajuan subrograsi *online* melalui OSA

2. Pengembangan modul SOCP:

- Penambahan fasilitas *filter/alert* apabila pengajuan pembiayaan lebih besar dari *plafond* induk
- *Blocking Plafond* (Lembaga *Linkage*) dengan adanya *alert message* apabila sudah melewati maksimum *plafond* induk *Blocking plafond* (Lembaga *Linkage*)
- Perubahan format *invoice net* (*debit note*) dan pencatatan biaya akuisisi dalam sistem SOCP beserta PPN dan PPH
- Laporan Report Tawidh
- Pembuatan *Checklist* Nilai Tuntutan Klaim di Menu *Monitoring*
- Pembuatan Fitur Untuk Filter Data Pengajuan Klaim lengkap yang belum diverifikasi KP
- Penambahan Filter untuk tanggal *create* & tanggal lengkap
- Penambahan Kategori Penyebab di Sistem SOCP
- Penambahan Fitur *Monitoring* Surat Penawaran (Hanya Melihat)
- Nilai *Outstanding* agar dapat di tampilkan di daftar sertifikat dan penjaminan *endorsement* khususnya restrukturisasi untuk kebutuhan pelaporan dan monitoring jumlah total *outstanding* risiko kafalah restruktur
- Daftar Informasi Agunan per Debitur
- Formulasi Perhitungan Rate AJP dan Nilai AJP untuk sertifikat *endrosement* Untuk laporan *monitoring* perdebitur bisa ditambahkan Bank Induk (Lap. *monitoring - checklist* ditambahkan bank induk)
- Penambahan fitur *covernote* pada tahap verifikasi Penambahan *fiel* nilai pengajuan klaim
- *Disable* Klik Kanan untuk Fitur Registrasi Debitur, Pengajuan Penjaminan, Daftar Sertifikat, Penjaminan *Endorsement*

The Company has implemented core business application, which is System Online Core Production (SOCP), covering marketing module, acceptance, ta'widh, reinsurance, actuary, and reports that have been used and applied nationally by employees of the headquarter, branch offices, as well as KPS and KPPS.

Up to now, the Company has developed its Information Technology through:

1. OSA Development:

- Implementation of Host to Host with BRI Syariah related to micro products
- Development of online claim feature and online application of subrogation through OSA

2. Development of SOCP module:

- Additional filter/alert facility if the application for financing is higher than the primary ceiling
- Blocking Plafond (Linkage Institution) with the alert message if it has passed the maximum primary ceiling of Blocking Plafond (Linkage Institution)
- Change of invoice net (debit note) format and record of acquisition fee in the SOCP system as well as the VAT and Income Tax
- Tawidh report
- Preparation of checklist for claim in the Monitoring Menu
- Creation of feature for a filter of complete claim application data that have not been verified by KP
- Additional filter for create date & complete data
- Additional cause category in the SOCP system
- Additional offering letter monitoring feature (only observing)
- Outstanding value, so it can be displayed in the list of certificate and guarantee endorsement, particularly restructuring for the purpose of reporting and monitoring the amount of total outstanding risk of structured kafalah.
- Collateral information list per debtor
- Formulation of AJP Rate calculation and AJP value for endorsement certificate. For monitoring report per debtor, Parent Bank can be added (Monitoring – checklist report is added with parent bank)
- Additional covernote feature in the verification stage of additional file for claim application
- Disabled right clicks for Debtor Registration Feature, Application for Guarantee, List of Certificate, Endorsement Guarantee

3. Pengembangan Aplikasi Table:

- *Table* digunakan sebagai *tools* dalam analisa data perusahaan untuk mendukung pengambilan keputusan
- Terdapat *dashboard* sesuai kebutuhan unit bisnis

4. Infrastruktur Perubahan Management:

- *Internet Access Management (IAM): monitoring* dalam optimalisasi dalam penggunaan *bandwidth* internet untuk karyawan, Pengelolaan dan monitoring akses, Integrasi pengelolaan akun *user* dengan terkoneksi dengan *Active Directory server*;
- Perubahan layanan VPN IP untuk 5 KPS menjadi layanan Metro
- *Backup Link DC to DRC*
- *omain controller: Penerapan Single Sign on* untuk keamanan PC atau Desktop
- Relokasi DC dari Gd Askrindo ke Sentul, Relokasi NOC dari Gd Askrindo ke Primagraha

3. Development of Table Application

- Table is used as tools in analyzing corporate data to support decision making
- There is a dashboard according to the needs of business units.

4. Management Change Infrastructure:

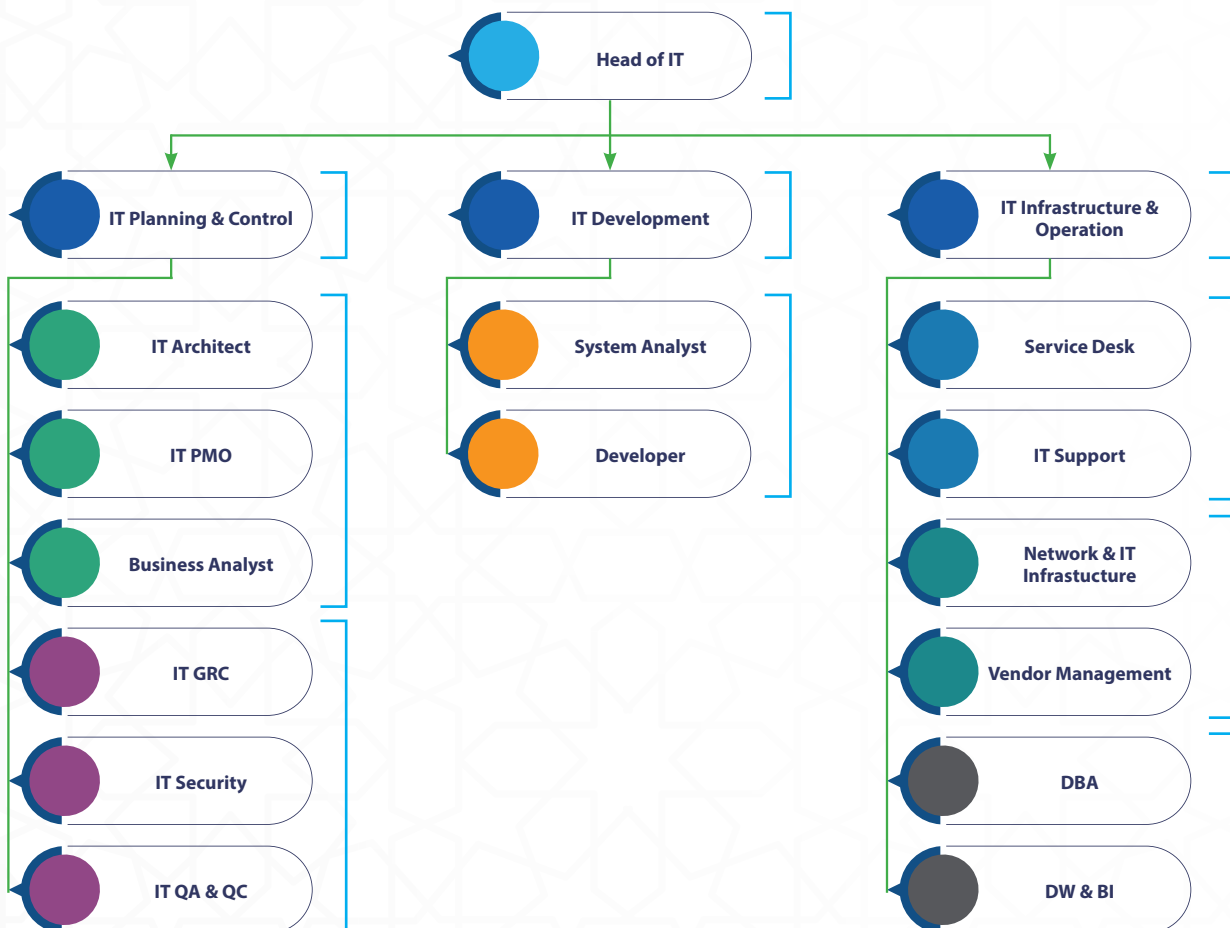
- Internet Access Management (IAM): monitoring of the optimization of internet bandwidth utilization for employees, management and monitoring of access, integration of user account management by connecting with Active Directory Server;
- Change of IP VPN service for 5 KPS to Metro service
- Backup Link DC to DRC
- Domain controller: implementation of Single Sign On for PC or desktop
- Relocation of DC from Askrindo Building to Sentul, Relocation of NOC from Askrindo Building to Primagraha

STRUKTUR PENGELOLA TI PERSEROAN

Penanggung jawab pengelolaan TI di Perseroan adalah Divisi Information Technology yang bertanggung jawab kepada Direktur Utama. Struktur Divisi Information Technology Perseroan adalah sebagai berikut:

THE COMPANY'S IT MANAGEMENT STRUCTURE

The in-charge of IT management in the Company is Information Technology Division, which is responsible to the President Director. The Company's Information Technology Division structure is as follows:



PROFIL KEPALA TEKNOLOGI INFORMASI



Gurit Eny Astuti
Kepala Teknologi Informasi
Head of Information Technology

Warga Negara Indonesia, 38 tahun. Saat ini berdomisili di Jakarta.

Menjabat sebagai Kepala Teknologi Informasi Perseroan sejak 2013. Sebelumnya, beliau menjabat sebagai *project and operational management, project budgeting, team management and project coordination* PT Inti Konten Indonesia (2012-2013), *Device R&D Manager* PT Inti Konten Indonesia (2010-2012), *Network Administrator* PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Kantor Regional Borneo Barat (2007-2010), *Application and Database Administrator* PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Cabang Sanggau (2006-2007), *Department Head Assistance* PT Hero Supermarket Tbk-Giant Hypermart (2004-2005), dan *Management in Trainee* PT Hero Supermarket Tbk. (2004-2005).

Beliau mendapatkan gelar S1 jurusan *Informatic Engineering*, Institut Teknologi Telkom pada tahun 2004.

VISI DAN MISI DI BIDANG TI

Visi

"Memberikan layanan teknologi informasi yang andal bertaraf internasional yang dapat mendukung dan mendorong inovasi bisnis".

Misi

- Memperkuat layanan TI sebagai business enablers dengan penerapan tata kelola TI yang baik serta adopsi berbagai praktik yang berlaku umum secara internasional (best practices).
- Meningkatkan sinergi bisnis dan teknologi informasi dalam meningkatkan layanan dan mendorong terciptanya inovasi
- Meningkatkan keandalan platform teknologi informasi dalam mendukung layanan kepada pelanggan

ROADMAP TEKNOLOGI INFORMASI PERSEROAN

Mengingat pentingnya peranan TI dalam kelancaran kegiatan operasional, maka Perseroan senantiasa berinovasi dan mengembangkan sistem TI yang sesuai dengan kebutuhan

PROFILE OF HEAD OF IT DIVISION

Indonesian citizen, 38 years old. Currently domiciled in Jakarta.

Served as Head of Information Technology of the Company since 2013. Previously, she served in project and operational management, project budgeting, team management and project coordination at PT Inti Konten Indonesia (2012-2013). She also served as Device R&D Manager of PT Inti Konten Indonesia (2010-2012), Network Administrator of PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) of West Borneo Regional Office (2007-2010), Application and Database Administrator of PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) of Sanggau Branch (2006-2007), Department Head Assistance of PT Hero Supermarket Tbk-Giant Hypermart (2004-2005), and Management in Trainee of PT Hero Supermarket Tbk. (2004-2005).

She earned his Bachelor's degree in Informatic Engineering from the Telkom Institute of Technology in 2004.

VISION AND MISSION IN THE IT AREA

Vision

"Providing reliable information technology service with international standard that can support and drive business innovation".

Mission

- Reinforcing IT service as business enablers by implementing good IT governance and adopting various best practices that are internationally
- Improving business synergy and information technology in increasing service and supporting innovation
- Increasing the reliability of information technology platform to support the service to customers

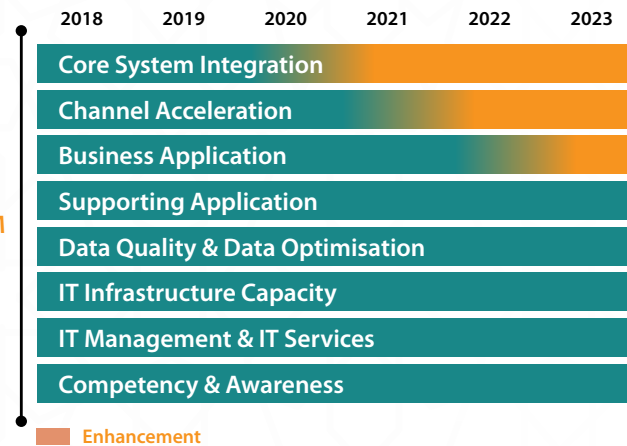
ROADMAP FOR THE COMPANY'S INFORMATION TECHNOLOGY

Considering the importance of IT role in the continuity of operational activities, the Company constantly innovates and develops IT system in accordance with the dynamic business

bisnis yang dinamis. Upaya tersebut diawali dengan penyusunan *roadmap* pengembangan TI yang disesuaikan dengan rencana jangka menengah dan jangka panjang Perseroan. *Roadmap* TI Perseroan hingga tahun 2023 adalah sebagai berikut:



needs. The effort begins with the formulation of roadmap for IT develop, which is in accordance with the Company's mid- and long-term plan. The Company's IT roadmap up to 2023 is as follows:



IMPLEMENTASI TI TAHUN 2018

Peranan Teknologi Informasi (TI) di lingkungan kegiatan usaha Perseroan secara keseluruhan adalah untuk menyediakan layanan sistem yang andal dan selaras dengan kebutuhan bisnis Perseroan. Hal ini sejalan dengan salah satu strategi yang diterapkan Perseroan untuk mengembangkan teknologi informasi dan layanan.

Pada 2018, Perseroan meningkatkan *enhancement sistem* aplikasi yang dimiliki sesuai dengan kebutuhan bisnis Perseroan terkini. Pengembangan ini di antaranya adalah meningkatkan aplikasi *Core System* dengan fitur unggulan penerbitan e-polis. Perseroan juga mengembangkan kerjasama *Host to Host* dengan mitra, baik mitra perbankan Syariah, Lembaga Reasuransi, maupun BPD. Selain itu, Perseroan juga mengembangkan infrastruktur TI yang dimiliki dengan menggunakan teknologi *hyper convert* pada *Data Center* (DC) dan *Disaster Recovery Center* (DRC).

Melengkapi peningkatan sistem TI, Perseroan pada tahun 2018 juga melakukan penyegaran atas struktur organisasi TI dan Tata Kerja Divisi/Departemen TI selaras dengan *Master Plan* Teknologi Informasi (MPTI) Perseroan. Upaya ini disertai dengan komitmen meningkatkan kompetensi SDI TI Perseroan melalui berbagai pelatihan dan *training*.

IMPLEMENTATION OF IT IN 2018

The role of information technology in the Company's business sector in overall is to provide reliable service system and conforming to the Company's business needs. This is in line with one of the strategies applied by the Company, which is to develop information technology and service.

In 2018, the Company improved the application system enhancement based on the Company's current business needs. Such development is to increase the Core System application with excellent feature of e-policy issuance. The company also develops Host-to-Host cooperation with its partners, both Sharia banking, reinsurance institution, and BPD. Furthermore, the Company also develops its IT infrastructure by using hyper convert technology at the Data Center (DC) and Disaster Recovery Center (DRC).

To complement the IT system improvement, the Company in 2018 also refreshed the IT organizational structure and working procedures of IT Division/Department in line with the Company's Master Plan of Information Technology. This effort is equipped with a commitment to develop the Company's IT human resources through various learning and trainings.

Tabel Target dan Pencapaian TI Perseroan

Table of the Company's IT Target and Achievement

No	Target & Pencapaian TI 2018 / IT Target and Achievement 2018
1	Pengembangan Sistem Integrasi Data Penjaminan dengan Mitra Bisnis (<i>host to host</i>) / Development of Integration System of Guarantee Data with business partners (<i>host to host</i>)
2	Pengembangan Sistem Aplikasi Suretyship (mobile apps Maasya) / Development of Suretyship Application System (Maasya mobile apps)
3	Pengembangan Sistem Aplikasi Call Center / Development of Call Center Application System
4	Implementasi Email Corporate / Implementation of Corporate Email
No	Target TI 2019 / IT Target 2019
1	Implementasi Core System v.2.0 sesuai dengan perkembangan kebutuhan bisnis yang akan diterapkan pada triwulan IV tahun 2019. / Implementation of Core System v.2.0 is in accordance with the development of business needs which will be implemented in the fourth quarter of 2019.

PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN SDI TI

Dalam rangka meningkatkan kemampuan SDI TI, karyawan pada bidang TI diberikan pelatihan secara intensif selaras dengan arah pengembangan sistem di Perseroan. Perseroan memberikan materi pelatihan berupa pengetahuan dan perspektif baru bagi SDI TI yang mengarah pada analisis kebutuhan bisnis dan arsitektur kebutuhan bisnis. Dengan memahami integrasi proses bisnis, SDI TI diharapkan mampu membuat perencanaan strategis TI dan mampu meningkatkan layanan kepada pelanggan.

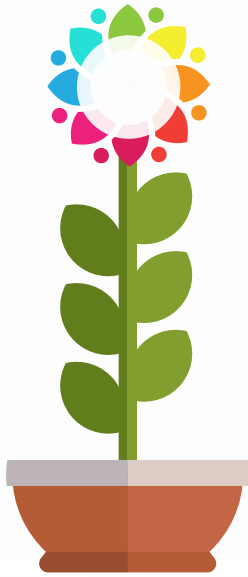
TRAINING AND DEVELOPMENT OF IT HUMAN RESOURCES

In order to improve the abilities of IT human resources, the employees in IT field is provided with intensive training conforming to the system development direction in the Company. The Company provides training material in the form of knowledge and new perspective for the IT Human Resources, which leads to the analysis of business needs and architecture of business needs. By understanding the business process integration, IT human resources are expected to prepare IT strategic planning and to be able to improve services to customers.

Tabel Pelatihan SDI TI Tahun 2018

Table of Training for IT Human Resources in 2018

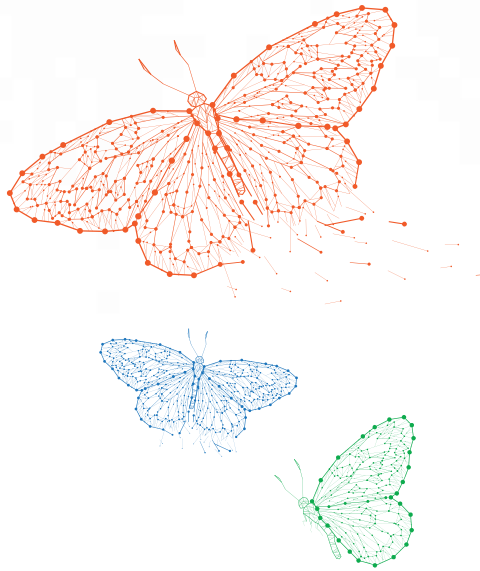
No	Nama Pelatihan / Training	Waktu / Time	Tempat / Place	Penyelenggara / Organizer	Biaya / Fee
1	Android Basic	Agustus 2018 / August 2018	Jakarta	Id-Networkers	2.000.000
2	Training CCNA RS + SP	November 2018	Jakarta	Id-Networkers	3.500.000
3	Training Windows Server	November 2018	Jakarta	Id-Networkers	2.500.000
Total					8.000.000



Tahun 2018 menjadi tahun pertumbuhan kinerja operasional dan finansial yang positif bagi Askrindo Syariah.

2018 has become a year of positive operational and financial performance growth for Askrindo Syariah.





Analisis dan Pembahasan Manajemen

Management Discussion and Analysis



Analisis dan Pembahasan Manajemen

Management Discussion and Analysis

Iklim industri yang positif merupakan peluang dan tantangan. Perseroan merespon setiap perkembangan yang ada dengan penuh optimisme, seraya menerapkan berbagai kebijakan utama.

Positive industrial climate offers both opportunity and challenges. The Company responds to every development with optimism, while implementing various key policies.



TINJAUAN MAKROEKONOMI GLOBAL

Di tengah kondisi perekonomian global yang tidak pasti, perekonomian Indonesia pada 2018 tetap kuat. Sinergi kebijakan Bank Indonesia, Pemerintah, dan otoritas terkait mampu mengawal ketahanan ekonomi dan mendorong berlanjutnya momentum pertumbuhan ekonomi. Ke depan, perekonomian Indonesia diperkirakan lebih baik dengan ditopang struktur ekonomi yang berimbang dan kuat.

Secara keseluruhan, ekonomi dunia 2018 tumbuh 3,7%, menurun dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya sebesar 3,8%. Pertumbuhan ekonomi global yang melambat dipengaruhi pertumbuhan kawasan Eropa dan Jepang seiring dengan permintaan eksternal yang berkurang dan permintaan domestik yang lemah.

Perekonomian dunia yang melambat berdampak pada penurunan volume perdagangan dan harga komoditas dunia. Pertumbuhan volume perdagangan dunia tahun 2018 tercatat 3,7%, lebih rendah dari 2017 sebesar 4,7%. Ketidakpastian perekonomian global ini bersumber dari kebijakan kenaikan suku bunga moneter AS, Federal Funds Rate-FFR, yang lebih cepat dan lebih tinggi. Kenaikan FFR tidak terlepas dari upaya

GLOBAL MACROECONOMIC OVERVIEW

In the midst of uncertain global economic conditions, Indonesian economy in 2018 remained strong. Synergy between Bank Indonesia, the Government, and related authorities was able to maintain economic resilience and encourage continued economic growth momentum. Going forward, the Indonesian economy is expected to further improve as supported by balanced and robust economic structure.

Overall, global economy in 2018 grew 3.7%, fell from 3.8% in the previous year. The decelerating global economic growth was affected by economic growth in Europe and Japan as both external and domestic demand decreased.

The world's economic downturn caused global trade volume and commodity prices to decrease. The growth of the world's trade volume in 2018 was recorded at 3.7%, lower than that of 2017 at 4.7%. This global economic uncertainty was driven by US policy to raise its monetary interest rates, namely the Federal Funds Rate-FFR, faster and higher. This increase was done as part of the efforts of the US central bank (the Fed) to mitigate

bank sentral AS (the Fed) untuk memitigasi risiko kenaikan inflasi ke depan sejalan dengan kenaikan aktivitas ekonomi AS yang melebihi pertumbuhan ekonomi potensialnya. The Fed pada 2018 telah menaikkan FFR sebanyak empat kali sebesar 100 basis points (bps), lebih besar dari 2017 sebanyak 3 kali sebesar 75 bps, dan sekali pada 2016 sebesar 25 bps, serta sekali pada 2015 sebesar 25 bps. Dengan perkembangan ini, FFR pada akhir 2018 tercatat pada kisaran 2,25%-2,50%.

Bersamaan dengan pengaruh ekspansi fiskal AS, perkembangan FFR kemudian memicu kenaikan imbal hasil obligasi pemerintah AS hingga mencapai 3,24% untuk tenor 10 tahun. Arah pengetatan kebijakan moneter AS juga diperkuat oleh kebijakan penurunan posisi neraca bank sentral (*balance sheet reduction*) sebagai bagian dari proses normalisasi kebijakan kuantitas yang ditempuh saat krisis keuangan global 2008. Perkembangan ini memicu mata uang dolar menguat secara global tergambar pada indeks dolar AS yang meningkat dari 92,1 pada 2017 menjadi 96,2 pada 2018.

Ketidakpastian perekonomian global juga dipengaruhi kondisi pasar keuangan global yang bergejolak dan menyebabkan peningkatan premi risiko investasi ke negara berkembang. Kondisi pasar keuangan global ini dipengaruhi meningkatnya tensi hubungan perdagangan antara AS dengan beberapa negara mitra dagangnya, antara lain Tiongkok, Kanada, Meksiko, dan kawasan Eropa. Di samping itu, krisis ekonomi yang terjadi di Argentina dan Turki mendorong kenaikan sentimen negatif pada negara berkembang. Ketidakpastian pasar keuangan global juga dipengaruhi risiko geopolitik, antara lain, perundingan Brexit antara Inggris dan Uni Eropa yang berlanjut, serta permasalahan ekonomi di Italia.

TINJAUAN EKONOMI NASIONAL

Ketidakpastian pasar keuangan global yang menaikkan premi risiko investasi ke negara berkembang, termasuk Indonesia, juga memengaruhi aliran modal asing ke Indonesia. Perkembangan ini pada gilirannya menurunkan kinerja transaksi modal dan finansial (TMF) pada triwulan II dan III 2018. Surplus TMF pada dua triwulan tersebut masing-masing tercatat US\$3,3 dan US\$3,9, menurun dari capaian periode yang sama tahun sebelumnya.

the risk of rising inflation in the future, in line with the increase in US economic activity that exceeded its potential economic growth. In 2018, the Fed had raised the FFR four times by 100 basis points (bps), higher than 3 times in 2017 at 75 bps, and at 25 bps in 2016 and 2015 just for once in each year. With this development, it is recorded that FFR at the end of 2018 reached between 2.25% -2.50%.

Along with the impact of US fiscal expansion, the development of FFR then triggered an increase in US government bond yields up to 3.24% for a 10-year tenor. The direction of tightening US monetary policy was also reinforced by balance sheet reduction policy as part of the quantity normalization process that took place during the 2008 global financial crisis. This development triggered US dollar to strengthen globally as reflected ON the rising US dollar index from 92.1 in 2017 to 96.2 in 2018.

The fluctuating global economy was also affected by volatile global financial market conditions that led to an increase in the investment risk premium to developing countries. This volatility in the global financial market was one of the impacts of the escalating tension of trade relations between the US and several trading partner countries, including China, Canada, Mexico and Europe. In addition, the economic crisis that occurred in Argentina and Turkey pushed up negative sentiment in developing countries. The uncertainty in the global financial market was also driven by geopolitical risks, among others, the continued Brexit negotiations between the UK and the EU, as well as economic problems in Italy.

NATIONAL ECONOMIC OVERVIEW

The uncertainty of global financial market which raised the investment risk premium to developing countries, including Indonesia, also affected the flow of foreign capital into Indonesia. This development in turn decreased the performance of capital and financial transactions (TMF) in the second and third quarters of 2018. The TMF surplus in Q2 and Q3 was recorded at US\$ 3.3 and US\$ 3.9 respectively, down from the achievement of the same period in the previous year.

Defisit transaksi berjalan yang melebar dan surplus TMF yang menurun berkontribusi pada menurunnya kinerja NPI triwulan II dan III 2018, serta berdampak pada meningkatnya tekanan terhadap nilai tukar Rupiah. NPI pada triwulan II dan III 2018 mencatat defisit cukup besar yakni masing-masing US\$4,31 miliar dan US\$4,39 miliar, dengan kontribusi terbesar bersumber dari penurunan aliran masuk modal asing. Sejalan dengan dinamika NPI tersebut, nilai tukar Rupiah mengalami tekanan pada triwulan II dan III 2018. Secara rata-rata, Rupiah pada triwulan II dan III 2018 masing-masing mencatat depresiasi 2,7% dan 4,5%, sehingga ditutup pada level Rp14.902 per dolar AS pada akhir September 2018.

Penurunan aliran masuk modal asing pada triwulan II dan III 2018 juga memengaruhi kondisi likuiditas domestik. Meskipun tetap dalam level yang aman, penurunan aliran masuk modal asing berkontribusi pada penurunan pertumbuhan likuiditas perekonomian, M1 dan M2 masing-masing tumbuh menjadi 8,2% dan 6,7% pada September 2018, dari semula 12,4% dan 8,3% pada akhir 2017. Pertumbuhan M2 yang melambat dipengaruhi oleh penurunan pertumbuhan uang kuasi yang pada September 2018 tercatat 6,3%, menurun dari akhir 2017 sebesar 6,9%. Sejalan dengan kondisi ini, posisi penempatan bank pada instrumen operasi moneter Bank Indonesia juga menurun, dari semula Rp471,2 triliun pada akhir 2017 menjadi Rp302,0 triliun pada September 2018. Meskipun menurun, posisi penempatan bank pada instrumen operasi moneter Bank Indonesia tetap mencerminkan level kecukupan likuiditas yang memadai.

Beberapa perkembangan menunjukkan kinerja ekspor Indonesia menurun pada semester II 2018. Pertumbuhan nilai ekspor nonmigas pada triwulan III dan IV 2018 masing-masing tercatat 8,9% (yoy) dan kontraksi 1,9% (yoy), lebih rendah dari kinerja pertumbuhan pada semester I 2018 yang rata-rata sebesar 9,6% (yoy). Berdasarkan negara tujuan, penurunan ekspor nonmigas terlihat pada kontraksi ekspor nonmigas pada triwulan IV 2018 ke beberapa mitra dagang utama seperti Tiongkok, Jepang, dan Filipina. Sementara itu, penurunan ekspor nonmigas juga terjadi pada komoditas utama seperti crude palm oil (CPO) dan karet olahan pada triwulan IV 2018. Secara keseluruhan, pertumbuhan nilai beberapa ekspor utama Indonesia seperti batu bara dan CPO pada 2018 tercatat 17,1% dan kontraksi 10,7%, menurun dari pertumbuhan tahun sebelumnya sebesar 40,6% dan 28,9%.

The increasing current account deficit and a declining surplus of TMF contributed to the decline in balance of payments of QII-III in 2018, and resulted in increased pressure on the Rupiah exchange rate. Balance of payments in the second and third quarters of 2018 recorded a substantial deficit of US\$ 4.31 billion and US\$ 4.39 billion respectively, with the largest contribution coming from a decrease in foreign capital inflows. In line with the dynamics of the balance of payments, the Rupiah exchange rate was under pressure in the second and third quarters of 2018. On average, Rupiah in the second and third quarters of 2018 recorded a depreciation of 2.7% and 4.5%, respectively, and closed at Rp14,902 per US dollar at the end of September 2018.

The decline in foreign capital inflows in the second and third quarters of 2018 also gave an impact on domestic liquidity conditions. Although it remained at a safe level, the decline in foreign capital inflows contributed to the decrease in economic liquidity growth, in which M1 and M2 each grew to 8.2% and 6.7% in September 2018, from previously 12.4% and 8.3% at the end of 2017. The slowdown in M2 growth was influenced by the decline in quasi money growth which in September 2018 was recorded at 6.3%, fell from 6.9% at the end of 2017. In line with this condition, the bank's placement position on the instruments of Bank Indonesia's monetary operations also decreased, from Rp471.2 trillion at the end of 2017 to Rp302.0 trillion in September 2018. Despite the decline, the bank's placement position on the instruments of Bank Indonesia's monetary operations continued to show adequate level of liquidity.

Meanwhile, Indonesia's export performance was recorded to show decelerating trend in the second semester of 2018. Non-oil and gas export growth in the third and fourth quarter of 2018 was recorded at 8.9% (yoy) with 1.9% (yoy) of contraction, lower than the growth in the semester I 2018 which was 9.6% (yoy) on average. Based on destination countries, the decline in non-oil and gas exports was reflected on the contraction of non-oil and gas exports in the fourth quarter of 2018 to several major trading partners such as China, Japan, and the Philippines. Meanwhile, the decline in non-oil and gas exports also occurred in key commodities such as crude palm oil (CPO) and processed rubber in the fourth quarter of 2018. In general, the growth of some of Indonesia's main exports such as coal and CPO in 2018 was recorded at 17.1% with contraction of 10.7%, down from the previous year's growth of 40.6% and 28.9%.

Secara keseluruhan, pertumbuhan komposit harga ekspor Indonesia turun 2,8% dibandingkan 2017. Sementara itu, harga minyak dalam tren meningkat hingga bulan Oktober 2018 kemudian turun tajam sejak November 2018. Rerata harga minyak jenis Brent dan Minas masing-masing tercatat sama yaitu US\$71 per barel pada 2018, meningkat dibandingkan dengan harga pada 2017 yang masing-masing sebesar US\$54 per barel dan 52 dolar AS per barel.

Tantangan dari jalur perdagangan semakin kompleks karena pada saat bersamaan impor tetap kuat sampai dengan triwulan III 2018 sejalan dengan permintaan domestik yang tinggi, khususnya untuk kegiatan proyek infrastruktur. Sampai dengan triwulan III 2018, rata-rata pertumbuhan nilai impor nonmigas cukup tinggi yakni sekitar 23,4% (yoy). Kenaikan impor terjadi di semua komponen, dengan rata-rata pertumbuhan tertinggi terjadi pada komponen impor barang modal (29,3%), diikuti dengan barang konsumsi (26,8%) dan bahan baku (18,6%). Peningkatan impor bahan baku terutama dalam bentuk bahan baku yang digunakan industri untuk mendukung aktivitas produksi baik untuk konsumsi domestik maupun berorientasi ekspor. Sementara itu, impor migas pada tiga triwulan pertama 2018 juga tercatat tinggi yakni US\$21,9 miliar, meningkat 35,0% dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya. Perkembangan ini dipengaruhi permintaan domestik yang tetap kuat dan tren kenaikan harga minyak dunia.

Ekspor yang menurun pada semester II 2018 dan impor yang tinggi sampai dengan triwulan III 2018 memberikan tantangan pada upaya pengendalian defisit transaksi berjalan. Defisit neraca transaksi berjalan melebar pada triwulan II dan III 2018, masing-masing mencapai 3,0% dan 3,3% dari PDB. Faktor lain yang memengaruhi defisit transaksi berjalan yang melebar adalah kenaikan pembayaran jasa transportasi barang (*freight*) sejalan dengan impor barang yang meningkat. Defisit jasa transportasi pada tiga triwulan pertama 2018 meningkat dari US\$4,7 miliar pada 2017 menjadi US\$6,4 miliar pada 2018. Peningkatan tersebut disebabkan oleh pembayaran jasa *freight* yang naik sejalan dengan aktivitas impor yang meningkat.

Sinergi kebijakan antar lembaga keuangan negara dan otoritas terkait lainnya dapat mengarahkan perekonomian Indonesia 2018 tetap stabil dan tumbuh lebih baik. Berbagai indikator ekonomi pada triwulan IV 2018 menunjukkan perkembangan positif. Aliran masuk modal asing kembali meningkat pada akhir 2018 didorong daya tarik pasar keuangan domestik yang tinggi dan prospek perekonomian yang tetap baik, serta ketidakpastian pasar keuangan global yang menurun. Impor juga mulai melambat pada triwulan IV 2018 sejalan dengan dampak kebijakan yang ditempuh, termasuk nilai tukar yang bergerak fleksibel.

Broadly speaking, composite growth in Indonesia's export prices fell 2.8% compared to 2017 while oil prices were on the uptrend up until October 2018 even though it fell sharply in November 2018. The average price of Brent and Minas types of oil was recorded the same at US\$ 71 per barrel in 2018, which increased compared to prices in 2017 which were US\$ 54 per barrel and US\$ 52 per barrel respectively.

Challenges from the trade sector were getting complex because at the same time imports remained strong up to the third quarter of 2018 in line with high domestic demand, especially for infrastructure project activities. Up until the third quarter of 2018, the average growth in non-oil and gas imports was quite high at around 23.4% (yoy). The increase in imports occurred in all components, with the highest average growth contributed by capital goods (29.3%), followed by consumer goods (26.8%) and raw materials (18.6%), particularly raw materials used by industry to support production activities for both domestic consumption and export needs. Meanwhile, oil and gas import in the first three quarters of 2018 was also recorded high at US\$ 21.9 billion, an increase of 35.0% compared to the previous year. This development was influenced by strong domestic demand and the increasing global oil prices trend.

Declining exports in the second semester of 2018 and high imports up to the third quarter of 2018 were among the challenges in controlling current account deficit. The current account deficit increased in the second and third quarters of 2018, reaching 3.0% and 3.3% of GDP respectively. Another factor influencing the rising current account deficit was the increase in payment of freight services in line with rising imports of goods. The transport services deficit in the first three quarters of 2018 increased from US\$ 4.7 billion in 2017 to US\$ 6.4 billion in 2018. This increase was due to rising freight services in line with increasing import activity.

The synergy of policies between state financial institutions and other relevant authorities was able to navigate the 2018 Indonesian economy to remain stable and grow better. Various economic indicators in the fourth quarter of 2018 showed positive developments. Foreign capital inflow again increased at the end of 2018, as driven by high attractiveness of domestic financial market and favorable economic outlook, as well as the declining uncertainty of global financial market. Imports also began to slow in the fourth quarter of 2018 in line with the impact of the policies taken, including flexible exchange rates.

Di tengah tekanan terhadap keseimbangan eksternal, perkembangan keseimbangan internal dan stabilitas sistem keuangan tetap kondusif. Sampai dengan triwulan III 2018, pertumbuhan ekonomi tetap solid ditopang oleh permintaan domestik. Kuatnya permintaan domestik terutama didorong dampak berlanjutnya proyek infrastruktur yang kemudian memberikan dampak pengganda kepada konsumsi rumah tangga dan investasi bangunan dan nonbangunan. Sampai dengan triwulan III 2018, pertumbuhan ekonomi Indonesia tercatat 5,17% cumulative to cumulative (ctc). Kondisi keseimbangan internal yang baik juga tergambar pada perkembangan inflasi yang terkendali. Pengaruh pelemahan Rupiah tidak memberikan tekanan berlebihan kepada inflasi, dimana sampai dengan September 2018 inflasi tercatat 2,88% (yoy). Sementara itu, stabilitas sistem keuangan tetap terjaga ditandai dengan permodalan yang tinggi, kredit yang meningkat, dan risiko kredit yang terjaga rendah.

Dengan perkembangan tersebut dan sejalan dengan perkembangan global, secara rata-rata nilai tukar Rupiah pada 2018 terdepresiasi 6,05%. Sementara itu, bila dibandingkan dengan level akhir tahun 2017, nilai tukar Rupiah tahun 2018 melemah 5,65% point to point (ptp). Depresiasi nilai tukar Rupiah tersebut tercatat lebih rendah dibandingkan dengan depresiasi beberapa mata uang lain seperti rupee India, rand Afrika Selatan, real Brasil, dan lira Turki. Dari aspek volatilitas, nilai tukar Rupiah juga rendah yakni 8,5%, lebih rendah dibandingkan dengan volatilitas beberapa mata uang lain.

Amid pressure on external balance, the development of internal balance and financial system stability was recorded to remain conducive. As of the third quarter of 2018, economic growth remained solid, supported by domestic demand. The strength of domestic demand was mainly driven by the impact of continued implementation of infrastructure projects which then had a multiplier effect on household consumption and building and non-building investment. As of the third quarter of 2018, Indonesia's economic growth was recorded at 5.17% on cumulative to cumulative (ctc) basis. Good internal balance conditions were also reflected on the controlled inflation. The weakening Rupiah in fact did not put excessive pressure on inflation, where as of September 2018, the inflation was at 2.88% (yoy). Meanwhile, financial system stability was under control as indicated by high capital, increased credit, and low credit risk.

With these developments and in line with global economic developments, Rupiah exchange rate in 2018 depreciated 6.05% on average. Meanwhile, when compared to the level at end of 2017, the Rupiah exchange rate in 2018 weakened by 5.65% on point to point (ptp) basis. The depreciation of Rupiah exchange rate was lower than the depreciation of several other currencies such as Indian rupees, South African rands, Brazilian real, and Turkish lira. In terms of volatility, Rupiah exchange rate was also low at 8.5%, lower than the volatility of several other currencies.



Di tengah gejolak sektor eksternal tersebut, inflasi 2018 tetap terkendali pada level yang rendah dan stabil. Ditopang inflasi inti dan inflasi volatile food (VF) yang terjaga, serta inflasi administered prices (AP) yang rendah, inflasi indeks harga konsumen (IHK) tercatat sebesar 3,13% dan berada dalam rentang sasaran 3,5±1%. Perkembangan ini juga menjadikan inflasi berturut-turut dalam 4 tahun terakhir berada dalam kisaran sasaran.

Amid the external sector turmoil, inflation in 2018 remained under control at a low and stable level. Supported by core inflation and maintained volatile food (VF) inflation, as well as low administered prices (AP) inflation, the consumer price index inflation (CPI) was recorded at 3.13% and was within the target range of 3.5 ± 1%. This development shows that in the last 4 years, inflation rate was within the target range.

Indikator Perekonomian Nasional

National Economic Indicators

Komponen / Component	2016	2017	2018				
			I	II	III	IV	Total
Pertumbuhan Ekonomi (Persen, yoy) / Economic growth (Percent, yoy)	5,03	5,07	5,06	5,27	5,17	5,18	5,17
Konsumsi Rumah Tangga (Persen,yoy) / Household consumption (Percent, yoy)	5,01	4,94	4,94	5,16	5,00	5,08	5,05
Konsumsi Pemerintah (Persen, yoy) / Government consumption (Percent, yoy)	-0,14	2,13	2,71	5,20	6,27	4,56	4,80
PMTB (Persen, yoy) / PMTB (Percent, yoy)	4,47	6,15	7,94	5,85	6,96	6,01	6,67
PMTB Bangunan (Persen, yoy) / PMTB Building (Percent, yoy)	5,18	6,24	6,16	5,02	5,66	5,02	5,45
PMTB Non Bangunan (Persen, yoy) / PMTB Non Building (Percent, yoy)	2,43	5,90	13,56	8,33	10,73	8,96	10,31
Ekspor Barang dan Jasa (Persen, yoy) / Goods and Services Export (Percent, yoy)	-1,66	8,91	5,94	7,65	8,08	4,33	6,48
Impor Barang dan Jasa (Persen, yoy) / Goods and Services Import (Percent, yoy)	-2,41	8,06	12,64	15,17	14,02	7,10	12,04
Inflasi IHK (Persen, yoy) / CPI Inflation (Percent, yoy)	3,02	3,61	3,40	3,12	2,88	3,13	3,13
Inflasi Inti (Persen, yoy) / Core Inflation (Percent, yoy)	3,07	2,95	2,67	2,72	2,82	3,07	3,07
Inflasi Volatile Food (Persen, yoy) / Volatile Food Inflation (Percent, yoy)	5,92	0,71	4,06	4,60	3,75	3,39	3,39
Inflasi Administered Prices (Persen, yoy) / Administered Prices Inflation (Percent, yoy)	0,21	8,70	5,11	2,88	2,40	3,36	3,36
Neraca Pembayaran Indonesia / Balance of Payments							
Defisit Transaksi Berjalan (Persen PDB) / Current Account Deficit (Percent of GDP)	1,82	1,60	2,07	3,01	3,28	3,57	2,98
Transaksi Modal dan Finansial (miliar dolar AS) / Capital and Financial Transaction (billion dollar of US)	29,3	28,7	2,3	3,3	3,9	15,7	25,2
Overall Balance (miliar dolar AS) / Overall Balance (billion dollar of US)	12,1	11,6	-3,9	-4,3	-4,4	5,4	-7,1
Cadangan Devisa (miliar dolar AS) / Forex reserve (billion dollar of US)	116,4	130,2	126,0	119,8	114,8	120,7	120,7
Nilai Tukar (rata-rata; Rp per dolar AS) / Exchange Rates (average: Rp per US dollar)	13.305	13.385	13.576	13.952	14.601	14.798	14.246
IHSG (Indeks) / (Index)	5.297	6.356	6.189	5.799	5.977	6.056	6.056
Yield SUN 10 Tahun (Persen) / Yield of 10-year tenor SUN (Percent)	7,9	6,3	6,7	7,7	8,1	8,0	8,0
Perbankan / Banking							
Kredit Total (Persen, yoy) / Total Credit (Percent, yoy)	7,9	8,2	8,5	10,7	12,7	11,8	11,8
CAR (akhir periode, Persen) / CAR (end of period, Percent)	22,7	23,0	22,5	22,0	22,9	22,9	22,9
NPL (akhir periode, Persen) / NPL (end of period, Percent)	2,9	2,6	2,8	2,7	2,7	2,4	2,4
APBN / State Budget							
Pajak (Persen PDB) / Tax (Percent of GDP)	10,4	9,9	1,7	2,7	2,5	3,4	10,3
Keseimbangan Primer (Persen PDB) / Primary Balance (Percent of GDP)	-1,0	-0,9	-0,16	0,25	-0,10	0,00	-0,01
Defisit APBN (Persen PDB) / State Budget Deficit (Percent of GDP)	2,5	2,5	0,6	0,1	0,6	0,4	1,8

Stabilitas sistem keuangan yang terkendali ditopang permodalan perbankan yang kuat dan likuiditas yang cukup. Rasio permodalan perbankan tetap tinggi dengan *capital adequacy ratio* (CAR) perbankan yang mencapai 22,9% pada akhir 2018. Likuiditas perbankan juga terjaga sepanjang 2018 yang tercermin dari rasio alat likuid terhadap DPK (AL/DPK) sebesar 19,3%. Penempatan bank pada instrumen operasi moneter juga meningkat kembali, sehingga pada akhir 2018 tercatat Rp382,8 triliun.

Controlled financial system stability was supported by strong banking capital and adequate liquidity. Banking capital ratio remained high with capital adequacy ratio (CAR) reaching 22.9% at the end of 2018. Banking liquidity was also maintained throughout 2018 as reflected on the ratio of liquid assets to deposits (AL/TPF) of 19.3%. Bank placements in monetary operating instruments also increased again to Rp382.8 trillion at the end of 2018.

Sejalan dengan hal itu, penyaluran kredit juga meningkat dan risiko kredit terkendali. Fungsi intermediasi terus menunjukkan peningkatan yang terlihat dari pertumbuhan kredit naik menjadi 11,8% pada 2018. Di tengah pertumbuhan kredit yang membaik, risiko kredit dikelola dengan baik yang tercermin dari rasio NPL yang tetap rendah yakni 2,4% (gross) atau 1,0% (nett) dan berada pada level sehat di bawah 5%. Sementara itu, penerbitan saham (IPO dan rights issue), obligasi korporasi, medium term notes (MTN), dan NCDs sebagai pembiayaan dari pasar modal tercatat sebesar Rp168,1 triliun (gross). Hal itu menunjukkan pembiayaan korporasi dari sumber-sumber domestik baik dari perbankan maupun pasar modal makin baik.

Daya tahan ekonomi yang baik di tengah ketidakpastian global yang tinggi mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap solid. Pertumbuhan ekonomi pada 2018 tercatat 5,17%, lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan pada tahun sebelumnya sebesar 5,07% dan merupakan capaian tertinggi dalam lima tahun terakhir. Perbaikan pertumbuhan ekonomi ditopang oleh permintaan domestik yang kuat dipengaruhi konsumsi dan investasi yang tumbuh tinggi melalui pembangunan proyek infrastruktur yang berlanjut. Sementara itu, kontribusi ekspor neto tercatat negatif dipengaruhi tingginya pertumbuhan impor dan menurunnya pertumbuhan ekspor. Secara spasial, pertumbuhan ekonomi pada 2018 ditopang terutama oleh peningkatan pertumbuhan ekonomi di wilayah Jawa, Sumatera, dan Maluku-Papua. Berdasarkan lapangan usaha (LU), pertumbuhan ekonomi terutama didorong kinerja LU yang terkait dengan permintaan domestik yang tumbuh kuat dan ekspor komoditas pertambangan.

Dinamika perekonomian domestik 2018 memberikan pelajaran penting untuk penguatan ketahanan ekonomi ke depan. Pelajaran pertama yaitu stabilitas dan ketahanan perekonomian perlu terus diperkuat. Pengelolaan perekonomian memerlukan kehati-hatian terkait dengan kebijakan moneter, perbankan dan fiskal serta naik-turunnya kinerja ekspor sejalan dengan siklus harga komoditas, atau tidak terkendalinya perkembangan sektor properti dan utang luar negeri. Oleh karena itu, diperlukan inflasi yang tetap terjaga pada tingkat rendah dan stabil, nilai tukar Rupiah yang stabil, defisit fiskal yang rendah, dan stabilitas sistem keuangan yang terpelihara. Selain itu, defisit transaksi berjalan perlu dikendalikan ke dalam batas yang aman yakni di bawah 3% dari PDB.

Daya saing dan produktivitas perlu terus ditingkatkan untuk mendorong momentum pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. Dalam kaitan ini, struktur ekspor perlu diperkuat dengan

In line with this, lending also increased and credit risk was under control. The intermediation function continued to show improvement, as evidenced by credit growth rising to 11.8% in 2018. Amid improving credit growth, credit risk was well managed, as reflected on low NPL ratio of 2.4% (gross) or 1.0% (net) and was at a healthy level below 5%. Meanwhile, the issuance of shares (IPO and rights issue), corporate bonds, medium term notes (MTN) and NCDs as financing from the capital market was recorded at Rp 168.1 trillion (gross). This showed that corporate financing from domestic sources both from banks and the capital market was getting better.

Good economic resilience amid high global uncertainty had driven Indonesia's economic growth to remain solid. Economic growth in 2018 was recorded at 5.17%, higher than the previous year's growth of 5.07% and was the highest growth ever recorded in the last five years. Improved economic growth was supported by strong domestic demand, which was influenced by high-growth consumption and investment through the continued implementation of infrastructure projects. Meanwhile, the contribution of net exports was recorded negative due to high import and declining export growth. Spatially, economic growth in 2018 was supported mainly by increased economic growth in the regions of Java, Sumatra and Maluku-Papua. Based on the business sector (LU), economic growth was mainly driven by business sector performance, which was contributed by strong domestic demand and mining commodity exports.

The dynamics of domestic economy in 2018 provided important lessons to strengthen economic resilience going forward. The first lesson was that stability and resilience of the economy needed to be strengthened. Economic management shall be prudently done in several sectors, among others, monetary, banking, and fiscal policies as well as fluctuations in export performance, in line with commodity price cycle, or uncontrolled developments of the property sector and foreign debt. Therefore, inflation shall be maintained at a low and stable level, along with Rupiah exchange rate and financial system stability, as well as low fiscal deficit. Moreover, the current account deficit needed to be controlled within safe limits of below 3% of GDP.

Competitiveness and productivity needed to be continuously improved to encourage higher economic growth momentum. In this regard, export structure shall be strengthened by

meninggalkan ketergantungan pada ekspor komoditas primer. Untuk itu, perlu penguatan manufaktur dan pariwisata, peningkatan kemampuan produksi dalam negeri untuk menekan impor, serta penguatan upaya untuk mendorong lebih banyak investasi langsung baik dari domestik maupun luar negeri. Penguatan struktur ekonomi nasional juga perlu terus didorong melalui hilirisasi industri untuk meningkatkan nilai tambah dari pengelolaan sumber daya alam, seperti sektor pertambangan, perkebunan, pertanian, dan perikanan. Industri manufaktur seperti otomotif, elektronika, tekstil, baja, dan kimia perlu terus dikembangkan untuk meningkatkan ekspor dengan memanfaatkan rantai pasok global.

Akselerasi efisiensi birokrasi, baik di pusat maupun di daerah, dan penerapan program perizinan terintegrasi atau OSS perlu terus diupayakan guna peningkatan iklim usaha dan investasi yang kondusif. Pembangunan infrastruktur terutama terkait konektivitas perlu terus diperluas dan diarahkan untuk mendukung pengembangan kawasan ekonomi dan pariwisata.

TINJAUAN INDUSTRI PENJAMINAN SYARIAH

Perbankan syariah nasional dalam dekade terakhir menunjukkan pertumbuhan positif tercermin dari volume usaha yang terus tumbuh, dana investasi dan dana titipan masyarakat serta penyaluran pembiayaan yang terus meningkat. Kinerja perbankan syariah tahun 2018 mengalami peningkatan lebih baik dibandingkan dengan 2017 lalu. Sampai dengan semester II 2018, Sejumlah bank syariah, meski masih mencatatkan rasio pembiayaan bermasalah atau *non-performing financing* (NPF) yang tinggi, namun berhasil membangun kinerja keuangan yang membaik. Sedikitnya ada tiga bank syariah yang mencatatkan kenaikan laba hingga semester II 2018, yakni Bank Muamalat, Bank BJB Syariah, dan Bank Panin Dubai Syariah.

Target pemerintah untuk mencapai pangsa keuangan syariah sebesar 10% pada tahun 2020 memerlukan beberapa strategi, pertama, pengelolaan tingkat risiko. Perbankan syariah perlu untuk memperhatikan setidaknya dua kunci dalam pengelolaan risiko yakni potensi terjadinya risiko dan dampak yang akan timbul dari risiko tersebut. Kedua, adalah pengelolaan infrastruktur dalam mendukung kegiatan operasional bank. Bagi bank syariah yang terafiliasi dengan bank konvensional, prinsip platform sharing akan sangat membantu untuk meminimalkan biaya operasional sehingga membuat kinerja bank syariah akan menjadi lebih efisien. Ketiga, pengelolaan likuiditas. Perbankan syariah perlu lebih agresif dalam mendapatkan dana jangka panjang untuk mengelola likuiditas.

reducing dependence on primary commodity exports. Hence, it was necessary to strengthen manufacturing and tourism, increase domestic production capabilities to reduce imports, and strengthen efforts to drive more direct investment from both domestic and overseas. National economy structure shall also be strengthened even further through downstream industries to increase added value from natural resource management, such as in the mining, plantation, agriculture and fisheries sectors. Manufacturing industries such as automotive, electronics, textiles, steel, and chemicals needed to be continuously developed to increase exports by capitalizing the global supply chain.

The acceleration of bureaucratic efficiency, both at central and regional government, as well as the implementation of an integrated licensing program or OSS shall be continuously pursued to improve business climate and investment to be more conducive. Infrastructure development, especially related to connectivity, needed to be continuously expanded and directed to support the development of economic and tourism areas.

SHARIA GUARANTEE INDUSTRY OVERVIEW

National Islamic banking in the last decade showed positive growth reflected in the volume of business that continues to grow, investment funds and funds deposited by the public and the distribution of financing continues to increase. Sharia banking performance in 2018 has improved better compared to 2017. As of the second semester of 2018, a number of Islamic banks, although still recording a high ratio of non-performing financing (NPF), have succeeded in building improved financial performance. There are at least three Islamic banks that recorded an increase in profits until the second semester of 2018, namely Muamalat Bank, BJB Syariah Bank, and Panin Dubai Syariah Bank.

The government's target of achieving a 10% share of Islamic finance by 2020 requires several strategies, first, managing the level of risk. Islamic banking needs to pay attention to at least two keys in managing risk, namely the potential occurrence of risk and the impact that will arise from that risk. Second, is the management of infrastructure in supporting bank operations. For Islamic banks affiliated with conventional banks, the principle of platform sharing will greatly help to minimize operational costs so as to make the performance of Islamic banks more efficient. Third, liquidity management. Islamic banking needs to be more aggressive in getting long-term funds to manage liquidity.

Keberadaan Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS) dalam mengembangkan potensi keuangan dan ekonomi syariah di Indonesia melalui Peraturan Presiden Nomor 91 tahun 2016 diharapkan dapat menjadi pemicu industri keuangan syariah termasuk perbankan syariah. Dengan masuknya keuangan dan ekonomi syariah ke dalam arus utama strategi nasional akan membantu pemerintah untuk mencapai tujuan pembangunan dengan enam pilar yaitu:

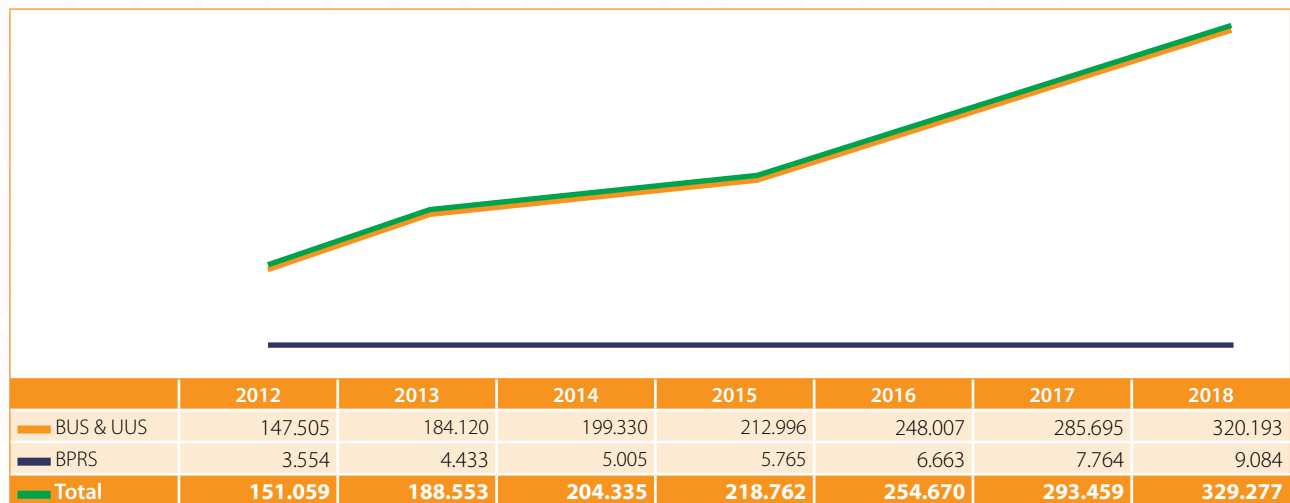
- Menarik dana investasi asing untuk mendanai proyek infrastruktur, pendidikan dan pertanian. Investasi berasal dari investor dari negara-negara Islam yang kaya akan minyak dan gas, investor konvensional internasional dan investor dari negara ASEAN yang mencari aset baru untuk memperluas portofolio investasi dalam instrumen syariah.
- Menggerakkan tabungan domestik untuk mendanai proyek-proyek nasional dan mendukung iklim investasi yang lebih baik.
- Mendiversifikasikan sumber dana pemerintah dan sektor korporasi untuk manajemen risiko yang lebih baik.
- Memperluas jangkauan dan penetrasi fasilitas keuangan bagi semua segmen masyarakat.
- Meningkatkan daya saing industri keuangan dengan mempromosikan persaingan yang sehat antara institusi keuangan konvensional dan syariah dengan berfokus pada inovasi produk, kualitas pelayanan dan efisiensi melalui skala ekonomi yang adil.
- Menjadikan Indonesia dengan ekonomi yang mandiri dan mampu menghadapi tantangan dari integrasi ASEAN di masa mendatang.

The existence of the National Sharia Finance Committee (KNKS) in developing sharia financial and economic potential in Indonesia through Presidential Regulation No. 91 of 2016 is expected to be a trigger for the sharia financial industry including sharia banking. With the entry of Islamic finance and economics into the mainstream of the national strategy will help the government to achieve development goals with six pillars namely:

- Attracting foreign investment funds to fund infrastructure, education and agriculture projects. The investment comes from investors from Islamic countries rich in oil and gas, conventional international investors and investors from ASEAN countries who are looking for new assets to expand their investment portfolio in Islamic instruments.
- Mobilize domestic savings to fund national projects and support a better investment climate.
- Diversifying sources of government and corporate sector funds for better risk management.
- Expand the reach and penetration of financial facilities for all segments of society.
- Enhance the competitiveness of the financial industry by promoting healthy competition between conventional and sharia financial institutions by focusing on product innovation, service quality and efficiency through equitable economies of scale.
- Making Indonesia an independent economy and able to face the challenges of ASEAN integration in the future.

Trend Pembiayaan Perbankan Syariah / Sharia Banking Financing Trend

Dalam miliar Rp / In billion Rp





Statistik Komposisi Pembiayaan Perbankan Syariah / Financing Composition Statistics of Sharia Banking

Dalam miliar Rp / In billion Rp

Lembaga Keuangan / Financial Institution	Tahun / Year						
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Bank Umum dan Unit Usaha Syariah / Sharia Commercial Bank and Sharia Business Unit	147.505	184.120	199.330	212.996	248.007	285.695	320.193
Bank Pembiayaan Rakyat Syariah / Sharia Rural Bank	3.554	4.433	5.005	5.765	6.663	7.764	9.084
Total Pembiayaan Syariah / Total Sharia Financing	151.059	188.553	204.335	218.762	254.670	293.459	329.277

Statistik Penyaluran Pembiayaan Perbankan Syariah, Dana Pihak Ketiga dan Aset Perbankan Syariah (BUS, UUS & BPRS) / Statistics of Sharia Banking Financing d, Third Party Funds, and Sharia Banking Assets (BUS, UUS & BPRS)

Dalam miliar Rp / In billion Rp

Komponen / Component	Tahun / Year						
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Pembiayaan / Financing	151.059	188.553	204.335	218.762	254.670	293.459	329.277
Dana Pihak Ketiga / Third Party Funds	150.450	187.200	221.887	235.977	285.159	341.875	379.963
Aset / Assets	199.716	248.109	283.400	310.363	370.786	451.145	504.726

Sampai dengan Desember 2018 volume pembiayaan perbankan syariah (BUS, UUS dan BPRS) sebesar Rp 329,27 triliun yang terdiri dari komposisi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah sebesar Rp320,19 triliun dan komposisi BPRS sebesar Rp9,08 triliun. Pertumbuhan pembiayaan perbankan syariah Desember 2018 year on year naik sebesar 12,21% dengan realisasi Desember 2017 sebesar Rp293,46 triliun menjadi Rp329,28 triliun.

Peningkatan pada dana pihak ketiga (DPK) sampai Desember 2018 mengalami pertumbuhan sebesar 11,1% menjadi Rp379,96 triliun dari Rp341,87 triliun pada tahun 2017. Pertumbuhan aset perbankan syariah mengalami peningkatan sebesar Rp 53,58 trilion atau sebesar 11,9% dari periode Desember 2017.

Pada Desember 2018 komposisi akad pembiayaan perbankan syariah didominasi oleh akad murabahah sebesar Rp161,75 triliun, kemudian akad musyarakah dengan nilai sebesar Rp130,48 triliun, akad mudharabah sebesar Rp16,05 triliun dan akad lainnya sebesar Rp858 miliar.

As of December 2018 the volume of Islamic banking financing (SCB, SBU and SRB) was Rp 329.27 trillion consisting of Sharia Commercial Banks and Sharia Business Unit compositions of Rp320.19 trillion and syaria rural bank (BPRS) composition of Rp9.08 trillion. Sharia banking financing growth in December 2018 year on year increased by 12.21% with the realization of December 2017 amounting to Rp293.46 trillion to Rp329.28 trillion.

The increase in third party funds (DPK) until December 2018 growth by 11.1% to Rp379.96 trillion from Rp341.87 trillion in 2017. Growth in Islamic banking assets increased by Rp 53.58 trillion or by 11.9% from the December 2017 period.

In December 2018 the composition of the Islamic banking financing contract was dominated by murabahah contracts amounting to Rp.11.75 trillion, then musyarakah contracts with a value of Rp130.48 trillion, mudharabah contracts amounting to Rp16.05 trillion and other contracts amounting to Rp858 billion.

Statistik Outstanding Akad Pembiayaan Perbankan Syariah (BUS, UUS dan BPRS)

Statistics of Outstanding Sharia Banking Financing Akad (BUS, UUS, and BPRS)

Statistik Akad Pembiayaan BUS, UUS dan BPRS / Statistics of Financing Akad of BUS, UUS and BPRS

Dalam miliar Rp / In billion Rp

Akad Pembiayaan / Financing Akad	Tahun / Year						
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Akad Mudharabah	12.122	13.732	14.476	14.989	15.447	17.214	16.047
Akad Musyarakah	27.988	40.301	49.955	61.365	79.196	102.338	130.479
Akad Murabahah	90.858	114.111	121.337	126.602	144.589	156.181	161.746
Akad Isishna	397	600	646	781	887	1.210	1.644
Akad Ijarah	7.359	10.489	11.625	10.637	9.157	9.253	10.644
Akad Qardh	12.171	9.088	6.063	4.075	4.877	6.539	7.859
Lainnya / Others	163	235	233	312	516	724	858
Total Pembiayaan / Total Financing	151.058	188.556	204.335	218.761	254.669	293.459	329.277

Melihat dari komposisi loan to deposit ratio (LDR) pada Desember 2018, nilai LDR Perbankan Syariah mencapai 86,11 %. Hal ini menunjukkan ekspansi pembiayaan masih dilakukan, sehingga menjadi peluang bagi Askrindo Syariah untuk meningkatkan pangsa pasar.

Looking at the composition of the loan to deposit ratio (LDR) in December 2018, the LDR value of Islamic Banking reached 86.11%. This shows that the financing expansion is still being done, so it becomes an opportunity for Askrindo Syariah to increase its market share.

Mengacu pada data statistik akad pembiayaan syariah, dapat diketahui bahwa pembiayaan masih didominasi oleh akad murabahah. Hal ini menunjukkan bahwa pembiayaan modal kerja yang bersifat produktif masih tumbuh. Disisi lain pembiayaan untuk konsumsi (pembelian barang) juga mulai bertumbuh.

Referring to the sharia financing contract statistics, it can be seen that the financing is still dominated by murabahah contracts. This shows that productive working capital financing is still growing. On the other hand financing for consumption (purchase of goods) also began to grow.

Statistik Outstanding Pembiayaan dan NPF berdasarkan Jenis Penggunaan (BUS, UUS dan BPRS)

Statistics of Financing Outstanding and NPF based on Type of Use (BUS, UUS, and BPRS)

Statistik Pembiayaan dan NPF (BUS, UUS dan BPRS) / Statistics of Financing and NPF (BUS, UUS, and BPRS)

Dalam miliar Rp / In billion Rp

Jenis Penggunaan dan Kategori Usaha / Type of Use and Business Category	Tahun						
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Modal Kerja / Working Capital	57.932	73.772	80.283	82.508	90.100	102.781	108.483
NPF	1.813	2.451	5.010	5.228	5.372	5.600	4.228
Investasi / Investment	27.052	34.451	42.612	52.798	61.167	68.079	77.047
NPF	729	1.046	1.896	2.383	3.021	3.823	3.342
Konsumsi / Consumption	66.075	80.332	81.440	83.455	103.402	122.598	143.747
NPF	943	1.617	2.118	2.108	2.349	2.383	2.407
Total Pembiayaan / Total Financing	151.059	188.555	204.335	218.761	254.669	293.459	329.277
Total NPF	3.485	5.114	9.024	9.719	10.742f	11.806	9.977

Sampai Desember 2018, pembiayaan tidak lancar (NPF) sebesar Rp9,98 triliun atau turun sebesar 15,49% dari Desember 2017. Jumlah pembiayaan secara year on year (yoy) dari periode yang sama di Desember 2017 meningkat sebesar 12,20% dari Rp293,46 triliun menjadi Rp329,28 triliun. Sektor konsumsi masih mendominasi dalam komposisi pembiayaan perbankan

Until December 2018, non-current financing (NPF) was Rp9.98 trillion or decreased by 15.49% from December 2017. Total year-on-year financing (yoy) from the same period in December 2017 increased by 12.20% from Rp293,46 trillion to Rp329.28 trillion. The consumption sector still dominates in the composition of Islamic banking financing which amounted to

syariah yang sebesar Rp143,75 triliun disusul pembiayaan untuk sektor modal kerja yang sebesar Rp108,48 triliun dan sektor investasi yang sebesar Rp77,05 triliun. Walaupun sektor konsumsi mendominasi komposisi pembiayaan, sektor konsumsi menyumbang NPF terendah yang sebesar Rp2,41 triliun. Untuk pembiayaan non lancar (NPF) yang terbesar sampai dengan Desember 2018 masih didominasi oleh sektor modal kerja yang sebesar Rp4,23 triliun.

Pasar Askrindo Syariah

a. Perbankan Syariah

Berdasarkan data Statistik Perbankan Syariah OJK Desember Tahun 2018, terlihat bahwa pembiayaan perbankan syariah mengalami pertumbuhan setiap tahunnya. Berikut adalah tabel statistik pembiayaan syariah :

Statistik Pembiayaan Syariah berdasarkan Jenis Penggunaan (BUS, UUS dan BPRS)

Rp.143.75 trillion, followed by financing for the working capital sector which amounted to Rp108.48 trillion and investment sector which amounted to Rp77.05 trillion. Although the consumption sector dominated the composition of financing, the consumption sector contributed the lowest NPF of Rp2.41 trillion. The largest non-current financing (NPF) up to December 2018 was still dominated by the working capital sector, which amounted to Rp4.23 trillion.

Askrindo Syariah Market

a. Syariah banking

Based on OJK Sharia Banking Statistics data for December 2018, it can be seen that Islamic banking financing is growing every year. Following is the sharia financing statistics table:

Statistics of Sharia Financing based on Type of Use (BUS, UUS, and BPRS)

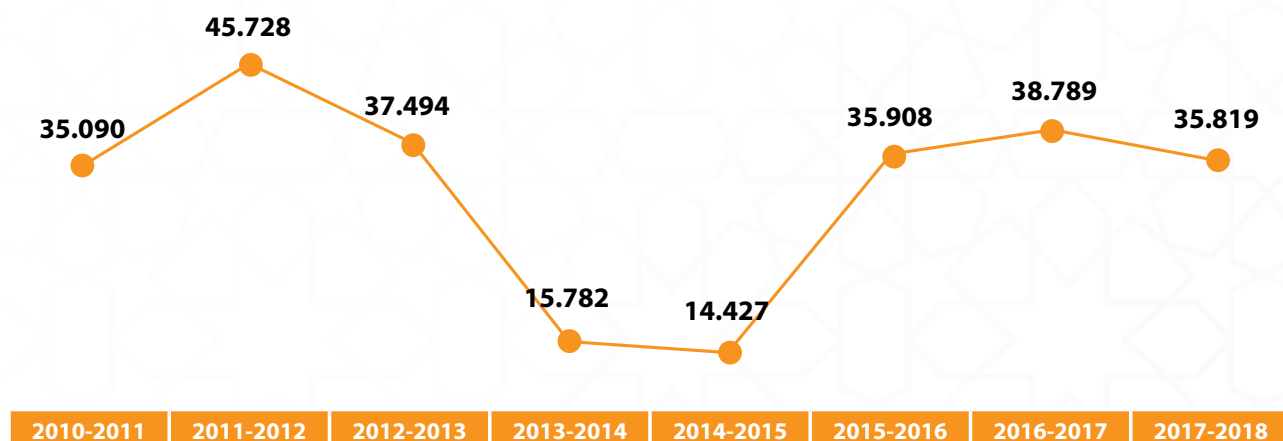
Statistik Pembiayaan per Jenis Penggunaan (BUS, UUS dan BPRS) / Statistics of Financing per Type of Use (BUS, UUS, and BPRS)

Dalam miliar Rp / In billion Rp

Jenis Penggunaan / Type of Use	Tahun						
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
BUS & UUS							
Modal Kerja / Working Capital	56.097	71.566	77.935	79.949	87.363	99.825	105.055f
Investasi / Investment	26.585	33.839	41.718	51.690	60.042	66.848	75.730
Konsumsi / Consumption	64.823	78.715	79.677	81.357	100.602	119.021	139.408
Total BUS & UUS	147.505	184.120	199.330	212.996	248.007	285.695	320.193
BPRS							
Modal Kerja / Working Capital	1.836	2.206	2.348	2.559	2.737	2.956	3.429
Investasi / Investment	465	612	893	1.109	1.126	1.231	1.317
Konsumsi / Consumption	1.252	1.615	1.763	2.097	2.800	3.577	4.339
Total BPRS	3554	4.433	5.005	5.765	6.663	7.764	9.084
Total Pembiayaan Syariah / Total Sharia Financing	151.059	188.553	204.335	218.762	254.670	293.459	329.277

Pertumbuhan Outstanding Pembiayaan Syariah berdasarkan Jenis Penggunaan (BUS, UUS dan BPRS)

Growth of Sharia Financing Outstanding based on Type of Use (BUS, UUS, and BPRS)



Jenis Penggunaan / Type of Use	2012-2013	2013-2014	2014-2015	2015-2016	2016-2017	2017-2018	Rata-rata	%
BUS & UUS								
Modal Kerja / Working Capital	15.469	6.369	2.014	7.414	12.462	5.230	9.150	9,17%
Investasi / Investment	7.254	7.879	9.972	8.352	6.806	8.882	7.789	11,65%
Konsumsi / Consumption	13.892	962	1.680	19.245	18.419	20.387	14.562	12,24%
Total BUS & UUS	36.614	15.210	13.667	35.011	37.687	34.498	34.501	11,03%
BPRS								
Modal Kerja / Working Capital	370	142	211	178	219	473	290	9,82%
Investasi / Investment	147	281	215	17	105	86	138	11,21%
Konsumsi / Consumption	363	148	334	703	777	762	450	12,57%
Total BPRS	880	571	760	897	1.101	1.321	878	11,31%
Grand Total	37.494	15.782	14.427	35.908	38.789	35.819	32.379	11,03%

Berdasarkan data pertumbuhan pembiayaan syariah di atas, terlihat bahwa pertumbuhan pembiayaan syariah memiliki siklus 5 tahunan. Dimana pertumbuhan terendah yaitu selama tahun 2014 menuju tahun 2015. Sesuai dengan data statistik ditentukan rata-rata pertumbuhan pembiayaan per tahun nya ialah sebesar 11,03%. Dengan memperhitungkan pertumbuhan pembiayaan sebesar 11,03%, dapat ditentukan Total Pembiayaan Bank Umum Syariah & Unit Usaha Syariah dan BPRS di 5 tahun mendatang. Adapun rincian data adalah sebagai berikut:

Based on the sharia financing growth data above, it can be seen that the growth of sharia financing has a 5 year cycle. Where the lowest growth is during 2014 to 2015. In accordance with statistical data determined the average growth of financing per year is 11.03%. Taking into account the financing growth of 11.03%, the Sharia Commercial Bank & Sharia Business Unit and Sharia Rural Bank Financing can be determined in the next 5 years. The details of the data are as follows:

**Proyeksi Outstanding Pembiayaan berdasarkan Jenis Penggunaan (BUS, UUS dan BPRS) 2019-2023 /
 Projection of Outstanding Financing based on Type of Use (BUS, UUS, and BPRS) 2019-2023**

Dalam miliar Rp / In billion Rp

Jenis Penggunaan / Type of Use	2019	2020	2021	2022	2023
BUS & UUS					
Modal Kerja / Working Capital	114.688	125.205	136.686	149.221	162.904
Investasi / Investment	84.553	94.403	105.401	117.680	131.390
Konsumsi / Consumption	156.472	175.624	197.120	221.248	248.328
Total BUS & UUS	355.712	395.232	439.208	488.148	542.622
BPRS					
Modal Kerja / Working Capital	3.765	4.135	4.541	4.987	5.477
Investasi / Investment	1.447	1.589	1.745	1.916	2.104
Konsumsi / Consumption	4.884	5.498	6.189	6.967	7.843
Total BPRS	10.096	11.222	12.475	13.870	15.424
Total Pembiayaan Syariah / Total Sharia Financing	365.808	406.453	451.682	502.018	558.046

b. Non Perbankan Syariah (IKNB Syariah)

Sektor syariah dalam industri multifinance syariah (lembaga pembiayaan syariah) terus menunjukkan tren penurunan penyaluran pembiayaan. Berdasarkan data statistik Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tentang lembaga pembiayaan Desember 2018, piutang pembiayaan berdasarkan prinsip syariah tercatat Rp28,01 triliun atau menurun 19,40% dibandingkan dengan periode yang sama Desember 2017 sebesar Rp34,75 triliun. Hal ini disebabkan oleh NPF yang cukup tinggi, sehingga perusahaan multifinance syariah

b. Non Sharia Banking (sharia non-bank financial industry)

The sharia sector in the sharia multifinance industry (sharia financing institutions) continues to show a declining trend in financing distribution. Based on statistical data from the Financial Services Authority (OJK) on financial institutions in December 2018, financing receivables based on sharia principles were recorded at Rp28.01 trillion or decreased by 19.40% compared to the same period in December 2017 amounting to Rp34.75 trillion. This is due to the NPF which is quite high, so Islamic finance companies are trying to

berupaya merestrukturisasi aset produktif. Namun, prospek penyaluran pembiayaan multifinance memungkinkan terus berkembang, seiring dengan dilaksanakannya amandemen Peraturan OJK No.29/2019 tentang perusahaan pembiayaan, dimana uang muka pembiayaan kendaraan bermotor sebesar 0%. Hal itu bisa diterapkan oleh perusahaan pembiayaan dengan rasio kredit macet atau non performing financing (NPF) di bawah 1%.

Di sisi lain, IKNB Syariah lainnya terus menunjukkan pertumbuhan pembiayaan yang positif. Rincian penyaluran pembiayaan IKNB syariah tersaji dalam tabel berikut:

restructure productive assets. However, the prospect of multi finance financing distribution is likely to continue to grow, along with the implementation of the OJK Regulation No.29 / 2019 concerning finance companies, where advances for motor vehicle financing are 0%. This can be applied by multifinance companies with non-performing financing (NPF) ratios below 1%.

On the other hand, other Sharia IKNB continue to show positive financing growth. Details of distribution of Sharia IKNB financing are presented in the following table:

Outstanding Pembiayaan IKNB Syariah

Outstanding Financing of Sharia IKNB

Statistik IKNB Syariah OJK / Statistics of OJK Sharia IKNB

Dalam miliar Rp / In billion Rp

IKNB	2014	2015	2016	2017	2018
Modal Ventura Syariah / Sharia Venture Capital	314	401	753	870	884
Pembiayaan Syariah / Sharia Financing	20.429	18.399	31.451	28.645	20.014
Lembaga Mikro Syariah / Micro Sharia Institute	N/A	3	9	12	15
Pegadaian Syariah / Sharia Pawnshop	N/A	3.749	4.572	5.222	7.094
Total	20.743	22.553	36.784	34.750	28.007

Pertumbuhan Outstanding Pembiayaan IKNB Syariah / Outstanding Growth of sharia non-bank financial industry Financing

Dalam miliar Rp / In billion Rp

IKNB	2014	2015	2016	2017	2018	%
Modal Ventura Syariah / Sharia Venture Capital	87	351	118	14	143	16,12%
Pembiayaan Syariah / Sharia Financing	(2.030)	13.052	(2.805)	(8.631)	(104)	-0,52%
Lembaga Mikro Syariah / Micro Sharia Institute	N/A	5,4	3,1	3	4	25,89%
Pegadaian Syariah / Sharia Pawnshop	N/A	823	650	1.872	1.115	15,72%
Total	(1.942)	14.232	(2.035)	(6.742)	878	3,14%

Dengan memperhitungkan pertumbuhan pembiayaan pada masing-masing IKNB Syariah, dapat ditentukan proyeksi pembiayaan di 5 tahun mendatang sebagai berikut:

Taking into account the growth of financing in each sharia non-bank financial industry, financing projections in the next 5 years can be determined as follows:

Proyeksi Outstanding Pembiayaan IKNB Syariah / Projection of Outstanding Financing of Sharia IKNB

Dalam miliar Rp / In billion Rp

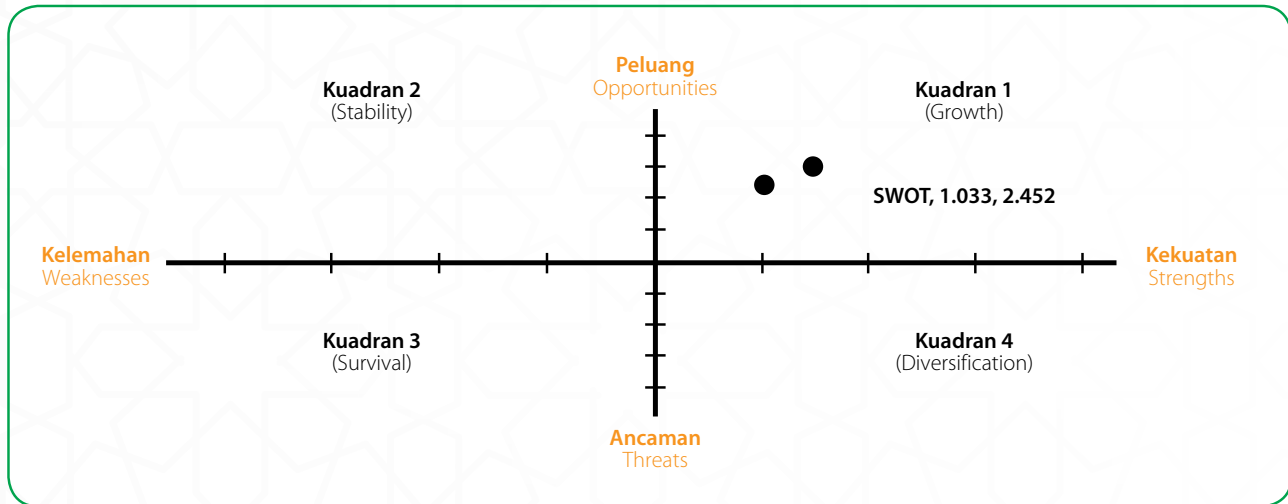
IKNB	2019	2020	2021	2022	2023
Modal Ventura Syariah / Sharia Venture Capital	1.027	1.192	1.384	1.607	1.866
Pembiayaan Syariah / Sharia Financing	20.118	20.13	19.910	19.807	19.704
Lembaga Mikro Syariah / Micro Sharia Institute	19	24	31	39	49
Pegadaian Syariah / Sharia Pawnshop	8.209	9.500	10.993	12.721	14.720
Total IKNB Syariah	29.373	30.729	32.317	34.317	36.339

Posisi Askrindo Syariah Saat ini

Dengan memperhitungkan kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang dihadapi, Perseroan pada tahun 2018 berada pada Posisi "Growth".

Current Askrindo Syariah Position

Taking into account the strengths, weaknesses, opportunities, and threats faced, the Company in 2018 is in the position of "Growth".



ASPEK PEMASARAN

Pada tahun 2018, Perseroan semakin menggiatkan aktivitas penetrasi pasar dengan melakukan inovasi produk penjaminan syariah dan memastikan terwujudnya *service excellent* atas kerjasama dengan segenap mitra. Selaras dengan upaya ini, Perseroan juga melakukan pengembangan internal dengan menyusun sistem operasi prosedur yang andal, baik di bidang operasional maupun pendukung, memenuhi kebutuhan SDM yang kompeten, membangun sistem aplikasi teknologi informasi yang terintegrasi, serta menguatkan struktur ekuitas (keuangan) yang pruden.

Guna mencapai sasaran utama, Perseroan juga meningkatkan kontribusi pendapatan melalui optimalisasi sumber bisnis baru yang berasal dari produk Pembiayaan dan *Surety Bond*. Pertumbuhan bisnis baru tersebut diupayakan melalui penguatan serta penambahan jejaring usaha dan inovasi, meliputi *cross selling/bundling*, sinergi/aliansi dengan mitra bisnis yang memberikan *win-win solution*, dan pengembangan produk baru.

Beberapa kebijakan utama terkait aktivitas pemasaran tahun 2018 yang dijalankan oleh Perseroan adalah sebagai berikut:

Strategi Umum Pemasaran

- Menjaga relasi bisnis yang sudah ada dengan memaksimalkan produk-produk penjaminan yang telah dilakukan kerjasama. Saat ini terdapat 15 Bank Umum Syariah (BUS), 17 Unit Usaha Syariah (UUS), 15 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS), 23 Lembaga Keuangan Non-Bank (LKNB), dan 4 Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB);

MARKETING ASPECT

In 2018, the Company intensified its market penetration activities by innovating sharia guarantee products and ensuring the realization of service excellence for cooperations with all partners. In line with this effort, the Company also carried out internal development by developing a reliable operating procedure system, both in the operational and support fields, accommodated the needs of competent human resources, built an integrated information technology application system, and strengthened prudent equity (financial) structure.

In order to achieve its main target, the Company also increased revenue contribution through optimization of new business sources derived from Financing and *Surety Bond* products. The Company strived to grow this new business by strengthening and increasing business networks and innovation, including *cross selling/bundling*, synergy/alliances with business partners that provide win-win solutions, and new product development.

Some of the main policies related to marketing activities in 2018 implemented by the Company were as follows:

General Marketing Strategy

- Maintaining existing business relationships by maximizing guarantee products that were already included in partnership. Currently there are 15 Sharia Commercial Banks (BUS), 17 Sharia Business Units (UUS), 15 Sharia Smallholder Financing Banks (BPRS), 23 Non-Bank Financial Institutions (LKNB), and 4 Non-Bank Financial Institutions (LKBB);

- b. Menetapkan tarif produk dengan mempertimbangkan faktor risiko, biaya akuisisi dan biaya reasuransi;
- c. Meningkatkan kerjasama dengan mitra bisnis, baik Perbankan Syariah maupun LKNB Syariah;
- d. Melaksanakan Intensifikasi dan Ekstensifikasi produk, *winback-strategy* serta penggunaan program-promosi yang tepat dan peningkatan layanan untuk meraih *customer engagement*;
- e. Meningkatkan kerjasama resiprokal dengan Perbankan Syariah untuk memanfaatkan investasi deposito dalam meningkatkan peroleh ujah.

Strategi Wilayah Cabang

- a. Meningkatkan 5 (lima) Kantor Pemasaran menjadi Kantor Cabang antara lain di wilayah Medan, Palembang, Semarang, Surabaya dan Makassar;
- b. Menambah Kantor Pemasaran di wilayah Batam, Bogor, Purwokerto, Surakarta, Jambi, Sukabumi, Jakarta Selatan 1 & 2, Pontianak, Aceh, Kediri, Banjarmasin, dan Lampung. Untuk memperbesar *market share*, Perseroan juga akan membuka jaringan kantor baru di Manado;
- c. Meningkatkan kompetensi SDM untuk memperkuat bisnis kantor cabang;
- d. Menerapkan standarisasi dalam hal *layout* dan *desain* interior maupun exterior kantor dan mendirikan Teras Mitra di setiap Kantor Cabang dan Kantor Perwakilan Syariah;
- e. Menetapkan target aspiratif setiap *outlet* KC, KPS dan KPPS melalui peningkatan potensi oleh masing-masing pemimpin *outlet* guna memastikan peningkatan *market share* dan bisnis di daerah masing-masing.

- b. Determining product rates by considering risk factors, acquisition costs and reinsurance costs;
- c. Enhancing cooperation with business partners, both Sharia Banking and Sharia LKNB;
- d. Carrying out Intensification and Extensification of products, *winback-strategies*, as well as using appropriate programs and improving services to achieve customer engagement;
- e. Increasing reciprocal cooperation with Sharia Banking to capitalize on deposit investments in increasing ujah income.

Branch Area Strategy

- a. Upgrading 5 (five) Marketing Offices to Branch Offices, among others those in Medan, Palembang, Semarang, Surabaya and Makassar;
- b. Increasing the number of Marketing Offices in Batam, Bogor, Purwokerto, Surakarta, Jambi, Sukabumi, South Jakarta 1 & 2, Pontianak, Aceh, Kediri, Banjarmasin, and Lampung. To expand market share, the Company will also open new office network in Manado;
- c. Improving HR competencies to strengthen branch office business;
- d. Implementing standardization in terms of office layout as well as interior and exterior design and establish Teras Mitra in each Sharia Branch Office and Representative Office;
- e. Establishing aspirational targets for each KC, KPS and KPPS outlet by enhancing potential done by each outlet manager to ensure an increase in market share and business in their respective regions.



Strategi Produk

- Menjaring penjaminan KBG dan *Surety*;
- Membentuk produk dan inisiasi produk baru;
- Memastikan bahwa produk-produk inovatif yang dikerjasamakan telah sesuai dengan kebutuhan.

SURVEY PELANGGAN

Perseroan secara berkala melakukan survey untuk mengetahui tingkat kepuasan dan *engagement* pelanggan, serta memastikan terwujudnya layanan dan produk terbaik yang sesuai dengan kebutuhan.

Metode Survey

Metode *survey* dijalankan dengan menyebarkan kuisioner ke seluruh Kantor Pemasaran Syariah (KPS) atau Kantor Cabang (KC) yang ditujukan kepada beberapa mitra bisnis di wilayah kerja masing-masing KPS & KC. Total kuesioner yang disebarakan pada tahun 2018 sebanyak 211 kuesioner.

Kuisioner ini terdiri dari 2 tipe pertanyaan, yaitu pertanyaan tertutup dengan pilihan jawaban serta pertanyaan terbuka. Kuesioner pertanyaan tertutup, meminta responden/mitra bisnis untuk memilih jawaban yang paling sesuai, dapat berupa 1 pilihan jawaban ataupun beberapa pilihan jawaban yang paling sesuai menurut responden/mitra bisnis. Sedangkan kuesioner pertanyaan terbuka, meminta responden/mitra bisnis mengisi jawaban yang paling sesuai berdasarkan pertanyaan yang diberikan.

Hasil Survey

Analisis atas hasil kegiatan Survey Kepuasan Pelanggan tahun 2018 dilakukan melalui dua pendekatan, yaitu Analisis *Customer Satisfaction Index* (CSI) dan Analisis *Service Quality*. Perhitungan/analisis CSI menggunakan pengukuran *Weight Factor* dan *Weight Score* atas hasil pengisian kuisioner responden untuk mendapatkan *Satisfaction Index*. Sedangkan Analisis *Service Quality* menggunakan pengukuran *gap* antara hasil persepsi/kinerja dengan harapan.

Berdasarkan hasil Survey Pelanggan tahun 2018, disimpulkan sebagai berikut:

- Tingkat kepuasan pelanggan tahun 2018, responden menyatakan Puas sebesar 36,97%, menyatakan Sangat Puas sebesar 54,03% dan menyatakan Cukup Puas sebesar 9,00%. Hal ini menunjukkan hasil yang positif, di mana persentase tingkat kepuasan pelanggan di 2018 untuk responden yang menyatakan Sangat Puas, lebih tinggi

Product Strategy

- Searching for KBG and *Surety* guarantees;
- Creating products and initiating new products;
- Ensuring that innovative products for cooperation are in accordance with the needs.

CUSTOMER SURVEY

The Company periodically conducts survey to determine the level of customer satisfaction and engagement, and ensures delivery of best services and products that meet the needs.

Survey Method

Survey method is carried out by distributing questionnaires to all Sharia Marketing Offices (KPS) or Branch Offices (KC) for several business partners in each KPS & KC working area. The total questionnaires distributed in 2018 were 211 questionnaires.

This questionnaire consists of 2 types of questions, namely closed-ended questions with a choice of answers and open-ended questions. For close-ended questionnaire, the respondent/business partner is required to choose the most suitable answer, which can be in the form of 1 or several answer options that are deemed to be the most suitable answer choices according to the respondent/business partner. Meanwhile, for open-ended questionnaire, the respondent/business partner is required to fill in the most appropriate answers based on the questions given.

Survey Results

The results of the Customer Satisfaction Survey 2018 was analyzed using two approaches, namely Customer Satisfaction Index (CSI) Analysis and Service Quality Analysis. Calculation/analysis of CSI uses Weight Factor and Weight Score measurements for the results of questionnaire filling-in by respondents to obtain the Satisfaction Index. Meanwhile, Service Quality Analysis uses measurement *gap* between perception/performance results and expectations.

Based on the results of Customer Survey 2018, it is concluded as follows:

- For customer satisfaction level in 2018, the number of respondents who declared Satisfied was recorded at 36.97%, Very Satisfied at 54.03% and Fairly Satisfied at 9.00%. This certainly shows positive result, in which the percentage of customer satisfaction level in 2018 for respondents who declared Very Satisfied was higher than

dibandingkan hasil persentase tingkat kepuasan pelanggan di 2017. Capaian ini sekaligus menunjukkan bahwa terjadi kepuasan pelanggan atas mutu dan eksistensi layanan Askrindo Syariah. Elemen pertimbangan terbanyak yang dipilih oleh responden dalam menentukan peningkatan kepuasan pelanggan adalah faktor Respon dan Komunikasi yang dilakukan oleh Askrindo Syariah dengan rata-rata *scoring* 8,29 (dari skala 1-10), disusul elemen berikutnya yakni faktor Layanan Administrasi dengan rata-rata *scoring* 8,1 (dari skala 1 – 10).

- b. Tingkat *engagement* pelanggan di 2018, responden menyatakan Puas sebesar 20,38%, menyatakan Sangat Puas sebesar 54,03%, dan menyatakan Cukup Puas sebesar 24,64%. Hal ini menunjukan hasil yang positif, di mana hasil persentase tingkat *engagement* pelanggan di 2018 untuk responden yang menyatakan Sangat Puas lebih tinggi dibandingkan hasil persentase tingkat *engagement* pelanggan di 2017. Capaian ini sekaligus menunjukkan bahwa terjadi *engagement* pelanggan atas mutu dan eksistensi layanan Askrindo Syariah. Elemen pertimbangan terbanyak yang dipilih oleh responden dalam menentukan peningkatan *engagement* pelanggan adalah faktor personalitas layanan karyawan yang dilakukan oleh Askrindo Syariah dengan rata-rata *scoring* 8,23 (dari skala 1-10), disusul elemen berikutnya yakni faktor kapasitas finansial Askrindo Syariah dengan rata-rata *scoring* 8,06 (dari skala 1 – 10)
- c. Elemen pertimbangan terbanyak yang dipilih oleh responden yang menunjukkan ketidakpuasan pelanggan adalah Tidak Pernah Terjadi sebesar 29,32%, disusul merasa faktor Kelambatan Pembayaran Klaim sebesar 20,68%. Capaian ini telah menjadi pertimbangan bagi Perseroan untuk melakukan perbaikan peningkatan pelayanan/ *service* kepada pelanggan. *Scoring* Tingkat Ketidakpuasan Pelanggan di 2018, rata-rata adalah 3,42% menunjukkan Sangat rendah rasa tidak puas/kecewa. Hal ini menunjukan bahwa hasil tingkat Ketidakpuasan pelanggan di 2018 untuk responden yang menyatakan Ketidakpuasan lebih tinggi dibandingkan 2017 dengan rata - rata sebesar adalah 3,40%.
- d. Secara keseluruhan tingkat kepuasan pelanggan terhadap eksistensi dan mutu layanan Askrindo Syariah dengan metode *Customer Satisfaction Index* (CSI) adalah sebesar 82,50%, yang artinya pelanggan SANGAT PUAS dengan eksistensi dan mutu layanan Askrindo Syariah.
- e. Berdasarkan hasil kuisioner mengenai harapan dan saran pelanggan, peningkatan pelayanan sudah cukup baik.

the percentage of customer satisfaction in 2017. This achievement also shows that customers were satisfied with the quality and existence of Askrindo Syariah services. The most consideration element chosen by respondents in determining the increase in customer satisfaction is the Response and Communication factor carried out by Askrindo Syariah with an average scoring of 8.29 (on a scale of 1-10), followed by the next element namely Administrative Services with an average scoring 8.1 (on a scale of 1-10).

- b. Customer engagement level in 2018, respondents stated Satisfaction of 20.38%, stated Very Satisfied by 54.03%, and stated Satisfied Sufficient at 24.64%. This shows a positive result, where the percentage level of customer engagement in 2018 for respondents who stated Very Satisfied is higher than the percentage level of customer engagement in 2017. This achievement also shows that customer engagement occurs with the quality and existence of Askrindo Syariah services. Among the evaluation indicators that are mostly chosen by respondents as a consideration in determining the increase in customer engagement were Askrindo Syariah employees' personality in delivering service, which obtained an average score of 8.23 (on a scale of 1-10), followed by Askrindo Syariah financial capacity with an average score of 8.06 (on a scale of 1-10)
- c. In terms of dissatisfaction result from the respondent, the evaluation indicator that is mostly used as a consideration to declare dissatisfaction was Never Happen at 29.32%, followed by Claim Payment Delay at 20.68%. This result has become a consideration for the Company to improve its services to the customers. Customer Dissatisfaction Level in 2018 was recorded at 3.42% on average, indicating Very low. This shows that the index of customer dissatisfaction level in 2018 for respondents who declared dissatisfaction was higher than in 2017 with an average of 3.40%.
- d. In general, customer satisfaction level for the existence and quality of Askrindo Syariah services was recorded at 82.50% based on the Customer Satisfaction Index (CSI) method. This means that the customers are VERY SATISFIED with the existence and quality of Askrindo Syariah services.
- e. Based on the results of the questionnaire regarding the expectations and suggestions of customers, service improvement was declared quite good.

Pangsa Pasar Perseroan

Berdasarkan olah data Statistik Perbankan Syariah dan Statistik IKNB Syariah Bulan Desember 2018, asumsi total potensi bisnis di 2018 (pembiayaan yang diberikan per tahunnya) sebesar Rp29.077 miliar. Total nilai kafalah penjaminan Askrindo Syariah yang ditanggung sendiri, bulan Desember tahun 2018 sebesar Rp10.387 Miliar. Sehingga market share atau pembiayaan yang telah dijamin oleh Askrindo Syariah yaitu sebesar Rp41,21%. Adapun rincian data ialah sebagai berikut:

Company Market Share

Based on data from Sharia Banking Statistics and sharia non-bank financial industry Statistics for December 2018, the assumption of total business potential in 2018 (financing provided annually) is Rp29,077 billion. The total value of Askrindo Syariah's underwritten kafalah, which was borne alone, in December 2018 was Rp10,387 billion. So the market share or financing guaranteed by Askrindo Syariah is Rp.41.21%. The details of the data are as follows:

**Market Share Askrindo Syariah Desember 2018 pada Bank Syariah dan IKNB Syariah /
The December 2018 Askrindo Syariah Market Share in Sharia Banks and sharia non-bank financial industry**

Dalam miliar Rp / In billion Rp

Lembaga / Institution	Pertumbuhan Pembiayaan / Financing Growth	Run Off 5%	Pembiayaan Baru / New Financing
Perbankan Syariah / Sharia Banking	35.819	14.672	50.491
IKNB Syariah / Sharia IKNB	(6.742)	1.737	(8.480)
Total Pencairan Pembiayaan / Total Financing Disbursement	29.077	16.409	42.011
Potensi Penjaminan (60% dari pencairan pembiayaan) / Potential Guarantees (60% of disbursed financing)	25.207		
Kafalah penjaminan Askrindo Syariah / Askrindo Syariah's underwritten kafalah	10.387		
Market Share Askrindo Syariah	41,21%		

TINJAUAN OPERASI PER SEGMENT USAHA

Kinerja Per segmen Usaha

Bisnis Perseroan pada tahun 2018 ditunjang oleh beberapa segmen, meliputi segmen produktif, konsumtif, *suretys* dan kontra bank garansi dengan nilai total penjaminan untuk tahun 2018 sebesar Rp10,4 Triliun.

Dari sisi segmen produktif, produk penjaminan mikro tercatat masih menyumbang kontribusi terbesar, yaitu sekitar 60,75% dari total seluruh segmen produktif. Sementara dari segmen konsumtif, kontribusi terbesar berasal dari penjaminan implan sebesar 40,81% dan nilai klaim sebesar 18,85%.

Pada tahun 2018, produk penjaminan pembiayaan (*cash financing*) memberikan kontribusi sebesar 98,24%, sementara segmen *non-cash financing* yaitu *suretyship* dan kontra bank garansi, memberikan kontribusi sebesar 1,76%.

Guna meningkatkan kinerja segmen *non-cash financing*, Perseroan di 2018 menggalakkan perjanjian kerjasama (PKS) dengan beberapa mitra perbankan syariah dan mitra korporasi BUMN untuk menerbitkan *surety bond* dan mengaktifkan agen-agen yang ada di seluruh jaringan kantor Perseroan. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan kinerja *non-cash financing* di masa mendatang.

OPERATIONAL OVERVIEW PER BUSINESS SEGMENTS

Performance per Business Segment

The Company's business in 2018 was supported by several segments, consisting of productive, consumptive, *suretys* and counter-bank guarantee segments with the total guarantee value amounting to Rp10.4 trillion in 2018.

In terms of productive segment, microfinancing products continued to account for the largest portion, which was around 60.75% of the total productive segment. While from the consumptive segment, the largest contribution came from implant guarantee of 40.81% and claim value of 18.85%.

In 2018, cash financing products contributed 98.24%, while the non-cash financing segment, namely *suretyship* and counter-bank guarantee, contributed 1.76%.

In order to improve the performance of non-cash financing segment, in 2018 the Company promoted a cooperation agreement (PKS) with several sharia banking partners and SOE corporate partners to issue *surety bonds* and activate agents across office network of the Company. This step is expected to improve non-cash financing performance in the future.

Imbal Jasa Kafalah

Per 31 Desember 2018, jumlah pengguna jasa seluruh produk mencapai 233.867 debitur, meningkat 119,67% dibandingkan tahun 2017 sejumlah 106.462 Debitur. Perolehan Imbal Jasa Kafalah (IJK) *gross* pada tahun 2018 mencapai Rp223,48 miliar, meningkat 26,76% dibandingkan 2017 sebesar Rp176,30 miliar sebagaimana tersaji dalam tabel berikut:

Dalam Rupiah Kecuali Dinyatakan Lain

In Rupiah Unless otherwise stated

No.	Jenis Produk / Type of Product	Nilai Ujrah / Ujrah Value	
		2018	2017
1	Kafalah Pembiayaan / Kafalah Financing	219.815	174.708
2	Kafalah Bank Garansi / Kafalah Bank Guarantee	3.339	1.557
3	Kafalah Surety	330	35
Total		223.484	176.300

Kafalah Pembiayaan

Perseroan menjamin segala jenis pembiayaan, baik pembiayaan skala kecil maupun skala menengah, seperti pembiayaan Mikro, Pembiayaan Modal Kerja, Pembiayaan Investasi, Pembiayaan Konsumsi, Pembiayaan Kepemilikan Emas dan Penjaminan Proyek-Proyek, yang sifatnya berkelanjutan, dengan skema *stand by loan* yang menggunakan *terms of condition* dan proses *underwriting* yang berhati-hati.

Dari pelaksanaan operasional usaha pada tahun 2018, total pendapatan Ujrah dari segmen kafalah pembiayaan mencapai Rp219.815 dibandingkan tahun 2017 sebesar Rp174.708 juta.

Kafalah Bank Garansi

Dari total nilai kafalah tahun 2018, total Ujrah segmen Kafalah Bank Garansi adalah sebesar Rp3.339 juta dibandingkan tahun 2017 sebesar Rp1.557 juta. Hasil tersebut menunjukkan adanya peningkatan penggunaan produk Bank Garansi oleh perbankan syariah nasional.

Kafalah Surety

Pada tahun 2018, dari total nilai kafalah tahun 2018, diperoleh total ujrah segmen Kafalah Surety sebesar Rp330 juta dibandingkan tahun 2017 sebesar Rp35 juta. Produk Kafalah Surety belum memberikan kontribusi yang maksimal dikarenakan pangsa pasar yang belum luas di perbankan syariah.

ANALISIS KINERJA KEUANGAN

Uraian mengenai kinerja keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 ini disusun berdasarkan Laporan Keuangan Perusahaan yang disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) yang berlaku umum di Indonesia. Laporan keuangan tersebut telah diaudit oleh

Kafalah Fee Contribution

As of December 31, 2018, the number of service users of all products reached 233,867 debtors, an increase of 119.67% compared to 2017 at 106,462 debtors. Gross Kafalah Fee Contribution (IJK) in 2018 reached Rp223.48 billion, an increase of 26.76% compared to 2017 amounting to Rp176.30 billion as presented in the following table:

Kafalah Financing

The Company guarantees all types of financing, both small and medium scale financing, such as Micro financing, Working Capital Financing, Investment Financing, Consumption Financing, Gold Ownership Financing and Project Guarantee, which are of a sustainable nature, with a stand by loan scheme that uses terms of conditions and prudent underwriting processes.

From the implementation of business operations in 2018, total revenue of Ujrah from kafalah financing segment reached Rp219,815 compared to 2017 amounting to Rp174,708 million.

Kafalah Bank Guarantee

From the total value of kafalah in 2018, total Ujrah from Kafalah Bank Guarantee segment amounted to Rp3,339 million compared to 2017 amounting to Rp1,557 million. These results indicated an increase in the use of Bank Guarantee products by national sharia banking.

Kafalah Surety

In 2018, from total value of kafalah in 2018, total Ujrah of Kafalah Surety segment was Rp330 million compared to 2017 amounting to Rp35 million. Kafalah Surety products have not made maximum contribution as its market share was not broad enough in sharia banking industry.

ANALYSIS OF FINANCIAL PERFORMANCE

This description of the financial performance for the year ended on December 31, 2018 is prepared based on the Company's Financial Statements which are presented in accordance with the generally accepted Financial Accounting Standards (PSAK) in Indonesia. The financial statements have been audited by

Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan dengan opini wajar dalam semua hal yang material, yakni posisi keuangan, kinerja keuangan dan arus kas, sesuai standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. Kinerja keuangan Perseroan ini dibahas dengan memperhatikan penjelasan dari pihak auditor eksternal mengenai catatan Laporan Keuangan perusahaan, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari laporan tahunan ini.

Public Accounting Firm of Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan with fair opinion in all material respects, namely financial position, financial performance and cash flow, in accordance with Indonesian Financial Accounting standards. The Company's financial performance is discussed by taking into account the explanation of the external auditor regarding the company's financial statements, as an integral part of this annual report.

LAPORAN POSISI KEUANGAN

Dalam Rupiah Kecuali Persentase

Deskripsi / Description	2018	2017	Defisiensi / Deficiency	Persentase / Percentage
Kas dan Bank / Cash and Bank	15.711.757.402	35.762.042.033	(20.050.284.631)	-56,07%
Aset Investasi / Investment Assets	349.848.110.022	318.884.943.750	30.963.166.272	9,71%
Piutang Ujrah / Ujrah Receivables	6.750.855.864	5.913.042.609	837.813.255	14,17%
Piutang ta'widh / Ta'widh Receivables	7.988.726.802	8.379.785.803	(391.059.001)	-4,67%
Piutang Hasil Investasi / Investment Income Receivables	381.286.784	153.183.255	228.103.529	148,91%
Aset Tetap / Fixed Assets	11.314.634.637	10.288.978.961	1.025.655.676	9,97%
Aset Pajak Tangguhan / Deferred Tax Assets	3.520.960.945	2.080.512.450	1.440.448.495	69,24%
Aset Tidak Berwujud / Intangible Assets	1.848.645.472	1.934.340.771	(85.695.299)	-4,43%
Aset Lain-lain / Other Assets	196.500.000	449.250.000	(252.750.000)	-56,26%
Jumlah Aset / Total Assets	401.227.957.708	391.354.837.891	9.873.119.817	2,52%
Utang Ta'widh / Ta'widh Payables	1.733.582.361	8.318.944.590	(6.585.362.229)	-79,16%
Utang Zakat / Zakat Payables	962.416.208	227.653.357	734.762.851	322,76%
Utang Pajak / Tax Payables	5.911.509.051	473.594.157	5.437.914.894	1148,22%
Jumlah Liabilitas / Total Liabilities	75.696.590.961	80.718.996.276	(5.022.405.315)	-6,22%
Jumlah Ekuitas / Total Equity	325.531.366.747	310.635.541.615	14.895.825.132	4,80%
Total Liabilitas dan Ekuitas / Total Liabilities and Equity	401.227.957.708	391.354.537.891	9.873.419.817	2,52%

Total Aset

Total aset perseroan per 31 Desember 2018 tercatat sebesar Rp401, 23 miliar atau meningkat 2,52% dari total aset tahun 2017 sebesar Rp391,35 miliar. Aset di 2018 terdiri dari aset lancar yang didominasi oleh aset investasi yang meliputi Deposito dan Reksadana, masing-masing sebesar Rp279,05 miliar dan Rp70,80 miliar.

- Kas dan bank mengalami peurunan Rp20,04 miliar atau sebesar 56,07% menjadi Rp15,71 miliar dibandingkan pada tahun 2017 sebesar Rp35,76 miliar. Penurunan ini terutama disebabkan oleh meningkatnya kebutuhan investasi yang mampu mendorong kerjasama antara mitra bisnis terutama Lembaga Jasa Keuangan Syariah.
- Investasi mengalami kenaikan Rp30,96 miliar atau sebesar 9,71% menjadi Rp349,85 miliar dibandingkan pada tahun 2017 sebesar Rp318,88 miliar. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh naiknya deposito berjangka mudharabah dari Rp248,80 miliar di 2017 menjadi Rp279,05 di 2018.

FINANCIAL POSITION STATEMENTS

In Rupiah except Percentage

Total Assets

The company's total assets as of December 31, 2018 were recorded at Rp401.23 billion, an increase of 2.52% from total assets in 2017 amounting to Rp391.35 billion. Assets in 2018 consisted of current assets which were dominated by investment assets comprising Deposits and Mutual Funds which amounted to Rp279.05 billion and Rp70.80 billion, respectively.

- Cash and banks decreased by Rp20.04 billion or 56.07% to Rp15.71 billion compared to 2017 amounting to Rp35.76 billion. This decrease was mainly due to increased investment needs that were able to encourage cooperation between business partners, especially Sharia Financial Services Institutions.
- Investment increased by Rp30.96 billion or 9.71% to Rp349.85 billion compared to 2017 amounting to Rp318.88 billion. This increase was mainly due to the increase in mudharabah time deposits from Rp248.80 billion in 2017 to Rp279.05 in 2018.

- Piutang Ujrah mengalami kenaikan Rp837,81 juta atau sebesar 14,17% menjadi Rp6,75 miliar dibandingkan pada 2017 sebesar Rp5,91 miliar. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh meningkatnya Piutang Pihak Berelasi dari Rp4,67 miliar di 2017 menjadi Rp5,38 miliar dan Piutang Pihak Ketiga dari Rp2,15 miliar di 2017 menjadi Rp2,27 miliar.
- Piutang Ta'widh mengalami penurunan Rp391,06 juta atau turun sebesar 4,67% menjadi Rp7,99 miliar dibandingkan pada 2017 sebesar Rp8,38 miliar. Penurunan ini terutama disebabkan oleh turunnya Piutang Pihak Berelasi dari Rp8,37 miliar di 2017 menjadi Rp7,67 miliar di 2018.
- Aset tetap per 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp11,31 miliar, meningkat 9,97% dari realisasi aset tetap tahun 2017, yakni sebesar Rp10,29 miliar. Aset tetap terdiri dari peralatan *computer* dan *noncomputer*, perabot kantor, renovasi dan gedung.

- Ujrah receivables increased by Rp837.81 million or by 14.17% to Rp6.75 billion compared to 2017 of Rp5.91 billion. This increase was mainly due to the increase in Related Party Receivables from Rp4.67 billion in 2017 to Rp5.38 billion and Third Party Receivables from Rp2.15 billion in 2017 to Rp2.27 billion.
- Ta'widh receivables decreased by Rp391.06 million or 4.67% to Rp7.99 billion compared to 2017 amounting to Rp8.38 billion. This decrease was mainly driven by the decrease in Related Party Receivables from Rp8.37 billion in 2017 to Rp7.67 billion in 2018.
- Fixed assets as of December 31, 2018 amounted to Rp11.31 billion, an increase of 9.97% from the realization of fixed assets in 2017, which amounted to Rp10.29 billion. Fixed assets consist of computer and non-computer equipment, office furniture, renovation and buildings.

Liabilitas

Total kewajiban Perseroan per 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp75,70 miliar turun 6,22% atau sebesar Rp5,02 miliar dari total kewajiban per 31 Desember 2017 sebesar Rp80,72 miliar. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan ta'widh secara signifikan di 2018, yang mencapai Rp6,59 miliar dari realisasi ta'widh per 31 Desember 2017.

Liabilities

Total liabilities of the Company as of December 31, 2018 was Rp75.70 billion, decreased by 6.22% or Rp5.2 billion from total liabilities as of December 31, 2017 of Rp80.72 billion. This decrease was largely due to a significant decrease in ta'widh in 2018, which reached Rp6.59 billion from the realization of ta'widh as of December 31, 2017.

Dalam Rupiah Kecuali Persentase

In Rupiah except Percentage

Deskripsi / Description	2018	2017	Perubahan / Changes	Persentase / Percentage
Utang Ta'widh / Ta'widh Payables	1.733.582.361	8.318.944.590	(6.585.362.229)	-79.16%
Utang Penjaminan Ulang / Re-Guarantee Payables	11.989.422.741	6.419.384.348	5.570.038.393	86.77%
Pendapatan Ujrah diterima dimuka / Ujrah Income In Advance	8.253.338.901	12.036.803.894	(3.783.464.993)	-31.43%
Utang Zakat / Zakah Payables	962.416.208	227.653.357	734.762.851	322.76%
Utang Pajak / Tax Payables	5.911.509.051	473.594.157	5.437.914.894	1148.22%
Biaya yang Masih Harus Dibayar / Accrued Expenses	2.846.872.467	1.434.168.447	1.412.704.020	98.50%
Estimasi Ta'widh Retensi Sendiri / Estimated Ta'widh Own Retention	18.519.750.447	31.933.923.726	(13.414.173.279)	-42.01%
Estimasi Ujrah yang belum merupakan pendapatan / Unearned estimated ujrah	22.125.368.273	16.810.740.881	5.314.627.392	31.61%
Liabilitas imbalan pasca kerja / Post employment benefit liabilities	2.206.202.034	2.282.340.604	(76.138.570)	-3.34%
Utang lain-lain / Other payables	1.148.128.478	781.442.272	366.686.206	46.92%
Jumlah Liabilitas / Total Liabilities	75.696.590.961	80.718.996.276	(5.022.405.315)	-6.22%

Utang Ta'widh

Utang Ta'widh per 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp1,73 miliar, turun 79,16 % atau sebesar Rp6,59 miliar dari Rp8,32 miliar per 31 Desember 2017. Penurunan utang ta'widh terutama disebabkan oleh menurunnya Utang Pihak Berelasi dari Rp6,88 miliar di 2017 menjadi Rp1,73 miliar di 2018.

Ta'widh Payables

Ta'widh Payables as of December 31, 2018 amounted to Rp1.73 billion, decreased by 79.16% or Rp6.59 billion from Rp8.32 billion as of December 31, 2017. The decrease in Ta'widh Payables was mainly due to a decrease in Related Party Payables from Rp6.88 billion in 2017 to Rp1.73 billion in 2018.

Utang Penjaminan Ulang

Utang Penjaminan Ulang per 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp11,99 miliar, naik 86,77% atau sebesar Rp5,57 miliar dari realisasi periode 31 Desember 2017 sebesar Rp6,42 miliar. Kenaikan Utang Penjaminan Ulang terutama disebabkan oleh Naiknya utang dari Pihak Berelasi dari Rp6,33 miliar di 2017 menjadi Rp11,88 di 2018.

Pendapatan Ujrah diterima dimuka

Pendapatan Ujrah diterima dimuka per 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp8,25 miliar, turun 31,43% atau sebesar Rp3,78 miliar dari realisasi periode 31 Desember 2017 sebesar Rp12,04 miliar.

Utang Zakat

Utang Zakat per 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp962,42 juta, naik 322,76% atau sebesar Rp734,66 juta dari realisasi periode 31 Desember 2017 sebesar Rp227,65 juta. Akun ini merupakan akumulasi dana zakat yang belum disalurkan.

Utang Pajak

Utang Pajak per 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp5,91 miliar, naik 1.148,22% atau sebesar Rp5,44 miliar dari periode 31 Desember 2017 sebesar Rp473,59 juta. Utang Pajak terdiri dari:

- Beban Pajak Penghasilan yang naik dari Rp388 juta di 2017 menjadi Rp8,08 miliar di 2018.
- Pajak Dibayar Dimuka yang pada tahun 2018 senilai Rp0 dibandingkan tahun 2017 sebesar Rp3,96 miliar.
- Utang Pajak yang naik dari Rp0 di 2017 menjadi Rp5,33 miliar di 2018.

Biaya yang Masih Harus Dibayar

Biaya yang Masih Harus Dibayar per 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp2,85 miliar, naik 98,50% atau sebesar Rp1,41 miliar dari periode 31 Desember 2017 sebesar Rp1,43 miliar. Biaya yang Masih Harus Dibayar terdiri dari:

- Biaya Pegawai, naik sebesar Rp322,83 juta atau 24,72% dari Rp1,31 miliar di 2017 menjadi Rp1,63 miliar di 2018;
- Biaya Jasa Profesional, naik sebesar Rp12,00 juta dari Rp60,00 juta di 2017 menjadi Rp72,00 juta di 2018;
- Biaya Sewa Kendaraan, naik dari Rp0 di 2017 menjadi Rp910 juta di 2018;
- Lain-lain, naik Rp168,28 juta atau 247,35% dari Rp68,03 juta di 2017 menjadi Rp236,31 juta di 2018.

Re-Guarantee Payables

Re-Guarantee Payables as of December 31, 2018 amounted to Rp11.99 billion, increased by 86.77% or Rp57.7 billion from the realization of the December 31, 2017 period amounting to Rp6.42 billion. The increase in Re-Guarantee Payables was mainly due to the increase in Related Party Payables from Rp6.33 billion in 2017 to Rp11.88 in 2018.

Ujrah Income in Advance

Ujrah Income in Advance as of December 31, 2018 was Rp8.25 billion, decreased by 31.43% or Rp3.78 billion from the realization of December 31, 2017 amounting to Rp12.04 billion.

Zakah Payables

Zakah Payables as of December 31, 2018 amounted to Rp962.42 million, increased by 322.76% or Rp734.66 million from the realization of the December 31, 2017 amounting to Rp227.65 million. This account is an accumulation of zakah funds that have not been distributed.

Tax Payables

Tax Payables as of December 31, 2018 amounted to Rp5.91 billion, increased by 1,148.22% or Rp5.44 billion from December 31, 2017 amounting to Rp473.59 million. Tax payables consist of:

- Income Tax Expenses which rose from Rp388 million in 2017 to Rp8.08 billion in 2018.
- Prepaid Taxes which in 2018 amounted to Rp0 compared to 2017 amounting to Rp3.96 billion.
- Tax Payables which rose from Rp0 in 2017 to Rp5.33 billion in 2018.

Accrued Expenses

Accrued Expenses as of December 31, 2018 amounted to Rp2.85 billion, rose by 98.50% or Rp1.41 billion from December 31, 2017 amounting to Rp1.43 billion. Accrued Expenses consisted of:

- Employee Expense, increased by Rp322.83 million or 24.72% from Rp1.31 billion in 2017 to Rp1.63 billion in 2018;
- Professional Services Expense, increased by Rp12.00 million from Rp60.00 million in 2017 to Rp72.00 million in 2018;
- Vehicle Rental Expense, increased from Rp0 in 2017 to Rp910 million in 2018;
- Others, rose by Rp168.28 million or 247.35% from Rp68.03 million in 2017 to Rp236.31 million in 2018.

Estimasi Ta'widh Retensi Sendiri

Estimasi Ta'widh Retensi Sendiri per 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp18,52 miliar, turun 42,01% atau sebesar Rp13,41 miliar dibandingkan periode 31 Desember 2017 sebesar Rp31,93 miliar.

Dalam estimasi ta'widh retensi sendiri termasuk estimasi atas ta'widh yang sudah terjadi namun belum dilaporkan (IBNR) masing-masing sebesar Rp5 miliar dan Rp6,04 miliar per 31 Desember 2018 dan 2017.

Estimasi Ujrah yang belum merupakan pendapatan

Estimasi Ujrah yang belum merupakan pendapatan per 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp22,13 miliar, naik 31,61% atau sebesar Rp5,31 miliar dibandingkan periode 31 Desember 2017 sebesar Rp16,81 miliar.

Liabilitas imbalan pasca kerja

Liabilitas imbalan pasca kerja per 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp2,21 miliar, turun 3,34% dibandingkan periode 31 Desember 2017 sebesar Rp2,28 miliar.

Utang lain-lain

Utang lain-lain per 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp1,15 miliar, naik 46,92% atau sebesar 366,69 juta dibandingkan periode 31 Desember 2017 sebesar Rp1,15 miliar.

Ekuitas

Berdasarkan Laporan Keuangan (*Audited*) Perseroan, Ekuitas per 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp401,23 miliar dengan rincian Modal Disetor pada 31 Desember 2018 tercatat sebesar Rp250,00 miliar, dan Cadangan Umum sebesar Rp61,46 miliar.

Dalam Rupiah Kecuali Persentase

Deskripsi / Description	2018	2017
Modal Setor / Paid-up Capital	250.000.000.000	250.000.000.000
Cadangan Umum / General Reserves	61.455.692.606	55.229.488.051
Keuntungan (Kerugian) yang belum direalisasi atas efek-efek dalam kelompok tersedia untuk dijual / Unrealized gain (losses) on available for sale marketable securities	729.702.567	84.943.616
Keuntungan (kerugian) aktuari / Actuarial gain (loss)	(738.885.659)	(905.094.607)
Saldo Laba / Retained Earnings	14.084.857.233	6.226.204.565
Kenaikan (Penurunan) Surat Berharga yang belum direalisasi / Increase (Decrease) of unrealized securities		
TOTAL EKUITAS / TOTAL EQUITY	325.531.366.747	310.635.541.615

Total Liabilitas dan Ekuitas

Total liabilitas dan ekuitas perseroan per 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp401,23 miliar atau meningkat 2,52% dari periode 31 Desember 2017 sebesar Rp391,35 miliar. Jumlah ini terdiri dari Liabilitas sebesar Rp75,70 miliar dan Ekuitas sebesar Rp325,53 miliar.

Estimated Ta'widh Own Retention

Estimated Ta'widh Own Retention as of December 31, 2018 was Rp18.52 billion, decreased by 42.01% or Rp13.41 billion compared to December 31, 2017 amounting to Rp31.93 billion.

Estimated ta'widh own retention includes estimates of ta'widh that incurred but not reported (IBNR) amounting to Rp5 billion and Rp6.04 billion as of 31 December 2018 and 2017, respectively.

Unearned Estimated Ujrah

Unearned Estimated Ujrah as of December 31, 2018 was Rp22.13 billion, rose by 31.61% or Rp5.31 billion compared to December 31, 2017 amounting to Rp16.81 billion.

Post-Employment Benefits Liabilities

Post-employment benefits liabilities as of December 31, 2018 was Rp2.21 billion, down 3.34% compared to December 31, 2017 amounting to Rp2.28 billion.

Other payables

Other payables as of December 31, 2018 were Rp1.15 billion, rose by 46.92% or 366.69 million compared to December 31, 2017 amounting to Rp1.15 billion.

Equity

Based on the Company's Audited Report, Equity as of December 31, 2018 was Rp401.23 billion, with details of Paid-up Capital as of December 31, 2018 recorded at Rp250.00 billion and General Reserves amounting to Rp61.46 billion.

Total Liabilities and Equity

The company's total liabilities and equity as of December 31, 2018 amounted to Rp401.23 billion, an increase of 2.52% from the period of December 31, 2017 amounting to Rp391.35 billion. This amount consisted of liabilities of Rp75.70 billion and equity of Rp325.53 billion.

LAPORAN LABA RUGI

Berdasarkan Laporan Keuangan (*Audited*) Perseroan, Laporan Laba (Rugi) Komprehensif untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah sebagai berikut:

Dalam Rupiah Kecuali Persentase

Deskripsi / Description	2018	2017	Perubahan / Changes	Persentase / Percentage
Pendapatan Kafalah / Kafalah Revenue	156.030.449.949	122.289.715.338	33.740.734.611	27,59%
Beban Kafalah / Kafalah Expenses	75.098.901.038	80.599.308.644	-5.500.407.606	-6,82%
Pendapatan Kafalah Bersih / Underwriting Income	80.931.548.911	41.690.406.694	39.241.142.217	94,13%
Pendapatan Investasi / Investment Income	12.655.131.361	16.965.151.160	-4.310.019.799	-25,41%
Beban Usaha / Operating Expenses	66.609.072.438	52.623.755.526	13.985.316.912	26,58%
Laba Usaha / Operating Profit	26.977.607.834	6.031.802.808	20.945.805.026	347,26%
Laba (Rugi) Bersih Sebelum zakat dan pajak / Net Profit (Loss) Before zakah and tax	22.729.066.672	6.783.858.801	1.594.207.871	235,05%
Laba (Rugi) Tahun Berjalan / Profit (Loss) current Year	14.084.857.233	6.226.204.555	7.858.652.678	126,22%
Laba (Rugi) Komprehensif / Comprehensive Profit (Loss)	14.895.825.132	6.459.062.548	8.436.762.584	130,62%

In Rupiah Except Percentage

Pada tahun 2018, Perseroan mencatatkan kenaikan kinerja yang cukup baik dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya. Perseroan membukukan laba setelah pajak dan zakat sebesar Rp14,08 miliar atau naik signifikan sebesar 126,22% dari tahun 2017 yang tercatat sebesar Rp6,23 miliar.

Imbal Jasa Kafalah Bruto

Imbal Jasa Kafalah Bruto selama tahun 2018 mencapai Rp223,48 miliar, naik 26,76% dari tahun 2017 sebesar Rp176,30 miliar. Pendapatan ujah tersebut terdiri dari:

- ujah pembiayaan konsumtif sebesar Rp51,24 miliar, turun 0,03% atau sebesar Rp15,95 juta dari Rp51,26 miliar di 2017;
- ujah pembiayaan produktif sebesar Rp168,57 miliar, naik 36,55% atau Rp45,12 miliar dari Rp123,46 miliar di 2017; dan
- ujah *surety* sebesar sebesar Rp3,67 miliar, naik 131,10% atau Rp2,08 miliar dari Rp1,59 miliar di 2017.

Jumlah Pendapatan kafalah adalah selisih dari imbal jasa kafalah bruto dengan beban penjaminan ulang, cadangan ujah dan pendapatan kafalah lain. Beban penjaminan ulang (*netto*) selama 2018 sebesar Rp66,95 miliar atau naik 43,34% sebesar Rp20,24 miliar dari Rp46,71 miliar di 2017.

Beban Kafalah

Beban kafalah terdiri dari beban ta'widh, beban komisi, Kenaikan (Penurunan) Estimasi Ta'widh Retensi Sendiri, Pendapatan Subrogasi dan beban kafalah lain. Beban Kafalah per 31 Desember 2018 tercatat sebesar Rp75,10 miliar, turun 6,82% atau Rp5,50 miliar dibandingkan tahun 2017 sebesar Rp80,60 miliar dengan rincian sebagai berikut:

INCOME STATEMENTS

Based on the Company's Audited Financial Statements, Comprehensive Income Statements for the years ended on December 31, 2018 and December 31, 2017 are as follows:

In 2018, the Company recorded a fairly good increase compared to the realization of the previous year. The Company posted profit after tax and zakah amounting to Rp14.08 billion or a significant increase of 126.22% from 2017 which was recorded at Rp6.23 billion.

Gross Kafalah Fee Contribution (Premi)

Gross Kafalah Fee Contribution in 2018 reached Rp223.48 billion, increased by 26.76% from 2017 amounting to Rp176.30 billion. Ujah income consisted of:

- consumptive financing ujah amounting to Rp51.24 billion, decreased by 0.03% or Rp15.95 million from Rp51.26 billion in 2017;
- productive financing ujah amounting to Rp168.57 billion, increased by 36.55% or Rp45.12 billion from Rp123.46 billion in 2017; and
- surety ujah amounting to Rp3.67 billion, increased by 131.10% or Rp2.08 billion from Rp1.59 billion in 2017.

Kafalah revenue is the difference from gross kafalah fee contribution with re-guarantee expense, ujah reserve and other kafalah income. Net re-guarantee expenses during 2018 amounted to Rp66.95 billion, up 43.34% to Rp20.24 billion from Rp46.71 billion in 2017.

Kafalah Expenses

Kafalah expenses consisted of ta'widh expenses, commission expenses, Increase (Decrease) of Estimated Ta'widh Own Retention, Subrogation Revenues and other expenses. Kafalah expense as of December 31, 2018 was recorded at Rp75.10 billion, fell by 6.82% or Rp5.50 billion compared to 2017 amounting to Rp80.60 billion with the following details:



Ta'widh

Ta'widh bersih selama tahun 2018 sebesar Rp80.544 juta atau 120,3% dari anggarannya sebesar Rp71.244 juta. Seluruh realisasi ta'widh selama tahun 2018 adalah ta'widh pembiayaan sebesar Rp80.544 juta dan ta'widh KBG & Surety.

Subrogasi

Subrogasi selama tahun 2018 sebesar Rp11.085 juta atau 48,1% dari anggarannya yang sebesar Rp23.040 juta.

Beban Akuisisi

Beban akuisisi selama tahun 2018 adalah sebesar Rp17.991 juta atau 77,3% dari anggarannya sebesar Rp23.271 juta.

Cadangan Ta'widh

Kenaikan cadangan ta'widh tahun 2018 dicatat sebesar Rp18.520 juta atau mencapai 44,73% dari anggaran tahun 2018 sebesar Rp41.398 juta. Kenaikan cadangan ta'widh pada tahun 2018 antara lain disebabkan terjadinya perubahan metode perhitungan cadangan ta'widh sesuai dengan POJK tentang Penyelenggaraan Usaha Penjaminan. Dimana perhitungan pada tahun 2016 menggunakan rumus : $0,25\% \times \text{Kafalah Outstanding (onrisk) periode berjalan}$, berubah menjadi $100\% \text{ ta'widh register} + \text{Rata-rata IBNR (3 bulan)}$.

Beban Kafalah Lain

Beban kafalah lain sebesar Rp1.064 juta Sehingga pada 31 Desember 2018 Beban Kafalah yang tercatat adalah sebesar Rp75.099 juta.

Pendapatan Kafalah Bersih

Pendapatan Kafalah Bersih pada tahun 2018 adalah sebesar Rp80,93 miliar, naik 94,13% atau sebesar Rp39,24 miliar dari Rp41,69 miliar di 2017.

Pendapatan Investasi

Investasi pada tahun 2018 adalah sebesar Rp12,66 miliar, turun 25,41% atau sebesar Rp4,31 miliar dari Rp16,97 miliar di 2017. Pendapatan Investasi berasal dari Bagi Hasil Deposito masing-masing sebesar Rp11,03 miliar dan Rp10,78 miliar di 2018 dan 2017 dan Reksadana sebesar Rp1,62 miliar dan Rp6,18 miliar di 2018 dan 2017.

Beban Usaha

Jumlah Beban Usaha selama tahun 2018 adalah sebesar Rp66,61 miliar, naik 26,58% dari Rp52,62 miliar di 2017. Beban Usaha di 2018 terdiri dari Beban Pemasaran sebesar Rp6,80 miliar dan Beban Umum sebesar Rp59,81 miliar.

Ta'widh

Net ta'widh during 2018 amounting to Rp80,544 million or 120.3% of the budget of Rp71,244 million. All realization of ta'widh during 2018 are ta'widh financing of IDR 80,544 million and KBG & Surety ta'widh.

Subrogation

Subrogation during 2018 amounted to Rp.11,085 million or 48.1% of its budget of Rp23,040 million.

Acquisition Expenses

Acquisition costs in 2018 amounted to Rp17,991 million or 77.3% of its budget of Rp23,271 million.

Ta'widh Reserve

The increase in ta'widh reserves in 2018 is recorded at Rp18,520 million or reaching 44.73% of the budget in 2018 amounting to Rp41,398 million. Increase in ta'widh reserves in 2018 was partly due to the occurrence Changes to the calculation method for backup reserves accordingly with POJK concerning the Implementation of Guarantee Business. Where calculations in 2016 uses formula: $0.25\% \times \text{Kafalah Outstanding (onrisk) period running}$, changes to $100\% \text{ ta'widh register} + \text{IBNR average (3 months)}$.

Other Kafalah Expenses

Other Kafalah expenses is amounted to Rp1,064 million. As of 31 December 2018, The Kafalah expenses recorded is amounted to Rp.75,099 million.

Underwriting Income

Net Kafalah Income 2018 was Rp80.93 billion, up 94.13% or Rp39.24 billion from Rp41.69 billion in 2017.

Investment Income

Investment in 2018 amounted to Rp12.66 billion, decreased by 25.41% or Rp4.31 billion from Rp16.97 billion in 2017. Investment income came from Profit Sharing Deposits amounting to Rp11.03 billion and Rp10.78 billion, respectively in 2018 and 2017 and mutual funds amounting to Rp1.62 billion and Rp6.18 billion in 2018 and 2017.

Operating Expenses

Total Operating Expenses during 2018 amounted to Rp66.61 billion, rose by 26.58% from Rp52.62 billion in 2017. Operating Expenses in 2018 consisted of Marketing Expenses of Rp6.80 billion and General Expenses of Rp59.81 billion.

Laba (Rugi) Usaha

Laba (Rugi) Usaha yang diperoleh selama 2018 merupakan selisih antara Pendapatan Kafalah Bersih ditambah Hasil Investasi (Nisbah Investasi) dikurangi dengan Jumlah Beban Usaha. Laba (Rugi) Usaha yang diperoleh selama 2018 adalah sebesar Rp26,98 miliar, naik signifikan sebesar 347% atau sebesar Rp20,95 miliar dari Rp6,03 miliar di 2017.

Laba (Rugi) Sebelum Pajak dan Zakat

Perolehan Laba (Rugi) Sebelum Pajak dan Zakat selama tahun 2018 adalah sebesar Rp22,73 miliar, naik 235,05% atau sebesar Rp1,59 miliar dibandingkan tahun 2017 sebesar Rp6,78 miliar. Laba (Rugi) Sebelum Pajak dan Zakat merupakan selisih antara Laba (Rugi) Usaha dan Pendapatan (Beban) Lain-lain.

Laba (Rugi) Komprehensif

Laba (Rugi) Komprehensif pada tahun 2018 adalah sebesar Rp14,90 miliar, naik 130,62% atau sebesar Rp8,44 miliar dibandingkan Rp6,46 miliar di 2017.

LAPORAN ARUS KAS

Laporan Arus Kas Selama Tahun 2018 menunjukkan Saldo Kas dan Bank Akhir Tahun sebesar Rp15.712 juta. Pengeluaran Kas sampai akhir tahun 2018 adalah sebesar Rp236.277 juta, sedangkan penerimaan kas selama 2018 adalah sebesar Rp247.190 juta.

Penerimaan kas didominasi oleh penerimaan Imbal jasa Kafalah sebesar Rp222.647 juta, atau 100.7% dari anggaran.

Penerimaan kas dari Hasil Investasi tercatat sebesar 60,8% dari RKAP 2018. Sedangkan pengeluaran kas didominasi oleh pengeluaran terkait Beban Kafalah antara lain beban Ta'widh dan Beban Penjaminan Ulang (reas). Beban Ta'widh mencapai 125,2% dari anggarannya sedangkan beban Penjaminan Ulang mencapai 117,4% dari anggarannya.

Jumlah Beban Kafalah pada tahun 2018 sebesar Rp167.177 atau mencapai 114,0% dari anggarannya. Sedangkan yang dikeluarkan untuk Pengadaan Barang Modal mencapai Rp3.230 Dengan demikian, saldo akhir kas pada tanggal 31 Desember 2018 tercatat sebesar Rp15.712.

Operating Profit (Loss)

Operating Profit (Loss) obtained during 2018 represented the difference between Net Kafalah Income plus Investment Income (Investment Ratio) deducted by Total Operating Expenses. Operating Profit (Loss) obtained during 2018 amounted to Rp26.98 billion, a significant increase of 347% or Rp20.95 billion from Rp6.03 billion in 2017.

Profit (Loss) Before Tax and Zakah

Profit (Loss) Before Tax and Zakah during 2018 was Rp22.73 billion, increased by 235.05% or Rp1.59 billion compared to 2017 amounting to Rp6.78 billion. Profit (Loss) Before Tax and Zakah is the difference between Operating Profit (Loss) and Other Income (Expenses).

Comprehensive Income

Comprehensive Income in 2018 was Rp14.90 billion, rose by 130.62% or Rp8.44 billion compared to Rp6.46 billion in 2017.

CASH FLOW STATEMENTS

Statements of Cash Flows During 2018 showed End-of-Year Cash and Bank Balances of Rp. 15,712 million. Cash disbursements until the end of 2018 amounted to Rp236,277 million, while cash receipts during 2018 amounted to Rp247,190 million.

Cash receipts are dominated by Kafalah fee receipts amounting to Rp222,647 million, or 100.7% of the budget.

Cash receipts from Investment Results were recorded at 60.8% of the 2018 RKAP. While cash disbursements were dominated by expenses related to Kafalah expenses including Ta'widh expenses and Reinsurance Expenses. Ta'widh expenses reached 125.2% of the budget while the Reinsurance expense reached 117.4% of the budget.

The amount of Kafalah expenses in 2018 was Rp167,177 or reached 114.0% of the budget. Whereas issued for the Procurement of Capital Goods reached Rp3,230. Thus, the final cash balance as at 31 December 2018 was recorded at Rp15,712.

Dalam Rupiah Kecuali Dinyatakan Lain

In Rupiah except Otherwise Stated

Deskripsi / Description	Anggaran / Budget 2018	Realisasi / Realization 2018	Pencapaian / Achievement	Anggaran / Budget 2019
Interior	2.000.000.000	1.817.000.000	90.9%	2.250.000.000
Inventaris Kantor / Office Inventory	600.000.000	309.000.000	51.5%	1.000.000.000
Mesin Kantor / Office Machinery	611.000.000	184.000.000	30.2%	600.000.000
Perangkat Keras / Hardware	857.000.000	254.000.000	29.6%	4.081.000.000
Perangkat Lunak / Software	4.000.000.000	918.000.000	23.0%	1.800.000.000
Bangunan Kantor / Office Building	-	-	-	-
Jumlah / Total	8.067.000.000	3.482.000.000	43.2%	13.626.000.000

Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Pada 2018, Perseroan mencatat arus kas dari aktivitas operasi sebesar Rp13.484 juta, lebih rendah Rp12.974 juta dibandingkan arus kas dari aktivitas operasi pada 2017 sebesar Rp26.458 juta. Penurunan ini diakibatkan oleh meningkatnya pengeluaran untuk pembayaran beban kafalah (seperti ta'widh dan beban penjaminan ulang).

Arus Kas untuk Aktivitas Investasi

Arus kas untuk aktivitas investasi tercatat sebesar Rp33.535 juta, mengalami kenaikan senilai Rp35.412 juta dibandingkan pada 2017. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh peningkatan investasi pada instrument deposito sebagai upaya peningkatan kerjasama terutama dengan mitra Perbankan Syariah.

Cash Flow from Operating Activities

In 2018, the Company recorded cash flows from operating activities of Rp13,484 million, lower than Rp12,974 million compared to cash flows from operating activities in 2017 of Rp26,458 million. This decrease was due to an increase in expenses for payment of kafalah expenses (such as ta'widh and re-guarantee fees).

Cash Flows for Investing Activities

Cash flow for investment activities was recorded at Rp 33,535 million, an increase of Rp 35,412 million compared to 2017. The increase was mainly due to an increase in investment in deposit instruments as an effort to increase cooperation, especially with Sharia Banking partners.

Dalam Rupiah Kecuali Persentase

In Rupiah except Percentage

Deskripsi / Description	2018	2017	Perubahan / Changes	Persentase / Percentage
Arus Kas dari Aktivitas Operasi / Cash Flows from Operating Activities	13.484.714.308	26.458.217.358	(12.973.503.050)	(49,03%)
Arus Kas untuk Aktivitas Investasi / Cash Flows from Investing Activities	(33.534.998.939)	1.876.821.624	(35.411.820.563)	(1.886,80%)
Kenaikan (Penurunan) Bersih Kas dan Bank / Net Increase (Decrease) in Cash on Hand and in Banks	(20.050.284.631)	28.335.038.982	(48.385.323.613)	(170,76%)
Saldo Kas dan Bank awal tahun / Cash on Hand and in Banks at Beginning of Year	35.762.042.033	7.427.003.051	28.335.038.982	381,51%
Saldo Kas dan Bank akhir tahun / Cash on Hand and Banks at End of Year	15.711.757.402	35.762.042.033	(20.050.284.631)	(56,07%)

KEMAMPUAN MEMBAYAR UTANG DAN TINGKAT KOLEKTIBILITAS PIUTANG

Kemampuan Membayar Utang

Kemampuan Perseroan dalam membayar utang dapat diukur dengan menggunakan rasio likuiditas dan rentabilitas.

1. Rasio Likuiditas

Rasio likuiditas terdiri dari rasio kas dan rasio lancar. Rasio kas merupakan tingkat kemampuan Perseroan dalam memenuhi seluruh kewajiban jangka pendek yang diukur dengan perbandingan antara kas + bank + surat berharga jangka pendek dengan liabilitas jangka pendek.

Sementara rasio lancar merupakan tingkat kemampuan Perseroan dalam memenuhi seluruh kewajiban jangka panjang diukur dengan perbandingan antara aset lancar dengan liabilitas jangka pendek. Rasio kas dan rasio lancar Per 31 Desember 2018 masing-masing adalah sebesar 20,76% dan 1.212,56%.

Uraian / Description	2018	2017
Rasio Kas (Kas & Bank dibagi Total Aset) / Cash Ratio (Cash & Bank divided by Total Assets)	20,76%	44,30%
Rasio Lancar / Current Ratio	1.212,56%	200,00%

ABILITY TO PAY DEBT AND RECEIVABLE COLLECTIBILITY LEVEL

Ability to Pay Debt

The Company's ability to pay debts can be measured using liquidity and profitability ratios.

1. Liquidity ratio

The liquidity ratio consists of cash ratio and current ratio. Cash ratio represents the level of the Company's ability to fulfill all short-term liabilities as measured by the ratio between cash + banks + short-term securities and short-term liabilities.

While current ratio represents the level of the Company's ability to fulfill all long-term liabilities measured by the ratio between current assets and short-term liabilities. Cash ratio and current ratio as of December 31, 2018 was 20,76% and 1.212,56%.

2. Rentabilitas

Rentabilitas Perseroan terdiri dari Return on Equity (RoE) dan Return on Investment (RoI). RoE dihitung berdasarkan perbandingan antara laba setelah pajak dengan modal sendiri, sementara RoI dihitung berdasarkan perbandingan antara EBIT + Penyusutan dengan *Capital Employed*. RoE Per 31 Desember 2018 adalah sebesar 4,43%.

Rasio Liabilitas terhadap Ekuitas / Liability to Equity Ratio	2018	2017
Return on Equity (RoE)	4,43%	2,00%

Kolektibilitas Piutang

Kolektibilitas piutang Perseroan dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah piutang usaha dengan jumlah pendapatan usaha. Kolektibilitas piutang Perseroan dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah piutang usaha dengan jumlah pendapatan usaha. Collection Periods Perseroan Pada 2018 tercatat selama 1-30 hari.

STRUKTUR MODAL DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN ATAS STRUKTUR MODAL

Struktur Modal

Struktur Modal adalah perimbangan atau perbandingan antara ekuitas dengan utang baik jangka panjang maupun jangka pendek. Per tanggal 31 Desember 2018 dan 2017, akun-akun Perseroan yang membentuk rasio total ekuitas terhadap total utang adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham	Jumlah Saham / Number of Shares	Persentase Kepemilikan / Ownership Percentage	Jumlah / Total	Shareholders
PT Asuransi Kredit Indonesia (Persero)	249.999	99,9996%	249.999.000.000	PT Asuransi Kredit Indonesia (Persero)
Yayasan Dana Kesejahteraan Karyawan Askrindo	1	0,0004%	1.000.000	Yayaan Dana Kesejahteraan Karyawan Askrindo
Jumlah	250.000	100,00%	250.000.000.000	Total

Kebijakan Manajemen atas Struktur Modal

Tujuan utama pengelolaan modal Perseroan adalah untuk memastikan pemeliharaan rasio modal yang sehat untuk mendukung usaha, pemeringkat pinjaman yang kuat dan memaksimalkan imbalan bagi pemegang saham. Perseroan disyaratkan untuk memelihara tingkat permodalan tertentu oleh perjanjian pinjaman. Perseroan telah memenuhi semua persyaratan modal yang ditetapkan oleh pihak eksternal.

Sesuai dengan Pasal 31 ayat 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 2/POJK.05/2017 tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Penjaminan, Perusahaan penjaminan syariah dengan lingkup nasional diwajibkan memiliki modal sendiri (ekuitas) minimum sebesar Rp100.000.000.000 (seratus miliar Rupiah) dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun setelah memperoleh izin usaha. Pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017, Perusahaan telah memenuhi ketentuan tersebut.

2. Rentability

The Company's rentability consisted of Return on Equity (RoE) and Return on Investment (RoI). RoE is calculated based on the ratio between profit after tax and equity, while RoI is calculated based on a ratio between EBIT + Depreciation and Capital Employed. ROE as of December 31, 2018 was 4.43%.

Receivables Collectability

The collectibility of the Company's receivables is calculated based on the ratio between the amount of trade receivables and total revenues. The collectibility of the Company's receivables is calculated based on a comparison between the amount of trade receivables and the amount of operating revenues. The Company's Collection Periods in 2018 are recorded for 1-30 days.

EQUITY STRUCTURE AND MANAGEMENT POLICY ON EQUITY STRUCTURE

Capital Structure

Capital Structure is a balance or ratio between equity and long-term and short-term debt. As of December 31, 2018 and 2017, the Company's accounts that made up the ratio of total equity to total debt are as follows:

Management Policy on Capital Structure

The main objective of the Company's capital management is to ensure that healthy capital ratio is maintained to support business, along with strong loan rating and to maximize return to shareholders. The Company is required to maintain certain capital level by loan agreement. The Company has fulfilled all capital requirements set by external parties.

In accordance with Article 31 paragraph 3 of the Financial Services Authority Regulation No. 2/POJK.05/2017 concerning the Implementation of Guarantee Institutions Business, sharia insurance companies with a national scope are required to have equity of a minimum of Rp100,000,000,000 (one hundred billion Rupiah) within a maximum period of 3 (three) years after obtaining business license. As of December 31, 2018 and 2017, the Company has complied with these conditions.

Dalam mengelola permodalannya, Perseroan senantiasa mempertahankan kelangsungan usaha serta memaksimalkan Manfaat bagi pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya.

Dasar Pemilihan Kebijakan Manajemen Atas Struktur Modal

Perseroan mengelola struktur permodalan dan melakukan penyesuaian, bila diperlukan, berdasarkan perubahan kondisi ekonomi. Untuk memelihara dan menyesuaikan struktur permodalan, Perseroan dapat menyesuaikan pembayaran dividen kepada pemegang saham, menerbitkan saham baru atau mengusahakan pendanaan melalui tambahan modal disetor dari Pemegang Saham.

INFORMASI MENGENAI INVESTASI, EKSPANSI, DIVESTASI, PENGGABUNGAN/PELEBURAN USAHA, AKUISISI ATAU RESTRUKTURISASI UTANG/MODAL

Pada 2018 Perseroan tidak melakukan aksi korporasi apapun.

INFORMASI TRANSAKSI MATERIAL YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN DAN/ ATAU TRANSAKSI DENGAN PIHAK AFILIASI

Suatu pihak dianggap berelasi dengan Perseroan jika:

- 1) Langsung, atau tidak langsung yang melalui satu atau lebih perantara, suatu pihak
 - a. mengendalikan, atau dikendalikan oleh, atau berada di bawah pengendalian bersama dengan Perseroan
 - b. memiliki kepentingan dalam Perusahaan yang memberikan pengaruh signifikan atas Perseroan; atau
 - c. memiliki pengendalian bersama atas Perseroan;
- 2) Suatu pihak yang berelasi dengan Perseroan;
- 3) Suatu pihak adalah ventura bersama dimana Perusahaan sebagai venturer;
- 4) Suatu pihak adalah anggota dari personil manajemen kunci Perseroan atau induknya;
- 5) Suatu pihak adalah anggota keluarga dekat dari individu yang diuraikan dalam butir 1) atau 4);
- 6) Suatu pihak adalah entitas yang dikendalikan, dikendalikan bersama atau dipengaruhi signifikan oleh atau untuk di mana hak suara signifikan pada beberapa entitas, langsung maupun tidak langsung, individu seperti diuraikan dalam butir 4) atau 5); atau
- 7) Suatu pihak adalah suatu program imbalan pascakerja untuk imbalan kerja dari Perseroan atau entitas yang terkait dengan Perseroan.

In managing its capital, the Company continues to maintain business continuity and maximize benefits for shareholders and other stakeholders.

Basis for Selecting Management Policy on Capital Structure

The Company manages capital structure and makes adjustments to it, if necessary, based on changes in economic conditions. To maintain and adjust the capital structure, the Company can adjust dividend payments to shareholders, issue new shares or seek funding through additional paid-in capital from the Shareholders.

INFORMATION CONCERNING INVESTMENT, EXPANSION, DIVESTMENT, MERGER, DEBT/ CAPITAL ACQUISITION OR RESTRUCTURING

In 2018 the Company did not carry out any corporate actions.

INFORMATION ON MATERIAL TRANSACTIONS THAT CONTAIN CONFLICT OF INTEREST AND/ OR TRANSACTIONS WITH AFFILIATED PARTIES

A party is considered to be related to the Company if:

- 1) Either directly or indirectly through one or more intermediaries, a party
 - a. controls, or is controlled by, or is under joint control with the Company
 - b. has interests in the Company that have a significant influence on the Company; or
 - c. have joint control of the Company;
- 2) A party related to the Company;
- 3) A party is a joint venture where the Company is a venturer;
- 4) A party is a member of the Company's key management personnel or its parent;
- 5) A party is a close family member of the individual described in points 1) or 4);
- 6) A party is an entity that is controlled, jointly controlled or significantly influenced by or for where the voting rights are significant in several entities, directly or indirectly, as set out in points 4) or 5); or
- 7) A party is a post-employment benefit program for employee benefits from the Company or an entity related to the Company.

Berikut merupakan pihak-pihak yang berelasi:

- PT Asuransi Kredit Indonesia (Persero) dan Yayasan Dana Kesejahteraan Karyawan Askrindo merupakan pemegang saham Perusahaan.
- Perusahaan yang sebagian pemegang saham dan pengurus atau manajemennya sama dengan Perusahaan adalah PT Reasuransi Nasional Indonesia dan PT Askrindo Mitra Utama.

Rincian jumlah masing-masing pos aset, liabilitas, pendapatan kafalah dan beban kafalah yang berkaitan dengan pihak yang berelasi beserta persentasenya terhadap total aset, total liabilitas, total pendapatan kafalah dan total beban kafalah sebagai berikut:

The following are related parties:

- PT Asuransi Kredit Indonesia (Persero) and Yayasan Dana Kesejahteraan Karyawan Askrindo are shareholders of the Company.
- Companies whose part of its shareholders and management is the same as the Company, namely PT Reasuransi Nasional Indonesia and PT Askrindo Mitra Utama.

The details of the amount of each asset, liability, kafalah revenue and kafalah expenses related to the related parties along with the percentage to total assets, total liabilities, total kafalah revenue and total expenses are as follows:

Bank / Cash in Banks

Bank / Cash in Banks	2018	2017
Rupiah		
Pihak berelasi / Related parties	1.962.488.490	1.559.333.328
PT Bank Syariah Mandiri	1.916.607.920	2.997.716.111
PT Bank BRI Syariah	615.342.231	396.316.174
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk - Unit Syariah / Sharia Unit	153.768.937	58.174.225
Dolar Amerika Serikat / US Dollar		
PT Bank BNI Syariah	264.643.750	247.592.951

Investasi / Investments

- Deposito berjangka mudharabah / Time deposits mudharabah

Pihak berelasi / Related parties	2018	2017
PT Bank Syariah Mandiri	94.351.439.088	89.700.000.000
PT Bank BRI Syariah	47.650.000.000	45.000.000.000
PT Bank BNI Syariah	46.650.000.000	52.900.000.000
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk - Unit Syariah / Sharia Unit	1.250.000.000	10.500.000.000

- Reksadana tersedia untuk dijual / Available for sale mutual fund

	Jumlah unit / Number of units	Biaya perolehan / Acquisition cost	Nilai wajar / Fair value	Keuntungan yang belum direalisasi / Unrealized gain
Reksa Dana Syariah Terproteksi PNM Investa 19	50.000.000	50.000.000.000	50.472.505.000	472.505.000
Reksa Dana Syariah PNM Sukuk Negara Syariah	10.079.840	10.066.968.367	10.290.754.934	223.786.567
Reksa Dana Syariah Terproteksi PNM Investa 12	10.000.000	10.000.000.000	10.033.411.000	33.411.000
Jumlah / Total	70.079.840	70.066.968.367	70.796.670.934	729.702.567

Piutang Ujrah / Ujrah Receivables

Pihak berelasi / Related parties	2018	2017
PT Bank Syariah Mandiri	2.378.709.175	1.502.557.649
PT Bank BRI Syariah	1.092.923.194	2.467.237.669
PT Permodalan Nasional Madani (Persero)	965.459.532	133.602.694
PT Bank BNI Syariah	944.972.345	248.246.603
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk - Unit Syariah / Sharia Unit	-	187.255.450
Kementerian Pertanian / Ministry of Agriculture	-	-

Piutang Ta'widh / Ta'widh Payables

Pihak berelasi / Related parties	2018	2017
PT Bank Syariah Mandiri	861.531.706	4.113.283.290
PT Bank BRI Syariah	769.419.616	2.670.908.949
PT Permodalan Nasional Madani (Persero)	65.331.000	49.820.550
PT Bank BNI Syariah	30.891.956	41.666.667

Utang Penjaminan Ulang (Berdasarkan reasuradur) / Re-guarantee Payables (based on reinsurance)

Pihak berelasi / Related parties	2018	2017
PT Asrinda Arthasangga	6.382.160.153	-
PT Reasuransi Nasional Indonesia - Unit Syariah / Sharia Unit	4.496.487.559	1.097.636.284
PT Asuransi Kredit Indonesia (Persero)	810.012.290	3.515.421.315
PT Asuransi Jiwa Bringin Jiwa Sejahtera	164.308.340	-
PT Asuransi Ekspor Indonesia (Persero)	20.115.000	20.115.000
PT Reasuransi Syariah Indonesia	9.977.593	1.700.752.703

Pendapatan beban dan Beban / Revenue and Expenses

Pendapatan / Revenue	2018	2017
Pendapatan Kafalah / Kafalah Income		
PT Bank Syariah Mandiri	77.302.441.017	74.450.989.940
PT Bank BRI Syariah	39.735.564.723	35.029.383.978
PT Bank BNI Syariah	23.809.278.635	21.128.091.513
PT Permodalan Nasional Madani (Persero)	35.217.466.180	13.263.530.076
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Unit Syariah / Sharia Unit	218.799.623	303.324.030
Pendapatan Kafalah Lain / Other Kafalah Income		
PT Bank Syariah Mandiri	64.860.000	61.450.000
PT Bank BNI Syariah	24.880.020	29.530.040
PT Bank BRI Syariah	3.962.932.291	15.596.000
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Unit Syariah / Sharia Unit	640.000	560.000
Jumlah / Total	4.053.312.311	107.136.040

Rincian pihak-pihak berelasi sebagai berikut / Details of related parties are as follows:

Beban / Expenses	2018	2017
Beban ta'widh / Ta'widh Expenses		
PT Bank Syariah Mandiri	57.085.359.351	50.796.784.638
PT Bank BRI Syariah	35.158.887.417	20.803.121.757
PT Bank BNI Syariah	4.788.127.082	5.772.677.028
PT Permodalan Nasional Madani (Persero)	8.665.565.364	4.519.943.203
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk - Unit Syariah / Sharia Unit	-	5.035.022
Jumlah / Total	105.697.939.214	81.897.561.648
Beban penjaminan ulang / Re-guarantee Expenses		
PT Asuransi Kredit Indonesia (Persero)	17.257.061.711	8.201.229.468
PT Reasuransi Nasional Indonesia - Unit Syariah / Sharia Unit	17.380.045.597	6.285.417.641
Jumlah / Total	34.637.107.308	14.486.647.109

KEBIJAKAN DIVIDEN

Pembagian dividen ditetapkan dari laba bersih yang diperoleh oleh Perseroan dan diberikan kepada para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan. Pada tahun 2018 dan 2017, sesuai dengan keputusan RUPS, Perseroan tidak membayarkan dividen kepada pemegang saham dan seluruh Laba dialokasikan sebagai cadangan umum.

PERUBAHAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERPENGARUH SIGNIFIKAN TERHADAP PERUSAHAAN

Sepanjang tahun 2018, tidak ada perubahan peraturan perundang-undangan yang berpengaruh signifikan terhadap Perseroan.

IKATAN YANG MATERIAL UNTUK INVESTASI BARANG MODAL

Pada 2018, Perseroan tidak melakukan investasi barang modal.

INVESTASI BARANG MODAL YANG DIREALISASIKAN PADA TAHUN BUKU

Karena Perseroan tidak melakukan investasi barang modal, informasi mengenai investasi barang modal (*capital expenditure*) yang direalisasikan Perseroan pada tahun 2018 tidak dapat disajikan dalam laporan tahunan ini.

DIVIDEND POLICY

Dividend payment is calculated from net income obtained by the Company and is for shareholders whose names are recorded in the Register of Shareholders of the Company. In 2018 and 2017, the Company did not pay dividends. In 2018, in accordance with the resolution of the GMS, the Company did not pay dividends to shareholders and all Profits were allocated as general reserves.

CHANGES IN LAWS AND REGULATIONS THAT SIGNIFICANTLY AFFECT THE COMPANY

Throughout 2018, there were no changes in laws and regulations that significantly affected the Company.

MATERIAL COMMITMENTS FOR CAPITAL EXPENDITURE

In 2018, the Company did not invest in capital goods

CAPITAL EXPENDITURE REALIZED FOR THE YEAR

Because the Company does not invest in capital goods, information regarding capital expenditure investments realized by the Company in 2018 cannot be presented in this annual report.



INFORMASI DAN FAKTA MATERIAL YANG TERJADI SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN

Perseroan tidak mencatatkan informasi dan fakta material yang berpengaruh signifikan setelah tanggal laporan akuntan pada periode tahun buku 2018. Beberapa kejadian penting yang terjadi setelah tanggal laporan di antaranya:

1. Perubahan komposisi Direksi dengan diangkatnya Bapak Supardi Najamuddin sebagai Direktur Pemasaran Perseroan.

PERBANDINGAN ANTARA TARGET, REALISASI TAHUN 2018 DAN PROYEKSI 2019

Dalam penyusunan RKAP 2018, Perseroan menggunakan asumsi-asumsi berdasarkan arahan pemegang saham. Dasar penyusunan RKAP Perseroan tahun buku 2018 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Dasar Perseroan dan berpedoman kepada Surat Keputusan Menteri BUMN No. Kep-101/MBU/2002 tanggal 4 Juni 2002 tentang Penyusunan RKAP BUMN serta Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. KEP-100/MBU/2002 tanggal 4 Juni 2002 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Badan Usaha Milik Negara dan Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No. PER-10/MBU/2014 tanggal 25 Juli 2014 tentang Indikator Penilaian Tingkat Kesehatan Badan Usaha Milik Negara Jasa Keuangan Bidang Usaha Perasuransian dan Jasa Penjaminan.

Perbandingan antara realisasi tahun 2018 dengan anggaran tahun 2018 dan realisasi tahun 2017 dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. **Pendapatan Kafalah**
Realisasi pendapatan *kafalah* tahun 2018 sebesar Rp156.031 juta atau tercapai 101,08% dari RKAP yang telah ditetapkan sebesar Rp154.366 juta dan mengalami peningkatan sebesar 27,59% jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2017 sebesar Rp122.289 juta.
- b. **Beban Kafalah**
Realisasi beban *kafalah* tahun 2018 sebesar Rp75.099 juta atau tercapai 91,42% dari RKAP yang telah ditetapkan sebesar Rp82.147 juta dan mengalami penurunan sebesar 6,82% jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2017 sebesar Rp80.599 juta.
- c. **Hasil Investasi**
Realisasi hasil investasi tahun 2018 sebesar Rp12.655 juta atau tercapai 60,07% dari RKAP yang telah ditetapkan sebesar Rp21.068 juta dan mengalami penurunan sebesar 25,41% jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2017 sebesar Rp16.965 juta.

SUBSEQUENT EVENT

The Company did not record material information and facts that had a significant effect after the date of the accountant's report in fiscal year 2018. Some important events that occurred after the reporting date include:

1. Changes in the composition of the Board of Directors with the appointment of Mr. Supardi Najamuddin as the Company's Marketing Director.

COMPARISON BETWEEN TARGETS, REALIZATION IN 2018, AND PROJECTIONS FOR 2019

In preparing RKAP 2018, the Company uses assumptions based on the direction of shareholders. The basis for the preparation of the Company's RKAP 2018 is carried out in accordance with the provisions in the Company's Basis and refers to the Decree of the Minister of SOE No. Kep-101/MBU/2002 dated June 4, 2002 concerning the Preparation of RKAP of SOE and Decree of the Minister of State-Owned Enterprises No. KEP-100/MBU/2002 dated June 4, 2002 concerning Assessment of the Health Level of State-Owned Enterprises and Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises No. PER-10/MBU/2014 dated July 25, 2014 concerning Indicators of Health Level of State-Owned Enterprises of Financial Services in the Field of Insurance Business and Guarantee Services.

Comparison between the realization of 2018 and budget 2018 and realization in 2017 can be summarized as follows:

- a. **Kafalah Revenue**
Realization of kafalah revenue in 2018 amounted to Rp156,031 million or 101.08% of the RKAP that had been set at Rp154,366 million and an increase of 27.59% compared to the realization in 2017 of Rp122,289 million.
- b. **Kafalah expenses**
Realization of kafalah expenses in year 2018 amounted to Rp75,099 million or 91.42% of the RKAP of Rp82,147 million and a decrease of 6.82% compared to the realization in 2017 of Rp80,599 million.
- c. **Investment Income**
Realization of investment income in 2018 amounted to Rp12,655 million or 60.07% of the RKAP amounting to Rp21,068 million and a decrease of 25.41% compared to the realization in 2017 of Rp16,965 million.

d. **Beban Usaha**

Realisasi beban usaha tahun 2018 sebesar Rp66.609 juta atau tercapai 94,64% dari RKAP yang telah ditetapkan sebesar Rp70.385 juta dan mengalami peningkatan sebesar 26,58% jika dibandingkan dengan realisasi 2017 sebesar Rp52.624 juta.

e. **Laba Setelah Pajak**

Laba setelah pajak tahun 2018 sebesar Rp14.085 juta atau 88,74% dari RKAP sebesar Rp15.872 juta dan mengalami kenaikan sebesar 126,27% jika dibandingkan dengan laba bersih setelah pajak tahun 2017 sebesar Rp6.225 juta.

d. **Operating expenses**

The realization of operating expenses in 2018 amounting to Rp66,609 million or 94.64% of the RKAP which was set at Rp70,385 million and an increase of 26.58% compared to realization in 2017 of Rp52,624 million.

e. **Profit after Tax**

Profit after tax in 2018 amounted to Rp14,085 million or 88.74% of the RKAP of Rp15,882 million and an increase of 126.27% compared to net profit after tax in 2017 of Rp6,225 million.

Uraian / Description	Dalam Jutaan Rupiah / In Million Rp			Dalam Persentase (%) / In Percentage (%)	
	Realisasi / Realization 2017	RKAP 2018	Realisasi / Realization 2018	Pencapaian / Achievement	Pertumbuhan / Growth
Total Pendapatan / Total Income	139,254	175,434	168,686	96,15	21,14
Jumlah Beban / Total Expenses	132,471	152,832	145,957	95,50	10,18
Laba Sebelum Zakat / Profit Before Zakah	6,783	22,602	22,729	100,56	235,09
Zakat / Zakah	170	642	568	88,47	234,12
Laba Sebelum Pajak / Profit Before Tax	6,613	21,960	22,161	100,92	235,11
Beban Pajak / Tax Expenses	388	6,088	8,076	132,65	1.981,44
Laba Setelah Pajak / Profit After Tax	6,225	15,872	14,085	88,74	126,27

Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP)

Secara keseluruhan, Rencana Kerja Anggaran Perseroan tahun 2018 telah dilaksanakan secara maksimal dengan perolehan laba komprehensif sebesar Rp14.895 juta dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Realisasi pendapatan kafalah tahun 2018 sebesar Rp156.031 juta atau tercapai 101,08% dari RKAP yang telah ditetapkan sebesar Rp154.366 juta.
- 2) Realisasi beban kafalah tahun 2018 sebesar Rp75.099 juta atau tercapai 91,42% dari RKAP yang telah ditetapkan sebesar Rp82.147 juta.
- 3) Penerimaan ujah kafalah bruto tahun 2018 sebesar Rp223.485 juta, atau tercapai 96,0% dari anggaran tahun 2018. Sedangkan Pendapatan kafalah bersih sebesar Rp80.931 juta, atau tercapai 112,1% dari anggarannya.
- 4) Pendapatan investasi tahun 2018 mencapai Rp12.655 juta yang berasal dari bagi hasil deposito di beberapa bank syariah. Hasil investasi ini tercapai 60,06% dari anggarannya sebesar Rp21.068 juta. Pada tahun 2018 investasi Perseroan dalam bentuk deposito dan reksadana sejumlah Rp349.848 juta.
- 5) Realisasi beban usaha pada tahun 2018 sebesar Rp66.609 juta, atau 94,63% dari anggarannya sebesar Rp70.385 juta. Beban Usaha tersebut terdiri dari biaya pemasaran sebesar Rp6.804 juta, beban umum sebesar Rp41.733 juta, beban administrasi Rp15.529 juta dan beban penyusutan dan amortisasi sebesar Rp2.543 juta.

Implementation of the Company's Work Plan and Budget

In overall, the Corporate Work Plan and Budget (RKAP) in 2018 has been applied optimally with the comprehensive profit amounting to IDR14,895 million with details as follows:

- 1) Realization of kafalah income in 2018 amounting to IDR156,031 million or accounted for 101.08% of the RKAP established, which was IDR154,366 million.
- 2) Realization of kafalah expenses in 2018 amounting to IDR75,099 million or accounted for 91.42% of the RKAP established, which was IDR82,147 million.
- 3) Gross ujah kafalah income in 2018 was IDR223,485 million, or accounted for 96.0% of the budget in 2018. The net kafalah income was IDR80,931 million, or accounted for 112,1% of the budget.
- 4) The investment income in 2018 reached IDR12,655 million, originating from profit sharing time deposits in several Sharia banks. The investment result accounted for 60.06% of the budget amounting to IDR21,068 million. In 2018, the Company's investment in the form of deposits and mutual fund amounted to IDR349,848 million.
- 5) Realization of operating expenses in 2018 was IDR66,609 million, or 94.63% of the budget amounting to IDR70,385 million. The operating expenses consisted of marketing fee of IDR6,804 million, general expenses amounting to IDR41,733 million, administrative expenses of IDR15,529 million, and depreciation and amortization expenses of IDR2,543 million.

- 6) Laba bersih setelah pajak & zakat sebesar Rp14.805 juta, atau 88,74% dari anggarannya sebesar Rp15.872 juta. Dengan pencapaian laba tersebut maka perusahaan mencatat ROA sebesar 5,1% dan ROE sebesar 4,9%.

PROGRAM KEPEMILIKAN SAHAM OLEH KARYAWAN DAN/ATAU MANAJEMEN

Perseroan merupakan anak BUMN yang kepemilikan sepenuhnya dipegang oleh negara, oleh sebab itu Perseroan tidak memiliki Program kepemilikan saham oleh karyawan dan/atau manajemen.

TINGKAT KESEHATAN PERUSAHAAN

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara BUMN Nomer No. PER-10/MBU/2014 tanggal 25 Juli 2014, mengenai Indikator Penilaian Tingkat Kesehatan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), pada tahun 2018, Perseroan berhasil mencatat nilai skor 78,50 poin dengan predikat tingkat (A) yang dikategorikan "SEHAT". Sementara pada tahun 2017, Perseroan mencatatkan nilai skor 76,00 dengan predikat tingkat "A" (Sehat). Total skor pada tahun 2018 lebih rendah dari RKAP 2018, yaitu sebesar 85,50 poin dan mengalami peningkatan sebesar 2,50 poin apabila dibandingkan dengan realisasi skor tahun 2017 sebesar 76,00.

Tabel Tingkat Kesehatan Perusahaan

Indikator/ Indicator	Bobot/ Quality	RKAP/Corporate Business Plan 2018		Per 31 Desember/ December 2018		Per 31 Desember/ December 2017	
		Nilai/ Value	Skor/ Score	Nilai/ Value	Skor/ Score	Nilai/ Value	Skor/ Score
ASPEK KEUANGAN / FINANCIAL ASPECT							
1. Rentabilitas / Profitability							
1.1. ROA	5,00	5,18%	2,00	5,59%	2,00	2,00	2,00%
1.2. ROE	5,00	4,82%	2,00	4,43%	2,00	2,00	2,00
2. Solvabilitas / Solvency (%)	15,00	381,59%	15,00	530,05%	15,00	485%	15,00
3. Likuiditas / Liquidity (%)	10,00	1041,93%	10,00	1212,56%	10,00	200%	10,00
Sub Total	35,00		29,00		29,00		29,00
ASPEK OPERASIONAL / OPERATIONAL ASPECT							
1. Yield on Investment (YOI)	10,00	5,67%	10,00	3,78%	3,00	5,00%	8,00
2. BOPO (%)	7,50	-0,37%	7,50	-27,02%	7,50	6,00%	7,50
3. Pertumbuhan premi/iuran/IJP / Premium Growth (%)	7,50	10,81%	4,50	26,76%	7,50	13,00%	4,50
4. Gearing Rasio (kali) / Gearing Ratio (Times)	10,00	32	10,00	32	10,00	30	8,00
5. Rasio Efektivitas Operasi / Operational Effectiveness Ratio (%)	7,50	6,82%	2,00	6,30%	2,00	3,00%	2,00
6. Rasio Efektivitas Subrogasi / Subrogation Effectiveness Ratio (%)	7,50	32,34%	7,50	13,76%	4,50	10,00%	2,00
Sub Total	50,00		41,50		34,50		32,00
ASPEK ADMINISTRATIF / ADMINISTRATIVE ASPECT							
1. Laporan perhitungan tahunan / Annual Calculation Report	5,00	Tepat Waktu / On Time	5,00	Tepat Waktu / On Time	5,00	Tepat Waktu / On Time	5,00
2. Rancangan RKAP / Corporate Business Plan	5,00	Tepat Waktu / On Time	5,00	Tepat Waktu / On Time	5,00	Tepat Waktu / On Time	5,00
3. Laporan Periodik (bulanan) / Periodic (Monthly) Report	5,00	Tepat Waktu / On Time	5,00	Tepat Waktu / On Time	5,00	Tepat Waktu / On Time	5,00
Sub Total	15,00		15,00		15,00		15,00
Total	100,00		85,50		78,50		76,00
Predikat Penilaian / Evaluation Predicate			AA		A		A

- 6) Net profit after tax & zakat amounted to IDR14,805 million, or 88.74% of the budget amounting to IDR15,872 million. With the profit achievement, the Company recorded ROA and ROE of 5.1% and 4.9%, respectively.

SHARE OWNERSHIP PROGRAM BY EMPLOYEES AND/OR MANAGEMENT

The Company is a subsidiary of a SOE which fully owned by the state, therefore the Company does not have a share ownership program by employees and/or management.

COMPANY HEALTH LEVEL

Based on the Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises No.PER-10 / MBU / 2014 dated July 25, 2014, concerning the Health Level Assessment Indicator of SOEs, in 2018, the Company managed to record a score of 78.50 points with a predicate level (A) which is categorized as "HEALTHY". While in 2017, the Company recorded a score of 76.00 with the predicate level of "A" (Healthy). The total score in 2018 is lower than the 2018 RKAP, which is 85.50 points, and increased by 2.50 points compared to the realization of the 2017 score of 76.00.

KEBIJAKAN AKUNTANSI

Laporan keuangan konsolidasian telah disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia yang mencakup Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia.

Standar baru, amendemen, revisi, penyesuaian dan interpretasi yang telah diterbitkan, dan yang akan berlaku efektif untuk tahun buku yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2018 namun tidak berdampak material terhadap laporan keuangan adalah sebagai berikut:

- Amendemen PSAK 2, "Laporan Arus Kas – Prakarsa Pengungkapan";
- Amendemen PSAK 13, "Properti Investasi – Pengalihan Properti Investasi";
- PSAK 15 (Penyesuaian), "Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama";
- Amendemen PSAK 16, "Aset Tetap – Agrikultur: Tanaman Produktif";
- Amendemen PSAK 46, "Pajak Penghasilan – Pengakuan Aset Pajak Tangguhan untuk Rugi yang Belum Direalisasi";
- Amendemen PSAK 53, "Pembayaran Berbasis Saham – Klasifikasi dan Pengukuran Transaksi Pembayaran Berbasis Saham";
- PSAK 67 (Penyesuaian), "Pengungkapan Kepentingan dalam Entitas Lain";
- PSAK 69, "Agrikultur"; dan
- PSAK 111, "Akuntansi Wa'd".

Pada tanggal penerbitan laporan tahunan ini, manajemen sedang mempelajari dampak yang mungkin timbul dari penerapan standar dan interpretasi standar baru dan amendemen standar berikut yang telah diterbitkan, namun belum berlaku efektif untuk tahun buku yang dimulai 1 Januari 2018 adalah sebagai berikut:

- ISAK 33, "Transaksi Valuta Asing dan Imbalan Dimuka";
- Amendemen PSAK 15, "Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama: Kepentingan Jangka Panjang pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama";
- Amendemen PSAK 62, "Kontrak Asuransi";
- PSAK 71, "Instrumen Keuangan";
- Amendemen PSAK 71, "Instrumen Keuangan: Fitur Percepatan Pelunasan dengan Kompensasi Negatif";
- PSAK 72, "Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan"; dan
- PSAK 73, "Sewa".

ACCOUNTING POLICY

The consolidated financial statements of the Company have been prepared in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards which include Statement of Financial Accounting Standards (STATEMENT OF FINANCIAL ACCOUNTING STANDARDS) and Interpretation of Financial Accounting Standards issued by the Indonesian Financial Accounting Standards Board.

New standards, amendments, improvements and interpretations issued and effective for the financial year at or after 1 January 2018 which do not have material impact on the financial statement are as follows:

- Amendments to PSAK 2, "Statement of Cash Flows – Disclosure Initiative";
- Amendments to PSAK 13, "Investment Property – Transfers of Investment Property";
- PSAK 15 (Improvements), "Investment in Associates and Joint Ventures";
- Amendments to PSAK 16, "Property, Plant and Equipment – Agriculture: Bearer Plants";
- Amendments to PSAK 46, "Income Taxes – Recognition of Deferred Tax Assets for Unrealized Losses";
- Amendments to PSAK 53, "Share-based Payment – Classification and Measurement of Share-based Payment Transactions";
- PSAK 67 (Improvements), "Disclosures of Interest in Other Entities";
- PSAK 69, "Agriculture"; and
- PSAK 111, "Wa'd Accounting".

As at the authorization date of this annual report, the management is still evaluating the potential impact of the new standards and interpretation and amendments to standards which have been issued but are not yet effective for the financial year beginning on 1 January 2018 as follows:

- ISAK 33, "Foreign Currency Transactions and Advance Consideration";
- Amendments to PSAK 15, "Investments in Associate and Joint Ventures: Long Term Interest in Associate and Joint Ventures";
- Amendments to PSAK 62, "Insurance Contracts";
- PSAK 71, "Financial Instruments";
- Amendments to PSAK 71, "Financial Instruments: Prepayment Features with Negative Compensation";
- PSAK 72, "Revenue from Contracts with Customers"; and
- PSAK 73, "Leases".

INFORMASI KELANGSUNGAN USAHA

Pembiayaan syariah baik dari perbankan syariah maupun IKNB syariah terus bertumbuh. Hal ini menjadi peluang bagi Askrindo Syariah untuk dapat memperbesar posisi *market*-nya. Berdasarkan data OJK dalam statistik perbankan syariah dan statistik IKNB syariah, dapat ditentukan proyeksi pembiayaan yang dikucurkan sebagai berikut:

Proyeksi Potensi Penjaminan Pembiayaan Perbankan Syariah & IKNB Syariah Tahun 2019 / Projection of Financing Guarantee Potential of Sharia Banking & Sharia IKNB in 2019

Dalam miliar Rp / In billion Rp

Lembaga / Institution	Pertumbuhan Pembiayaan 2019 / Financing Growth 2019	Run Off 5%	Pembiayaan Baru / New Financing
Perbankan Syariah / Sharia Banking	36.531	16.464	52.995
IKNB Syariah / Sharia IKNB	1.365	1.400	(35)
Total Pencairan Pembiayaan / Total Financing Disbursement	37.896	17.864	52.960
Potensi Penjaminan (60% dari pencairan pembiayaan) / Guarantee Potential (60% of financing disbursement)	31.776		

Pada tahun 2019 diproyeksikan pembiayaan Perbankan Syariah (BUS, UUS dan BPRS) serta IKNB Syariah yang membutuhkan penjaminan ialah sebesar Rp31.776 milyar. Hal tersebut merupakan potensi bisnis bagi Askrindo Syariah.

Namun, berdasarkan kondisi perusahaan saat ini, sulit untuk merealisasikan hal tersebut. Jumlah modal sendiri bersih pada Desember tahun 2018 ialah sebesar Rp325 Milyar. Dengan kafalah produktif terjamin sebesar Rp6.122 Milyar, maka Askrindo Syariah dapat menyerap potensi pembiayaan sebesar 24,3% pada pembiayaan produktif. Kafalah terjamin (agregat) sebesar Rp10.411 Milyar, maka Askrindo Syariah dapat menyerap potensi pembiayaan sebesar 41,30%.

BUSINESS CONTINUITY INFORMATION

Sharia financing both from Sharia banking and sharia non-bank financial industry continue to grow. This is an opportunity for Askrindo Syariah to be able to enlarge its market position. Based on OJK data in sharia banking statistics and Sharia non-Bank Financial Industry statistics, the following financing projections can be determined:

In 2019, Sharia Banking financing (BUS, UUS and BPRS) and Sharia IKNB that need guarantees are projected to amount to Rp31,776 billion. It is potential for Askrindo Syariah business.

However, based on the company's current condition, it is difficult to realize this. The amount of net own capital in December 2018 was Rp.325 billion. With a guaranteed productive kafalah of Rp6,122 billion, Askrindo Syariah can absorb the financing potential of 24.3% in productive financing. Guaranteed kafalah (aggregate) of Rp10,411 billion, then Askrindo Syariah can absorb the financing potential of 41.30%.

Share Proyeksi Pangsa Pasar Tahun 2018 / Market Share Projection in 2018

Komponen / Component	Produktif / Productive	Agregat / Aggregate
Kafalah terjamin / Guaranteed kafalah	6.122	10.411
Modal bersih sendiri / Net equity	325	325
Gearing ratio / Gearing ratio	18,8	32,0
Potensi / Potential	25.207	25.207
Share terhadap pembiayaan / Share in the financing	24,29%	41,30%

Berdasarkan hal tersebut di atas, terlihat bahwa kapasitas penjaminan Askrindo Syariah pada Desember 2018 telah mencapai batas maksimal. Dengan asumsi gearing ratio mencapai kapasitas maksimalnya, yaitu 20 untuk produktif dan 40 untuk agregat, market share di 2019 akan menurun, berdasarkan perhitungan sebagaimana berikut:

Based on the above, it can be seen that the capacity of Askrindo Syariah's guarantee in December 2018 has reached its maximum limit. Assuming the gearing ratio reaches its maximum capacity, which is 20 for productive and 40 for aggregate, market share in 2019 will decrease, based on calculations as follows:

Share Proyeksi Pangsa Pasar Tahun 2019 / Market Share Projection in 2019

Komponen / Component	Produktif / Productive	Agregat / Aggregate
Kafalah terjamin / Guaranteed kafalah	8.900	19.100
Modal bersih sendiri / Net equity	510	510
Gearing ratio / Gearing ratio	19	40
Potensi / Potential	31.776	31.776
Share terhadap pembiayaan / Share in the financing	28,0%	60,1%

Share terhadap pembiayaan produktif akan meningkat tahun 2019 menjadi 28,0% dari sebelumnya 24,3% dengan asumsi menggunakan GR sebesar 19 kali gearing ratio produktif sebesar 19 kali. Sedangkan pada gearing ratio agregat maksimal 40 kali, maka share terhadap pembiayaan akan meningkat di 2019 dari 41,3% menjadi 60,1%. Oleh sebab itu, untuk meningkatkan sekaligus mempertahankan pangsa pasar maka Askrindo Syariah membutuhkan penambahan modal disetor pada tahun 2019. Ilustrasi secara ringkas tersaji pada tabel dibawah ini:

Meningkatkan Kapasitas Penjaminan Askrindo Syariah

Dalam rangka meningkatkan *market share* Askrindo Syariah tahun 2019, Askrindo Syariah membutuhkan tambahan modal sebesar Rp150 Miliar. Dengan ditambahnya modal sebesar Rp150 Miliar pada tahun 2019, maka diharapkan *market share* tahun 2019 dapat meningkat menjadi 28,0% dengan kapasitas produktif dan 60,1% secara agregat.

Gambaran mengenai *trend* kafalah terjamin yang telah terealisasi sejak tahun 2013 s.d 2018 serta perbandingan kafalah terjamin Askrindo Syariah dibandingkan dengan ekspansi pembiayaan Perbankan Syariah (Total BUS, UUS dan BPRS) tersaji melalui tabel di bawah ini:

Share of productive financing will increase in 2019 to 28.0% from the previous 24.3% with the assumption of using a GR of 19 times productive gearing ratio of 19 times. While the aggregate gearing ratio is a maximum of 40 times, the share of financing will increase in 2019 from 41.3% to 60.1%. Therefore, to increase and maintain market share, Askrindo Syariah requires additional paid-up capital in 2019. A brief illustration is presented in the table below:

Increasing Askrindo Syariah's Guarantee Capacity

In order to increase Askrindo Syariah's market share in 2019, the Company needs an additional capital of Rp150 billion. With the addition of capital of Rp150 billion in 2019, it is expected that market share in 2019 can increase to 28.0% with productive capacity and 60.1% in the aggregate.

An overview of guaranteed kafalah trends that have been realized since 2013 to 2018 as well as comparison of Askrindo Syariah guaranteed kafalah compared to the expansion of Sharia Banking financing (Total SCB, SBU and SRB) presented through the table below:

Trend Pencapaian Kafalah 2013-2018 / Kafalah Achievement Trend in 2013-2018

Kafalah Penjaminan / Kafalah Guarantee	Periode / Period					
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Produktif / Productive	722	1.052	2.714	3.116	5.274	6.120
Agregat / Aggregate	938	3.198	5.444	8.236	9.166	10.426

Perbandingan Kafalah Perusahaan terhadap Ekspansi Pembiayaan / Comparison between Company Kafalah and Financing Expansion

Ekspansi Kafalah / Kafalah Expansion	Periode / Period						Proyeksi / Projection 2019
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Kafalah Askrindo Syariah	938	3.198	5.444	8.236	9.166	10.426	19.100
Perbankan Syariah (Total Kafalah) / Sharia Banking (Total Kafalah)	37.494	15.782	14.427	35.908	38.789	42.011	52.960
Perbandingan / Comparison	2,5%	20,3%	37,7%	22,9%	23,6%	24,8%	36,1%



Penambahan penyertaan modal akan berdampak pada pertumbuhan share Penjaminan Askrindo Syariah terhadap perbankan syariah. Hal itu terbukti pada tahun 2016 s.d 2018 pertumbuhan kapasitas penjaminan Askrindo Syariah belum mampu mengimbangi pertumbuhan outstanding pembiayaan syariah. Oleh karena itu untuk mencapai pertumbuhan yang agresif, penambahan penyertaan modal sangat dibutuhkan.

The addition of capital investment will have an impact on the growth of Askrindo Syariah Guarantee share on Sharia banking. This was evident in 2016 to 2018 the growth of the guarantee capacity of Askrindo Syariah has not been able to offset the outstanding growth in Sharia financing. Therefore, to achieve aggressive growth, additional equity participation is needed.

Tata Kelola Perusahaan

Good Corporate Governance



Askrindo Syariah senantiasa memonitor perkembangan regulasi yang ada lalu menerapkannya di lingkungan Perseroan sehingga kepatuhan Perseroan meningkat serta selaras dengan perkembangan terkini.

Askrindo Syariah continues to monitor the development of existing regulations and then applies them in the Company's environment so that the Company's compliance increases and is in line with the latest developments.



Tata Kelola Perusahaan

Good Corporate Governance

Perseroan senantiasa mengelola usaha berlandaskan nilai-nilai GCG guna mendorong pertumbuhan yang seirama dengan perkembangan budaya korporat yang positif.

The Company continues to manage business based on GCG values to spur growth in line with the development of positive corporate culture.



Perseroan senantiasa berkomitmen tinggi untuk menerapkan praktik terbaik Tata Kelola Perusahaan (*Good Corporate Governance/GCG*), terutama dalam menjalankan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, kemandirian, kewajaran, dan kesetaraan di seluruh level organisasi.

KOMITMEN PENEGAKAN GCG

Perseroan yakin bahwa penerapan GCG secara optimal akan melahirkan budaya dan etika kerja yang baik, sehingga seluruh individu Perseroan dapat memberikan kinerja lebih positif, membangun, serta bermanfaat bagi seluruh pemangku kepentingan. Sebagai wujud komitmen Perseroan terhadap implementasi GCG, Perseroan pada tahun 2018 semakin menguatkan struktur organisasi dan pengawasannya, meliputi unit kerja internal audit, manajemen risiko, tim ISO, tim KPKU, tim GCG, perangkat SOP dan peraturan-peraturan lain yang terkait, serta penyusunan program kerja di Perseroan. Sebagai hasilnya, skor asesmen GCG pada tahun 2018 ini tercatat cukup memuaskan yakni sebesar 73,30% atau mencapai kualifikasi "Cukup Baik". Skor tersebut meningkat dibanding tahun 2017 sebesar 72,74%.

The company always maintains its high commitment to the implementation of good corporate governance best practices, particularly in upholding the principles of transparency, accountability, responsibility, independence, fairness and equality at all levels of the organization.

GCG ENFORCEMENT COMMITMENTS

The Company believes that optimally implementing GCG will give birth to the excellent corporate culture and work ethics, encouraging every individual in the Company to deliver more positive and constructive contribution to the Company's performance and to be of benefit to all stakeholders. To embody the Company's commitment towards the implementation of GCG, in 2018 we strengthened our organizational structure and its supervision, which include internal audit unit, risk management unit, ISO team, KPKU team, GCG team, SOP and other relevant regulations, as well as the Company's work program development. As the result, the Company's GCG score in 2018 was quite satisfactory, namely to 73.30% receiving a "Fairly Good" qualification. Such score was higher than that in 2017, which was 72.74%.

MEKANISME DAN STRUKTUR TATA KELOLA

Perseroan meyakini bahwa implementasi GCG yang melebihi dari sekedar kepatuhan terhadap standar dan peraturan perundang-undangan, mampu menciptakan kinerja yang berdaya saing tinggi dan berkelanjutan.

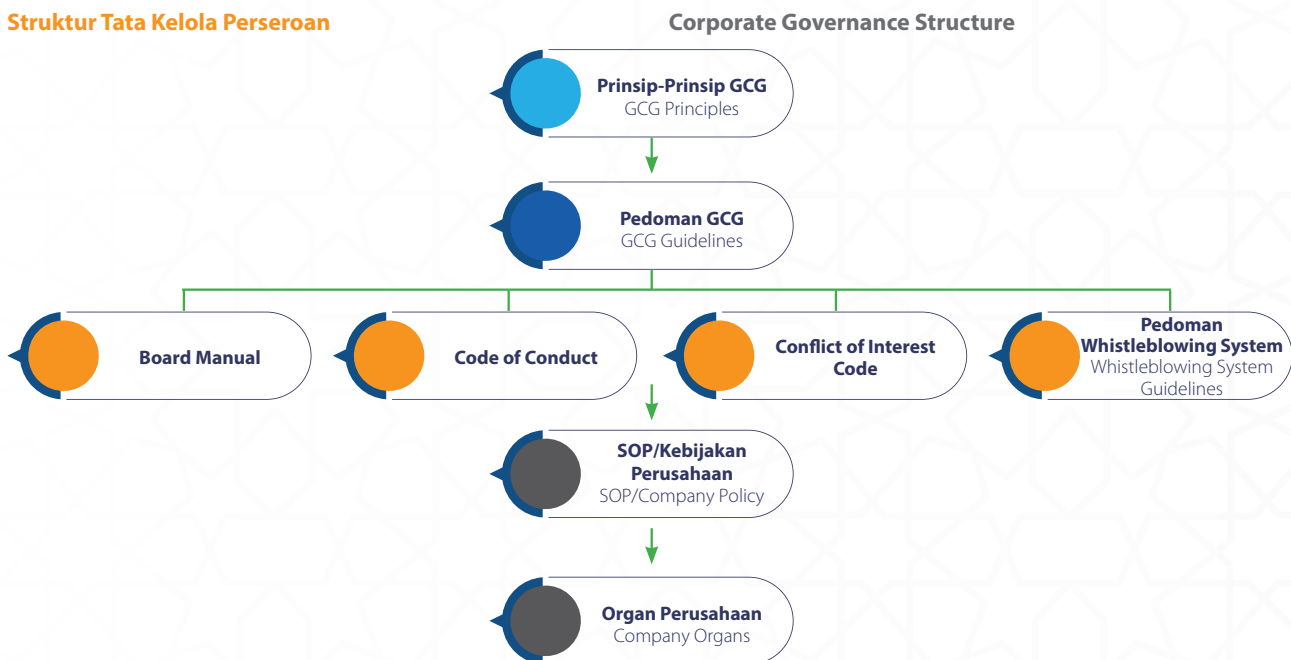
Tata Kelola Perseroan merujuk pada mekanisme yang harmonis sebagai realisasi dari Prinsip GCG, Struktur Kebijakan Perusahaan dan Organ Perusahaan. Dalam mekanisme tersebut, Prinsip GCG berkedudukan sebagai dasar bagi segala pemikiran, kebijakan dan tindakan yang dilaksanakan dalam Struktur Kebijakan Perusahaan yang dipraktikkan oleh Organ Perusahaan sebagai bagian dari Manajemen Perusahaan.

THE GOVERNANCE STRUCTURE AND MECHANISM

The Company believes that the implementation of GCG, which goes beyond compliance with standards and laws and regulations, is capable of creating highly competitive and sustainable performance.

Corporate Governance refers to a harmonious mechanism as a realization of GCG Principles, Company Policy Structure and Company Organs. In this mechanism, the GCG Principles are located as the basis for all thoughts, policies and actions carried out in the Corporate Policy Structure practiced by Company Organs as part of Company Management.

Struktur Tata Kelola Perseroan



Pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik atau *good corporate governance* (GCG) merupakan salah satu butir pernyataan Misi Perseroan. Oleh karena itu, telah menjadi komitmen bagi seluruh Insan Perseroan dari tingkat puncak hingga staf pelaksana untuk senantiasa mengupayakan implementasinya secara konsisten dan menyeluruh sesuai dengan *standard international best practices*.

Pada tahun 2018, Perseroan memasuki usia keenam sebagai perusahaan penjaminan syariah pertama di Indonesia. Pada tahun ini Perseroan kembali meningkatkan infrastruktur dan penerapan tata kelola Perseroan, diantaranya dengan menguatkan struktur organisasi dan pengawasannya

The implementation of good corporate governance (GCG) is one of the points stated in the Company's mission statement. Therefore, it has become the commitment of all Company Personnels, from top level to executive staff, to constantly strive to consistently and comprehensively apply it in accordance with international best practices.

The year 2018 marked the sixth year of the Company's journey as the first sharia guarantee company in Indonesia. In that year, the Company again improved its infrastructure and implementation of corporate governance, among others by strengthening its organizational structure and supervision including internal

mencakup unit kerja internal audit, manajemen risiko korporat, manajemen risiko transaksional, kepatuhan, Tim ISO, tim KPKU, tim GCG, perangkat SOP dan peraturan-peraturan lain yang terkait, serta penyusunan program kerja di Perseroan.

Terkait komitmen pelaksanaan GCG, Direksi telah menetapkan Pedoman *Good Corporate Governance* (GCG) dan Pedoman bagi Dewan Komisaris dan Direksi (*board manual*) sebagai pedoman Perseroan melalui Surat Keputusan nomor 067/Kep-Dir/XII/2015 dan Surat Keputusan nomor 055/KEP-DIR/XII/2015 tentang Pedoman-pedoman *Good Corporate Governance* pada tanggal 23 Desember 2015.

Selain berdasarkan Pedoman tersebut diatas, penerapan GCG Perseroan juga merujuk antara lain pada ketentuan-ketentuan berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Penjaminan;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Lembaga Penjamin;
10. Anggaran Dasar Perusahaan berdasarkan Akta Notaris nomor 45, tanggal 29 November 2012 yang dibuat oleh Notaris Hadijah, SH dan telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-61610.AH.01 tahun 2012 tanggal 29 November 2012;
11. Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor: PER-01/MBU/2012 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara;

audit work units, corporate risk management, transactional risk management, compliance, the KPKU Team ISO team, GCG teams, SOPs and regulations other related regulations, as well as the preparation of work programs at the Company.

Regarding the commitment to GCG implementation, the Board of Directors has set guidelines for *Good Corporate Governance* (GCG) and manual boards as guidelines for the Company based on Decree number 067/Kep-Dir/XII/2015 and Decree number 069/KEP-DIR/XII/2015 regarding *Good Corporate Governance* Guidelines on December 23, 2015.

In addition to the aforementioned Guidelines, the application of GCG in the Company also refers to the following provisions:

1. Law of the Republic of Indonesia Number 1 of 2016 concerning Guarantees
2. Law of the Republic of Indonesia Number 14 of 2008 concerning Information Disclosure;
3. Law of the Republic of Indonesia Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions;
4. Law of the Republic of Indonesia Number 19 Year 2016 concerning Amendments to Law Number 11 Year 2008 concerning Information and Electronic Transactions;
5. Law of the Republic of Indonesia Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies;
6. Law of the Republic of Indonesia Number 19 of 2003 concerning State-Owned Enterprises (BUMN);
7. Law of the Republic of Indonesia Number 20 of 2001 concerning Amendment to Law of the Republic of Indonesia Number 31 of 1999 concerning Eradication of Corruption;
8. Law of the Republic of Indonesia Number 5 of 1999 concerning Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition;
9. Regulation of the President of the Republic of Indonesia Number 2 of 2008 concerning Guarantor Institutions;
10. The Company's Articles of Association, based on the Notarial Deed number 45, November 29 of 2012 made by Notary Hadijah, SH and ratified by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia Number: AHU-61610.AH.01 2012 dated November 29, 2012;
11. Regulation of the State Minister of SOE Number: PER- 01/MBU/2012 concerning Implementation of *Good Corporate Governance* in State-Owned Enterprises;

12. Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor: PER-09/MBU/2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor: PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara;
13. Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor: PER-03/MBU/2012 tentang Pedoman Pengangkatan Anggota Direksi dan Anak Perusahaan BUMN;
14. Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor: PER-07/MBU/2012 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas BUMN;
15. Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor: PER-12/MBU/2012 tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris/ Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara;
16. Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor: PER-15/MBU/2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor: PER-05/MBU/2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa BUMN;
17. POJK No. 1/POJK.05/2017 Tentang Perizinan Usaha & Kelembagaan Lembaga Penjamin;
18. POJK No. 2/POJK.05/2017 Tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Penjamin;
19. POJK No. 3/POJK.05/2017 Tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Lembaga Penjamin;
20. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7/ POJK.05/2014 tentang Pemeriksaan Lembaga Penjaminan;
21. POJK No. 27/POJK.05/2016 Tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Pada Perusahaan Perasuransian, Dana Pensiun, Perusahaan Pembiayaan, dan Perusahaan Penjaminan;
22. POJK No 10/POJK.05/2014 tanggal 27 Agustus 2014 tentang Penilaian Tingkat Risiko Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank ;
23. POJK No. 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit;
24. POJK No. 56/POJK.04/2015 Tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal;
25. Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 74/DSNMUI/ I/2009 Tentang Penjaminan Syariah.

Guna menjamin pelaksanaan GCG yang fokus dan terarah, Perseroan telah memiliki struktur GCG yang meliputi struktur organ dan kebijakan Perseroan, yaitu: Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, Direksi, Sekretaris Dewan Komisaris, Sekretaris Perusahaan, Satuan Pengawasan Intern dan Manajemen Risiko & Kepatuhan.

12. Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises Number: PER-09/MBU/2012 concerning Amendments to the Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises Number: PER-01/MBU/2011 concerning Implementation of Good Corporate Governance in State-Owned Enterprises;
13. Regulation of the State Minister of SOE Number: PER- 03/MBU/2012 concerning Guidelines for Appointment of Members of the Board of Directors and SOE Subsidiaries;
14. Regulation of the State Minister of SOE Number: PER- 07/MBU/2012 concerning Guidelines for Determining Income of the SOE's Board of Directors, Board of Commissioners and Supervisory Board;
15. Regulation of the State Minister of SOE Number: PER- 12/MBU/2012 concerning Supporting Organs of the Board of Commissioners/Supervisory Board of State- Owned Enterprises;
16. Regulation of the Minister of SOE Number: PER-15/MBU/2012 concerning Amendment to the Regulation of the Minister of SOE Number: PER-05/MBU/2008 concerning General Guidelines for the Implementation of Goods and Services Procurement FOR SOE;
17. FSA Regulation No. 1/POJK.05/2017 Concerning Business Licensing & Guarantor Institutions;
18. FSA Regulation No. 2/POJK.05/2017 concerning the Business Implementation of Guarantor Institution;
19. FSA Regulation No. 3/POJK.05/2017 concerning Good Corporate Governance for Guarantor Institutions;
20. FSA Regulation Number 7/POJK.05/2014 concerning Inspection of Guarantee Institutions;
21. FSA Regulation No. 27/POJK.05/2016 concerning Capability and Compliance Assessment for Main Parties in Insurance Companies, Pension Funds, Financing Companies, and Guarantee Companies;
22. FSA Regulation 10/POJK.05/2014 dated 27 August 2014 concerning Assessment of the Risk Level of Non-Bank Financial Services Institutions;
23. FSA Regulation No. 55/POJK.04/2015 concerning Establishment and Work Guidelines of the Audit Committee;
24. FSA Regulation No. 56/POJK.04/2015 concerning Establishment and Guidelines for Preparation of the Internal Audit Unit Charter;
25. Fatwa of the National Sharia Council Number: 74/ DSN-MUI/I/2009 Concerning Sharia Guarantee.

To guarantee the implementation of focused and directed GCG, the Company has a GCG structure that includes the organizational structure and policies of the Company, namely: General Meeting of Shareholders (GMS), Board of Commissioners, Sharia Supervisory Board, Board of Directors, Secretary of the Board of Commissioners, Corporate Secretary, Unit Internal Audit and Risk Management & Compliance.

IMPLEMENTASI PRINSIP-PRINSIP TATA KELOLA PERUSAHAAN

Perseroan menerapkan struktur dan tata kelola yang memperhatikan prinsip-prinsip GCG sesuai dengan ketentuan dan peraturan-peraturan yang berlaku serta best practice. Bagi Perseroan, implementasi GCG di lingkungan Perseroan merupakan tindak lanjut atas dasar-dasar hukum, salah satunya adalah Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-01/MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011 tentang Penerapan Tata Kelola yang Baik pada BUMN, yang menyebutkan bahwa "BUMN wajib melaksanakan operasional Perseroan dengan berpegang pada prinsip-prinsip GCG yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran."

Transparansi (*Transparency*)

Keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam pengungkapan dan penyediaan informasi yang relevan mengenai Lembaga Penjamin, yang mudah diakses oleh Pemangku Kepentingan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang penjaminan serta standar, prinsip, dan praktik penyelenggaraan usaha yang sehat.

Akuntabilitas (*Accountability*)

Kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ Lembaga Penjamin sehingga kinerja penyelenggaraan usaha Lembaga Penjamin dapat berjalan secara transparan, wajar, efektif, dan efisien.

Pertanggungjawaban (*Responsibility*)

Kesesuaian pengelolaan Lembaga Penjamin dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penjaminan dan nilai etika serta standar, prinsip, dan praktik penyelenggaraan usaha yang sehat.

Kemandirian (*Independency*)

Keadaan Lembaga Penjamin yang dikelola secara mandiri dan profesional serta bebas dari Benturan Kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penjaminan dan nilai etika serta standar, prinsip, dan praktik penyelenggaraan usaha yang sehat.

Kewajaran (*Fairness*)

Kesetaraan dan keseimbangan di dalam memenuhi hak-hak Pemangku Kepentingan yang timbul berdasarkan perjanjian, ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penjaminan, dan nilai etika serta standar, prinsip, dan praktik penyelenggaraan usaha yang sehat.

IMPLEMENTATION OF THE PRINCIPLES OF CORPORATE GOVERNANCE

The Company implements a structure and governance that takes into account GCG principles in accordance with applicable laws and regulations as well as best practices. For the Company, the implementation of GCG in the organization is a follow up of legal basis, one of which is the Minister of SOE Regulation No. SOE. PER-01/MBU/2011 dated August 1, 2011 concerning the Implementation of Good Governance in SOEs, which states that "SOEs are required to carry out the Company's operations by adhering to GCG principles, namely transparency, accountability, responsibility, independency, and fairness."

Transparency

Openness in the decision-making process as well as in the disclosure and provision of relevant information regarding the Guarantor Institution, which can be accessed by Stakeholders, in accordance with the laws and regulations in the field of guarantees as well as the standards, principles and practices of conducting a sound business.

Accountability

Clarity of functions and implementation of the guarantor institution's accountability, so that the performance of the Guarantor Institution's business operations can run transparently, fairly, effectively and efficiently.

Responsibility

Conformity of management of the Guarantor Institution with the provisions of laws and regulations in the field of guarantees and ethical values as well as the standards, principles and practices of conducting a sound business.

Independency

The state of the Guarantor Institution that is managed independently and professionally and is free from Conflict of Interest and not to be influenced nor under any pressure of any party that is not in accordance with the laws and regulations in the field of guarantee business and ethical value as well as standards, principles and practices of sound business operations.

Fairness

Equality and balance in fulfilling the Stakeholders' rights arising from the agreement, the provisions of laws and regulations in the field of guarantee business, and ethical values as well as standards, principles, and practices of conducting a sound business.

ASSESSMENT GCG TAHUN 2018

Dasar Pengukuran

Perseroan melaksanakan *self assessment* GCG berpedoman pada Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-01/MBU/2011 tanggal 01 Agustus 2011 tentang Penerapan Tata kelola Perusahaan Yang Baik. Untuk Anak Perusahaan BUMN terdapat pergeseran bobot pada nomor tertentu terkait dengan faktor yang tidak relevan, meskipun bobot per kategori tidak berubah. Selain itu, Perseroan juga menggunakan kriteria penilaian berdasarkan format ASEAN CG *Scorecard*, dengan prinsip OECD yang berstandar ASEAN.

Proses Assessment

Proses asesmen terhadap GCG Perseroan pada tahun 2018 dilaksanakan pada tanggal 7-8 Februari 2019. *Assessment* GCG Perseroan dilakukan oleh Tim evaluator asesmen GCG PT Asuransi Kredit Indonesia (Persero). Untuk mempercepat proses pengukuran, digunakan pendekatan komparasi dari hasil penilaian *assessment* tahun 2017 yang dilakukan oleh Tim *Assessment* GCG PT Askrindo sehingga bobot per parameter tidak berubah.

Kriteria Penilaian

Kriteria penilaian *assessment* yang dilakukan meliputi:

1. Komitmen penerapan tata kelola perusahaan yang baik;
2. Pemegang saham dan RUPS;
3. Dewan Komisaris;
4. Direksi;
5. Pengungkapan Informasi dan Transparansi; dan
6. Aspek lainnya.

Hasil Assessment

Berdasarkan *self assessment* oleh internal atas penerapan GCG yang telah dilakukan tahun 2018, secara keseluruhan Perseroan memperoleh nilai sebesar 73,30 atau mencapai kualifikasi "Cukup Baik". Skor tersebut meningkat dibandingkan tahun 2017 sebesar 72,74.

Pada tahun 2018, terjadi persentase peningkatan skor yang cukup signifikan dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu pada aspek pengujian "Pengungkapan Informasi & Transparansi" dari skor 5,45 pada 2017 menjadi 6,93 di 2018. Hal ini terutama dikarenakan Perseroan telah menyusun Laporan Tahunan 2017.

Pada aspek pengujian "Direksi", skor di 2018 mengalami penurunan menjadi 24,46 dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 25,49. Demikian juga dengan aspek "Komitmen

GCG ASSESSMENT IN 2018

Measurement Basics

The Company carries out a GCG self-assessment based on SOE Ministerial Regulation Number PER-01 / MBU / 2011 dated August 1, 2011 concerning the Implementation of Good Corporate Governance. For SOE Subsidiaries, there is a shift in the weight of certain numbers related to irrelevant factors, even though the weight per category does not change. In addition, the Company also uses assessment criteria based on the ASEAN CG *Scorecard* format, with OECD principles with ASEAN standards.

Assessment Process

The assessment process for the GCG of the Company in 2018 took place on 7-8 February 2019. The GCG assessment of the Company was carried out by the GCG Assessment Evaluator Team of PT Asuransi Kredit Indonesia (Persero). To speed up the measurement process, a comparative approach was used from the results of the 2017 assessment carried out by the GCG Assessment Team of PT Askrindo so that the weighting per parameter did not change.

Assessment criteria

The assessment criteria carried out include:

1. Commitment to the implementation of good corporate governance;
2. Shareholders and GMS;
3. Board of Commissioners;
4. Directors;
5. Information Disclosure and Transparency; and
6. Other aspects.

Assessment Results

Based on internal self-assessment of the implementation of GCG that has been carried out in 2018, as a whole the Company received a value of 73.30 or achieved a "Good Enough" qualification. The score increased compared to 2017 which was 72.74.

In 2018, there was a significant percentage increase in score compared to the previous year, namely in the aspect of testing "Information Disclosure & Transparency" from a score of 5.45 in 2017 to 6.93 in 2018. This is mainly because the Company has compiled the 2017 Annual Report.

In the aspect of testing the "Directors", the score in 2018 decreased to 24.46 compared to the previous year of 25.49. Likewise with the aspect of "Commitment to the

terhadap Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik Secara Berkelanjutan” yang mendapatkan skor 4,61 dibandingkan tahun 2017 sebesar 5,19. Faktor penurunan tersebut terutama dikarenakan Perseroan belum melakukan *update* atas pedoman GCG yang dimiliki dan belum melengkapi struktur organisasi.

Hasil capaian penerapan GCG Perseroan berdasarkan aspek pengujian selengkapannya sebagai berikut:

Tabel Hasil Asesmen GCG

No.	Aspek Penilaian / Assessment Aspect	Nilai / Score (%)	
		2018	2017
1	Komitmen terhadap penerapan tata kelola perusahaan yang baik secara berkelanjutan / Commitment to the implementation of good corporate governance	4,61	5,19
2	Pemegang Saham & RUPS/Pemilik Modal / Shareholders and GMS	8,69	8,51
3	Dewan Komisaris/Dewan Pengawas / Board of Commissioners/Supervisory Board	28,61	28,10
4	Direksi / Board of Directors	24,46	25,49
5	Pengungkapan informasi dan transparansi / Information Disclosure and Transparency	6,93	5,45
	Aspek lainnya / Other aspects.	0,00	0,00
Total		73,30	72,74
Klasifikasi Kualitas Penerapan GCG / Quality Classification of GCG Implementation		Cukup Baik / Fairly Good	Cukup Baik / Fairly Good

Perseroan telah menindaklanjuti atas rekomendasi atas penerapan GCG tahun 2018 dari Tim evaluator GCG tahun 2018 untuk perbaikan tata kelola yang meliputi tindakan korektif yang diperlukan dan waktu penyelesaian serta kendala/hambatan penyelesaiannya, apabila masih terdapat kekurangan dalam penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS)

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) merupakan organ tata kelola Perseroan yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Perseroan dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi dan Dewan Komisaris. RUPS sebagai organ Perseroan merupakan wadah bagi para Pemegang Saham untuk mengambil keputusan strategis berkaitan dengan modal yang ditanam dalam Perseroan, dengan memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keputusan yang diambil dalam RUPS didasari kepentingan usaha Perseroan jangka pendek, menengah, dan panjang yang dilakukan secara wajar dan transparan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007. Tanpa mengurangi kewenangan RUPS untuk menjalankan hak sesuai dengan Anggaran Dasar dan Peraturan Perundang-undangan, Pemegang Saham tidak melakukan intervensi terhadap tugas, fungsi dan wewenang Dewan Komisaris dan Direksi, serta Dewan Pengawas Syariah.

Implementation of Good Corporate Governance Continuously” which scored 4.61 compared to 2017 of 5.19. The decrease factor is mainly due to the Company not yet updating the GCG guidelines that were finalized and not yet completing the organizational structure.

The results of the implementation of the Company’s GCG based on the testing aspects are as follows:

GCG Assessment Results Table

No.	Aspek Penilaian / Assessment Aspect	Nilai / Score (%)	
		2018	2017
1	Komitmen terhadap penerapan tata kelola perusahaan yang baik secara berkelanjutan / Commitment to the implementation of good corporate governance	4,61	5,19
2	Pemegang Saham & RUPS/Pemilik Modal / Shareholders and GMS	8,69	8,51
3	Dewan Komisaris/Dewan Pengawas / Board of Commissioners/Supervisory Board	28,61	28,10
4	Direksi / Board of Directors	24,46	25,49
5	Pengungkapan informasi dan transparansi / Information Disclosure and Transparency	6,93	5,45
	Aspek lainnya / Other aspects.	0,00	0,00
Total		73,30	72,74
Klasifikasi Kualitas Penerapan GCG / Quality Classification of GCG Implementation		Cukup Baik / Fairly Good	Cukup Baik / Fairly Good

The Company has followed up on the recommendation for the implementation of GCG in 2018 from the GCG evaluator team in 2018 for governance improvement which includes corrective actions needed and the time of completion and constraints/obstacles to its completion, if there are still deficiencies in the implementation of Good Corporate Governance.

GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS (GMS)

The General Meeting of Shareholders (GMS) is a corporate governance organ that holds the highest and all the authority that cannot be transferred to the Board of Directors and Board of Commissioners. GMS is the forum where Shareholders exercise their rights in making strategic decisions relating to the capital invested in the Company, by observing the Articles of Association and applicable laws and regulations.

The resolutions made at the GMS should be based on the short, medium and long-term business interests of the Company, which are carried out fairly and transparently, as stipulated in the Limited Liability Company Law Number 40 of 2007. Without prejudice to the rights of the GMS in accordance with the Articles of Association and Legislation, the Shareholders should not intervene in the duties, functions and authority of the Board of Commissioners and Directors, and the Sharia Supervisory Board.

Mekanisme dan Penyelenggaraan RUPS Perseroan

RUPS Tahunan diselenggarakan setiap tahun, meliputi:

- Persetujuan Laporan Tahunan;
- Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP);
- Penunjukan Akuntan Publik;
- Putusan hal-hal lain yang diusulkan oleh Dewan Komisaris dan atau seorang atau lebih Pemegang Saham sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.

Pelaksanaan RUPS Tahunan 2018

Pada tahun 2018, Perseroan menyelenggarakan 1 (satu) kali RUPST pada tanggal 29 Juni 2018 bertempat di Ruang Rapat PT Asuransi Kredit Indonesia (Persero), lantai 8, Jl. Angkasa Blok B-9 Kav. No. 8, Jakarta Pusat. Acara ini dihadiri oleh perwakilan dari 250.000 saham yang memiliki hak suara yang sah, atau 100% dari saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

Agenda RUPST mencakup 4 (empat) mata acara dan tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan suara tidak setuju dan/atau abstain atas usulan mata acara tersebut, sehingga keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat dari seluruh pemegang saham yang hadir.

Pelaksanaan RUPST telah sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan.

Keputusan RUPS Tahunan 2018

Mata acara pertama: Persetujuan laporan tahunan dan pengesahan laporan keuangan tahun buku 2018, persetujuan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris tahun buku 2018 sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (*volledig acquit et decharge*) kepada Direksi atas tindakan pengurusan Perseroan dan anggota Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan Perseroan selama tahun 2018.

- 1.1. RUPS menyetujui laporan tahunan dan mengesahkan laporan keuangan Perseroan tahun buku 2018 dan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris yang telah diaudit oleh kantor Akuntan Publik (KAP) Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan dalam laporannya;
- 1.2. RUPS memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (*volledig acquit et decharge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan Perseroan

Mechanism and Implementation of GMS in the Company

Annual GMS is held annually and includes:

- Approval of Annual Reports;
- Approval of Corporate Work Plan and Budget (RKAP);
- Appointment of Public Accountant;
- Resolution of other matters as proposed by the Board of Commissioners and/or one or more Shareholder in accordance with the provisions of the Articles of Association.

Annual GMS 2018

In 2018, the Company held 1 (one) AGM on June 29, 2018 at the Meeting Room of PT Asuransi Kredit Indonesia (Persero), 8th floor, Jl. Angkasa Blok B-9 Kav. No. 8, Jakarta Pusat. The event was attended by representatives of 250,000 shares with valid voting rights, or 100% of shares with valid voting rights issued by the Company.

The AGMS agenda includes 4 (four) agenda items and there are no shareholders or the power of attorney of the shareholders who declare the vote of disapproval and/or abstain from the proposed agenda, so that the decision is made based on deliberation for consensus from all shareholders present.

The Annual General Meeting of Shareholders is in accordance with the applicable rules and regulations and in accordance with the Company's Articles of Association.

Decree of the 2018 AGMS

First agenda item: Approval of the annual report and ratification of the 2018 financial year report, approval of the Board of Commissioners' supervisory report for the 2018 fiscal year as well as the granting of repayment and release of responsibility (*volledig acquit et decharge*) to the Directors for the management actions of the Company and members of the Board of Commissioners for the supervisory action Company during 2018.

- 1.1. The GMS approved the annual report and endorsed the financial statements of the Company for the 2018 fiscal year and the Board of Commissioners' audited supervisory report by the Public Accounting Firm (KAP) Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Partners in his report;
- 1.2. The GMS grants repayment and release of responsibility (*volledig acquit et decharge*) to the Board of Directors and the Board of Commissioners for the Company's

dan pengawasan Perseroan selama tahun 2018, sepanjang tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana atau tidak melanggar ketentuan/prosedur hukum yang berlaku dan tindakan tersebut tercatat dan dilaporkan dalam laporan tahunan dan laporan keuangan tahun buku 2018.

Mata acara kedua: Penetapan penggunaan laba bersih tahun buku 2018.

2.1 Menetapkan penggunaan Laba Setelah Pajak dan Zakat Perseroan tahun buku 2018 sebesar Rp14.084.857.233 seluruhnya untuk Cadangan Umum.

Mata acara ketiga: Penetapan penghasilan Direksi dan Dewan Komisaris.

3.1. Penetapan besarnya gaji/honorarium berikut fasilitas dan tunjangan lainnya tahun 2019 serta tantiem tahun buku 2018 untuk anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan akan ditetapkan dalam Surat Keputusan Pemegang Saham Mayoritas secara tersendiri dengan memperhatikan ketentuan peraturan yang berlaku.

Mata acara keempat: Penetapan KAP untuk mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir tanggal 31 Desember 2019.

4.1. Penetapan KAP untuk general audit atas laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 akan ditentukan kemudian dengan memperhatikan kesamaan KAP yang akan melakukan general audit atas laporan keuangan PT Asuransi Kredit Indonesia (Perser) tahun buku 2019 yang akan ditetapkan oleh Kementerian Badan Usaha Milik Negara selaku Pemegang Saham serta mematuhi ketentuan dan peraturan yang berlaku.

management and supervision activities during 2018, as long as these actions do not constitute a criminal offense or do not violate applicable legal provisions/procedures and those actions are recorded and reported in the 2018 annual report and financial report.

Second agenda item: Determination of the use of net income for the 2018 fiscal year.

2.1 Determine the use of the Company's After Taxes and Zakat Profit for the fiscal year 2018 amounting to Rp14,084,857,233 for the General Reserves.

Third agenda item: Determination of the income of the Directors and the Board of Commissioners.

3.1. Determination of the amount of salary / honorarium along with other facilities and benefits in 2019 and the 2018 fiscal year bonus for members of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company will be stipulated in a Majority Shareholder Decree separately, taking into account applicable regulations.

Fourth agenda item: Determination of Public Accounting Firm to audit the Company's financial statements for the fiscal year ending December 31, 2019.

4.1. Determination of Public Accountant for general audit of the Company's financial statements for the fiscal year which will end on December 31, 2019 will be determined later by taking into account the similarity of the Public Accountant who will conduct a general audit of the financial statements of PT Asuransi Kredit Indonesia (Persero) for the 2019 fiscal year to be determined by the Ministry State-Owned Enterprises as Shareholders and comply with applicable rules and regulations.

Keputusan RUPS Tahunan 2017

Decision of the 2017 Annual GMS

No	Keputusan / Decision	Realisasi / Realization
1	Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2016 / Approval of the Annual Report and Ratification of the Company's Financial Statements for the Year 2016 Menunjuk pada Pasal 21 Anggaran Dasar PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah, Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) menyetujui Laporan Tahunan dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah Tahun Buku 2016, sekaligus memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (<i>volledig acquit et decharge</i>) kepada Direksi atas tindakan pengurusan perseroan dan Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan perseroan selama Tahun Buku 2016 sepanjang tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana atau tidak melanggar ketentuan/prosedur hukum yang berlaku dan telah dilaporkan kepada Pemegang Saham serta tercatat dan dilaporkan dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahun Buku 2016. / Referring to Article 21 of the Articles of Association of PT Askrindo Syariah Financing Guarantee, the General Meeting of Shareholders (GMS) hereby approved the Annual Report and ratified the Financial Statement of PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah for Fiscal Year 2016, as well as granted full release and discharge of responsibility (<i>volledig acquit et decharge</i>) to the Board of Directors for the management of the Company and the Board of Commissioners for the Company's supervisory actions during the Fiscal Year 2016 in so far as the aforementioned actions and supervision do not constitute a criminal act or violates the prevailing regulation(s) and legal procedures, and as long as recorded in the Annual Report and Financial Statements for Fiscal Year 2016.	Terealisasi / Realized

No	Keputusan / Decision	Realisasi / Realization
2	Penggunaan Laba Tahun Buku 2016 / The Appropriation of the Earning After Taxes from Year 2016 Menetapkan penggunaan Laba Setelah Pajak dan Zakat Tahun Buku 2016 sebesar Rp20.484.036.491 (dua puluh milyar empat ratus delapan puluh empat juta tiga puluh enam ribu empat ratus sembilan puluh satu rupiah) yang diperoleh dari tahun buku 2016 seluruhnya sebagai Cadangan Umum dan tidak dibagikan dividen. / Determine the appropriation of Profit After Taxes and Zakat for the Fiscal Year of 2016 amounting to Rp20,484,036,491, - (twenty billion four hundred eighty four million thirty six thousand four hundred ninety one rupiahs) obtained from the 2016 financial year entirely as General Reserves and hence not to be distributed as dividends.	Terealisasi / Realized
3	Penunjukan Kantor Akuntan Publik (KAP) Untuk General Audit Tahun Buku 2017 / Appointment of the Public Accountant Firm (KAP) for the 2017 General Audit Year Penunjukan Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk general audit tahun buku 2017 akan ditentukan kemudian dengan memperhatikan kesamaan Kantor Akuntan Publik (KAP) yang akan melakukan general audit laporan keuangan PT Asuransi Kredit Indonesia (Persero) tahun buku 2017 yang akan ditetapkan oleh Kementerian Badan Usaha Milik Negara selaku Pemegang Saham serta mematuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 17/PMK.01/2008 tentang Jasa Akuntan Publik. / The appointment of the Public Accountant Firm (KAP) to conduct a general audit for the 2017 fiscal year will be determined later by taking into consideration the appointment of the Public Accountant Firm (KAP) to conduct financial statement audit of PT Asuransi Kredit Indonesia (Persero) for the 2017 fiscal year, which will be determined by the Ministry State-Owned Enterprises as Shareholders, and in accordance with the prevailing laws and regulations, in particular the Minister of Finance Regulation (PMK) No. 17/PMK.01/2008 concerning Public Accountant Services.	Terealisasi / Realized
4	Penghasilan Direksi, Honorarium Dewan Komisaris, dan Tantiem / Income of the Board of Directors, Board of Commissioners Honorarium, and Tantiem Penghasilan berupa gaji untuk Direksi dan honorarium untuk Dewan Komisaris serta Sekretaris Dewan Komisaris tahun buku 2017 dan tantiem tahun buku 2016 akan ditetapkan dalam Surat Keputusan Pemegang Saham tersendiri dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. / Income, in the form of salary for the Board of Directors and honorarium for the Board of Commissioners as well as the Secretary of the Board of Commissioners for the year 2017 and the tantiem for the year 2016, will be stipulated in separate Shareholders' Decree by taking into account the applicable laws and regulations.	Terealisasi / Realized

Pelaksanaan RUPS Luar Biasa Tahun 2018

Pada tahun 2018, Perseroan menyelenggarakan 1 (satu) kali RUPS LB pada tanggal 22 Januari 2018 bertempat di Ruang Rapat Direksi PT Asuransi Kredit Indonesia (Persero), Lantai 8, Jalan Angkasa Blok B-9, Kavling Nomor 8, Kemayoran, Jakarta Pusat. Acara ini dihadiri oleh perwakilan dari 250.000 saham yang merupakan seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor dalam Perseroan. Pelaksanaan RUPS LB telah sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Keputusan RUPS LB tahun 2018 telah dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat tertanggal 22 Januari 2018, Nomor 36, yang dibuat oleh Notaris Hadijah, S.H., Notaris di Jakarta, sebagai berikut:

1. Membatalkan pengangkatan tuan Supardi Najamuddin sebagai Direktur Pemasaran Perseroan terhitung sejak penetapan. Alasan pembatalan tersebut adalah memenuhi ketentuan Pasal 26 ayat 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27/POJK.03/2016, berdasarkan Salinan Keputusan Anggota Dewan Komisaris Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-109/NB.22.2017.
2. Memberhentikan dengan hormat tuan Pribadi selaku Direktur Utama Perseroan terhitung sejak tanggal penetapan dengan ucapan terimakasih atas sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan selama menjabat sebagai Direktur Utama Perseroan. Alasan pemberhentian tersebut adalah perlunya perubahan Anggota Direksi demi kepentingan dan tercapainya tujuan Perseroan.

Extraordinary GMS in 2018

In 2018, the Company held 1 (one) Extraordinary GMS on January 22, 2018 at the Meeting Room of the Directors of PT Asuransi Kredit Indonesia (Persero), 8th Floor, Jalan Angkasa Blok B-9, Kavling Number 8, Kemayoran, Central Jakarta. The event was attended by representatives of 250,000 shares, which were all shares that had been placed and paid up in the Company. The implementation of the Extraordinary General Meeting of Shareholders is in accordance with the applicable laws and regulations. The decision of the Extraordinary GMS of LB in 2018 has been stated in the Deed of the Minutes of the Meeting dated January 22, 2018, Number 36, made by Notary Hadijah, S.H., Notary in Jakarta, as follows:

1. Cancel the appointment of Mr. Supardi Najamuddin as the Company's Marketing Director as of the stipulation. The reason for the cancellation is to meet the provisions of Article 26 paragraph 1 of the Financial Services Authority Regulation Number 27 / POJK.03 / 2016, based on a copy of the Decision of the Members of the Board of Commissioners of the Financial Services Authority Number KEP-109 / NB.22.2017.
2. Respectfully dismissal Mr. Pribadi as the Company's President Director as of the date of stipulation with thanks for the contribution of energy and thoughts given during his tenure as President Director of the Company. The reason for the dismissal is the need for changes in the Members of the Board of Directors in the interest and achievement of the Company's goals.

3. Segala tindakan tuan Pribadi dalam kedudukannya sebagaimana dimaksud di atas, sejak berakhirnya masa jabatan dinyatakan sah sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan hukum dan kewenangan yang diberikan dalam Anggaran Dasar dan ketentuan yang berlaku.
 4. Mengangkat tuan Soegiarto sebagai Direktur Utama berlaku efektif sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 21 Januari 2023 dengan tugas, wewenang dan kewajiban sebagaimana diatur dalam Pasal 11 Anggaran Dasar Perseroan dan ketentuan lain yang berlaku, namun sewaktu-waktu dapat diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS dengan menyebutkan alasannya.
 5. Memperhatikan keputusan angka 1 dan sesuai Pasal 10 Anggaran Dasar Perseroan, maka untuk sementara tuan Soegiharto selaku Direktur Utama sekaligus merangkap tugas sebagai Direktur Pemasaran sampai dengan adanya Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan tentang penetapan definitive Direktur Pemasaran. Dalam melaksanakan segala tindakan sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Pemasaran kepada tuan Soegiharto diberikan tugas, tanggung jawab dan kewenangan sebagaimana diatur dalam Pasal 11 Anggaran Dasar Perseroan dan ketentuan yang berlaku.
 6. Pembatalan, pemberhentian dan pengangkatan Anggota Direksi Perseroan ditetapkan dengan memperhatikan Surat Menteri BUMN Nomor SR-586/MBU/10/2017 tanggal 5 Oktober 2017 tentang persetujuan pengangkatan anggota Direksi Perseroan (Anak Perusahaan PT Asuransi Kredit Indonesia (Persero) dan Surat Otoritas Jasa Keuangan Nomor S-41/NB/223/2018 tanggal 9 Januari 2018 hal Keputusan Atas Pencalonan Direksi Perseroan serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
3. Every action of the Mr. Pribadi in his position as referred to above, since the end of his term of office shall be declared valid as long as it does not contradict the provisions of law and authority given in the Articles of Association and the applicable provisions.
 4. Appointing the Mr. Soegiarto as President Director is effective from the date of stipulation until January 21, 2023 with the duties, authorities and obligations as stipulated in Article 11 of the Company's Articles of Association and other applicable provisions, but at any time can be dismissed based on the GMS decision by stating the reasons.
 5. Noting the decision number 1 and in accordance with Article 10 of the Company's Articles of Association, Mr. Soegiharto as the President Director is also concurrently serving as the Marketing Director until the General Meeting of Shareholders of the Company regarding the definitive determination of the Marketing Director. In carrying out all actions as the Acting Director (Acting) of the Marketing Director, Mr. Soegiharto is given the duties, responsibilities and authorities as stipulated in Article 11 of the Company's Articles of Association and applicable provisions.
 6. The cancellation, dismissal and appointment of the Company's Directors is determined by taking into account the Minister of SOE Number SR-586 / MBU / 10/2017 dated October 5, 2017 concerning the approval of the appointment of members of the Company's Directors (Subsidiaries of Asuransi Kredit Indonesia (Persero) and Financial Services Authority Letters Number S-41 / NB / 223/2018 dated January 9, 2018 regarding the Decision on the Nomination of the Board of Directors of the Company and the provisions of the applicable laws.

DEWAN PENGAWAS SYARIAH

Dewan Pengawas Syariah sebagai organ perusahaan memiliki fungsi sebagai pengawas atas kegiatan usaha Perseroan agar sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah

Komposisi Dewan Pengawas Syariah

Komposisi Dewan Pengawas pada 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

SHARIA SUPERVISORY BOARD

The Sharia Supervisory Board serves as the Company's organ overseeing the compliance of the Company's business activities with sharia principles .

Composition of the Sharia Supervisory Board

The composition of the Supervisory Board as of 31 December 2018 is as follows:

Tabel Susunan Dewan Pengawas Syariah

Composition of the Shariah Supervisory Board

Nama / Name	Jabatan / Position	Dasar Pengangkatan / Appointment Letter	Tanggal Pengangkatan / Appointment Date
Daud Rasyid	Ketua Dewan Pengawas / Head of the Supervisory Board	Rekomendasi Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No. U-235/DSN-MUI/III/2018 / Based on the Recommendation from National Sharia Councils of Indonesian Councils of Ulama No. U-235/DSN-MUI/III/2018.	29 Maret 2018 / March 29, 2018
Muhammad Zubair	Anggota Dewan Pengawas / Member of the Supervisory Board	Rekomendasi Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No. U-235/DSN-MUI/III/2018 / Based on the Recommendation from National Sharia Councils of Indonesian Councils of Ulama No. U-235/DSN-MUI/III/2018.	29 Maret 2018 / March 29, 2018
Deni Nuryadin	Anggota Dewan Pengawas / Member of the Supervisory Board	Rekomendasi Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No. U-235/DSN-MUI/III/2018 / Based on the Recommendation from National Sharia Councils of Indonesian Councils of Ulama No. U-235/DSN-MUI/III/2018.	29 Maret 2018 / March 29, 2018

Tugas dan Wewenang Dewan Pengawas Syariah

Dewan Pengawas Syariah mempunyai tugas dan wewenang, antara lain sebagai berikut:

- 1) Dewan Pengawas Syariah berfungsi melaksanakan tugas pengawasan dan pemberian nasihat serta saran kepada Direksi agar kegiatan Perusahaan Penjaminan Syariah sesuai dengan Prinsip Syariah
- 2) Memastikan pemenuhan prinsip syariah atas akad, kegiatan operasional dan produk yang dikeluarkan Perseroan;
- 3) Mengawasi proses pengembangan produk baru Perseroan;
- 4) Meminta fatwa Dewan Syariah Nasional untuk produk baru Perseroan yang belum ada fatwanya;
- 5) Melakukan revidu secara berkala atas pemenuhan prinsip syariah terhadap mekanisme kegiatan usaha tugasnya.
- 6) Meminta data dan informasi terkait dengan aspek dari satuan kerja Perseroan dalam rangka pelaksanaan tugasnya.

Anggota DPS berhak memperoleh informasi dari Direksi mengenai Perseroan secara lengkap dan tepat waktu.

Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas di 2018

Dewan Pengawas terdiri dari Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan Dewan Komisaris. Dewan Pengawas melaksanakan fungsi pengawasan termasuk terhadap prinsip-prinsip dasar atas penyelenggaraan penjaminan pembiayaan dengan prinsip syariah.

Duties and Authorities of the Sharia Supervisory Board

The Sharia Supervisory Board has the following duties and authorities, among others:

- 1) The Sharia Supervisory Board carries out the supervisory function and provision of advice to the Board of Directors so that the Company activities are in accordance with Sharia Principles
- 2) Ensuring the Company's contracts (akad), operational activities and products are in compliance with sharia principles;
- 3) Supervising the process of developing the Company's new products;
- 4) Requesting the fatwa of the National Sharia Council for new products of the Company which has yet receive fatwa;
- 5) Periodically reviewing the compliance of sharia principles on the Company business activities.
- 6) Requesting relevant data and information from the Company's work units in order to carry out its duties.

Members of Sharia Supervisory Board are entitled to obtain complete and timely information of the Company from the Board of Directors.

Implementation of Duties and Responsibilities of the Supervisory Board in 2018

The Supervisory Board consists of the Sharia Supervisory Board (DPS) and the Board of Commissioners. The Supervisory Board carries out the supervisory function including on the basic principles of implementing financing guarantees under sharia principles.

Rapat Dewan Pengawas Syariah

Rapat Dewan Pengawas Syariah wajib diselenggarakan secara berkala per tiga bulan, atau atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris, atau atas permintaan dari satu orang atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara.

Berdasarkan Laporan Dewan Pengawas Syariah tahun 2018, beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan diantaranya:

- 1) Rapat koordinasi antara Dewan Pengawas Syariah dengan Manajemen Perseroan secara berkala sebanyak 4 kali pertemuan; dan
- 2) Pemberian rekomendasi atas seluruh perjanjian kerjasama dan pengembangan produk baru dalam tahun 2018.

Adapun tingkat kehadiran masing-masing anggota DPS dan agenda rapat sepanjang tahun 2018 adalah sebagai berikut:

Tabel Rapat Dewan Pengawas Syariah Tahun 2018

Nama / Name	Jabatan / Position	Target / Target	Kehadiran / Attendance	Persentase / Percentage
Daud Rasyid	Ketua Dewan Pengawas / Head of the Supervisory Board	4	4	100%
Muhammad Zubair	Anggota Dewan Pengawas / Member of the Supervisory Board	4	4	100%
Deni Nuryadin	Anggota Dewan Pengawas / Member of the Supervisory Board	4	4	100%

DEWAN KOMISARIS

Dewan Komisaris merupakan organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai Anggaran Dasar serta memberi nasihat kepada Direksi sebagaimana ditentukan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Dewan Komisaris bertanggung jawab melakukan pengawasan terhadap kinerja Direksi, memberikan nasihat atau saran, serta memastikan bahwa Direksi telah menjalankan tugas-tugasnya untuk kepentingan *stakeholders*. Dewan Komisaris bertanggung jawab memberikan laporan kepada RUPS serta memberikan rekomendasi remunerasi anggota Dewan Komisaris dan Direksi serta nominasi auditor eksternal.

Dewan Komisaris telah memenuhi ketentuan *fit & proper test* dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Pemegang Saham dan/atau Kementerian BUMN, serta memenuhi ketentuan dalam UU Perseroan Terbatas serta prinsip-prinsip GCG. Perseroan mewajibkan Dewan Komisaris untuk mengungkapkan kepemilikan sahamnya, baik saham di Perseroan maupun di

Sharia Supervisory Board Meeting

Sharia Supervisory Board meetings are held on regular basis every three months, or upon written request by one or more members of the Board of Commissioners, or upon request by one or more shareholders with voting rights.

Based on the 2018 Report by the Sharia Supervisory Board, several activities carried out include:

- 1) Coordination meetings between the Sharia Supervisory Board and the Management of the Company, conducted 4 (four) times; and
- 2) Providing recommendations on all cooperation agreements and the development of new products in 2018.

The attendance of each DPS member and meeting agenda throughout 2018 are as follows:

Table of Sharia Supervisory Board Meetings in 2018

Nama / Name	Jabatan / Position	Target / Target	Kehadiran / Attendance	Persentase / Percentage
Daud Rasyid	Ketua Dewan Pengawas / Head of the Supervisory Board	4	4	100%
Muhammad Zubair	Anggota Dewan Pengawas / Member of the Supervisory Board	4	4	100%
Deni Nuryadin	Anggota Dewan Pengawas / Member of the Supervisory Board	4	4	100%

BOARD OF COMMISSIONERS

The Board of Commissioners is the Company's organ that has the duty of conducting general and/or special supervision in accordance with the Articles of Association and to provide advice to the Board of Directors as stipulated by the Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies.

The Board of Commissioners is responsible for overseeing the performance of the Board of Directors, providing advice, and ensuring that the Board of Directors has carried out their duties for the interests of stakeholders. The Board of Commissioners is responsible for submitting reports to the GMS and providing recommendations on the remuneration of members of the Board of Commissioners and Board of Directors and the nomination of the Company's external auditor.

The Board of Commissioners has met the *fit & proper test* by the Financial Services Authority (OJK) and Shareholders and/or the Ministry of SOES, as well as met the provisions in the Law of Limited Liability Company and the principles of GCG. The Company requires the Board of Commissioners to disclose their shares ownership, both in the Company and in other

perusahaan lainnya yang berkedudukan di dalam dan di luar negeri dalam suatu laporan yang harus diperbaharui setiap tahunnya.

Dewan Komisaris tidak mengambil dan atau menerima keuntungan pribadi dari Perseroan selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS. Seluruh anggota Dewan Komisaris memiliki integritas, kompetensi dan reputasi yang memadai.

Dalam melaksanakan tugasnya, Dewan Komisaris bertanggung jawab kepada RUPS. Pertanggung Jawaban kepada RUPS merupakan perwujudan akuntabilitas pengawasan atas pengelolaan perusahaan dalam rangka pelaksanaan prinsip-prinsip GCG. Kinerja Dewan Komisaris dievaluasi berdasarkan unsur-unsur penilaian kinerja yang disusun oleh Komite Audit. Pelaksanaan penilaian dilakukan pada tiap akhir periode tutup buku. Hasil Penilaian kinerjanya disampaikan dalam RUPS.

Komposisi Dewan Komisaris

Komposisi Dewan Komisaris Perusahaan telah sesuai undang undang Nomor 40 2007 tentang Perseroan Terbatas, POJK No. 3/POJK.05/2017 tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Lembaga Penjamin dan Anggaran Dasar Perusahaan yang menyatakan bahwa Dewan Komisaris terdiri dari paling sedikit 2 (dua) orang dan seorang diantaranya diangkat sebagai Komisaris Utama. Komisaris Utama merangkap sebagai Komisaris Indenpenden.

Komposisi Dewan Komisaris Perseroan periode 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

companies domiciled at home and abroad in a report that must be renewed annually.

The Board of Commissioners shall not take and or receive any personal benefits from the Company other than the remuneration and other facilities stipulated by the GMS. All members of the Board of Commissioners have the integrity, competence and adequate reputation.

In carrying out their duties, the Board of Commissioners answers directly to the GMS. It is the realization of accountability of the Board of Commissioners in conducting supervisory function over the management of the Company in the context of implementing the principles of GCG. The Board of Commissioners' performance is evaluated based on the criteria of performance prepared by the Audit Committee. Assessment is carried out at the end of each book closing period. The results of the appraisal are to be submitted to the GMS.

Composition of the Board of Commissioners

The composition of the Company's Board of Commissioners complies with the Law Number 40 2007 concerning Limited Liability Companies, FSA Regulation No 3/ POJK.05/2017 concerning Good Corporate Governance for Guarantor Institutions and the Company's Articles of Association which states that the Board of Commissioners consists of at least 2 (two) persons and one of them was appointed as the President Commissioner. The President Commissioner also serves as the Independent Commissioner.

The composition of the Company's Board of Commissioners as of 31 December 2018 is as follows:

Nama / Name	Jabatan / Position	Dasar Pengangkatan / Appointment Letter	Tanggal Pengangkatan / Date of Appointment
Budi Wisakseno	Komisaris Utama/Komisaris Independen Pengawas President Commissioner/ Independent Commissioner/ Supervisor	Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 17 Mei 2016 / Resolution of the Extraordinary General Meeting of Shareholders on 17 May 2016	17 Mei 2016 May 17, 2016
Bambang Hermanto	Komisaris / Commissioner	Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa pada 16 Mei 2018 / Resolutions of the Extraordinary General Meeting of Shareholders May 16, 2018	16 Mei 2018 May 16, 2019

Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Dewan Komisaris mempunyai tugas dan atau kewajiban untuk:

- a. Meminta keterangan secara tertulis kepada Direksi terhadap suatu permasalahan yang terjadi;
- b. Memberikan pendapat atau arahan dalam rapat Dewan Komisaris dengan Direksi atau rapat-rapat lain yang dihadiri oleh Dewan Komisaris;
- c. Kunjungan ke Divisi/Kantor Cabang tertentu dalam rangka memastikan pelaksanaan operasional Perseroan seperti *underwriting*, pembayaran klaim, pemasaran, sumber daya manusia keuangan dan aspek lainnya berjalan secara efektif; Dalam hal Dewan Komisaris akan melakukan kunjungan kerja ke Divisi/Kantor Cabang dan Unit Pemasaran, prosedur yang harus dilakukan adalah sebagai berikut:
 1. Dewan Komisaris menyampaikan rencana kunjungan kerja secara tertulis kepada Direksi dengan mencantumkan maksud dan tujuan, lokasi serta waktu kunjungan kerja yang akan dilakukan;
 2. Direksi mempersiapkan kunjungan kerja tersebut termasuk menyediakan fasilitas yang diperlukan sesuai ketentuan tentang perjalanan dinas Dewan Komisaris;
 3. Dalam hal kunjungan kerja dilakukan bersama sama dengan Direksi, prosedur tersebut di atas tidak diperlukan.
- d. Memberikan tanggapan atas laporan berkala yang diberikan oleh Direksi;
- e. Tunduk pada ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku, Anggaran Dasar Perusahaan dan keputusan RUPS;
- f. Beritikad baik, berhati-hati dan bertanggung-jawab dalam menjalankan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
- g. Pengawasan untuk kepentingan Perseroan dengan memperhatikan kepentingan para Pemegang Saham dan bertanggung jawab kepada RUPS;
- h. Melakukan tugas pengawasan terhadap kebijakan Direksi dalam melaksanakan pengurusan Perseroan termasuk ketaatan terhadap peraturan perundangundangan yang berlaku, pelaksanaan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP), Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP), Rencana Bisnis serta ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar dan keputusan RUPS;
- i. Melakukan pengawasan terhadap Direksi untuk memastikan Direksi mematuhi tata urutan peraturan internal Perseroan;

Duties and Responsibilities of the Board of Commissioners

The Board of Commissioners has the duty and or obligation to:

- a. Request written information from the Board of Directors regarding problems that occurred;
- b. Provide opinions or directive during the Board of Commissioners meeting with the Board of Directors, or during other meetings attended by the Board of Commissioners;
- c. Visit certain Division/Branch Offices in order to ensure that the Company's operational activities, such as underwriting, claim settlement, marketing, human resources development, financial, and other aspects are carried out effectively. The procedures in the event that the Board of Commissioners to conduct a visit to the Division/ Branch Office and Marketing Unit are as follows:
 1. The Board of Commissioners to submit a written plan of visit to the Board of Directors by stating the intention, purpose, location and time of the visit;
 2. The Board of Directors to prepare the necessary facilities for the visit in accordance with the provisions regarding the official tip of the Board of Commissioners;
 3. In the event that the work visit is carried out together with the Board of Directors, then the above procedure is not required.
- d. Provide responses to periodic reports provided by the Board of Directors;
- e. Comply with applicable legislation, the Company's Articles of Association and GMS decisions;
- f. Having good faith, careful and responsible in carrying out supervision and giving advice to the Board of Directors, only for the interests and in accordance with the purposes and objectives of the Company;
- g. Supervision is carried out for the interests of the Company by taking into account the interests of the Shareholders and being accountable to the GMS;
- h. Carry out oversight duties on the policies of the Board of Directors in implementing Company management including compliance with applicable laws and regulations, implementation of the Company's Long-Term Plan (RJPP), Corporate Work Plan and Budget (RKAP), Business Plans and provisions of the Articles of Association and GMS decisions;
- i. Supervise the Board of Directors to ensure the Board of Directors adheres to the Company's internal rules;

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> j. Memberi nasihat kepada Direksi dalam melaksanakan pengurusan Perseroan; k. Memberikan pendapat dan saran kepada Direksi dan segenap jajarannya berkaitan dengan pengurusan Perseroan; l. Memberikan pendapat dan saran kepada Direksi dan segenap Jajarannya berkaitan dengan penyusunan visi, misi serta rencana-rencana strategis Perseroan lainnya seperti yang diatur dalam Anggaran Dasar; m. Memberikan pendapat dan saran serta pengesahan mengenai RJPP dan RKAP yang diusulkan Direksi. Pengesahan untuk RJPP selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari sejak penyampaian rancangan oleh Direksi dan 30 (tiga puluh) hari sejak tahun buku baru dimulai untuk pengesahan RKAP; n. Memantau proses keterbukaan dan efektifitas komunikasi dalam Perseroan; o. Melakukan penelitian dan penelaahan atas laporan laporan dari Direksi dan segenap jajarannya, terutama yang berkaitan dengan tugas-tugas spesifik yang telah diputuskan bersama; p. Meneliti dan menelaah laporan-laporan dari komitekomite yang ada di bawah Dewan Komisaris; q. Mengikuti perkembangan kegiatan Perseroan baik dari informasi-informasi internal yang disediakan oleh Perusahaan maupun dari informasi-informasi eksternal yang berasal dari media maupun dari sumber-sumber lainnya; r. Bila dipandang perlu, menghadiri rapat-rapat kerja/koordinasi dengan Direksi dan segenap jajarannya; s. Melakukan usaha-usaha untuk memastikan bahwa Direksi dan jajarannya telah mematuhi ketentuan Perundang-undangan serta peraturan-peraturan lainnya dalam mengelola Perusahaan; t. Menyusun rencana kerja dan anggaran Dewan Komisaris untuk periode tahun berjalan; u. Melakukan pembagian kerja diantara para Anggota Dewan Komisaris yang diatur oleh mereka sendiri, dan untuk kelancaran tugasnya Dewan Komisaris dapat dibantu oleh seorang Sekretaris Dewan Komisaris yang diangkat oleh Dewan Komisaris atas beban Perseroan; v. Melakukan <i>self assesment</i> atas kinerja Dewan Komisaris secara periodik; w. Menerapkan GCG secara konsisten; dan x. Memantau efektivitas praktik GCG antara lain dengan mengadakan pertemuan berkala antara Dewan Komisaris dengan Direksi untuk membahas implementasi GCG di Perseroan. | <ul style="list-style-type: none"> j. Provide advice to the Board of Directors in implementing the management of the Company; k. Provide opinions and suggestions to the Board of Directors and all staff related to the management of the Company; l. Provide opinions and suggestions to the Board of Directors and all of its Staff regarding the preparation of the Company's vision, mission and strategic plans as stipulated in the Articles of Association; m. Provide opinions and suggestions as well as ratifying the RJPP and RKAP proposed by the BOD. Ratification of the RJPP should be no later than 60 (sixty) days from the submission of the draft by the Board of Directors and 30 (thirty) days since the new fiscal year begins for the ratification of the RKAP; n. Monitor the openness and effectiveness of communication within the Company; o. To go over and review the reports from the Board of Directors and all staff, especially those related to specific tasks that have been jointly decided; p. To go over and to review reports from the Committees under the Board of Commissioners; q. Keep updated with the development of the Company's activities both from internal information provided by the Company and from external information originating from the media as well as from other sources; r. If deemed necessary, attending the work/coordination meetings with the Board of Directors and all staff; s. Ensure that the Board of Directors and staff are in compliance with laws and other regulations in managing the Company; t. Prepare the work plan and budget of the Board of Commissioners for the current year period; u. Managing the division of duties among the members of the Board of Commissioners, and to support thei duties, the Board of Commissioners is assisted by the Secretary of the Board of Commissioners appointed by the Board of Commissioners at the expense of the Company; v. Conduct periodic self-assessments on the performance of the Board of Commissioners; w. Implement GCG consistently; and x. Monitor the effectiveness of GCG practices, among others, by holding regular meetings with the Board of Directors to discuss the GCG implementation in the Company. |
|--|--|

Hak dan Kewenangan Dewan Komisaris

Hak Dewan Komisaris

- a. Anggota Dewan Komisaris, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri setiap waktu berhak memasuki bangunan bangunan dan halaman-halaman atau tempat-tempat lain yang dipergunakan atau dikuasai oleh Perusahaan;
- b. Memeriksa buku-buku, surat-surat bukti, persediaan barang-barang, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas (untuk keperluan verifikasi) dan lain-lain surat berharga serta mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi;
- c. Jika dianggap perlu, Dewan Komisaris atas biaya Perusahaan untuk jangka waktu terbatas dapat meminta bantuan ahli-ahli untuk melakukan pemeriksaan sesuai tugas dan wewenangnya;
- d. Anggota Dewan Komisaris berhak meminta penjelasan dan menanyakan segala hal yang berhubungan dengan tugas-tugas Dewan Komisaris dan Direksi maupun yang berkenaan dengan Perusahaan, dan Direksi wajib menyampaikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh Dewan Komisaris;
- e. Pembagian kerja dan keanggotaan komite diantara para Anggota Dewan Komisaris diatur oleh Dewan Komisaris, dan untuk kelancaran tugasnya Dewan Komisaris dapat dibantu oleh Sekretaris yang diangkat oleh Dewan Komisaris atas beban Perusahaan;
- f. Setiap Anggota Dewan Komisaris berhak untuk menerima honorarium dan tunjangan lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang jumlahnya ditetapkan oleh RUPS dan peraturan perundangundangan yang berlaku;
- g. Mendapatkan sarana dan fasilitas Perseroan sesuai dengan hasil penetapan RUPS yang penyediaannya disesuaikan dengan kondisi keuangan Perusahaan, azas kepatutan dan kewajiban serta tidak bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Wewenang Dewan Komisaris

1. Dewan Komisaris berwenang untuk menyetujui atau menolak secara tertulis rencana Direksi untuk Mengagunkan aktiva tetap untuk:
 - a. Penarikan kredit jangka menengah/panjang;
 - b. Mendirikan Anak Perusahaan dan/atau Perusahaan Patungan;
 - c. Melakukan penyertaan modal pada perusahaan lain, Anak Perusahaan dan Perusahaan Patungan;
 - d. Melakukan penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan dan pembubaran Anak Perusahaan

The Rights and Authority of the Board of Commissioners

The Rights of the Board of Commissioners

- a. Members of the Board of Commissioners, both jointly and individually, at all time have the right to enter buildings and premises or other places that are used or under the Company's control;
- b. Checking books, letters of evidence, inventory, checking and matching the cash (for purposes of verification) and other securities and to be acknowledged of all actions taken by the Board of Directors;
- c. Whenever deemed necessary, the Board of Commissioners at the Company's expense, for a limited period of time, may request the assistance of experts to carry out inspections according to their duties and authorities;
- d. Members of the Board of Commissioners have the right to ask for an explanation and all matters relating to the duties of the Board of Commissioners and the Board of Directors as well as those relating to the Company, and the Board of Directors must submit an explanation of all matters asked by the Board of Commissioners;
- e. Division of work and committee membership among the members of the Board of Commissioners is regulated by the Board of Commissioners, and for the smooth functioning of the Board of Commissioners can be assisted by a Secretary appointed by the Board of Commissioners at the Company's expense;
- f. Each Member of the Board of Commissioners has the right to receive honorarium and other benefits in accordance with the applicable provisions whose amount is determined by the GMS and the applicable laws and regulations;
- g. Obtain Company facilities in accordance with the GMS resolution, the provision of which is adjusted to the Company's financial conditions, propriety and fairness principles and should not be conflict with the prevailing laws and regulations.

Authority of the Board of Commissioners

1. The Board of Commissioners has the authority to approve or to deny in writing the plan of the Board of Directors to pledge fixed assets as collateral for:
 - a. Medium/long term loan;
 - b. Establishing subsidiary and/or joint venture company;
 - c. Conducting equity sharing with other companies, subsidiaries and joint ventures;
 - d. Conducting merger, consolidation, expropriation, separation and dissolution of Subsidiary;

- e. Mengadakan kerjasama lisensi, kontrak manajemen, menyewakan aset, kerjasama operasi dan perjanjian kerjasama lainnya yang melebihi nilai tertentu yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris;
 - f. Mengikat Perseroan sebagai penjamin (*borgatau avalist*) yang mempunyai akibat keuangan yang melebihi jumlah tertentu yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris;
 - g. Mengalihkan, melepaskan atau menjaminkan harta kekayaan Perseroan yang jumlahnya kurang dari 50% (lima puluh per seratus) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak;
 - h. Menghapus-bukukan piutang macet dan persediaan barang mati yang melebihi nilai tertentu yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris;
 - i. Melepaskan dan menghapuskan aktiva tetap Perseroan dengan umur ekonomis yang lazim berlaku dalam industri pada umumnya lebih dari 5 (lima) tahun;
 - j. Menetapkan *blue print* organisasi Perseroan;
 - k. Menetapkan dan mengubah logo Perseroan;
 - l. Melakukan tindakan-tindakan lain yang belum ditetapkan dalam RKAP namun masih diatur dalam Anggaran Dasar Perusahaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya permohonan atau penjelasan dan dokumen dari Direksi, Dewan Komisaris tidak memberikan keputusan tertulis, maka Dewan Komisaris dianggap menyetujui usulan Direksi.
2. Memberhentikan untuk sementara Anggota Direksi dari jabatannya apabila anggota Direksi bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar atau terdapat indikasi melakukan kerugian pada Perseroan atau melalaikan kewajibannya atau terdapat alasan yang mendesak bagi Perseroan, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
- a. Keputusan Dewan Komisaris mengenai pemberhentian sementara anggota Direksi dilakukan sesuai dengan tata cara pengambilan keputusan Rapat Dewan Komisaris;
 - b. Pemberhentian sementara dimaksud harus diberitahukan secara tertulis kepada anggota Direksi tersebut disertai dengan alasan yang menyebabkan tindakan tersebut dengan tembusan kepada Direksi dan disampaikan dalam waktu paling lambat 2 (dua) hari setelah ditetapkannya pemberhentian sementara tersebut;
- e. Conducting licensing cooperation, management contracts, leasing assets, joint operations and other cooperation agreements that exceed certain values set by the Board of Commissioners;
 - f. Binding the Company as a guarantor (borg or avalist) with financial consequences exceeding the specified limit set by the Board of Commissioners.
 - g. Transferring, disposing or pledging the Company's assets whose amount are less than 50% (fifty per hundred) of the Company's net worth in 1 (one) transaction or more, whether related or not related to each other;
 - h. Writing off non-performing loan and assets whose values exceeding a certain number set by the Board of Commissioners;
 - i. Disposing and writing off fixed assets whose economic age exceeding 5 (five) years, a common practice in the industry.
 - j. Preparing the blue print of the Company's organization;
 - k. Determining and changing the Company's logo;
 - l. Performing other actions not specified in the RKAP but are stipulated in the Company's Articles of Association and applicable laws and regulations. In the event that within 30 (thirty) days of receipt of the request or explanation and documents from the Board of Directors, the Board of Commissioners does not provide a written decision, the Board of Commissioners is deemed to have approved the Board of Directors' proposal.
2. Temporarily dismissing member of the Board of Directors from his/her position in the event that the said person acted in contrary to the Articles of Association or showed an indication of causing loss to the Company or neglecting his/her obligations or under urgent circumstances, with due observance to the following provisions:
- a. The decision of the Board of Commissioners regarding the temporary dismissal of members of the Board of Directors carried out in accordance with the procedures for decision making at the Board of Commissioners' Meeting;
 - b. The said temporary termination must be notified in writing to the member of the Board of Directors accompanied by the reasons for such action with a copy for the Board of Directors submitted within no later than 2 (two) days after the stipulation of the temporary dismissal;

- c. Anggota Direksi yang diberhentikan sementara tidak berwenang menjalankan pengurusan Perseroan serta mewakili Perseroan baik di dalam maupun diluar pengadilan;
 - d. Dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah pemberhentian sementara dimaksud harus diselenggarakan RUPS Luar Biasa oleh Dewan Komisaris yang akan memutuskan apakah mencabut atau menguatkan keputusan pemberhentian sementara tersebut;
 - e. Dalam RUPS Luar Biasa, anggota Direksi diberikan kesempatan untuk membela diri;
 - f. Dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari RUPS Luar Biasa tidak diselenggarakan atau RUPS Luar Biasa tidak dapat mengambil keputusan, maka pemberhentian sementara tersebut menjadi batal dan anggota Direksi yang bersangkutan wajib melakukan tugas kembali sebagaimana mestinya;
 - g. Pemberhentian sementara tidak dapat diperpanjang atau ditetapkan kembali dengan alasan yang sama, apabila pemberhentian sementara dinyatakan batal sebagaimana dimaksud poin f.
3. Mengurus Perseroan untuk sementara dalam hal seluruh anggota Direksi diberhentikan untuk sementara atau Perseroan tidak mempunyai seorangpun anggota Direksi, dalam hal demikian, Dewan Komisaris berhak untuk memberikan kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih diantara anggota Dewan Komisaris atas tanggungan Dewan Komisaris;
 4. Dapat mengusulkan kepada Direksi untuk melaksanakan RUPS jika dianggap perlu dengan menyebutkan halhal yang akan dibicarakan;
 5. Memberikan persetujuan atas penunjukan Kepala Satuan Pengawasan Intern;
 6. Memberikan persetujuan bahwa kepentingan salah seorang Anggota Direksi akan diwakili oleh Anggota Direksi lainnya dalam hal terjadi benturan kepentingan salah seorang Anggota Direksi yang diwakili tersebut. Dalam hal terjadi benturan kepentingan oleh seluruh Anggota Direksi maka Perusahaan akan diwakili oleh Dewan Komisaris atau oleh seorang yang ditunjuk Dewan Komisaris.
- c. Members of the Board of Directors who are temporarily dismissed are not authorized to carry out the management action for the Company or to represent the Company both inside and outside the court of justice;
 - d. Within a period of no later than 30 (thirty) days after the said temporary dismissal, an Extraordinary GMS must be held by the Board of Commissioners to decide whether to revoke or strengthen the decision on the said temporary dismissal;
 - e. During the Extraordinary GMS, the said member of the Board of Directors has the chance to defend themselves;
 - f. In the event that an Extraordinary GMS is not held within a period of 30 (thirty) days or cannot come to a decision, then the temporary dismissal should be annulled and void and hence the member of the Board of Directors concerned is obliged to carry out the assignment as it should;
 - g. Temporary dismissal cannot be extended or re- defined for the same reason, after declared annulled and void as referred to in point f.
3. In the event all members of the Board of Directors are temporarily dismissed, or in the event the Company has no Board of Directors, the Board of Commissioners has the right authorize one or more members of the Board to run the Company on behalf of the Board of Commissioners.
 4. Whenever deemed necessary, proposing to the Board of Directors to implement the GMS by stating the matters to be discussed.
 5. Giving approval for the appointment of the Head of the Internal Audit Unit;
 6. Giving approval in the event a member of the Board of Directors is to be represented members by another member of the Board of Directors, due to conflict of interest. In the event that all members of the Board of Directors have conflict of interest than the Company will be represented by the Board of Commissioners or by a person appointed by the Board of Commissioners.

Uraian Tugas dan Tanggung jawab masing-masing Anggota Dewan Komisaris

Sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Negara BUMN nomor PER-01/MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011, dalam melaksanakan tugasnya Dewan Komisaris harus mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dan

Duties and Responsibilities of Members of the Board of Commissioners

As stipulated by the Regulation of the Minister of State- Owned Enterprises number PER-01/MBU/2011 dated August 1, 2011, in carrying out their duties, the Board of Commissioners shall comply with the legislation and/or the Articles of Association

atau Anggaran Dasar Perusahaan serta membuat pembagian tugas yang diatur oleh Dewan Komisaris.

Tugas Komisaris Utama sebagai *primus inter pares* adalah mengkoordinasikan kegiatan Dewan Komisaris. Kemudian, untuk menjalankan fungsi pengawasan dan pengendalian Perseroan secara maksimal, Dewan Komisaris melakukan pembagian tugas kepada masing-masing anggota Dewan Komisaris sebagai berikut:

of the Company and make distribution and make division of duties.

As *primus inter pares*, the duty of the President Commissioner is to coordinate the activities of the Board of Commissioners. Then, to carry out the Company's supervisory and controlling functions to the fullest, the Board of Commissioners distributes the tasks to each member of the Board of Commissioners as follows:

Tabel Pembagian Tugas Dewan Komisaris

Table of Distribution of Duties of the Board of Commissioners

Nama / Name	Jabatan / Position	Uraian Tugas / Duties
Budi Wisakseno	Komisaris Utama/ Komisaris Independen President Commissioner/ Independent Commissioner Supervisor	- Melaksanakan tugas yang berkaitan dengan fungsi Dewan Komisaris sebagai organ Perseroan; / Performing duties related to the functions of the Board of Commissioners as the Company's organs; - Melakukan pengawasan secara umum atas kepengurusan Perseroan oleh Direksi dan Manajemen; / Conducting general supervision over the management of the Company performed by BOD and management staff; - Pengawasan atas kepengurusan Perseroan oleh Direksi dan Manajemen yang terkait dengan bidang Akuntansi dan Keuangan; / Supervising the Company's Accounting and Financial management performed by BOD and management staff; - Mewakili pelaksanaan hubungan organ Dewan Komisaris dengan pihak internal dan eksternal Perseroan; / Representing the relationship between the Board of Commissioners and internal as well as external parties of the Company; - Koordinator pelaksanaan tugas anggota Dewan Komisaris lainnya; / Coordinating duties of other members of Board of Commissioners; - Menunjuk anggota Komisaris untuk bertindak atas nama Dewan Komisaris; / Appointing a member of Board of Commissioners to act on behalf of Board of Commissioners; - Menetapkan pembagian tugas anggota Dewan Komisaris; dan / Distributing the duties of members of Board of Commissioners; and - Menetapkan tugas Sekretaris Dewan Komisaris. / Determining the duties of Board of Commissioners' Secretary.
Bambang Hermanto	Komisaris Commissioner	- Pelaksanaan tugas yang berkaitan dengan fungsi Dewan Komisaris sebagai organ Perseroan; / Fulfilling duties related to the functions of Board of Commissioners as an organ of the Company; - Pengawasan atas kepengurusan Perseroan oleh Direksi dan Manajemen yang terkait dengan bidang GCG, Manajemen Risiko, Sistem Pengendalian Intern dan Transportasi Budaya Kerja; / Supervising the management of the Company by the Board of Directors and Management, related to GCG, Risk Management, Internal Control System and Work Culture Transformation; - Pelaksanaan tugas lain yang disepakati oleh Dewan Komisaris. / Fulfilling other duties agreed by the Board of Commissioners

Masa Jabatan Dewan Komisaris

Masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana ditetapkan Anggaran Dasar Perusahaan adalah 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan. Dalam hal masa jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir dan RUPS belum menetapkan penggantinya, maka tugas-tugas Dewan Komisaris yang lowong tersebut dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pengisian jabatan Dewan Komisaris yang lowong untuk sementara. RUPS dapat memberhentikan Dewan Komisaris sewaktu-waktu dengan menyebutkan alasannya, demi kepentingan dan tujuan Perseroan.

Terms of Office of the Board of Commissioners

The terms of office of the Board of Commissioners as stipulated in the Company's Articles of Association is 5 (five) years and can be reappointed for 1 (one) terms of office. In the event that the terms of office of the Board of Commissioners ends while the GMS has yet determined the replacement, then the vacant duties shall be carried out in accordance with the provisions on the temporary vacant position of the Board of Commissioners. The GMS can dismiss the Board of Commissioners at any time by stating the reasons, for the interests and objectives of the Company.

Masa jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila:

1. Meninggal dunia;
2. Masa jabatannya berakhir;
3. Tidak lagi memenuhi persyaratan Perundang-undangan yang berlaku;
4. Diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS; dan
5. Mengundurkan diri.

Independensi Dewan Komisaris

Dewan Komisaris wajib menjaga independensinya sehingga dapat bertugas sebaik-baiknya untuk kepentingan Perseroan. Perseroan menetapkan beberapa ketentuan untuk menjaga independensi Dewan Komisaris di antaranya:

1. Selain Dewan Komisaris, pihak lain tidak diperkenankan campur tangan dalam kepengurusan Perseroan;
2. Dewan Komisaris harus dapat mengambil keputusan secara obyektif, tanpa benturan kepentingan dan bebas dari segala tekanan dari pihak manapun;
3. Direksi tidak diperkenankan melakukan aktivitas yang dapat mengganggu independensi Dewan Komisaris dalam mengurus Perseroan; dan
4. Dewan Komisaris wajib menandatangani Pakta Integritas sebagai bentuk komitmennya dalam melaksanakan kegiatan Perseroan yang dapat menimbulkan benturan kepentingan.

Pengawasan dan Rekomendasi Dewan Komisaris tahun 2018

Dewan Komisaris secara proaktif melakukan pengawasan dan memberikan masukan kepada Direksi. Pengawasan dilakukan secara langsung termasuk melakukan *monitoring* tindak lanjut atas rekomendasi dari Dewan Komisaris kepada Direksi, maupun melalui Komite.

Selama tahun 2018, Dewan Komisaris telah melakukan pengawasan dan *monitoring* terhadap:

1. Kinerja Perseroan bidang Keuangan bulanan, triwulanan dan semesteran.
2. Memberikan nasehat/saran untuk bidang underwriting, Investasi, Akuntansi & Keuangan, Organisasi & SDM, GCG, Manajemen Risiko dan Sistem Pengendalian Intern, Visi, Misi dan Budaya Kerja, TI dan lainnya (Reasuransi, Piutang, Aktiva Tetap, *Recoveries*).
3. Tindak lanjut atas laporan hasil pemeriksaan audit/ temuan auditor.
4. *Monitoring/evaluasi* Kinerja Kantor Cabang.

Terms of office of member of the Board of Commissioners ends when the said person:

1. Demised;
2. The term of office ended;
3. Failed to meet the requirements of applicable law;
4. Dismissed based on GMS decision; and
5. Resigned.

Independence of the Board of Commissioners

The Board of Commissioners shall stay independent in order to perform their duties at the best way possible for the interests of the Company. The Company stipulates several provisions to maintain the independence of the Board of Commissioners including:

1. In addition to the Board of Commissioners, no other party is permitted to interfere in the management of the Company;
2. The Board of Commissioners must be able to make decisions objectively, without conflicts of interest and free from any pressure from any party;
3. The Board of Directors is not permitted to carry out activities that could interfere with the independence of the Board of Commissioners in managing the Company; and
4. The Board of Commissioners must sign the Integrity Pact as a form of its commitment in carrying out the Company's activities which can lead to a conflict of interest.

Supervision and Recommendation of the Board of Commissioners in 2018

Proactively, the Board of Commissioners supervises and provides input to the Board of Directors. The supervisory function is carried out directly, among others by monitoring follow-up actions on recommendations from the Board of Commissioners to the Board of Directors, as well as through the Committee.

During 2018, the Board of Commissioners supervised and monitored:

1. The Company's monthly, quarterly and half yearly financial performance.
2. Providing advice for underwriting, investment, accounting & finance, organization & HR, GCG, Risk Management and Internal Control Systems, Vision, Mission and Corporate Culture, IT and others (Reinsurance, Accountable Receivables, Fixed Assets, *Recoveries*).
3. Follow-up on the audit report/auditor's findings.
4. Monitoring/evaluation of Branch Office Performance.

Dewan Komisaris juga telah menyampaikan beberapa rekomendasi yang disampaikan kepada Direksi melalui Rapat Direksi dengan Dewan Komisaris (Radikom) yang meliputi:

1. Memberikan pengarahan kepada Direksi mengenai RKAP 2018 dan memantau pencapaiannya;
2. Mengevaluasi dan memberikan pengarahan terkait kinerja keuangan perusahaan secara bulanan;
3. Memberi perhatian mengenai RUPS dan RUPS LB;
4. Mengevaluasi dan menyetujui keputusan Manajemen dan tindakan strategis yang diusulkan oleh Direksi;
5. Memantau penerapan manajemen risiko, memantau dan memperkuat kepatuhan;
6. Mengevaluasi tindak lanjut temuan audit internal dan eksternal; dan
7. Memantau pelaksanaan GCG serta evaluasi kinerja Direksi.

The Board of Commissioners has also submitted several recommendations from the Board of Directors through the Board of Directors and Board of Commissioners Meeting (Radikom) which includes:

1. Providing direction to the Board of Directors regarding the 2019 RKAP and monitoring its achievements;
2. Evaluating and providing guidance regarding the Company's financial performance on a monthly basis;
3. Paying attention to the GMS and EGMS;
4. Evaluating and giving approval on the Management's decisions and strategic actions proposed by the Board of Directors;
5. Monitoring the implementation of risk management, monitoring and strengthening the compliance;
6. Evaluating the follow-up of internal and external audit findings; and
7. Monitoring the implementation of GCG and evaluating the performance of the Board of Directors.



Rapat Dewan Komisaris

Selama tahun 2018, rapat Dewan Komisaris diselenggarakan sebanyak 12 kali dalam Rapat Direksi dan Dewan Komisaris (Radikom).

Rapat Dewan Komisaris dengan Direksi (RADIKOM)

Selain mengadakan rapat secara internal, Dewan Komisaris juga mengadakan rapat dengan Direksi atau Radikom yang menekankan pentingnya hubungan kerja yang baik antara Dewan Komisaris dengan Direksi. Hubungan kerja harmonis yang terbuka dan saling menghormati ini penting untuk mendukung efektivitas dan produktivitas kinerja Perseroan.

Rapat Dewan Komisaris dengan Direksi (Radikom) diadakan satu kali dalam satu bulan atau kapan saja bila diperlukan.

Sepanjang tahun 2018, Radikom telah diselenggarakan sebanyak 12 kali. Tabel Kehadiran Dewan Komisaris dan Direksi dalam Radikom dan agendanya disampaikan sebagai berikut:

Tabel kehadiran Rapat Dewan Komisaris-Direksi Tahun 2018

Nama / Name	Jabatan / Position	Jumlah Rapat / Number of Meeting	Kehadiran / Attendance	Persentase / Percentage
Budi Wisakseno	Komisaris Utama/Komisaris Independen Pengawas President Commissioner/Independent Commissioner Supervisor	12	12	100%
Bambang Hermanto	Komisaris / Commissioner	12	12	100%
Soegiharto	Direktur Utama / President Director	12	12	100%
Subagio Istiarso	Direktur Keuangan / Director of Finance	12	12	100%

Tabel Agenda Rapat Komisaris-Direksi Tahun 2018

No.	Waktu Rapat / Date	Agenda / Agenda	Realisasi / Realization
1	13 Februari 2018 / February 13, 2018	Pembahasan kinerja bulan Januari 2018 / Discussion of the Company performance of January 2018	Teralisasi / Realized
2	28 Maret 2018 / March 28, 2018	Pembahasan kinerja bulan Februari 2018 / Discussion of the Company performance of February 2018	Teralisasi / Realized
3	16 April 2018 / April 16, 2018	Pembahasan kinerja bulan Maret 2018 / Discussion of the Company performance of March 2018	Teralisasi / Realized
4	14 Mei 2018 / May 14, 2018	- Pembahasan kinerja bulan Februari-April 2018 - Persiapan RUPS 2017 - Discussion of the Company performance of February-April 2018 - Preparation of the GMS 2017	Teralisasi / Realized
5	26 Juni 2018 / June 26, 2018	- Pembahasan kinerja bulan Mei 2018 - Persiapan fit & proper test Direksi dan Komisaris - Discussion of the Company performance of May 2018 - Preparation of fit & proper test for Directors and Commissioners	Teralisasi / Realized
6	24 Juli 2018 / July 24, 2018	Pembahasan kinerja bulan Juni 2018 / Discussion of the Company performance of June 2018	Teralisasi / Realized

Meeting of the Board of Commissioners During 2018, the Board of Commissioners' convened 12 meetings of the Board of Directors and Board of Commissioners (Radikom).

Meeting of the Board of Commissioners and the Board of Directors (RADIKOM)

In addition to internal meetings, the Board of Commissioners also holds meetings with the Board of Directors (Radikom) emphasizing the importance of a fine working relationship between the Board of Commissioners and the Board of Directors. This open and respectful harmonious working relationship is important to support the effectiveness and productivity of the Company.

Meetings of the Board of Commissioners and Directors (Radikom) are held at least once a month or at any time whenever deemed necessary.

Throughout 2018, Radikom was held 12 times. The table of attendance of the Board of Commissioners and Directors in the Radikom and its agenda are presented as follows:

Table of attendance at the 2018 Board of Commissioners-Directors Meeting

Table of BOD Meeting Agenda in 2018

No.	Waktu Rapat / Date	Agenda / Agenda	Realisasi / Realization
7	24 Agustus 2018/ August 24, 2018	Pembahasan kinerja bulan Juli 2018 / Discussion of the Company performance of July 2018	Teralisasi / Realized
8	24 September 2018/ September 24, 2018	- Pembahasan kinerja bulan Agustus 2018 - Rencana dan strategi bidang SDI - Discussion of the Company performance of August 2018 - Plan and strategy on HR	Teralisasi / Realized
9	18 Oktober 2018/ October 18, 2018	- Pembahasan kinerja bulan September 2018 - Perkembangan TI yang akan diaplikasikan - Discussion of the Company performance of September 2018 - Discussion on IT will be applied	Teralisasi / Realized
10	15 November 2018/ November 15, 2018	- Pembahasan kinerja bulan Oktober 2018 - Proses Penyusunan RKAP 2019 - Discussion of the Company performance of October 2018 2019 RKAP preparation process	Teralisasi / Realized
11	3 Desember 2018/ December 3, 2018	- Laporan Kesehatan Perseroan sd November 2018 - The Company Health up until November 2018 Report	Teralisasi / Realized
12	18 Desember 2018/ December 18, 2018	- Pembahasan kinerja bulan November 2018 - Discussion of the Company performance of March 2018	Teralisasi / Realized

Arahan Dewan Komisaris Kepada Direksi

Sepanjang tahun 2018, Dewan Komisaris telah memberikan nasihat/masukan/arahan kepada Direksi terhadap 4 (empat) bidang.

Tabel Arahan Dewan Komisaris Tahun 2018

No	Bidang / Issue	Jumlah Arahan / Number of Direction
1	Underwriting / Underwriting	12 kali / times
2	Investasi / Investment	12 kali / times
3	Keuangan & Umum / Financial & General Affair	12 kali / times
4	Pengendalian / Control	12 kali / times

Directives from of the Board of Commissioners to the Board of Directors

Throughout 2018, the Board of Commissioners has provided advice/input/direction to the Board of Directors on 4 (four) issues.

Table of the Board of Commissioners' Direction for 2018

Program Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi Dewan Komisaris

Sepanjang tahun 2018, Perseroan mengikutsertakan Dewan Komisaris dalam beberapa pelatihan guna mengasah kemampuan dalam memberikan supervise atas pengelolaan Perseroan. Realisasi pelatihan Dewan Komisaris untuk pengembangan kompetensi Dewan Komisaris adalah sebesar Rp16,75 juta dengan rincian sebagai berikut:

Tabel Informasi Pelatihan dan Pengembangan

Nama Komisaris / Name of Commissioner	No	Pelatihan / Training	Waktu / Time	Penyelenggara / Organizer	Lokasi / Location	Biaya / Cost (Rp)
Budi Wisaksono	1	Uji Sertifikasi CRGP	Desember 2018 / December 2018	RAP Indonesia	Palembang	11.000.000
Sub Total						11.000.000
Bambang Hermanto	1	Konferensi Nasional Manajemen Risiko	Desember 2018 / December 2018	Lembaga Sertifikasi Profesi Manajemen Risiko (LSPMR)	Palembang	4.500.000
Sub Total						4.500.000
Total						15.500.000

Board of Commissioners Training and Competency Development Program

Throughout 2018, the Board of Commissioners attended several trainings to hone their skills in providing supervision over the management of the Company. The realization of the Board of Commissioners' training for the competency development the Board of Commissioners is Rp16.75 million with details as follows:

Table of Information on Training and Competency Development of the Board of Commissioners

Pengungkapan Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris

Dalam rangka menjalankan tugas pengawasan dan pemberian saran atas pengelolaan Perusahaan kepada Direksi, Dewan Komisaris mengacu kepada Pedoman Kerja Dewan Komisaris (*Board Charter*). Tujuan *Board Charter* adalah memberikan pedoman kepada Dewan Komisaris dan Direksi dalam memahami peraturan-peraturan yang terkait dengan tata kerja Dewan Komisaris dan Direksi. *Board Charter* Dewan Komisaris telah ditetapkan melalui Surat Keputusan Direksi Nomor: 055/KEP-DIR/XII/2018 pada 3 Desember 2018.

Isi Board Charter Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

- Bab I : Pendahuluan
- Bab II : Dewan Komisaris
- Bab III : Dewan Pengawas Syariah
- Bab IV : Direksi
- Bab V : Kegiatan Antara Organ Perusahaan

DIREKSI

Direksi merupakan organ Perseroan yang bertanggungjawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan dan tujuan Perseroan sesuai ketentuan Anggaran Dasar. Dalam melaksanakan tugas pengelolaan Perseroan, Direksi bertanggungjawab secara kolektif, sehingga dapat menghasilkan nilai tambah dan memastikan kesinambungan bisnis Perseroan. Masing-masing anggota Direksi melaksanakan tugas dan mengambil keputusan sesuai pembagian tugas dan wewenang yang diatur Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam melaksanakan tugasnya, Direksi bertanggung jawab kepada RUPS. Pertanggungjawaban Direksi kepada RUPS merupakan perwujudan akuntabilitas pengelolaan Perseroan dalam rangka pelaksanaan prinsip-prinsip GCG. Kinerja Direksi dievaluasi oleh Dewan Komisaris baik secara individual maupun kolektif berdasarkan unsur-unsur penilaian kinerja Direksi.

Pelaksanaan penilaian dilakukan pada tiap akhir periode tutup buku. Hasil penilaian kinerja Direksi oleh Dewan Komisaris disampaikan dalam RUPS.

Organizer Disclosure of the Board of Commissioners' Charter

In order to carry out the duties of supervision and giving advice on the management of the Company performed by the Board of Directors, the Board of Commissioners refers to the Guidelines of the Board of Commissioners (*Board Charter*). The purpose of the Board Charter is to provide guidance for the Board of Commissioners and the Board of Directors in understanding the regulations elated to the working procedures of the Board of Commissioners and the Board of Directors. The Board of Commissioners' Charter was determined through the BOD Decree Number: 055/KEP-DIR/XII/2018 on 3 December 2014.

The contents of the Board of Commissioners Board of Commissioners are as follows:

- Chapter I : Introduction
- Chapter II : Board of Commissioners
- Chapter III : Sharia Council
- Chapter IV : Directors
- Chapter V : Activity Between Company Organs

BOARD OF DIRECTORS

The Board of Directors is the Company's organ fully responsible for the management of the Company for the interests and the objectives of the Company in accordance with the Articles of Association. In carrying out the management tasks, the Board of Directors are collectively responsible, in order to generate added values and to ensure the Company's business continuity. Each member of the Board of Directors carries out his/her duties and makes decisions in accordance with the division of duties and authorities regulated in the Articles of Association and the applicable laws and regulations

In carrying out their duties, members of the Board of Directors answers directly to the GMS. The responsibility of the Board of Directors to the GMS is the realization of the accountability in managing the Company in the context of implementing the principles of GCG. The performance of the Board of Directors is evaluated by the Board of Commissioners both individually and collectively based on the criteria set for the Board of Directors' performance evaluation.

The assessment is carried out at the end of each book closing period. The result of the assessment of the Board of Directors performance by the Board of Commissioners is to be submitted at the GMS.

Komposisi Anggota Direksi

Komposisi Direksi Perseroan terdiri dari anggota-anggota yang memiliki kompetensi di bidang Asuransi, Keuangan serta Manajemen sehingga memungkinkan dilakukannya proses pengambilan putusan yang efektif, efisien dan segera. Berdasarkan akta notaris Hadijah, SH Nomor: 008/NOT/I/2018 tentang perubahan susunan pengurus perseroan, susunan Direksi PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah per 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

Tabel Komposisi Direksi Perseroan 2018

Nama / Name	Jabatan / Position	Dasar Pengangkatan / Basis of Appointment	Tanggal Pengangkatan / Date of Appointment
Sugiharto	Direktur Utama / President Director	Keputusan RUPS LB tanggal 22 Januari 2018 / Decision of the General Meeting of Shareholders on January 22, 2018	22 Januari 2018 / January 22, 2018
Subagio Istiarno	Direktur Keuangan / Director of Finance	Keputusan RUPS LB tanggal 22 Januari 2018. / Decision of the General Meeting of Shareholders on January 22, 2018	22 Januari 2018 / January 22, 2018

Pada saat penyampaian laporan tahunan ini, Komposisi Direksi Perseroan telah mengalami perubahan. Komposisi Direksi terakhir berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 17 Januari 2019 adalah sebagai berikut:

Nama / Name	Jabatan / Position	Dasar Pengangkatan / Basis of Appointment	Tanggal Pengangkatan / Date of Appointment
Soegiharto	Direktur Utama / President Director	Keputusan RUPS LB tanggal 22 Januari 2018 / Decision of the General Meeting of Shareholders on January 22, 2018	22 Januari 2018 / January 22, 2018
Subagio Istiarno	Direktur Keuangan / Director of Finance	Keputusan RUPS LB tanggal 22 Januari 2018. / Decision of the General Meeting of Shareholders on January 22, 2018	22 Januari 2018 / January 22, 2018
Supardi Najamuddin	Direktur Pemasaran / Director of Marketing	Keputusan RUPS LB tanggal 17 Januari 2019 / Decision of the General Meeting of Shareholders on January 17, 2019	17 Januari 2019 / January 17, 2019

Composition of the Board of Directors

The Board of Directors consists of members who have competencies in the fields of insurance, finance and management, so that they can make decisions effectively, efficiently and immediately. Based on the notarial deed of Hadijah, SH Number: 008/NOT/I/2018 concerning changes in the composition of the company management, the composition of the Directors of PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah as of December 31, 2018 is as follows:

Board of Directors Composition Table 2018

At the time of submission of this annual report, the Composition of the Board of Directors of the company has changed. The latest composition based on the Resolution of the Extraordinary General Meeting of Share holders dated January 17, 2019 are as follow:

Tugas dan Kewajiban Direksi

Direksi bertugas secara kolektif menjalankan segala tindakan yang berkaitan dengan pengelolaan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar Pengadilan tentang segala hal dan segala kejadian dengan pembatasan-pembatasan sebagaimana diatur dalam peraturan perundangundangan, Anggaran Dasar dan atau Keputusan RUPS.

Direksi dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya harus selalu:

1. Melaksanakan tugasnya dengan itikad baik untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan, serta memastikan agar Perseroan melaksanakan tanggung jawab sosialnya serta memperhatikan kepentingan dari berbagai Pemangku Kepentingan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Tunduk pada ketentuan peraturan Perundangundangan yang berlaku, Anggaran Dasar dan keputusan RUPS serta memastikan seluruh aktivitas Perseroan telah sesuai dengan ketentuan peraturan Perundangundangan yang berlaku, Anggaran Dasar dan keputusan RUPS;
3. Menerapkan GCG secara konsisten;
4. Mematuhi tata urutan peraturan internal Perseroan;
5. Bertindak selaku pimpinan dalam pengelolaan Perseroan;
6. Memelihara dan mengurus kekayaan Perseroan;
7. Bertanggung-jawab penuh dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan Perseroan dalam mencapai maksud dan tujuannya;
8. Memperhatikan masukan-masukan yang diberikan oleh Dewan Komisaris;
9. Melakukan segala tindakan dan perbuatan, baik mengenai pengelolaan maupun pemilikan kekayaan Perseroan serta mengikat Perseroan dengan pihak lain dan/atau pihak lain dengan Perseroan, dengan pembatasan tertentu;
10. Wajib menyelenggarakan dan menyimpan Daftar Khusus yang memuat keterangan mengenai kepemilikan saham masing-masing Direktur dan anggota Dewan Komisaris beserta keluarganya dalam Perseroan dan/atau pada perusahaan lain serta tanggal saham itu diperoleh;
11. Bertanggung-jawab penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya;

Duties and Obligations of the Board of Directors

In carrying out all actions relating to the management of the company, the Board of Directors must work collectively for the interests of the Company, in accordance with the purposes and objectives of the Company, and represent the Company inside and outside the Court regarding all matters and events related to the company, with restrictions regulated in legislation, Articles of Association and or GMS Decisions.

The Board of Directors in carrying out their duties and obligations must always:

1. Discharge their duties in good faith for the interests of the Company and in accordance with the purposes and objectives of the Company, and ensure that the Company carries out its social responsibilities and takes into account the interests of various Stakeholders in accordance with the provisions of legislation;
2. Comply with the applicable laws and regulations, Articles of Association and GMS decisions and ensure that all activities of the Company are in accordance with the applicable applicable laws and regulations, Articles of Association and decisions of the GMS;
3. Implement GCG consistently;
4. Comply with the order of the Company's internal regulations;
5. Act as the leader in managing the Company;
6. Maintain and manage the Company's assets;
7. Take full responsibility for carrying out their duties for the interests of the Company in fulfilling its purposes and achieving objectives;
8. Be receptive to inputs from the Board of Commissioners;
9. Carry out all actions, both regarding the management and ownership of the Company's assets and binding the Company to other parties and/or other parties with the Company, under certain restrictions;
10. Must make and keep Special Register containing information on share ownership of each Director and member of the Board of Commissioners and their families in the Company and/or other companies as well as the date the shares were obtained;
11. Personally responsible for the loss of the Company should the person concerned is guilty or is negligent in carrying out his duties;

12. Memelihara dan menyimpan di tempat kedudukan Perseroan Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus, Risalah RUPS, Risalah Rapat Dewan Komisaris dan Risalah Rapat Direksi, Laporan Tahunan dan dokumen keuangan Perseroan dan dokumen Perusahaan lainnya;
13. Memberikan laporan berkala menurut cara dan waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta laporan lainnya setiap kali diminta oleh Dewan Komisaris dan/ atau Pemegang Saham;
14. Memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan atau yang diminta anggota Dewan Komisaris dan para Pemegang Saham;
15. Anggota Direksi wajib mengungkapkan:
 - a. Kepemilikan sahamnya yang mencapai 5% (lima perseratus) atau lebih pada Perseroan dan/atau pada perusahaan lain yang berkedudukan di dalam dan di luar negeri; dan
 - b. Hubungan keuangan dan hubungan keluarga dengan Anggota.

Hak dan Kewajiban Direksi

Hak Direksi

1. Memperoleh cuti sesuai ketentuan yang berlaku;
2. Menerima gaji berikut fasilitas dan tunjangan lainnya termasuk santunan purna jabatan yang jumlahnya ditetapkan oleh RUPS atau Dewan Komisaris berdasarkan pelimpahan wewenang dari RUPS;
3. Apabila Perseroan mencapai tingkat keuntungan, maka Direksi dapat menerima insentif sebagai imbalan atas prestasi kerjanya yang besarnya ditetapkan oleh RUPS;
4. Mendapatkan sarana dan fasilitas Perseroan serta santunan purna jabatan sesuai dengan hasil penetapan RUPS yang penyediaannya disesuaikan dengan kondisi keuangan Perseroan, asas kepatutan dan kewajiban serta tidak bertentangan dengan peraturan Perundangundangan yang berlaku. Penjabaran tentang sarana dan fasilitas Perseroan dituangkan lebih lanjut dalam Keputusan RUPS;
5. Memperoleh salinan risalah Rapat Direksi, baik yang bersangkutan hadir maupun tidak hadir dalam Rapat Direksi tersebut.

Kewenangan Direksi

1. Menetapkan kebijakan kepengurusan Perseroan;
2. Mengatur penyerahan kekuasaan Direksi kepada seorang atau beberapa orang anggota Direksi untuk mengambil keputusan atas nama Direksi atau mewakili Perseroan di dalam dan di luar pengadilan.

12. Maintain and keep the List of Shareholders, Special Register, Minutes of GMS, Minutes of Board of Commissioners Meetings and Directors' Meetings, Annual Reports and Company financial documents and other Company documents at the Company's domicile;
13. Provide periodic reports in a manner and time in accordance with applicable regulations, as well as other reports, whenever requested by the Board of Commissioners and/ or Shareholders;
14. Provide explanation on everything requested by members of the Board of Commissioners and Shareholders;
15. Members of the Board of Directors must disclose:
 - a. Ownership of shares that reaches 5% (five percent) or more in the Company and/or other companies domiciled at home and abroad; and
 - b. Financial relationships and family relationships with Members.

Rights and Obligations of the Board of Directors

Right of the Board of Directors

1. Leave in accordance with the applicable provisions;
2. Receive salaries and other facilities and benefits including post-service compensation, while the amount of which is determined by the GMS or the Board of Commissioners based on delegation of authority from the GMS;
3. In the event the Company is able to generate profit, then the Board of Directors is entitled to receive incentives in return for their achievements, with the amount set by the General Meeting of Shareholders;
4. Obtain facilities as well as full-time compensation from the company, in accordance with the resolution of the GMS, with the provision of which is adjusted to the financial condition of the Company, propriety and fairness and should not be in conflict with the prevailing laws and regulations. The description of the Company's facilities is further elaborated in the GMS Decision;
5. Obtain copy of the minutes of the Board of Directors' Meeting, whether the person is present or not present at the Board of Directors Meeting.

Authority of the Board of Directors

1. Setting the management policy of the Company;
2. Delegating the authority of the Board of Directors to one or several members of the Board of Directors to make decisions on behalf of the Board of Directors or represent the Company inside and outside the court.

- | | |
|---|---|
| <ol style="list-style-type: none"> 3. Mengatur penyerahan kekuasaan Direksi kepada seorang atau beberapa orang pekerja Perseroan baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama atau kepada orang lain, untuk mewakili Perseroan di dalam dan di luar pengadilan. 4. Mengatur ketentuan-ketentuan tentang kepegawaian Perseroan termasuk penetapan gaji, pensiun atau jaminan hari tua dan penghasilan lain bagi pekerja Perseroan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan ketentuan penetapan gaji, pensiun atau jaminan hari tua dan penghasilan lain bagi pekerja yang melampaui kewajiban yang ditetapkan peraturan perundang-undangan, harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari RUPS. 5. Mengangkat dan memberhentikan pekerja Perseroan berdasarkan peraturan kepegawaian Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 6. Mengangkat dan memberhentikan Sekretaris Perusahaan; dan 7. Melakukan segala tindakan dan perbuatan lainnya mengenai pengelolaan maupun pemilikan kekayaan Perseroan, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan atau pihak lain dengan Perseroan, serta mewakili perseroan di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan segala kejadian, dengan pembatasan-pembatasan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar dan/atau Keputusan RUPS. | <ol style="list-style-type: none"> 3. Delegating the authority of the Board of Directors to one or several employees of the Company, individually or jointly, or to other person/s, to represent the Company inside and outside the court. 4. Determining the provisions regarding the Company's employment including stipulation of salaries, pensions or post-employment benefits and other benefits for employees of the Company, based on the applicable laws and regulations, under the condition that in the event the stipulation of salaries, pensions or post-employment benefits and other income for workers exceeding the provision stipulated by legislation, prior approval must be obtained from the GMS. 5. To appoint and dismiss the Company's employees based on the Company's personnel regulations and applicable laws and regulations; 6. To appoint and dismiss the Corporate Secretary; and 7. Conducting all actions and other actions regarding the management and ownership of the Company's assets, binding the Company with other parties and/ or other parties with the Company, and representing the company inside and outside the court regarding all matters and events, with restrictions as stipulated in legislation, Articles of Association and/or GMS Decisions. |
|---|---|

Kewajiban Direksi

1. Mengusahakan dan menjamin terlaksananya usaha dan kegiatan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan serta kegiatan usahanya;
2. Menyiapkan pada waktunya Rencana Jangka Panjang Perusahaan, Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan, dan perubahannya serta menyampaikannya kepada Dewan Komisaris dan Pemegang Saham untuk mendapatkan pengesahan RUPS;
3. Memberikan penjelasan kepada RUPS mengenai Rencana Jangka Panjang Perusahaan dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan;
4. Membuat Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus, Risalah RUPS, dan Risalah Rapat Direksi;
5. Membuat Laporan Tahunan sebagai wujud pertanggungjawaban pengelolaan Perseroan, serta dokumen keuangan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang tentang Dokumen Perusahaan;
6. Menyusun Laporan Keuangan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan dan menyerahkan kepada Akuntan Publik untuk diaudit;

Obligation of the Board of Directors

1. Strive to ensure the implementation of the business and activities of the Company, in accordance with the purpose and objectives and business activities;
2. Preparing the Company's Long-Term Plan, Corporate Work Plan and Budget, along with the amendments to be submitted to the Board of Commissioners and Shareholders in timely manner to obtain the approval of the GMS;
3. Providing explanation to the GMS regarding the Company's Long-Term Plan and the Company's Work Plan and Budget;
4. Preparing List of Shareholders, Special Register, Minutes of GMS, and Minutes of Directors' Meetings;
5. Preparing Annual Reports as manifestation of accountability for managing the Company, as well as the Company's financial documents as referred to in the Law concerning Company Documents;
6. Preparing Financial Statements based on Financial Accounting Standards to be submitted to Public Accountant for auditing;

7. Menyampaikan Laporan Tahunan termasuk Laporan Keuangan kepada RUPS untuk disetujui dan disahkan serta laporan mengenai hak-hak Perseroan yang tidak tercatat dalam pembukuan antara lain sebagai akibat penghapusan piutang;
8. Memberikan penjelasan kepada RUPS mengenai Laporan Tahunan;
9. Menyampaikan Neraca dan Laporan Laba Rugi yang telah disahkan oleh RUPS kepada Menteri yang membidangi Hukum dan HAM sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
10. Menyampaikan laporan perubahan susunan Pemegang Saham, Direksi dan Dewan Komisaris kepada Menteri yang membidangi Hukum dan HAM;
11. Memelihara Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus, Risalah RUPS, Risalah Rapat Dewan Komisaris dan Risalah Rapat Direksi, Laporan Tahunan dan dokumen keuangan Perseroan;
12. Menyimpan di tempat kedudukan Perseroan Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus, Risalah RUPS, Risalah Rapat Dewan Komisaris dan Risalah Rapat Direksi, Laporan Tahunan dan dokumen keuangan Perseroan serta dokumen perseroan lainnya;
13. Menyusun sistem akuntansi sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan dan berdasarkan prinsip-prinsip pengendalian intern, terutama fungsi pengurusan, pencatatan, penyimpanan, dan pengawasan;
14. Memberikan laporan berkala menurut cara dan waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta laporan lainnya setiap kali diminta oleh Dewan Komisaris dan atau Pemegang Saham;
15. Menyiapkan susunan organisasi Perseroan lengkap dengan perincian dan tugasnya;
16. Memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan atau yang diminta anggota Dewan Komisaris dan para Pemegang Saham;
17. Menyusun dan menetapkan *blue print* organisasi Perseroan; dan
18. Menjalankan kewajiban-kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar dan yang ditetapkan oleh RUPS berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Kewenangan Direksi yang harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris

1. Mengagunkan aktiva tetap untuk penarikan kredit jangka pendek;

7. Submitting the Annual Report including the Financial Statement to the GMS to be approved and ratified, as well as the report on the rights of the Company which is not recorded in the book, among others, as a result of the write-off of accounts receivable;
8. Providing explanation to the Annual General Meeting of Shareholders;
9. Submitting Balance Sheets and Income Statements which have been approved by the GMS to the Minister of Law and Human Rights in accordance with the provisions of laws and regulations;
10. Submitting reports of changes in the composition of Shareholders, the Board of Directors and the Board of Commissioners to the Minister of Law and Human Rights;
11. Keeping List of Shareholders, Special Register, Minutes of GMS, Minutes of Board of Commissioners' Meetings and Minutes of Board of Directors Meetings, Annual Reports and Company financial documents;
12. Keeping at the Company's place the list of Shareholders, Special Register, Minutes of GMS, Minutes of Board of Commissioners Meetings and Minutes of Board of Directors Meetings, Annual Reports and Company financial documents and other corporate documents;
13. Developing an accounting system that is in accordance with Financial Accounting Standards and based on the principles of internal control, especially the functions of management, recording, storage, and supervision;
14. Providing reports periodically in a manner and time in accordance with applicable regulations, as well as other reports whenever requested by the Board of Commissioners and or Shareholders;
15. Preparing the structure of organization of the Company complete with details and duties;
16. Providing explanation of everything that is asked or requested by members of the Board of Commissioners and Shareholders;
17. Preparing and determining the blue print of the Company's organization; and
18. Carrying out other obligations in accordance with the provisions stipulated in the Articles of Association and stipulated by the GMS based on laws and regulations.

Board of Directors Authority that must obtain written approval from the Board of Commissioners:

1. Pledging fixed assets for short-term loan;

2. Mengadakan kerjasama dengan badan usaha atau pihak lain berupa kerja sama lisensi, kontrak manajemen, menyewakan aset, Kerja Sarna Operasi (KSO), Bangun Guna Serah (*Build Operate Transfer/BOT*), Bangun Milik Serah (*Build Own Transfer/BOWT*), Bangun Serah Guna (*Build Transfer Operate/BTO*) dan kerja sama lainnya dengan nilai atau jangka waktu tertentu yang ditetapkan oleh RUPS;
3. Menerima atau memberikan pinjaman jangka menengah/ panjang, kecuali pinjaman (utang atau piutang) yang timbul karena transaksi bisnis, dan pinjaman yang diberikan kepada anak perusahaan dengan ketentuan pinjaman kepada anak perusahaan dilaporkan kepada Dewan Komisaris;
4. Menghapuskan dari pembukuan piutang macet dan persediaan barang mati;
5. Melepaskan aktiva tetap bergerak dengan umur ekonomis yang lazim berlaku dalam industri pada umumnya sampai dengan 5 (lima) tahun; dan
6. Menetapkan struktur organisasi 1 (satu) tingkat di bawah Direksi.

Kewenangan yang hanya dapat dilakukan oleh Direksi setelah mendapat tanggapan tertulis dari Dewan Komisaris dan persetujuan dari RUPS:

1. Mengagunkan aktiva tetap untuk penarikan kredit jangka menengah/panjang;
2. Melakukan penyertaan modal pada perseroan lain;
3. Mendirikan anak perusahaan dan atau perusahaan patungan;
4. Melepaskan penyertaan modal pada anak perusahaan dan/ atau perusahaan patungan;
5. Melakukan penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan, dan pembubaran anak perusahaan dan atau perusahaan patungan;
6. Mengikat Perseroan sebagai penjamin (*borg* atau *avallst*), kecuali pemberian penjaminan yang merupakan pelaksanaan kegiatan usaha Perseroan;
7. Mengadakan kerja sama dengan badan usaha atau pihak lain berupa kerja sama lisensi, kontrak manajemen, menyewakan aset, Kerja Sarna Operasi (KSO), Bangun Guna Serah (*Build Operate Transfer/BOT*), Bangun Milik Serah (*Build Own Transfer/BOWT*), Bangun Serah Guna (*Build Transfer Operate/BTO*) dan kerja sama lainnya dengan nilai atau jangka waktu melebihi penetapan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 8 huruf b Pasal mengenai kewajiban Direksi dalam Anggaran Dasar Perusahaan;
8. Tidak menagih lagi piutang macet yang telah dihapusbukukan;

2. Conducting cooperation with other business entities or parties in the form of licensing, management contracts, leasing assets, Build Operate Transfer (BOT), Build Own Transfer (BOWT), Build Transfer Operate (BTO) and other cooperation with certain value or period determined by the GMS;
3. Accepting or providing medium/long term loans, except loans (payables or accounts receivable) arising from business transactions, and loans provided to subsidiaries as long as such loans were reported to the Board of Commissioners;
4. Writing off non-performing receivables and inventories from bookkeeping;
5. Disposing movable fixed assets according to the economic age generally applicable in the industry, namely up to 5 (five) years; and
6. Determining the organizational structure 1 (one) level below the Board of Directors.

The authority that only the Board of Directors has upon receiving written response from the Board of Commissioners and approval from the GMS:

1. Pledging fixed assets for medium/long term loans;
2. Placing equity participation in other company;
3. Establishing subsidiary and or joint venture company;
4. Releasing capital participation in subsidiaries and/or joint ventures;
5. Performing merger, consolidation, acquisition, separation and dissolution of subsidiaries and or joint ventures;
6. Binding the Company as guarantor (*borg* or *avalist*), except that such provision of guarantees are the implementation of the Company's business activities;
7. Entering into collaboration agreement with other business entities or other parties in the form of license, management contracts, leasing assets, Build Operate Transfer (BOT), Build Own Transfer (BOWT), Build Transfer Operate (BTO) and other kind of collaboration with a value or period exceeding the limit set by the GMS as referred to in paragraph 8 letter b Article concerning the obligations of the Board of Directors in the Articles of Association of the Company;
8. No to collect non-performing payables that have been written off;

9. Melepaskan dan menghapuskan aktiva tetap Perseroan dengan umur ekonomis yang lazim berlaku dalam industri pada umumnya lebih dari 5 (lima) tahun;
10. Menetapkan *blue print* organisasi Perseroan;
11. Menetapkan dan merubah logo Perseroan;
12. Melakukan tindakan-tindakan lain dan tindakan yang belum ditetapkan dalam Rencana Kerja Dan Anggaran Perusahaan;
13. Membentuk yayasan, organisasi dan atau perkumpulan baik yang berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan Perseroan yang dapat berdampak bagi Perseroan;
14. Pembebanan biaya Perseroan yang bersifat tetap dan rutin untuk yayasan, organisasi dan/atau perkumpulan baik yang berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan Perseroan; dan
15. Pengusulan wakil Perseroan untuk menjadi calon anggota Direksi dan Dewan Komisaris pada perusahaan patungan dan atau anak perusahaan yang memberikan kontribusi signifikan kepada Perseroan dan atau bernilai strategis yang ditetapkan RUPS.

9. Disposing and writing off the Company's fixed assets which has a generally prevailing economical age in the industry of more than 5 (five) years;
10. Setting the blue print of the organization of the Company;
11. Determining and changing the Company logo;
12. Carrying out other actions not specified in the Company's Work Plan and Budget;
13. Establishing a foundation, organization and/or association that is directly or indirectly related to the Company which can have an impact on the Company;
14. Charging fixed and routine expenses to the Company for funding the foundations, organizations and/or associations that are directly or indirectly related to the Company; and
15. Proposing representatives of the Company to become candidates for members of the Board of Directors and Board of Commissioners in joint ventures and/ or subsidiaries which has significant contributions to the Company and/or having strategic value as determined by the GMS.

Ruang Lingkup Tugas dan Tanggung Jawab Masing-masing Direksi

Pembagian tugas masing-masing Direksi dilakukan guna menjamin pelaksanaan dan kesinambungan pencapaian sasaran Perseroan pada masa mendatang secara lebih sistematis efisien dan efektif, sebagai berikut:

Scope of Duties and Responsibilities of Each Member of the Board of Directors

Aimed to ensure a more systematic, efficient and effective efforts on achieving the Company's target in the future, the distribution of duties between members of the Board of Directors are as follows:

Tabel Pembagian Tugas Direksi 2018

Table of the Division of Duties of the Board of Directors in 2018

No.	Nama / Name	Penyelenggara / Position	Uraian Tugas / Job Description
1	Sugiharto	Direktur Utama / President Director	Memiliki tugas dan wewenang untuk memimpin dan mengkoordinasikan semua kegiatan Direksi dalam melakukan pengelolaan dan pengurusan Perseroan, membawahi Satuan Pengawasan Intern (SPI), Sekretaris Perusahaan, Manajemen Risiko, Kepatuhan & GCG. / In charge of and is authorized to lead and coordinate all activities of the Board of Directors in managing the Company, in charge of the Internal Audit Unit (SPI), Corporate Secretary, Risk Management, Compliance & GCG.
2	Subagio Istiarno	Direktur Keuangan / Director of Finance	- Melaksanakan pengelolaan di bidang keuangan dan akuntansi, pengusahaan modal, perencanaan dan pengembangan sumber-sumber pendapatan serta pembelanjaan dan kekayaan Perseroan; / Performing financial and accounting management, capital raising, planning and development of the Company's sources of income and expenditure, and managing assets; - Melakukan koordinasi dengan Unit Bisnis terkait fungsinya; / Coordinating with the Business Units, in accordance with its functions; - Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Direktur Utama; / Performing other tasks given by the President Director; - Pengelolaan sumber daya manusia / Managing human resources.
3	Supardi Najamuddin	Direktur Pemasaran / Director of Marketing	- Melaksanakan pengelolaan di bidang pemasaran sampai dengan pengelolaan produksi serta koordinasi dan pembinaan/penilaian kinerja Divisi yang ada dibawahnya; / Performing management in the marketing up to the production, and coordinating and coaching/assessing the performance of the Divisions under it; - Melakukan kajian pengembangan bisnis; / Conducting business development studies; - Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Direktur Utama. / Performing other tasks given by the President Director.

*) Per Desember 2018, Supardi Najamuddin menjabat sebagai SEVP. Beliau diangkat sebagai Direktur Pemasaran Perseroan pada tanggal 17 Januari 2019 / As of December 2018, Supardi Najamuddin served as SEVP. He was appointed as the Company's Marketing Director as of the 17th January 2019.

Masa Jabatan Direksi

Masa jabatan Direksi Perseroan sesuai Anggaran Dasar Perusahaan adalah 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan. Dalam hal masa jabatan anggota Direksi berakhir dan RUPS belum dapat menetapkan penggantinya, maka tugas-tugas anggota Direksi yang lowong tersebut dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pengisian jabatan anggota Direksi yang lowong. Namun demikian RUPS dapat memberhentikan para anggota Direksi sewaktu-waktu dengan menyebutkan alasannya, demi kepentingan dan tujuan Perseroan. Masa jabatan anggota Direksi berakhir apabila:

1. Meninggal dunia;
2. Masa jabatannya berakhir;
3. Tidak lagi memenuhi persyaratan Perundang-undangan yang berlaku;
4. Diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS; dan
5. Mengundurkan diri.

Independensi (Kemandirian) Direksi

Direksi Perseroan wajib menjaga independensinya sehingga dapat melaksanakan tugas-tugas yang dipercayakan kepadanya secara optimal. Dalam menjalankan tugastugasnya, Direksi tidak boleh terpengaruh tekanan dari pihak manapun dan wajib bertindak seoptimal mungkin demi kepentingan Perseroan. Untuk menjaga independensi, Perseroan menetapkan ketentuan mengenai independensi Direksi sebagai berikut:

1. Selain Direksi, pihak lain manapun tidak diperkenankan melakukan atau campur tangan dalam kepemimpinan Perseroan;
2. Direksi harus dapat mengambil keputusan secara obyektif, tanpa benturan kepentingan dan bebas dari segala tekanan dari pihak manapun;
3. Direktur dilarang melakukan aktivitas yang dapat mengganggu independensinya dalam mengurus Perseroan; dan
4. Menandatangani Pakta Integritas sebagai bentuk komitmen Direksi dalam melaksanakan kegiatan Perseroan yang dapat menimbulkan benturan kepentingan.

Hubungan Keuangan dan Hubungan Keluarga Anggota Direksi

Anggota Direksi beserta keluarganya tidak memiliki saham pada korporasi yang terafiliasi dengan PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah. Seluruh anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Direksi lainnya atau dengan anggota Dewan Komisaris serta tidak memiliki hubungan keluarga

The Terms of Office of the Board of Directors

Based on the Company's Articles of Association, the term of office of the Board of Directors is 5 (five) years and can be reappointed for 1 (one) term of office. In the event that the term of office of members of the Board of Directors ends and the GMS has yet determined a replacement, then the duties of the vacant members of the Board of Directors should be carried out in accordance with the provisions for filling in vacant members of the Board of Directors. However, the GMS has the rights to dismiss members of the Board of Directors at any time by stating the reasons, for the interests and objectives of the Company. The term of office of members of the Board of Directors ends if the said person:

1. Departed;
2. The term of office ended;
3. No longer meet the requirements of applicable law;
4. Dismissed based on GMS decision; and
5. Resigned.

Independence of the Board of Directors

Members of the Board of Directors shall maintain their independence in order to be able to carry out the tasks entrusted to them optimally. In carrying out their duties, the Board of Directors shall not be affected by any pressure from any party and shall act optimally for the benefit of the Company. To maintain the independence of the Board, the Company establishes provisions regarding the independence of the Board of Directors as follows:

1. Besides member of the Board of Directors, no other party is permitted to conduct or interfere in the management of the Company;
2. The Board of Directors must be able to make decisions objectively, without any conflict of interest and free from any pressure from any party;
3. The Board of Directors is prohibited from carrying out activities that may may affect his/her ability to act independently in managing the Company.
4. Sign the Integrity Pact as a form of commitment of the Board of Directors in carrying out the Company's activities which can lead to conflicts of interest.

Financial and Family Relationship of the Board of Directors

Members of the Board of Directors and their families have no shares in companies affiliated with PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah. All members of the Board of Directors have no family relationship up to third degree, include vertical as well as horizontal relationships, or relationship by marriage, with

sedarah sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun garis kesamping atau hubungan semenda. Dengan demikian, Direksi dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara independen, mandiri serta tidak memiliki benturan kepentingan antara kepentingan pribadi, keluarga dan saudara, jabatan lain atau golongan dengan kepentingan Perusahaan.

Rapat Direksi

Rapat Direksi wajib diselenggarakan secara berkala, atau atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris, atau atas permintaan dari satu orang atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara. Sepanjang tahun 2018, Direksi telah menyelenggarakan Rapat sebanyak 19 (sembilan belas) kali. Adapun tingkat kehadiran masing-masing anggota Direksi dan agenda rapat adalah sebagai berikut:

other members of the Board of Directors or with members of the Board of Commissioners. Therefore, the Board of Directors can carry out their duties and responsibilities independently without any conflict of interest between the interest of personal, family and relatives, of other positions or groups with the interests of the Company.

Board of Directors Meetings

Board of Directors meetings shall be held periodically, or upon written request from one or more members of the Board of Commissioners, or upon request from one or more shareholders with voting rights. Throughout 2018, the Board of Directors convened 19 (nineteen) meetings. The attendance level of each member of the Board of Directors and meeting agenda are as follows:

Tabel Tingkat Kehadiran Rapat Direksi 2018

Table of Attendance of the Board of Directors in 2018

No	Nama / Name	Jabatan / Position	Kehadiran / Attendance	Persentase / Percentage
1	Sugiharto	Direktur Utama / President Director	19	100%
2	Subagio Istiarno	Direktur Keuangan / Director of Finance	19	100%
3	Supardi Najamuddin*	Direktur Pemasaran / Director of Marketing	19	100%

*) Per Desember 2018, Supardi Najamuddin menjabat sebagai SEVP. Beliau diangkat sebagai Direktur Pemasaran Perseroan per tanggal 17 Januari 2019 / As of December 2018, Supardi Najamuddin served as SEVP. He was appointed as the Company's Marketing Director as of the 17th January 2019

Adapun agenda rapat Direksi di 2018 adalah sebagai berikut:

The Board of Directors meeting in 2018 is as follows:

Tabel Agenda Rapat Direksi 2018

Table of BOD Meeting Agenda in 2018

No.	Waktu / Date	Agenda	Realisasi / Realization
1	9 Januari 2018 / January 9, 2018	- Laporan keuangan 2017 - Persiapan penyusunan laporan tahunan 2017 2017 financial statements - Preparation of 2017 annual reports	Terealisasi / Realized
2	16 Januari 2018 / January 16, 2018	- Klasifikasi kantor cabang & KPS - Rencana Raker I tahun 2018 - Classification of branch offices & marketing offices 2018 Work Meeting Plan	Terealisasi / Realized
3	24 Januari 2018 / January 24, 2018	- Masa kerja DPS - Job grading - DPS work period - Job grading	Terealisasi / Realized
4	31 Januari 2018 / January 31, 2018	- Support program ICMI - Persiapan raker - ICMI program support - Preparation of work meetings	Terealisasi / Realized
5	7 Februari 2018 / February 7, 2018	- Pembuatan milestone Perseroan - Gathering dengan agen - Making Company milestones - Gathering with agents	Terealisasi / Realized
6	5 Maret 2018 / March 5, 2018	- Remunerasi - Peningkatan laba Perseroan - Remuneration - Increasing the Company's profit strategy	Terealisasi / Realized

No.	Waktu / Date	Agenda	Realisasi / Realization
7	13 Maret 2018 / March 13, 2018	- Laporan tata kelola ke OJK - Rencana event di 2018 - Governance report to OJK - Planned event in 2018	Terealisasi / Realized
8	2 April 2018 / April 2, 2018	- Promosi jabatan - Kinerja cabang - Job promotions - Branch performance	Terealisasi / Realized
9	30 April 2018 / April 30, 2018	- Penguatan divisi pemasaran - Annual report - Strengthening the marketing division - Annual report	Terealisasi / Realized
10	15 Mei 2018 / May 15, 2018	- Persiapan RUPS - Launching logo JPAS - GMS preparation - Launching the JPAS logo	Terealisasi / Realized
11	22 Mei 2018 / May 22, 2018	- Evaluasi KPS - Masterplan TI - Evaluate the marketing office - IT Master Plan	Terealisasi / Realized
12	30 Mei 2018 / May 30, 2018	- Progress KPI - Progress RJPP - KPI Progress - Progress of the Company's Long Term Plan	Terealisasi / Realized
13	29 Juni 2018 / June 29, 2018	- Reasuransi 2018 - Progress core system - Reinsurance 2018 - Core system progress	Terealisasi / Realized
14	1 Agustus 2018 / August 1, 2018	Progress Mobile Application untuk Bonding dan biayanya / the progress of Mobile Application for Bonding and it's fees	Terealisasi / Realized
15	14 Agustus 2018 / August 14, 2018	Evaluasi semester I triwulan ke-2 / Evaluation of semester 1 of the 2nd quarter	Terealisasi / Realized
16	21 Agustus 2018 / August 21, 2018	Flow pengajuan klaim dari departemen ta'widh / Flow of claim submission from the ta'widh department	Terealisasi / Realized
17	2 Oktober 2018 / October 2, 2018	Rencana pembentukan koperasi pegawai Perseroan / Plans for the formation of cooperative for the Company's employees	Terealisasi / Realized
18	8 Oktober 2018 / October 8, 2018	Persiapan rapat evaluasi anak perusahaan / Preparation of subsidiary evaluation meetings	Terealisasi / Realized
19	24 Oktober 2018 / October 24, 2018	Laporan audit KAP / Audit reports of public accounting firms	Terealisasi / Realized

Pelatihan Direksi

Selama 2018, anggota Direksi Perseroan telah mengikuti beberapa pelatihan dalam menunjang tugas dan tanggung jawabnya mengelola Perseroan. Pelatihan yang diikuti sebagai berikut:

Board of Directors Training

During 2018, members of the Company's Board of Directors participated in several trainings to support their duties and responsibilities in managing the Company. The training is followed as follows:

Tabel Pelatihan Direksi 2018

Table of Training for the Board of Directors 2018

Nama Direktur / Director Name	No	Pelatihan / Training	Waktu / Date	Penyelenggara / Organizer	Lokasi / Location	Biaya / Fee
Soegiharto	1	Executive CRGP Forum & Dinner Gathering	Agustus 2018 / August 2018	Lembaga Sertifikasi Profesi Manajemen Risiko (LSPMR)	Jakarta	450.000
	2	Risk Beyond 2018 International Conference	Desember 2018 / December 2018	CRMS Indonesia	Yogyakarta	8.750.000
Subagio Istiarno	1	Seminar Eksekutif BUMN "Directorship Program" / BUMN Executive Seminar "Directorship Program"	Juli 2018 / July 2018	IPC Corporate University	Bogor	8.900.000
	2	Uji Sertifikasi CRGP / CRGP Certification Test	Desember 2018 / December 2018	RAP Indonesia	Palembang	11.000.000
Total						29.100.000

REMUNERASI DEWAN KOMISARIS, DAN DIREKSI SERTA DPS

Remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi dilakukan dengan basis formula yang ditetapkan oleh RUPS serta telah melalui kajian oleh Dewan Komisaris melalui pendalaman yang dilakukan oleh Pemegang Saham.

Prosedur Remunerasi Direksi

Pada tahun 2018, prosedur dan penetapan remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi dilakukan berdasarkan Pasal 96 ayat (1) Undang-undang Perseroan Terbatas No. 40 tahun 2007 yang mengatur besarnya gaji dan tunjangan Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS. Bentuk Honorarium, Tunjangan dan Fasilitas, serta komponen lain yang termasuk di dalam komponen penghasilan mengacu pada ketentuan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor: Per-02/ MBU/06/2016 tanggal 20 Juni 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor: Per-04/ MBU/2014 tanggal 10 Maret 2014 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas BUMN dan juga tertuang dalam Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor: Per-04/MBU/2014 tanggal 10 Maret 2014 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas BUMN.

Penetapan remunerasi Direksi terdiri dari beberapa komponen seperti:

1. Honorarium
2. Tunjangan
3. Fasilitas
4. Tantiem/insentif kinerja.

REMUNERATION OF THE BOARD OF COMMISSIONERS, THE BOARD OF DIRECTORS AND SSB

Remuneration for members of the Board of Commissioners and Board of Directors is carried out on the basis of the formula stipulated by the GMS and reviewed by the Board of Commissioners through indepth review by the Shareholders.

Board of Directors' Remuneration Procedure

In 2018, the procedures for the determination of the remuneration of the Board of Commissioners and Directors are carried out based on the Article 96 paragraph (1) of the Limited Liability Company Law No. 40 of 2007 which regulates the amount of salaries and allowances of the Board of Directors determined based on the resolution of the GMS. Honorarium, Allowances and Facilities, as well as other components included in the income component, refer to the provisions set forth in the State Minister of State Regulation Number: Per-02/ MBU/06/2016 dated June 20, 2016 concerning Amendment to Regulation of the Minister of BUMN State Number: Per-04/ MBU/2014 dated March 10, 2014 concerning Guidelines for Determining the Income of Directors, Board of Commissioners, and BUMN Supervisory Board and also contained in State Minister of BUMN Regulation Number: Per-04/MBU/2014 dated March 10, 2014 concerning Guidelines for Determining Directors' Income, Board of Commissioners, and BUMN Supervisory Board.

Determination of remuneration for the Board of Directors consists of several components such as:

1. Honorarium
2. Allowances
3. Facilities
4. Tantiem/performance incentives.

Indikator Kinerja

Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi mengacu pada indikator-indikator sebagai berikut:

1. Remunerasi diberikan dalam hal Perseroan memperoleh keuntungan dalam tahun buku yang bersangkutan;
2. Remunerasi diberikan dengan mengacu pada perkembangan bisnis penjaminan;
3. Remunerasi diberikan melalui hasil pengukuran kinerja Dewan Komisaris dan Direksi yang sesuai dengan tugas dan tanggung jawab;
4. Kinerja keuangan dan pencapaian *Key Performance Indicator (KPI)* Perseroan.
5. Prestasi kerja individu;
6. Kewajaran dengan peer Perseroan lainnya;
7. Pertimbangan sasaran dan strategi jangka panjang Perseroan;
8. Besaran remunerasi yang diterima adalah:
 - a. Direktur Utama 100%.
 - b. Anggota Direksi 90% dari Direktur Utama
 - c. Komisaris Utama 45% dari remunerasi Direktur Utama.
 - d. Anggota Dewan Komisaris 90% dari remunerasi Komisaris Utama.

Struktur Remunerasi Yang Menunjukkan Komponen Remunerasi dan Jumlah Nominal Per Komponen Untuk Setiap Anggota Dewan Komisaris Dan Direksi

Pada tahun 2018, remunerasi yang diberikan kepada Direksi, Komisaris dan DPS adalah sebagai berikut:

Tabel struktur remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi
Tabel Remunerasi Direksi 2018

No.	Jenis / Type	Komponen / Component	Jumlah / Amount
1	Gaji / Salary	Direktur Utama / President Director	756.000.000
		Direktur / Director	642.600.000
2	Tunjangan / Allowance	1. Hari Raya Keagamaan / Religious Holidays	
		Direktur Utama / President Director	88.200.000
		Direktur / Director	74.970.000
		2. Perumahan / Housing allowance	
		Direktur Utama / President Director	302.400.000
		Direktur / Director	257.040.000
		3. Purna Jabatan / Post-service allowance	
		Direktur Utama (Premi/Tahun) / President Director (Premi/Year)	240.345.000
		Direktur (Premi/Tahun) / Director (Premi/Year)	216.310.500
3	Fasilitas / Facilities	1. Kendaraan Dinas / Official vehicle	
		Direktur Utama / President Director / COP	18.700.700
		Direktur / Director / COP	18.700.700
		2. Fasilitas Kesehatan / Medical allowance	
		Direktur Utama / President Director	
		- Rawat Jalan / Outpatient	20.000.000
		- Rawat Inap (Kelas Kamar/hari) / Inpatient (Room Class/day)	2.000.000
		- Medical Check up / Medical Check up	0
		Direktur / Director	
		- Rawat Jalan / Outpatient	20.000.000
		- Rawat Inap (Kelas Kamar/hari) / Inpatient (Room Class/day)	2.000.000
		- Medical Check up / Medical Check up	0
		3. Bantuan Hukum / Legal Assistance	0
4	Tantiem (Insentif Kinerja) / Tantiem (Performance Incentives)	Direktur Utama / President Director (Gross)	113.222.806
		Direktur / Director (Gross)	101.900.526

Performance Indicators

The remuneration of the Board of Commissioners and the Board of Directors refers to the following indicators:

1. Remuneration is given in the event that the Company gains profits in the relevant fiscal year;
2. Remuneration is given by referring to the development of the business;
3. Remuneration is given based on the performance of the Board of Commissioners and Directors, in accordance with their duties and responsibilities;
4. Financial performance and achievement of the Company's Key Performance Indicator (KPI);
5. Individual work performance;
6. Fairness with peers of the Company;
7. Consideration of the Company's long-term goals and strategies;
8. The amount of remuneration received is:
 - a. President Director 100%.
 - b. Member of the Board of Directors 90% of the President Director.
 - c. President Commissioner 45% of the President Director's remuneration.
 - d. Members of the Board of Commissioners 90% of the remuneration of the President Commissioner.

Remuneration Structure that Shows Remuneration Components and Nominal Amount Per Component for Each Member of the Board of Commissioners and the Board of Directors

In 2018, the remuneration for the Board of Directors, the Board of Commissioners and SSB are as follows:

Table of Board of Directors Remuneration in 2018

Tabel Remunerasi Dewan Komisaris 2018

Table of BOC Remuneration in 2018

No.	Jenis / Type	Komponen / Component	Jumlah / Amount
1	Gaji / Salary	Komisaris Utama / President Commissioner	28.350.000
		Komisaris / Commissioner	25.515.000
2	Tunjangan / Allowance	1. Hari Raya Keagamaan / Religious Holidays	
		Komisaris Utama / President Commissioner	34.020.000
		Komisaris / Commissioner	30.618.000
		2. Perumahan / Housing allowance	
		Komisaris Utama / President Commissioner	5.670.000
		Komisaris / Commissioner	5.103.000
		3. Purna Jabatan / Post-service allowance	
		Komisaris Utama (Premi/Tahun) / President Commissioner (Premi/Year)	77.253.750
		Komisaris (Premi/Tahun) / Commissioner (Premi/Year)	76.545.000
3	Fasilitas / Facilities	1. Kendaraan Dinas / Official vehicle	
		Komisaris Utama / President Commissioner	0
		Komisaris / Commissioner	0
		2. Fasilitas Kesehatan / Medical allowance	
		Komisaris Utama / President Commissioner	
		- Rawat Jalan / Outpatient	20.000.000
		- Rawat Inap (Kelas Kamar/hari) / Inpatient (Room Class/day)	2.000.000
		- Medical Check up / Medical Check up	0
		Komisaris / Commissioner	
		- Rawat Jalan / Outpatient	20.000.000
		- Rawat Inap (Kelas Kamar/hari) / Inpatient (Room Class/day)	2.000.000
		- Medical Check up / Medical Check up	0
		3. Bantuan Hukum / Legal Assistance	
		Komisaris Utama / President Commissioner (Gross)	43.671.654
4	Tantiem (Insentif Kinerja) / Tantiem (Performance Incentives)	Komisaris / Commissioner (Gross)	39.304.488

REMUNERASI DEWAN PENGAWAS SYARIAH

SHARIA SUPERVISORY BOARD REMUNERATION

Pada tahun 2018, remunerasi yang diberikan kepada DPS adalah sebagai berikut:

In 2018, the remuneration given to DPS is as follows:

No.	Jenis / Type	Komponen / Component	Jumlah / Amount
1	Gaji / Salary	Dewan Pengawas Syariah / Sharia Supervisory Board	28.350.000
2	Tunjangan / Allowance	Hari Raya Keagamaan / Religious Holidays	30.000.000

INFORMASI MENGENAI PEMEGANG SAHAM UTAMA DAN PENGENDALI

Pemegang saham utama dan pengendali PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah per 31 Desember 2018 adalah PT (Persero) Asuransi Kredit Indonesia dengan kepemilikan saham sebesar 99,99% atau mewakili 249.999 lembar saham.

INFORMATION ABOUT PRINCIPAL AND CONTROLLING SHAREHOLDERS

The principal and controlling shareholders of PT Askrindo Syariah Financing Guarantee as of 31 December 2018 is PT (Persero) Asuransi Kredit Indonesia, owning 99,99% or representing 249,999 shares.



- PT Askrindo (Persero) **99,99%**
- YDKKA
(Yayasan Dana Kesejahteraan
Karyawan Askrindo) **0,01%**

HUBUNGAN AFILIASI

Anggota Dewan Komisaris beserta keluarganya tidak memiliki saham pribadi pada korporasi yang terafiliasi dengan PT Askrindo Syariah. Selain itu antar anggota Dewan Komisaris dan antara anggota Dewan Komisaris dengan anggota Direksi tidak ada hubungan keluarga sedarah sampai dengan derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun garis ke samping atau hubungan semenda. Dengan demikian, Dewan Komisaris dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara independen, mandiri serta tidak memiliki benturan kepentingan antara kepentingan pribadi, keluarga dan saudara, jabatan lain atau golongan dengan kepentingan Perseroan.

AFFILIATE RELATIONSHIP

Members of the Board of Commissioners, as well as their families, do not have shares at the affiliated companies of PT Askrindo Syariah. In addition, members of the Board of Commissioners have no family relation with fellow members of the Board of Commissioners and members of the Board of Directors, up to third degree, either vertically or horizontally, or relation by marriage (in-law). And thus, the Board of Commissioners can perform their duties and responsibilities independently without any conflict between the interest of personal, family, relatives, other positions, other parties with the interest of the Company.

Nama / Name	Memiliki Hubungan Afiliasi Dengan / Having Affiliated Relationship With					
	Dewan Komisaris / Board of Commissioner		Direksi / Board of Director		Pemegang Saham / Pengendali / Controlling Shareholders	
	Ya / Yes	Tidak / No	Ya / Yes	Tidak / No	Ya / Yes	Tidak / No
Budi Wisakseno		v		v		v
Bambang Hermanto		v		v		v
Soegiharto		v		v		v
Subagio Istiarno		v		v		v
Supardi Najamuddin		v		v		v

Tabel Hubungan Keuangan

Financial Relations Table

Nama / Name	Memiliki Hubungan Keuangan Dengan / Having Financial Relationship With							
	Direksi / Board of Director		Dewan Komisaris / Board of Commissioner		DPS / Sharia Supervisory Board		Pemegang Saham / Shareholders	
	Ya / Yes	Tidak / No	Ya / Yes	Tidak / No	Ya / Yes	Tidak / No	Ya / Yes	Tidak / No
Budi Wisakseno		v		v		v		v
Bambang Hermanto		v		v		v		v
Soegiharto		v		v		v		v
Subagio Istiarno		v		v		v		v
Supardi Najamuddin		v		v		v		v

Tabel Hubungan Keluarga

Family Relations Table

Nama / Name	Memiliki Hubungan Keluarga Dengan / Family Relations With							
	Direksi / Board of Director		Dewan Komisaris / Board of Commissioner		DPS / Sharia Supervisory Board		Pemegang Saham / Shareholders	
	Ya / Yes	Tidak / No	Ya / Yes	Tidak / No	Ya / Yes	Tidak / No	Ya / Yes	Tidak / No
Budi Wisakseno		v		v		v		v
Bambang Hermanto		v		v		v		v
Soegiharto		v		v		v		v
Subagio Istiarno		v		v		v		v
Supardi Najamuddin		v		v		v		v

Tabel Pengungkapan kepemilikan saham Dewan Komisaris dan Direksi yang mencapai 5% atau lebih dari modal disetor

Table of Disclosures of share ownership of the Board of Commissioners and Directors that reaches 5% or more of the paid-up capital

Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris, DPS, dan Direksi yang mencapai 5% atau lebih dari modal disetor / Share ownership of the Board of Commissioners, SSB, and the Board of Directors which reaches 5% or more of the paid-up capital							
Nama / Name	Jabatan / Position	X		Y		Z	
		Jumlah Saham / Number of Shares	%	Jumlah Saham / Number of Shares	%	Jumlah Saham / Number of Shares	%
Budi Wisaksono	Komisaris Utama/ Komisaris Independen / President Commissioner/ Independent Commissioner	0	0	0	0	0	0
Bambang Hermanto	Komisaris / Commissioner	0	0	0	0	0	0
Soegiharto	Direktur Utama / President Director	0	0	0	0	0	0
Subagio Istiarno	Direktur Keuangan / Director of Finance	0	0	0	0	0	0
Supardi Najamuddin	Direktur Pemasaran / Director of Marketing	0	0	0	0	0	0

Note: X kepemilikan saham di PT JPAS; Y kepemilikan saham di lembaga penjaminan lain; Z Lembaga lainnya selain X&Y / X is share ownership at PT JPAS; Y is share ownership at other guarantee institutions; Z is other institutions besides X & Y

KOMITE AUDIT

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri BUMN Peraturan Menteri BUMN No. PER-12/MBU/2012 tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara, dalam rangka membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugasnya mewujudkan pengawasan yang efektif, Dewan Komisaris wajib membentuk Komite Audit.

Pengangkatan dan pemberhentian Anggota Komite Audit dilaporkan kepada RUPS. Ketua dan Anggota Komite Audit diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris di mana Ketua Komite Audit adalah anggota Dewan Komisaris yang merupakan anggota Dewan Komisaris Independen atau anggota Dewan Komisaris yang dapat bertindak independen. Anggota Komite Audit dapat berasal dari anggota Dewan Komisaris dari luar Perusahaan.

Susunan Anggota Komite Audit

Komite Audit Perseroan dibentuk berdasarkan SK Dewan Komisaris PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah Nomor KEP- 003/DK/JPAS/2017 tentang Pengangkatan Komite Audit, dengan mempertimbangkan Surat Direktur SDM & Umum PT

AUDIT COMMITTEE

As stipulated in the Regulation of the Minister of SOE Regulations Minister of BUMN No. PER-12/MBU/2012 concerning Supporting Board of Commissioners Organs/Board of Trustees of Business Entity State Owned, in order to assist the Board of Commissioners in carrying out their duties, realizing supervision effectively, the Board of Commissioners must establish an Audit Committee.

The appointment and dismissal of Audit Committee Members reported to the GMS. Chairperson and members of the Audit Committee are appointed and dismissed by the Board of Commissioners. The Chairman of the Audit Committee is a member of the Board of Commissioners who is an Independent Board of Commissioners or members of the Board of Commissioners who can act independently. Audit Committee members may come from Board members Commissioners from outside of the Company.

Audit Committee composition

The Audit Committee was established based on the Decree of the Board of Commissioners of PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah Number KEP-003/DK/JPAS/2017 concerning the Appointment of Audit Committee, taking into account the

(Persero) Asuransi Kredit Indonesia Nomor 195/DIR tanggal 13 Maret 2017 Perihal Komite Audit PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah.

Letter of Director of HR & General Affairs of PT (Persero) Asuransi Kredit Indonesia Number 195/ DIR dated March 13, 2017 regarding the Audit Committee of PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah.

Susunan Komite Audit

Nama / Name	Jabatan / Position
Budi Wisakseno	Ketua Komite Audit / Chairman of the Audit Committee
Purwadi	Anggota Komite Audit / Members of the Audit Committee

Audit Committee Composition

Profil Komite Audit

Budi Wisakseno

Ketua Komite Audit

Profil Budi Wisakseno telah disajikan dalam bahasan profil Dewan Komisaris dalam laporan tahunan ini.

Profile of the Audit Committee

Budi Wisakseno

Chairman of the Audit Committee

Budi Wisakseno's profile has been presented in the Board of Commissioners profile discussion in this annual report.

Tugas Komite audit

Komite Audit bertugas membantu Dewan Komisaris dalam memantau dan memastikan efektivitas sistem pengendalian internal dan pelaksanaan tugas auditor internal dan auditor eksternal dengan melakukan pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian internal termasuk proses pelaporan keuangan. Rincian tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- Menyusun rencana kerja tahunan dan disampaikan kepada Dewan Komisaris untuk mendapatkan persetujuan;
- Melakukan evaluasi atas pencapaian rencana kerja dan melaporkannya kepada Dewan Komisaris;
- Membantu Dewan Komisaris untuk memastikan efektivitas Sistem Pengendalian Intern dan efektivitas pelaksanaan tugas eksternal auditor dan internal auditor dengan melakukan pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian internal termasuk proses pelaporan keuangan;
- Melaporkan kepada Dewan Komisaris berbagai risiko yang mungkin dihadapi Perusahaan dan pelaksanaan manajemen risiko oleh Direksi;
- Melakukan pemeriksaan terhadap dugaan adanya kesalahan dalam keputusan Rapat Direksi;
- Memberikan pendapat profesional yang independent kepada Dewan Komisaris, yang meliputi antara lain:
 - Menilai pelaksanaan kegiatan serta hasil audit yang dilakukan oleh Auditor Internal maupun Auditor Eksternal, sehingga dapat dicegah pelaksanaan dan pelaporan yang tidak memenuhi standar;
 - Memberikan rekomendasi mengenai penyempurnaan sistem pengendalian manajemen Perusahaan serta pelaksanaannya;

Duties of the Audit Committee

The Audit Committee is tasked with assisting the Board of Commissioners in monitoring and ensuring the effectiveness of internal control system and the implementation of duties of internal and external auditors through monitoring and evaluation over the audit plan and implementation in order to assess the adequacy of internal control, including the process of financial reporting. The details and responsibilities of the Audit Committee are as follow:

- Prepare annual work plan to be submitted to the Board of Commissioners for approval;
- Evaluate the progress of the work plan to be reported to the Board of Commissioners;
- Assist the Board of Commissioners to ensure the effectiveness of Internal Control System and the effectiveness of the implementation of the duties of external auditors and internal auditors by monitoring and evaluating the planning and implementation of audits in order to assess the adequacy of internal controls including the financial reporting process;
- Report to the Board of Commissioners regarding various risks that potentially be in place and the implementation of risk management performed by the Board of Directors;
- Investigate the suspected error in the decision of the Board of Directors Meeting;
- Provide independent professional opinion to the Board of Commissioners, which includes, among others:
 - assessment of the activities and results of audits conducted by the Internal Auditor and External Auditor, so as to prevent implementation and reporting that does not meet the standards;
 - Provide recommendations regarding the improvement of the Company's management control system and their implementation;

- 3) Melaksanakan tugas lain yang diberikan Dewan Komisaris sepanjang masih dalam lingkup tugas dan kewajiban Dewan Komisaris berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- g. Memastikan telah terdapat prosedur evaluasi yang memuaskan terhadap segala informasi yang dikeluarkan Perusahaan;
- h. Mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris serta tugas-tugas Dewan Komisaris, antara lain:
 - 1) Penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perusahaan seperti laporan keuangan, proyeksi dan informasi keuangan lainnya;
 - 2) Penelaahan atas independensi dan obyektivitas Auditor Internal dan Eksternal;
 - 3) Penelaahan atas kecukupan pemeriksaan yang dilakukan oleh Auditor Internal dan Eksternal untuk memastikan semua risiko penting telah dikaji;
 - 4) Penelaahan atas efektivitas pengendalian intern Perusahaan;
 - 5) Penelaahan atas tingkat kepatuhan Perusahaan tercatat terhadap peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan kegiatan Perusahaan;
 - 6) Pemeriksaan terhadap dugaan adanya kesalahan dalam keputusan rapat Direksi atau penyimpangan dalam pelaksanaan hasil keputusan rapat Direksi.

Masa tugas Anggota Komite Audit yang bukan berasal dari anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang satu kali selama 2 (dua) tahun masa jabatan dengan tidak mengurangi hak Dewan Komisaris untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.

Wewenang

- a. Dalam melaksanakan tugas-tugasnya, Komite Audit dengan mandat dari Dewan Komisaris memiliki wewenang akses secara penuh dan tidak terbatas terhadap personil, pencatatan, dokumen, asset Perusahaan dan informasi terkait lainnya sesuai tugas yang diberikan;
- b. Dalam menjalankan kewenangan tersebut, Komite Audit dapat bekerja sama dengan mitra kerjanya diantaranya: Sekretaris Dewan Komisaris, unit-unit operasional Perusahaan, Divisi Manajemen Risiko dan SPI. SPI wajib memberikan laporan dan informasi yang diminta oleh Komite Audit;
- c. Memperoleh program pengembangan kapabilitas sesuai kebutuhan dan kemampuan Perusahaan;

- 3) Carrying out other duties given by the Board of Commissioners insofar as they are within the scope of the duties and obligations of the Board of Commissioners based on applicable legislation.
- g. Ensure satisfactory evaluation procedures for all information that will be issued by the Company;
- h. Identify matters that require attention from the Board of Commissioners, as well as the duties of the Board of Commissioners, including:
 - 1) Review of financial information to be issued by the Company, including financial statements, financial projections and other information;
 - 2) Reviewing the independence and objectivity of the Internal and External Auditors;
 - 3) Reviewing the adequacy of examinations conducted by the Internal and External Auditors to ensure that all important risks have been assessed;
 - 4) Reviewing the effectiveness of the Company's internal controls;
 - 5) Reviewing the level of compliance of the Company with respect to other laws and regulations relating to the activities of the Company;
 - 6) Examination of suspected errors in decisions of the Board of Directors 'meeting or deviations in the implementation of the decisions of the Board of Directors' meetings.

The term of office of the Audit Committee Members who are not members of the Board of Commissioners is no more than 3 (three) years and can be extended once, namely for 2 (two) years of office, without prejudice to the rights of the Board of Commissioners to terminate them at any time.

Authority

- a. Based on the mandate of the Board of Commissioners, in carrying out its duties, the Audit Committee has full and unlimited access authority to personnel, records, documents, Company assets and other relevant information according to the tasks assigned;
- b. In carrying out this authority, the Audit Committee can work with its partners, including the Secretary of the Board of Commissioners, operational units, the Risk Management Division and the IAU. IAU must provide reports and information requested by the Audit Committee;
- c. Obtain capability development programs according to the needs and capabilities of the Company;

- d. Apabila diperlukan dengan persetujuan tertulis Dewan Komisaris, Komite Audit dapat mempekerjakan tenaga ahli atau konsultan yang independen dari luar Perusahaan di bidang hukum maupun bidang lainnya yang dipandang perlu atas biaya Perusahaan untuk membantu Komite Audit.

SEKRETARIAT DEWAN KOMISARIS

Guna membantu kelancaran pelaksanaan tugasnya, Dewan Komisaris mendapatkan bantuan Sekretaris Dewan Komisaris. Sekretaris Dewan Komisaris menjalankan tugas-tugas administrasi dan kesekretariatan yang berkaitan dengan seluruh kegiatan Dewan Komisaris, memastikan tugas-tugas Dewan Komisaris telah dijalankan dan semua informasi yang diperlukan Dewan Komisaris telah tersedia dan tugas lainnya sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Profil Sekretariat Dewan Komisaris



Zulfakhri

Sekretariat Dewan Komisaris

Secretary of the Board of Commissioners

Warga Negara Indonesia, 41 tahun. Saat ini berdomisili di Jakarta, Indonesia.

Menjabat sebagai Sekretaris Dewan Komisaris Perseroan sejak Maret 2017. Sebelumnya, beliau menjabat berbagai posisi di PT Asuransi Kredit Indonesia (Persero) di antaranya sebagai Kepala Bagian Sekretariat sejak September 2018, Deputy Division Head of Claim General Insurance (2017-2018), Deputy Division Head of Legal Non-Litigation (2015-2017), Supervision of Legal Division (Januari 2015-Juni 2015), dan Supervision of Marketing Division (2014-2015). Selain itu, beliau juga berpengalaman menjabat posisi lainnya di antaranya sebagai Manager and Association Secretary The General Insurance Association on Indonesia (AAUI) (2012-2014), dan berbagai posisi di Bumiputeramuda 1967 General Insurance Ltd. Jakarta di antaranya sebagai personal Accident & Health Insurance Manager (2012) Human Resource Development Manager (2009-2012), Corporate Secretary (2008-2009), Public Relation

- d. If deemed necessary, upon the written approval of the Board of Commissioners, the Audit Committee may employ independent experts or consultants from outside the Company in the field of law and other fields deemed necessary at the Company's expenses to help with the Audit Committee duties.

THE SECRETARY OF THE BOARD OF COMMISSIONERS

To help smooth the implementation of their duties, the Board of Commissioners receives the assistance of the Secretary of the Board of Commissioners. The Secretary of the Board of Commissioners carries out administrative and secretarial tasks related to all activities of the Board of Commissioners, ensuring that the duties of the Board of Commissioners have been carried out and all information required by the Board of Commissioners is available and other tasks as stipulated in the applicable laws and regulations.

Profile of Secretary of the Board of Commissioners

Indonesian citizen, 41 years old. Currently domiciled in Jakarta, Indonesia.

Served as Secretary of the Company's Board of Commissioners since March 2017. Previously, he held various positions at PT Asuransi Kredit Indonesia (Persero), among others, Head of the Secretariat Division since September 2018, Deputy Division Head of Claim General Insurance (2017-2018), Deputy Division Head of Legal Non-Litigation (2015-2017), Supervision of Legal Division (January 2015-June 2015), and Supervision of Marketing Division (2014-2015). In addition, he also has other positions, namely Manager and Association Secretary of The General Insurance Association on Indonesia (AAUI) (2012-2014), and various positions at Bumiputeramuda 1967 General Insurance Ltd. Jakarta, among others as Personal Accident & Health Insurance Manager (2012), Human Resource Development Manager (2009-2012), Corporate Secretary (2008-2009), Public Relations Manager (2007-2008), Marketing

Manager (2007-2008) Marketing Manager (2006-2007), Personal Accident & Health Insurance Manager (2005-2006), Underwriting Manager Cabang Roxy (2003-2005), Bonding & Engineering Underwriting Staff (2003), Underwriting Staff Claim Division cabang Sudirman (2002-2003), dan Management Trainee Program (2001-2002).

Fungsi Pokok Sekretariat Dewan Komisaris

Sekretaris Dewan Komisaris mempunyai fungsi pokok untuk memberikan dukungan kepada Dewan Komisaris guna memperlancar tugas-tugas Dewan Komisaris dalam melaksanakan fungsinya sebagai wakil Pemegang Saham untuk memberikan nasihat serta pengawasan dalam kaitannya dengan pengurusan Perseroan oleh Direksi dan segenap jajarannya.

Masa Tugas

Masa tugas Sekretaris dan staf Sekretariat Dewan Komisaris ditetapkan oleh Dewan Komisaris maksimum 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk paling lama 2 (dua) tahun dengan tidak mengurangi hak Dewan Komisaris untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.

Tugas Sekretaris Dewan Komisaris

- Menyusun Rancangan Rencana Kerja dan Anggaran Dewan Komisaris.
- Memastikan bahwa Dewan Komisaris mematuhi peraturan perundang-undangan serta menerapkan prinsip-prinsip GCG.
- Menyediakan informasi untuk kebutuhan Dewan Komisaris dalam rangka pengambilan keputusan.
- Mempersiapkan bahan-bahan yang diperlukan berkaitan dengan laporan• laporan rutin Direksi dalam mengelola Perseroan seperti: RKAP, Laporan Tahunan, Laporan Triwulanan, Laporan Hasil Pemeriksaan SPI, dan laporan-laporan lain yang dibutuhkan;
- Mempersiapkan bahan/materi yang diperlukan berkaitan dengan hal-hal yang harus mendapatkan keputusan dari Dewan Komisaris berkenaan dengan kegiatan pengelolaan Perseroan yang dilakukan oleh Direksi dan segenap jajarannya.
- Menyiapkan dan mengkordinasikan agenda rapat dengan pihak-pihak yang hadir dalam rapat.
- Menyiapkan dan mengirimkan undangan rapat kepada pihak-pihak yang akan menghadiri rapat.
- Melakukan konfirmasi mengenai waktu, tempat, kehadiran, serta hal-hal lain yang dipandang perlu demi kelancaran rapat.

Manager (2006-2007), Personal Accident & Health Insurance Manager (2005-2006), Roxy Branch Underwriting Manager (2003-2005), Bonding & Engineering Underwriting Staff (2003), Sudirman Underwriting Staff of Claim Division of Sudirman Branch (2002-2003), and Management Trainee Program (2001-2002).

Main Function of The Secretary of the Board of Commissioners

The Secretary of the Board of Commissioners has the main function to provide support to the Board of Commissioners in order to facilitate the duties of the Board of Commissioners in carrying out its function as a representative of Shareholders to provide advice and supervision in relation to the management of the Company by the Directors and all of its staff.

Tenure

The term of office of the Secretary and staff of The Secretary of the Board of Commissioners is determined by the Board of Commissioners for a maximum of 3 (three) years and can be reappointed for a maximum of 2 (two) years without prejudice to the right of the Board of Commissioners to dismiss it at any time.

The Duties of the Secretary of the Board of Commissioners

- Prepare the Draft Work Plan and Budget of the Board of Commissioners.
- Ensuring that the Board of Commissioners complies with laws and regulations and applies GCG principles.
- Providing information for the needs of the Board of Commissioners for decision making.
- Prepare the materials needed related to reports • routine reports of Directors in managing the Company such as: RKAP, Annual Reports, Quarterly Reports, SPI Inspection Results Reports, and other required reports;
- Prepare materials/materials needed related to matters that must get a decision from the Board of Commissioners regarding the Company's management activities carried out by the Directors and all of its staff.
- Prepare and coordinate the agenda of the meeting with the parties present at the meeting.
- Prepare and send meeting invitations to parties who will attend the meeting.
- Confirming time, place, attendance, and other matters deemed necessary for the smooth running of the meeting.

- | | |
|--|---|
| <p>i. Menyelenggarakan pertemuan/rapat Dewan Komisaris, baik internal Dewan Komisaris maupun dengan Direksi dan jajarannya serta pihak-pihak lainnya.</p> <p>j. Membuat risalah rapat atas rapat rutin maupun non rutin Dewan Komisaris.</p> <p>k. Menyampaikan risalah rapat kepada pihak-pihak yang berkepentingan.</p> <p>l. Mempersiapkan pertimbangan, pendapat, saran dan keputusan lainnya dari Dewan Komisaris untuk para Pemegang Saham, Direksi dan pihak-pihak terkait dengan pengelolaan Perseroan.</p> <p>m. Menindaklanjuti setiap keputusan Dewan Komisaris dengan cara sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Mencatat setiap keputusan yang dihasilkan dalam forum-forum pengambilan keputusan serta penanggungjawabnya; 2) Memantau dan mengecek tahapan kemajuan pelaksanaan hasil keputusan rapat, pertimbangan, pendapat, saran dan keputusan Dewan Komisaris lainnya; 3) Melakukan upaya untuk mendorong pelaksanaan tindak lanjut keputusan rapat, pertimbangan, pendapat, saran dan keputusan Dewan Komisaris lainnya kepada penanggung jawab terkait. <p>n. Menyelenggarakan kegiatan di bidang kesekretariatan dalam lingkungan Dewan Komisaris, baik untuk keperluan Dewan Komisaris dan komite-komitennya serta pengadministrasiannya.</p> <p>o. Melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan tata persuratan dan kearsipan.</p> <p>p. Melaksanakan dan mengkoordinasikan usaha-usaha untuk memperlancar kegiatan administrasi kesekretariatan baik untuk Dewan Komisaris maupun komite-komite yang ada di dalam lingkungan Dewan Komisaris.</p> <p>q. Melaksanakan dan mengkoordinasikan pengamanan atas data dan dokumen-dokumen yang berada dalam penguasaan/lingkup kerja Dewan Komisaris, dengan cara sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Melakukan dan mengkoordinasikan pengadministrasian hasil pertemuan/rapat di lingkungan Dewan Komisaris, baik dengan Direksi beserta jajaran dan pihak-pihak lainnya; 2) Melakukan dan mengkoordinasikan pengadministrasian risalah Rapat Dewan Komisaris, baik rutin maupun non rutin; 3) Melakukan dan mengkoordinasikan penyusunan jadwal kegiatan Dewan Komisaris dalam melaksanakan fungsi-fungsi serta kelengkapan yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan tersebut; | <p>i. Organizing meetings/meetings of the Board of Commissioners, both internal to the Board of Commissioners and with the Board of Directors and its staff and other parties.</p> <p>j. Make minutes of meetings for both routine and non-routine meetings of the Board of Commissioners.</p> <p>k. Deliver the minutes of the meeting to interested parties.</p> <p>l. Prepare considerations, opinions, suggestions and other decisions of the Board of Commissioners for the Shareholders, Directors and parties related to the management of the Company.</p> <p>m. Following up on every decision of the Board of Commissioners as follows:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Record every decision produced in the decision making forums and the person in charge; 2) Monitor and check the progress stages of the implementation of the resolutions of meetings, considerations, opinions, suggestions and other decisions of the Board of Commissioners; 3) Make efforts to encourage the implementation of follow-up decisions of meetings, considerations, opinions, suggestions and other decisions of the Board of Commissioners to the responsible person. <p>n. Carrying out activities in the field of secretariat in the environment of the Board of Commissioners, both for the needs of the Board of Commissioners and its committees and their administration.</p> <p>o. Carry out and coordinate correspondence and archival activities.</p> <p>p. Carry out and coordinate efforts to facilitate secretarial administration activities for both the Board of Commissioners and the committees within the Board of Commissioners</p> <p>q. Implement and coordinate the safeguarding of data and documents within the control / scope of work of the Board of Commissioners, in the following manner:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Conduct and coordinate the administration of the results of meetings/meetings within the Board of Commissioners, both with the Directors and the ranks and other parties; 2) Carry out and coordinating the administration of minutes of the Board of Commissioners' Meetings, both routine and non-routine; 3) Carry out and coordinate the preparation of the schedule of activities of the Board of Commissioners in carrying out the functions and completeness needed to carry out these activities; |
|--|---|

- 4) Memimpin, mengarahkan dan mengkoordinasikan pelaksanaan sistem dan prosedur yang ada di lingkungan kerja Dewan Komisaris;
- 5) Melakukan dan mengkoordinasikan pengadministrasian bahan/dokumen/ laporan yang diberikan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris.
- r. Menyusun Rancangan Laporan-Laporan Dewan Komisaris.

Wewenang Sekretaris Dewan Komisaris

Dengan persetujuan dan penugasan dari Dewan Komisaris maka wewenang yang dilimpahkan kepada Sekretaris Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

- a. Menetapkan sistem dan prosedur persuratan maupun kearsipan dalam lingkungan Dewan Komisaris;
- b. Melihat catatan, risalah rapat Direksi, dokumen Perseroan maupun laporan-laporan dalam rangka kegiatan penyediaan informasi yang diperlukan oleh Dewan Komisaris;
- c. Meminta data/informasi/penjelasan yang dibutuhkan Dewan Komisaris kepada pihak-pihak yang terkait di dalam maupun di luar Perusahaan untuk keperluan pelaksanaan tugas Dewan Komisaris;
- d. Mengingatkan serta meminta penjelasan dari satuan kerja pihak terkait atas keterlambatan penyediaan bahan/ laporan/dokumen yang dibutuhkan oleh Dewan Komisaris;
- e. Memasuki pekarangan, gedung, dan kantor yang dipergunakan oleh Perseroan;
- f. Mewakili Dewan Komisaris untuk berhubungan dengan pihak luar Perseroan dan/ atau di dalam Perseroan sesuai dengan penugasan yang diberikan serta kebijakan yang telah ditentukan oleh Dewan Komisaris;
- g. Mengusulkan rencana program kerja Dewan Komisaris dalam kaitannya dengan fungsi kesekretariatan Dewan Komisaris di Perseroan;
- h. Mengusulkan agenda rapat Dewan Komisaris dengan pihak di dalam/luar Perseroan;
- i. Sesuai dengan arahan Dewan Komisaris, mengundang Direksi/pejabat Perusahaan lainnya (dengan sepengetahuan Direksi), Komite-komite Dewan Komisaris/ pihak di luar Perseroan untuk menghadiri rapat yang diselenggarakan oleh Dewan Komisaris;
- j. Menghadiri rapat dengan pihak di dalam/luar Perseroan sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya oleh Dewan Komisaris;
- k. Menggunakan fasilitas kesekretariatan Dewan Komisaris untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya.

- 4) Lead, direct and coordinate the implementation of systems and procedures in the work environment of the Board of Commissioners;
- 5) Carry out and coordinate the administration of materials / documents / reports provided by the Directors to the Board of Commissioners.
- r. Prepare Draft Reports of the Board of Commissioners.

Authority of the Secretary of the Board of Commissioners

With the approval and assignment of the Board of Commissioners, the authority delegated to the Secretary of the Board of Commissioners is as follows:

- a. Establishes correspondence and archiving systems and procedures within the Board of Commissioners;
- b. View notes, minutes of meetings of the Board of Directors, Company documents and reports in the context of providing information needed by the Board of Commissioners;
- c. Request data/information/explanations needed by the Board of Commissioners to related parties inside and outside the Company for the purpose of carrying out the duties of the Board of Commissioners;
- d. Remind and ask for explanations from related parties' work units for the delay in providing materials / reports / documents needed by the Board of Commissioners;
- e. Entering the grounds, buildings and offices used by the Company;
- f. Representing the Board of Commissioners to deal with outside parties of the Company and / or within the Company in accordance with the assignments given and policies determined by the Board of Commissioners;
- g. Propose the work plan of the Board of Commissioners in relation to the secretariat function of the Board of Commissioners in the Company;
- h. Propose the Board of Commissioners meeting agenda with parties inside/outside the Company;
- i. In accordance with the directions of the Board of Commissioners, invite Directors/other Company officials (with the knowledge of the Directors), Committees of the Board of Commissioners/parties outside the Company to attend meetings held by the Board of Commissioners;
- j. Attending meetings with parties inside/outside the Company in accordance with the policies previously set by the Board of Commissioners;
- k. Use the Board of Commissioners' secretarial facilities to carry out their duties and obligations.

SEKRETARIS PERUSAHAAN

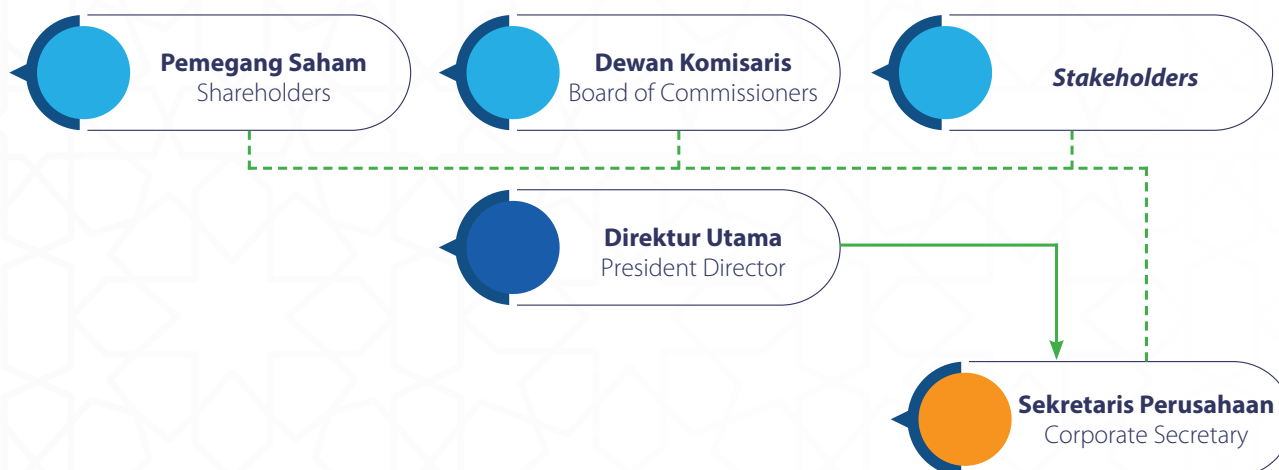
Sekretaris Perusahaan berfungsi sebagai penghubung (*liaison officer*) atau *contact person* antara Perseroan dengan masyarakat. Berdasarkan Surat Keputusan Direksi 073/KEP-DIR/XII/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pedoman Sekretaris Perusahaan, Sekretaris Perusahaan bertugas memberikan pelayanan atas setiap informasi yang dibutuhkan stakeholders serta kepada pihak-pihak di luar Perseroan dan atau dalam Perseroan berkaitan dengan kondisi Perseroan. Penyelenggaraan fungsi tersebut diserahkan kepada pejabat setingkat Kepala Divisi yang pengangkatan dan pemberhentiannya dilakukan oleh Direktur Utama atas persetujuan Dewan Komisaris.

CORPORATE SECRETARY

The Corporate Secretary functions as a liaison office, or contact person, between the Company and the community. Based on Board of Directors Decree 073/KEP-DIR/XII/2015 dated December 23, 2015 concerning Guidelines for Corporate Secretary, the Corporate Secretary is tasked with providing all information needed by stakeholders, as well as parties outside and/or within the Company relating to the condition of the Company. The function is carried out by officials at the level of Head of Division whose appointment and dismissal is carried out by the President Director with the approval of the Board of Commissioners.

Struktur Organisasi Sekretaris Perusahaan PT Jaminan
Pembiayaan Askrindo Syariah

Structure of Organization of Corporate Secretary



Profil Sekretaris Perusahaan

Profile of Corporate Secretary



Catur Heru Putranto

Kepala Sekretaris Perusahaan & Legal
Head of Corporate Secretary & Legal

Warga Negara Indonesia, 45 tahun. Saat ini berdomisili di Jakarta.

Indonesian citizen, 45 years old. Currently domiciled in Jakarta.

Menjabat sebagai Kepala Sekretaris Perusahaan & Legal sejak 2013 berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 021/KEP-DIR/SDM/IV/2018 tentang Mutasi Pegawai sdr. Catur Heru Putranto PT Penjaminan Pembiayaan Askrindo Syariah tanggal 9 April

Served as Head of Corporate Secretary & Legal since 2013 based on Board of Directors Decree No. 021/KEP-DIR/SDM/IV/2018 concerning Employee Transfer of Catur Heru Putranto of PT Penjaminan Pembiayaan Askrindo Syariah dated April 9,

2018. Sebelumnya, beliau menjabat sebagai *micro banking manager* Bank Syariah Mandiri (2011-2013), *manager* Divisi Kredit BPR Perdana (2008-2011), *cluster manager* Divisi *Consumer Mass Market* Bank Danamon (2005-2009), dan *Supervisor* Divisi Nestle Arina Multikarya (2002-2005).

Beliau meraih gelar S1 jurusan MGT Perbankan dari STIE Tri Dharma Widya Jakarta pada 2002.

Fungsi Sekretaris Perusahaan

Fungsi Sekretaris Perusahaan adalah sebagai penghubung (*liason officer*) atau contact person antara Perusahaan dengan masyarakat serta memberikan pelayanan atas setiap informasi yang dibutuhkan stakeholders serta kepada pihak-pihak di luar Perseroan dan atau dalam Perseroan berkaitan dengan kondisi Perusahaan. Selain itu, fungsi Sekretaris Perusahaan yaitu memastikan bahwa Perseroan mematuhi peraturan tentang persyaratan keterbukaan sejalan dengan penerapan prinsip-prinsip GCG dan menatausahakan serta menyimpan dokumen Perseroan, termasuk tetapi tidak terbatas pada Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus dan risalah rapat Direksi, rapat Dewan Komisaris dan RUPS.

Uraian Tugas & Tanggung Jawab Sekretaris Perusahaan

Sesuai dengan Surat Keputusan Direksi Direksi 073/KEPDIR/ XII/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pedoman Sekretaris Perusahaan, maka tugas Sekretaris Perusahaan berdasarkan fungsinya adalah sebagai berikut:

1. Kesekretariatan
 - a. Menyusun jadwal, membuat undangan dan mengatur pelaksanaan pertemuan/rapat Direksi baik dengan pihak internal, eksternal Perseroan dan pertemuan penting lainnya, antara lain:
 - Rapat Direksi yang diadakan minimal seminggu sekali;
 - Rapat Dewan Komisaris dengan Direksi setiap 3 (tiga) bulan sekali atau sesuai dengan kebutuhan; dan
 - RUPS Pengesahan RKAP dan Pengesahan Laporan Keuangan yang diadakan masing-masing setiap tahun sekali.
 - Rapat Kerja yang diadakan minimal 3 (tiga) kali setahun yaitu Rapat Konsolidasi awal tahun, Rapat Kerja Evaluasi Semester I dan Rapat Kerja Penyusunan Anggaran/RKAP tahun berikutnya.
 - b. Menyiapkan dan memastikan agenda Rapat Direksi, RADIKOM dan RUPS Tahunan;

2018. Previously, he served as micro banking manager of Bank Syariah Mandiri (2011-2013), manager of Credit Division of BPR Perdana (2008-2011), cluster manager of Consumer Mass Market Division of Bank Danamon (2005-2009), and Supervisor of Nestle Division of Arina Multikarya (2002-2005).

He earned his Bachelor's degree majoring in Banking MGT from STIE Tri Dharma Widya Jakarta in 2002.

Function of the Corporate Secretary

The Corporate Secretary acts as a liaison officer, or contact person, between the Company and the community in providing information needed by stakeholders, as well as those outside and/or within the Company relating to the condition of the Company. In addition, the function of the Corporate Secretary is to ensure that the Company complies with the regulations on disclosure of information, in line with GCG principles, as well as administers and keeps the Company's documents, including but not limited to Shareholders Register, Special List and minutes of meetings of the Board of Directors, Board of Commissioners and GMS.

Description of the Corporate Secretary's Duties & Responsibilities

In accordance with the BOD Decree No. 073/KEP-DIR/ XII/2015 dated December 23, 2015 concerning the Guidelines for Corporate Secretary, the duties of the Corporate Secretary, based on functions, are as follows:

1. Secretariat
 - a. Preparing the schedules, invitations and the organizing the meetings of the Boards of Directors, both internally and with external parties of the Company and other important meetings, including:
 - Board of Directors meetings which shall be held at least once a week;
 - Board of Commissioners and Directors meetings which shall be held every 3 (three) months or according to the needs; and
 - GMS for the Ratification of RKAP and Financial Statements which shall be held annually.
 - Work Meetings which shall be held at least 3 (three) times a year, namely the Consolidation Meeting at the beginning of the year, Evaluation Meeting for the First Semester, Work Meeting for the preparation of Work and Budget Plan/RKAP.
 - b. Prepare the agenda of the Board of Directors Meetings, RADIKOM and Annual GMS;

- c. Memastikan bahwa agenda rapat sudah termasuk masalah-masalah yang perlu mendapatkan perhatian dan atau keputusan serta masalah non-rutin yang signifikan. Agenda rapat tersebut disampaikan bersamaan dengan penyampaian undangan.
 - d. Menyampaikan Risalah Rapat kepada seluruh anggota Direksi paling lambat 7 (tujuh) hari setelah Rapat dilaksanakan;
 - e. Melakukan perbaikan atas risalah rapat Direksi (jika ada keberatan atau usulan perbaikan) yang disampaikan Direksi;
 - f. Mengatur dan memastikan Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi menghadiri RUPS.
 - g. Menyusun program kerja/kegiatan dan kebutuhan anggaran Bagian Sekretaris Perusahaan;
 - h. Menghadiri rapat Direksi, RADIKOM, RUPS dan membuat Risalah Rapat serta proses pengesahannya;
 - i. Menyelenggarakan kegiatan ketatausahaan, pelaporan perusahaan dan tugas-tugas protokoler Direksi lainnya;
 - j. Membuat daftar khusus mengenai kepemilikan saham Dewan Komisaris dan Direksi beserta keluarganya pada Perusahaan dan perusahaan lain;
2. Komunikasi Perusahaan
- a. Memastikan bahwa setiap anggota Direksi dan Dewan Komisaris menerima program pengenalan Perseroan pada saat pertama kali menjabat. Tujuan dari program tersebut adalah untuk menginformasikan anggota baru Direksi/Dewan Komisaris mengenai Perseroan, sehingga anggota baru tersebut dapat memberikan kontribusinya secepat mungkin kepada Perseroan. Materi pengenalan tersebut harus disiapkan oleh Sekretaris Perusahaan, yang meliputi antara lain:
 - 1) Informasi atau Pengetahuan Internal, meliputi:
 - Anggaran Dasar Perusahaan;
 - Latar belakang dan sejarah Perseroan;
 - Misi dan visi Perseroan serta maksud dan tujuan Perseroan;
 - Struktur organisasi Perseroan;
 - Tugas, tanggung jawab dan hak/kewenangan serta fasilitas yang diperuntukkan bagi Direksi dan Dewan Komisaris;
 - Rencana Jangka Panjang Perseroan;
 - Rencana Kerja dan Anggaran Belanja Perseroan setiap tahun;
 - Perkembangan Kinerja Perusahaan selama 5 (lima) tahun terakhir;
 - Program bisnis dan jenis produk Perseroan;

- c. Ensure that the meeting agenda has included issues that need attention and/or decisions and significant non-routine issues. The agenda of the meeting should be sent together with the invitation.
 - d. Submitting Minutes of Meeting to all members of the Board of Directors no later than 7 (seven) days after the Meeting is held;
 - e. Revising the minutes of the Board of Directors meeting (should there be objections or improvements) submitted by the Board of Directors;
 - f. Managing and ensuring that Shareholders, Board of Commissioners and Directors attend the GMS.
 - g. Developing work programs/activities and budget requirements for the Corporate Secretary Section;
 - h. Attending the Board of Directors meeting, RADIKOM, GMS and preparing the Minutes of Meeting and the approval process;
 - i. Organizing administrative activities, reporting and other Board of Directors' protocol;
 - j. Preparing special register of share ownership of the Board of Commissioners and the Board of Directors and their families in the Company and other companies;
2. Corporate Communication
- a. Ensuring that each new member of the Board of Directors and Board of Commissioners follows the induction program during their first terms of office. The program is to inform the new members of the Board of Directors/Board of Commissioners about the Company, so that they can perform their duties promptly. The introductory material must be prepared by the Corporate Secretary, which includes:
 - 1) Internal Information or Knowledge
 - The Company's Articles of Association;
 - The background and history of the Company;
 - The mission and vision of the Company as well as the purposes and objectives of the Company;
 - The Company's organizational structure;
 - Duties, responsibilities and rights/authorities as well as facilities for the Board of Directors and the Board of Commissioners;
 - The Company's Long Term Plan;
 - The Company's Annual Work Plan and Budget;
 - The progress of the Company's Performance in the last 5 (five) years;
 - Business programs and types of products of the Company;

- Keberadaan bangunan dan lingkungan kantor, kantor cabang, anak Perusahaan, organisasi/asosiasi, Sumber Daya Manusia (SDM).
- 2) Informasi atau Pengetahuan Eksternal, meliputi:
 - Posisi Perseroan dibandingkan dengan mitra usaha, kompetitor dan *stakeholder* lain;
 - Undang-undang dan peraturan yang terkait; dan
 - Hubungan dan kewajiban dengan regulator dan lembaga terkait lainnya.
- 3) Program Pengenalan yang diberikan dapat berupa presentasi, pertemuan atau kunjungan ke fasilitas Perseroan, perkenalan dengan para Kepala Divisi, Kepala Bagian, Kepala Cabang dan Karyawan di Perseroan serta program lainnya.
- b. Menjalin hubungan dengan instansi luar, seperti Instansi Pemerintah, BUMN, swasta, media masa dan masyarakat dalam rangka mengumpulkan dan mempublikasikan informasi;
- c. Mengelola informasi dan mengkaji seluruh informasi termasuk dampak hukumnya dan mempersiapkan informasi tersebut secermat mungkin yang akan dikomunikasikan kepada pihak terkait;
- d. Membina hubungan dengan investor/mitra bisnis/instansi luar Perseroan dan Anak Perusahaan;
- e. Menyusun dan mempublikasikan tanggapan secara tepat waktu, akurat dan objektif atas pertanyaan dari masyarakat, pemasok dan pekerja;
- f. Memberikan penjelasan jawaban dan informasi yang diberikan kepada pihak-pihak terkait secara relevan, sehingga tidak menimbulkan kerancuan ataupun kebingungan yang dapat mempengaruhi citra Perseroan;
- g. Menyusun materi Laporan Tahunan yang dibuat oleh masing-masing Divisi;
- h. Memastikan Laporan Tahunan Perseroan disusun sesuai ketentuan yang berlaku dan diserahkan kepada pihak-pihak terkait;
- i. Memastikan bahwa persetujuan Laporan Tahunan harus tercantum di dalam agenda RUPS Tahunan;
- j. Memutakhirkan materi informasi yang disajikan dalam website Perseroan secara berkala;
- k. Mengkoordinasikan penyiapan dan penyediaan bahan-bahan untuk "Press Release" atas setiap pernyataan dalam tingkatan Direksi;

- The existence of buildings and office environments, branch offices, subsidiaries, organizations/associations, Human Resources (HR).
- 2) External Information or Knowledge
 - The position of the Company compared to business partners, competitors and other stakeholders;
 - Relevant laws and regulations; and
 - Relationships and obligations with regulators and other relevant institutions.
- 3) Introduction Program can be done in the form of presentations, meetings or visits to Company facilities, introductions to Division Heads, Section Heads, Branch Office Heads and Employees in the Company and other programs.
- b. Establishing relationships with external agencies, such as Government Agencies, State-Owned Enterprises, private sector, mass media and the public in collecting and publishing information;
- c. Managing information and reviewing all information including its legal impact and preparing the information which will be communicated to the parties concerned as carefully as possible;
- d. Fostering relationships with investors/business partners/institution outside of the Company and Subsidiaries;
- e. Compiling and publishing responses upon questions from the public, suppliers and workers in a timely, accurate and objective manner;
- f. Provide explanations, answers and information to relevant parties, so as not to cause confusion that can affect the Company's image;
- g. Prepare material for Annual Reports made by each Division;
- h. Ensure that the Company's Annual Report has been prepared in accordance with the applicable provisions and submitted to related parties;
- i. Ensure that the approval of the Annual Report must be included in the agenda of the Annual GMS;
- j. Updating information material that is presented on the website of the Company on a regular basis;
- k. Coordinating the preparation and provision of materials for "Press Release" for each statement from the Board of Directors;

Hak dan Wewenang Sekretaris Perusahaan

1. Meminta data/informasi/keterangan yang dibutuhkan Direksi dan mengingatkan serta meminta penjelasan apabila ada keterlambatan atas data/informasi/ keterangan tersebut kepada pihak-pihak terkait di dalam Perusahaan untuk keperluan pelaksanaan tugas Direksi sepanjang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Mewakili Direksi untuk berhubungan dengan pihak-pihak di luar Perusahaan dan/atau di dalam Perusahaan sesuai dengan penugasan yang diberikan serta kebijakan yang telah ditentukan;
3. Menyetujui pemberian sponsor dan atau bantuan Perusahaan sesuai dengan kewenangan dan kebijakan Perusahaan;
4. Menyetujui program promosi, pameran yang akan diikuti oleh Perusahaan dengan terlebih dahulu menjelaskan atau menyampaikan proposal sesuai dengan kewenangan dan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Perusahaan;
5. Menggunakan fasilitas-fasilitas kesekretariatan untuk melaksanakan tugas-tugasnya;
6. Mendapatkan program pengembangan diri untuk meningkatkan kemampuannya dalam menjalankan fungsi sebagai Sekretaris Perusahaan;
7. Mendapatkan gaji, honorarium dan fasilitas lainnya sesuai dengan kebijakan Perusahaan dan perundang-undangan yang berlaku.

Uraian Pelaksanaan Tugas Sekretaris Perusahaan Bidang Sekretariat & Humas

1. Bidang Promosi
Di bidang promosi, perusahaan melakukan beberapa kegiatan antara lain melakukan pengkinian konten website perusahaan & portal BUMN, mendukung unit kerja pemasaran dalam penyelenggaraan pameran-pameran dan kemitraan.
2. Bidang Humas dan Publikasi
Dalam rangka meningkatkan citra positif perusahaan, perusahaan melakukan beberapa kegiatan antara lain melakukan promosi/iklan dalam rangka pendekatan kepada perbankan dan asosiasi; membuat dan menyelenggarakan event-event korporat, publikasi perusahaan & pemasaran produk; melaksanakan kegiatan Corporate Social Responsibility dengan pemberian santunan sembako kepada kaum dhuafa, turut serta dalam berbagai kegiatan sponsorship, serta melakukan pencetakan media promosi berupa brosur, *company profile*, Kalender dan Buku Agenda 2014. Disamping itu perusahaan juga melakukan sosialisasi & penilaian GCG dan KPKU untuk membangun konsep citra positif perusahaan yang ideal bagi perusahaan, meskipun nilai GCG dan KPKU perusahaan masih belum memuaskan dan bertekad untuk semakin ditingkatkan kedepannya.

The Rights and Authorities of the Corporate Secretary

1. Request data/information/explanation needed by the Board of Directors and to remind and ask for clarification should there be delay in the provision of data/information/ explanation to related parties, for the purpose of carrying out the duties of the Board of Directors as long as they are in accordance with applicable laws and regulations;
2. Representing the Board of Directors in dealing with parties outside the Company and/or within the Company in accordance with the assignments given and policies that have been determined;
3. Approve sponsorship and/or assistance provided by the Company in accordance with the Company's authority and policies;
4. Approve promotional and exhibition programs to be followed by the Company, by first explaining or submitting proposals in accordance with the authority and policies set by the Company;
5. Using secretarial facilities in carrying out their duties;
6. Receiving development program to improve capabilities in carrying out the functions of the Corporate Secretary;
7. Receiving salaries, honorarium and other facilities in accordance with Company policies and applicable laws.

Description of Duties of the Corporate Secretary in the Secretariat & Public Relations Sector

1. Promotion Sector
The Company carries out several promotional activities, including updating the content of the Company's website & SOE portals, supporting the marketing work units in organizing exhibitions and partnerships.
2. Public Relations and Publications Sector
To improve its positive image, the Company conducts promotional activities/advertising as an approach to banks and associations; create and hold corporate events, publications & product marketing; carrying out Corporate Social Responsibility activities by providing basic needs to the needy, participating in various sponsorship activities, as well as through various promotional media such as brochures, company profiles, Calendar and Agenda. In addition, the Company also conducts GCG socialization & assessment and KPKU to build an ideal image. Although the GCG and KPKU score are still unsatisfactory, the Company is determined to continue to improve it in the future.

3. Bidang Kesekretariatan

Di bidang kesekretariatan, perusahaan melakukan beberapa kegiatan antara lain: melaksanakan kebijakan tata kelola persuratan dan tata kelola kearsipan, dan *customer care*, mengadakan sosialisasi untuk pegawai di Kantor Pusat dan Kantor Cabang tentang *E-filing* Askrindo Syariah (Sistem Tata Persuratan).

3. Secretarial Sector

In the secretarial sector, the Company has performed several activities, namely mailing and archiving governance as well as customer care, disseminating Askrindo Syariah E-filing (Procedure for Correspondence System) for employees at the Head Office and Branch Offices.

SATUAN PENGAWASAN INTERN (SPI)

Perseroan membentuk Satuan Pengawasan Intern (SPI) sebagai Unit Internal Audit yang menjadi mitra strategis Manajemen dalam pengelolaan dan pengawasan kinerja Perseroan. SPI Perseroan secara struktural bertanggung jawab langsung dan menyampaikan laporan kepada Direktur Utama. SPI melakukan tugasnya berdasarkan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) tahun 2018 yang telah disetujui pada tanggal 29 Desember 2017.

INTERNAL AUDIT UNIT (IAU)

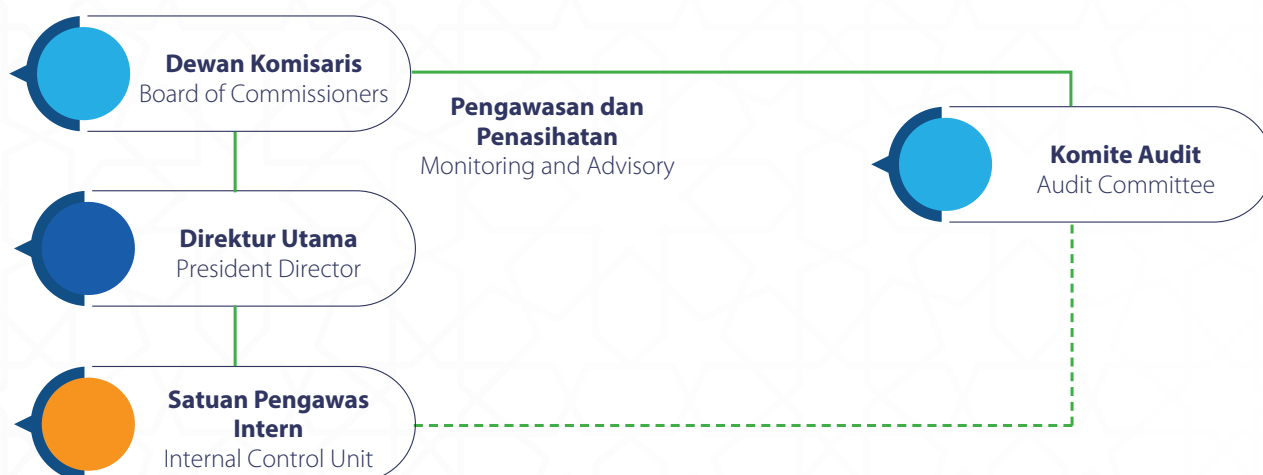
The Company established the Unit Internal Audit as a strategic partner for the Management in managing and monitoring the performance of the Company. The Company's SPI is structurally directly responsible and submits reports to the President Director. SPI performs its duties under the 2018 Annual Supervision Work Program which was approved on December 29, 2017.

Jumlah tenaga SPI pada tahun 2018 adalah sebanyak 3 (tiga) orang dan dipimpin oleh seorang kepala setingkat Kepala Divisi. Pada tahun 2018, SPI menerbitkan sebanyak 6 Laporan Hasil Audit (LHA) dimana dari LHA tersebut sudah selesai ditindak lanjuti dengan persentase sebesar 53%. SPI telah melakukan monitoring tindak lanjut temuan auditor eksternal khususnya temuan audit Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Kantor Akuntan Publik (KAP).

The number of SPI personnel in 2018 is as many as 3 (three) people and is led by a head at the level of a Division Head. In 2018, SPI issued 6 Audit Reports (LHA), of which the LHA has been followed up with a percentage of 53%. SPI has monitored the follow up of the findings of external auditors, especially the audit findings of the Financial Services Authority (OJK) and the Public Accountant Office (KAP).

Bagan Struktur dan Kedudukan SPI PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah

Structure and Position Chart of SPI



Kedudukan Satuan Pengawasan Internal (SPI) di dalam struktur organisasi

Kedudukan Satuan Pengawasan Internal (SPI) di dalam struktur organisasi dijelaskan sebagai berikut:

- SPI dalam pelaksanaan tugasnya membantu Direktur Utama dalam menjalankan fungsi assurance dan advisory bagi Perseroan;
- SPI dipimpin oleh seorang Kepala Satuan Pengawasan Internal;
- SPI berkedudukan dan bertanggung jawab langsung di bawah Direktur Utama;
- Kepala SPI diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama setelah mendapat persetujuan Dewan Komisaris;
- Kepala Satuan Pengawasan Internal bekerja secara independen dan obyektif serta ditempatkan sedemikian rupa, sehingga mampu melakukan tugas pengawasan intern sesuai yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Profil Kepala SPI

Berdasarkan Surat Keputusan Direktur No.118/KEP-DIR/VIII2017, Kepala SPI Perseroan dijabat oleh Agung Hamengku Budi. Pada saat penyampaian laporan ini, beliau telah menyelesaikan masa jabatannya sebagai Kepala SPI per 31 Mei 2019. Saat ini, tugas dan fungsi SPI dijalankan oleh Utami Dewi yang ditunjuk sebagai Plt. Kepala SPI berdasarkan Surat Keputusan Direksi No.156/KEP-DIR/SDM/V/2019.



Agung Hamengku Budi
Kepala Unit Audit Internal
Head of Internal Audit Unit

Warga Negara Indonesia, 56 tahun. Saat ini berdomisili di Jakarta.

Menjabat sebagai Kepala Unit Audit Internal sejak 2017 berdasarkan Surat Keputusan Direktur No.118/KEP-DIR/VIII2017. Sebelumnya, beliau merupakan Kepala Divisi SDM & Umum Perseroan (2015), Kepala Divisi Human Capital Development Perseroan (2016), *Individual Consultant* PT Kharisma Konsultama (2015), *Team Leader* (CEO) di National Management Consultant PNPM Mandiri Perdeaan (2001-2015), dan menjabat beberapa posisi di PT Bank Duta Tbk. (1989-2000) dan PT Astakona Indonesia (1988-1989).

The position of the Internal Audit Unit (IAU) within the structure of organization

The position of the Internal Audit Unit (IAU) within the structure of organization can be explained as follow:

- In performing its duties, IAU assisted the President Director in conducting the function of assurance and advisory for the Company.
- IAU is led by Head of Internal Audit Unit.
- The IAU is under and answers directly to the President Director.
- Head of IAU is appointed and dismissed by the President Director, based on the approval of the Board of Commissioners.
- Head of IAU works independently and objectively, and is positioned in such a way to enable him/her to perform internal audit duties as mandated by the prevailing rules and regulation.

Head of Internal Audit Unit Profile

Based on Director's Decree No.118/KEP-DIR/VIII2017, the Head of the Company's Internal Audit Unit is held by Agung Hamengku Budi. At the time of submission of this report, he had completed his term of office as Head of SPI as of May 31, 2019. At present, the duties and functions of IAU are carried out by Utami Dewi who is appointed as Acting Head of IAU based on Directors Decree No.156 / KEP-DIR / SDM / V / 2019.

Indonesian citizen, 56 years old. Currently domiciled in Jakarta.

Served as Head of Internal Audit Unit since 2017 based on Director's Decree No.118/KEP-DIR/VIII2017. Previously, he was Head of the Company's HR & General Division (2015), Head of the Company's Human Capital Development Division (2016), *Individual Consultant* at PT Kharisma Konsultama (2015), *Team Leader* (CEO) at National Management Consultant PNPM Mandiri Perdeaan (2001-2015), and held several positions at PT Bank Duta Tbk. (1989-2000) and at PT Astakona Indonesia (1988-1989).

Beliau meraih gelar Magister Management in Marketing dari IPWI pada 1995 dan gelar sarjana (S1) jurusan ekonomi dari Universitas Airlangga pada 1988.

He earned a Masters in Management in Marketing from IPWI in 1995 and a bachelor's degree in economics from Airlangga University in 1988.



Utami Dewi

Plt. Head of Internal Audit Unit

Acting Head of Internal Audit Unit

Warga Negara Indonesia, 31 tahun. Saat ini berdomisili di Jakarta.

Indonesian citizen, 31 years old. Currently domiciled in Jakarta.

Menjabat sebagai Plt. Kepala Unit Audit Internal sejak 2019 berdasarkan Surat Keputusan Direksi No.156/KEP-DIR/SDM/V/2019. Sebelumnya, beliau menjabat sebagai Kepala Departemen Keuangan dan Akuntansi Perseroan (2013-2019), Auditor KAP Soejatna Mulyana dan Rekan (2003-2013), *Staff Purchasing* PT Lima Tekno Indonesia (2001-2002), dan Staf Akunting Koperasi Baitul Maal Muhammadiyah Jakarta (2000-2001).

Served as Head of Internal Audit Unit since 2019 based on Directors Decree No.156/KEP-DIR/SDM/V/2019. Previously, she served as Head of the Ministry of Finance and Accounting of the Company (2013-2019), KAP Auditors Soejatna Mulyana and Partners (2003-2013), Staff Purchasing Staff of PT Lima Tekno Indonesia (2001-2002), and Accounting Staff of Baitul Maal Cooperative Muhammadiyah Jakarta (2000-2001).

Beliau mendapatkan gelar S1 jurusan akunting dari Unviersitas Trisakti Jakarta pada 2000.

She earned his bachelor's degree in accounting from Trisakti University Jakarta in 2000.

Uraian Tugas & Tanggung Jawab SPI

Tugas dan tanggung jawab SPI adalah sebagai berikut:

1. Menyusun dan melaksanakan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT);
2. Menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian internal dan sistem manajemen risiko sesuai dengan kebijakan Perseroan;
3. Melakukan pemeriksaan (audit) dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas di bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi dan kegiatan lainnya, baik yang tertuang dalam rencanatahun, maupun yang menjadi perhatian Direksi dan Komite Audit;
4. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang obyektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkat manajemen;
5. Membuat Laporan Hasil Audit dan menyampaikan laporan tersebut kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris melalui Komite Audit;

Description of Duties and Responsibilities of IAU

Duties and Responsibilities of IAU are as follow:

1. Preparing and implementing the Annual Monitoring Work Program (PKPT);
2. Auditing and evaluating the implementation of internal controls and risk management systems in accordance with Company's policies;
3. Conducting audits and assessments on the efficiency and effectiveness regarding the finance, accounting, operations, human resources, marketing, information technology and other activities, both those stated in the annual plan, as well as those that need the attention of the Board Directors and Audit Committees;
4. Providing suggestions for improvement and objective information about the activities to be audited at all levels of management;
5. Preparing Audit Report to be submitted to the President Director and the Board of Commissioners through the Audit Committee;

6. Memantau, menganalisis dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan;
7. Bekerja sama dengan Komite Audit;
8. Menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan audit internal yang dilakukannya; dan
9. Melakukan pemeriksaan khusus apabila diperlukan berdasarkan penugasan khusus dari Direktur Utama atau sebagai pengembangan pemeriksaan sebelumnya. SPI dalam melaksanakan audit internal yang efektif, wajib memastikan pemeriksaan dan penilaian atas kecukupan dan efektivitas struktur pengendalian intern serta kualitas kinerja Perseroan dalam rangka menjaga dan mengamankan kegiatan usaha Perseroan.

Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi SPI

Perseroan menyelenggarakan program peningkatan kompetensi SPI dengan melakukan program pengembangan kompetensi auditor secara sistematis dan berjenjang. Kebijakan Perseroan terkait pengembangan kompetensi SPI pada 2018 dilakukan melalui dua cara yaitu pengembangan kompetensi pada lembaga eksternal dan pengembangan kompetensi secara internal.

Uraian Pelaksanaan Tugas SPI Tahun 2018

Aktivitas SPI dalam melakukan pelaksanaan tugas selama tahun 2018 adalah melakukan audit di kantor cabang maupun kantor pusat dengan lingkup pengawasan terhadap penelaahan:

1. Atas efektivitas dan efisiensi operasi Perseroan dan memastikan tingkat pencapaian sasaran terhadap rencana yang ditetapkan;
2. Atas ketataan pada perundang-undangan, peraturan, ketentuan, sistem dan prosedur serta kebijakan Perseroan;
3. Atas keandalan pelaporan informasi keuangan yang terlaksana secara akurat dan tepat waktu;
4. Atas penerapan GCG dan memastikan bahwa program dan implementasinya telah dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip GCG

UNIT KEPATUHAN

Perseroan membentuk fungsi kepatuhan yang berada di Satuan Kerja Manajemen Risiko, Kepatuhan dan GCG. Satuan kerja ini bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama dan dipimpin oleh Kepala satuan Kerja dengan rekomendasi Dewan Komisaris.

Susunan Anggota Unit Kepatuhan

Ketua/Head : Catur Heru Putranto
Anggota/Member : Zaki

6. Monitoring, analyzing and reporting the implementation of follow-up corrections that have been suggested;
7. Cooperating with the Audit Committee;
8. Developing program to evaluate the quality of internal audit activities; and
9. Performing special audit whenever deemed necessary based on special assignments from the President Director or as further development of previous audit. In carrying out effective internal audits. The IAU should ensure the audit and assessment on the adequacy and effectiveness of internal control structure and the quality of the Company's performance in order to safeguard and secure the Company's business activities.

IAU Competence Training and Development

The Company organizes IAU competency development programs through auditor competency development programs carried out in a systematic and tiered manner. The Company's policies on IAU competency development in 2018 are carried out in two ways, namely the development of competencies in external institutions and competency development conducted internally.

Description of the Implementation of Duties of IAU in 2018

In carrying out the tasks during 2018, the IAU conducted audits in branch offices and head office, with the scope of the audit on:

1. Effectiveness and efficiency of the Company's operations and ensuring the level of achievement of targets against the plan;
2. Compliance with laws, regulations, regulations, systems and procedures and policies of the Company;
3. Reliability of the financial statement that is carried out accurately and in timely manner;
4. Implementation of GCG and ensuring that the program and its implementation are carried out in accordance with the principles of GCG

COMPLIANCE UNIT

The Company forms a compliance function under the Risk Management, Compliance and GCG Work Unit. This work unit answers directly to the President Director and is headed by the Head of the Work Unit with the recommendation of the Board of Commissioners.

Compliance Unit's Composition

Head : Catur Heru Putranto
Member : Zaki

Profil Ketua Unit Kepatuhan

Ketua Unit Kepatuhan dijabat oleh Catur Heru Putranto. Profil beliau telah disajikan dalam bab Sekretaris Perusahaan dalam laporan tahunan ini.

Uraian Tugas & Tanggung Jawab Unit Kepatuhan & GCG

Sesuai dengan Surat Keputusan Direksi No.130/KEP-DIR/IX/2016 tanggal 30 November 2016 tentang Struktur Organisasi, maka tugas dan tanggungjawab unit kepatuhan sebagai berikut:

1. Mengorganisasikan dan mengkoordinasikan praktik pengelolaan kepatuhan dan GCG.
2. Menyusun pedoman praktik tata kelola perusahaan (GCG).
3. Melaksanakan program monitoring praktik pelaksanaan GCG pada fungsi perusahaan terkait.
4. Membina kerja sama yang baik dengan divisi atau unit usaha terkait dalam rangka memantau kepatuhan Perseroan terhadap peraturan perundang-undangan;
5. Memastikan bahwa Perseroan mematuhi peraturan tentang persyaratan keterbukaan sejalan dengan penerapan prinsip-prinsip GCG.

Piagam Kepatuhan

Pada 16 Oktober 2017, telah dibuat Piagam kepatuhan dan SOP Kepatuhan yang merupakan bagian dari kebijakan dan proses pengelolaan kepatuhan di lingkungan Perseroan. Isi piagam tersebut adalah sebagai berikut:

- Bab I : Pendahuluan
 Bab II : Misi dan Tujuan Kepatuhan
 Bab III : Prinsip Kepatuhan
 Bab IV : Definisi dan Ruang Lingkup
 Bab V : pengelolaan Risiko Kepatuhan
 Bab VI : Wewenang dan Tanggung Jawab
 Bab VII : Hubungan Kerja
 Bab VIII : Pelaporan
 Bab IX : Penutup

SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL

Perseroan telah membentuk Sistem Pengendalian Internal yang efektif untuk mengamankan investasi dan asset Perseroan, mencakup:

1. Lingkungan pengendalian internal Perseroan yang dilaksanakan dengan disiplin dan terstruktur, yang terdiri dari:
 - a. Integritas, nilai etika, dan kompetensi karyawan.
 - b. Filosofi dan gaya Manajemen Perseroan.
 - c. Cara pelaksanaan kewenangan dan tanggung jawabnya.

Profile of the Head of the Compliance Unit

The Head of the Compliance Unit is held by Catur Heru Putranto. His profile has been presented in the Corporate Secretary chapter in this annual report.

Description of Duties & Responsibilities of the Compliance & GCG Unit

In accordance with the Board of Directors Decree No.130/KEP-DIR/IX/2016 dated 30 November 2016 concerning Organizational Structure, the duties and responsibilities of compliance units are as follows:

1. Organize and coordinate management of compliance and GCG.
2. Develop guidelines for corporate governance practices (GCG).
3. Carry out a monitoring program on GCG implementation practices in related company functions.
4. Fostering good cooperation with related divisions or business units in order to monitor the Company's compliance with laws and regulations;
5. Ensure that the Company complies with the regulations regarding disclosure requirements in line with the application of GCG principles.

Compliance Charter

Since 2017, the Company prepared a compliance Charter and Compliance SOP, which is part of the compliance management policies and processes within the Company.

- Chapter I : Introduction
 Chapter II : Mission and Compliance Objectives
 Chapter III : Compliance Principle
 Chapter IV : Definition and Scope
 Chapter V : Compliance Risk management
 Chapter VI : Authority and Responsibility
 Chapter VII : Employment Relations
 Chapter VIII : Reporting
 Chapter IX : Closing

INTERNAL CONTROL SYSTEM

The Company has established an effective Internal Control System to secure the Company's investments and assets, including:

1. The internal control environment, which is carried out in a disciplined and structured manner, consists of:
 - a. Integrity, ethical values, and competence of employees.
 - b. The philosophy and style of the Company's Management.
 - c. Procedures for implementing their authority and responsibilities.

- d. Pengorganisasian dan pengembangan Sumber Daya Manusia.
- e. Perhatian dan arahan yang dilakukan oleh Direksi.
2. Pengkajian terhadap pengelolaan risiko usaha (*risk assessment*), yaitu suatu proses untuk mengidentifikasi, menganalisa, dan menilai pengelolaan risiko yang relevan;
3. Aktivitas pengendalian, yaitu tindakan-tindakan yang dilakukan dalam suatu proses pengendalian terhadap kegiatan Perseroan pada setiap tingkat dan unit dalam struktur organisasi Perseroan, antara lain mengenai: kewenangan, otorisasi, verifikasi, rekonsiliasi, penilaian prestasi kerja, pembagian tugas dan keamanan terhadap aset Perseroan;
4. Sistem informasi dan komunikasi, yaitu suatu proses penyajian laporan mengenai kegiatan operasional, finansial, serta ketaatan dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan oleh Perseroan;
5. *Monitoring*, yaitu proses penilaian terhadap kualitas sistem pengendalian internal, termasuk fungsi internal audit pada setiap tingkat dan unit dalam struktur organisasi Perseroan, sehingga dapat dilaksanakan secara optimal; dan
6. Memastikan tindak lanjut atas rekomendasi dari SPI.

- d. Organizing and developing Human Resources.
- e. Attention and direction made by the Directors.
2. Assessment of business risk management, which is a process for identifying, analyzing, and assessing relevant risk management;
3. Controlling activities, namely actions made in order to control the activities at each level and unit within the Company's organizational structure, including: authority, authorization, verification, reconciliation, performance appraisal, division of tasks and security of assets Company;
4. Information and communication systems, a process of presenting reports on operational, financial, and compliance and compliance with the provisions of the laws and regulations by the Company;
5. Monitoring, the process of assessing the quality of the internal control system, including the internal audit function at each level and unit in the Company's organizational structure, so that it can be implemented optimally; and
6. Ensure follow-up on recommendations from SPI.



MANAJEMEN RISIKO

Perseroan membentuk Satuan Kerja Manajemen Risiko, Kepatuhan dan GCG sebagai Unit Pengelolaan Risiko dan kepatuhan serta implementasi GCG.

Unit ini bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama dan dipimpin oleh Kepala satuan Kerja atas rekomendasi Dewan Komisaris.

Satuan Kerja Manajemen Risiko, Kepatuhan & GCG merupakan unit kerja yang berada dibawah Direktur Utama. Satuan Kerja ini merupakan salah satu organ pendukung Tata Kelola Perusahaan selain Sekretaris Perusahaan dan Satuan Pengawasan Intern.

Susunan Anggota Manajemen Risiko

Ketua : Haryadi Rifai
 Anggota : Rias Wulan Fitri
 Muhamad Hasan Maulana

Profil Ketua Unit Manajemen Risiko

Haryadi Rifai
 Kepala Manajemen Risiko
 Warga Negara Indonesia, saat ini berdomisili di Jakarta, Indonesia.

Menjabat sebagai Ketua Manajemen Risiko sejak 2013. Beliau juga pernah menjabat sebagai Kepala Unit Audit Internal Perseroan (2014-2017) dan *Branch Manager*-area Jakarta & Banten (2013-2014). Sebelumnya, beliau menjabat berbagai posisi di PT Asuransi Adira Dinamika di antaranya sebagai Senior Risk Management Analyst (2012-2013), Senior Technical Development Analyst (2010-2012), Claim Operation MV & HE Dept. Head (2009-2010), Marine Underwriter (2009), Sharia Senior Marketing Head (2009), dan Sharia Office Head (2007-2009). Beliau juga pernah menjabat sebagai Marine Underwriter di PT QBE Pool Indonesia (2005-2007), Technical Manager di PT Visi Proteksi Konsulindo (2002-2004), beberapa posisi di PT Asuransi Grasia Unisarana (1996-2002), dan Marine Surveyor di PT Alsum Prakarsa Corporation (1992-1996).

Beliau meraih gelar Master of Science in Islamic Economics & Finance Post Graduate Program of Middle East & Islamic Studies Universitas Jakarta pada 2009 dan gelar S1 Bachelor in Financial Management Faculty of Economic dari Fishery Institute Department of Marine Fisheries Jakarta pada 1992.

RISK MANAGEMENT

The Company established a Risk Management, Compliance and GCG Work Unit as a Unit that manages Risk and compliance and GCG implementation.

This unit answers directly to the President Director and is headed by the Head of the Working Unit on the recommendation of the Board of Commissioners.

The Risk Management, Compliance & GCG Work Unit is a work unit under the President Director. This Work Unit is one of the supporting organs of Corporate Governance in addition to the Corporate Secretary and the Internal Audit Unit.

Composition of Risk Management

Head : Haryadi Rifai
 Member : Rias Wulan Fitri
 Muhamad Hasan Maulana

Head of Risk Management Profile

Haryadi Rifai
 Head of Risk Management
 Indonesian citizen, currently domiciled in Jakarta, Indonesia.

Served as Head of Risk Management since 2013. He has also served as Head of the Company's Internal Audit Unit (2014-2017) and Branch Manager of Jakarta & Banten (2013-2014). Previously, he held various positions at PT Asuransi Adira Dinamika, including Senior Risk Management Analyst (2012-2013), Senior Technical Development Analyst (2010-2012), Claim Operation MV & HE Dept. Head (2009-2010), Marine Underwriter (2009), Sharia Senior Marketing Head (2009), and Sharia Office Head (2007-2009). He also served as Marine Underwriter at PT QBE Pool Indonesia (2005-2007), Technical Manager at PT Visi Proteksi Konsulindo (2002-2004), several positions at PT Asuransi Grasia Unisarana (1996-2002), and Marine Surveyor at PT Alsum Prakarsa Corporation (1992-1996).

He earned his Master of Science degree in Islamic Economics & Finance, Post Graduate Program of Middle East & Islamic Studies at the University of Jakarta in 2009 and a Bachelor's degree in Financial Management, Faculty of Economics, from the Fishery Institute Department of Marine Fisheries, Jakarta in 1992.

Tugas

Manajemen Risiko memiliki tugas untuk:

1. Mengorganisasikan dan mengkoordinasikan kegiatan manajemen dan pengelolaan risiko korporat maupun transactional secara tepat dan sistematis, mulai dari pembuatan review risiko, penyusunan pedoman pengelolaan risiko, penyusunan rencana kerja. Mengorganisasikan proses pengelolaan risiko korporat mulai dari: Identifikasi risiko, pengukuran risiko, pengendalian risiko, pengujian dan *monitoring* pengendalian risiko.
2. Mengorganisasikan dan mengkoordinasikan praktik pengelolaan kepatuhan dan GCG, menyusun pedoman praktik tata kelola perusahaan (GCG). Melaksanakan program *monitoring* praktik pelaksanaan GCG pada fungsi perusahaan terkait.

Perseroan mengadopsi penilaian tingkat risiko sesuai ketentuan POJK No. 10/POJK.05/2014 tanggal 27 Agustus 2014 tentang Penilaian Tingkat Risiko Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank (LJKNB). Dari hasil penilaian *self assessment*, diperoleh nilai risiko Askrindo Syariah sebesar 1,22 yaitu pada tingkat risiko SEDANG RENDAH. Dalam hal ini probabilitas kegagalan perusahaan dalam memenuhi kewajibannya relatif rendah, perusahaan telah membangun sistem pengendalian risiko yang kuat. Secara Agregat perusahaan diindikasikan sangat sehat dan memiliki kemampuan untuk memenuhi kewajibannya kepada pemegang sertifikat/nasabah.

Ikhtisar Penilaian Tingkat Risiko per 31 Desember 2018

Tabel Ikhtisar Penilaian Tingkat Risiko Perseroan 2018

Jenis Risiko / Risk Type	Nilai Risiko / Value at Risk	Bobot / Weight	Risiko Bersih / Net Risk
1. Kepengurusan / Management	0,96	10%	0,08
2. Tata Kelola / Governance	1,34	10%	0,32
3. Strategi / Strategy	1,08	15%	0,20
3.1. Risiko Bawaan (A) / Inherent Risk (A)	1,15		
3.2. Manajemen & Pengendalian (B) / Management & Control (B)	1,00		
4. Operasional / Operational	1,12	15%	0,24
4.1. Risiko Bawaan (A) / Inherent Risk (A)	1,21		
4.2. Manajemen & Pengendalian (B) / Management & Control (B)	1,03		
5. Aset & Liabilitas / Asset & Liability	1,22	20%	0,44
5.1. Risiko Bawaan (A) / Inherent Risk (A)	1,23		
5.2. Manajemen & Pengendalian (B) / Management & Control (B)	1,20		
6. Penjaminan / Guarantee	1,47	30%	1,38
6.1. Risiko Bawaan (A) / Inherent Risk (A)	1,50		
6.2. Manajemen & Pengendalian (B) / Management & Control (B)	1,43		
(f)		100%	2,66
Total Nilai Bersih / Total Net Value			1,28
7. Dukungan Dana (Permodalan) / Funds (Capital) Support			
7.1. Kemampuan Pendanaan (Permodalan) / Funding Capacity (Capital)	1,10	55%	0,81
7.2. Tambahan Pendanaan (Permodalan) / Additional Funding (Capital)	1,10	45%	0,66
(g)	0,96	100%	1,46

Task

Risk Management is assigned to:

1. Organize and coordinate management activities and corporate risk management appropriately and systematically, start by reviewing risk, preparing risk management guidelines, preparing work plans. Organizing corporate risk management processes starting from: risk identification, risk measurement, risk control, testing and monitoring risk control.
2. Organizing and coordinating compliance and GCG practices, drawing up guidelines for corporate governance practices (GCG). Carry out monitoring program on GCG implementation in the related functions of companies.

The Company adopted a risk level assessment in accordance with the provisions of POJK No. 10/POJK.05/2014 dated 27 August 2014 concerning the Assessment of the Risk Level of Non-Bank Financial Services Institutions (LJKNB). The self-assessment on the risk faced by Askrindo Syariah resulted in a score of 1.22, or at the level of MEDIUM LOW risk. In this case, the Company's probability of failure in meeting its obligations is relatively low, since the Company has built a strong risk control system. Aggregately, the Company is indicated to be very healthy and has the ability to fulfill its obligations to the policy holder/customer.

Overview of the 2018 Risk Level

Table of Overview of the 2018 Risk Level

Jenis Risiko / Risk Type	Nilai Risiko / Value at Risk	Bobot / Weight	Risiko Bersih / Net Risk
Total Nilai Risiko Dukungan Dana (Permodalan) (I) / Total Value of Funds (Capital) Support Risk (I)			1,10
Bobot Total Nilai Bersih dan Dukungan Dana 50%:50% / Weighted Total Net Value and Funds Support 50%:50%			
Nilai Tingkat Risiko Keseluruhan (J) / Overall Risk Level (J) Value			1,20
Tingkat Risiko / Risk Level			

Evaluasi atas Efektivitas Sistem Manajemen Risiko

Perseroan secara berkala melakukan evaluasi atas efektivitas sistem manajemen risiko Perseroan yang dilakukan melalui masing-masing divisi. Direksi dibantu oleh Satuan Manajemen Risiko dan Satuan Pengawasan Internal serta saran dari Dewan Komisaris melakukan kajian dan merumuskan strategi pengelolaan dan mitigasi yang diperlukan. Evaluasi terhadap Sistem Manajemen Risiko Perseroan pada 2017 telah berjalan efektif. Hasil kajian menjadi rekomendasi yang harus ditindaklanjuti dalam perbaikan Sistem Manajemen Risiko Perseroan yang lebih baik pada masa Mendatang.

KOMITE DI BAWAH DIREKSI

Direksi telah membentuk komite-komite yang bertugas membantu Direksi untuk menangani kebijakan Perseroan pada bidang khusus, untuk menangani strategi atau risiko dan kemudian melaporkan kembali kepada Direksi tentang keputusan yang diambil atau rekomendasi yang dibuat. Adapun komite-komite tersebut adalah:

1. Komite Produk

Tugas

- Melakukan evaluasi atas usulan Kebijakan dan Prosedur Produk yang diajukan.
- Melakukan evaluasi dan usulan atas konten Perjanjian Kerjasama (PKS) dan produk dengan mitra bisnis.
- Melakukan evaluasi atas kinerja produk penjaminan yang telah dan akan dipasarkan dan membuat rekomendasi terkait upaya peningkatan yang diperlukan.
- Menyelenggarakan rapat Komite Produk dalam hal (i) terdapat usulan PKS/produk baru atau perubahan atas PKS/produk yang telah ada yang perlu didaftarkan kepada regulator terkait dan/atau melibatkan DPS untuk memperoleh persetujuan dari aspek syariah; atau (ii) adanya ketentuan baru yang dikeluarkan oleh regulator terkait dengan produk penjaminan dan/atau pemasarannya; atau (iii) karena alasan lain sepanjang dianggap perlu oleh Komite Produk.

Evaluation of the Effectiveness of the Risk Management System

The Company periodically evaluates the effectiveness of the Company's risk management system carried out through each division. The Board of Directors is assisted by the Risk Management Unit and the Internal Control Unit, and gets advice from the Board of Commissioners about conducting studies and formulate management and mitigation strategies. The evaluation of the Company's Risk Management System in 2018 has been done effectively. The results of the study are recommendations that must be followed up in improving the Company's Risk Management System in the future.

COMMITTEES UNDER THE BOARD OF DIRECTORS

The Board of Directors has formed committees whose task is to assist the Board of Directors in handling the Company's policies in specific areas, to handle strategy or risk and then report back to the Board of Directors about the decisions taken or recommendations made. The committees are:

1. Product Committee

Task

- Evaluate the proposed Product Policies and Procedures submitted.
- Evaluating and proposing the contents of the Cooperation Agreement (PKS) and products with business partners.
- Evaluate the performance of guarantee products that have been and will be marketed and make recommendations related to the necessary improvement efforts.
- Hold a Product Committee meeting in the event that (i) there is a proposal for a PKS/new product or an amendment to an existing PKS/product that needs to be registered with the relevant regulator and/or involves a DPS to obtain approval from the sharia aspect; or (ii) there are new provisions issued by regulators related to the guarantee product and/or its marketing; or (iii) for other reasons as long as deemed necessary by the Product Committee.

Wewenang

- Komite Produk dapat memberikan usulan dan/atau keputusan untuk mengubah produk penjaminan atau menghentikan produk dan/atau pemasarannya.
- Komite Produk dapat mengakses catatan atau informasi ke seluruh unit kerja JPAS yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya termasuk informasi produk dan keuangan.
- Komite Produk dapat bekerjasama dengan komite-komite dan unit kerja lainnya.

Hak dan Kewajiban

- Anggota Komite Produk wajib menjalankan tugas dengan baik dengan berpedoman pada SK Komite serta lampirannya yang terkait.
- Anggota Komite Produk wajib menjaga kerahasiaan atas seluruh dokumen, data, informasi dan segala sesuatu yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas Komite.
- Anggota Komite Produk wajib membuat laporan yang ditandatangani Ketua Komite dan Anggota Komite atas setiap pelaksanaan tugas disertai dengan rekomendasi jika ada.
- Anggota Komite wajib menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal.
- Dalam rangka menghindari terjadinya tumpang tindih pelaksanaan tugas di antara komite-komite di bawah Direksi dan kerjasama pelaksanaan, Komite Produk wajib melakukan koordinasi dengan komite-komite di bawah Direksi.

Masa Tugas

- Anggota Komite Produk yang merupakan anggota Direksi, masa tugasnya sebagai anggota komite sama dengan masa jabatannya sebagai Direksi yang ditentukan oleh RUPS.
- Anggota Komite Produk yang merupakan anggota Direksi, berhenti dengan sendirinya sebagai anggota komite apabila masa jabatannya sebagai anggota Direksi berakhir.
- Apabila anggota Direksi yang menjadi Ketua Komite Produk berhenti sebelum masa tugasnya sebagai anggota Direksi berakhir maka jabatan Ketua Komite digantikan oleh Direksi lainnya dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari.
- Anggota/Sekretaris Komite Produk selain Direksi, masa tugasnya sama dengan masa jabatan yang melekat padanya.

Authority

- The Product Committee can provide proposals and/or decisions to change the product guarantee or stop the product and/or marketing.
- The Product Committee can access records or information to all JPAS work units related to the implementation of their duties including product and financial information.
- Product Committees can collaborate with committees and other work units.

Rights and obligations

- Product Committee members are required to carry out their duties properly based on the Committee Decree and related attachments.
- Members of the Product Committee must maintain the confidentiality of all documents, data, information and everything related to the implementation of the Committee's duties.
- Product Committee Members are required to make a report signed by the Chairperson of the Committee and Committee Members on each task implementation accompanied by recommendations if any.
- Committee Members must provide sufficient time to carry out their duties and responsibilities optimally.
- In order to avoid overlapping in the implementation of tasks between committees under the Board of Directors and cooperation in implementation, the Product Committee must coordinate with committees under the Board of Directors.

Tenure

- Product Committee members who are members of the Board of Directors, their tenure as committee members is the same as their term of office as Directors determined by the GMS.
- Product Committee Members who are members of the Board of Directors, terminate themselves as members of the committee if their term of office as a member of the Board of Directors ends.
- If a member of the Board of Directors who becomes the Chairperson of the Product Committee quits before his term of office as a member of the Board of Directors ends, the position of Chair of the Committee is replaced by other Directors within no later than 30 (thirty) days.
- Members/Secretaries of the Product Committee other than the Directors, the term of office is the same as the term of office attached to it.

2. Komite Penjaminan

Tugas

- Melakukan evaluasi kesesuaian antara pedoman (termasuk kebijakan & SOP) penjaminan dengan pelaksanaan kegiatan penjaminan yang mencakup antara lain kegiatan akseptasi, aktuarial, penjaminan ulang, klaim, dan subrogasi.
- Melakukan penelaahan dan memberikan pendapat atas Kebijakan Penjaminan serta kebijakan lainnya yang diwajibkan oleh regulator.
- Memberikan rekomendasi atas setiap Kebijakan Penjaminan khususnya akseptasi dan klaim yang menjadi limit pejabat yang diberi kewenangan limit akseptasi dan klaim.
- Memutuskan kegiatan penjaminan antara lain persetujuan akseptasi termasuk terms & kondisi yang disyaratkan;
- Menjaga kehati-hatian dalam kegiatan akseptasi, aktuarial, reguarantee, klaim dan subrogasi agar dapat mendapatkan manfaat maksimal bagi setiap pemangku kepentingan.
- Melaksanakan tugas-tugas tertentu lainnya yang terkait dengan fungsi dan ruang lingkup Komite Penjaminan.

Wewenang

- Komite Penjaminan dapat mengakses catatan atau informasi ke seluruh unit kerja JPAS yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya termasuk informasi keuangan dan manajemen.
- Komite Penjaminan dapat bekerjasama dengan komite-komite dan unit kerja lainnya.

Hak dan Kewajiban

- Anggota Komite Penjaminan wajib menjalankan tugas dengan baik dengan berpedoman pada SK Komite Penjaminan.
- Anggota Komite wajib menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal.
- Anggota Komite Penjaminan wajib menjaga kerahasiaan atas seluruh dokumen, data, informasi dan segala sesuatu yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas Komite Penjaminan.
- Komite Penjaminan wajib membuat dan menyampaikan laporan kepada pihak-pihak terkait yang ditandatangani Ketua Komite dan Anggota Komite atas setiap pelaksanaan tugas disertai dengan rekomendasi jika ada.
- Dalam rangka menghindari terjadinya tumpang tindih pelaksanaan tugas di antara komite-komite di bawah Direksi, Komite Penjaminan wajib melakukan koordinasi dengan komite lainnya.

2. Guarantee Committee

Task

- Evaluate the suitability of the guideline (including policies & SOPs) of guarantees with the implementation of guarantee activities which include acceptance, actuarial, reinsurance, claims and subrogation activities.
- Reviewing and providing opinions on the Guarantee Policy and other policies required by the regulator.
- Provide recommendations on each Guarantee Policy, especially acceptances and claims that are the official limit that is given the authority of acceptance and claim limits.
- Deciding guarantee activities including acceptance agreements including terms & conditions that are required;
- Maintain prudence in acceptances, actuarial, regulatory, claims and subrogation activities in order to get maximum benefits for each stakeholder.
- Carry out certain other tasks related to the function and scope of the Guarantee Committee.

Authority

- The Guarantee Committee can access records or information to all JPAS work units relating to the implementation of their duties including financial and management information.
- The Guarantee Committee can cooperate with the committees and other work units.

Rights and obligations

- Members of the Guarantee Committee must carry out their duties properly based on the Decree of the Guarantee Committee.
- Committee members must provide sufficient time to carry out their duties and responsibilities optimally.
- Members of the Guarantee Committee must maintain the confidentiality of all documents, data, information and everything related to the implementation of the Assurance Commission's duties.
- The Guarantee Committee must prepare and submit reports to related parties signed by the Chairperson of the Committee and Members of the Committee on each implementation of the tasks accompanied by recommendations if any.
- In order to avoid overlapping of tasks between committees under the Board of Directors, the Guarantee Committee must coordinate with other committees.

Masa Tugas

- Anggota Komite Penjaminan yang merupakan anggota Direksi, masa tugasnya sebagai anggota komite sama dengan masa jabatannya sebagai Direksi yang ditentukan oleh RUPS.
- Anggota Komite Penjaminan yang merupakan anggota Direksi berhenti dengan sendirinya sebagai anggota komite apabila masa jabatannya sebagai anggota Direksi berakhir.
- Apabila anggota Direksi yang menjadi Ketua Komite Penjaminan berhenti sebelum masa tugasnya sebagai anggota Direksi berakhir maka jabatan Ketua Komite Penjaminan digantikan oleh Direksi lainnya dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari.
- Anggota/Sekretaris Komite Penjaminan selain Direksi, masa tugasnya sama dengan masa jabatan yang melekat padanya.

3. Komite Manajemen Risiko

Tugas

- Melakukan evaluasi dan rekomendasi atas:
 - Penyusunan kebijakan dan pedoman manajemen risiko termasuk strategi manajemen risiko, penetapan selera risiko (*risk appetite*) dan toleransi risiko (*risk tolerance*) yang diambil.
 - Penyempurnaan pelaksanaan manajemen risiko korporat.
 - Penetapan hal-hal yang terkait dengan keputusan bisnis yang menyimpang dari kebijakan/prosedur normal, regulasi dan melampaui rencana bisnis dan limit yang telah ditetapkan sebelumnya yang belum diatur dalam komite lainnya.
 - Budaya sadar risiko (*risk awareness*) agar terbentuk dalam setiap aktivitas perusahaan.
 - Pengambilan keputusan tentang kebijakan dan strategi perusahaan terkait dengan pengelolaan risiko operasional maupun non operasional yang bersifat strategis dan korporat yang dapat mempengaruhi terhadap kesinambungan usaha perusahaan.
- Melakukan kajian dan pemantauan atas Profil Risiko Perusahaan serta upaya-upaya mitigasi yang dilakukan oleh Manajemen terhadap faktor-faktor risiko utama.
- Memantau kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, pengendalian dan sistem informasi manajemen risiko.
- Melakukan pembahasan terhadap laporan-laporan risiko termasuk laporan tingkat risiko.

Tenure

- A member of the Guarantee Committee who is a member of the Board of Directors, his term of office as a member of the committee is the same as his term of office as the Board of Directors determined by the GMS.
- Members of the Guarantee Committee who are members of the Board of Directors terminate themselves as members of the committee if their term of office as members of the Board of Directors ends.
- If a member of the Board of Directors who becomes the Chairperson of the Guarantee Committee quits before his term of office as a member of the Board of Directors ends, the position of Chair of the Guarantee Committee is replaced by other Directors within no later than 30 (thirty) days.
- Members/Secretaries of the Guarantee Committee other than the Directors, the term of office is the same as the term of office attached to it.

3. Risk Management Committee

Task

- Evaluate and recommend:
 - Formulation of policies and guidelines for risk management including risk management strategies, determination of risk appetite and risk tolerance taken.
 - Improving the implementation of corporate risk management.
 - Determination of matters related to business decisions that deviate from normal policies/procedures, regulations and exceed business plans and predetermined limits that have not been regulated in other committees.
 - A risk awareness culture in order to be formed in every company activity.
 - Decision making regarding company policies and strategies related to strategic and corporate operational and non-operational risk management that can affect the sustainability of the company's business.
- Conducting studies and monitoring of the Company's Risk Profile and mitigation efforts undertaken by Management of the main risk factors.
- Monitor the adequacy of the process of identification, measurement, monitoring, control and risk management information systems.
- Conduct discussions on risk reports including risk level reports.

- e) Melakukan pemantauan kepatuhan perusahaan terhadap Anggaran Dasar, peraturan Otoritas Jasa Keuangan, serta peraturan per undangan lainnya yang terkait dengan manajemen risiko.
- f) Menjalani kerjasama dengan konsultan dari luar, akuntan, asesor atau pihak eksternal lainnya yang memberikan saran kepada Komite.

Wewenang

- a) Komite Manajemen Risiko dapat mengakses catatan atau informasi ke seluruh unit kerja JPAS yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya termasuk informasi keuangan dan manajemen.
- b) Komite Manajemen Risiko dapat bekerjasama dengan komite-komite dan unit kerja lainnya.

Hak dan Kewajiban

- a) Anggota Komite Manajemen Risiko wajib menjalankan tugas dengan baik dengan berpedoman pada Tata Kerja Komite.
- b) Anggota Komite wajib menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal.
- c) Anggota Komite wajib menjaga kerahasiaan atas seluruh dokumen, data, informasi dan segala sesuatu yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas Komite Penjaminan.
- d) Komite Manajemen Risiko wajib membuat dan menyampaikan laporan kepada pihak-pihak terkait yang ditandatangani Ketua Komite dan Anggota Komite atas setiap pelaksanaan tugas disertai dengan rekomendasi jika ada.
- e) Dalam rangka menghindari terjadinya tumpang tindih pelaksanaan tugas di antara komite-komite di bawah Direksi, Komite Penjaminan wajib melakukan koordinasi dengan komite lainnya.

Masa Tugas

- a) Anggota Komite Manajemen Risiko yang merupakan anggota Direksi, masa tugasnya sebagai anggota komite sama dengan masa jabatannya sebagai Direksi yang ditentukan oleh RUPS.
- b) Anggota Komite Manajemen Risiko yang merupakan anggota Direksi berhenti dengan sendirinya sebagai anggota komite apabila masa jabatannya sebagai anggota Direksi berakhir.
- c) Apabila anggota Direksi yang menjadi Ketua Komite Manajemen Risiko berhenti sebelum masa tugasnya sebagai anggota Direksi berakhir maka jabatan Ketua

- e) Monitor the company's compliance with the Articles of Association, Financial Services Authority regulations, and other regulations related to risk management.
- f) Collaborate with external consultants, accountants, assessors or other external parties who provide advice to the Committee.

Authority

- a) The Risk Management Committee can access records or information to all JPAS work units related to the implementation of their duties including financial and management information.
- b) The Risk Management Committee can work with committees and other work units.

Rights and obligations

- a) Members of the Risk Management Committee must carry out their duties properly based on the Committee's Work Procedures.
- b) Committee members must provide sufficient time to carry out their duties and responsibilities optimally.
- c) Committee Members must maintain the confidentiality of all documents, data, information and everything related to the implementation of the Guarantee Committee's duties.
- d) The Risk Management Committee must prepare and submit reports to related parties signed by the Chair of the Committee and Members of the Committee on each task implementation accompanied by recommendations if any.
- e) In order to avoid overlapping of tasks between committees under the Board of Directors, the Guarantee Committee must coordinate with other committees.

Tenure

- a) A member of the Risk Management Committee who is a member of the Board of Directors, his term of office as a member of the committee is the same as his term of office as the Board of Directors determined by the GMS.
- b) Members of the Risk Management Committee who are members of the Board of Directors terminate themselves as members of the committee if their term of office as members of the Board of Directors ends.
- c) If a member of the Board of Directors who becomes the Chairperson of the Risk Management Committee quits before his term of office as a member of the Board of

Komite Penjaminan digantikan oleh Direksi lainnya dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari.

- d) Anggota/Sekretaris Komite Manajemen Risiko selain Direksi, masa tugasnya sama dengan masa jabatan yang melekat padanya.

4. Komite Personalia

Tugas

- Melakukan evaluasi dan rekomendasi atas rumusan kebijakan dan arahan yang terkait dengan pengelolaan sumber daya insani di JPAS.
- Tugas pada butir a. Tersebut diatas antara lain mencakup hal-hal sebagai berikut:
 - Remunerasi dan insentif pegawai;
 - Mutasi dan rotasi pegawai;
 - Promosi, demosi, detasering, dan pemutusan hubungan kerja pegawai;
 - Disiplin pegawai;
 - Hal-hal lain yang terkait dengan penanganan masalah pegawai terkait dengan pihak eksternal dan hubungan industrial.
- Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan dan pengelolaan personalia yang telah ditetapkan.
- Menjalin kerjasama dengan konsultan dari luar atau pihak eksternal lainnya yang memberikan saran kepada Komite.

Wewenang

- Komite Personalia dapat mengakses catatan atau informasi ke seluruh unit kerja JPAS yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya termasuk informasi kepegawaian dan keuangan.
- Komite Personalia dapat bekerjasama dengan komite-komite dan unit kerja lainnya.

Hak dan Kewajiban

- Anggota Komite Personalia wajib menjalankan tugas dengan baik dengan berpedoman pada Tata Kerja Komite.
- Anggota Komite wajib menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal.
- Anggota Komite wajib menjaga kerahasiaan atas seluruh dokumen, data, informasi dan segala sesuatu yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas Komite Personalia.

Directors ends, the position of Chair of the Guarantee Committee is replaced by other Directors within no later than 30 (thirty) days.

- d) Members / Secretaries of the Risk Management Committee other than the Directors, the term of office is the same as the term of office attached to it.

4. Personnel Committee

Task

- Evaluating and recommending policy formulations and directives related to human resource management at JPAS.
- Tasks in point a. The above include, among others, the following matters:
 - Remuneration and employee incentives;
 - Employee movements and rotation;
 - Promotion, demotion, detasering, and termination of employee employment;
 - Discipline of employees;
 - Other matters related to handling employee problems related to external parties and industrial relations.
- Conduct an evaluation of the implementation of policies and personnel management that have been determined.
- Establish cooperation with outside consultants or other external parties who provide advice to the Committee.

Authority

- The Personnel Committee can access records or information to all JPAS work units related to the implementation of their duties including staffing and financial information.
- The Personnel Committee can work with committees and other work units.

Rights and obligations

- Members of the Personnel Committee are required to carry out their duties properly based on the Committee's Work Procedures.
- Committee members must provide sufficient time to carry out their duties and responsibilities optimally.
- Committee Members shall maintain the confidentiality of all documents, data, information and everything related to the performance of the Personnel Committee's duties.

- d) Komite Personalia wajib membuat dan menyampaikan laporan kepada pihak-pihak terkait yang ditandatangani Ketua Komite dan Anggota Komite atas setiap pelaksanaan tugas disertai dengan rekomendasi jika ada.
- e) Dalam rangka menghindari terjadinya tumpang tindih pelaksanaan tugas di antara komite-komite di bawah Direksi, Komite Personalia wajib melakukan koordinasi dengan komite lainnya.

Masa Tugas

- a) Anggota Komite Personalia yang merupakan anggota Direksi, masa tugasnya sebagai anggota komite sama dengan masa jabatannya sebagai Direksi yang ditentukan oleh RUPS.
- b) Anggota Komite Personalia yang merupakan anggota Direksi berhenti dengan sendirinya sebagai anggota komite apabila masa jabatannya sebagai anggota Direksi berakhir.
- c) Apabila anggota Direksi yang menjadi Ketua Komite Personalia berhenti sebelum masa tugasnya sebagai anggota Direksi berakhir maka jabatan Ketua Komite Personalia digantikan oleh Direksi lainnya dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari.
- d) Anggota/Sekretaris Komite Personalia selain Direksi, masa tugasnya sama dengan masa jabatan yang melekat padanya.

5. Komite Investasi

Tugas

- a) Merumuskan kebijakan dan arahan investasi.
- b) Memantau pelaksanaan kebijakan, SOP dan arahan investasi yang telah ditetapkan.
- c) Melakukan evaluasi atas pelaksanaan dan arahan investasi yang telah ditetapkan.
- d) Menjaga kehati-hatian dalam kegiatan investasi agar dapat mendapatkan manfaat maksimal bagi setiap pemangku kepentingan.

Wewenang

- a) Komite Investasi dapat mengakses catatan atau informasi ke seluruh unit kerja JPAS yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya termasuk informasi keuangan dan manajemen.
- b) Komite Investasi dapat bekerjasama dengan komite-komite dan unit kerja lainnya.

- d) The Personnel Committee is required to make and submit reports to related parties signed by the Chairperson of the Committee and Members of the Committee on each implementation of the tasks accompanied by recommendations if any.
- e) In order to avoid overlapping of tasks between committees under the Board of Directors, the Personnel Committee must coordinate with other committees.

Tenure

- a) Members of the Personnel Committee who are members of the Board of Directors, their tenure as committee members is the same as their term of office as Directors determined by the GMS.
- b) Members of the Personnel Committee who are members of the Board of Directors terminate themselves as members of the committee if their term of office as members of the Board of Directors ends.
- c) If a member of the Board of Directors who becomes the Chairperson of the Personnel Committee quits before his term of office as a member of the Board of Directors ends, the position of Chairperson of the Personnel Committee is replaced by other Directors within no later than 30 (thirty) days.
- d) Members / Secretaries of the Personnel Committee other than the Directors, the term of office is the same as the term of office attached to it.

5. Investment Committee

Task

- a) Formulate investment policies and directions.
- b) Monitor the implementation of policies, SOPs and investment directives that have been determined.
- c) Evaluate the implementation and direction of the investment that has been determined.
- d) Maintain prudence in investment activities in order to get maximum benefit for each stakeholder.

Authority

- a) The Investment Committee can access records or information to all JPAS work units related to the implementation of their duties including financial and management information.
- b) The Investment Committee can work with committees and other work units.

Hak dan Kewajiban

- Anggota Komite Investasi wajib menjalankan tugas dengan baik dengan berpedoman pada SK Komite Investasi.
- Anggota Komite wajib menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal.
- Anggota Komite Investasi wajib menjaga kerahasiaan atas seluruh dokumen, data, informasi dan segala sesuatu yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas Komite Investasi.
- Komite Investasi wajib membuat dan menyampaikan laporan kepada pihak-pihak terkait yang ditandatangani Ketua Komite dan Anggota Komite atas setiap pelaksanaan tugas disertai dengan rekomendasi jika ada.
- Dalam rangka menghindari terjadinya tumpang tindih pelaksanaan tugas di antara komite-komite di bawah Direksi, Komite Investasi wajib melakukan koordinasi dengan komite lainnya.

Masa Tugas

- Anggota Komite Investasi yang merupakan anggota Direksi, masa tugasnya sebagai anggota komite sama dengan masa jabatannya sebagai Direksi yang ditentukan oleh RUPS.
- Anggota Komite Investasi yang merupakan anggota Direksi berhenti dengan sendirinya sebagai anggota komite apabila masa jabatannya sebagai anggota Direksi berakhir.
- Apabila anggota Direksi yang menjadi Ketua Komite Investasi berhenti sebelum masa tugasnya sebagai anggota Direksi berakhir maka jabatan Ketua Komite Investasi digantikan oleh Direksi lainnya dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari.
- Anggota/Sekretaris Komite Investasi selain Direksi, masa tugasnya sama dengan masa jabatan yang melekat padanya.

6. Komite Pengadaan Barang dan Jasa

Tugas

- Melakukan evaluasi atas usulan Kebijakan dan Prosedur Pengadaan Barang & Jasa yang diajukan.
- Melakukan evaluasi atas pelaksanaan kegiatan pengadaan barang & jasa.
- Melakukan evaluasi atas kinerja pengadaan barang & Jasa yang telah dilakukan termasuk vendor yang digunakan dan membuat rekomendasi terkait upaya perbaikan yang diperlukan.

Rights and obligations

- Investment Committee members must carry out their duties properly based on the Investment Committee Decree.
- Committee members must provide sufficient time to carry out their duties and responsibilities optimally.
- Members of the Investment Committee must maintain the confidentiality of all documents, data, information and everything related to the implementation of the investment committee's duties.
- The Investment Committee must prepare and submit reports to related parties signed by the Chairperson of the Committee and Members of the Committee on each implementation of the tasks accompanied by recommendations if any.
- In order to avoid overlapping of tasks between committees under the Board of Directors, the Investment Committee must coordinate with other committees.

Tenure

- An Investment Committee member who is a member of the Board of Directors, his term of office as a member of the committee is the same as his term of office as the Board of Directors determined by the GMS.
- Members of the Investment Committee who are members of the Board of Directors terminate themselves as members of the committee if their term of office as members of the Board of Directors ends.
- If a member of the Board of Directors who becomes the Chair of the Investment Committee quits before his term of office as a member of the Board of Directors ends, the position of Chair of the Investment Committee is replaced by other Directors within no later than 30 (thirty) days.
- Members/Secretaries of the Investment Committee other than the Board of Directors, whose term of office is the same as the term of office attached to it.

6. Goods and Services Procurement Committee

Task

- Evaluate the proposed Policies and Procedures for Procurement of Goods & Services submitted.
- Evaluate the implementation of goods & services procurement activities.
- Evaluate the performance of the procurement of goods & services that have been carried out including the vendors used and make recommendations related to the necessary improvement efforts.

- d) Menyelenggarakan rapat Komite Pengadaan Barang & Jasa dalam hal (i) terdapat usulan PKS dengan vendor atas Pengadaan Barang & Jasa baru atau perubahan atas PKS yang telah dibuat; atau (ii) adanya ketentuan baru yang dikeluarkan oleh regulator terkait dengan Pengadaan Barang & Jasa; atau (iii) karena alasan lain sepanjang dianggap perlu oleh Komite Pengadaan Barang & Jasa.

Wewenang

- Komite Pengadaan Barang & Jasa dapat memberikan usulan dan/atau keputusan atas Pengadaan Barang & Jasa sesuai dengan ketentuan.
- Komite Pengadaan Barang & Jasa dapat mengakses catatan atau informasi ke seluruh unit kerja JPAS yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya termasuk informasi Pengadaan Barang & Jasa dan anggaran.
- Komite Pengadaan Barang & Jasa dapat bekerjasama dengan komite-komite dan unit kerja lainnya.

Hak dan Kewajiban

- Anggota Komite Pengadaan Barang & Jasa wajib menjalankan tugas dengan baik dengan berpedoman pada SK Komite serta lampirannya yang terkait.
- Anggota Komite Pengadaan Barang & Jasa wajib menjaga kerahasiaan atas seluruh dokumen, data, informasi dan segala sesuatu yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas Komite.
- Anggota Komite Pengadaan Barang & Jasa wajib membuat laporan yang ditandatangani Ketua Komite dan Anggota Komite atas setiap pelaksanaan tugas disertai dengan rekomendasi jika ada.
- Anggota Komite wajib menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal.
- Dalam rangka menghindari terjadinya tumpang tindih pelaksanaan tugas di antara komite-komite di bawah Direksi dan kerjasama pelaksanaan, Komite Pengadaan Barang & Jasa wajib melakukan koordinasi dengan komit lainnya.

Masa Tugas

- Anggota Komite Pengadaan Barang & Jasa yang merupakan anggota Direksi, masa tugasnya sebagai anggota komite sama dengan masa jabatannya sebagai Direksi yang ditentukan oleh RUPS.

- d) Organize meetings of the Goods & Services Procurement Committee in the event that (i) there is a PKS proposal with a vendor for the procurement of new Goods & Services or changes to the PKS that have been made; or (ii) there are new provisions issued by regulators relating to the Procurement of Goods & Services; or (iii) for other reasons as long as deemed necessary by the Goods & Services Procurement Committee.

Authority

- The Goods & Services Procurement Committee can provide proposals and/or decisions on the Procurement of Goods & Services in accordance with the provisions.
- The Goods & Services Procurement Committee can access records or information to all JPAS work units related to the implementation of their duties including information on Procurement of Goods & Services and the budget.
- The Goods & Services Procurement Committee can cooperate with committees and other work units.

Rights and obligations

- Members of the Goods & Services Procurement Committee must carry out their duties properly based on the Committee's Decree and related attachments.
- Members of the Goods & Services Procurement Committee shall maintain the confidentiality of all documents, data, information and everything related to the implementation of the Committee's duties.
- Members of the Goods & Services Procurement Committee are required to make a report signed by the Chairperson of the Committee and Members of the Committee on each execution of duties accompanied by recommendations if any.
- Committee Members must provide sufficient time to carry out their duties and responsibilities optimally.
- In order to avoid overlapping of tasks between committees under the Board of Directors and cooperation in implementation, the Goods & Services Procurement Committee must coordinate with other commitments.

Tenure

- Members of the Goods & Services Procurement Committee who are members of the Board of Directors, their tenure as committee members is the same as their term of office as Directors determined by the GMS.

- b) Anggota Komite Barang Pengadaan Barang & Jasa yang merupakan anggota Direksi, berhenti dengan sendirinya sebagai anggota komite apabila masa jabatannya sebagai anggota Direksi berakhir.
- c) Apabila anggota Direksi yang menjadi Ketua Komite Barang Pengadaan Barang & Jasa berhenti sebelum masa tugasnya sebagai anggota Direksi berakhir maka jabatan Ketua Komite digantikan oleh Direksi lainnya dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari.
- d) Anggota/Sekretaris Komite Pengadaan Barang & Jasa selain Direksi, masa tugasnya sama dengan masa jabatan yang melekat padanya.

- b) Members of the Goods & Services Procurement Committee, who are members of the Board of Directors, terminate themselves as members of the committee if their term of office as members of the Board of Directors ends.
- c) If a member of the Board of Directors who becomes the Chairperson of the Goods & Services Procurement Committee quits before his term of office as a member of the Board of Directors ends, the position of the Chairperson of the Committee is replaced by other Directors within no later than 30 (thirty) days.
- d) Members/Secretaries of the Goods & Services Procurement Committee other than the Directors, the term of office is the same as the term of office attached to it.

HUBUNGAN KERJA DENGAN PIHAK EKSTERNAL

Perusahaan Asuransi dan Reasuransi

Dalam rangka untuk pengelolaan risiko dan memperluas pangsa pasar penjaminan, PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah menjalin kerjasama dengan perusahaan asuransi/ reasuransi sebagai berikut:

Tabel Daftar Rekanan Perusahaan Asuransi dan Reasuransi

No.	Nama Perusahaan / Company Name	Jenis Kerjasama / Type of Collaboration
1	PT Askrindo (Persero)	Wanprestasi / Default
2	PT Reasuransi Nasional Indonesia Syariah	Wanprestasi dan Meninggal dunia / Default and Demise
3	PT Reasuransi Syariah Indonesia	Wanprestasi dan Meninggal dunia / Default and Demise
4	Asuransi Takaful Keluarga	Meninggal dunia / Demise
5	Asuransi BRI Life - Syariah	Meninggal dunia / Demise
6	Avrist Assurance - Syariah	Meninggal dunia / Demise
7	Asuransi Jiwa Amanah Gita	Meninggal dunia / Demise
8	PT BNI Life - Syariah	Meninggal dunia / Demise
9	PT Asuransi Bumida - Syariah	Gangguan Usaha / Business Disruption
10	PT Asuransi Staco - Syariah	Gangguan usaha dan Asuransi Kebakaran / Business Disruption and Fire Insurance
11	PT Asuransi Chubb Syariah Indonesia	PHK dan Asuransi Kebakaran / Layoffs and Fire Insurance

Akuntan Perseroan

Sebagaimana keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tahunan yang tercantum dalam Risalah Rapat Umum Pemegang Saham PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah tentang Pengesahan Laporan Keuangan Tahun Buku 2018, RUPS melimpahkan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan Kantor Akuntan Publik (KAP), dalam rangka pelaksanaan audit atas Laporan Keuangan Tahun Buku 2018.

Guna menyajikan laporan keuangan kepada pemegang saham yang memiliki integritas, Perseroan menggunakan jasa auditor eksternal Kantor Akuntan Publik (KAP) Tanubrata

RELATIONSHIP WITH THE EXTERNAL PARTIES

Insurance and Reinsurance Companies

In order to manage risk and expand market share, PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah enters into collaboration agreement with the following insurance/ reinsurance companies:

Table of Insurance and Reinsurance Partners

The Company's Accountant

As stated in the Minutes of the General Meeting of Shareholders of PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah concerning Ratification of Financial Statements for the 2018 Financial Year, the GMS delegates authority to the Board of Commissioners to appoint Public Accounting Firm (KAP) to conduct the audit on the 2018 Financial Statements.

In order to present financial reports with integrity to shareholders, the Company uses the services of external auditor from the Public Accountant Firm Tanubrata Sutanto

Sutanto Bambang & Rekan (No. izin Akuntan Publik OJK No.622/KM.1/2016). untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2018. Selain audit Laporan Keuangan, Perseroan tidak menggunakan jasa lain dari Akuntan Publik.

Bambang & Rekan (No. izin Akuntan Publik OJK No.622/KM.1/2016) to audit the Company's Financial Statements for the financial year 2018 The Company did not use other services from Public Accountants aside of the said financial statements audit services.

Tabel informasi akuntan publik 5 (lima) tahun terakhir

Table of information about public accountants in the last 5 (five) years

Tahun / Year	Periode Penugasan / Period of Assignment	Akuntan / Accountant	Kantor Akuntan Publik / Public Accountant Firm	Biaya (Termasuk PPN) / Fee (Inc VAT)
2018	Tahun Buku 2018 / Fiscal Year 2018	E. Wisnu Susilo Broto	KAP Tanubrata Sutanto Bambang & Rekan	Rp90 juta / million
2017	Tahun Buku 2017 / Fiscal Year 2017	Jacinta Mirawati	Mirawati Sensi Indris	Rp70 juta / million
2016	Tahun Buku 2016 / Fiscal Year 2016	Safaat Widjabrata	Soejatna, Mulyana & Rekan	Rp60 juta / million
2015	Tahun Buku 2015 / Fiscal Year 2015	Safaat Widjabrata	Soejatna, Mulyana & Rekan	Rp60 juta / million
2014	Tahun Buku 2014 / Fiscal Year 2014	Safaat Widjabrata	Soejatna, Mulyana & Rekan	Rp53 juta / million

Tabel Perusahaan yang dialihkan kepada pihak lain (Outsourcing)

Table of Outsourcing to Other Parties

No.	Fungsi yang Dialihkan kepada Pihak Lain / Function Outsourced to Other Parties	Pihak Lain yang Menjadi Partner / Outsource Partners	Jangka Waktu Perjanjian / Duration of the Agreement	Alasan Outsourcing / Reason for Outsourcing
1	Keamanan dan <i>cleaning service</i> / Security and cleaning service	PT Usayasa Reksa Tohaga	2013 - 2018	Kemudahan penyediaan tenaga kerja / Ease of providing labor
2	Pemasaran / Marketing	PT Inti Mitra Setia	2017 - 2019	Meningkatkan jaringan Pemasaran / Improve network marketing
3	<i>Data Center, Local Maintenance</i> / Data Center, Local Maintenance	PT Duta Pratama Teknologi		Perawatan dan pengelolaan Data center / Maintenance and management of data center
4	Langganan <i>co-location Data center</i> / Colocation Data center	PT Telkom Sigma	2017 - 2019	Pengelolaan colocation data center / Data center colocation management

KETERBUKAAN INFORMASI

Sebagai bentuk transparansi kepada masyarakat, Perseroan secara berkala menyebarluaskan informasi yang terkait dengan aktivitas dan kinerja keuangan. Keterbukaan informasi tersebut dalam rangka memenuhi amanat dan ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Undang- Undang Republik Indonesia No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan untuk itu pula maka Manajemen telah menetapkan sebuah Pedoman *Transparansi & Disclosure* melalui Surat Keputusan Direksi No. 072/KEP-DIR/XII/2015 tanggal 23 Desember 2015. Sarana atau media yang digunakan untuk menyampaikannya antara lain *website* dan media surat kabar dalam bentuk *pers release* tentang kinerja dan hasil usaha Perseroan.

Media yang digunakan untuk menyampaikan informasi perusahaan antara lain *website*, email Korporat, intranet, media surat kabar dan *media online*.

DISCLOSURE OF INFORMATION

As a form of transparency to the public, the Company periodically disseminates information related to its activities and financial performance. The information disclosure is to fulfill the mandate and provisions stipulated in the Law of the Republic of Indonesia No. 14 of 2008 concerning Public Information Disclosure and for this reason, the Management established a Guidelines for Transparency & Disclosure through the Board of Directors Decree No. 072/KEP-DIR/XII/2015 dated December 23, 2015. The means or media used to deliver it include website and newspaper media, through press release about the performance and results of the Company's operations.

The media used to deliver company information include websites, corporate e-mails, intranets, newspaper media and online media.

Website

Pengelolaan *website* Perseroan dilaksanakan oleh Tim Pengelola *Website* Perseroan di bawah Sekretaris Perusahaan, yang tugasnya antara lain menjaga/ memastikan *Website* Perseroan tetap memenuhi kepatuhan terhadap ketentuan keterbukaan informasi kepada pihak eksternal dan *update*/pembaharuan isi konten secara berkala. Hal-hal yang disampaikan, khususnya dalam penyampaian laporan dan informasi penting lainnya yang dimuat dalam *website* Perseroan www.askrindosyariah.co.id adalah sebagai berikut: Kinerja Keuangan yang berisi Laporan Keuangan Penting (5 tahun), Laporan Keuangan tahun berjalan, Laporan Tahunan (*Annual Report*). Pedoman dan Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan. Struktur Organisasi, Produk Perseroan, Visi dan Misi serta CSR. Peluang untuk Karir dan Pengadaan Barang. Konten Publik mengenai Aktivitas Manajemen.

E-Mail Korporat

Agar komunikasi dapat dilakukan secara lebih efektif, Perseroan telah memiliki jaringan intranet yang memadai. Salah satunya dengan menggunakan sarana *corporate e-mail* sehingga antarunit kerja dan antar pegawai dapat melakukan korespondensi surat menyurat secara lebih efisien berkat pengurangan penggunaan kertas (*paperless*).

BENTURAN KEPENTINGAN TERKAIT HUBUNGAN BERELASI

Kebijakan mengenai benturan kepentingan terdapat di dalam Buku Pedoman *Good Corporate Governance* yang telah disahkan dengan Surat Keputusan Direksi No. 067/ KEPDIR/XII/2015 tanggal 23 Desember 2015 dan Pedoman Benturan Kepentingan disahkan dengan Surat Keputusan Direksi No. 070/KEP-DIR/XII/2015 tanggal 23 Desember 2015. Kebijakan benturan kepentingan mengatur antara lain melarang setiap Insan Perseroan memiliki saham atau melakukan investasi dengan badan usaha lain yang bermitra bisnis atau memiliki keterkaitan bisnis dengan Perseroan, memiliki usaha yang berhubungan langsung atau terkait dengan aktivitas Perseroan, merangkap bekerja di perusahaan lain atau memegang jabatan pada lembaga lembaga/institusi lain dalam bentuk apapun, kecuali telah mendapat persetujuan tertulis dari Direksi dan/atau Dewan Komisaris dan melakukan perbuatan/ tindakan atau menempatkan diri pada posisi yang dapat menimbulkan benturan kepentingan antara dirinya dengan Perseroan, untuk menghindari konflik antara kepentingan pribadi dengan kepentingan Perseroan.

Sepanjang tahun 2018, tidak terdapat transaksi dengan benturan kepentingan, dengan demikian tidak ada kerugian atau hal yang mengurangi keuntungan.

Website

The Company's Website Management Team is under the Corporate Secretary, with the task of maintaining/ensuring that the Company's Website always complies with the provisions on information disclosure to external parties and updating content regularly. Matters submitted on the Company's website www.askrindosyariah.co.id, specifically related to important reports and information, are as follows: Financial Performance that contains Important Financial Reports (5 years), current year Financial Reports, Annual Reports. Guidelines and Implementation of Corporate Governance. Organizational Structure, Company Products, Vision and Mission and CSR. Opportunities for Career and Procurement of Goods. Public Content regarding Management Activities.

Corporate E-mail

In order to carry out communication more effectively, the Company already has installed adequate intranet network. One of them is by using corporate e-mail facilities to facilitate efficient correspondence between work units and employees while reducing paper consumption.

CONFLICTS OF INTERESTS WITH RELATED PARTIES

The policy regarding conflicts of interest is stipulated in the Good Corporate Governance Handbook which is ratified by Decree of the Board of Directors No. 067/ KEPDIR/XII/2015 dated 23 December 2015 and Conflict of Interest Guidelines which were ratified by Decree of the Board of Directors No. 070/ KEP-DIR/XII/2015 dated December 23, 2015. Conflict of interest policies, among others, prohibit all Company Employees from owning shares or investing with other business entities that have business partnerships or relationships with the Company, have businesses that are directly related to the activities of the Company, concurrently work in other companies or hold positions in institutions in any form, without written approval from the Board of Directors and/or the Board of Commissioners and carry out actions or hold positions that can cause a conflict of interest between themselves and the Company.

Throughout 2018, there were no transactions containing conflicts of interest, thus there are no losses incurred or things that might reduce profits.

KODE ETIK

Perseroan menyadari akan pentingnya arti implementasi GCG sebagai salah satu alat untuk berinteraksi & berkomunikasi yang etis, tidak hanya kepada Pemilik Modal (*shareholders*) namun juga segenap Pemangku Kepentingan (*stakeholders*). Oleh karena itu, Perseroan berkomitmen mengimplementasikan yang salah satunya dilakukan melalui penerapan Pedoman Etika Bisnis dan Etika Kerja (*Code of Conduct*) secara konsisten.

Kebijakan Manajemen untuk hal tersebut adalah melalui surat keputusan Direksi 068/KEP-DIR/XII/2015 tanggal 23 Desember 2015, tentang Pedoman Etika Bisnis dan Etika Kerja (*Code of Conduct*) yang diberlakukan untuk seluruh individu yang bertindak atas nama PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah, baik Dewan Komisaris, Direksi maupun Pegawai yang selanjutnya disebut Insan Perseroan, Pemegang Saham serta seluruh *stakeholder* atau mitra kerja yang melakukan transaksi bisnis dengan Perseroan.

Pedoman Etika Bisnis dan Etika Kerja terdiri dari etika bisnis Perseroan dan Etika Kerja Insan Perseroan dari Jajaran Manajemen yang disusun untuk mempengaruhi, membentuk, mengatur dan melakukan kesesuaian tingkah laku sehingga tercapai keluaran yang konsisten yang sesuai dengan budaya Perseroan dalam mencapai visi dan misi Perseroan. Perseroan senantiasa mendorong kepatuhan terhadap standard etika dan berkomitmen untuk mengimplementasikannya, serta mewajibkan seluruh pimpinan dari setiap tingkatan dalam Perseroan, bertanggung jawab untuk memastikan bahwa pedoman etika bisnis dan etika kerja dipatuhi dan dijalankan dengan baik pada jajaran masing-masing.

Implementasi Kode Etik

Sebagai bentuk pernyataan bahwa pedoman Pedoman Etika Bisnis dan Etika Kerja dipatuhi dan dijalankan dengan baik, maka kepada seluruh anggota Dewan Komisaris, Direksi dan setiap individu (karyawan) diwajibkan untuk menandatangani pernyataan secara pribadi, setiap tahunannya.

Sosialisasi Kode Etik

Penyebaran *Code of Conduct* dilakukan dengan memanfaatkan berbagai media seperti *website*, surat edaran dan sosialisasi kepada segenap Pegawai, Direksi & Dewan Komisaris.

Isi Kode Etik

Kode etik Perseroan mengatur kebijakan nilai-nilai etis yang dinyatakan secara eksplisit sebagai suatu standar perilaku yang harus menjadi pedoman seluruh Insan Perseroan. Isi kode etik Perseroan yang dihimpun menjadi satu buku pegangan bagi seluruh tenaga kerja Perseroan adalah sebagai berikut:

CODE OF CONDUCT

The Company realizes the importance of implementing GCG as one of the tools to interact & communicate ethically, not only to shareholders but also to all stakeholders. Therefore, the Company is committed to implementing it through the application of Business Ethics and Code of Conduct, consistently.

The Management's policy regarding this matter is outlined in the Decree of the Board of Directors 068/KEP-DIR/ XII/2015 dated 23 December 2015, concerning the Code of Conduct which applies to all individuals acting on behalf of PT Askrindo Syariah Financing Guarantee, both the Board of Commissioners, Directors and Employees, hereinafter referred to as Company Personnel, Shareholders and all stakeholders or business partners who conduct business transactions with the Company.

The Guidelines for Business Ethics and Work Ethics, which consist of the Company's business ethics and the Code of Conducts, are prepared to influence, shape and regulate behavior, so that output is consistent with the Company's culture in order to achieve the Company's vision and mission. The Company always encourages compliance with ethical standards and commits to its implementation, and requires all leaders from every level in the Company, to be responsible for ensuring that the guidelines are adhered to and executed properly in their respective sections.

Implementation of the Code of Conduct

As a form of statement that the guidelines for the Code of Business Ethics and Work Ethics are adhered to and executed properly, all members of the Board of Commissioners, Board of Directors and individuals (employees) are required to sign statements individually, annually.

Dissemination of the Code of Conduct

The dissemination of the Code of Conduct is done by utilizing various media such as websites, circulars and outreach to all employees, Directors & Board of Commissioners.

Code of Conduct Content

The Code of Conduct Content regulates ethical values policy stated explicitly as a behaviour standard that should guide all components of the Company. The Code of Conduct Content is summarized as one guide book for all employees of the Company. The content is as follows:

Bab 1	: Pendahuluan
Bab 2	: Etika Bisnis
Bab 3	: Etika Kerja
Bab 4	: Penerapan dan Penegakan
Bab 5	: Penutup

Chapter 1	: Introduction
Chapter 2	: Business Ethics
Chapter 3	: Work Ethics
Chapter 4	: Application and Enforcement
Chapter 5	: Closing

PERKARA HUKUM YANG DIHADAPI SELAMA 2018

Sepanjang tahun 2018, Perseroan tidak menghadapi perkara hukum baik oleh anggota Dewan Komisaris, Direksi, maupun seluruh pegawai Perseroan.

INFORMASI SANKSI ADMINISTRATIF

Sepanjang 2018, Perseroan tidak mendapatkan sanksi administrasi yang dikenakan kepada Entitas, anggota Dewan Komisaris dan Direksi, oleh otoritas terkait (pasar modal, perbankan dan lainnya).

PERNYATAAN ANTI GRATIFIKASI, KORUPSI DAN PENYUAPAN

Perseroan senantiasa melakukan sosialisasi atas program pengendalian gratifikasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan *board manual*, Perseroan menetapkan bahwa Dewan Komisaris, Direksi, dan pejabat satu level di bawah Direksi dilarang untuk memberikan atau menawarkan atau menerima baik langsung ataupun tidak langsung sesuatu yang berharga kepada pejabat pemerintah dan pihak-pihak lain yang mempengaruhi atau sebagai imbalan atas apa yang telah dilakukannya dan tindakan lainnya sesuai peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Dewan Komisaris, Direksi, dan pejabat satu level di bawah Direksi juga diwajibkan melaporkan harta kekayaan kepada Lembaga Pemerintah yang berwenang. Selain itu juga untuk senantiasa mencegah dan menghindarkan diri dari praktik-praktik korupsi, gratifikasi, dan penyuapan dalam cara dan bentuk apapun untuk kepentingan apapun yang diyakini dan dianggap dapat merugikan Perseroan.

PERNYATAAN PENOLAKAN PEMBERIAN DANA UNTUK KEGIATAN POLITIK

Sejalan dengan *board manual*, Dewan Komisaris, Direksi, dan pejabat satu level di bawah Direksi tidak diperkenankan menanggapi permintaan dari pihak manapun dan dengan alasan apapun, baik permintaan secara langsung dari pihak pihak tertentu termasuk dan tidak terbatas pada pejabat/pegawai di lingkungan instansi Pemerintah dan partai politik yang berkaitan dengan permintaan sumbangan, termasuk yang berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa di Perseroan.

LEGAL CASES IN 2018

Throughout 2018, the Company did not face any legal cases either by members of the Board of Commissioners, Directors or all employees of the Company

INFORMATION ABOUT ADMINISTRATIVE SANCTIONS

Throughout 2018, the Company did not get administrative sanctions from related authorities (capital markets, banking and others), imposed on Entities, or members of the Board of Commissioners and Directors.

ANTI GRATIFICATION, CORRUPTION AND BRIBERY STATEMENTS

The Company continues to socialize gratification control programs in accordance with applicable laws and regulations. Based on the manual board, the Company stipulates that the Board of Commissioners, the Board of Directors and officials of one level below the Board of Directors are prohibited from giving or offering or receiving directly or indirectly anything of value to government officials and other parties that influence or in return has been done and other actions are in accordance with the applicable laws and regulations.

The Board of Commissioners, the Board of Directors, and officials of one level below the Board of Directors are also required to report assets to the authorized Government Institutions, in order to prevent and avoid corruption, gratuity, and bribery in any way and any form for any interest that can be detrimental to the Company.

FUNDING FOR POLITICAL ACTIVITIES

In accordance with the manual board, the Board of Commissioners, the Board of Directors, and officials one level below the Board of Directors are not permitted to respond to any requests from any party and for any reason, directly from certain parties including and not limited to officials/employees of Government agencies and political parties, relating to donations, and the procurement of goods and services in the Company.

SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN

Keberadaan dan Tujuan *Whistleblowing System*

Perseroan senantiasa mendorong setiap karyawan untuk berperilaku adil dan terbuka dalam melaksanakan seluruh kegiatan dengan mengedepankan nilai-nilai profesionalisme, kejujuran, integritas, dan etika yang tinggi. Dalam lingkup lingkungan Perseroan, upaya ini mendapatkan penekanan melalui serangkaian kebijakan terkait prinsip-prinsip dan standar tingkah laku yang ditetapkan bagi seluruh karyawan dalam Kode Etik Perseroan.

Sejalan dengan komitmen menegakkan nilai-nilai yang terkandung dalam Kode Etik, Perseroan pada 23 Desember 2015 telah membentuk Pedoman *Whistle Blowing System* yang kemudian kembali disempurnakan pada 16 Oktober 2017. Pedoman ini dimaksudkan sebagai panduan kebijakan dan mekanisme bagi seluruh karyawan dalam melaporkan setiap perilaku tidak etis, baik telah terjadi maupun masih berupa kecurigaan, kecurangan, atau pelanggaran atas Kode Etik Perseroan.

Jenis Pelanggaran yang Dapat Dilaporkan

Lingkup pelaporan/penyingkapan yang dapat ditindaklanjuti oleh Tim meliputi:

1. Korupsi
2. Suap
3. Benturan Kepentingan
4. Pencurian
5. Kecurangan
6. Melanggar hukum dan peraturan perusahaan

Pengelola Laporan

1. Direksi, jika terlapor adalah insan Perseroan selain Tim Pengelola pelaporan Pelanggaran, Dewan Komisaris, DPS, dan Direksi;
2. Dewan Komisaris, jika terlapor adalah Direksi; dan
3. Direktur Utama, jika terlapor adalah Dewan Komisaris, DPS, dan Tim Pengelola Pelaporan Pelanggaran.

Penyampaian Laporan Pelanggaran

- a. Pelaporan pelanggaran yang diduga dilakukan oleh Pegawai ditujukan kepada Direksi PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah.
- b. Pelaporan pelanggaran yang diduga dilakukan oleh Direksi ditujukan kepada Dewan Komisaris PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah.

WHISTLE BLOWING SYSTEM

Existence and Purpose of Whistleblowing System

The Company always encourages every employee to demonstrate fair and transparent conduct in carrying out all activities by upholding the values of professionalism, honesty, integrity, and high ethics. In the Company's environment, this effort is promoted through a series of policies on the principles and standards of behavior set out for all employees in the Company's Code of Ethics.

In line with the commitment to uphold the values set forth in the Code of Ethics, the Company on December 23, 2015 established the Whistle Blowing System Guidelines on December 23, 2015 which were then improved on October 16, 2017. These guidelines are intended as guides to policy and mechanism for all employees in reporting any unethical behavior, whether it has occurred or is suspected to have occurred, fraud or violation to the Company's Code of Ethics.

Types of Violations That Can Be Reported

The scope of reporting/disclosure that can be followed up by the Team includes:

1. Corruption
2. Bribes
3. Conflict of Interest
4. Theft
5. Fraud
6. Violation to company laws and regulations

Report Management

1. Board of Directors, if the reported is a member of the Company other than the Whistleblowing Management Team, the Board of Commissioners, DPS, and the Board of Directors;
2. Board of Commissioners, if the reported is the Board of Directors; and
3. President Director, if the reported is the Board of Commissioners, DPS, and the Whistleblowing Management Team.

Submission of Violation Reports

- a. Violation report allegedly committed by employees is addressed to the Board of Directors of PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah.
- b. Violation report allegedly committed by the Board of Directors is addressed to the Board of Commissioners of PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah.

- c. Pelaporan pelanggaran yang diduga dilakukan oleh Dewan Komisaris, DPS, dan Tim Pengelola Pelaporan Pelanggaran ditujukan kepada Direktur Utama PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah.
- d. Apabila penerima pelaporan pelanggaran bukan Dewan Komisaris, Direktur Utama atau Direksi maka yang bersangkutan wajib meneruskan pelaporan pelanggaran tersebut kepada Dewan Komisaris, Direktur Utama atau Direksi.
- e. Perusahaan menerima setiap pelaporan pelanggaran yang diajukan dari *stakeholders* dan/atau perwakilan *stakeholders* baik secara lisan maupun tertulis.
- f. Perusahaan dalam hal ini Tim Pengelola Pelaporan Pelanggaran, memberikan penjelasan mengenai kebijakan dan prosedur penyelesaian pelaporan pelanggaran pada saat *stakeholders* dan/atau perwakilan *stakeholders* mengajukan pelaporan pelanggaran.
- g. Penyampaian pelaporan pelanggaran yang diduga dilakukan oleh Pegawai dilakukan secara tertulis dengan mekanisme sebagai berikut:

- 1) Melalui *website* perusahaan www.askrindosyariah.co.id
- 2) Menyampaikan surat resmi yang ditujukan kepada Direksi, dengan cara diantar langsung atau melalui pos ke Perseroan dengan alamat:

Direksi
PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah
u.p Tim Pengelola Pelaporan Pelanggaran
Jalan Gedung Kesenian No. 3-7
Jakarta Pusat 10710

- h. Penyampaian pelaporan pelanggaran yang diduga dilakukan oleh Direksi dilakukan secara tertulis dengan mekanisme sebagai berikut :
- 1) Melalui *website* Perseroan yaitu www.askrindosyariah.co.id
- 2) Menyampaikan surat resmi yang ditujukan kepada Dewan Komisaris, dengan cara diantar langsung, atau melalui pos ke Perseroan dengan alamat:

Dewan Komisaris
PT Penjamin Pembiayaan Askrindo Syariah
u.p Tim Pengelola Pelaporan Pelanggaran
Jalan Gedung Kesenian No. 3-7
Jakarta Pusat 10710

- c. Violation report allegedly committed by the Board of Commissioners, DPS, and Whistleblowing Management Team is addressed to the Board of Directors of PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah.
- d. If the recipient of a violation report is not the Board of Commissioners, the President Director or the Board of Directors, the person concerned must forward the report of the violation to the Board of Commissioners, the President Director or the Board of Directors.
- e. The company receives every violation report submitted from stakeholders and/or stakeholder representatives both verbally and in writing.
- f. The company, in this case the Whistleblowing Management Team, provides an explanation of the policies and procedures for reporting violations when stakeholders and/or representatives of stakeholders submit violation report.
- g. Submission of violation report allegedly committed by Employees is done in writing with the following mechanism:

- 1) Through the company's website www.askrindosyariah.co.id
- 2) Delivering official letters addressed to the Directors, by direct delivery or by post to the Company at:

Board of Directors
PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah
Attn. Whistleblowing Management Team
Jalan Gedung Kesenian No. 3-7
Central Jakarta 10710

- h. Submission of violation report allegedly committed by the Board of Directors is done in writing with the following mechanism:
- 1) Through the Company's website, www.askrindosyariah.co.id
- 2) Delivering official letters addressed to the Board of Commissioners, by direct delivery or by post to the Company at:

Board of Commissioners
PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah
Attn. Whistleblowing Management Team
Jalan Gedung Kesenian No. 3-7
Central Jakarta 10710

- i. Penyampaian pelaporan pelanggaran yang diduga dilakukan oleh Dewan Komisaris, DPS, dan Tim Pengelola Pelaporan Pelanggaran dilakukan secara tertulis dengan mekanisme sebagai berikut:

- 1) Melalui *website* Perseroan www.askrindosyariah.co.id
- 2) Menyampaikan surat resmi yang ditujukan kepada Direktur Utama, dengan cara diantar langsung atau melalui pos ke Perseroan dengan alamat:

Direktur Utama
 PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah
 u.p Tim Pengelola Pelaporan Pelanggaran
 Jalan Gedung Kesenian No. 3-7
 Jakarta Pusat 10710

- j. Pelaporan pelanggaran secara tertulis dilengkapi fotokopi identitas dan bukti pendukung seperti dokumen yang berkaitan dengan transaksi yang dilakukan dan/atau pelaporan pelanggaran yang akan disampaikan.
- k. Pelaporan pelanggaran secara tertulis tanpa identitas wajib dilengkapi bukti pendukung seperti dokumen yang berkaitan dengan transaksi yang dilakukan dan/atau pelaporan pelanggaran yang akan disampaikan.
- l. Perseroan wajib memberikan tanda terima jika pelaporan pelanggaran diajukan secara tertulis beridentitas.
- m. Apabila pelaporan pelanggaran diajukan oleh perwakilan *stakeholders*, maka selain dokumen di atas juga diserahkan dokumen lainnya yaitu:
 - 1) Fotokopi bukti identitas *stakeholders* dan perwakilan *stakeholders*.
 - 2) Surat Kuasa dari *stakeholders* kepada perwakilan *stakeholders* yang menyatakan bahwa *stakeholders* memberikan kewenangan bertindak untuk dan atas nama *stakeholders*.
 - 3) Jika perwakilan *stakeholders* adalah lembaga atau badan hukum, maka harus dilampiri dengan dokumen yang menyatakan bahwa pihak yang mengajukan pelaporan berwenang untuk mewakili lembaga atau badan hukum tersebut.
- l. Perseroan wajib menyampaikan bukti tanda terima pelaporan pelanggaran kepada *stakeholders* dan/atau perwakilan *stakeholders* yang mengajukan pelaporan.

Penanganan Pengaduan

- a. Tim Pengelola Pelaporan Pelanggaran melakukan verifikasi atas laporan yang masuk berdasarkan catatan tim. Tim Pengelola Pelaporan Pelanggaran akan memutuskan perlu tidaknya dilakukan investigasi atas pelaporan pelanggaran

- i. Submission of violation report allegedly committed by the Board of Commissioners, DPS, and Whistleblowing Management Team is done in writing with the following mechanism:

- 1) Through the Company's *website* www.askrindosyariah.co.id
- 2) Delivering official letters addressed to the Board of Commissioners, by direct delivery or by post to the Company at:

President Director
 PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah
 Attn. Whistleblowing Management Team
 Jalan Gedung Kesenian No. 3-7
 Central Jakarta 10710

- j. Written violation report is accompanied by a photocopy of identity card and supporting evidence such as documents relating to the transaction carried out and/or violation reports to be submitted.
- k. Written violation report made by anonymous must be accompanied by supporting evidence such as documents relating to the transaction carried out and/or violation reports to be submitted.
- l. The Company must provide a receipt if the violation report is submitted in writing and complemented with an identity.
- m. If violation report is submitted by stakeholder representatives, in addition to the above documents, other documents are also submitted, namely:
 - 1) Photocopy of proof of identity of stakeholders and stakeholder representatives.
 - 2) Power of Attorney from stakeholders to stakeholder representatives stating that stakeholders give authority to act for and on behalf of stakeholders.
 - 3) If the stakeholder representative is an institution or legal entity, then it must be accompanied by a document that states that the party submitting the report has the authority to represent the institution or legal entity.
- l. The Company is required to submit proof of receipt of violation report to stakeholders and/or stakeholder representatives who submit reports.

Complaint Handling

- a. The Whistleblowing Management Team verifies the incoming reports based on team records. The Whistleblowing Management Team will decide whether or not an investigation is required for the violation report

dalam waktu 30 (tiga puluh) hari dan dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja.

- b. Apabila hasil verifikasi sebagaimana ayat 1 (satu) menunjukkan bahwa pelaporan tidak benar dan tidak ada bukti maka tidak akan diproses lebih lanjut.
- c. Apabila hasil verifikasi menunjukkan adanya indikasi pelanggaran yang disertai bukti-bukti yang cukup, maka pelaporan dapat diproses ke tahap investigasi.
- d. Terkait pelaporan pelanggaran yang melibatkan oknum Pegawai yang memerlukan investigasi, wajib ditindaklanjuti oleh Tim Pengelola Pelaporan Pelanggaran tingkat Direksi untuk diinvestigasi.
- e. Terkait pelaporan pelanggaran yang melibatkan Direksi, Dewan Komisaris, Organ Pendukung Dewan Komisaris dan Organ Pendukung Direksi yang memerlukan investigasi, wajib ditindaklanjuti oleh Tim Pengelola Pelaporan Pelanggaran tingkat Dewan Komisaris dan Direktur Utama untuk diinvestigasi.
- f. Pelaku pelanggaran yang telah terbukti berdasarkan hasil investigasi, akan diproses sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- g. Apabila hasil investigasi terbukti adanya pelanggaran disiplin oleh Pegawai, maka dapat ditindaklanjuti sidang disiplin sesuai ketentuan yang berlaku dengan Direksi sebagai hakim, Satuan Pengawas Internal (SPI) sebagai penuntut, Bagian Hukum sebagai pembela dan pendapat atau masukan dari atasan yang bersangkutan.
- h. Apabila hasil investigasi terbukti adanya pelanggaran oleh Pegawai yang mengarah ke tindak pidana, maka dapat ditindaklanjuti proses hukum yang berlaku kepada lembaga penegak hukum dengan Direksi sebagai pejabat penyerah perkara.
- i. Skema Proses Pelaporan Pelanggaran sebagaimana terlampir.
- j. Investigasi Semua laporan mengenai pelanggaran yang masuk dilakukan verifikasi, dengan tujuan untuk sedapat mungkin mengumpulkan bukti awal yang cukup memadai, sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan apakah laporan pelanggaran tersebut benar adanya atau bahkan sebaliknya ditemukan tidak cukup bukti untuk diteruskan pada tahap investigasi.

Administrasi Pelaporan

1. Seluruh proses pelaporan pelanggaran diadministrasikan secara baik oleh Tim Pengelola Pelaporan Pelanggaran.
2. Catatan penerimaan pelaporan pelanggaran memuat sekurangnya:

within 30 (thirty) days and can be extended for a maximum of 30 (thirty) working days.

- b. If the verification results as referred to in paragraph 1 (one) indicate that the report is untrue and there is no evidence for it, then it will not be processed further.
- c. If the verification results show an indication of a violation as supported by sufficient evidence, then the reporting can be processed to the investigation stage.
- d. In respect of violation report involving employees who need investigation, the report must be followed up by the Whistleblowing Management Team on the Board of Directors level to be investigated.
- e. In respect of violation report involving the Board of Directors, the Board of Commissioners, the Supporting Organs of the Board of Commissioners and the Supporting Organs of the Board of Directors who need investigation, the report must be followed up by the Whistleblowing Management Team on the Board of Directors level and the President Director to be investigated.
- f. The offender proven guilty based on the investigation result will be processed in accordance with applicable regulations.
- g. If the investigation results prove that there is a disciplinary violation by the Employee, then to follow up the report, a disciplinary hearing can be initiated according to the applicable provisions with the Board of Directors as judges, Internal Audit (SPI) as prosecutors, the Legal Department as defenders and opinions or input from the relevant supervisors.
- h. If the investigation results prove that there is a violation by an employee leading to a criminal offense, then to follow up the report, legal process to be managed by the applicable law enforcement agency will be carried out with the Board of Directors as the case surrender.
- i. Violation Reporting Process Scheme is as attached.
- j. Investigation of All incoming violation report is done starting with a verification, with the purpose of gathering sufficient initial evidence, so that a conclusion can be drawn whether the violation report is true or even found to have insufficient evidence to be continued at the investigation stage.

Reporting Administration

1. The entire process of violation reporting is well administered by the Whistleblowing Management Team.
2. The record of violation report receipt contains at least:

- a. Nomor registrasi.
 - b. Tanggal penerimaan.
 - c. Petugas penerima.
 - d. Deskripsi singkat.
3. Pengelola WBS membuat laporan secara periodik, antara lain meliputi jumlah pelaporan/penyingkapan, kategori pelaporan/penyingkapan dan saluran yang digunakan oleh Pelapor serta menyampaikannya kepada Direksi.

Perlindungan Pelapor dan Terlapor

Perlindungan Pelapor dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas kerahasiaan identitas Pelapor dan perlindungan dari tindakan yang merugikan Pelapor. Bagi Perusahaan, perlindungan Pelapor akan menumbuhkan rasa aman bagi Insan Perusahaan dan pelapor lainnya.

Kebijakan perlindungan Pelapor dimaksudkan pula untuk mendorong setiap Insan Perusahaan dan Pelapor lainnya untuk berani melaporkan pelanggaran.

Perusahaan berkomitmen untuk melindungi Pelapor yang beritikad baik dan Perusahaan patuh terhadap segala peraturan perundangan yang terkait serta best practices yang berlaku dalam penyelenggaraan sistem perlindungan Pelapor.

Perusahaan memberikan sanksi bagi pelaporan pelanggaran yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan kebijakan ini; misalnya fitnah atau pelaporan palsu.

Semua laporan pelanggaran dijamin kerahasiaan dan keamanannya oleh Perusahaan. Pelapor dijamin haknya untuk memperoleh informasi mengenai tindak lanjut atas laporannya.

Pelapor dapat mengadukan bila mendapatkan balasan berupa tekanan atau ancaman atau tindakan pembalasan lain yang dialaminya. Pengaduan harus disampaikan kepada Tim Perusahaan melalui mekanisme yang telah ditetapkan Perusahaan. Dalam hal masalah ini tidak dapat dipecahkan secara internal, Pelapor dijamin haknya untuk membawa ke lembaga independen di luar Perusahaan, seperti misalnya mediator, lembaga perlindungan saksi dan korban atas biaya Perusahaan.

Perusahaan memberikan perlindungan kepada Pelapor, atas kemungkinan dilakukannya hal-hal sebagai berikut :

- a. Pemecatan yang tidak adil;
- b. Penurunan jabatan atau pangkat dengan alasan yang tidak jelas;

- a. Registration number.
 - b. Receipt date.
 - c. Receiving Officer.
 - d. Short description.
3. The WBS management prepares periodic reports, including the number of reports/disclosure, reporting/disclosure categories and channels used by the Reporting Party and submitting them to the Board of Directors.

Protection of the Reporting and Reported Party

Protection of the Reporting Party aims to provide guarantees on the confidentiality of the identity of the Reporting Party and protection from actions that harm the Reporting Party. For the Company, the protection of the Reporting Party will foster a sense of security for employees of the Company and other whistleblower.

The whistleblower's protection policy is also intended to encourage all Company Personnel and other Whistleblower to have the courage to report violations.

The Company is committed to protecting the Reporting Party that acts in good faith and the Company complies with all applicable and relevant laws and best practices in the implementation of the protection system of the Whistleblower.

The company provides sanctions in relation to violation report that do not comply with the purpose and objective of this policy; such as defamation or false reporting.

All violation reports are guaranteed for its confidentiality and security by the Company. The rights of the whistleblower to obtain information regarding the follow-up of his/her report is guaranteed.

The whistleblower can complain if they obtain feedbacks in the form of pressure or threats or other acts of retaliation they experience. Complaints must be submitted to the Company Team through a mechanism established by the Company. In the event that this problem cannot be solved internally, the right of the Whistleblower to bring the case to an independent institution outside the Company, such as a mediator, witness and victim protection agency, is guaranteed and made at the Company's expense.

The Company provides protection to the Whistleblower, for the possibility of the following matters:

- a. Unfair dismissal;
- b. Demotion or promotion for no apparent reason;

- c. Pelecehan atau diskriminasi dalam segala bentuknya;
- d. Catatan yang merugikan dalam file data pribadinya (*personal file record*).

Selain perlindungan di atas, untuk Pelapor yang beritikad baik, Perusahaan juga akan menyediakan perlindungan hukum, sejalan dengan yang diatur Undang Undang No. 15 tahun 2002 jo Undang Undang No.25 tahun 2003 pada Pasal 43 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pasal 13 Undang Undang No.13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, dan Pasal 5 Peraturan Pemerintah No.57 tahun 2003 tentang Tata Cara Perlindungan Khusus bagi Pelapor dan Saksi dalam Tindak Pidana Pencucian Uang yaitu:

- a. Perlindungan dari tuntutan pidana dan/atau perdata;
- b. Perlindungan atas keamanan pribadi, dan/atau keluarga Pelapor dari ancaman fisik dan/atau mental;
- c. Perlindungan terhadap harta Pelapor; dan/atau
- d. Pemberian keterangan tanpa bertatap muka dengan Terlapor, pada setiap tingkat pemeriksaan perkara dalam hal pelanggaran tersebut masuk pada sengketa pengadilan.

Dalam hal Pelapor merasa perlu, maka dia juga dapat meminta bantuan pada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), sesuai Undang Undang No.13 tahun 2006.

Apresiasi Pelapor

- a. Perusahaan dapat memberikan penghargaan kepada Pelapor atas pelanggaran yang dapat dibuktikan sehingga aset/keuangan Perusahaan dapat diselamatkan.
- b. Penghargaan diberikan melalui Kebijakan Direksi.

Sanksi

Bentuk sanksi kepada Terlapor yang terbukti bersalah diberikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Perusahaan.

Sosialisasi Whistleblowing System

Perseroan melakukan sosialisasi Sistem Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing System*) kepada seluruh karyawan Perseroan untuk memberikan pemahaman atas kebijakan dan mekanisme pelaporan pelanggaran. Perseroan juga melakukan sosialisasi kepada *stakeholders* lainnya.

Laporan di Tahun 2018

Pada 2018, tidak terdapat laporan pelanggaran atas "Pengungkapan yang dilindungi".

- c. Harassment or discrimination in all its forms;
- d. An adverse record in his personal data file (personal file record).

In addition to the above protection, for Whistleblower who have good intention, the Company will also provide legal protection, in accordance with Law No. 15 of 2002 in conjunction with Law No. 25 of 2003 in Article 43 concerning Criminal Acts of Money Laundering and Article 13 of Law No.13 of 2006 concerning Protection of Witnesses and Victims, and Article 5 of Government Regulation No.57 of 2003 concerning Procedures for Special Protection for Whistleblowers and Witnesses in Money Laundering Crime, namely:

- a. Protection from criminal and/or civil charges;
- b. Protection of personal, and or family security of the Whistleblower from physical and/or mental threats;
- c. Protection of assets of the Whistleblower; and/or
- d. Provision of information without face to face with the Reported Party, at each level of examination of cases in the event that the violations entered court disputes.

In the event the Whistleblower feels it is necessary, they can also ask for assistance from the Witness and Victim Protection Agency (LPSK), in accordance with Law No.13 of 2006.

Appreciation of Whistleblower

- a. The Company can give awards to the Whistleblower for violations that can be proven so that the Company's assets/finance can be saved.
- b. Awards are given through Directors' Policy.

Sanctions

The form of sanctions to the Reported Party who is proven guilty is given in accordance with the applicable provision in the Company.

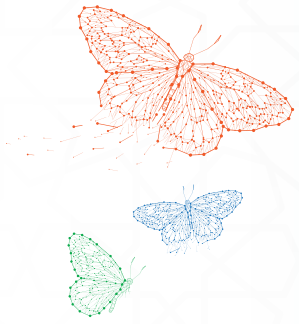
Dissemination of Whistleblowing System

The Company disseminates the Whistleblowing System to all employees of the Company to provide an understanding of the policies and mechanisms for reporting violations. The Company also conducts dissemination to other stakeholders.

Report in 2018

In 2018, there were no violation report of "protected disclosures".





Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Corporate Social Responsibility



Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Corporate Social Responsibility

Askrindo Syariah berupaya untuk menetapkan kebijakan-kebijakan CSR secara terukur untuk memastikan kehadiran Perseroan bagi masyarakat dan lingkungan sekitar.

Askrindo Syariah strives to establish measurable CSR policies to ensure the Company's presence in the community and its surrounding.



Tanggung jawab sosial perusahaan atau *Corporate Social Responsibility* (CSR) merupakan komitmen Perseroan untuk mengembangkan kegiatan usaha yang berkelanjutan dengan senantiasa memperhatikan tanggung jawab sosial perusahaan serta keseimbangan aspek ekonomi, sosial dan lingkungan. Perseroan menyadari bahwa keberhasilan dalam menjalankan bisnis tidak hanya ditentukan oleh kinerja manajemen dan operasional yang baik, melainkan juga didukung oleh keterlibatan dalam berkontribusi terhadap masyarakat dan lingkungan. Oleh karena itu, Perseroan senantiasa berupaya untuk meningkatkan program-program CSR yang dapat memberikan pengaruh positif bagi pengembangan masyarakat lingkungan sekitar.

TUJUAN

Tujuan program-program CSR Perseroan antara lain:

- Mewujudkan kepedulian terhadap kesejahteraan sosial masyarakat di sekitar wilayah operasional Perseroan.
- Mendorong kegiatan dan pertumbuhan ekonomi masyarakat serta terciptanya lapangan kerja dan kesempatan berusaha agar dapat berkembang dan mandiri.

Corporate Social Responsibility (CSR) is a commitment of the Company to develop sustainable business activities with due regard to social responsibility and a balance of economic, social and environmental aspects. The Company realizes that success in doing business is not only determined by good management and operational performance, but also is supported by involvement in contributing to society and the environment. Therefore, the Company always strives to improve its CSR programs that can have a positive influence on the development of the surrounding community.

PURPOSE

The objectives of the Company's CSR programs include:

- Realizing concern for the social welfare of the community around the Company's operational areas.
- Encouraging community economic activity and growth as well as job creation and business opportunities to develop and be independent.

KEBIJAKAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

Sebagai wujud komitmen terhadap masyarakat dan sekitar, Perseroan mengintegrasikan program Tanggungjawab Sosial Perusahaan atau *corporate social responsibility* (CSR) sebagai bagian tak terpisahkan dari usaha yang dijalankan. Perseroan mengupayakan pemberian kontribusi yang nyata kepada masyarakat dan lingkungan dengan mengedepankan pertumbuhan bisnis yang bermanfaat (*profit*) sekaligus peduli terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat (*people*) dan terwujudnya lingkungan yang terjaga (*planet*).

Pada tahun 2018, Perseroan telah menyelenggarakan beberapa kegiatan CSR dengan fokus pada beberapa bidang utama sebagai berikut:

1. Tanggung jawab lingkungan;
2. Tanggung jawab terhadap masyarakat;
3. Tanggung jawab ketenagakerjaan; dan
4. Tanggungjawab produk dan jasa.

Rencana Kerja, Anggaran dan Realisasi Program CSR Pada 2018

Pada tahun 2018, Perseroan telah mengalokasikan dana sebesar Rp100.000.000 juta untuk program bantuan.

TANGGUNG JAWAB TERHADAP MASYARAKAT

Kebijakan

Dalam bidang sosial dan kemasyarakatan, Perseroan melakukan kegiatan CSR yang melibatkan, mengembangkan, dan memberdayakan masyarakat sekitar sehingga turut membantu meningkatkan kesejahteraan umum.

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY POLICY

As a form of commitment to the community and the surrounding area, the Company integrates its CSR program as an inseparable part of the business. The Company strives to make a tangible contribution to society and the environment by promoting business growth that is beneficial (*profit*) while at the same time caring for improving the quality of life of people (*people*) and creating a sustainable environment (*planet*).

In 2018, the Company has organized several CSR activities with a focus on several key areas as follows:

1. Environmental responsibility;
2. Responsibility towards the community;
3. Labor responsibilities; and
4. Product and service responsibilities.

Work Plan, Budget and Realization of CSR Programs in 2018

In 2018, the Company has allocated Rp 100,000,000 million for the assistance program.

RESPONSIBILITIES OF THE COMMUNITY

Policy

In the social and community sector, the Company carries out CSR activities that involve, develop, and empower the surrounding community so that it helps improve public welfare.



Program yang Dilakukan

Beberapa kegiatan CSR di bidang sosial dan kemasyarakatan yang telah diselenggarakan Perseroan di sepanjang tahun 2018 di antaranya:

1. Penyerahan hewan kurban berupa dua ekor sapi kepada masyarakat di pemukiman padat penduduk bantaran kali Ciliwung pada 21 Agustus 2018 dan Lembaga amil zakat nasional al-Azhar;
2. Pembagian takjil bagi masyarakat di sekitar kantor pusat Perseroan pada bulan Ramadhan 1439 H oleh karyawan;
3. Penyaluran zakat kepada Yayasan Bina Putra, Sukabumi sebesar Rp13.300.000 pada 7 Juni 2018, saat milad ke-6;
4. Penyerahan dana santunan ke Yayasan Amanah Takaful Jakarta, Yayasan ar-Rahman Sukabumi, dan al-Khairiyah Jakarta pada 8 Juni 2018 sebesar 5-7,5 juta;
5. Penyerahan santunan kepada Laznas BSM sebesar Rp30 juta dan buka bersama Yatim Dhuafa pada 7 Juni 2018; dan
6. Penyembelihan hewan kurban berupa 4 ekor kambing di lingkungan kantor pusat Perseroan pada 25 Agustus 2018.

Program Done

Some CSR activities in the social and community sectors that have been carried out by the Company throughout 2018 include:

1. Submission of sacrificial animals in the form of two cows to the community in densely populated settlements along the Ciliwung River on August 21, 2018 and the al-Azhar National Amil Zakat Institute;
2. Distribution of takjil for the community around the Company's head office during Ramadhan 1439 H by employees;
3. Distribution of zakat to the Bina Putra Foundation, Sukabumi in the amount of Rp. 13,300,000 on June 7, 2018, during the 6th anniversary;
4. Submission of compensation funds to the Jakarta Amanah Takaful Foundation, ar-Rahman Foundation Sukabumi, and al-Khairiyah Jakarta on June 8, 2018 amounting to 5-7.5 million;
5. Submission of compensation to BSM Laznas in the amount of Rp30 million and breaking fast with Yatim Dhuafa on June 7, 2018; and
6. Slaughter of sacrificial animals in the form of 4 goats in the Company's head office environment on August 25, 2018.





TANGGUNG JAWAB KETENAGAKERJAAN

Perseroan senantiasa memerhatikan tingkat kepuasan setiap karyawan dan secara berkala menjalankan program pembinaan, pengembangan, dan menciptakan hubungan yang sehat antara atasan dengan bawahan, memberikan remunerasi yang adil, memastikan keselamatan dan keamanan kerja, serta menjunjung tinggi kesetaraan seluruh karyawan.

Kebijakan

Dalam mengimplementasikan tanggung jawab praktik ketenagakerjaan, Perseroan berpijak pada UU RI No.13/2013 tentang ketenagakerjaan.

a. Praktik Ketenagakerjaan

Perseroan menyadari bahwa hubungan kerja yang baik dengan seluruh karyawan merupakan prasyarat utama dalam mencapai visi dan misi. Kegiatan bisnis dapat berjalan dengan lancar, dan Perseroan meraih laba serta tumbuh dan berkembang sesuai dengan target yang ditetapkan apabila lingkungan kerja sehat serta saling bersinergi. Oleh karena itu, Perseroan senantiasa menyelenggarakan praktik ketenagakerjaan yang sehat dengan seluruh karyawan dan menjamin hak dan kesejahteraan seluruh karyawan.

LABOR RESPONSIBILITIES

The Company always pays attention to the level of satisfaction of each employee and regularly runs a program of coaching, developing, and creating healthy relationships between superiors and subordinates, providing fair remuneration, ensuring work safety and security, and upholding the equality of all employees.

Policy

In implementing the responsibilities of labor practices, the Company rests on RI Law No.13/2013 concerning manpower.

a. Employment Practices

The Company realizes that a good working relationship with all employees is the main prerequisite in achieving its vision and mission. Business activities can run smoothly, and the Company makes a profit and grows and develops according to the targets set if the work environment is healthy and synergizes with each other. Therefore, the Company always organizes healthy employment practices with all employees and guarantees the rights and welfare of all employees.

Di sisi lain, Perseroan juga senantiasa menjunjung tinggi asas kesetaraan dan kesempatan kerja dengan tidak membedakan SDM berdasarkan jenis kelamin maupun ras. Penerapan prinsip non-diskriminasi ini menjadi dasar Perseroan dalam berinteraksi dengan karyawan dalam kerangka menciptakan hubungan industrial yang harmonis.

b. Kesehatan dan Keselamatan Kerja

Perseroan menyadari bahwa kesehatan dan keselamatan kerja sangat penting dalam menunjang keberhasilan aktivitas usaha Perseroan. Bagi kami, keselamatan dan kesehatan kerja memiliki makna strategis yang menjaga eksistensi bisnis Perseroan. Aspek keselamatan dan kesehatan kerja ditempatkan sebagai prioritas utama dalam kegiatan operasional bisnis Perseroan.

Program yang Dilakukan

1. Praktik ketenagakerjaan

Di bidang ketenagakerjaan, Perseroan membuka kesempatan bagi masyarakat sekitar untuk menjadi bagian dari Perseroan sebagai karyawan sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan. Perseroan juga memberikan perhatian besar terhadap kesejahteraan karyawan, termasuk dalam memenuhi hak-haknya, baik dari segi pelatihan, hak cuti, remunerasi, maupun kebebasan bersekitar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2. Guna meningkatkan kebersamaan antar karyawan dan manajemen, Perseroan pada tahun 2018 juga menyelenggarakan kegiatan bersama, di antaranya:

- 1) Buka puasa bersama karyawan di Hotel Borobudur, 28 Mei 2018;
- 2) Program rutin temu karyawan dengan manajemen (*face to face*) meliputi doa pagi bersama, rapat koordinasi divisi dan forum antar divisi setiap minggu; dan
- 3) Family gathering sekali setiap tahun.

Selain itu, Perseroan juga mengadakan program kesehatan baik yang diperuntukkan khusus untuk karyawan, maupun yang dapat memberikan manfaat kepada masyarakat luas seperti donor darah dengan rincian sebagai berikut:

1. Suntik vaksin hepatitis B tahap pertama kepada karyawan bekerjasama dengan Biofarma pada 8-9 Oktober 2018;
2. Suntik vaksin hepatitis B tahap kedua kepada karyawan bekerjasama dengan Biofarma pada 14-16 November 2018; dan
3. Donor darah dalam rangka memperingati ulang tahun Perseroan ke-6 di kantor pusat pada 1 November 2018.

On the other hand, the Company also always upholds the principle of equality and employment opportunities by not differentiating HR based on gender or race. The application of the principle of non-discrimination forms the basis of the Company in interacting with employees within the framework of creating harmonious industrial relations.

b. Occupational Health and Safety

The Company realizes that occupational health and safety is very important in supporting the success of the Company's business activities. For us, occupational safety and health have a strategic meaning that maintains the existence of the Company's business. Occupational safety and health aspects are placed as the main priority in the Company's business operations.

Program Done

1. Labor practices

In the field of employment, the Company opens opportunities for the surrounding community to become part of the Company as an employee in accordance with the required qualifications. The Company also pays great attention to the welfare of employees, including in fulfilling their rights, both in terms of training, leave rights and remuneration in accordance with applicable regulations.

2. To improve togetherness between employees and management, the Company in 2018 also held joint activities, including:

- 1) Breaking fast with employees at Borobudur Hotel, May 28, 2018;
- 2) Regular program of meeting employees with management/*face to face*, including morning prayer together, division coordination meetings and inter-division forums every week; and
- 3) Family gathering once every year.

In addition, the Company also conducts health programs both intended specifically for employees, and which can provide benefits to the wider community such as blood donors with the following details:

1. first phase of hepatitis B vaccine injection to employees in collaboration with Biofarma on 8-9 October 2018;
2. Second stage of hepatitis B vaccine injection to employees in collaboration with Biofarma on 14-16 November 2018; and
3. Blood donation in commemoration of the Company's 6th anniversary at the head office on November 1, 2018.



TANGGUNG JAWAB PRODUK DAN JASA

Kebijakan

Perseroan memiliki komitmen untuk senantiasa memberikan layanan terbaik bagi seluruh pelanggan. Bagi Perseroan, pelanggan merupakan bagian yang sangat penting dalam mencapai kinerja dan hasil usaha yang lebih baik. Oleh karena itu, Perseroan senantiasa menyediakan layanan informasi yang memudahkan seluruh pihak dalam mencari informasi layanan maupun produk yang dimiliki Perseroan secara mudah, serta layanan pengaduan.

Program yang Dilakukan

Perseroan senantiasa mengutamakan kepuasan mitra dengan melakukan peningkatan kualitas produk, layanan, dan profesionalitas kerja. Selain itu, Perseroan juga menyelenggarakan program rekonsiliasi produk dengan mitra bisnis setiap tiga bulan sekali.

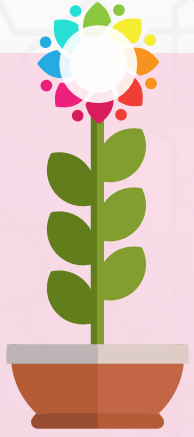
PRODUCT AND SERVICE RESPONSIBILITIES

Policy

The Company has a commitment to always provide the best service to all partners. For the Company, partners are a very important part in achieving better performance and operating results. Therefore, the Company always provides information services that make it easier for all parties to find information on the services and products of the Company easily, as well as complaint services.

Program Done

The Company always prioritizes partner satisfaction by improving the quality of its products, services and professionalism. In addition, the Company also holds a product reconciliation program with business partners every three months.



Laporan Keuangan

Financial Statement





Halaman ini sengaja dikosongkan.
This page is intentionally left blank.



PT JAMINAN PEMBIAYAAN ASKRINDO SYARIAH

**LAPORAN KEUANGAN/
FINANCIAL STATEMENTS**

**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2018/
FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2018**

DAN/AND

**LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN/
INDEPENDENT AUDITORS' REPORT**

*These Financial Statements are originally
issued in Indonesian language*

**PT JAMINAN PEMBIAYAAN ASKRINDO SYARIAH
LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2018**

**PT JAMINAN PEMBIAYAAN ASKRINDO SYARIAH
FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2018**

DAFTAR ISI

CONTENTS

Pernyataan Direksi

Directors' Statement

Ekshibit/ Exhibit

Laporan Posisi Keuangan

A

Statement of Financial Position

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan
Komprehensif lain

B

*Statement of Profit or Loss and Other
Comprehensive Income*

Laporan Perubahan Ekuitas

C

Statement of Changes in Equity

Laporan Arus Kas

D

Statement of Cash Flows

Laporan Sumber dan Penyaluran Dana Zakat

E

*Statement of Sources and Distribution of
Zakah Fund*

Catatan atas Laporan Keuangan

F

Notes to Financial Statements

Laporan Auditor Independen

Independent Auditors' Report



**SURAT PERNYATAAN DIREKSI
TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS
LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2018
PT JAMINAN PEMBIAYAAN ASKRINDO SYARIAH**

**THE STATEMENT OF BOARD OF DIRECTORS
REGARDING RESPONSIBILITY ON
FINANCIAL STATEMENT
FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2018
PT JAMINAN PEMBIAYAAN ASKRINDO SYARIAH**

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

We, the undersigned:

Nama	:	Songiharta	:	Nama
Alamat kantor	:	Gedung Primagraha Persada, Jl. Gedung Kesenian No. 3-7 Pasar Baru, Jakarta Pusat - 10710	:	Office address
Telepon	:	021 - 3517525	:	Telephone
Jabatan	:	Direktur Utama/President Director	:	Title
Nama	:	Subagio Istarno	:	Nama
Alamat kantor	:	Gedung Primagraha Persada, Jl. Gedung Kesenian No. 3-7 Pasar Baru, Jakarta Pusat - 10710	:	Office address
Telepon	:	021 - 3517525	:	Telephone
Jabatan	:	Direktur/Director	:	Title

Menyatakan bahwa:

declare that:

- Kami bertanggungjawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah (Perusahaan);
- Laporan keuangan Perusahaan telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia;
- Sebuah informasi dalam laporan keuangan Perusahaan telah dinyatakan secara lengkap dan sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya;
 - Laporan keuangan Perusahaan tidak mengandung informasi atau peristiwa material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material;
- Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal Perusahaan;

- We are responsible for the preparation and presentation of Pt Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah (the Company) financial statements;
- The Company financial statements have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standard in Indonesia;
- All informations in the Company financial statements have been disclosed on a complete and truthful manner;
 - The Company financial statements do not contain any incorrect information or material fact, nor do they omit information or material fact;
- We are responsible for the Company's internal control system;

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

This statement is made truthfully.

Atas nama dan mewakili Direksi/For and on behalf of the Board of Directors

Jakarta, 25 Februari 2019/Jakarta, 25 February 2019


Songiharta
Direktur Utama/ President Director


Subagio Istarno
Direktur/Director

PT. JAMINAN PEMBIAYAAN ASKRINDO SYARIAH
Gedung Primagraha Persada Lt.1, Jl. Gedung Kesenian No. 3 - 7 Pasar Baru
Jakarta Pusat (10710), Telp. (021) 3517525
Website : www.askrindoasyariah.co.id

1.800-4-A-ARTIST
www.4artists.com

PT JAMINAN PEMBIAYAAN ASKRINDO SYARIAH
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2018
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Exhibit C

PT JAMINAN PEMBIAYAAN ASKRINDO SYARIAH
STATEMENT OF CHANGES IN EQUITY
FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2018
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

These Financial Statements are originally issued
in Indonesian language

Exhibit C

Catatan/ Notes	Modal saham/ Paid - up capital stock	Cadangan umum/ General reserves	Keuntungan (Kerugian) yang belum direalisasi atas efek-elek dalam kelompok tersedia untuk dijual/ Unrealized gain (losses) on available for sale marketable securities	Keuntungan (Kerugian) aktuarial/ Gain (loss) actuarial	Saldo laba/ Retained earnings	Jumlah ekuitas/ Total equity	
Saldo 1 Januari 2017	250.000.000.000	34.745.451.559	(507.791,628)	(545.217,356)	20.484.036.492	304.176.479.067	Balance as of 1 January 2017
Pembentukan cadangan umum	-	20.484.036.492	-	-	(20.484.036.492)	-	Allowances for general reserves
Pendapatan komprehensif tahun berjalan	-	-	-	-	6.226.204.555	6.226.204.555	Comprehensive income current year
Laba bersih tahun berjalan	-	-	592.735.244	(399.877,251)	-	232.857.993	Net income for the year
Pendapatan (beban) komprehensif lainnya	-	-	-	-	-	-	Other comprehensive income (expense)
Saldo 31 Desember 2017	250.000.000.000	55.229.488.051	84.943.616	(905.094.607)	6.226.204.555	310.635.541.615	Balance as of 31 December 2017
Pembentukan cadangan umum	-	6.226.204.555	-	-	(6.226.204.555)	-	Allowances for general reserves
Pendapatan komprehensif tahun berjalan	-	-	-	-	14.084.857.233	14.084.857.233	Comprehensive income current year
Laba bersih tahun berjalan	-	-	644.758.951	166.208.948	-	810.967.899	Net income for the year
Pendapatan komprehensif lainnya	-	-	-	-	-	-	Other comprehensive income
Saldo 31 Desember 2018	250.000.000.000	61.455.692.606	729.702.567	(738.885.659)	14.084.857.233	325.531.366.747	Balance as of 31 December 2018

Uraikan atas Laporan Keuangan pada Exhibit F terlampir
yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dari Laporan Keuangan secara keseluruhan

See accompanying Notes to Financial Statements on Exhibit F
which are an integral part of
the Financial Statements taken as a whole



These Financial Statements are originally issued
in Indonesian language

Ekshibit D

Exhibit D

PT JAMINAN PEMBIAYAAN ASKRINDO SYARIAH
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2018
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT JAMINAN PEMBIAYAAN ASKRINDO SYARIAH
STATEMENT OF CASH FLOWS
FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2018
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	<u>2018</u>	<u>2017</u>	
Arus Kas dari Aktivitas Operasi			Cash Flows From Operating Activities
Penerimaan kas dari kafalah	218.863.222.616	132.615.545.948	Kafalah receipts
Penerimaan dari kafalah lain	57.222.373.649	138.006.040	Other kafalah receipts
Penerimaan kas dari hasil investasi	12.325.588.744	16.967.872.330	Investment income receipts
Penerimaan kas dari lain-lain	3.876.708.251	2.025.128.210	Other receipts
Pengeluaran beban kafalah	(208.499.136.324)	(63.719.000.872)	Payment for kafalah expenses
Pengeluaran untuk beban usaha	(62.774.287.602)	(55.217.830.543)	Payment for operating expenses
Pengeluaran untuk pajak penghasilan	(2.638.067.878)	(5.098.000.135)	Payment for income taxes
Pengeluaran untuk zakat	(568.226.667)	(517.700.000)	Payment for zakat
Pengeluaran lain-lain	(4.323.460.481)	(735.803.620)	Payment for others
Kas bersih diperoleh dari aktivitas operasi	<u>13.484.714.308</u>	<u>26.458.217.358</u>	Cash provided by operating activities
Arus Kas dari Aktivitas Investasi			Cash Flows From Investing Activities
Pencairan deposito berjangka	65.800.000.000	203.250.000.000	Time deposit withdrawals
Pencairan investasi jangka pendek	50.098.021.464	24.402.489.622	Short term investment withdrawals
Pembelian aset tetap dan aset tidak berwujud	(3.483.020.403)	(7.614.108.464)	Purchases of fixed assets and intangible assets
Pembelian aset lain-lain	-	638.440.466	Purchases of other assets
Penempatan investasi jangka pendek	(50.000.000.000)	(35.000.000.000)	Short term investment
Penempatan deposito berjangka	(95.950.000.000)	(183.800.000.000)	Time deposit investment
Kas bersih diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas investasi	<u>(33.534.998.939)</u>	<u>1.876.821.624</u>	Cash provided by (used in) investing activities
Kenaikan (Penurunan) Bersih Kas dan Bank	<u>(20.050.284.631)</u>	<u>28.335.038.982</u>	Net Increase (Decrease) in Cash on Hand and in Banks
Saldo Kas dan Bank awal tahun	<u>35.762.042.033</u>	<u>7.427.003.051</u>	Cash on Hand and in Banks at Beginning of year
Saldo Kas dan Bank akhir tahun	<u>15.711.757.402</u>	<u>35.762.042.033</u>	Cash on Hand and Banks at End of year

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Ekshibit F terlampir
yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dari Laporan Keuangan secara keseluruhan

See accompanying Notes to Financial Statements on Exhibit F
which are an integral part of
the Financial Statements taken as a whole



*These Financial Statements are originally issued
in Indonesian language*

Ekshibit E

Exhibit E

PT JAMINAN PEMBIAYAAN ASKRINDO SYARIAH
LAPORAN SUMBER DAN PENYALURAN DANA ZAKAT
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2018
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT JAMINAN PEMBIAYAAN ASKRINDO SYARIAH
STATEMENT OF SOURCES AND DISTRIBUTION OF ZAKAH FUND
FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2018
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	<u>2018</u>	<u>2017</u>	
Sumber Dana Zakat			Source of Zakah Funds
Zakat dari dalam pembiayaan syariah	568.226.667	169.596.470	Zakah from sharia financing
Zakat dari karyawan	<u>550.523.834</u>	<u>63.905.131</u>	Zakah from employees
Jumlah sumber dana zakat	1.118.750.501	233.501.601	Total source of zakah funds
Penyaluran Dana Zakat kepada Entitas Pengelola Zakat	<u>(383.987.650)</u>	<u>(517.700.000)</u>	Distribution of Zakah Funds to Zakah Management Entity
Kenaikan (penurunan) dana zakat	734.762.851	(284.198.399)	Increasing (decreasing) of zakah funds
Saldo awal dana zakat	<u>227.653.357</u>	<u>511.851.756</u>	Beginning balance of zakah funds
Saldo akhir dana zakat	<u><u>962.416.208</u></u>	<u><u>227.653.357</u></u>	Ending balance of zakah funds

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Ekshibit F terlampir
yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dari Laporan Keuangan secara keseluruhan

*See accompanying Notes to Financial Statements on Exhibit F
which are an integral part of
the Financial Statements taken as a whole*

*These Financial Statements are originally
issued in Indonesian language*

Ekshibit F

Exhibit F

**PT JAMINAN PEMBIAYAAN ASKRINDO SYARIAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2018
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT JAMINAN PEMBIAYAAN ASKRINDO SYARIAH
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2018
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

1. UMUM

a. Pendirian dan informasi umum

PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah (Perusahaan) didirikan berdasarkan Akta No. 45 tanggal 29 November 2012 oleh Hadijah, SH, notaris di Jakarta. Akta pendirian ini disahkan oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU-61610.AH.01.01 tanggal 3 Desember 2012. Anggaran dasar Perusahaan beberapa kali diubah, terakhir dengan Akta No. 24 tanggal 14 Juni 2016 oleh Hadijah, SH, notaris di Jakarta, mengenai perubahan Direksi dan Komisaris. Perubahan anggaran dasar tersebut telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-AH.01.03-0058308 tanggal 17 Juni 2016.

Sesuai dengan pasal 3 dari Anggaran Dasar Perusahaan, ruang lingkup kegiatan Perusahaan terutama meliputi penjaminan pembiayaan sesuai dengan prinsip syariah.

Perusahaan tergabung dalam kelompok usaha PT Asuransi Kredit Indonesia (Persero). Perusahaan memulai usahanya secara komersial pada bulan Desember tahun 2012. Kantor pusat Perusahaan terletak di Gedung Primagraha Lantai 1 Jl. Gedung Kesenian No. 3-7, Pasar Baru, Jakarta Pusat 10710. Perusahaan memiliki 2 kantor cabang yang terletak di Jakarta dan Bandung.

b. Dewan komisaris, direksi, dan dewan pengawas syariah

Berdasarkan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tentang Pengangkatan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah yang diadakan tanggal 16 Mei 2018 dan 17 Nopember 2017, didokumentasikan dalam Akta No. 45 dari Hadijah SH, notaris di Jakarta, susunan pengurus Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris	2018	2017	Board of Commissioner
Komisaris Utama	: Budi Wisakseno	Budi Wisakseno	: President Commissioner
Komisaris	: Bambang Hermanto	Yulison Marpaung	: Commissioner
Direksi			Directors
Direktur Utama	: Soegiharto	Pribadi	: President Director
Direktur Keuangan	: Subagio Istiarno	Subagio Istiarno	: Finance Director
Direktur Pemasaran	: Soegiharto (Plt.)	Supardi Najamudin	: Marketing Director
Dewan Pengawas Syariah			Sharia Supervisory Board
Ketua	: Daud Rasyid	Ichwan Sam	: Chairman
Anggota	: Muhammad Zubair	Daud Rasyid	: Member
Anggota	: Deni Nuryadin	Muhammad Zubair	: Member

1. GENERAL

a. Establishment and general information

PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah ("Company") was established based on Notarial Deed No. 45 dated 29 November 2012 of Hadijah, SH, notary in Jakarta. The Deed of establishment had been approved by the Minister of Justice of the Republic of Indonesia in its Decision Letter No. AHU-61610.AH.01.01 dated 3 December 2012. The Company's articles of association were amended several times, most recently by Deed No. 24 dated 14 June 2016 by Hadijah, SH, notary in Jakarta regarding the changes of the Directors and Commissioners. The amendment of the articles of association has been approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia No. AHU-AH.01.03-0058308 dated 17 June 2016.

In accordance with article 3 of the Company's Articles of Association, the scope of the Company's activities mainly covers financing guarantees in accordance with sharia principles.

Companies are incorporated into business groups PT Asuransi Kredit Indonesia (Persero). The company started its business commercially in December 2012. The Company's head office Central is located at Primagraha Building Central 1st Floor Jl. Gedung Kesenian No. 3-7, Pasar Baru, Central Jakarta 10710. The company has 2 branch offices located in Jakarta and Bandung.

b. Board of commissioners, board of directors, and sharia supervisory board

Based on Minutes of Extraordinary General Meeting of Shareholders held on 16 May 2018 and 17 November 2017, documented in Deed No. 45 from Hadijah SH, notary in Jakarta, the composition of the Company's management as of 31 December 2018 and 2017 are as follows:

*These Financial Statements are originally
issued in Indonesian language*

Ekshibit F/2

Exhibit F/2

**PT JAMINAN PEMBIAYAAN ASKRINDO SYARIAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2018
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT JAMINAN PEMBIAYAAN ASKRINDO SYARIAH
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2018
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

1. UMUM (Lanjutan)

b. Dewan komisaris, direksi, dan dewan pengawas syariah (Lanjutan)

Pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 jumlah karyawan Perusahaan masing-masing sebanyak 126 dan 131 karyawan (tidak diaudit).

1. GENERAL (Continued)

b. Board of commissioners, board of directors, and sharia supervisory board (Continued)

As of 31 December 2018 and 2017 there were 126 employees and 131 employees (unaudited) respectively.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN

Kebijakan akuntansi utama yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan adalah seperti dijabarkan di bawah ini:

a. Dasar penyusunan

Prinsip kebijakan akuntansi yang diadopsi dalam penyusunan laporan keuangan dinyatakan dalam Catatan 2. Kebijakan tersebut telah diterapkan secara konsisten untuk setiap tahun penyajian, kecuali dinyatakan lain.

Laporan keuangan disajikan dalam mata uang Rupiah (Rp) yang juga merupakan mata uang fungsional Perusahaan.

Laporan keuangan ini telah disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia (PSAK).

Penyusunan laporan keuangan berdasarkan ISAK mensyaratkan penggunaan estimasi akuntansi kritis tertentu. Penyusunan laporan keuangan juga mensyaratkan manajemen Perusahaan untuk menggunakan pertimbangan dalam menerapkan kebijakan akuntansi Perusahaan. Hal-hal di mana pertimbangan dan estimasi yang signifikan telah dibuat dalam penyusunan laporan keuangan beserta dampaknya diungkapkan dalam Catatan 3.

Laporan keuangan perusahaan telah disusun berdasarkan biaya historis, kecuali untuk laporan arus kas.

Laporan arus kas disajikan dengan metode langsung (*direct method*) dengan mengelompokkan arus kas dalam aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

The principle accounting policies adopted in the preparation of these financial statements are set out below:

a. Basis of preparation

The principal accounting policies adopted in the preparation of the financial statements are set out in Note 2. The policies have been consistently applied to all the years presented, unless otherwise stated.

The financial statements are presented in Rupiah (Rp) which is also the Company's functional currency.

These financial statements have been prepared in accordance with the Indonesian Statement of Financial Accounting Standards (collectively PSAK).

The preparation of financial statements in compliance with ISAK requires the use of certain critical accounting estimates. It also requires Company's management to exercise judgment in applying the Company's accounting policies. The areas where significant judgments and estimates have been made in preparing the financial statements and their effect are disclosed in Note 3.

The financial statements have been prepared on a historical cost basis, except for the statement of cash flows.

The statements of cash flows are prepared using direct method with classification of cash flows into operating, investing, and financing activities.

*These Financial Statements are originally
issued in Indonesian language*

Ekshibit F/3

Exhibit F/3

**PT JAMINAN PEMBIAYAAN ASKRINDO SYARIAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2018
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT JAMINAN PEMBIAYAAN ASKRINDO SYARIAH
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2018
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN
(Lanjutan)**

**b. Standar baru, amandemen, revisi, penyesuaian
dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan**

Standar baru, amandemen, revisi, penyesuaian dan interpretasi yang telah diterbitkan, dan yang akan berlaku efektif untuk tahun buku yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2018 namun tidak berdampak material terhadap laporan keuangan adalah sebagai berikut:

- Amandemen PSAK 2, "Laporan Arus Kas - Prakarsa Pengungkapan";
- Amandemen PSAK 13, "Properti Investasi - Pengalihan Properti Investasi";
- PSAK 15 (Penyesuaian), "Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama";
- Amandemen PSAK 16, "Aset Tetap - Agrikultur: Tanaman Produktif";
- Amandemen PSAK 46, "Pajak Penghasilan - Pengakuan Aset Pajak Tangguhan untuk Rugi yang Belum Direalisasi";
- Amandemen PSAK 53, "Pembayaran Berbasis Saham - Klasifikasi dan Pengukuran Transaksi Pembayaran Berbasis Saham";
- PSAK 67 (Penyesuaian), "Pengungkapan Kepentingan dalam Entitas Lain";
- PSAK 69, "Agrikultur"; dan
- PSAK 111, "Akuntansi Wa'd".

Pada tanggal penerbitan laporan keuangan ini, manajemen sedang mempelajari dampak yang mungkin timbul dari penerapan standar dan interpretasi standar baru dan amandemen standar berikut yang telah diterbitkan, namun belum berlaku efektif untuk tahun buku yang dimulai 1 Januari 2018 adalah sebagai berikut:

- ISAK 33, "Transaksi Valuta Asing dan Imbalan Dimuka";
- Amandemen PSAK 15, "Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama: Kepentingan Jangka Panjang pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama";
- Amandemen PSAK 62, "Kontrak Asuransi";
- PSAK 71, "Instrumen Keuangan";
- Amandemen PSAK 71, "Instrumen Keuangan: Fitur Percepatan Pelunasan dengan Kompensasi Negatif";
- PSAK 72, "Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan"; dan
- PSAK 73, "Sewa".

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES
(Continued)**

**b. New Standards, Amendments, Improvements
and Interpretations of Financial Accounting
Standards**

New standards, amendments, improvements and interpretations issued and effective for the financial year at or after 1 January 2018 which do not have material impact on the financial statement are as follows:

- *Amendments to PSAK 2, "Statement of Cash Flows - Disclosure Initiative";*
- *Amendments to PSAK 13, "Investment Property - Transfers of Investment Property";*
- *PSAK 15 (Improvements), "Investment in Associates and Joint Ventures";*
- *Amendments to PSAK 16, "Property, Plant and Equipment - Agriculture: Bearer Plants";*
- *Amendments to PSAK 46, "Income Taxes - Recognition of Deferred Tax Assets for Unrealized Losses";*
- *Amendments to PSAK 53, "Share-based Payment - Classification and Measurement of Share-based Payment Transactions";*
- *PSAK 67 (Improvements), "Disclosures of Interest in Other Entities";*
- *PSAK 69, "Agriculture"; and*
- *PSAK 111, "Wa'd Accounting".*

As at the authorization date of the financial statements, the management is still evaluating the potential impact of the new standards and interpretation and amendments to standards which have been issued but are not yet effective for the financial year beginning on 1 January 2018 as follows:

- *ISAK 33, "Foreign Currency Transactions and Advance Consideration";*
- *Amendments to PSAK 15, "Investments in Associate and Joint Ventures: Long Term Interest in Associate and Joint Ventures";*
- *Amendments to PSAK 62, "Insurance Contracts";*
- *PSAK 71, "Financial Instruments";*
- *Amendments to PSAK 71, "Financial Instruments: Prepayment Features with Negative Compensation";*
- *PSAK 72, "Revenue from Contracts with Customers"; and*
- *PSAK 73, "Leases".*

*These Financial Statements are originally
issued in Indonesian language*

Ekshibit F/4

Exhibit F/4

**PT JAMINAN PEMBIAYAAN ASKRINDO SYARIAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2018
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT JAMINAN PEMBIAYAAN ASKRINDO SYARIAH
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2018
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN
(Lanjutan)**

**b. Standar baru, amandemen, revisi, penyesuaian
dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan
(Lanjutan)**

Seluruh standar baru dan amandemen standar berlaku efektif untuk tahun buku yang dimulai 1 Januari 2020, sementara interpretasi standar baru berlaku efektif dimulai 1 Januari 2019. Penerapan dini atas standar baru dan amandemen standar tersebut diperkenankan, sementara penerapan dini atas PSAK 73 diperkenankan jika telah menerapkan dini PSAK 72.

c. Aset keuangan

Aset keuangan diakui di dalam laporan posisi keuangan jika, dan hanya jika, Perusahaan menjadi pihak di dalam provisi kontraktual instrumen keuangan.

Selain dari aset keuangan di dalam hubungan lindung nilai kualifikasian, kebijakan akuntansi Perusahaan untuk setiap kategori adalah sebagai berikut:

Pengakuan dan pengukuran awal

Ketika aset keuangan diakui pertama kali, aset keuangan tersebut diukur pada nilai wajar, ditambah, dalam hal aset keuangan tidak diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, biaya transaksi yang langsung dapat diatribusikan. Perusahaan menentukan klasifikasi aset keuangan pada pengakuan awal dan, apabila diizinkan dan jika diperbolehkan dan sesuai, akan dievaluasi kembali setiap akhir tahun keuangan.

Perusahaan mengklasifikasikan aset ke dalam satu kategori sebagai diungkapkan dibawah ini, tergantung pada tujuan aset diperoleh.

Pengukuran setelah pengakuan awal

Pengukuran setelah pengakuan awal aset keuangan bergantung pada klasifikasi sebagai berikut:

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES
(Continued)**

**b. New Standards, Amendments, Improvements
and Interpretations of Financial Accounting
Standards (Continued)**

All new standards and amendments to standards are effective for the financial year beginning January 1, 2020, while the new interpretation is effective beginning January 1, 2019. Early adoption of the above new standards and amendments to standards is permitted, while early adoption of PSAK 73 is permitted only upon early adoption also of PSAK 72.

c. Financial assets

Financial assets are recognized in the statement of financial position if and only if, the Company becomes a party of contractual provisions of the financial instrument.

Other than financial assets in a qualifying hedging relationship, the Company accounting policy for each category is as follows:

Initial recognition and measurement

When financial assets are recognized initially, they are measured at fair value, plus, in the case of financial assets not at fair value through profit or loss, directly attributable transaction costs. The Company determines the classification of its financial assets at initial recognition and, where allowed and appropriate, re-evaluates this designation at the end of each reporting period.

The Company classifies its financial assets into one of the categories discussed below, depending on the purpose for which the asset was acquired.

Subsequent measurement

The subsequent measurement of financial assets depends on their classification as follows:

*These Financial Statements are originally
issued in Indonesian language*

Ekshibit F/5

Exhibit F/5

**PT JAMINAN PEMBIAYAAN ASKRINDO SYARIAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2018
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT JAMINAN PEMBIAYAAN ASKRINDO SYARIAH
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2018
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN
(Lanjutan)**

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES
(Continued)**

c. Aset keuangan (Lanjutan)

c. Financial assets (Continued)

Pengukuran setelah pengakuan awal (Lanjutan)

Subsequent measurement (Continued)

**1. Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar
melalui laporan laba rugi**

**1. Financial assets at fair value through profit
or loss**

Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi meliputi aset keuangan dalam kelompok diperdagangkan dan aset keuangan yang pada saat pengakuan awal ditetapkan untuk diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi. Aset keuangan diklasifikasikan dalam kelompok dimiliki untuk diperdagangkan apabila aset keuangan tersebut diperoleh terutama untuk tujuan dijual kembali dalam waktu dekat.

Financial assets at fair value through profit or loss include financial assets held-for-trading and financial assets designated upon initial recognition at fair value through profit or loss. Financial assets are classified as held-for-trading if they are acquired for the purpose of selling in the near term.

Aset keuangan ditetapkan sebagai diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi pada saat pengakuan awal jika memenuhi kriteria sebagai berikut:

Financial assets may be designated at initial recognition at fair value through profit or loss if the following criteria are met:

Aset yang termasuk dalam kategori ini diklasifikasikan sebagai aset lancar apabila aset tersebut baik dimiliki untuk diperdagangkan atau diharapkan untuk direalisasikan dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan setelah akhir periode pelaporan. Segala perubahan nilai wajar diakui pada laporan laba rugi.

Assets in this category are classified as current assets if they are either held for trading or are expected to be realized within 12 (twelve) months after the end of the reporting period. Any fair value changes are recognized in profit or loss.

Perusahaan memiliki aset keuangan yang diklasifikasikan sebagai aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi yang terdiri dari efek ekuitas untuk diperdagangkan dan reksadana.

The Company have financial assets classified as financial assets at fair value through profit or loss consists of equity securities for trading and mutual funds.

- Penetapan tersebut mengeliminasi atau mengurangi secara signifikan ketidakonsistenan pengukuran dan pengakuan yang dapat timbul dari pengukuran aset atau pengakuan keuntungan dan kerugian karena penggunaan dasar-dasar yang berbeda;
- Aset tersebut merupakan bagian dari kelompok aset keuangan, liabilitas keuangan, atau keduanya, yang dikelola dan kinerjanya dievaluasi berdasarkan nilai wajar, sesuai dengan manajemen risiko atau strategi investasi yang didokumentasikan; atau
- Instrumen keuangan tersebut memiliki derivatif melekat, kecuali jika derivatif melekat tersebut tidak memodifikasi secara signifikan arus kas, atau terlihat jelas dengan sedikit atau tanpa analisis, bahwa pemisahan derivatif melekat tidak dapat dilakukan.

- *The designation eliminates or significantly reduces the inconsistent treatment that would otherwise arise from measuring the financial assets or recognizing gains or losses on them on a different basis;*
- *The assets are part of a group of financial assets, financial liabilities or both which are managed and their performance evaluated on a fair value basis, in accordance with a documented risk management or investment strategy; or*
- *The financial instruments contains an embedded derivative, unless the embedded derivative does not significantly modify the cash flows or it is clear, with little or no analysis, that it would not be separately recorded.*

*These Financial Statements are originally
issued in Indonesian language*

Ekshibit F/6

Exhibit F/6

**PT JAMINAN PEMBIAYAAN ASKRINDO SYARIAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2018
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT JAMINAN PEMBIAYAAN ASKRINDO SYARIAH
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2018
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN
(Lanjutan)**

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES
(Continued)**

c. Aset keuangan (Lanjutan)

c. Financial assets (Continued)

Pengukuran setelah pengakuan awal (Lanjutan)

Subsequent measurement (Continued)

**1. Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar
melalui laporan laba rugi (Lanjutan)**

**1. Financial assets at fair value through profit
or loss (Continued)**

Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi dicatat pada laporan posisi keuangan pada nilai wajarnya. Perubahan nilai wajar langsung diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif. Bunga yang diperoleh dicatat sebagai pendapatan bunga, sedangkan pendapatan dividen dicatat sebagai bagian dari pendapatan lain-lain sesuai dengan persyaratan dalam kontrak, atau pada saat hak untuk memperoleh pembayaran atas dividen tersebut telah ditetapkan.

Financial assets at fair value through profit or loss are recorded in the statement of financial position at fair value. Changes in fair value are recognized directly in the statement of comprehensive income. Interest earned is recorded as interest income, while dividend income is recorded as part of other income according to the terms of the contract, or when the right of payment has been established.

Pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017, Perusahaan tidak memiliki efek ekuitas diperdagangkan.

As of 31 December 2018 and 2017, the Company does not have trading equity securities.

2. Pinjaman dan piutang

2. Loans and receivables

Pinjaman dan piutang merupakan aset keuangan non-derivatif dengan pembayaran tetap dan dapat ditentukan dan tidak memiliki kuotasi harga di pasar aktif. Secara mendasar, pinjaman dan piutang muncul dari pemberian barang dan jasa kepada para pelanggan (misalnya, piutang dagang), namun juga terkait dengan jenis lain aset moneter kontraktual.

Loans and receivables are non-derivative financial assets with fixed or determinable payments that are not quoted in an active market. They arise principally through the provision of goods and services to customers (e.g. trade receivables), but also incorporate other types of contractual monetary asset.

Aset tersebut diukur dengan menggunakan biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif dikurangi provisi bagi penurunan nilai aset.

Such assets are carried at amortized cost using the effective interest method less provision for impairment

Aset tersebut diukur dengan menggunakan biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif dikurangi provisi bagi penurunan nilai aset.

Such assets are carried at amortized cost using the effective interest method less provision for impairment

Keuntungan dan kerugiannya diakui di dalam laporan laba rugi pada saat pinjaman dan piutang dihentikan pengakuannya atau mengalami penurunan nilai, sebagaimana melalui proses amortisasi.

Gains and losses are recognized in profit or loss when the loans and receivables are derecognized or impaired, as well as through the amortization process.

Negosiasi ulang tersebut cenderung mengubah jangka waktu pembayaran dibandingkan dengan jumlah yang terutang dengan konsekuensi arus kas yang diharapkan di masa depan akan didiskontokan pada suku bunga efektif awal dan segala perbedaan yang timbul terhadap nilai tercatat akan diakui di dalam laporan laba rugi komprehensif sebagai laba operasi.

Such renegotiations will lead to changes in the timing of payments rather than changes to the amounts owed and, in consequence, the new expected cash flows are discounted at the original effective interest rate and any resulting difference to the carrying value is recognised in the statement of comprehensive income (operating profit).

*These Financial Statements are originally
issued in Indonesian language*

Ekshibit F/7

Exhibit F/7

**PT JAMINAN PEMBIAYAAN ASKRINDO SYARIAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2018
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT JAMINAN PEMBIAYAAN ASKRINDO SYARIAH
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2018
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN
(Lanjutan)**

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES
(Continued)**

c. Aset keuangan (Lanjutan)

c. Financial assets (Continued)

Pengukuran setelah pengakuan awal (Lanjutan)

Subsequent measurement (Continued)

2. Pinjaman dan piutang (Lanjutan)

2. Loans and receivables (Continued)

Perusahaan memiliki aset keuangan yang diklasifikasikan sebagai pinjaman dan piutang terdiri dari piutang premi, piutang reasuransi dan piutang lain-lain.

The Company have financial assets classified as loans and receivables consists of premium receivables, reinsurance receivables and other receivables.

3. Investasi dimiliki hingga jatuh tempo

3. Held-to-maturity investments

Aset keuangan 'dimiliki sampai jatuh tempo' merupakan aset keuangan non-derivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dengan jatuh tempo tetap di mana manajemen Perusahaan memiliki tujuan dan kemampuan positif untuk memiliki investasi sampai jatuh tempo.

Financial assets "held-to-maturity" are non-derivative financial assets with fixed or determinable payments or fixed maturities that the Company's management has the positive intention and ability to hold the investment to maturity.

Investasi dimiliki sampai jatuh tempo diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif, dikurangi segala kerugian penurunan nilai. Keuntungan dan kerugiannya diakui di dalam laporan laba rugi pada saat investasi dimiliki sampai jatuh tempo dihentikan pengakuannya atau mengalami penurunan nilai, sebagaimana halnya melalui proses amortisasi.

Held-to-maturity investments are measured at amortized cost using the effective interest method, less any impairment losses. Gains and losses are recognized in profit or loss when the held-to-maturity investments are derecognized or impaired, as well as through the amortization process.

Perusahaan tidak memiliki aset keuangan yang diklasifikasikan sebagai investasi dimiliki sampai jatuh tempo.

The Company does not have any financial assets classified as held-to-maturity.

4. Aset keuangan tersedia untuk dijual

4. Available-for-sale financial assets

Aset keuangan tersedia untuk dijual merupakan aset yang ditetapkan sebagai tersedia untuk dijual atau tidak diklasifikasikan dalam kategori instrumen keuangan yang lain. Aset keuangan ini diperoleh dan dimiliki untuk jangka waktu yang tidak ditentukan dan dapat dijual sewaktu-waktu untuk memenuhi kebutuhan likuiditas atau karena perubahan kondisi pasar.

Available for sale financial assets are those which are designated as such or not classified in any of the other categories. They are purchased and held indefinitely and may be sold in response to liquidity requirements or changes in market conditions.

These Financial Statements are originally issued in Indonesian language

Ekshibit F/8

Exhibit F/8

PT JAMINAN PEMBIAYAAN ASKRINDO SYARIAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2018
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT JAMINAN PEMBIAYAAN ASKRINDO SYARIAH
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2018
 (Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN
 (Lanjutan)

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES
 (Continued)

c. Aset keuangan (Lanjutan)

c. Financial assets (Continued)

Pengukuran setelah pengakuan awal (Lanjutan)

Subsequent measurement (Continued)

4. Aset keuangan tersedia untuk dijual
 (Lanjutan)

4. Available-for-sale financial assets
 (Continued)

Setelah pengukuran awal, aset keuangan tersedia untuk dijual diukur pada nilai wajar, dengan laba atau rugi yang belum direalisasi diakui sebagai pendapatan komprehensif lain - "Laba (rugi) belum direalisasi dari nilai wajar aset keuangan tersedia untuk dijual", sampai aset keuangan tersebut dihentikan pengakuannya atau dianggap telah mengalami penurunan nilai, dimana pada saat itu akumulasi laba atau rugi direklasifikasi ke komponen laba rugi dan dikeluarkan dari akun "Laba (rugi) belum direalisasi dari kenaikan (penurunan) nilai aset keuangan tersedia untuk dijual".

After initial measurement, available for sale financial assets are measured at fair value with unrealized gains or losses recognized as other comprehensive income - "Unrealized gain (loss) on changes in fair value of available for sale investments" until the investment is derecognized, or determined to be impaired, at which time the cumulative gain or loss is reclassified to the profit and loss and removed from "Unrealized gain (loss) on changes in fair value of available-for-sale investments".

Pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017, kategori ini meliputi investasi Perusahaan dalam unit penyertaan reksadana.

As of 31 December 2018 and 2017 the company's investments in available for sale mutual funds.

Investasi di dalam instrumen ekuitas dengan nilai wajar yang tidak dapat diukur dengan andal, diukur pada biaya perolehan dikurangi kerugian penurunan nilai.

Investments in equity instruments whose fair value cannot be reliably measured are measured at cost less impairment loss.

Karena nilai wajarnya tidak dapat ditentukan secara andal, maka investasi penyertaan saham dinyatakan pada biaya perolehan, setelah dikurangi penurunan nilai, jika ada.

In the absence of a reliable basis for determining the fair value, the equity investments are carried at cost, net of impairment, if any.

Penghentian pengakuan

Derecognition

Suatu aset keuangan dihentikan pengakuannya apabila hak untuk menerima arus kas aset telah berakhir. Pada penghentian aset keuangan secara keseluruhan, selisih antara nilai tercatat dengan jumlah yang akan diterima dan semua kumulatif keuntungan atau kerugian yang telah diakui di dalam pendapatan komprehensif lainnya diakui di dalam laporan laba rugi.

A financial asset is derecognized when the rights to receive cash flows from the asset have expired. On derecognition of a financial asset in its entirety, the difference between the carrying amount and the sum of the consideration received and any cumulative gain or loss that had been recognized in other comprehensive income is recognized in profit or loss.

Semua penjualan dan pembelian yang lazim aset keuangan diakui dan dihentikan pengakuannya pada saat tanggal perdagangan, yaitu tanggal Perusahaan dan entitas anak berkomitmen untuk membeli atau menjual aset.

All regular way purchases and sales of financial assets are recognized or derecognized on the trade date i.e., the date that the Company commits to purchase or sell the asset.

*These Financial Statements are originally
issued in Indonesian language*

Ekshibit F/9

Exhibit F/9

**PT JAMINAN PEMBIAYAAN ASKRINDO SYARIAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2018
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT JAMINAN PEMBIAYAAN ASKRINDO SYARIAH
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2018
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN
(Lanjutan)**

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES
(Continued)**

c. Aset keuangan (Lanjutan)

c. Financial assets (Continued)

Penghentian pengakuan (Lanjutan)

Derecognition (Continued)

Pembelian atau penjualan yang lazim (reguler) adalah pembelian atau penjualan aset keuangan berdasarkan kontrak yang mensyaratkan penyerahan aset dalam kurun waktu yang ditetapkan dengan peraturan atau kebiasaan yang berlaku di pasar.

Regular way purchases or sales are purchases or sales of financial assets that require delivery of assets within the period generally established by regulation or convention in the marketplace concerned.

Saling hapus

Offsetting

Aset dan liabilitas keuangan saling hapus dan nilai bersih yang dilaporkan dalam laporan posisi keuangan jika dan hanya jika, ada hak hukum saat ini dilaksanakan untuk mengimbangi jumlah yang diakui dan ada niat untuk menyelesaikan secara bersih, atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara bersamaan.

Financial assets and liabilities are set off and the net amount is presented in the statements of financial position when, and only when, the Company has a legal right to set-off the amounts and intends either to settle on net basis or realizes the asset and settles the liability simultaneously.

Penurunan nilai aset keuangan

Impairment of financial assets

Pada setiap tanggal laporan posisi keuangan, manajemen Perusahaan menelaah apakah suatu aset keuangan atau kelompok aset keuangan telah mengalami penurunan nilai.

The Company's management assesses at each statement of financial position date whether a financial asset or group of financial assets is impaired

1. Aset yang dinilai dengan biaya perolehan diamortisasi

1. Assets carried at amortized cost

Manajemen pertama-tama menentukan apakah terdapat bukti obyektif mengenai penurunan nilai secara individual atas aset keuangan yang signifikan secara individual, atau secara kolektif untuk aset keuangan yang jumlahnya tidak signifikan secara individual. Jika manajemen menentukan tidak terdapat bukti obyektif mengenai penurunan nilai atas aset keuangan yang dinilai secara individual, baik aset keuangan tersebut signifikan atau tidak signifikan, maka aset tersebut dimasukkan ke dalam kelompok aset keuangan yang memiliki karakteristik risiko kredit yang sejenis dan menilai penurunan nilai kelompok tersebut secara kolektif. Aset yang penurunan nilainya dinilai secara individual, dan untuk itu kerugian penurunan nilai diakui atau tetap diakui, tidak termasuk dalam penilaian penurunan nilai secara kolektif.

The management first assesses whether objective evidence of impairment exists individually for financial assets that are individually significant, or collectively for financial assets that are not individually significant. If the management determines that no objective evidence of impairment exists for an individually assessed financial asset, whether significant or not, the asset is included in a group of financial assets with similar credit risk characteristics and that group of financial assets is collectively assessed for impairment. Assets that are individually assessed for impairment and for which an impairment loss, is or continues to be recognized are not included in a collective assessment of impairment.

*These Financial Statements are originally
issued in Indonesian language*

Ekshibit F/10

Exhibit F/10

**PT JAMINAN PEMBIAYAAN ASKRINDO SYARIAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2018
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT JAMINAN PEMBIAYAAN ASKRINDO SYARIAH
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2018
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN
(Lanjutan)**

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES
(Continued)**

c. Aset keuangan (Lanjutan)

c. Financial assets (Continued)

Penurunan nilai aset keuangan (Lanjutan)

Impairment of financial assets (Continued)

**1. Aset yang dinilai dengan biaya perolehan
diamortisasi (Lanjutan)**

**1. Assets carried at amortized cost
(Continued)**

Jika terdapat bukti obyektif bahwa penurunan nilai kerugian diukur sebagai selisih antara nilai tercatat aset dengan nilai kini estimasi arus kas masa depan (tidak termasuk kerugian kredit di masa depan yang belum terjadi) yang didiskonto menggunakan suku bunga efektif awal dari aset tersebut (yang merupakan suku bunga efektif yang dihitung pada saat pengakuan awal). Nilai tercatat aset tersebut langsung dikurangi dengan penurunan nilai yang terjadi atau menggunakan akun penyisihan dan jumlah kerugian yang terjadi diakui di laporan laba rugi komprehensif.

If there is an objective evidence that an impairment loss has been incurred, the amount of the loss is measured as the difference between the asset's carrying amount and the present value of estimated future cash flows (excluding future credit losses that have not been incurred) discounted at the financial asset's original effective interest rate (i.e., the effective interest rate computed at initial recognition). The carrying amount of the asset shall be reduced either directly or through the use of an allowance account. The amount of loss is charged to the statement of comprehensive income.

Jika, pada tahun berikutnya, jumlah kerugian penurunan nilai berkurang karena suatu peristiwa yang terjadi setelah penurunan nilai tersebut diakui, maka dilakukan penyesuaian atas penyisihan kerugian penurunan nilai yang sebelumnya diakui. Pemulihan penurunan nilai selanjutnya diakui dalam laporan laba rugi komprehensif, dengan ketentuan nilai tercatat aset setelah pemulihan penurunan nilai tidak melampaui biaya perolehan diamortisasi pada tanggal pemulihan tersebut.

If, in a subsequent year, the amount of the impairment loss decreases because of an event occurring after the impairment was recognized, the previously recognized impairment loss is reversed. Any subsequent reversal of an impairment loss is recognized in the statement of comprehensive income, to the extent that the carrying value of the asset does not exceed its amortized cost at the reversal date.

**2. Aset keuangan yang dicatat pada biaya
perolehan**

2. Assets carried at cost

Jika terdapat bukti obyektif bahwa kerugian penurunan nilai telah terjadi atas instrumen ekuitas yang tidak memiliki kuotasi harga di pasar aktif dan tidak diukur pada nilai wajar karena nilai wajarnya tidak dapat diukur secara andal, maka jumlah kerugian penurunan nilai diukur berdasarkan selisih antara nilai tercatat aset keuangan dengan nilai kini dari estimasi arus kas masa depan yang didiskontokan pada tingkat pengembalian yang berlaku di pasar untuk aset keuangan serupa.

If there is an objective evidence that an impairment loss has been incurred on an unquoted equity instrument that is not carried at fair value because its fair value cannot be reliably measured, the amount of the loss is measured as the difference between the asset's carrying amount and the present value of estimated future cash flows discounted at the current market rate of return for a similar financial asset.

*These Financial Statements are originally
issued in Indonesian language*

Ekshibit F/11

Exhibit F/11

**PT JAMINAN PEMBIAYAAN ASKRINDO SYARIAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2018
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT JAMINAN PEMBIAYAAN ASKRINDO SYARIAH
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2018
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN
(Lanjutan)**

c. Aset keuangan (Lanjutan)

Penurunan nilai aset keuangan (Lanjutan)

**2. Aset keuangan yang dicatat pada biaya
perolehan (Lanjutan)**

Dalam hal instrumen ekuitas dalam kelompok tersedia untuk dijual, penelaahan penurunan nilai ditandai dengan penurunan nilai wajar dibawah biaya perolehannya yang signifikan dan berkelanjutan. Jika terdapat bukti obyektif penurunan nilai, maka kerugian penurunan nilai kumulatif yang dihitung dari selisih antara biaya perolehan dengan nilai wajar kini, dikurangi kerugian penurunan nilai yang sebelumnya telah diakui dalam komponen laba rugi, dikeluarkan dari ekuitas dan diakui dalam komponen laba rugi. Kerugian penurunan nilai tidak boleh dipulihkan melalui laporan laba rugi komprehensif. Kenaikan nilai wajar setelah terjadinya penurunan nilai diakui di ekuitas.

Dalam hal instrumen utang dalam kelompok tersedia untuk dijual, penurunan nilai ditelaah berdasarkan kriteria yang sama dengan aset keuangan yang dicatat pada biaya perolehan diamortisasi. Bunga tetap diakui berdasarkan suku bunga efektif asal yang diterapkan pada nilai tercatat aset yang telah diturunkan nilainya, dan dicatat sebagai bagian dari pendapatan bunga dalam laporan laba rugi dan komprehensif lain. Jika, pada tahun berikutnya, nilai wajar instrumen utang meningkat dan peningkatan nilai wajar tersebut karena suatu peristiwa yang terjadi setelah penurunan nilai tersebut diakui, maka penurunan nilai yang sebelumnya diakui harus dipulihkan melalui laporan laba rugi komprehensif.

3. Aset keuangan tersedia untuk dijual

Penurunan yang signifikan atau penurunan jangka panjang di dalam nilai wajar lebih rendah dari biaya perolehan, kesulitan keuangan signifikan perusahaan penerbit atau perusahaan peminjam, dan hilangnya pasar aktif perdagangan merupakan bukti obyektif investasi ekuitas diklasifikasikan sebagai aset keuangan tersedia untuk dijual yang mungkin mengalami penurunan nilai. "Signifikansi" akan dievaluasi terhadap biaya awal investasi dan "jangka panjang" dievaluasi terhadap periode di mana nilai wajar lebih rendah dari biaya awalnya.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES
(Continued)**

c. Financial assets (Continued)

Impairment of financial assets (Continued)

2. Assets carried at cost (Continued)

In case of equity investments classified as available for sale, assessment of any impairment would include a significant or prolonged decline in the fair value of the investments below its cost. Where there is an evidence of impairment, the cumulative loss measured as the difference between the acquisition cost and the current fair value, less any impairment loss on that financial asset previously recognized in the statement of comprehensive income is removed from equity and recognized in the statement of comprehensive income. Impairment losses on equity investments are not reversed through the statement of comprehensive income. Increases in fair value after impairment are recognized directly in equity.

In the case of debt instruments classified as available for sale, impairment is assessed based on the same criteria as financial assets carried at amortized cost. Interest continues to be accrued at the original effective interest rate on the reduced carrying amount of the asset and is recorded as part of interest income in the statement of profit or loss and other comprehensive income. If, in subsequent year, the fair value of a debt instrument increased and the increase can be objectively related to an event occurring after the impairment loss was recognized in the statement of comprehensive income, the impairment loss is reversed through the statement of comprehensive income.

3. Available-for-sale financial assets

Significant or prolonged decline in fair value below cost, significant financial difficulties of the issuer or obligor, and the disappearance of an active trading market are objective evidence that equity investments classified as available-for-sale financial assets may be impaired. "Significant" is to be evaluated against the original cost of the investment and "prolonged" against the period in which the fair value has been below its original cost.

*These Financial Statements are originally
issued in Indonesian language*

Ekshibit F/12

Exhibit F/12

**PT JAMINAN PEMBIAYAAN ASKRINDO SYARIAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2018
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT JAMINAN PEMBIAYAAN ASKRINDO SYARIAH
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2018
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN
(Lanjutan)**

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES
(Continued)**

**d. Penurunan nilai aset non-keuangan (selain aset
pajak tangguhan)**

**d. Impairment of non-financial assets (excluding
deferred tax assets)**

Perusahaan menilai pada tiap tanggal pelaporan apakah terdapat indikasi penurunan nilai pada aset. Apabila terdapat indikasi penurunan nilai, atau ketika penilaian penurunan nilai bagi aset secara tahunan disyaratkan, Perusahaan membuat estimasi nilai terpulihkan aset.

The Company assesses at each reporting date whether there is any indication that an asset may be impaired. If any such indication exists, or when annual impairment assessment for an asset is required, the Company makes an estimate of the asset's recoverable amount.

Suatu nilai terpulihkan aset lebih tinggi dibandingkan nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual aset atau unit penghasil kas dan nilai pakainya dan ditentukan sebagai suatu aset individual, kecuali aset tersebut tidak menghasilkan arus kas masuk yang sebagian besar independen dari aset lain. Di dalam menilai nilai pakai, estimasi arus kas yang diharapkan diperoleh dari aset didiskontokan terhadap nilai kininya dengan menggunakan suku bunga diskonto sebelum pajak yang mencerminkan penilaian pasar kini terhadap nilai waktu uang dan risiko spesifik aset.

An asset's recoverable amount is the higher of an asset's or cash-generating unit's fair value less costs to sell and its value in use and is determined for an individual asset, unless the asset does not generate cash inflows that are largely independent of those from other assets. In assessing value in use, the estimated future cash flows expected to be generated by the asset are discounted to their present value using a pre-tax discount rate that reflects current market assessments of the time value of money and the risks specific to the asset.

Ketika nilai tercatat suatu aset melebihi nilai terpulihkannya, aset tersebut diturunkan nilainya hingga nilai terpulihkannya. Rugi penurunan nilai diakui dalam laba rugi kecuali aset yang relevan dicatat pada nilai revaluasian, yang mana rugi penurunan nilai dicatat sebagai penurunan revaluasian. Suatu penilaian dilakukan pada setiap tanggal pelaporan apabila terdapat segala indikasi bahwa kerugian penurunan nilai yang diakui sebelumnya sudah tidak ada lagi atau mengalami penurunan. Suatu kerugian penurunan nilai yang diakui sebelumnya, dibalikkan nilainya jika terdapat-

Where the carrying amount of an asset exceeds its recoverable amount, the asset is written down to its recoverable amount. Impairment losses are recognized in profit or loss unless the relevant asset is carried at a revalued amount, in which case the impairment loss is treated as a revaluation decrease. An assessment is made at each reporting date as to whether there is any indication that previously recognized impairment losses may no longer exist or may have decreased. A previously recognized impairment loss is reversed only if there has been a change in the estimates used to-

perubahan estimasi yang digunakan untuk menentukan nilai terpulihkan aset sejak pengakuan terakhir kerugian penurunan nilai. Apabila demikian kondisinya, nilai tercatat aset meningkat pada jumlah terpulihkannya. Kenaikan tersebut tidak dapat melebihi nilai tercatat yang telah ditentukan, penyusutan bersih, tidak ada kerugian penurunan nilai yang diakui sebelumnya.

determine the asset's recoverable amount since the last impairment loss was recognized. If that is the case, the carrying amount of the asset is increased to its recoverable amount. That increase cannot exceed the carrying amount that would have been determined, net of depreciation, had no impairment loss been recognized previously.

Pembalikkan nilai tersebut diakui di dalam laporan laba rugi kecuali aset tersebut diukur pada jumlah revaluasian, yang dalam hal ini dipertlakukan sebagai kenaikan revaluasi.

Such reversal is recognized in profit or loss unless the asset is measured at revalued amount, in which case the reversal is treated as a revaluation increase.

*These Financial Statements are originally
issued in Indonesian language*

Ekshibit F/13

Exhibit F/13

**PT JAMINAN PEMBIAYAAN ASKRINDO SYARIAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2018
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT JAMINAN PEMBIAYAAN ASKRINDO SYARIAH
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2018
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN
(Lanjutan)**

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES
(Continued)**

e. Liabilitas keuangan

e. Financial liabilities

Liabilitas keuangan diakui di dalam laporan posisi keuangan, jika dan hanya jika, Perusahaan menjadi bagian ketentuan kontraktual instrumen keuangan. Perusahaan menentukan klasifikasi liabilitas keuangan pada saat pengakuan awal.

Financial liabilities are recognized in the statement of financial position if and only if, the Company becomes a party to the contractual provisions of the financial instrument. The Company determines the classification of its financial liabilities at initial recognition.

Perusahaan mengklasifikasikan liabilitas keuangan ke dalam salah satu dari dua kategori, bergantung pada tujuan liabilitas itu diperoleh.

The Company classifies its financial liabilities into one of two categories, depending on the purpose for which the liability was acquired.

Selain dari liabilitas keuangan di dalam hubungan lindung nilai yang memiliki kualifikasi sebagai instrumen lindung nilai, kebijakan akuntansi Perusahaan untuk setiap kategori adalah sebagai berikut:

Other than financial liabilities in a qualifying hedging relationship, the Company's accounting policy for each category is as follows:

1. Nilai wajar melalui laba rugi

1. Fair value through profit or loss

Kategori ini hanya terdiri dari instrumen derivatif *out-of-the-money*. Instrumen tersebut dinilai di dalam laporan posisi keuangan pada nilai wajar dengan perubahan nilai wajar yang diakui di dalam laporan laba rugi komprehensif.

This category comprises only out-of-the-money derivatives. They are carried in the statement of financial position at fair value with changes in fair value recognised in the statement of comprehensive income.

2. Liabilitas keuangan lainnya

2. Other financial liabilities

Liabilitas keuangan lainnya diukur setelah pengukuran awal pada biaya perolehan diamortisasi, dengan menggunakan metode suku bunga efektif. Keuntungan dan kerugian diakui di dalam laba dan rugi ketika liabilitas dihentikan pengakuannya, dan melalui proses amortisasi.

Other financial liabilities are subsequently measured at amortized cost, using the effective interest method. Gains and losses are recognized in profit and loss when the liabilities are derecognized, and through the amortization process.

Liabilitas keuangan lainnya mencakup pinjaman dan utang bank pada pengakuan awal diakui pada nilai wajar bersih dari biaya transaksi yang dapat diatribusikan untuk menerbitkan instrumen tersebut.

Other financial liabilities include long term loans are initially recognised at fair value of any transaction costs which is attributed to issue of the instrument.

Liabilitas yang memiliki tingkat suku bunga selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif yang memastikan setiap beban bunga selama periode untuk membayar kembali memiliki suku bunga tetap pada saldo liabilitas yang tercantum di dalam laporan posisi keuangan.

Such interest bearing liabilities are subsequently measured at amortised cost using the effective interest rate method, which ensures that any interest expense over the period to repay has a constant rate on the balance of the liability carried over statement of financial position.

Beban bunga di dalam konteks ini meliputi biaya transaksi awal dan utang premi terhadap pembayaran kembali, sebagaimana halnya utang bunga maupun utang kupon pada utang yang masih tersisa.

Interest expense in this context includes initial transaction costs and premium payable on redemption, as well as any interest or coupon payable while the liability is outstanding.

These Financial Statements are originally issued in Indonesian language

Ekshibit F/14

Exhibit F/14

**PT JAMINAN PEMBIAYAAN ASKRINDO SYARIAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2018
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT JAMINAN PEMBIAYAAN ASKRINDO SYARIAH
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2018
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN
(Lanjutan)**

e. Liabilitas keuangan (Lanjutan)

2. Liabilitas keuangan lainnya (Lanjutan)

Liabilitas keuangan disajikan sebagai liabilitas lancar kecuali Perusahaan memiliki hak tanpa syarat untuk menunda penyelesaian liabilitas selama sekurang-kurangnya 12 (dua belas) bulan setelah periode pelaporan.

Suatu liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya ketika kewajiban yang ditetapkan di dalam kontrak dilepaskan atau dibatalkan atau kadaluwarsa.

Ketika liabilitas keuangan saat ini ditukar dengan liabilitas keuangan lain dari peminjam yang sama dengan persyaratan yang berbeda secara substansial, atau persyaratan liabilitas yang ada dimodifikasi secara substansial, maka pertukaran maupun modifikasi tersebut diperlakukan sebagai penghentian pengakuan liabilitas awal dan pengakuan liabilitas baru dan selisih masing-masing jumlah diakui di dalam laporan laba rugi.

f. Kas dan Bank

Kas dan bank meliputi kas dan simpanan di bank yang bersifat jangka pendek yang sewaktu-waktu bisa dicairkan, dan yang tidak dijaminkan serta tidak dibatasi pencairannya.

g. Aset tetap

Pada pengakuan awal, aset tetap dinilai sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan aset meliputi harga pembelian dan semua biaya yang dapat diatribusikan langsung untuk membawa aset tersebut ke kondisi kerja dan kondisi lokasi bagi tujuan penggunaannya.

Biaya legal awal untuk mendapatkan hak legal diakui sebagai bagian biaya akusisi tanah, biaya-biaya tersebut tidak disusutkan. Biaya terkait dengan pembaruan hak atas tanah diakui sebagai aset tak berwujud dan diamortisasi sepanjang umur hukum hak.

Penyusutan dihitung dengan menggunakan metode garis lurus, berdasarkan estimasi masa manfaat ekonomis aset tetap sebagai berikut:

	Tahun/ Years	Metode Penyusutan Depreciation Method	
Bangunan dan renovasi	8-20	Garis lurus/Straight line	Building and renovation
Peralatan komputer	4	Garis lurus/Straight line	Computer equipment
Peralatan non komputer	4	Garis lurus/Straight line	Non computer equipment
Perabot kantor	8	Garis lurus/Straight line	Office furniture

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES
(Continued)**

e. Financial liabilities (Continued)

2. Other financial liabilities (Continued)

Financial liabilities are presented as current liabilities unless the Company has an unconditional right to defer settlement for at least 12 (twelve) months after the end of the reporting period.

A financial liability is derecognized when the obligation under the liability is discharged or cancelled or expires.

When an existing financial liability is replaced by another from the same lender on substantially different terms, or the terms of an existing liability are substantially modified, such an exchange or modification is treated as a derecognition of the original liability and the recognition of a new liability, and the difference in the respective carrying amounts is recognized in profit or loss.

f. Cash and Bank

Cash on hand and in banks include cash on hand and short-term deposits banks and which are not used as collateral and are not restricted.

g. Property and equipment

Property and equipment are initially carried at cost. The cost of an asset comprises its purchase price and any directly attributable cost of bringing the asset to the working condition and location for its intended use.

Initial legal costs incurred to obtain legal rights are recognised as part of the acquisition cost of the land, and these costs are not depreciated. Costs related to renewal of land rights are recognised as intangible assets and amortised during the period of the landrights.

Depreciation is calculated on the straight line method, based on the estimated useful lives of the assets as follows:

*These Financial Statements are originally
issued in Indonesian language*

Ekshibit F/15

Exhibit F/15

**PT JAMINAN PEMBIAYAAN ASKRINDO SYARIAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2018
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT JAMINAN PEMBIAYAAN ASKRINDO SYARIAH
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2018
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN
(Lanjutan)**

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES
(Continued)**

g. Aset tetap (Lanjutan)

g. Property and equipment (Continued)

Masa manfaat ekonomis, nilai residu dan metode penyusutan ditelaah setiap akhir tahun dan pengaruh dari setiap perubahan estimasi tersebut berlaku prospektif.

The estimated useful lives, residual values and depreciation method are reviewed at each year end, with the effect of any changes in estimate accounted for on a prospective basis.

Biaya perbaikan dan pemeliharaan dibebankan ke laba rugi di periode yang sama pada saat terjadinya. Pengeluaran yang memperpanjang masa manfaat aset dikapitalisasi dan disusutkan.

Repair and maintenance expenses are charged to profit or loss during the financial period in which they are incurred. Expenditure which extends the useful lives of the assets or provides further economic benefits are capitalised and depreciated.

Apabila aset tetap dihentikan penggunaannya atau dijual, harga perolehan dan akumulasi depresiasi yang terkait dengan aset tetap tersebut dihentikan pengakuannya dari laporan keuangan dan keuntungan atau kerugian yang dihasilkan diakui dalam laba rugi.

When fixed assets are retired or otherwise disposed of, their costs and the related accumulated depreciation are eliminated from the financial statements and any resulting gains or losses are recognised in the profit or loss.

Apabila nilai tercatat aset tetap lebih besar dari nilai yang dapat diperoleh kembali, aset diturunkan menjadi sebesar nilai yang dapat diperoleh kembali, dengan menggunakan nilai tertinggi antara harga jual neto dengan nilai pakai.

When the carrying amount of an asset is greater than its estimated recoverable amount, it is written down immediately to its recoverable amount, which is determined based on the higher of net selling price or value in use.

h. Biaya dibayar dimuka

h. Prepaid expenses

Biaya dibayar dimuka diamortisasi selama masa manfaatnya dengan menggunakan metode garis lurus.

Prepaid expenses are amortised on a straight-line basis over the expected periods of benefits.

i. Pendapatan ujah

i. Ujah income

Pendapatan ujah diakui dan dicatat sebagai pendapatan ujah pada saat sertifikat penjaminan direalisasi berdasarkan nota penutupan sertifikat penjaminan. Pendapatan ujah diakui sebagai pendapatan selama periode polis berdasarkan proporsi risiko atau proporsi jangka waktu proteksi yang diberikan.

Ujah income is recognized and recorded as ujah income when the guarantee certificate is realized based on the closing note of the guarantee certificate. Ujah income is recognized as income during the policy period based on risk proportion or proportion of the period of protection granted.

Ujah yang belum merupakan pendapatan diakui sebesar ujah neto sesuai dengan proporsi harian sampai dengan periode kafalah berakhir.

Unearned ujah income is recognized in the amount of net ujah in accordance with the daily proportion until the expiration period ends.

Kenaikan atau penurunan ujah yang belum merupakan pendapatan merupakan selisih antara saldo ujah yang belum merupakan pendapatan tahun berjalan dan tahun lalu.

The increase or decrease in unearned ujah income is the difference between the balance of unearned ujah income the current year and last year.

These Financial Statements are originally issued in Indonesian language

Ekshibit F/16

Exhibit F/16

**PT JAMINAN PEMBIAYAAN ASKRINDO SYARIAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2018
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT JAMINAN PEMBIAYAAN ASKRINDO SYARIAH
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2018
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN
(Lanjutan)**

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES
(Continued)**

j. Beban *ta'widh*

j. *Ta'widh* expenses

Beban *ta'widh* merupakan klaim atas penjaminan yang terdiri atas *ta'widh* disetujui, *ta'widh* dalam proses penyelesaian termasuk *ta'widh* yang terjadi namun belum dilaporkan, dan beban penyelesaian *ta'widh*. Beban *ta'widh* tersebut diakui pada saat timbulnya kewajiban untuk memenuhi *ta'widh*. Pendapatan *ta'widh* penjaminan ulang diakui dan dicatat sebagai pengurang beban *ta'widh* pada periode yang sama dengan periode pengakuan beban *ta'widh*. Hak subrogasi diakui sebagai pengurang beban *ta'widh* pada saat realisasi.

*Ta'widh's expense is a claim on the guarantee consisting of approved *ta'widh*, *ta'widh* in the settlement process including *ta'widh* incurred but not reported, and the settlement cost of *ta'widh*. The *ta'widh* expense is recognized when the obligation arises to fulfill *ta'widh*. The guaranteed underwriting income is recognized and recorded as a deduction from *ta'widh's* expenses in the same period as the recognition period for *ta'widh's* expenses. Subrogation rights are recognized as a deduction *ta'widh* expenses at the time of realization.*

Jumlah *ta'widh* dalam proses penyelesaian (estimasi *ta'widh* retensi sendiri) dihitung berdasarkan estimasi kerugian retensi sendiri dari *ta'widh* yang pada tanggal laporan posisi keuangan masih dalam proses penyelesaian, termasuk *ta'widh* yang sudah terjadi namun belum dilaporkan. Perubahan dalam estimasi *ta'widh* retensi sendiri diakui dalam laba rugi di periode terjadinya perubahan. Kenaikan (penurunan) estimasi *ta'widh* retensi sendiri adalah selisih antara *ta'widh* retensi sendiri tahun berjalan dengan tahun lalu.

*The amount of *ta'widh* in the settlement process (estimated *ta'widh* own retention) is calculated based on the estimation of own retention losses from *ta'widh* which at the report date the financial position is still in the process of completion, including *ta'widh* incurred but not reported. Changes in the estimated *ta'widh* own retention itself is recognized in profit or loss in the period in which the changes occur. The increase (decrease) in estimated *ta'widh* own retention is the difference between the *ta'widh* own retention for the year and last year.*

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 2/POJK.05.2017 tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Penjaminan, lembaga penjamin wajib membentuk cadangan *ta'widh* paling sedikit 0,01% dari nilai penjaminan yang ditanggung sendiri atau penjumlahan dari 100% dari nilai penjaminan yang ditanggung sendiri pada saat *ta'widh* dilaporkan, dengan *ta'widh* yang sudah terjadi namun belum dilaporkan (*incurred but not reported*). *Ta'widh* yang sudah terjadi tetapi belum dilaporkan (*incurred but not reported*) dihitung berdasarkan rata-rata *ta'widh* ditanggung sendiri yang telah dibayarkan pada 3 bulan terakhir.

*Based on the Financial Services Authority Regulation No. 2 / POJK.05.2017 concerning the Implementation of the Business Guarantee Institution, the guarantor institution is obliged to form a *ta'widh* reserve of at least 0.01% of the guaranteed underwriting value or the sum of 100% of the guarantee value borne by itself when the incurred but not reported *ta'widh*. Incurred but not reported *ta'widh* is calculated based on the average self-borne *ta'widh* paid in the last 3 months.*

k. Hasil investasi

k. *Income from investment*

- Hasil investasi dari deposito berjangka dan obligasi diakui atas dasar proporsi waktu dan tingkat bunga yang berlaku.
- Penghasilan dividen diakui bila hak pemegang saham untuk menerima pembayaran ditetapkan.
- Keuntungan atau kerugian dari penjualan saham diakui pada saat transaksinya.

- Interest income from investment in time deposits and bonds is recognized on a time proportion basis, based on principal outstanding and prevailing interest rates.*
- Dividend income is recognized when the stockholders right to receive payment is established.*
- Gains or losses on sale of securities are recognized at the time of the transactions.*



*These Financial Statements are originally
issued in Indonesian language*

Ekshibit F/17

Exhibit F/17

**PT JAMINAN PEMBIAYAAN ASKRINDO SYARIAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2018
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT JAMINAN PEMBIAYAAN ASKRINDO SYARIAH
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2018
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN
(Lanjutan)**

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES
(Continued)**

l. Beban usaha

Beban usaha dan beban lain-lain diakui pada saat terjadinya (*accrual basis*).

l. Operating expenses

Operating expenses and other expenses are recognized when incurred (accrual basis).

m. Liabilitas imbalan pasca-kerja

Program manfaat pasti

Sesuai dengan Undang-undang Tenaga Kerja yang berlaku di Indonesia, Perusahaan memberikan manfaat pasca kerja manfaat pasti kepada para karyawannya.

m. Employment benefits liabilities

Defined benefit plans

In accordance with the relevant Manpower Law prevailing in Indonesia, the Group provides defined benefit post-employment benefits to their employees.

Liabilitas imbalan pascakerja diakui di dalam laporan posisi keuangan yang mencerminkan nilai kini kewajiban imbalan pasti, yang disesuaikan bagi keuntungan dan kerugian aktuarial yang belum diakui dan biaya jasa lalu yang belum diakui.

The pension benefit obligations recognized in the statement of financial position represent the present value of the defined benefit obligation, as adjusted for unrecognized actuarial gains and losses and unrecognized past service costs.

Provisi bagi manfaat pasca kerja ditentukan dengan menggunakan metode *Projected Unit Credit (PUC)*.

Provision for post-employment benefits is determined using the Projected Unit credit method (PUC).

Surplus dan defisit program imbalan pasti diukur pada:

Defined benefit scheme surpluses and deficits are measured at:

- Nilai wajar dari aset yang direncanakan pada tanggal pelaporan, dikurangi
- Liabilitas program yang dihitung dengan menggunakan metode PUC yang di diskonto ke nilai kini dengan menggunakan imbal hasil obligasi perusahaan yang berkualitas tinggi yang tersedia yang memiliki tanggal jatuh tempo yang mendekati persyaratan liabilitas; ditambah
- Biaya servis masa lalu yang tidak diakui, di kurangi
- Dampak persyaratan pendanaan minimum yang disetujui dengan skema wali amanat.

- *The fair value of plan assets at the reporting date; less*
- *Plan liabilities calculated using the PUC method discounted to its present value using yields available on high quality corporate bonds that have maturity dates approximating to the terms of the liabilities; plus*
- *Unrecognised past service costs; less*
- *The effect of minimum funding requirements agreed with scheme trustees.*

Pengukuran kembali kewajiban pasti neto diakui langsung dalam ekuitas. Pengukuran kembali tersebut termasuk:

Remeasurements of the net defined obligation are recognised directly within equity. The remeasurements include:

- Keuntungan dan kerugian aktuaris
- Imbalan atas aset program (tidak termasuk bunga)
- Aset dengan efek batas tertinggi (tidak termasuk bunga)

- *Actuarial gains and losses*
- *Return on plan assets (interest exclusive)*
- *Any asset ceiling effects (interest exclusive)*

These Financial Statements are originally issued in Indonesian language

Ekshibit F/18

Exhibit F/18

**PT JAMINAN PEMBIAYAAN ASKRINDO SYARIAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2018
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT JAMINAN PEMBIAYAAN ASKRINDO SYARIAH
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2018
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN
(Lanjutan)**

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES
(Continued)**

m. Liabilitas imbalan pasca-kerja (Lanjutan)

m. Employment benefits liabilities (Continued)

Program manfaat pasti (Lanjutan)

Defined benefit plans (Continued)

Biaya jasa di akui dalam laporan laba rugi, dan termasuk biaya jasa kini dan masa lalu, serta keuntungan dan kerugian kurtailmen.

Service costs are recognised in profit or loss, and include current and past service costs as well as gains and losses on curtailments

Beban bunga neto (pendapatan) diakui dalam laporan laba rugi dan dihitung dengan menerapkan tingkat diskonto untuk mengukur kewajiban imbalan pasti (aset) pada awal periode tahunan hingga pembayaran manfaat selama periode.

Net interest expense (income) is recognised in profit or loss, and is calculated by applying the discount rate used to measure the defined benefit obligation (asset) at the beginning of the annual period to the balance of the net defined benefit obligation (asset), considering the effects of contributions and benefit payments during the period.

Keuntungan atau kerugian yang timbul dari perubahan manfaat program atau kurtailmen diakui secara langsung dalam laba rugi.

Gains or losses arising from changes to scheme benefits or scheme curtailment are recognized immediately in profit or loss.

Penyelesaian program manfaat pasti diakui dalam periode dimana penyelesaian tersebut terjadi.

Settlements of defined benefit schemes are recognised in the period in which the settlement occurs.

Manfaat jangka pendek karyawan

Short-term employee benefits

Imbalan karyawan berupa cuti tahunan diakui pada saat entitas mengakru kepada karyawan. Suatu provisi dicadangkan bagi liabilitas diestimasi bagi cuti sebagai hasil dari jasa yang diberikan oleh karyawan sampai tanggal laporan posisi keuangan.

Employee entitlements to annual leave are recognized when they accrue to employees. A provision is made for the estimated liability for leave as a result of services rendered by employees up to statement of financial position date.

n. Perpajakan

n. Taxation

Beban pajak terdiri dari pajak kini dan pajak tangguhan. Pajak diakui dalam laporan laba rugi, kecuali jika pajak tersebut terkait dengan transaksi atau kejadian yang langsung diakui ke ekuitas. Dalam hal ini, pajak tersebut masing-masing diakui dalam pendapatan komprehensif lain atau ekuitas.

The tax expense consists of current and deferred tax. Tax is recognised in the profit or loss, except to the extent that it relates to items recognised directly in equity. In this case, the tax is also recognised in other comprehensive income or directly in equity, respectively.

Beban pajak kini dihitung berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku pada tanggal pelaporan keuangan. Manajemen secara periodik mengevaluasi posisi yang dilaporkan di Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) sehubungan dengan situasi di mana aturan pajak yang berlaku membutuhkan interpretasi.

The current income tax expense is calculated based on the tax regulation applicable on the reporting date. Management periodically evaluates positions taken in tax returns with respect to situations in which applicable tax regulation is subject to interpretation.

*These Financial Statements are originally
issued in Indonesian language*

Ekshibit F/19

Exhibit F/19

**PT JAMINAN PEMBIAYAAN ASKRINDO SYARIAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2018
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT JAMINAN PEMBIAYAAN ASKRINDO SYARIAH
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2018
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN
(Lanjutan)**

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES
(Continued)**

n. Perpajakan (Lanjutan)

n. Taxation (Continued)

Jika perlu, manajemen menentukan provisi berdasarkan jumlah yang diharapkan akan dibayar kepada otoritas pajak. Pajak penghasilan tangguhan diakui, dengan menggunakan metode *balance sheet liability* untuk semua perbedaan temporer antara dasar pengenaan pajak aset dan liabilitas dengan nilai tercatatnya pada laporan keuangan.

It establishes provision where appropriate on the basis of amounts expected to be paid to the tax authorities. Deferred income tax is recognised, using the balance sheet liability method, on temporary differences arising between the tax bases of assets and liabilities and their carrying amounts in the financial statements.

Pajak penghasilan tangguhan ditentukan dengan menggunakan tarif pajak yang telah berlaku atau secara substantif telah berlaku pada akhir periode pelaporan dan diharapkan diterapkan ketika aset pajak penghasilan tangguhan direalisasi atau liabilitas pajak penghasilan tangguhan diselesaikan.

Deferred income tax is determined using tax rates that have been enacted or substantially enacted as at reporting period and is expected to apply when the related deferred income tax asset is realised or the deferred income tax liability is settled.

Aset pajak penghasilan tangguhan diakui hanya jika besar kemungkinan jumlah penghasilan kena pajak di masa depan akan memadai untuk dikompensasi dengan perbedaan temporer yang masih dapat dimanfaatkan.

Deferred income tax assets are recognized only to the extent that it is probable that future taxable profit will be available against which the temporary differences can be utilised.

Aset dan liabilitas pajak penghasilan tangguhan dapat saling hapus apabila terdapat hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus antara aset pajak kini dengan liabilitas pajak kini dan apabila aset dan liabilitas pajak penghasilan tangguhan dikenakan oleh otoritas perpajakan yang sama, baik atas entitas kena pajak yang sama ataupun berbeda dan adanya niat untuk melakukan penyelesaian saldo-saldo tersebut secara neto.

Deferred income tax assets and liabilities are offset when there is a legally enforceable right to offset current tax assets against current tax liabilities and when the deferred income taxes assets and liabilities relate to income taxes levied by the same taxation authority on either the same taxable entity or different taxable entities where there is an intention to settle the balances on a net basis.

Pendapatan yang dikenakan pajak penghasilan yang bersifat final diakui sebagai perbedaan tetap dalam perhitungan pajak penghasilan dan tidak ada aset atau liabilitas pajak tangguhan yang diakui.

Income subject to final income tax is recognised as permanent difference in the corporate income tax calculation and there is no deferred tax asset or liability is recognised.

o. Penjabaran mata uang asing

o. Foreign currency translation

Akun-akun yang tercakup dalam laporan keuangan entitas menggunakan mata uang dari lingkungan ekonomi utama dimana entitas beroperasi (mata uang fungsional).

Items included in the financial statements are measured using the currency of the primary economic environment in which the entity operates (the functional currency).

Laporan keuangan disajikan dalam Rupiah (Rp), yang merupakan mata uang fungsional dan mata uang penyajian Perusahaan.

Financial statements are presented in Rupiah (IDR) which is the Company's functional and presentation currency.

*These Financial Statements are originally
issued in Indonesian language*

Ekshibit F/20

Exhibit F/20

**PT JAMINAN PEMBIAYAAN ASKRINDO SYARIAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2018
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT JAMINAN PEMBIAYAAN ASKRINDO SYARIAH
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2018
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN
(Lanjutan)**

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES
(Continued)**

o. Penjabaran mata uang asing (Lanjutan)

o. Foreign currency translation (Continued)

Transaksi dalam mata uang asing dijabarkan ke dalam mata uang Rupiah dengan menggunakan kurs yang berlaku pada tanggal transaksi. Keuntungan atau kerugian dari selisih kurs yang timbul dari penyelesaian transaksi dalam mata uang lain dan dari penjabaran aset dan liabilitas moneter dalam mata uang lain diakui di dalam laporan laba rugi komprehensif.

Foreign currencies transactions are translated into Rupiah using the exchange rates prevailing at the dates of the transactions. Gains or losses resulting from the settlement of such transactions in other currencies and from the translation of monetary assets and liabilities denominated in other currencies are recognised in the statement of comprehensive income.

Pada akhir periode laporan, aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing dijabarkan ke mata uang Rupiah dengan kurs tengah dari kurs beli dan kurs jual yang diterbitkan oleh Bank Indonesia yang berlaku pada tanggal tersebut. Kurs dari mata uang asing utama yang digunakan adalah sebagai berikut (nilai Rupiah penuh):

As at the end of the reporting period, monetary assets and liabilities denominated in foreign currencies are translated into Rupiah using middle rate of buying rate and selling rate issued by the Bank of Indonesia which prevail as at that date. The exchange rates of the major foreign currencies used are as follows (full amount in Rupiah):

	2018	2017	
1 Dolar Amerika Serikat	14.481	13.548	United States Dollar (USD) 1

p. Transaksi dengan pihak-pihak berelasi

p. Transactions with related parties

Suatu pihak dianggap berelasi dengan Perusahaan jika:

A party is considered to be related to the Company if:

- 1) Langsung, atau tidak langsung yang melalui satu atau lebih perantara, suatu pihak
 - a. mengendalikan, atau dikendalikan oleh, atau berada di bawah pengendalian bersama dengan Perusahaan
 - b. memiliki kepentingan dalam Perusahaan yang memberikan pengaruh signifikan atas Perusahaan; atau
 - c. memiliki pengendalian bersama atas Perusahaan;
- 2) Suatu pihak yang berelasi dengan Perusahaan;
- 3) Suatu pihak adalah ventura bersama dimana Perusahaan sebagai venturer;
- 4) Suatu pihak adalah anggota dari personil manajemen kunci Perusahaan atau induknya;
- 5) Suatu pihak adalah anggota keluarga dekat dari individu yang diuraikan dalam butir 1) atau 4);

- 1) *Directly, or indirectly through one or more intermediaries, the party*
 - a. *controls, or is controlled by, or is under common control with, the Company;*
 - b. *has an interest in the Company that gives it significant influence over the Company; or*
 - c. *has joint control over the Company;*
- 2) *The party is an associate of the Company;*
- 3) *The party is a joint venture in which the Company is a venturer;*
- 4) *The party is a member of the key management personnel of the Company or its parent;*
- 5) *The party is a close member of the family of any individual referred to in 1) or 4);*

*These Financial Statements are originally
issued in Indonesian language*

Ekshibit F/21

Exhibit F/21

**PT JAMINAN PEMBIAYAAN ASKRINDO SYARIAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2018
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT JAMINAN PEMBIAYAAN ASKRINDO SYARIAH
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2018
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN
(Lanjutan)**

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES
(Continued)**

**p. Transaksi dengan pihak-pihak berelasi
(Lanjutan)**

p. Transactions with related parties (Continued)

Suatu pihak dianggap berelasi dengan Perusahaan jika (Lanjutan):

A party is considered to be related to the Company if (Continued):

- 6) Suatu pihak adalah entitas yang dikendalikan, dikendalikan bersama atau dipengaruhi signifikan oleh atau untuk di mana hak suara signifikan pada beberapa entitas, langsung maupun tidak langsung, individu seperti diuraikan dalam butir 4) atau 5); atau
- 7) Suatu pihak adalah suatu program imbalan pascakerja untuk imbalan kerja dari Perusahaan atau entitas yang terkait dengan Perusahaan.

- 6) *The party is an entity that is controlled, jointly controlled or significantly influenced by, or for which significant voting power in such entity resides with, directly or indirectly, any individual referred to in 4) or 5); or*
- 7) *The party is a post-employment benefit plan for the benefit of employees of the Company, or of any entity that is a related party of the Company;*

Seluruh transaksi dengan pihak-pihak berelasi telah diungkapkan dalam Catatan 30.

All transactions with related parties are disclosed in Note 30.

q. Provisi

q. Provisions

Provisi diakui ketika Perusahaan memiliki kewajiban legal maupun konstruktif sebagai hasil peristiwa lalu, yaitu kemungkinan besar arus keluar sumber daya ekonomi diperlukan untuk menyelesaikan kewajiban dan suatu estimasi terhadap jumlah dapat dilakukan.

Provisions are recognized when the Company has a legal or constructive obligation as a result of past events, it is more likely than not that an outflow of resources will be required to settle the obligation and a reliable estimate of the amount can be made.

Provisi dikaji pada akhir tiap periode pelaporan dan disesuaikan untuk mencerminkan estimasi terbaik. Apabila tidak ada lagi kemungkinan arus keluar sumber daya ekonomi diperlukan untuk menyelesaikan kewajiban, maka provisi tersebut dicadangkan.

Provisions are reviewed at the end of each reporting period and adjusted to reflect the current best estimate. If it is no longer probable that an outflow of economic resources will be required to settle the obligation, the provision is reversed.

Apabila dampak nilai waktu uang adalah material, maka provisi didiskontokan dengan menggunakan tarif sebelum pajak, jika lebih tepat, untuk mencerminkan risiko spesifik liabilitas. Kenaikan provisi terkait dengan berlalunya waktu diakui sebagai beban keuangan, ketika pendiskontoan digunakan.

If the effect of the time value of money is material, provisions are discounted using a current pre tax rate that reflects, where appropriate, the risk specific to the liability. When discounting is used, the increase in the provision due to the passage of time is recognized as a finance cost.

r. Kontinjensi

r. Contingencies

Liabilitas kontinjensi tidak diakui di dalam laporan keuangan. Liabilitas kontinjensi diungkapkan di dalam catatan atas laporan keuangan kecuali kemungkinan arus keluar sumber daya ekonomi adalah kecil.

Contingent liabilities are not recognized in the financial statements. They are disclosed in the notes to the financial statements unless the possibility of an outflow of resources embodying economic benefits is remote.

*These Financial Statements are originally
issued in Indonesian language*

Ekshibit F/22

Exhibit F/22

**PT JAMINAN PEMBIAYAAN ASKRINDO SYARIAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2018
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT JAMINAN PEMBIAYAAN ASKRINDO SYARIAH
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2018
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN
(Lanjutan)**

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES
(Continued)**

s. Peristiwa setelah periode pelaporan

s. Events after the reporting period

Aset kontinjensi tidak diakui di dalam laporan keuangan, namun diungkapkan di dalam catatan atas laporan keuangan jika terdapat kemungkinan suatu arus masuk manfaat ekonomis mengalir ke dalam entitas.

Contingent assets are not recognized in the financial statements but are disclosed in the notes to the financial statements when an inflow of economic benefits is probable.

Peristiwa setelah periode pelaporan menyajikan bukti kondisi yang terjadi pada akhir periode pelaporan (peristiwa penyesuaian) yang dicerminkan di dalam laporan keuangan.

Events after the reporting period that provide evidence of conditions that existed at the end of the reporting period (adjusting events) are reflected in the financial statements.

Peristiwa setelah periode pelaporan yang bukan merupakan peristiwa penyesuaian, diungkapkan di dalam catatan laporan keuangan bila material.

Events after the reporting period that are not adjusting events are disclosed in the notes to the financial statements when material.

t. Hirarki pengukuran nilai wajar PSAK 60

t. PSAK 60 fair value measurement hierarchy

PSAK 60 mensyaratkan pengungkapan tertentu yang mensyaratkan klasifikasi aset keuangan dan liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar dengan menggunakan hirarki nilai wajar yang mencerminkan signifikansi input yang digunakan di dalam melakukan pengukuran nilai wajar. Hirarki nilai wajar memiliki tingkatan sebagai berikut:

PSAK 60 requires certain disclosures which require the classification of financial assets and financial liabilities measured at fair value using a fair value hierarchy that reflects the significance of the inputs used in making the fair value measurement. The fair value hierarchy has the following levels:

- ii. Kuotasi pasar (belum disesuaikan) di dalam pasar aktif bagi aset maupun liabilitas yang identikal (Tingkat 1);
- iii. Input selain kuotasi pasar yang termasuk di dalam Tingkat 1 yang dapat diobservasi bagi aset atau liabilitas, baik langsung (misalnya, harga) maupun tidak langsung (misalnya, derivatif harga) (Tingkat 2); dan
- iv. Input bagi aset dan liabilitas yang bukan berdasarkan data pasar yang dapat diobservasi (input yang tidak dapat diobservasi) (Tingkat 3).

- i. Quoted prices (unadjusted) in active markets for identical assets or liabilities (Level 1);
- ii. Inputs other than quoted prices included within Level 1 that are observable for the asset or liability, either directly (i.e. as prices) or indirectly (i.e. derived from prices) (Level 2); and
- iii. Inputs for the asset or liability that are not based on observable market data (unobservable inputs) (Level 3).

Tingkatan di dalam hirarki nilai wajar di mana aset keuangan maupun liabilitas keuangan dikategorisasi, ditetapkan pada basis tingkatan paling rendah input yang signifikan terhadap pengukuran nilai wajar. Aset keuangan dan liabilitas keuangan diklasifikasikan di dalam keseluruhan hanya ke dalam salah satu dari ketiga tingkatan tersebut.

The level in the fair value hierarchy within which the financial asset or financial liability is categorised is determined on the basis of the lowest level input that is significant to the fair value measurement. Financial assets and financial liabilities are classified in their entirety into only one of the three levels.

*These Financial Statements are originally
issued in Indonesian language*

Ekshibit F/23

Exhibit F/23

**PT JAMINAN PEMBIAYAAN ASKRINDO SYARIAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2018
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT JAMINAN PEMBIAYAAN ASKRINDO SYARIAH
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2018
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**3. ESTIMASI DAN PERTIMBANGAN AKUNTANSI YANG
PENTING**

Beberapa estimasi dan asumsi dibuat dalam rangka penyusunan laporan keuangan dimana dibutuhkan pertimbangan manajemen dalam menentukan metodologi yang tepat untuk penilaian aset dan liabilitas.

Manajemen membuat estimasi dan asumsi yang berimplikasi pada pelaporan nilai aset dan liabilitas atas tahun keuangan satu tahun kedepan. Semua estimasi dan asumsi yang diharuskan oleh standar akuntansi keuangan adalah estimasi terbaik yang didasarkan standar yang berlaku. Estimasi dan pertimbangan dievaluasi secara terus menerus dan berdasarkan pengalaman masa lalu dan faktor-faktor lain termasuk harapan atas kejadian yang akan datang.

Walaupun estimasi ini dibuat berdasarkan pengetahuan terbaik manajemen atas kejadian dan tindakan saat ini, hasil yang timbul mungkin berbeda dengan jumlah yang diestimasi semula.

Sumber utama ketidakpastian estimasi:

a. Estimasi *ta'widh* retensi sendiri

Estimasi *ta'widh* retensi sendiri merupakan pembentukan cadangan teknis yang digunakan untuk mencatat estimasi retensi sendiri atas kemungkinan *ta'widh* yang berpotensi menjadi beban di masa mendatang berdasarkan estimasi wajar. Pembentukan estimasi *ta'widh* retensi sendiri dilakukan dengan melakukan estimasi atas *ta'widh* yang sudah diajukan namun masih dalam proses penyelesaian dan *ta'widh* yang sudah terjadi namun belum dilaporkan.

Nilai tercatat estimasi *ta'widh* retensi sendiri Perusahaan pada tanggal laporan posisi keuangan diungkapkan di dalam Catatan 12 di dalam laporan keuangan.

b. Estimasi *ujrah* yang belum merupakan pendapatan

Perhitungan *ujrah* kafalah yang belum merupakan pendapatan terkait dan disesuaikan dengan *ujrah* kafalah yang telah diakui sebagai pendapatan. Masa pengakuan pendapatan *ujrah* kafalah adalah lama masa proteksi ditambah 1 (satu) tahun untuk masa hak pengajuan ganti rugi. Pengakuan pendapatan atas *ujrah* kafalah tersebut dilakukan sesuai dengan proporsi risiko atau proporsi jangka waktu proteksi yang diberikan.

Bagian *ujrah* kafalah yang sudah diterima namun belum dapat diakui sebagai pendapatan karena pertimbangan tersebut, diakui sebagai pendapatan *ujrah* kafalah yang belum merupakan pendapatan dan dicatat di kelompok liabilitas.

**3. CRITICAL ACCOUNTING ESTIMATES AND
JUDGEMENTS**

Certain estimates and assumption are made in the preparation of the financial statements. These often require management judgement in determining the appropriate methodology for valuation of assets and liabilities.

Management makes estimates and assumptions that affect the reported amounts of assets and liabilities within the next financial year. All estimates and assumptions required in conformity with financial accounting standard are best estimates undertaken in accordance with the applicable standard. Estimates and judgements are evaluated on a continuous basis, and are based on past experience and other factors, including expectations with regard to future events.

Although these estimates are based on management's best knowledge of current events and activities, actual results may differ from those estimates.

Key sources of estimation uncertainty:

a. Estimated *ta'widh* own retention

*The estimated *ta'widh* own retention is the formation of a technical reserve that is used to record the estimated own retention of the possibility of *ta'widh* which has potential to become a future expense based on a reasonable estimate. The estimation of *ta'widh* own retention is done by estimating *ta'widh* which has been submitted but is still in the process of completion and *ta'widh* incurred but not reported.*

*The carrying amount of the Company's estimated *ta'widh* own retention at the statement of financial position date is disclosed in Note 12 to the financial statements.*

b. Unearned estimated *ujrah*

*The unearned *ujrah* kafalah calculation is adjusted to *ujrah* kafalah which has been recognized as income. The period of revenue recognition for *ujrah* kafalah is the duration of the protection period plus 1 (one) year for the period of the right to apply for compensation. The revenue recognition for *ujrah* kafalah is carried out in accordance with the proportion of risk or the proportion of the protection period given.*

*The *ujrah* kafalah portion that has been received but cannot be recognized as income because of this consideration, is recognized as unearned *ujrah* kafalah income and recorded in the liability group.*

These Financial Statements are originally issued in Indonesian language

Ekshibit F/24

Exhibit F/24

**PT JAMINAN PEMBIAYAAN ASKRINDO SYARIAH
 CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2018
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT JAMINAN PEMBIAYAAN ASKRINDO SYARIAH
 NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
 FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2018
 (Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

3. ESTIMASI DAN PERTIMBANGAN AKUNTANSI YANG PENTING (Lanjutan)

b. Estimasi ujarah yang belum merupakan pendapatan (Lanjutan)

Nilai tercatat estimasi ujarah yang belum merupakan pendapatan Perusahaan pada tanggal laporan posisi keuangan diungkapkan di dalam Catatan 12 di dalam laporan keuangan.

c. Liabilitas imbalan pascakerja

Nilai kini liabilitas imbalan kerja tergantung pada sejumlah faktor yang ditentukan dengan menggunakan asumsi aktuarial (Catatan 20). Asumsi yang digunakan dalam menentukan biaya bersih untuk pensiun termasuk tingkat pengembalian jangka panjang yang diharapkan atas aset program dan tingkat diskonto yang relevan. Setiap perubahan dalam asumsi ini akan berdampak pada nilai tercatat liabilitas imbalan kerja.

Asumsi tingkat pengembalian yang diharapkan atas aset program ditentukan secara seragam, dengan mempertimbangkan pengembalian historis jangka panjang, alokasi aset dan perkiraan masa depan atas pengembalian investasi jangka panjang.

d. Penurunan nilai aset yang bukan merupakan aset keuangan

Dalam mengidentifikasi terdapat atau tidaknya penurunan nilai aset, Perusahaan mempertimbangkan hal-hal berikut ini:

- terdapat bukti mengenai keusangan atau kerusakan fisik aset;
- telah atau akan terjadi perubahan signifikan yang bersifat merugikan sehubungan dengan cara penggunaan aset;
- terdapat bukti bahwa kinerja ekonomi aset tidak memenuhi harapan atau lebih buruk dari yang diharapkan;
- aliran kas sesungguhnya secara material lebih kecil dari aliran kas taksiran, sebelum diperhitungkan diskonto.

e. Nilai wajar dari instrumen keuangan

Jika nilai wajar dari aset dan liabilitas keuangan yang tercatat dalam neraca tidak dapat diperoleh dari pasar aktif, nilai wajar ditentukan dari beberapa teknik penilaian termasuk model matematika, seperti teknik penilaian analisa arus kas masa datang yang didiskonto menggunakan suku bunga pasar yang berlaku.

Metode dan asumsi yang diterapkan, dan teknik penilaian yang digunakan, diungkapkan di dalam Catatan 32.

3. CRITICAL ACCOUNTING ESTIMATES AND JUDGEMENTS (Continued)

b. Unearned estimated ujarah (Continued)

The carrying amount of the Company's estimated unearned ujarah at the statement of financial position date is disclosed in Notes 9 and 12 to the financial statements.

c. Employee benefits liabilities

The present value of the employee benefits obligation depends on a number of factors that are determined on an actuarial basis using a number of assumptions (Note 20). The assumptions used in determining the net cost for pensions include the expected long-term rate of return on the relevant plan assets and the discount rate. Any changes in these assumptions will impact the carrying amount of employee benefits obligation.

The expected return on plan assets assumption is determined on a uniform basis, taking into consideration long-term historical returns, asset allocation and future estimates of long-term investment returns.

d. Impairment of assets value of nonfinancial assets

In identifying whether or not there is an impairment over asset, the Company considers the following matters:

- there is evidence of obsolescence or physical damage to assets;*
- has or will occur detrimental to significant changes with respect to how the assets used;*
- there is evidence that the economic performance of the asset does not meet expectations or worse than expected;*
- actual cash flow is materially smaller than the estimated cash flow, before discount taken into account.*

e. Fair value of financial instruments

Where the fair value of financial assets and financial liabilities recorded on the balance sheet cannot be derived from active markets, they are determined using a variety of valuation techniques, including mathematical models, such as discounted future cash flows analysis by using prevailing market rate.

The methods and assumptions applied, and the valuation techniques used, are disclosed in Notes 32.

*These Financial Statements are originally
issued in Indonesian language*

Ekshibit F/25

Exhibit F/25

**PT JAMINAN PEMBIAYAAN ASKRINDO SYARIAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2018
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT JAMINAN PEMBIAYAAN ASKRINDO SYARIAH
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2018
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**3. ESTIMASI DAN PERTIMBANGAN AKUNTANSI YANG
PENTING (Lanjutan)**

**3. CRITICAL ACCOUNTING ESTIMATES AND
JUDGEMENTS (Continued)**

f. Aset pajak tangguhan

f. Deferred tax assets

Aset pajak tangguhan diakui atas jumlah pajak penghasilan terpulihkan (*recoverable*) pada periode mendatang sebagai akibat perbedaan temporer yang boleh dikurangkan. Justifikasi manajemen diperlukan untuk menentukan jumlah aset pajak tangguhan yang dapat diakui, sesuai dengan waktu yang tepat dan tingkat laba fiskal di masa mendatang sejalan dengan strategi rencana perpajakan ke depan.

Deferred tax assets are recognised for the future recoverable taxable income arising from temporary difference. Management judgement is required to determine the amount of deferred tax assets that can be recognised, based upon the likely timing and level of future taxable profits together with future tax planning strategies.

4. KAS DAN BANK

4. CASH ON HAND AND IN BANKS

	2018	2017	
Kas			Cash on hand
Rupiah	90.954.233	65.193.630	Rupiah
Bank			Cash in banks
Rupiah			Rupiah
Pihak berelasi			Related parties
PT Bank Syariah Mandiri	1.962.488.490	1.559.333.328	PT Bank Syariah Mandiri
PT Bank BRI Syariah	1.916.607.920	2.997.716.111	PT Bank BRI Syariah
PT Bank BNI Syariah	615.342.231	396.316.174	PT Bank BNI Syariah
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk - Unit Syariah	153.768.937	58.174.225	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk - Sharia Unit
Pihak ketiga			Third parties
PT CIMB Niaga Syariah	3.022.291.611	-	PT CIMB Niaga Syariah
PT Bank Muamalat Indonesia Tbk	2.420.038.148	27.359.593.096	PT Bank Muamalat Indonesia Tbk
PT BPD Nusa Tenggara Barat - Unit Syariah	2.288.450.870	680.698.943	PT BPD Nusa Tenggara Barat - Sharia Unit
PT Bank Syariah Bukopin	1.076.158.305	68.311.876	PT Bank Syariah Bukopin
PT BPD Sumatera Selatan dan Bangka Belitung - Unit Syariah	569.353.306	756.642.019	PT BPD Sumatera Selatan dan Bangka Belitung - Sharia Unit
PT Bank Jabar Banten Syariah	448.459.659	143.243.082	PT Bank Jabar Banten Syariah
PT BPD Jawa Tengah - Unit Syariah	387.749.520	644.719.294	PT BPD Jawa Tengah - Sharia Unit
PT BPD Sumatera Barat - Unit Syariah	208.122.909	181.241.765	PT BPD Sumatera Barat - Sharia Unit
PT BPD Sulawesi Selatan - Unit Syariah	89.798.859	-	PT BPD Sulawesi Selatan - Unit Sharia
PT Bank Victoria Syariah	57.187.163	327.522.970	PT Bank Victoria Syariah
PT BPRS Dinar Asri	43.255.209	41.407.375	PT BPRS Dinar Asri
PT BPD Sumatera Utara - Unit Syariah	28.924.696	28.680.443	PT BPD Sumatera Utara - Sharia Unit
PT BPD Kalimantan Selatan - Unit Syariah	24.203.237	109.830.812	PT BPD Kalimantan Selatan - Sharia Unit
PT BPD Jawa Timur - Unit Syariah	20.152.348	67.645.238	PT BPD Jawa Timur - Sharia Unit
PT Bank Panin Syariah	19.993.925	20.645.175	PT Bank Panin Syariah
PT Bank Mega Syariah	3.812.076	4.120.506	PT Bank Mega Syariah
PT Bank Maybank Syariah Indonesia	-	3.413.020	PT Bank Maybank Syariah Indonesia
Sub Jumlah	15.356.159.419	35.449.255.452	Sub Total
Dolar Amerika Serikat			US Dollar
Pihak berelasi			Related party
PT Bank BNI Syariah	264.643.750	247.592.951	PT Bank BNI Syariah
Jumlah Bank	15.620.803.169	35.696.848.403	Total Cash in Bank
Jumlah	15.711.757.402	35.762.042.033	Total

*These Financial Statements are originally
issued in Indonesian language*

Ekshibit F/26
Exhibit F/26

PT JAMINAN PEMBIAYAAN ASKRINDO SYARIAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2018
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT JAMINAN PEMBIAYAAN ASKRINDO SYARIAH
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2018
 (Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

4. KAS DAN BANK (Lanjutan)

Ekuivalen tingkat bunga dari nisbah yang diperoleh dari Bank adalah sebesar 1,26% dan 1,56% pada tahun 2018 dan 2017.

Pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017, tidak terdapat kas dan bank Perusahaan yang dibatasi penggunaannya.

4. CASH ON HAND AND IN BANKS (Continued)

The equivalents interest rate from profit sharing obtained from Bank are 1.26% and 1.56% in 2018 and 2017.

As of 31 December 2018 and 2017, there were no cash and bank the Company which were restricted in use.

5. INVESTASI
a. Deposito berjangka mudharabah

	2018	2017
Pihak berelasi		
PT Bank Syariah Mandiri	94.351.439.088	89.700.000.000
PT Bank BRI Syariah	47.650.000.000	45.000.000.000
PT Bank BNI Syariah	46.650.000.000	52.900.000.000
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk - Unit Syariah	1.250.000.000	10.500.000.000
Sub Jumlah	189.901.439.088	198.100.000.000
Pihak ketiga		
PT CIMB Niaga Syariah	24.200.000.000	-
PT BPD Nusa Tenggara Barat - Unit Syariah	17.200.000.000	11.200.000.000
PT Bank Syariah Bukopin	17.000.000.000	10.000.000.000
PT BPD Jawa Tengah - Unit Syariah	6.500.000.000	5.500.000.000
PT Bank Muamalat Indonesia Tbk	6.000.000.000	6.500.000.000
PT BPD Sumatera Selatan dan Bangka Belitung - Unit Syariah	5.000.000.000	4.500.000.000
PT BPD Jawa Timur - Unit Syariah	4.000.000.000	2.000.000.000
PT Bank Victoria Syariah	4.000.000.000	7.500.000.000
PT Bank Jabar Banten Syariah	1.750.000.000	-
PT BPD Kalimantan Barat - Unit Syariah	1.000.000.000	1.000.000.000
PT BPD Kalimantan Selatan - Unit Syariah	1.000.000.000	1.000.000.000
PT BPD Sumatera Barat - Unit Syariah	1.000.000.000	1.000.000.000
PT BPD Daerah Istimewa Yogyakarta - Unit Syariah	500.000.000	500.000.000
Sub Jumlah	89.150.000.000	50.700.000.000
J u m l a h	279.051.439.088	248.800.000.000

Ekuivalen tingkat bunga dari nisbah yang diperoleh dari deposito adalah sebesar 4 - 7,5% pada tahun 2018 dan 2017.

5. INVESTMENTS
a. Time deposits mudharabah

Related parties	
PT Bank Syariah Mandiri	
PT Bank BRI Syariah	
PT Bank BNI Syariah	
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk - Sharia Unit	
Sub Total	
Third parties	
PT CIMB Niaga Syariah	
PT BPD Nusa Tenggara Barat - Sharia Unit	
PT Bank Syariah Bukopin	
PT BPD Jawa Tengah - Sharia Unit	
PT Bank Muamalat Indonesia Tbk	
PT BPD Sumatera Selatan dan Bangka Belitung - Sharia Unit	
PT BPD Jawa Timur - Sharia Unit	
PT Bank Victoria Syariah	
PT Bank Jabar Banten Syariah	
PT BPD Kalimantan Barat - Sharia Unit	
PT BPD Kalimantan Selatan - Sharia Unit	
PT BPD Sumatera Barat - Sharia Unit	
PT BPD Daerah Istimewa Yogyakarta - Sharia Unit	
Sub Total	
T o t a l	

The equivalents interest rate from profit sharing obtained from time deposits are 4 - 7.5% in 2018 and 2017.

*These Financial Statements are originally
issued in Indonesian language*

Ekshibit F/27

Exhibit F/27

**PT JAMINAN PEMBIAYAAN ASKRINDO SYARIAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2018
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT JAMINAN PEMBIAYAAN ASKRINDO SYARIAH
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2018
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

5. INVESTASI (Lanjutan)

5. INVESTMENTS (Continued)

b. Reksa dana tersedia untuk dijual

b. Available-for-sale mutual fund

2018					
	Jumlah unit/ Number of units	Biaya perolehan/ Acquisition cost	Nilai wajar/ Fair value	Keuntungan yang belum direalisasi/ Unrealized gain	
Reksa Dana Syariah Terproteksi PNM Investa 19	50.000.000	50.000.000.000	50.472.505.000	472.505.000	Reksa Dana Syariah Terproteksi PNM Investa 19
Reksa Dana Syariah PNM Sukuk Negara Syariah	10.079.840	10.066.968.367	10.290.754.934	223.786.567	Reksa Dana Syariah PNM Sukuk Negara Syariah
Reksa Dana Syariah Terproteksi PNM Investa 12	10.000.000	10.000.000.000	10.033.411.000	33.411.000	Reksa Dana Syariah Terproteksi PNM Investa 12
Jumlah	70.079.840	70.066.968.367	70.796.670.934	729.702.567	Total 711.727.184
2017					
	Jumlah unit/ Number of units	Biaya perolehan/ Acquisition cost	Nilai wajar/ Fair value	Keuntungan yang belum direalisasi/ Unrealized gain	
Reksa Dana Sukuk Negara Syariah	60.076.718	60.000.000.134	60.076.441.750	76.441.616	Sukuk Negara Sharia Mutual Fund
Terproteksi PNM Investa 12 Syariah	10.000.000	10.000.000.000	10.008.502.000	8.502.000	Terproteksi PNM Investa 12 Syariah
Jumlah	70.076.718	70.000.000.134	70.084.943.750	84.943.616	Total

Mutasi keuntungan (kerugian) reksadana yang tersedia untuk dijual yang belum direalisasi adalah sebagai berikut:

Movements of unrealized gain (losses) of available-for-sale mutual funds are as follows:

	2018	2017	
Saldo awal	84.943.616	(507.791.628)	Beginning balance
Realisasi atas keuntungan penjualan	164.989.697	-	Realized gain on sale
Perubahan nilai wajar	479.769.254	592.735.244	Change in fair value
Jumlah	729.702.567	84.943.616	Total

Nilai wajar reksadana diperoleh dari harga kuotasi pasar aktif atas reksadana tersebut.

Fair value of mutual funds was obtained from quoted price in active market for these mutual funds.

*These Financial Statements are originally
issued in Indonesian language*

Ekshibit F/28
Exhibit F/28

PT JAMINAN PEMBIAYAAN ASKRINDO SYARIAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2018
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT JAMINAN PEMBIAYAAN ASKRINDO SYARIAH
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2018
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

6. PIUTANG UJRAH
6. UJRAH RECEIVABLES

	2018	2017	
Pihak berelasi			<i>Related parties</i>
PT Bank Syariah Mandiri	2.378.709.175	1.502.557.649	<i>PT Bank Syariah Mandiri</i>
PT Bank BRI Syariah	1.092.923.194	2.467.237.669	<i>PT Bank BRI Syariah</i>
PT Permodalan Nasional Madani (Persero)	965.459.532	133.602.694	<i>PT Permodalan Nasional Madani (Persero)</i>
PT Bank BNI Syariah	944.972.345	248.246.603	<i>PT Bank BNI Syariah</i>
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk -			<i>PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk -</i>
Unit Syariah	-	187.255.450	<i>Sharia Unit</i>
Kementerian Pertanian	-	131.077.113	<i>Ministry of Agriculture</i>
Sub Jumlah	5.382.064.246	4.669.977.178	<i>Sub Total</i>
Pihak ketiga			<i>Third parties</i>
PT Bank NTB Syariah	1.180.332.858	-	<i>PT Bank NTB Syariah</i>
PT BPD Sumatera Selatan dan Bangka Belitung	247.025.128	-	<i>PT BPD Sumatera Selatan dan Bangka Belitung</i>
PT Bank Jabar Banten Syariah	246.439.521	106.723.750	<i>PT Bank Jabar Banten Syariah</i>
PT Bahana Artha Ventura	243.200.000	-	<i>PT Bahana Artha Ventura</i>
PT BPD Kalimantan Selatan - Unit Syariah	-	1.179.902.767	<i>PT BPD Kalimantan Selatan - Sharia Unit</i>
PT BPD Sulawesi Selatan dan Barat -			<i>PT BPD Sulawesi Selatan dan Barat -</i>
Unit Syariah	-	336.356.522	<i>Sharia Unit</i>
PT BPRS Bhakti Sumekar	-	215.340.451	<i>PT BPRS Bhakti Sumekar</i>
PT BPRS Dinar Asri	-	120.093.278	<i>PT BPRS Dinar Asri</i>
Lain-lain (dibawah 100 juta)	355.766.928	188.621.480	<i>Others (below 100 million)</i>
Sub Jumlah	2.272.764.435	2.147.038.248	<i>Sub Total</i>
Jumlah	7.654.828.681	6.817.015.426	Total
Dikurangi			<i>Less:</i>
Cadangan kerugian penurunan nilai	(903.972.817)	(903.972.817)	<i>Allowance for impairment losses</i>
Jumlah - Bersih	6.750.855.864	5.913.042.609	Total - Net

Piutang ujah Perusahaan tahun berjalan pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 berumur 1-30 hari.

The Company's ujah receivables for the year ended 31 December 2018 and 2017 are aged 1-30 days.

Berdasarkan evaluasi manajemen terhadap kolektibilitas saldo masing-masing piutang ujah pada tanggal-tanggal 31 Desember 2018 dan 2017, manajemen berpendapat bahwa cadangan kerugian penurunan nilai memadai untuk menutup kemungkinan kerugian dari tidak tertagihnya piutang usaha tersebut.

Based on management's evaluation of the collectibility of the balances of each ujah receivables as of 31 December 2018 and 2017, management believes that the allowance for impairment losses is adequate to cover possible losses from the uncollectible accounts.

Manajemen berpendapat bahwa tidak terdapat risiko terkonsentrasi secara signifikan atas piutang dari pihak ketiga.

Management believes that there is no significant concentrated risk of receivables from third parties.

*These Financial Statements are originally
issued in Indonesian language*

Ekshibit F/29

Exhibit F/29

**PT JAMINAN PEMBIAYAAN ASKRINDO SYARIAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2018
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT JAMINAN PEMBIAYAAN ASKRINDO SYARIAH
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2018
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

7. PIUTANG TA'WIDH

	2018	2017
Pihak berelasi		
PT Reasuransi Syariah Indonesia	6.460.777.556	1.104.213.834
PT Asrinda Arthasangga	844.051.303	-
PT Asuransi Jiwa Bringin Jiwa Sejahtera	331.014.911	178.525.784
PT BNI Life Insurance	34.700.187	-
PT Asuransi Kredit Indonesia (Persero)	-	7.091.416.074
Sub Jumlah	<u>7.670.543.957</u>	<u>8.374.155.692</u>
Pihak ketiga		
PT Avrist Assurance	318.182.845	-
PT Asuransi Bumiputera muda 1967	-	5.630.111
Sub Jumlah	<u>318.182.845</u>	<u>5.630.111</u>
Jumlah	<u>7.988.726.802</u>	<u>8.379.785.803</u>

Piutang ta'widh berumur 1-60 hari, sehingga Perusahaan tidak membentuk cadangan kerugian penurunan nilai atas piutang ta'widh karena manajemen berpendapat bahwa seluruh piutang tersebut dapat ditagih.

Manajemen berpendapat bahwa tidak terdapat risiko terkonsentrasi secara signifikan atas piutang dari pihak ketiga.

7. TA'WIDH RECEIVABLES

	2018	2017	
Related parties			
PT Reasuransi Syariah Indonesia	6.460.777.556	1.104.213.834	PT Reasuransi Syariah Indonesia
PT Asrinda Arthasangga	844.051.303	-	PT Asrinda Arthasangga
PT Asuransi Jiwa Bringin Jiwa Sejahtera	331.014.911	178.525.784	PT Asuransi Jiwa Bringin Jiwa Sejahtera
PT BNI Life Insurance	34.700.187	-	PT BNI Life Insurance
PT Asuransi Kredit Indonesia (Persero)	-	7.091.416.074	PT Asuransi Kredit Indonesia (Persero)
Sub Total	<u>7.670.543.957</u>	<u>8.374.155.692</u>	Sub Total
Third parties			
PT Avrist Assurance	318.182.845	-	PT Avrist Assurance
PT Asuransi Bumiputera muda 1967	-	5.630.111	PT Asuransi Bumiputera muda 1967
Sub Total	<u>318.182.845</u>	<u>5.630.111</u>	Sub Total
Total	<u>7.988.726.802</u>	<u>8.379.785.803</u>	Total

Ta'widh receivables are aged 1-60 days, so the Company does not make allowance for impairment losses on ta'widh receivables because management believes that all of the receivables can be collected.

Management believes that there is no significant concentrated risk of receivables from third parties.

8. PIUTANG HASIL INVESTASI

Akun ini merupakan bagi hasil investasi deposito masing-masing sebesar Rp 381.286.784 dan Rp 153.183.255 pada tanggal-tanggal 31 Desember 2018 dan 2017.

8. INVESTMENT INCOME RECEIVABLES

This account represents deposit investment returns of Rp 381,286,784 and Rp 153,183,255 as of 31 December 2018 and 2017, respectively.

9. BIAYA DIBAYAR DIMUKA

	2018	2017
Sewa	2.238.031.030	2.746.663.719
Asuransi	1.096.959.250	745.356.850
Uang muka kerja	331.489.500	53.480.000
Jumlah	<u>3.666.479.780</u>	<u>3.545.500.569</u>

9. PREPAID EXPENSES

	2018	2017	
Rent	2.238.031.030	2.746.663.719	Rent
Insurance	1.096.959.250	745.356.850	Insurance
Work advances	331.489.500	53.480.000	Work advances
Total	<u>3.666.479.780</u>	<u>3.545.500.569</u>	Total

*These Financial Statements are originally
issued in Indonesian language*

Ekshibit F/30

Exhibit F/30

**PT JAMINAN PEMBIAYAAN ASKRINDO SYARIAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2018
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT JAMINAN PEMBIAYAAN ASKRINDO SYARIAH
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2018
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

10. ASET TETAP

10. FIXED ASSETS

	Saldo Awal 1 Januari 2018 / <i>Beginning Balance</i> 1 January 2018	Penambahan/ <i>Additions</i>	Pengurangan/ <i>Deductions</i>	Saldo Akhir 31 Desember 2018/ <i>Ending Balance</i> 31 December 2018	
Biaya Perolehan:					Acquisition cost:
Tanah	4.150.998.529	-	-	4.150.998.529	Land
Bangunan dan renovasi	3.445.051.288	1.817.027.228	-	5.262.078.516	Buildings and renovation
Peralatan komputer	6.140.385.428	254.249.000	-	6.394.634.428	Computer equipment
Peralatan non komputer	688.279.335	184.531.000	-	872.810.335	Non Computer equipment
Perabot kantor	2.050.210.435	309.013.175	-	2.359.223.610	Office furniture
Jumlah	16.474.925.015	2.564.820.403	-	19.039.745.418	Total
Akumulasi Penyusutan:					Accumulated depreciation:
Bangunan dan renovasi	795.475.285	412.264.639	-	1.207.739.924	Buildings and renovation
Peralatan komputer	4.299.392.731	748.962.696	-	5.048.355.427	Computer equipment
Peralatan non komputer	508.846.655	101.931.468	-	610.778.123	Non Computer equipment
Perabot kantor	582.231.383	276.005.924	-	858.237.307	Office furniture
Jumlah	6.185.946.054	1.539.164.727	-	7.725.110.781	Total
Nilai Buku	10.288.978.961			11.314.634.637	Book value
	Saldo Awal 1 Januari 2017 / <i>Beginning Balance</i> 1 January 2017	Penambahan/ <i>Additions</i>	Pengurangan/ <i>Deductions</i>	Saldo Akhir 31 Desember 2017/ <i>Ending Balance</i> 31 December 2017	
Biaya Perolehan:					Acquisition cost:
Tanah	-	4.150.998.529	-	4.150.998.529	Land
Bangunan dan renovasi	1.043.424.928	2.401.626.360	-	3.445.051.288	Buildings and renovation
Peralatan komputer	5.932.135.428	208.250.000	-	6.140.385.428	Computer equipment
Peralatan non komputer	589.313.435	98.965.900	-	688.279.335	Non Computer equipment
Perabot kantor	1.295.942.760	754.267.675	-	2.050.210.435	Office furniture
Jumlah	8.860.816.551	7.614.108.464	-	16.474.925.015	Total
Akumulasi Penyusutan:					Accumulated depreciation:
Bangunan dan renovasi	232.794.247	562.681.038	-	795.475.285	Buildings and renovation
Peralatan komputer	3.047.973.623	1.251.419.108	-	4.299.392.731	Computer equipment
Peralatan non komputer	408.810.235	100.036.420	-	508.846.655	Non Computer equipment
Perabot kantor	346.929.673	235.301.710	-	582.231.383	Office furniture
Jumlah	4.036.507.778	2.149.438.276	-	6.185.946.054	Total
Nilai Buku	4.824.308.773			10.288.978.961	Book value

*These Financial Statements are originally
issued in Indonesian language*

Ekshibit F/31

Exhibit F/31

**PT JAMINAN PEMBIAYAAN ASKRINDO SYARIAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2018
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT JAMINAN PEMBIAYAAN ASKRINDO SYARIAH
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2018
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

10. ASET TETAP (Lanjutan)

Jumlah penyusutan yang dibebankan pada beban usaha masing-masing adalah sebesar Rp 1.539.164.727 dan Rp 2.149.438.276 pada tahun 2018 dan 2017.

Manajemen berpendapat bahwa tidak terdapat penurunan nilai atas aset tersebut pada tanggal-tanggal 31 Desember 2018 dan 2017.

Perusahaan memiliki sebidang tanah yang terletak di Medan, Sumatera Utara dengan hak legal berupa Hak Guna Bangunan yang dapat diperbarui dan berjangka waktu dua puluh (20) tahun yang akan jatuh tempo tahun 2037. Berdasarkan data tersebut, manajemen berkeyakinan bahwa HGB akan dapat diperpanjang pada akhir periode HGB, karena masing-masing tanah diperoleh secara legal dan didukung oleh bukti kepemilikan yang memadai.

Aset tetap Perusahaan berupa bangunan telah diasuransikan kepada PT Asuransi Chubb Syariah Indonesia, pihak ketiga, terhadap risiko kebakaran, pencurian dan risiko lainnya dengan jumlah pertanggungan masing-masing sebesar Rp 829.810.000 dan Rp 829.810.000 di tahun 2018 dan 2017. Manajemen berpendapat bahwa nilai pertanggungan tersebut cukup untuk menutup kemungkinan kerugian atas aset yang dipertanggungkan.

10. FIXED ASSETS (Continued)

The amount of depreciation charged to each operating expense is Rp 1,539,164,727 and Rp 2,149,438,276 in 2018 and 2017.

Management believes that there is no impairment in value of the assets as of 31 December 2018 and 2017.

The company has a plot of land located in Medan, North Sumatra with legal rights in the form of renewable Rights to Build for twenty (20) years that will mature in 2037. Based on these data, management believes that the Rights to Build will be renewable at the end the Rights to Build period, because each land is obtained legally and is supported by sufficient evidence of ownership.

The Company's fixed assets such as building have been insured with PT Asuransi Chubb Syariah Indonesia, a third party, against the risk of fire, theft and other risks with a total coverage amounting to Rp 829,810,000 and Rp 829,810,000 in 2018 and 2017. Management believes that the insurance coverage is enough to cover possible losses on the insured assets.

11. ASET TIDAK BERWUJUD

	2018
Perangkat lunak	4.665.734.847
Amortisasi perangkat lunak	(2.817.089.375)
Jumlah	1.848.645.472

Beban amortisasi perangkat lunak yang dibebankan pada beban usaha masing-masing adalah sebesar Rp 1.003.895.300 dan Rp 1.363.570.051 pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 (Catatan 28).

11. INTANGIBLE ASSETS

	2017
Software	4.724.731.545
Software - amortization	(2.790.390.774)
Total	1.934.340.771

The amortization of software expenses charged to each operating expense is equal to Rp 1,003,895,300 and Rp 1,363,570,051 on the date 31 December 2018 and 2017 (Note 28).

12. ESTIMASI TA'WIDH RETENSI SENDIRI

Estimasi ta'widh retensi sendiri masing-masing sebesar Rp 18.519.750.447 dan Rp 31.933.923.726 pada tanggal-tanggal 31 Desember 2018 dan 2017.

Dalam estimasi ta'widh retensi sendiri termasuk estimasi atas ta'widh yang sudah terjadi namun belum dilaporkan (IBNR) masing-masing sebesar Rp 4.999.390.350 dan Rp 6.039.709.198 pada tanggal-tanggal 31 Desember 2018 dan 2017.

12. ESTIMATED TA'WIDH OWN RETENTION

Estimates of ta'widh retention amounting to Rp 18,519,750,447 and Rp 31,933,923,726 as of 31 December 2018 and 2017, respectively.

The estimated ta'widh own retention includes estimates of ta'widh that incurred but not reported (IBNR) amounting to Rp 4,999,390,350 and Rp 6,039,709,198 as of 31 December 2018 and 2017, respectively.

*These Financial Statements are originally
issued in Indonesian language*

Ekshibit F/32
Exhibit F/32

PT JAMINAN PEMBIAYAAN ASKRINDO SYARIAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2018
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT JAMINAN PEMBIAYAAN ASKRINDO SYARIAH
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2018
 (Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

13. ESTIMASI UJRAH YANG BELUM MERUPAKAN PENDAPATAN

Estimasi ujarah yang belum merupakan pendapatan masing-masing sebesar Rp 22.125.368.273 dan Rp 16.810.740.881 pada tanggal-tanggal 31 Desember 2018 dan 2017.

13. UNERANED ESTIMATED UJRAH

Estimates of ujarah that have not yet constituted revenues of Rp 22,125,368,273 and Rp 16,810,740,881 as of December 31, 2018 and 2017, respectively.

14. UTANG TA'WIDH

	2018	2017
Pihak berelasi		
PT Bank Syariah Mandiri	861.531.706	4.113.283.290
PT Bank BRI Syariah	769.419.616	2.670.908.949
PT Permodalan Nasional Madani (Persero)	65.331.000	49.820.550
PT Bank BNI Syariah	30.891.956	41.666.667
Sub Jumlah	1.727.174.278	6.875.679.456
Pihak ketiga		
PT BPD Sumatera Barat - Unit Syariah	6.408.083	96.406.556
PT BPRS Haris Insan Karimah	-	679.086.932
PT Bank Jabar Banten Syariah	-	623.583.085
PT BPD Nusa Tenggara Barat - Unit Syariah	-	40.647.299
PT BPD Jawa Timur - Unit Syariah	-	3.541.262
Sub Jumlah	6.408.083	1.443.265.134
Jumlah	1.733.582.361	8.318.944.590

Related parties
 PT Bank Syariah Mandiri
 PT Bank BRI Syariah
 PT Permodalan Nasional Madani (Persero)
 PT Bank BNI Syariah
 Sub Total

Third parties
 PT BPD Sumatera Barat - Sharia Unit
 PT BPRS Haris Insan Karimah
 PT Bank Jabar Banten Syariah
 PT BPD Nusa Tenggara Barat - Sharia Unit
 PT BPD Jawa Timur - Sharia Unit
 Sub Total

T o t a l

15. UTANG PENJAMINAN ULANG
a. Berdasarkan reasuradur

	2018	2017
Pihak berelasi		
PT Asrinda Arthasangga	6.382.160.153	-
PT Reasuransi Nasional Indonesia - Unit Syariah	4.496.487.559	1.097.636.284
PT Asuransi Kredit Indonesia (Persero)	810.012.290	3.515.421.315
PT Asuransi Jiwa Bringin Jiwa Sejahtera	164.308.340	-
PT Asuransi Ekspor Indonesia (Persero)	20.115.000	20.115.000
PT Reasuransi Syariah Indonesia	9.977.593	1.700.752.703
Sub Jumlah	11.883.060.935	6.333.925.302
Pihak ketiga		
PT Avrist Assurance	69.350.659	85.459.046
PT Asuransi Staco Mandiri	25.528.622	-
PT Chubb Life Insurance Indonesia	11.482.525	-
Sub Jumlah	106.361.806	85.459.046
Jumlah	11.989.422.741	6.419.384.348

Related parties
 PT Asrinda Arthasangga
 PT Reasuransi Nasional Indonesia - Sharia Unit
 PT Asuransi Kredit Indonesia (Persero)
 PT Asuransi Jiwa Bringin Jiwa Sejahtera
 PT Asuransi Ekspor Indonesia (Persero)
 PT Reasuransi Syariah Indonesia
 Sub Total

Third parties
 PT Avrist Assurance
 PT Asuransi Staco Mandiri
 PT Chubb Life Insurance Indonesia
 Sub Total

T o t a l

15. RE-GUARANTEEE PAYABLES
a. Based on reinsurance

*These Financial Statements are originally
issued in Indonesian language*

Ekshibit F/33

Exhibit F/33

**PT JAMINAN PEMBIAYAAN ASKRINDO SYARIAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2018
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT JAMINAN PEMBIAYAAN ASKRINDO SYARIAH
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2018
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

15. UTANG PENJAMINAN ULANG (Lanjutan)

15. RE-GUARANTEE PAYABLES (Continued)

b. Berdasarkan umur (hari)

b. Based on age (days)

	2018	2017	
1-60 hari	5.482.290.713	6.313.810.302	1-60 days
Lebih dari 60 hari	6.507.132.027	105.574.046	More than 60 days
J u m l a h	11.989.422.741	6.419.384.348	T o t a l

16. PENDAPATAN UJRAH DITERIMA DIMUKA

16. UJRAH INCOME IN ADVANCE

Pendapatan ujarah diterima dimuka masing-masing sebesar Rp 8.253.338.901 dan Rp 12.036.803.894 pada tanggal-tanggal 31 Desember 2018 dan 2017.

Ujarah income received in advance is amounting to Rp 8,253,338,901 and Rp 12,036,803,894 as of 31 December 2018 and 2017, respectively.

17. UTANG ZAKAT

17. ZAKAH PAYABLES

Utang zakat masing-masing sebesar Rp 962.416.208 dan 227.653.357 pada tanggal-tanggal 31 Desember 2018 dan 2017. Akun ini merupakan akumulasi dana zakat yang belum disalurkan.

Zakah payables is amounting to Rp 962,416,208 and Rp 227,653,357 as of 31 December 2018 and 2017, respectively. This account is an accumulation of zakat funds that have not been distributed.

18. PERPAJAKAN

18. TAXATION

a. Beban pajak penghasilan

a. Income tax expenses

	2018	2017	
Kini	(9.571.834.250)	(2.232.500.256)	Current
Tangguhan	1.495.851.478	1.844.442.480	Deferred
J u m l a h	(8.075.982.772)	(388.057.776)	T o t a l

b. Pajak dibayar dimuka

b. Prepaid taxes

	2018	2017	
Pajak penghasilan pasal 28a			Income tax article 28a
Tahun 2017	-	2.865.499.879	2017
Tahun 2016	-	1.097.457.811	2016
J u m l a h	-	3.962.957.690	T o t a l

c. Utang pajak

c. Taxes payable

	2018	2017	
Pajak penghasilan pasal 21	174.270.772	83.697.950	Income tax article 21
Pajak penghasilan pasal 23	46.826.289	4.229.955	Income tax article 23
Pajak pasal 4 ayat 2	5.200.000	37.320.000	Tax article 4 sub article 2
Pajak penghasilan 25	355.197.938	348.346.252	Income tax article 25
Pajak penghasilan badan 29	5.330.014.052	-	Corporate income tax article 29
J u m l a h	5.911.509.051	473.594.157	T o t a l

These Financial Statements are originally issued in Indonesian language

Ekshibit F/34

Exhibit F/34

**PT JAMINAN PEMBIAYAAN ASKRINDO SYARIAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2018
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT JAMINAN PEMBIAYAAN ASKRINDO SYARIAH
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2018
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

18. PERPAJAKAN (Lanjutan)

18. TAXATION (Continued)

d. Pajak penghasilan kini

d. Current tax

Rekonsiliasi antara laba sebelum pajak menurut laporan laba rugi dengan laba menurut pajak adalah sebagai berikut:

The reconciliation between profit before tax per income statement and company's taxable income are as follows:

	2018	2017	
Laba sebelum pajak menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain	22.729.066.672	6.614.262.332	Profit before tax per statement of profit or loss and other comprehensive income
Perbedaan fiskal terdiri: Perbedaan sementara:			Fiscal adjustments consists of: Temporary differences:
Ta'widh yang sudah terjadi namun belum dilaporkan	4.999.390.350	6.039.709.198	Incurred but not reported of Ta'widh
Imbalan pasca kerja	984.015.565	1.005.790.693	Long-term employee benefit
Perbedaan tetap:			Permanent differences:
Cadangan ujah	5.314.627.392	7.437.789.989	Ujah reserves
Pph Pasal 28a	3.962.957.690	-	Income tax article 28a
Entertainment dan representasi	3.270.524.920	-	Entertainment and representation
Beban kendaraan dinas	2.046.125.598	-	Office vehicle expenses
Tunjangan PPh Pasal 21	2.426.177.658	2.121.999.420	Income tax article 21 allowance
Beban pengobatan dan rumah sakit	1.173.505.563	1.190.419.865	Medical and hospital expenses
Representasi dan jamuan	1.224.265.527	732.787.521	Representation and entertainment
Beban perjalanan dinas	756.874.812	-	Office travel expenses
Beban olahraga dan rekreasi	659.697.719	150.207.370	Sport and recreational expenses
Beban zakat pegawai	550.523.834	63.905.131	Employee zakah expenses
Beban perumahan	420.612.501	196.124.998	Housing expenses
Iuran keanggotaan	278.709.986	238.513.877	Membership fee
Sumbangan pegawai	87.103.657	103.642.269	Employee donations
Beban listrik, air dan gas	58.289.758	-	Electricity, water, and gas expenses
Penghasilan yang dikenakan pajak final	(12.655.131.361)	(16.965.151.640)	Income subjected to final tax
Laba kena pajak	38.287.337.000	8.930.001.023	Taxable income
Beban pajak kini	9.571.834.250	2.232.500.256	Current tax expenses
Dikurangi:			Less:
Uang Muka PPh Pasal 25	(4.241.820.198)	(5.098.000.135)	Prepaid taxes - Income tax article 25
Jumlah utang pajak penghasilan badan	5.330.014.052	(2.865.499.879)	Corporate income tax payable

e. Pajak tangguhan

e. Deferred tax

Pajak tangguhan dihitung berdasarkan pengaruh pajak atas perbedaan temporer antara jumlah tercatat aset dan liabilitas menurut laporan keuangan dengan dasar pengenaan pajak aset dan liabilitas.

Deferred tax is calculated based on the tax effect of temporary differences between the tax bases for assets and liabilities and their carrying amount for financial reporting purpose.

*These Financial Statements are originally
issued in Indonesian language*

Ekshibit F/35

Exhibit F/35

**PT JAMINAN PEMBIAYAAN ASKRINDO SYARIAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2018
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT JAMINAN PEMBIAYAAN ASKRINDO SYARIAH
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2018
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

18. PERPAJAKAN (Lanjutan)

18. TAXATION (Continued)

d. Pajak tangguhan (Lanjutan)

d. Deferred tax (Continued)

Rincian dari aset (liabilitas) pajak tangguhan
Perusahaan adalah sebagai berikut:

*The details of the Company's deferred tax
assets (liabilities) are as follows:*

	1 Januari 2018/ 1 January 2018	Dikreditkan (dibebankan) ke Laporan laba rugi/ Credited to (charged to) income statement	Dikreditkan (dibebankan) ke Ekuitas/ Credited to (charged to) equity	31 Desember 2018/ 31 December 2018	
Aset pajak tangguhan					Deferred tax assets
Ta'widh yang sudah terjadi namun belum dilaporkan	1.509.927.299	1.249.847.588	-	2.759.774.887	Incurring but not reported of Ta'widh
Imbalan pasca kerja	570.585.151	246.003.890	(55.402.983)	761.186.058	Post-employment benefit
Jumlah	2.080.512.450	1.495.851.478	(55.402.983)	3.520.960.945	Total

	1 Januari 2017/ 1 January 2017	Dikreditkan (dibebankan) ke Laporan laba rugi/ Credited to (charged to) income statement	Dikreditkan (dibebankan) ke Ekuitas/ Credited to (charged to) equity	31 Desember 2017/ 31 December 2017	
Aset pajak tangguhan					Deferred tax assets
Ta'widh yang sudah terjadi namun belum dilaporkan	-	1.509.927.299	-	1.509.927.299	Incurring but not reported of Ta'widh
Imbalan pasca kerja	116.110.886	334.515.181	119.959.084	570.585.151	Post-employment benefit
Jumlah	116.110.886	1.844.442.480	119.959.084	2.080.512.450	Total

19. BIAYA YANG MASIH HARUS DIBAYAR

19. ACCRUED EXPENSES

	2018	2017	
Pegawai	1.628.963.489	1.306.136.783	Employee
Jasa profesional	72.000.000	60.000.000	Professional fee
Sewa kendaraan	909.600.000	-	Vehicle rent
Lain-lain	236.308.978	68.031.664	Others
Jumlah	2.846.872.467	1.434.168.447	Total

*These Financial Statements are originally
issued in Indonesian language*

Ekshibit F/36
Exhibit F/36

PT JAMINAN PEMBIAYAAN ASKRINDO SYARIAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2018
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT JAMINAN PEMBIAYAAN ASKRINDO SYARIAH
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2018
 (Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

20. LIABILITAS IMBALAN PASCAKERJA

Pada tanggal 25 Maret 2003, Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13/2003 untuk mengganti Surat Keputusan Menteri Tenaga Kerja No. Kep-150/Men/2000. Perusahaan telah membuat cadangan pensiun karyawan sesuai dengan Undang-Undang tersebut, yang dihitung oleh aktuaris independen PT Prima Aktuaria dengan laporannya No. 078/PBL/KE/II/2019 tanggal 13 Februari 2019. Metode perhitungan aktuaria yang digunakan untuk menentukan nilai kini kewajiban imbalan pasti dan biaya jasa kini adalah "Projected Unit Credit" dengan asumsi dasar sebagai berikut:

	31 Desember 2018/ 31 December 2018	31 Desember 2017/ 31 December 2017
Tingkat bunga	8,66%	7,27%
Tingkat kenaikan gaji	10%	10%
Usia pensiun normal	56 Tahun	56 Tahun
Table mortalitas	Indonesia (TMI-III) - 2011	Indonesia (TMI-III) - 2011
Tingkat kecacatan	5% di usia 0-39	5% di usia 0-39
Tingkat pengunduran diri	Tahun menurun secara proporsional hingga 0% di usia > 50 tahun/	Tahun menurun secara proporsional hingga 0% di usia > 50 tahun/

Rincian beban liabilitas imbalan pasca kerja yang diakui di dalam laporan laba rugi adalah sebagai berikut:

	2018	2017
Biaya jasa kini	1.007.569.326	964.744.443
Biaya bunga	76.486.142	41.046.250
Beban liabilitas imbalan pasca kerja yang diakui dalam laporan laba rugi	1.084.055.468	1.005.790.693
Pengukuran kembali liabilitas liabilitas imbalan pasca kerja		
Kerugian (keuntungan) aktuarial yang timbul dari:		
Perubahan asumsi keuangan	(395.553.560)	284.148.665
Penyesuaian pengalaman	82.152.814	255.682.358
Lain-lain	91.788.815	(59.994.688)
(Penghasilan) beban liabilitas imbalan pasca kerja yang diakui di penghasilan komprehensif lain	(221.611.931)	479.836.335
Jumlah	862.443.537	1.485.627.028

20. EMPLOYEE BENEFITS LIABILITIES

On 25 March 2003, Government was signed labour act No.13/2003 to changed Minister of Labour Decision Letters No. Kep-150/Men/2000. Company was appraised employment pension reserve according to the act, that is calculated by Independent Actuary PT Prima Aktuaria on its report No. 078/PBL/KE/II/2019 date 13 February 2019. Actuarial calculation method that used to determine present value of post-employment benefits liabilities and present service expense are "Projected Unit Credit", in assumption basis, consist of:

	31 Desember 2018/ 31 December 2018	31 Desember 2017/ 31 December 2017	
Tingkat bunga	8,66%	7,27%	Discount rate
Tingkat kenaikan gaji	10%	10%	Future salary increment rate
Usia pensiun normal	56 Tahun	56 Tahun	Normal retirement age
Table mortalitas	Indonesia (TMI-III) - 2011	Indonesia (TMI-III) - 2011	Mortality table
Tingkat kecacatan	5% di usia 0-39	5% di usia 0-39	Level of disability
Tingkat pengunduran diri	Tahun menurun secara proporsional hingga 0% di usia > 50 tahun/	Tahun menurun secara proporsional hingga 0% di usia > 50 tahun/	Rate of resignation

The details of the post-employment benefit expense recognized in the income statements are as follows:

Current service cost	
Interest cost	
Post-employment benefits expens recognized in the income statement	
Remeasurement of liabilities	
employee benefits liabilities	
Actuarial gains (losses)	
arising from:	
Changes in financial assumptions	
Adjustment of experience	
Others	
Post-employment benefits (income) expense recognized in other comprehensive income	
Total	

*These Financial Statements are originally
issued in Indonesian language*

Ekshibit F/37

Exhibit F/37

**PT JAMINAN PEMBIAYAAN ASKRINDO SYARIAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2018
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT JAMINAN PEMBIAYAAN ASKRINDO SYARIAH
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2018
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

20. LIABILITAS IMBALAN PASCA-KERJA (Lanjutan)

20. EMPLOYEE BENEFITS LIABILITIES (Continued)

Mutasi liabilitas imbalan pasca kerja yang diakui di dalam laporan posisi keuangan adalah sebagai berikut:

Movements of the post-employment benefit recognized in the statement of financial position are as follows:

	2018	2017	
Saldo awal	2.282.340.604	1.273.612.176	Beginning balance
Beban imbalan kerja jangka panjang tahun berjalan	1.084.055.468	1.005.790.693	Long-term employee benefits expense during the year
(Penghasilan) beban komprehensif lain	(221.611.931)	479.836.335	Other comprehensive (income) expense
Kontribusi Perusahaan	(938.582.107)	(476.898.600)	Company's contribution
Saldo akhir tahun	<u>2.206.202.034</u>	<u>2.282.340.604</u>	Ending balance

Mutasi nilai wajar aset program adalah sebagai berikut:

The movements in the fair value of plan assets are as follows:

	2018	2017	
Saldo awal	864.358.276	301.953.816	Beginning balance
Pendapatan bunga dari aset program	89.742.618	25.511.172	Interest income from plan assets
Iuran dari perusahaan	938.582.107	476.898.600	Contributions from the company
Pembayaran imbalan pasca kerja	(100.039.903)	-	Payment of post-retirement benefits
Keuntungan/ (kerugian) aktuarial	(91.788.815)	59.994.688	Actuarial gain/ (losses)
Saldo akhir	<u>1.700.854.283</u>	<u>864.358.276</u>	Ending balance

Analisis sensitivitas

Sensitivity analysis

Analisis sensitivitas kuantitatif untuk asumsi yang signifikan pada tanggal 31 Desember 2018 sebagai berikut:

A quantitative sensitivity analysis for significant assumptions as of 31 December 2018 is as follows:

	31 Desember / 31 December 2018		
	1% Kenaikan/ Increase	1% Penurunan/ Decrease	
Tingkat diskonto	8,66%	8,66%	Discount rate
Dampak kewajiban manfaat pasti bersih	3.496.591.788	4.394.759.926	Impact on the net defined benefits obligations
Tingkat kenaikan gaji	10,00%	10,00%	Salary increment rate
Dampak kewajiban manfaat pasti bersih	3.907.056.317	3.499.581.769	Impact on the net defined benefits obligations

Analisa sensitivitas didasarkan pada perubahan atas satu asumsi aktuarial dimana asumsi lainnya dianggap konstan. Dalam prakteknya, hal ini jarang terjadi dan perubahan beberapa asumsi mungkin saling berkorelasi. Dalam perhitungan sensitivitas kewajiban imbalan pasti atas asumsi aktuarial utama, metode yang sama (perhitungan nilai kini kewajiban imbalan pasti dengan menggunakan metode *projected unit credit* di akhir periode) telah diterapkan seperti dalam penghitungan kewajiban pensiun yang diakui dalam laporan posisi keuangan.

The sensitivity analysis are based on a change in an assumption while holding all other assumptions constant. In practice, this is unlikely to occur, and changes in some of the assumptions may be correlated. When calculating the sensitivity of the defined benefit obligation to significant actuarial assumptions the same method (present value of the defined benefit obligation calculated with the projected unit credit method at the end of the reporting period) has been applied as when calculating the pension liability recognised within the statement of financial position.

*These Financial Statements are originally
issued in Indonesian language*

Ekshibit F/38
Exhibit F/38

PT JAMINAN PEMBIAYAAN ASKRINDO SYARIAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2018
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT JAMINAN PEMBIAYAAN ASKRINDO SYARIAH
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2018
 (Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

21. MODAL SAHAM
21. SHARE CAPITAL

Pemegang Saham	2018 dan/ and 2017			Stockholders
	Jumlah Saham/ Number of Share	Persentase Kepemilikan/ Percentage of Ownership	Jumlah/ Total	
PT Asuransi Kredit Indonesia (Persero)	249.999	99,9996%	249.999.000.000	PT Asuransi Kredit Indonesia (Persero)
Yayasan Dana Kesejahteraan				Yayasan Dana Kesejahteraan
Karyawan Askrindo	1	0,0004%	1.000.000	Karyawan Askrindo
Jumlah	250.000	100,00%	250.000.000.000	Total

Manajemen Permodalan

Tujuan utama dari pengelolaan modal Perusahaan adalah untuk memastikan bahwa Perusahaan mempertahankan rasio modal yang sehat dalam rangka mendukung bisnis dan memaksimalkan nilai pemegang saham.

Sesuai dengan Pasal 31 ayat 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 2/POJK.05/2017 tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Penjaminan, Perusahaan penjaminan syariah dengan lingkup nasional diwajibkan memiliki modal sendiri (ekuitas) minimum sebesar Rp 100.000.000.000 (seratus miliar Rupiah) dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun setelah memperoleh izin usaha. Pada tanggal-tanggal 31 Desember 2018 dan 2017, Perusahaan telah memenuhi ketentuan tersebut.

Perusahaan mengelola struktur modal dan membuat penyesuaian terhadap struktur modal sehubungan dengan perubahan kondisi ekonomi.

Capital Management

The main objective of the Company's capital management is to ensure that the Company maintains a healthy capital ratio in order to support the business and maximize shareholder value.

In accordance with Article 31 paragraph 3 of the Financial Services Authority Regulation No. 2/POJK.05/2017 concerning the Implementation of Business Guarantee Institutions, sharia guarantee companies with a national scope are required to have their own minimum capital (equity) amounting to Rp 100,000,000,000 (one hundred billion Rupiah) within a maximum period of 3 (three) years after obtaining a business license. As of 31 December 2018 and 2017, the Company 34 has complied with these regulations.

The Company manages the capital structure and makes adjustments to the capital structure due to changes in economic conditions.

22. CADANGAN UMUM
22. GENERAL RESERVES

Berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tanggal 16 Mei 2018 dan 16 Juni 2017, para pemegang saham telah menyetujui pembagian laba tahun 2018 dan 2017 dengan membentuk cadangan umum masing-masing sebesar Rp 6.226.204.555 dan Rp 20.484.036.492 pada tanggal-tanggal 31 Desember 2018 dan 2017.

Based on the General Meeting of Shareholders' dated 16 May 2018 and 16 June 2017, the shareholders approved the distribution of profits in 2018 and 2017 by forming general reserves amounting to Rp 6,226,204,555 and Rp 20,484,036,492 as of 31 December 2018 and 2017.



*These Financial Statements are originally
issued in Indonesian language*

Ekshibit F/39

Exhibit F/39

**PT JAMINAN PEMBIAYAAN ASKRINDO SYARIAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2018
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT JAMINAN PEMBIAYAAN ASKRINDO SYARIAH
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2018
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

23. UJRAH KAFALAH BRUTO

	2018	2017
Konsumtif	51.241.763.330	51.257.710.569
Produktif	168.573.512.301	123.455.015.710
Surety	3.669.225.233	1.587.689.980
Jumlah	223.484.500.864	176.300.416.260

*Consumptive
Productive
Surety
Total*

24. BEBAN PENJAMINAN ULANG

	2018	2017
Konsumtif	15.725.621.078	13.558.553.933
Produktif	50.093.150.979	32.654.803.671
Surety	1.135.166.556	497.559.369
Jumlah	66.953.938.613	46.710.916.973

*Consumptive
Productive
Surety
Total*

25. BEBAN TA'WIDH

	2018	2017
Konsumtif	32.777.986.903	25.079.227.432
Produktif	94.212.115.596	70.334.737.277
Jumlah	126.990.102.499	95.413.964.709

*Consumptive
Productive
Total*

26. TA'WIDH REASURANSI

	2018	2017
Konsumtif	13.349.629.049	8.919.381.411
Produktif	33.097.132.116	22.861.948.020
Jumlah	46.446.761.165	31.781.329.431

*Consumptive
Productive
Total*

27. PENDAPATAN INVESTASI

	2018	2017
Bagi hasil deposito	11.031.089.793	10.783.209.950
Reksa dana	1.624.041.568	6.181.941.690
Jumlah	12.655.131.361	16.965.151.640

*Profit sharing time deposits
Mutual funds
Total*

*These Financial Statements are originally
issued in Indonesian language*

Ekshibit F/40

Exhibit F/40

**PT JAMINAN PEMBIAYAAN ASKRINDO SYARIAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2018
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT JAMINAN PEMBIAYAAN ASKRINDO SYARIAH
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2018
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

28. BEBAN USAHA

	2018	2017	
Pemasaran			Marketing
Promosi	5.883.598.062	3.525.621.831	Promotion
Lainnya	920.100.663	743.906.372	Others
Sub Jumlah	6.803.698.725	4.269.528.203	Sub Total
Umum dan administrasi			General and administrative
Gaji dan tunjangan karyawan	33.058.105.232	25.812.249.449	Salary and employee benefits
Beban kantor lainnya	22.339.498.994	17.487.130.818	Other office expenses
Penyusutan dan amortisasi	2.543.060.027	3.513.008.328	Depreciation and amortization
Imbalan kerja jangka panjang	1.084.055.468	1.005.790.693	Long-term employee benefits
Pengembangan dan pelatihan	393.424.403	243.048.999	Development and training
Pemeliharaan dan perbaikan	386.095.690	146.140.981	Maintenance and repair
Lain-lain	1.133.899	146.858.055	Others
Sub Jumlah	59.805.373.713	48.354.227.323	Sub Total
J u m l a h	66.609.072.438	52.623.755.526	T o t a l

29. PENDAPATAN (BEBAN) LAIN-LAIN

	2018	2017	
Jasa giro	222.964.983	149.189.035	Current account service
Administrasi bank	(46.349.825)	(54.377.549)	Bank administration
Pendapatan (beban) lainnya	(4.425.156.320)	657.244.507	Other income (expense)
J u m l a h	(4.248.541.162)	752.055.993	T o t a l



*These Financial Statements are originally
issued in Indonesian language*

Ekshibit F/41

Exhibit F/41

**PT JAMINAN PEMBIAYAAN ASKRINDO SYARIAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2018
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT JAMINAN PEMBIAYAAN ASKRINDO SYARIAH
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2018
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

30. SIFAT DAN TRANSAKSI PIHAK BERELASI

Berikut ini pihak-pihak yang berelasi:

- PT Asuransi Kredit Indonesia (Persero) dan Yayasan Dana Kesejahteraan Karyawan Askrindo merupakan pemegang saham Perusahaan.
- Perusahaan yang sebagian pemegang saham dan pengurus atau manajemennya sama dengan Perusahaan adalah PT Reasuransi Nasional Indonesia dan PT Askrindo Mitra Utama.

Rincian jumlah masing-masing pos aset, liabilitas, pendapatan kafalah dan beban kafalah yang berkaitan dengan pihak yang berelasi beserta persentasenya terhadap total aset, total liabilitas, total pendapatan kafalah dan total beban kafalah sebagai berikut:

Aset	2018	2017	Persentase terhadap jumlah aset/ liabilitas Percentage of total asset/ liabilities	
			2018	2017
Kas dan bank				
PT Bank Syariah Mandiri	1.962.488.490	1.559.333.328	0,49%	0,40%
PT Bank BRI Syariah	1.916.607.920	2.997.716.111	0,48%	0,77%
PT Bank BNI Syariah	879.985.981	643.909.126	0,22%	0,16%
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk				
Unit Syariah	153.768.937	58.174.225	0,04%	0,01%
Jumlah	4.912.851.328	5.259.132.790	1,22%	1,34%
Piutang ujah				
PT Bank Syariah Mandiri	2.378.709.175	1.502.557.649	0,59%	0,38%
PT Bank BRI Syariah	1.092.923.194	2.467.237.669	0,27%	0,63%
PT Permodalan Nasional Madani (Persero)	965.459.532	133.602.694	0,24%	0,03%
PT Bank BNI Syariah	944.972.345	248.246.603	0,24%	0,06%
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk -				
Unit Syariah	-	187.255.450	0,00%	0,05%
Kementerian Pertanian	-	131.077.113	0,00%	0,03%
Jumlah	5.382.064.246	4.669.977.178	1,34%	1,19%
Piutang ta'widh				
PT Reasuransi Syariah Indonesia	6.460.777.556	1.104.213.834	1,61%	0,28%
PT Asrinda Arthasangga	844.051.303	-	0,21%	0,00%
PT Asuransi Jiwa Bringin Jiwa Sejahtera	331.014.911	178.525.784	0,08%	0,05%
PT BNI Life Insurance	34.700.187	-	0,01%	0,00%
PT Asuransi Kredit Indonesia (Persero)	-	7.091.416.074	0,00%	1,81%
Jumlah	7.670.543.957	8.374.155.692	1,91%	2,14%
Piutang hasil investasi				
PT Bank Syariah Mandiri	91.947.691	45.064.899	0,02%	0,01%
PT Bank BNI Syariah	67.696.899	25.725.173	0,02%	0,01%
PT Bank BRI Syariah	56.163.193	29.193.337	0,01%	0,01%
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk				
Unit Syariah	2.236.274	13.391.781	0,00%	0,00%
Jumlah	218.044.057	113.375.190	0,05%	0,03%
Deposito berjangka mudharabah				
PT Bank Syariah Mandiri	94.351.439.088	89.700.000.000	23,52%	22,92%
PT Bank BNI Syariah	46.650.000.000	52.900.000.000	11,63%	13,52%
PT Bank BRI Syariah	47.650.000.000	45.000.000.000	11,88%	11,50%
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk				
Unit Syariah	1.250.000.000	10.500.000.000	0,31%	2,68%
Jumlah	189.901.439.088	198.100.000.000	47,33%	50,62%
Reksadana				
PT PNM Investment Management	70.796.670.934	70.084.943.750	17,64%	17,91%

30. NATURE AND TRANSACTION OF RELATED PARTIES

The details of related parties are as follows:

- PT Asuransi Kredit Indonesia (Persero) and Yayasan Dana Kesejahteraan Karyawan Askrindo are the Company's shareholders.
- Companies that partially shareholders and management or management are the same as the Company are PT Reasuransi Nasional Indonesia and PT Askrindo Mitra Utama.

The amount details of each assets, liabilities, kafalah income, and kafalah expense in the course of transactions with related parties and the its percentage to total asset, total liability, total kafalah income and total kafalah expense are as follows:

Assets
Cash on hand and in banks
PT Bank Syariah Mandiri
PT Bank BRI Syariah
PT Bank BNI Syariah
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
Sharia Unit
Total
Ujrah receivables
PT Bank Syariah Mandiri
PT Bank BRI Syariah
PT Permodalan Nasional Madani (Persero)
PT Bank BNI Syariah
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk -
Sharia Unit
Ministry of Agriculture
Total
Tawidh receivables
PT Reasuransi Syariah Indonesia
PT Asrinda Arthasangga
PT Asuransi Jiwa Bringin Jiwa Sejahtera
PT BNI Life Insurance
PT Asuransi Kredit Indonesia (Persero)
Total
Investment income receivables
PT Bank Syariah Mandiri
PT Bank BNI Syariah
PT Bank BRI Syariah
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
Sharia Unit
Total
Time deposits mudharabah
PT Bank Syariah Mandiri
PT Bank BNI Syariah
PT Bank BRI Syariah
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
Sharia Unit
Total
Mutual Fund
PT PNM Investment Management

These Financial Statements are originally issued in Indonesian language

Ekshibit F/42

Exhibit F/42

**PT JAMINAN PEMBIAYAAN ASKRINDO SYARIAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2018
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT JAMINAN PEMBIAYAAN ASKRINDO SYARIAH
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2018
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

30. SIFAT DAN TRANSAKSI PIHAK BERELASI (Lanjutan)

30. NATURE AND TRANSACTION OF RELATED PARTIES (Continued)

Rincian pihak-pihak berelasi sebagai berikut:

Details of related parties are as follows:

	2018	2017	Persentase terhadap jumlah aset/ liabilitas Percentage of total asset/ liabilities		
			2018	2017	
Liabilitas					Liabilities
Utang ta'widh					Ta'widh payables
PT Bank Syariah Mandiri	861.531.706	4.113.283.290	1,14%	5,10%	PT Bank Syariah Mandiri
PT Bank BRI Syariah	769.419.616	2.670.908.949	1,02%	3,31%	PT Bank BRI Syariah
PT Permodalan Nasional Madani (Persero)	65.331.000	49.820.550	0,09%	0,06%	PT Permodalan Nasional Madani (Persero)
PT Bank BNI Syariah	30.891.956	41.666.667	0,04%	0,05%	PT Bank BNI Syariah
Jumlah	1.727.174.278	6.875.679.456	2,28%	1,76%	
Utang penjaminan ulang					Re-guarantee payables
PT Asrinda Arthasangga	6.382.160.153	-	8,43%	0,00%	PT Asrinda Arthasangga
PT Reasuransi Nasional Indonesia - Unit Syariah	4.496.487.559	1.097.636.284	5,94%	1,36%	PT Reasuransi Nasional Indonesia - Sharia Unit
PT Asuransi Kredit Indonesia (Persero)	810.012.290	3.515.421.315	1,07%	4,36%	PT Asuransi Kredit Indonesia (Persero)
PT Asuransi Jiwa Bringin Jiwa Sejahtera	164.308.340	-	0,22%	0,00%	PT Asuransi Jiwa Bringin Jiwa Sejahtera
PT Asuransi Ekspor Indonesia (Persero)	20.115.000	20.115.000	0,03%	0,02%	PT Asuransi Ekspor Indonesia (Persero)
PT Reasuransi Syariah Indonesia	9.977.593	1.700.752.703	0,01%	2,11%	PT Reasuransi Syariah Indonesia
Jumlah	11.883.060.935	6.333.925.302	15,70%	7,85%	Total
	2018	2017	Persentase terhadap jumlah pendapatan/ beban Percentage of total revenue/ expenses		
			2018	2017	
Pendapatan					Revenue
Pendapatan Kafalah					Kafalah Income
PT Bank Syariah Mandiri	77.302.441.017	74.450.989.940	34,59%	42,23%	PT Bank Syariah Mandiri
PT Bank BRI Syariah	39.735.564.723	35.029.383.978	17,78%	19,87%	PT Bank BRI Syariah
PT Bank BNI Syariah	23.809.278.635	21.128.091.513	10,65%	11,98%	PT Bank BNI Syariah
PT Permodalan Nasional Madani (Persero)	35.217.466.180	13.263.530.076	15,76%	7,52%	PT Permodalan Nasional Madani (Persero)
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk					PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
Unit Syariah	218.799.623	303.324.030	0,10%	0,17%	Sharia Unit
Jumlah	176.283.550.178	144.175.319.537	78,88%	81,78%	Total
Pendapatan kafalah lain					Other kafalah income
PT Bank BNI Syariah	64.860.000	61.450.000	1,35%	44,53%	PT Bank BNI Syariah
PT Bank BRI Syariah	24.880.020	29.530.040	0,52%	21,40%	PT Bank BRI Syariah
PT Bank Syariah Mandiri	3.962.932.291	15.596.000	82,31%	11,30%	PT Bank Syariah Mandiri
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk					PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
Unit Syariah	640.000	560.000	0,01%	0,41%	Sharia Unit
Jumlah	4.053.312.311	107.136.040	84,19%	77,63%	Total

*These Financial Statements are originally
issued in Indonesian language*

Ekshibit F/43

Exhibit F/43

**PT JAMINAN PEMBIAYAAN ASKRINDO SYARIAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2018
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT JAMINAN PEMBIAYAAN ASKRINDO SYARIAH
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2018
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

30. SIFAT DAN TRANSAKSI PIHAK BERELASI (Lanjutan)

**30. NATURE AND TRANSACTION OF RELATED PARTIES
(Continued)**

Rincian pihak-pihak berelasi sebagai berikut:

Details of related parties are as follows:

Beban	2018		2017		Persentase terhadap jumlah pendapatan/ beban Percentage of total revenue/ expenses		Expenses
	2018	2017	2018	2017	2018	2017	
Beban ta'widh							Ta'widh expenses
PT Bank Syariah Mandiri	57.085.359.351	50.796.784.638	44,95%	53,24%			PT Bank Syariah Mandiri
PT Bank BRI Syariah	35.158.887.417	20.803.121.757	27,69%	21,80%			PT Bank BRI Syariah
PT Bank BNI Syariah	4.788.127.082	5.772.677.028	3,77%	6,05%			PT Bank BNI Syariah
PT Permodalan Nasional Madani (Persero)	8.665.565.364	4.519.943.203	6,82%	4,74%			PT Permodalan Nasional Madani (Persero)
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk							PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
Unit Syariah	-	5.035.022	0,00%	0,01%			Unit Syariah
Jumlah	105.697.939.214	81.897.561.648	83,23%	85,83%			Total
Beban penjaminan ulang							Reguarantee expenses
PT Asuransi Kredit Indonesia (Persero)	17.257.061.711	8.201.229.468	25,77%	17,56%			PT Asuransi Kredit Indonesia (Persero)
PT Reasuransi Nasional Indonesia - Unit Syariah	17.380.045.597	6.285.417.641	25,96%	13,46%			PT Reasuransi Nasional Indonesia - Unit Syariah
Jumlah	34.637.107.308	14.486.647.109	51,73%	31,01%			Total

31. ASET DAN LIABILITAS MONETER DALAM MATA UANG ASING

**31. FINANCIAL ASSETS AND LIABILITIES DENOMINATED
IN FOREIGN CURRENCIES**

Pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017, Perusahaan mempunyai aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing sebagai berikut:

*As of 31 December 2018 and 2017, the Company had
monetary assets and liabilities in foreign currencies
as follows:*

		2018		2017		
		Mata uang asing/ Foreign currencies	Ekuivalen Rupiah/ Equivalent Rupiah	Mata uang asing/ Foreign currencies	Ekuivalen Rupiah/ Equivalent Rupiah	
Aset moneter						Monetary assets
Kas dan bank	USD	18.275	264.643.750	18.275	247.592.951	Cash on hand and in banks

Kurs konversi yang digunakan Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing adalah 1 USD: Rp 14.481 dan Rp 13.548.

*The exchange rate as 31 December 2018 and
2017 are 1 USD: Rp 14,481 and Rp 13,548,
respectively.*

*These Financial Statements are originally
issued in Indonesian language*

Ekshibit F/44

Exhibit F/44

**PT JAMINAN PEMBIAYAAN ASKRINDO SYARIAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2018
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT JAMINAN PEMBIAYAAN ASKRINDO SYARIAH
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2018
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

32. ASET DAN LIABILITAS KEUANGAN

Ikhtisar instrumen keuangan yang dimiliki berdasarkan kategori, disajikan sebagai berikut:

32. FINANCIAL ASSETS AND LIABILITIES

A summary of the financial instruments held by category is provided below:

2018				
Tersedia untuk dijual/ Available-for-sale	Pinjaman yang diberikan dan piutang/ Loans and receivables	Liabilitas pada biaya perolehan diamortisasi/ Liabilities at amortized cost	Jumlah/ Total	
Aset Keuangan				Financial Assets
Kas dan bank	15.711.757.402	-	15.711.757.402	Cash on hand and in banks
Deposito berjangka mudharabah	279.051.439.088	-	279.051.439.088	Time deposits mudharabah
Reksadana	-	-	70.796.670.934	Mutual fund
Piutang ujah	6.750.855.864	-	6.750.855.864	Ujah receivables
Piutang ta'widh	7.988.726.802	-	7.988.726.802	Ta'widh receivables
Piutang hasil investasi	381.286.784	-	381.286.784	Investment income receivables
Jumlah	309.884.065.940	-	380.680.736.874	Total
Liabilitas Keuangan				Financial Liabilities
Utang ta'widh	-	1.733.582.361	1.733.582.361	Ta'widh payables
Utang penjaminan ulang	-	11.989.422.741	11.989.422.741	Re-guarantee payables
Utang pajak	-	5.932.043.551	5.932.043.551	Taxes payable
Biaya yang masih harus dibayar	-	2.846.872.467	2.846.872.467	Accrued expenses
Utang lain-lain	-	1.148.128.477	1.148.128.477	Other payables
Jumlah	-	23.650.049.597	23.650.049.597	Total
2017				
Tersedia untuk dijual/ Available-for-sale	Pinjaman yang diberikan dan piutang/ Loans and receivables	Liabilitas pada biaya perolehan diamortisasi/ Liabilities at amortized cost	Jumlah/ Total	
Aset Keuangan				Financial Assets
Kas dan bank	35.762.042.033	-	35.762.042.033	Cash on hand and in banks
Deposito berjangka mudharabah	248.800.000.000	-	248.800.000.000	Time deposits mudharabah
Reksadana	-	-	70.084.943.750	Mutual fund
Piutang ujah	5.913.042.609	-	5.913.042.609	Ujah receivables
Piutang ta'widh	8.379.785.803	-	8.379.785.803	Ta'widh receivables
Piutang hasil investasi	153.183.255	-	153.183.255	Investment income receivables
Jumlah	299.008.053.700	-	369.092.997.450	Total
Liabilitas Keuangan				Financial Liabilities
Utang ta'widh	-	8.318.944.590	8.318.944.590	Ta'widh payables
Utang penjaminan ulang	-	6.419.384.348	6.419.384.348	Re-guarantee payables
Utang pajak	-	473.594.157	473.594.157	Taxes payable
Biaya yang masih harus dibayar	-	1.434.168.447	1.434.168.447	Accrued expenses
Utang lain-lain	-	781.442.271	781.442.271	Other payables
Jumlah	-	17.427.533.813	17.427.533.813	Total

*These Financial Statements are originally
issued in Indonesian language*

Ekshibit F/45

Exhibit F/45

**PT JAMINAN PEMBIAYAAN ASKRINDO SYARIAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2018
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT JAMINAN PEMBIAYAAN ASKRINDO SYARIAH
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2018
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

33. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN

a. Risiko Keuangan

Perusahaan menampilkan rentang risiko keuangan melalui aset keuangan, liabilitas keuangan (investasi dan pinjaman), aset reasuransi dan liabilitas asuransi. Khususnya risiko keuangan kunci yang dalam jangka panjang hasil investasinya tidak menutupi jumlah kewajibannya yang timbul dari kontrak asuransi dan investasi. Komponen yang paling penting risiko keuangan adalah risiko mata uang dan risiko kredit.

Risiko ini muncul dari produk ekuitas dan mata uang, yang semuanya dinyatakan dalam pergerakan pasar umum dan khusus. Risiko utama yang dihadapi Perusahaan berkaitan dengan investasi dan kewajibannya adalah risiko harga ekuitas.

Analisa sensitivitas - risiko mata uang

Perusahaan memiliki kas di bank dalam mata uang lokal dan asing. Ujrah jangka pendek Perusahaan diinvestasikan dalam aset dengan denominasi mata uang yang sama seperti kewajibannya, untuk mengeliminasi risiko kurs mata uang. Risiko kurs mata uang timbul dari pengakuan aset dan kewajiban dengan denominasi mata uang selain Rupiah.

Pada tanggal 31 Desember 2018, jika IDR melemah/ menguat sebesar 10% terhadap USD dengan seluruh variabel lain konstan, laba sebelum pajak untuk tahun berjalan akan lebih tinggi/rendah sebesar Rp 26.464.375 terutama diakibatkan kerugian dari penjabaran kas dan bank. Dampak terhadap ekuitas sama dengan dampak terhadap laba setelah pajak tahun berjalan.

b. Risiko Kredit

Perusahaan mempunyai exposure risiko kredit, yaitu risiko ketidakmampuan debitur membayar utangnya pada saat jatuh tempo. Area kunci dimana Perusahaan memiliki risiko kredit adalah:

- Bagian reasuradur atas kewajibannya;
- Jumlah yang menjadi kewajiban reasuradur dalam hal *ta'widh* yang sudah dibayar;

33. MANAGEMENT OF FINANCIAL RISK

a. Financial Risk

The Company is exposed to a range of financial risks through its financial assets, financial liabilities (investment contracts and borrowings), reinsurance assets and insurance liabilities. In particular, the key financial risk is that the in the long-term its investment proceeds are not sufficient to fund the obligations arising from its insurance and investment contracts. The most important components of this financial risk are foreign currency risk and credit risk.

These risks arise from open positions in currency and equity products, all of which are exposed to general and specific market movements. The risks that the Company primarily faces due to the nature of its investments and liabilities is equity price risk.

Sensitivity analysis - currency risk

The Company underwrites short-term insurance contracts in local and foreign currencies. The Company's ujah are invested in assets denominated in the same currencies as their insurance liabilities, which eliminates the foreign currency exchange rate risk for these operations. Foreign exchange risk arises from recognised assets and liabilities that are denominated in currencies other than Rupiahs

As of 31 December 2018, if IDR had weakened/ strengthened by 10% against USD with all other variables held constant, pre-tax profit for the year would have been increase/decrease Rp 26,464,375 mainly as a result of foreign exchange losses on the translation of cash and banks. The impact on equity would have been the same as the impact on post-tax profit for the year.

b. Credit Risk

The Company has exposure to credit risk, which is the risk that a counterparty will be unable to pay amounts in full when due. Key areas where the Company is exposed to credit risk are:

- *Reinsurers' share of liabilities;*
- *Amounts due from reinsurers in respect of ta'widh already paid;*

*These Financial Statements are originally
issued in Indonesian language*

Ekshibit F/46

Exhibit F/46

**PT JAMINAN PEMBIAYAAN ASKRINDO SYARIAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2018
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT JAMINAN PEMBIAYAAN ASKRINDO SYARIAH
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2018
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

33. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (Lanjutan)

33. MANAGEMENT OF FINANCIAL RISK (Continued)

b. Risiko Kredit (Lanjutan)

b. Credit Risk (Continued)

Perusahaan menyusun struktur tingkat risiko kredit yang dapat diterima dengan menentukan limit atas eksposurnya masing-masing debitur, atau Perusahaan debitur, dan terhadap segmen geografis dan industri. Suatu risiko tergantung pada review tahunan atau lebih.

The Company structures the levels of credit risk it accepts by placing limits on its exposure to a single counterparty, or the Company's of counterparties, and to geographical and industry segments. Such risks are subject to an annual or more frequent review.

Reasuransi digunakan untuk mengelola risiko penjaminan. Namun demikian bukan untuk membebaskan kewajiban Perusahaan sebagai penanggung utama. Jika reasuradur gagal untuk membayar *ta'widh* karena suatu alasan, Perusahaan tetap berkewajiban untuk membayar kepada pemegang polis. Kesehatan reasuradur dipertimbangkan atas dasar tahunan dengan mereview kesehatan keuangan sebelum meminta dukungan reasuransi.

Reinsurance is used to manage reguarantee risk. This does not, however, discharge the Company's liability as primary insurer. If a reinsurer fails to pay a ta'widh for any reason, the Company remains liable for the payment to the policyholder. The creditworthiness of reinsurers is considered on an annual basis by reviewing their financial strength prior to finalisation of any contract.

Manajemen yakin terhadap kemampuan untuk mengendalikan dan menjaga eksposur risiko kredit pada tingkat yang minimal. Eksposur maksimum risiko kredit pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Management is confident in its ability to control and sustain minimal exposure of credit risk. The maximum credit risk exposure at the reporting date is as follows:

2018					
	Belum jatuh tempo atau tidak mengalami penurunan nilai/ <i>Neither past due nor impaired</i>	Telah jatuh tempo tetapi tidak mengalami penurunan nilai/ <i>Past due but nor impaired</i>	Mengalami penurunan nilai/ <i>impaired</i>	Jumlah/ <i>Total</i>	
Aset Keuangan					Financial assets
Kas dan bank	15.711.757.402	-	-	15.711.757.402	Cash on hand and in banks
Deposito berjangka mudharabah	279.051.439.088	-	-	279.051.439.088	Time deposits mudharabah
Reksadana	70.796.670.934	-	-	70.796.670.934	Mutual fund
Piutang ujarah	-	6.750.855.864	-	6.750.855.864	Ujarah receivables
Piutang ta'widh	7.988.726.802	-	-	7.988.726.802	Ta'widh receivables
Piutang hasil investasi	381.286.784	-	-	381.286.784	Investment income receivables
Jumlah	373.929.881.010	6.750.855.864	-	380.680.736.874	Total

*These Financial Statements are originally
issued in Indonesian language*

Ekshibit F/47

Exhibit F/47

**PT JAMINAN PEMBIAYAAN ASKRINDO SYARIAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2018
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT JAMINAN PEMBIAYAAN ASKRINDO SYARIAH
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2018
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

33. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (Lanjutan)

33. MANAGEMENT OF FINANCIAL RISK (Continued)

b. Risiko Kredit (Lanjutan)

b. Credit Risk (Continued)

2017				
Belum jatuh tempo atau tidak mengalami penurunan nilai/ <i>Neither past due nor impaired</i>	Telah jatuh tempo tetapi tidak mengalami penurunan nilai/ <i>Past due but nor impaired</i>	Mengalami penurunan nilai/ <i>impaired</i>	Jumlah/ <i>Total</i>	
Aset Keuangan				Financial assets
Kas dan bank	35.762.042.033	-	35.762.042.033	Cash on hand and in banks
Deposito berjangka mudharabah	248.800.000.000	-	248.800.000.000	Time deposits mudharabah
Reksadana	70.084.943.750	-	70.084.943.750	Mutual fund
Piutang ujarah	-	5.913.042.609	5.913.042.609	Ujrah receivables
Piutang ta'widh	8.379.785.803	-	8.379.785.803	Ta'widh receivables
Piutang hasil investasi	153.183.255	-	153.183.255	Investment income receivables
Jumlah	363.179.954.841	5.913.042.609	369.092.997.450	Total

c. Risiko Likuiditas

c. Liquidity Risk

Risiko likuiditas adalah risiko bahwa Perusahaan tidak dapat memenuhi semua kewajibannya pada saat jatuh tempo seperti pembayaran *ta'widh*, dana komitmen kontraktual, atau arus kas keluar lainnya. Suatu arus keluar mengurangi sumber kas untuk aktivitas operasional, perdagangan dan investasi. Keadaan yang ekstrem, kekurangan likuiditas dapat mengakibatkan penurunan laporan posisi keuangan dan penjualan aset atau potensi ketidakmampuan dalam memenuhi komitmen dengan pemegang polis. Risiko Perusahaan tidak akan dapat melaksanakan kewajibannya adalah inheren dalam semua operasional asuransi dan dapat dipengaruhi oleh skala khusus institusi dan kejadian di industri meliputi, tetapi tidak terbatas pada, peristiwa kredit, kegiatan merger dan akuisisi, kejutan sistemik dan bencana alam.

Monitoring dan pelaporan yang dilakukan dalam bentuk pengukuran dan proyeksi arus kas untuk beberapa hari, minggu dan bulan kedepan, karena ini periode penting dalam mengelola likuiditas. Titik awal untuk proyeksi ini adalah analisa jatuh tempo kontrak dari liabilitas keuangan dan tanggal penerimaan aset keuangan yang diharapkan.

Risiko likuiditas adalah risiko bahwa Perusahaan tidak dapat memenuhi semua kewajibannya pada saat jatuh tempo seperti pembayaran *ta'widh*, dana komitmen kontraktual, atau arus kas keluar lainnya.

Liquidity risk is the risk that the Company is unable to meet its obligations when they fall due as a result of policyholder benefit payments, cash requirements from contractual commitments, or other cash outflows. Such outflows would deplete available cash resources for operational, trading and investments activities. In extreme circumstances, lack of liquidity could result in reductions in the statements of financial position and sales of assets, or potentially an inability to fulfill policyholder commitments. The risk that the Company will be unable to do so is inherent in all insurance operations and can be affected by a range of institution-specific and market-wide events including, but not limited to, credit events, merger and acquisition activity, systemic shocks and natural disasters.

Monitoring and reporting take the form of cash flow measurement and projections for the next day, week and month respectively, as these are key periods for liquidity management. The starting point for those projections is an analysis of the contractual maturity of the financial liabilities and the expected collection date of the financial assets.

Liquidity risk is the risk that the Company is unable to meet its obligations when they fall due as a result of policyholder benefit payments, cash requirements from contractual commitments, or other cash outflows.

These Financial Statements are originally issued in Indonesian language

Ekshibit F/48

Exhibit F/48

**PT JAMINAN PEMBIAYAAN ASKRINDO SYARIAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2018
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT JAMINAN PEMBIAYAAN ASKRINDO SYARIAH
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2018
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

32. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (Lanjutan)

32. MANAGEMENT OF FINANCIAL RISK (Continued)

c. Risiko Likuiditas (Lanjutan)

c. Liquidity Risk (Continued)

2018							
Jatuh tempo							
	<= 1 tahun	1 - 2 tahun	Jumlah				
Aset				Assets			
Kas dan bank	15.711.757.402	-	15.711.757.402	Cash on hand and in banks			
Deposito berjangka mudharabah	279.051.439.088	-	279.051.439.088	Time deposits mudharabah			
Reksadana	-	70.796.670.934	70.796.670.934	Mutual fund			
Piutang ujjrah	6.750.855.864	-	6.750.855.864	Ujjrah receivables			
Piutang ta'widh	7.988.726.802	-	7.988.726.802	Ta'widh receivables			
Piutang hasil investasi	381.286.784	-	381.286.784	Investment income receivables			
J u m l a h	309.884.065.940	70.796.670.934	380.680.736.874	T o t a l			
Liabilitas				Liabilities			
Utang ta'widh	1.733.582.361	-	1.733.582.361	Ta'widh payables			
Utang penjaminan ulang	11.989.422.741	-	11.989.422.741	Re-guarantee payables			
Utang pajak	5.932.043.551	-	5.932.043.551	Taxes payable			
Biaya yang masih harus dibayar	2.846.872.467	-	2.846.872.467	Accrued expenses			
Utang lain-lain	1.148.128.477	-	1.148.128.477	Other payables			
J u m l a h	23.650.049.597	-	23.650.049.597	T o t a l			
2017							
Jatuh tempo							
	<= 1 tahun	1 - 2 tahun	Jumlah				
Aset				Assets			
Kas dan bank	35.762.042.033	-	35.762.042.033	Cash on hand and in banks			
Deposito berjangka mudharabah	248.800.000.000	-	248.800.000.000	Time deposits mudharabah			
Reksadana	-	70.084.943.750	70.084.943.750	Mutual fund			
Piutang ujjrah	5.913.042.609	-	5.913.042.609	Ujjrah receivables			
Piutang ta'widh	8.379.785.803	-	8.379.785.803	Ta'widh receivables			
Piutang hasil investasi	153.183.255	-	153.183.255	Investment income receivables			
J u m l a h	299.008.053.700	70.084.943.750	369.092.997.450	T o t a l			
Liabilitas				Liabilities			
Utang ta'widh	8.318.944.590	-	8.318.944.590	Ta'widh payables			
Utang penjaminan ulang	6.419.384.348	-	6.419.384.348	Re-guarantee payables			
Utang pajak	473.594.157	-	473.594.157	Taxes payable			
Biaya yang masih harus dibayar	1.434.168.447	-	1.434.168.447	Accrued expenses			
Utang lain-lain	781.442.271	-	781.442.271	Other payables			
J u m l a h	17.427.533.813	-	17.427.533.813	T o t a l			

34. TANGGUNG JAWAB ATAS PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

34. RESPONSIBILITY OF THE FINANCIAL STATEMENTS PREPARATION

Laporan keuangan ini telah selesai dan diotorisasi untuk diterbitkan oleh Direksi dan Perusahaan pada tanggal 25 Februari 2019.

These financial statements have been completed and authorized for issue by the Director of the Company on 25 February 2019.



No. : MC-01.3712/2019
Fax : MC-01.3712/2019
www.bdo.com

Perusahaan Jaminan Pembiayaan Syariah & Rekan
Certified Public Accountants
Kediri No. 422/KD-11/2019

Praktikantor: Jember, 27 Mei 2019
Jalan Jember, Jember, Jawa Timur
66111-12012 - Indonesia

This report is originally issued in Indonesian language.

No. : 00161/2.1068/AD-4/D.9/0117-1/11/2019
Hal : Laporan Keuangan 31 Desember 2018

No. : 00161/2.1068/AD-4/D.9/0117-1/11/2019
Re : Financial Statements 31 December 2018

Laporan Auditor Independen

Independent Auditors' Report

Pemegang Saham, Dewan Komisaris
dan Direksi
PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah
Jember

The Stockholders, Board of Commissioners
and Directors
PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah
Jember

Kami telah mengaudit laporan keuangan PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah ("Perusahaan"), yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2018, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan laporan sumber dan penyaluran dana zakat dan subsektor, kewajiban akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

We have audited the accompanying financial statements of PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah (the "Company"), which comprise the statement of financial position as of 31 December 2018, and the statements of profit or loss and other comprehensive income, changes in equity, and statements of cash flows, and statement of sources and distribution of zakat fund and a summary of significant accounting policies and other explanatory information.

Tanggung jawab manajemen atas laporan keuangan

Management's responsibility for the financial statements

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Management is responsible for the preparation and fair presentation of such financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Tanggung jawab auditor

Auditors' responsibility

Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan tersebut berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan tersebut bebas dari kesalahan penyajian material.

Our responsibility is to express an opinion on such financial statements based on our audit. We conducted our audit in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. Those standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether such financial statements are free from material misstatement.

Sebuah audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan entitas untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifan pengendalian internal entitas. Suatu audit juga mencakup pengujian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi manajemen yang dibuat oleh manajemen, serta pengungkapan atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the financial statements. The procedures selected depend on the auditor's judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditor considers internal control relevant to the entity's preparation and fair presentation of the financial statements in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the entity's internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of the financial statements.

TANUBRATA SUTANTO FAHMI BAMBANG & REKAN

Praktikantor: Jember, 27 Mei 2019
Jalan Jember, Jember, Jawa Timur
66111-12012 - Indonesia

Halaman 2

Page 2

Tanggung jawab auditor (Lanjutan)

Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk mendukung suatu basis bagi opini audit kami.

Opini

Menurut opini kami, laporan keuangan (selanjutnya menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material), posisi keuangan PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah tanggal 31 Desember 2018 serta kinerja keuangan dan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Materi lain

Laporan keuangan PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah tanggal 31 Desember 2017 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, telah diaudit oleh auditor independen lain dalam laporannya tertanggal 28 Februari 2018 yang menyatakan opini tanpa modifikasi atas laporan keuangan tersebut.

Auditors' responsibility (Continued)

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion.

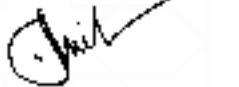
Opinion

In our opinion, the accompanying financial statements present fairly, in all material respects, the financial position of PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah as of 31 December 2018 and their financial performance and cash flows for the year then ended, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

Other matters

Financial statements of PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah as of 31 December 2017 and for the year then ended, were audited by other independent auditors whose report dated 28 February 2018, expressed unmodified opinion on such financial statements.

Kantor Akuntan Publik
TANUBRATA SUTANTO JAMBU BAMBANG & PRTN



Eriswita Sutanto Broto, ST, Ak. M. Ak. CPA, CA
SIAP AP 01172
License No. AP 0517

25 Februari 2019/25 February 2019
AT:P



PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah

Gedung Primagraha Persada
Jl. Gedung Kesenian No. 3-7, Sawah Besar
Jakarta Pusat – DKI Jakarta 10710
Phone : +62 21 351 7525
Website : www.askrindosyariah.co.id